Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RKPD DIY

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

jogja istimewa

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2022-2027.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat daerah sebgai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

7. Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2022 - 2027.
(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dalam periode 1 (satu) tahun.
(3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2024 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB 1 : PENDAHULUAN
    b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
    c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
    d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
    e. BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA

f. BAB 6 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

g. BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

h. BAB 8 : PENUTUP

(2) Rincian uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2024 menjadi:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. dasar penyusunan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

URAIAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1-5

1.3 Hubungan Antar Dokumen 1-9

1.4 Maksud dan Tujuan 1-10

1.5 Sistematika Dokumen RKPD 1-10

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **2-1**

2.1 Kondisi Umum Daerah 2-2

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-45

2.3 Aspek Pelayanan Umum 2-97

2.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPD DIY Sampai Dengan Tahun Berkenaan 2-322

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah 2-347

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **3-2**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3-2

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3-15

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **4-1**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4-1

4.2 Perumusan Tema Pembangunan 4-5

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2024 4-19
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4-21
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 5-1
5.1 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Se-DIY 5-1
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan 5-5
BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 6-1
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 6-1
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 6-2
DINAS KESEHATAN 6-64
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 6-84
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 6-132
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6-149
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6-162
DINAS SOSIAL 6-170
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6-170
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 6-225
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 6-244
DINAS PERHUBUNGAN 6-271
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6-288
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 6-297
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6-326
DINAS KEBUDAYAAN 6-326
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 6-343
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6-356
DINAS PARIWISATA 6-376

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 6-386
SEKRETARIAT DPRD 6-521
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6-536
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 6-552
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6-589
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6-597
BADAN PENGHUBUNG DAERAH 6-605
INSPEKTORAT 6-611
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6-620
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7-1
7.1 Indikator Kinerja Utama 7-2
7.2 Indikator Kinerja Daerah 7-3
BAB 8 PENUTUP 8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY 1-5
Tabel 1-2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah 1-9
Tabel 2-1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota 2-5
Tabel 2-2 Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota 2-6
Tabel 2-3 Potensi Ketersediaan Air (juta m^3) 2-18
Tabel 2-4 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2021 (m^3/detik) 2-19
Tabel 2-5 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS 2-19
Tabel 2-6 Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan 2-20
Tabel 2-7 Penggunaan lahan di DIY Tahun 2022 2-23
Tabel 2-8 Peruntukan lahan di DIY Sesuai Perda No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2-30
Tabel 2-9 Kawasan Rawan Bencana di Wilayah DIY Tahun 2018 - 2022 2-36
Tabel 2-10 Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2021 2-37
Tabel 2-11 Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2018-2022 2-39
Tabel 2-12 Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2017 – 2021 2-39
Tabel 2-13 Korban Bencana DIY Tahun 2018 – 2022 2-40
Tabel 2-14 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2018 – 2022 2-40
Tabel 2-15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 - 2021 2-43
Tabel 2-16 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2-44
Tabel 2-17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2022 (%) 2-46

Tabel 2-18 Penanggulangan Kemiskinan di 15 Kapanewonan DIY .. 2-49
Tabel 2-19 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 – 2022 (September 2017- September 2022) 2-52
Tabel 2-20 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2022 (%) 2-53
Tabel 2-21 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022 (Juta Rp) 2-57
Tabel 2-22 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021 2-58
Tabel 2-23 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022 2-59
Tabel 2-24 Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2017-2022 2-59
Tabel 2-25 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021 (juta Rupiah) 2-63
Tabel 2-26 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun 2017-2021 2-64
Tabel 2-27 Laju Inflasi DIY Tahun 2017-2022 2-64
Tabel 2-28 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2019 2-67
Tabel 2-29 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2022 .. 2-67
Tabel 2-30 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2017-2021 2-92
Tabel 2-31 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-2021 2-93
Tabel 2-32 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021 2-94
Tabel 2-33 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021 2-95
Tabel 2-34 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021 2-97
Tabel 2-35 Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Tahun 2022 2-102

Tabel 2-36 Jumlah Dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY....2-106
Tabel 2-37 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY....2-106
Tabel 2-38 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun 2018-2022....2-107
Tabel 2-39 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021....2-109
Tabel 2-40 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompentensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021....2-110
Tabel 2-41 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021....2-111
Tabel 2-42 Jumlah Kasus HIV 2017-2021....2-115
Tabel 2-43 Jumlah Kasus AIDS 2017-2021....2-115
Tabel 2-44 Prasarana Irigasi....2-117
Tabel 2-45 Data Akses Air Minum Tahun 2022....2-118
Tabel 2-46 Akses Sanitasi di DIY Tahun 2022....2-119
Tabel 2-47 Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah di DIY....2-120
Tabel 2-48 Potensi Timbulan Sampah Wilayah Kartamantul Tahun 2021 Menurut *Masterplan*....2-121
Tabel 2-49 Data Timbulan Sampah Tahun 2022....2-122
Tabel 2-50 Angka Timbulan Sampah Terpilih yang Menjadi Acuan Analisis Pengembangan Hulu....2-123
Tabel 2-51 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2018-2022....2-125
Tabel 2-52 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2018-2022....2-129
Tabel 2-53 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2022 .2-130
Tabel 2-54 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada 18 SRS Tahun 2022....2-133
Tabel 2-55 Penanganan RTLH 2018-2022....2-135
Tabel 2-56 Penanganan PSU Tahun 2018-2022....2-136
Tabel 2-57 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK Kabupaten/Kota 2016) dan Progres Penanganan....2-136
Tabel 2-58 Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha)....2-137

Tabel 2-59 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2018-2022 2-143
Tabel 2-60 Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018-2021 2-145
Tabel 2-61 Perbandingan Indeks Risiko IRBI DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2021 2-145
Tabel 2-62 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY . 2-146
Tabel 2-63 Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dan Rata-Rata Nasional Tahun 2019 2-146
Tabel 2-64 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun 2-147
Tabel 2-65 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) /Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun 2018-2022 2-148
Tabel 2-66 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2018-2022 2-150
Tabel 2-67 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017-2023 2-150
Tabel 2-68 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (ribu orang), Tahun 2018–2022 2-152
Tabel 2-69 Capaian IPG DIY Tahun 2018-2022 2-156
Tabel 2-70 Capaian IDG DIY Tahun 2018-2022 2-157
Tabel 2-71 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi Tahun 2017-2022 2-158
Tabel 2-72 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021 Menurut Jenis Kelamin 2-161
Tabel 2-73 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin 2-162
Tabel 2-74 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2020-2021 2-164
Tabel 2-75 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 2018–2022 (Rupiah) 2-167
Tabel 2-76 Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 – 2022 2-169
Tabel 2-77 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2018-2022 2-172
Tabel 2-78 Capaian bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 2-178

Tabel 2-79 Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 2-179
Tabel 2-80 Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY 2-179
Tabel 2-81 Inventarisasi Tanah Enclave di DIY 2-180
Tabel 2-82 Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2022 2-181
Tabel 2-83 Rekapitulasi Triwulan III 2020 PKAM DIY Kualitas Air Sumur dan Minum 2021 2-183
Tabel 2-84 Indeks Kualitas Udara (IKU) DIY Tahun 2022 2-184
Tabel 2-85 Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan 2-185
Tabel 2-86 Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2022 2-186
Tabel 2-87 Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2022 (Orang) 2-188
Tabel 2-88 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY ... 2-189
Tabel 2-89 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2022 2-189
Tabel 2-90 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2022 2-191
Tabel 2-91 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2-191
Tabel 2-92 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021 2-192
Tabel 2-93 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2023 . 2-193
Tabel 2-94 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa 2-194
Tabel 2-95 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat 2-194
Tabel 2-96 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2015-2035 . 2-197
Tabel 2-97 Rasio Akseptor KB Tahun 2018 s.d. 2023 2-199
Tabel 2-98 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021 2-200
Tabel 2-99 Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2022 2-201
Tabel 2-100 Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2019 dan 2020 2-201
Tabel 2-101 Perkembangan *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2022 2-202

Tabel 2-102 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2022 2-203
Tabel 2-103 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2022 2-203
Tabel 2-104 Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2018-2022 2-204
Tabel 2-105 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022 2-205
Tabel 2-106 Jumlah Pergerakan, Bangkitan dan Tarikan di DIY... 2-206
Tabel 2-107 Tabel Derajat Kejenuhan di Jalan Perkotaan Tahun 2019 dan 2021 2-210
Tabel 2-108 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017 s.d. 2022 2-212
Tabel 2-109 Trayek AKDP yang terlayani di DIY 2-213
Tabel 2-110 Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2018-2022 2-214
Tabel 2-111 Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Berdasarkan Hasil Survei 2-215
Tabel 2-112 Jumlah Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2022 2-215
Tabel 2-113 Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM Panjang Ruas Jalan 2-216
Tabel 2-114 Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY 2-217
Tabel 2-115 Rekapitulasi jumlah ATCS di DIY 2-218
Tabel 2-116 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY..... 2-221
Tabel 2-117 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018 2-222
Tabel 2-118 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019 2-223
Tabel 2-119 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020 2-224
Tabel 2-120 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021 2-225
Tabel 2-121 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022 2-225
Tabel 2-122 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2022 2-227
Tabel 2-123 Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020-2022..... 2-228
Tabel 2-124 Perkembangan KUR, 2018-2022 2-230
Tabel 2-125 Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah) 2-231

Tabel 2-126 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga dan Sarana Olahraga di DIY 2-234
Tabel 2-127 Perbandingan Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata dengan Seluruh Elemen Data 2-236
Tabel 2-128 Penyediaan Data Statistik Tahun 2022 2-238
Tabel 2-129 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi Milik Pemda DIY 2-241
Tabel 2-130 Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2018-2022 2-243
Tabel 2-131 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2017-2021 2-245
Tabel 2-132 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2021 2-248
Tabel 2-133 Jumlah Museum per Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021 2-249
Tabel 2-134 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2018-2021 2-249
Tabel 2-135 Kalurahan/Kelurahan Budaya di DIY per Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 351/Kep/2021 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya 2-250
Tabel 2-136 Jumlah Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) 2-251
Tabel 2-137 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Tahun 2018 s.d Tahun 2021 2-253
Tabel 2-138 Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2018 s.d. 2022 2-253
Tabel 2-139 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018-2023 2-254
Tabel 2-140 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah 2-254
Tabel 2-141 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2022 2-257
Tabel 2-142 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2018-2022 (Hari) 2-259
Tabel 2-143 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2018-2022 (ton) 2-262
Tabel 2-144 Populasi Ternak di DIY Tahun 2018-2022 (ekor) 2-263
Tabel 2-145 Luas Hutan di DIY berdasarkan fungsi (Ha) 2-264
Tabel 2-146 Hasil Hutan di DIY Tahun 2018-2022 2-266
Tabel 2-147 Luas Lahan Kritis di DIY (Ha) 2-267

Tabel 2-148 Data Usulan Bantuan Listrik Untuk Rumah Tangga Belum Berlistrik Atau Masih Menyalur 2-268
Tabel 2-149 Rumah Tangga Miskin Yang Belum Berlistrik Sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Jauh dari Jaringan Listrik PLN 2-268
Tabel 2-150 Jumlah Sambungan Rumah Untuk Listrik Sesuai Standar Keselamatan Tahun 2018 – 2022 2-269
Tabel 2-151 Capaian Bauran Energi di DIY Tahun 2021 2-270
Tabel 2-152 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2018-2022 2-271
Tabel 2-153 Rerata Penurunan Muka Air Tanah Di DIY tahun 2018 – 2022 2-273
Tabel 2-154 Luas Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan 2-275
Tabel 2-155 Nilai Ekspor Impor DIY Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS) 2-276
Tabel 2-156 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2018-2021 2-277
Tabel 2-157 Perkembangan Margin Perdagangan dan Pengangkutan di DIY (%), Tahun 2018-2021 2-278
Tabel 2-158 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2018-2022 2-278
Tabel 2-159 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2018-2022 2-281
Tabel 2-160 Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2018-2022 2-285
Tabel 2-161 Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran di DIY Tahun 2018-2022 2-285
Tabel 2-162 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2017-2022 ... 2-286
Tabel 2-163 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY 2-287
Tabel 2-164 Survei Kepuasan Masyarakat 2016-2022 2-288
Tabel 2-165 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan pada Tahun 2017-2021 2-289
Tabel 2-166 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021 2-295
Tabel 2-167 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2021 2-297
Tabel 2-168 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2021 2-298
Tabel 2-169 Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024 2-298

Tabel 2-170 Capaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Daerah, 2020-2022 2-300
Tabel 2-171 Temuan, Rekomendasi, dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2017-2022 2-304
Tabel 2-172 Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022 2-311
Tabel 2-173 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di DI Yogyakarta Tahun 2018-2022 2-317
Tabel 2-174 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan DIY Tahun 2018-2022 (dalam persen) 2-317
Tabel 2-175 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS) 2-318
Tabel 2-176 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2022 2-319
Tabel 2-177 Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2022 2-319
Tabel 2-178 Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2022 2-320
Tabel 2-179 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2018-2022 2-321
Tabel 2-180 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2022 2-322
Tabel 2-181 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2018-2022 2-322
Tabel 2-182 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2022 2-324
Tabel 2-183 Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2018-2022 2-326
Tabel 2-184 Capaian Sasaran OPD Tahun 2022 2-329
Tabel 2-185 Realisasi fisik sub kegiatan yang tidak mencapai 100 persen 2-340
Tabel 2-186 Laporan Rekapitulasi Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun 2022 2-342
Tabel 2-187 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%) 2-349

Tabel 2-188 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2016 – 2021. .. 2-386
Tabel 2-189 Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2016 – 2022 2-388
Tabel 2-190 Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif 2-400
Tabel 2-191 Status IDM Tahun 2022 Menurut Kalurahan di DIY. 2-414
Tabel 2-192 Jumlah BUMDes/BUMKal DIY 2-417
Tabel 2-193 Data BUMKal di DIY Menurut Kategori Tahun 2022 2-418
Tabel 2-194 Perkembangan *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 2-421
Tabel 2-195 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 2-422
Tabel 2-196 Jumlah Gugatan Perceraian di DIY Tahun 2020- 2021.... 2-423
Tabel 2-197 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan di DIY Tahun 2020 dan 2021 2-424
Tabel 2-198 Prioritas Penanganan Ruas Jalan Berdasarkan Peringkat Kinerja terburuk 2-427
Tabel 2-199 Trayek AKDP yang terlayani di DIY 2-429
Tabel 2-200 Data Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2016 – 20212-431
Tabel 2-201 Target Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2021-2040 2-432
Tabel 2-202 Perbandingan antara Target Rencana Umum Nasional Keselamatan dengan Indeks Fatalitas Riil di DIY..... 2-433
Tabel 2-203 Keikutsertaan dan Capaian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2-460
Tabel 3-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018 - 2022 3-6
Tabel 3-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2018 - 2022 3-6
Tabel 3-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2018 - 2022 ..3-10
Tabel 3-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2018 - 2022 (September) ..3-10
Tabel 3-5 Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2024 3-12
Tabel 3-6 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 3-24

Tabel 4-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 4-4
Tabel 4-2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2022-2027 4-9
Tabel 4-3 13 Highlight Major Project yang dilakukan dalam RKP Tahun 2024 4-16
Tabel 4-4 16 *Highlight* Proyek Prioritas Strategis*/Major Project* yang dilanjutkan dalam RKP Tahun 2024 4-17
Tabel 4-5 Tabel Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024... 4-18
Tabel 4-6 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027 4-19
Tabel 4-7 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah 4-20
Tabel 5-1 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta, Tahun 2024 5-1
Tabel 5-2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul, Tahun 2024 5-2
Tabel 5-3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024 5-3
Tabel 5-4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2024 5-4
Tabel 5-5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman, Tahun 2024 5-5
Tabel 6-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatifnya Tahun 2024 6-1
Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta 7-2
Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah DIY Tahun 2024 . 7-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Peta Administrasi DIY 2-4
Gambar 2-2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY 2-7
Gambar 2-3 Peta Kemiringan Lereng DIY 2-9
Gambar 2-4 Peta Curah Hujan DIY 2-10
Gambar 2-5 Peta Geologi DIY 2-13
Gambar 2-6 Peta Jenis Tanah DIY 2-14
Gambar 2-7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY 2-17
Gambar 2-8 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS 2-21
Gambar 2-9 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS 2-22
Gambar 2-10 Peta Penggunaan Lahan DIY 2-23
Gambar 2-11 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019 .. 2-29
Gambar 2-12 Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 – 2039 .. 2-33
Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana DIY 2-36
Gambar 2-14 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota 2-41
Gambar 2-15 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia 2-42
Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk DIY 2-44
Gambar 2-17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015–Maret 2022 2-46
Gambar 2-18 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di DIY Maret 2013 – September 2022 ... 2-47
Gambar 2-19 Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem 2021-2024 2-48
Gambar 2-20 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022 (Maret 2017-September 2022) .. 2-56

Gambar 2-21 Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2017-2022 2-61
Gambar 2-22 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 – Maret 2022 2-62
Gambar 2-23 Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – Maret 2022..... 2-63
Gambar 2-24 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2022..... 2-66
Gambar 2-25 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2022 2-72
Gambar 2-26 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022 2-73
Gambar 2-27 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun) .. 2-75
Gambar 2-28 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun) . 2-76
Gambar 2-29 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2018-2022 (Tahun) 2-78
Gambar 2-30 Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2022 (Tahun)..... 2-79
Gambar 2-31 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang DIY Tahun 2018 s.d 2022..... 2-80
Gambar 2-32 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein (KEP) di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021 (Persen) 2-81
Gambar 2-33 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2018-2022 (Balita) 2-82
Gambar 2-34 Perkembangan Balita *Stunting* di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022 (Persen).. 2-83
Gambar 2-35 Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2018-2022 (Orang)..... 2-84
Gambar 2-36 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2018-2022 (Anak)..... 2-86
Gambar 2-37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2019-2022 (Persen) 2-88
Gambar 2-38 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2019-2022 (Persen)..... 2-89
Gambar 2-39 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2019 – 2023 (Persen) 2-90

Gambar 2-40 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022 2-98
Gambar 2-41 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022 2-99
Gambar 2-42 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2017-2022 di tiap kabupaten/kota DIY 2-100
Gambar 2-43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2018-2022 2-101
Gambar 2-44 Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY Tahun 2018-2021 2-103
Gambar 2-45 Grafik Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2018 - 2022 . 2-104
Gambar 2-46 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021 2-111
Gambar 2-47 Prevalensi Diabetes Melitus Berdasarkan Diagnosis Dokter Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018 2-113
Gambar 2-48 Prevalensi Stroke* (Per mil) Berdasarkan Diagnosis Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018 2-113
Gambar 2-49 Prevalensi Kanker Berdasarkan Diagnosis Dokter Menurut Provinsi (Per mil), 2013-2018 2-114
Gambar 2-50 Prevalensi Penyakit Jantung (Diagnosis Dokter) Pada Penduduk Semua Umur Menurut Provinsi, 2018 2-114
Gambar 2-51 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi 2-125
Gambar 2-52 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2022 2-166
Gambar 2-53 Kalurahan Rawan Pangan 2018-2022 2-169
Gambar 2-54 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2022 2-171
Gambar 2-55 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2022 2-172
Gambar 2-56 Produksi Daging di DIY Tahun 2018-2022 (Ton/Tahun) 2-174
Gambar 2-57 Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2022 (dalam ton) .. 2-174
Gambar 2-58 Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2022 (dalam ton)2-175
Gambar 2-59 Data capaian IKTL DIY 2018-2022 2-187
Gambar 2-60 Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI 2-196

Gambar 2-61 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035 2-198
Gambar 2-62 Pernikahan Dini (Perkawinan Usia <18 Tahun) Tahun 2016 dan 2021 2-200
Gambar 2-63 Jumlah Kasus DAN Kasus/Km Periode 2019-2022 Jalan Provinsi DIY 2-217
Gambar 2-64 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2022 2-228
Gambar 2-65 Jumlah UKM di DIY Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2018-2022 2-229
Gambar 2-66 Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2018 s.d 2022 2-232
Gambar 2-67 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan II 2022 2-232
Gambar 2-68 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020 2-242
Gambar 2-69 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2018-2022 (Orang) 2-258
Gambar 2-70 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW di DIY Tahun 2018-2022 (Orang) 2-260
Gambar 2-71 Sebaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Orang) 2-261
Gambar 2-72 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY 2-262
Gambar 2-73 Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di DIY, 2018-2022 2-279
Gambar 2-74 Jumlah Perusahaan Industri Besar/Kecil Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022 2-280
Gambar 2-75 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2018-2022 2-282
Gambar 2-76 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2018-2022 2-283
Gambar 2-77 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2018-2022 2-284
Gambar 2-78 Grafik Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah 2-291
Gambar 2-79 Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY 2017-2021 2-293
Gambar 2-80 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2018-2022 (dalam ribu) 2-313

Gambar 2-81 Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan) 2-314
Gambar 2-82 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2018-2022..... 2-315
Gambar 2-83 NTP Per Subsektor Tahun 2018-2022 2-316
Gambar 2-84 Posisi Program Pemda dalam Cascading RPJMD DIY Tahun 2017-2022 2-326
Gambar 2-85 Realisasi Fisik Triwulan IV, 2022 (31 Desember 2022) . 2-339
Gambar 2-86 Realisasi Keuangan Triwulan IV, 2022 (31 Desember 2022) 2-339
Gambar 2-87 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2017 - Maret 2022)..... 2-348
Gambar 2-88 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022..... 2-352
Gambar 2-89 Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022 2-354
Gambar 2-90 Indeks Williamson DIY Tahun 2018-2022 2-355
Gambar 2-91 Perkembangan Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2017-2022 2-391
Gambar 2-92 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021. 2-397
Gambar 2-93 Perkembangan mCPR DIY, 2019-2021 2-421
Gambar 2-94 Jumlah Korban Kecelakaan Jalan Provinsi di DI Yogyakarta Tahun 2022 2-430
Gambar 2-95 Data Pelanggaran Batas Muatan Kendaraan Tahun 2017 – 2021 2-434
Gambar 3-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2018 - 2022 3-3
Gambar 3-2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY , 2018 - 2022 (%).....3-4
Gambar 3-3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2018 – 2022 3-5
Gambar 3-4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2018 - 2022.....3-7
Gambar 3-5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2022 3-8
Gambar 3-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2018 - 2022 3-8
Gambar 3-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2018- 2022.....3-9
Gambar 3-8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2018-2022 3-11
Gambar 3-9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2018 - 2022 (September).....3-12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konstitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis.

Dokumen RKPD DIY Tahun 2024 disusun bersamaan dengan waktu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD tersebut. RKPD DIY Tahun 2024 juga berada pada masa akhir tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005 – 2025 dengan penekanan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja jangka menengah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan strategis RKPD memerlukan perhatian yang besar dan komprehensif, yang seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

1) Pengolahan data dan informasi.
2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

1) Pendahuluan.
2) Gambaran umum kondisi Daerah.
3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah.
4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
5) Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
6) Rencana kerja dan pendanaan Daerah.
7) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8) Penutup.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana

indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. **Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

   Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara Perangkat Dearah, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

   a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
   b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
   c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
   d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
   e. Sinergi dengan RKP.

5. **Perumusan Rancangan Akhir RKPD**

   Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. **Penetapan RKPD**

   RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan daerah.

RKPD disusun dengan memperhatikan RPJPD DIY Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, Evaluasi Capaian RKPD periode sebelumnya dan RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Penyusunan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD DIY Tahun 2022-2027. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan digunakan juga sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

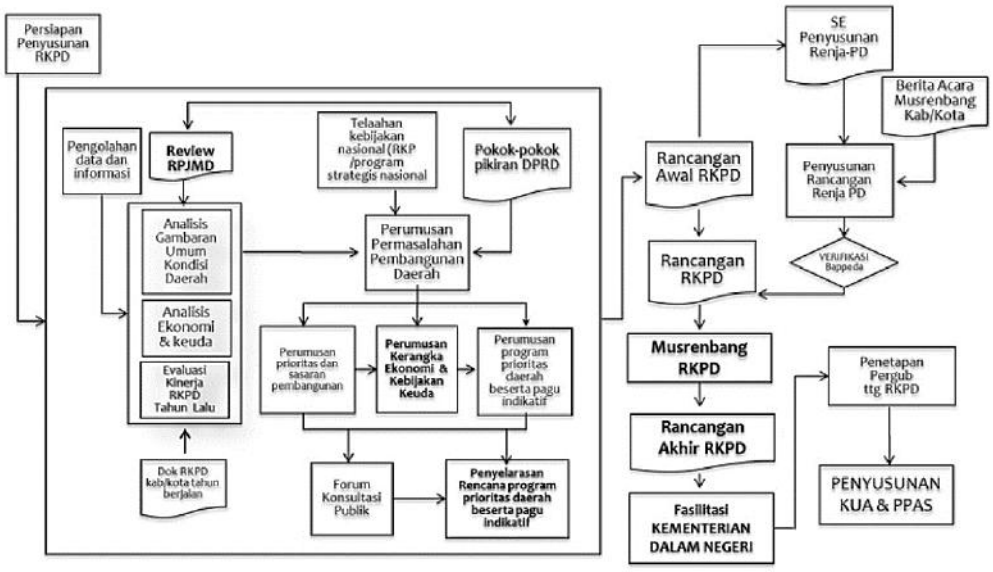

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Tahun 2008 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas

Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12)
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 86);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Desain Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042;
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

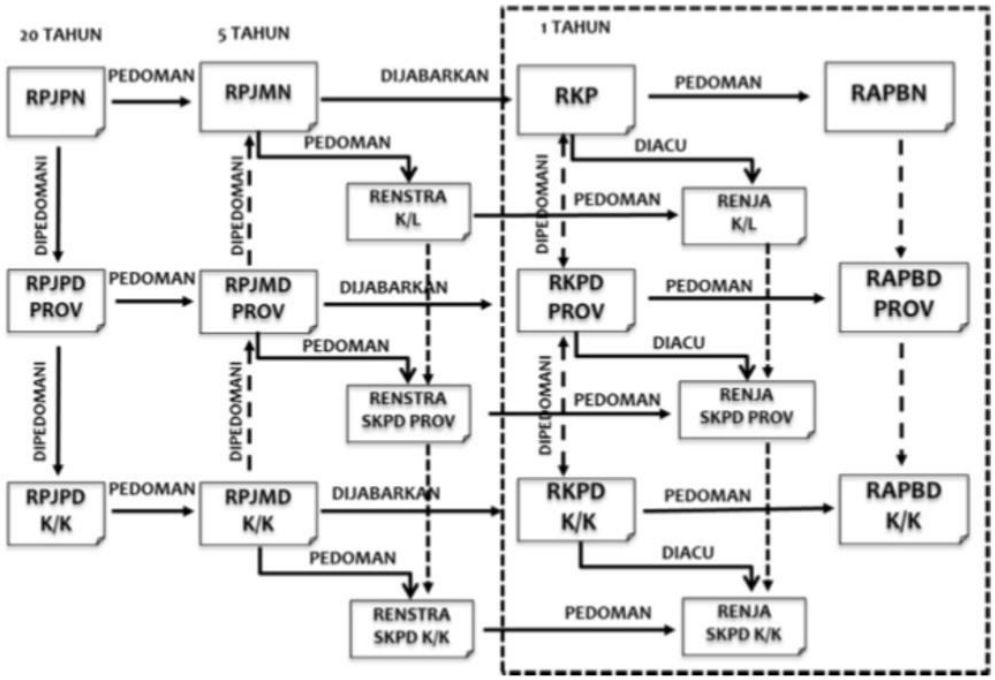

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Tabel 1-2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat kondisi geografi daerah, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, rancangan kerangka keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju.

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/ Badan/ Lembaga Teknis Daerah/ Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2024.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan**
   Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**
   Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. **Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**
   Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
4. **Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**
   Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
5. **Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**
   Memuat mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen perencaaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan DIY.
6. **Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**
   Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
7. **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
   Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.
8. **Bab VIII Penutup**

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2012 DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa DIY mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintah daerah di DIY merupakan keberlanjutan dari pemerintahan *nagari* Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dan sekaligus berproses menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Terdapat dimensi kesinambungan dan penyesuaian *(continuity and adaptivity)* secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Bentuk dan susunan pemerintahan DIY yang istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam konsideran huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya suatu NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Penetapan substansi Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an, Penetapan substansi Keistimewaan DIY juga bertujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab. Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Penetapan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Substansi kewenangan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, wilayah DIY terletak di zona selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan bentuk wilayah yang menyerupai geometri segitiga. Puncak segitiga wilayah DIY merupakan titik batas paling utara yang terletak pada Puncak Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 2.911 m diatas permukaan air laut. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif, diantara 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Bagian alas segitiga wilayah DIY merupakan batas di sisi selatan berupa garis pantai yang menghadap Samudera Hindia memanjang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 113km. Wilayah DIY umumnya tergolong subur dan berpotensi untuk ditanami berbagai komoditas pertanian, dengan karakteristik potensi sumberdaya alam yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Kondisi alam yang indah dan unik juga berpotensi menjadi destinasi pariwisata.

Bentang alam DIY terdiri dari empat fisiografi utama; Satuan fisiografi Pegunungan Selatan, Satuan fisiografi Gunung Berapi Merapi, Satuan fisiografi Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo, dan Satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan. Satuan

fisiografis Pegunungan Selatan merujuk pada kawasan geomorfologi karst yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kawasan geomorfologi karst merupakan fenomena bentanglahan iconic khas Gunungkidul. Kawasan karst yang kurang potensial untuk pertanian semusim. Wilayah Kabupaten Sleman, kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul bagian utara merupakan satuan fisiografi vulkanik Gunung Merapi. Bentuklahan ini tersusun dari material vulkan muda yang kaya unsur hara dan sangat subur. Kabupaten Bantul bagian selatan adalah dataran aluvial pantai yang terletak antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo. Kawasan ini juga potensial untuk budidaya pertanian, khususnya pertanian semusim. Bagian barat DIY merupakan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan fisiografi perbukitan denudasional di sisi utara dan dataran aluvial pantai pada sisi selatan, seperti juga yang ada di Kabupaten Bantul bagian selatan.

Sungai-sungai yang melintas di DIY merupakan salah satu pembentuk karakteristik lahan yang berpotensi memberi pengaruh (baik itu mendukung ataupun sebagai faktor pembatas) pengembangan wilayah, serta perkembangan penggunaan lahan di DIY. Sebagai faktor pendukung, sungai berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya air. Sebagai pembatas, sungai berhubungan dengan zona perlindungan setempat dan mungkin juga zona rawan bencana banjir. Beberapa sungai besar yang melintas dan bermuara di wilayah pesisir DIY antara lain Sungai Opak Oyo, Sungai Progo, dan Sungai Bogowonto. Beberapa sungai kecil lainnya adalah Sungai Gajahwong, Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Serang. Semua sungai tersebut bermuara di kawasan pesisir Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Karakteristik batuan yang bersifat larut air pada kawasan karst di Gunungkidul menyebabkan sungai sungai yang melintas disana menghilang dari permukaan menjadi aliran bawah permukaan (sungai bawah tanah). Beberapa subsistem aliran bawah tanah yang dominan antara lain subsistem Ngobaran, subsistem Baron, dan subsistem Bribin.

Ditinjau dari aspek demografi, hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk DIY yang mengalami peningkatan dan perubahan proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur yang akan berpengaruh pada karakteristik sumberdaya manusia yang ada. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) jumlah penduduk DI Yogyakarta September 2020 sebesar 3.668.719 orang. Dengan luas daratan DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 sebesar 3.173,87 km^2, maka

secara general kepadatan penduduk DIY sebanyak 1.155,91 orang per km^2. Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58 persen. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di DIY hasil SP2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 orang dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta yaitu 373.589 orang. Uraian dan penjelasan rinci terkait aspek Geografi dan Demografi adalah sebagai berikut.

Aspek Geografi

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis wilayah DIY terletak pada posisi 7 .33'- 8 .12' Lintang Selatan dan 110 .00'-110 .50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di zona bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia.

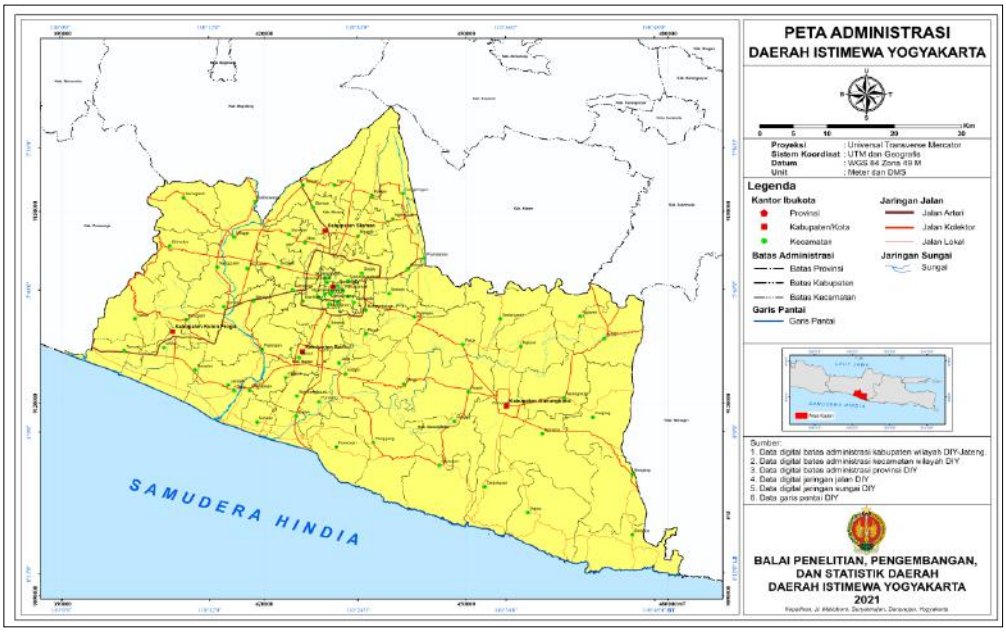

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-1 Peta Administrasi DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/kota dan Kalurahan dilakukan penyelarasan nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerah. Penyelarasan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan Kemantren untuk sebutan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta. Kapanewon dipimpin oleh Panewu dan kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. 2) Kalurahan untuk sebutan Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk sebutan desa di wilayah Kota Yogyakarta.

Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/ kelurahan. Sedangkan jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 Rukun Warga dan 26.896 Rukun Tetangga.

Tabel 2-1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan / Kelurahan	Dusun	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
D.I. Yogyakarta		78	438	4.508	7.102	26.896

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Luas seluruh wilayah DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 adalah 3.173,87 Km^2 atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.555,47 Km^2). DIY merupakan provinsi dengan luasan terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 46,55% dari luas DIY.

Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,03% dari luas DIY.

Tabel 2-2 Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

No	Kode	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Km^2	%	Keterangan
1	34.01	Kab. Kulon Progo	577,22	18,19	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
2	34.02	Kab. Bantul	511,71	16,12	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
3	34.03	Kab. Gunungkidul	1.477,39	46,55	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
4	34.04	Kab. Sleman	574,73	18,11	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
5	34.71	Kota Yogyakarta	32,82	1,03	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
		DIY	3.173,87	100	

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2022

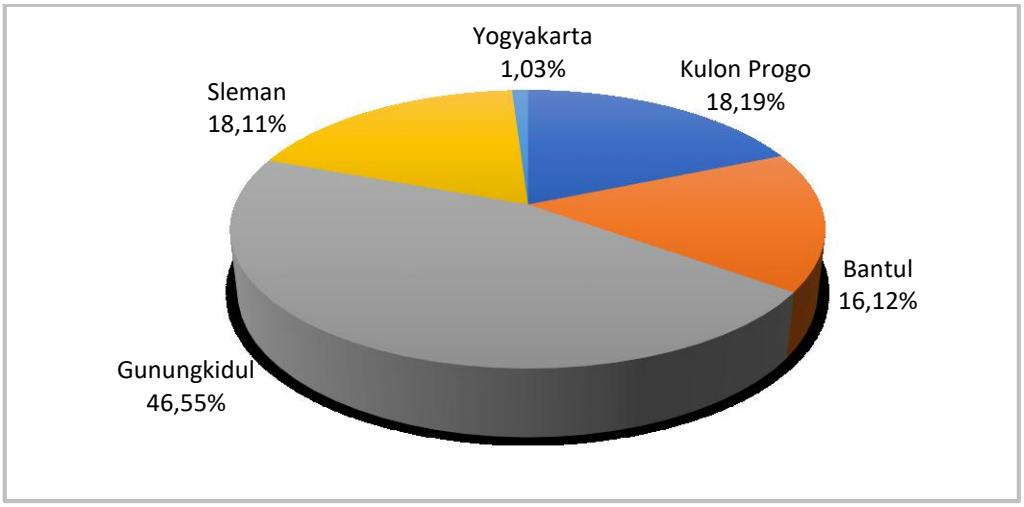

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY

2.1.1.2 Topografi

Topografi dideskripsikan secara kualitatif sebagai bentuk permukaan lahan, dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan besaran sudut lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng, bentuk lereng dan posisi ketinggian suatu tempat diatas permukaan laut. Topografi DIY dipresentasikan dalam kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Kemiringan lahan
   Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY hasil analisis tahun 2022, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 Km^2, lahan dengan kemiringan 2-8 % seluas 522,73 Km^2, lahan dengan kemiringan 8-15% seluas 302,80 Km^2, lahan dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 Km^2, lahan dengan kemiringan 25-40 % seluas 332,83 Km^2, lahan dengan kemiringan lebih dari 40 % seluas 367,03 Km^2.

2) Ketinggian lahan
   Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84 %, wilayah dengan ketinggian 100-499 mdpl sebesar 65,65 %, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl sebesar 5,04 %, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47 %.

3) Unit Fisiografis

Di Wilayah DIY terdapat empat satuan fisiografi utama yaitu; fisiografi pegunungan selatan karst, fisiografi gunung api, fisiografi dataran aluvial (dataran rendah graben Bantul), dan fisiografi perbukitan denudasional Kulon Progo berikut dataran aluvial pantai di sisi selatan wilayah Kulon Progo. Di selatan DIY terletak Samudera Hindia yang juga kaya akan potensi sumber daya alam laut. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY sebagai berikut:

a. Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km^2, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Bantul bagian timur, yang merupakan kawasan geomorfologi karst berupa perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air permukaan. Di sebelah utara kawasan karst yaitu pada bagian tengah wilayah Kabupaten Gunungkidul berupa cekungan basin Wonosari. Wilayah karst ~~ini~~ merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
b. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km^2, ketinggian 80 – 2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul. Satuan fisiografi ini merupakan bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km^2, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan fisiografis kawasan pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir type barchan yang merupakan fenomena langka di dunia;

d. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km^2, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil (3160,93).

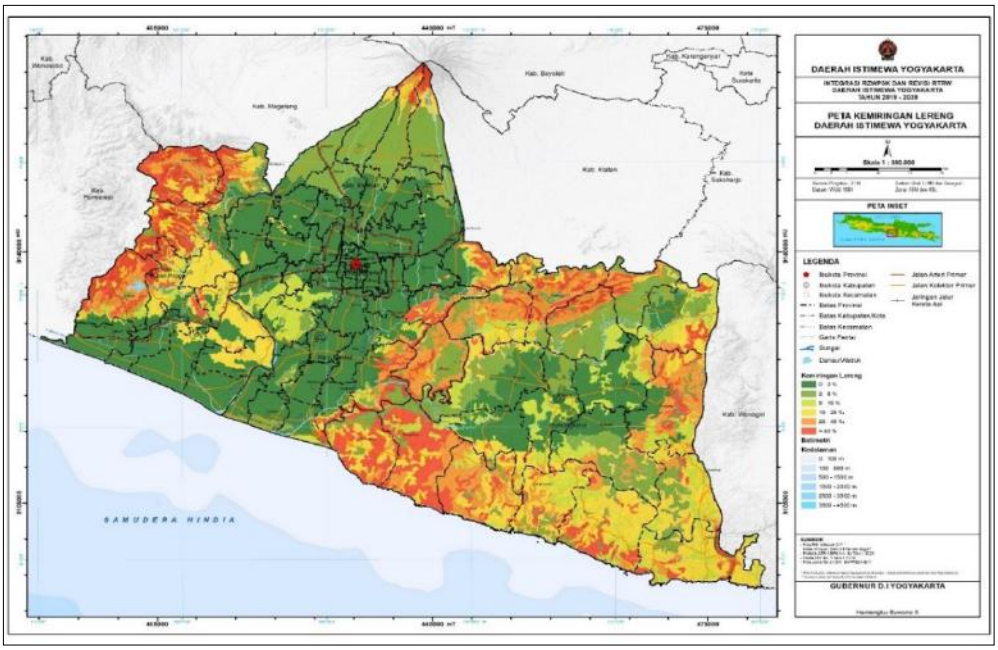

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Pengolahan Data DEMNAS dan Citra ASTER, 2022

Gambar 2-3 Peta Kemiringan Lereng DIY

2.1.1.3 Klimatologi

Kondisi iklim sangat mempengaruhi wilayah baik dari segi potensi sumber daya alam maupun potensi bencana alam. DIY terletak di wilayah yang dipengaruhi oleh tiga tipe iklim: musiman, tropis dan maritim. Iklim musiman sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah pada waktu tertentu. Periode pergantian angin normal adalah 6 bulan. Ada dua jenis iklim musiman: monsun barat daya (*monsoon* barat) dan monsun timur laut (*monsoon* timur). Dari Oktober hingga April, angin monsun barat daya bertiup dan dominan membawa hujan. Monsun timur laut bertiup dari bulan April sampai Oktober, dengan karakter kering sehingga menjadi musim kemarau.

Sebagai bagian dari daerah beriklim tropis, kondisi iklim DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis, dengan suhu tinggi dan curah hujan yang tinggi. Posisinya yang dekat dengan Samudera Hindia, memberi pengaruh akibat adanya banyak penguapan air laut, yaitu kelembaban tinggi dan curah hujan yang tinggi pula.

Parameter iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban dan arah angin memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dianggap sebagai potensi cagar alam dan potensi alam yang berkelanjutan. Berikut adalah catatan DIY untuk tahun 2021:

1) Suhu minimum 21,90 °C dan suhu maksimum 32,00 °C.
2) Curah hujan bulanan tertinggi pada bulan Maret terjadi di Kabupaten Sleman sebesar 422 mm^3 dan terendah di seluruh kabupaten sebesar 0 mm^3.
3) Kelembaban Minimum 54,0 dan Kelembaban Maksimum 92
4) Tekanan 988,20 mb hingga 997 mb;
5) Kecepatan angin minimum 1 knot, kecepatan angin maksimum 7 knot.

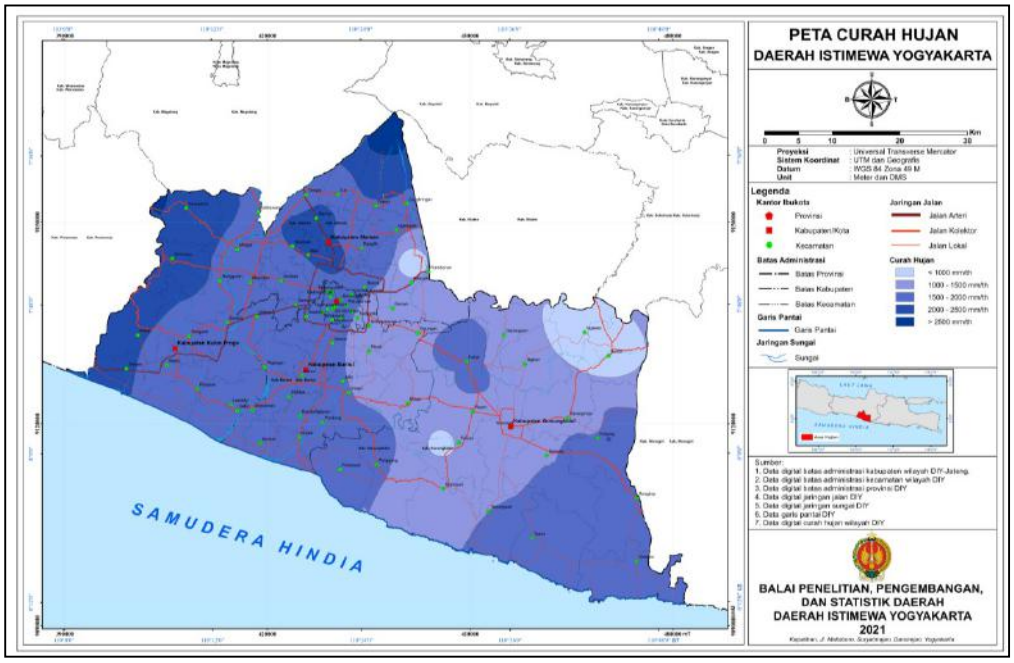

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-4 Peta Curah Hujan DIY

2.1.1.4 Geologi dan Jenis Tanah

Formasi geologi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tmpk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).

DIY mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada singkapan Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpk). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.

1) Aluvium (Qa) Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.
2) Formasi Gunungapi Merapi (Qvm) Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.
3) Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo) Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.
4) Formasi Kepek (Tmpk) Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.
5) Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batulanau. Di bagian selatan dijumpai batu gamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik hidrogeologi dari batugamping

menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memilki karakteristik soluble dan mudah meloloskan air.

6) Formasi Sentolo (Tmps) Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir napalan.
7) Formasi Oyo (Tmo) Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.
8) Formasi Sambipitu (Tmss) Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batu lempung.
9) Formasi Semilir (Tms) Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batu lempung tufaan.
10) Formasi Kebo Butak (Tomk), Formasi Kebo Butak berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batu pasir dan batu lempung andesit. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batulanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.
11) Formasi Andesit Tua, Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Litologinya berupa breksi volkanik dengan fragmen andesit, tuf, lapilli tuf, lapili breksi, sisipan aliran lava andesit, aglomerat, serta batu pasir volkanik yang tersingkap di daerah Kulon Progo. Formasi

ini tersingkap baik di bagian tengah, utara, dan barat daya daerah Kulon Progo yang membentuk morfologi pegunungan bergelombang sedang hingga terjal. Ketebalan formasi ini kira-kira mencapai 600 m. Berdasarkan fosil Foraminifera planktonik yang dijumpai dalam napal dapat ditentukan umur Formasi Andesit Tua yaitu Oligosen Atas.

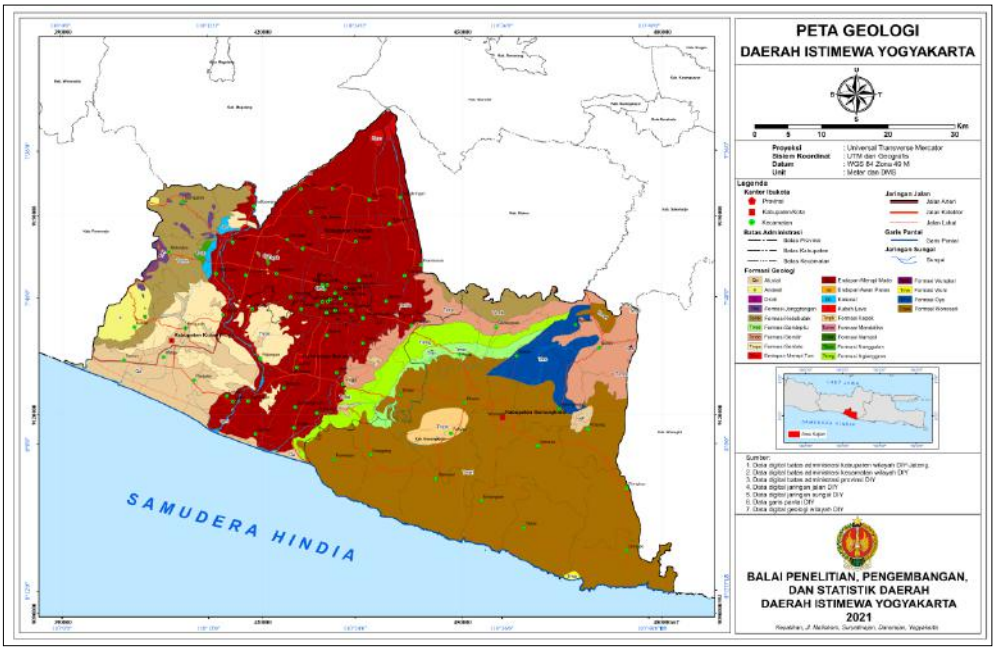

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-5 Peta Geologi DIY

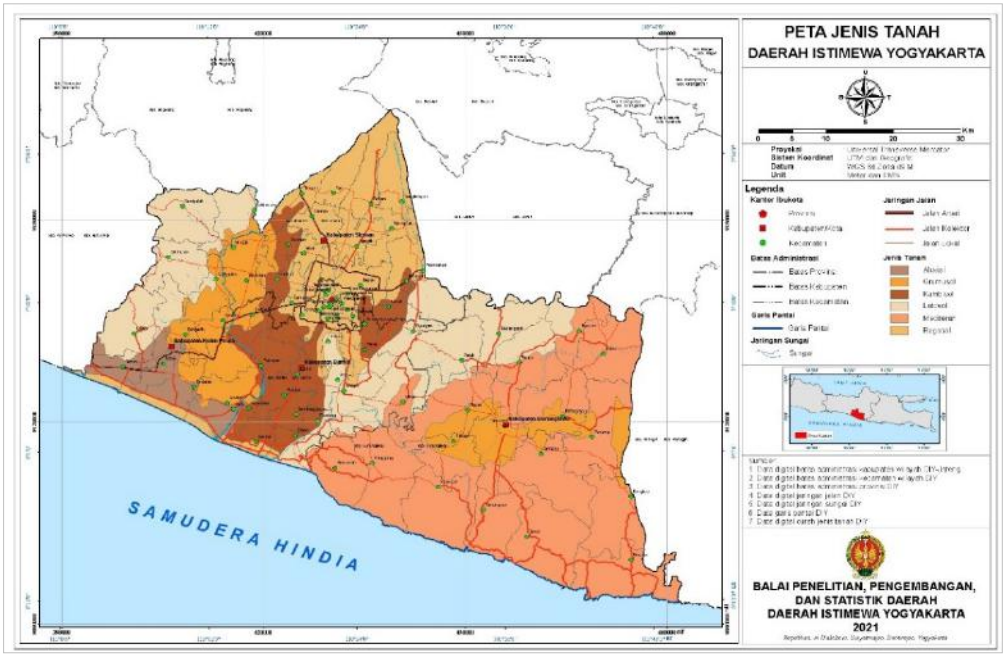

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-6 Peta Jenis Tanah DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Jenis tanah yang ada di wilayah DIY dapat digolongkan dalam beberapa kategori besar sebagai berikut:

1) Unit fisiografi vulkanik muda Gunungapi Merapi, mengandung tanah regosol seluas 521,44 Km^2 atau sekitar 16,43 %. Tanah Regosol merupakan salah satu sub jenis tanah Entisol. Yaitu tanah yang berasal dari pelapukan material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Jenis tanah ini belum mengalami perkembangan sempurna dalam hal struktur maupun teksturnya. Regosol termasuk jenis tanah mineral yang kaya unsur hara sehingga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi namun tidak bisa mengikat air. Regosol tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul bagian utara.
2) Jenis tanah berikutnya adalah Kambisol yang tersebar seluas 304,45 Km^2 atau sekitar 9,59%. Tanah Kambisol (menurut sistem FAO)

merupakan tanah yang mempunyai horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, serta tidak terdapat gejala hidromorfik. Secara simpel kambisol bisa dikatakan sebagai tahap awal dari jenis tanah latosol. Dengan origin yang hampir sama maka kambisol pun memiliki tingkat kesuburan yang setara dengan latosol. Persebaran kambisol berada pada wilayah Kabupaten Sleman bagian barat dan timur serta hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah dan selatan.

3) Jenis tanah aluvial di wilayah DIY tersebar seluas 120,95 Km^2 atau sekitar 3,81%. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan dibagian hilir, dan berasosiasi dengan keberadaan sungai sebagai *transport agent* nya dari hulu. Tanah ini biasanya bewarna coklat hingga kelabu. Di wilayah DIY tanah aluvial tersebar dikawasan selatan Kabupaten Kulon Progo.
4) Di DIY juga ada tanah jenis grumusol seluas 407,31 Km^2 atau 12,83%. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. Kandungan *organic* di dalamnya rendah jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan kurang cocok untuk ditanami komoditas pertanian. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau. Grumusol berwarna hitam dan persebarannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah. Sifat kembang kerutnya yang tinggi memerlukan *treatment* khusus dalam bidang konstruksi karena sangat berisiko mempercepat kerusakan struktur bangunan atau badan jalan.
5) Jenis tanah mediteran adalah yang paling dominan di wilayah DIY yaitu seluas 1139,24 Km^2 atau 35,90%. Tanah jenis mediteran ini tersebar bagian timur, selatan, dan barat wilayah Kabupaten Gunungkidul. Tanah mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. Yang menjadi masalah utama dari jenis tanah mediteran adalah ketersediaan air yang rendah dan tingginya pH tanah (>7). Tanah yang bersifat alkalis ini akan mengikat fosfat sehingga akan menjadi kendala bagi tanaman untuk tumbuh.
6) Kategori Jenis tanah yang terakhir distribusi penyebarannya berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan Gunungkidul bagian utara. Jenis tanah ini adalah latosol, dengan luas penyebaran sekitar 680,11 Km^2 atau 21,43%. Tanah ini memiliki lapisan solum yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 30 cm sampai 5 meter bahkan lebih. Memiliki batas horizon yang tidak jelas. Latosol meliputi tanah hasil pelapukan yang intensif dan perkembangan tanah yang lebih lanjut. Keadaan ini meyebabkan pelindian

unsur basa, bahan organic, dan silica dengan menyisakan sesquoksida berwarna merah. Umumnya kandungan unsur hara dari rendah sampai sedang. Tekstur tanah liat, struktur remah dan konsisitensi gembur. Fitur menarik dari jenis tanah latosol adalah adanya akumulasi sesquioxides besi atau aluminium yang disebut laterit dan banyak dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata, karena karakternya yang menjadi sangat keras pada kondisi udara sangat kering.

2.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa igir perbukitan di mana air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. DAS menerima, dan menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya kemudian mengalirkannya melalui alur alur sungai menuju ke muara (laut ataupun danau).

Wilayah DIY dilewati beberapa Daerah Aliran Sungai yang semuanya bermuara di Samudra Hindia. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS, terdapat empat DAS yang menjadi sasaran DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bribin. Selain empat DAS utama tersebut terdapat juga beberapa DAS mikro yang bersifat sub surface DAS yang kawasannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada sisi utara di sekitar perbatasan wilayah DIY juga merupakan daerah tangkapan air DAS Bengawan Solo. Peta kawasan DAS di DIY sebagaimana mengacu pada data layer tematik penyusunan RTRW DIY 2019-2039 dapat dilihat pada Gambar Peta Daerah Aliran Sungai di bawah ini.

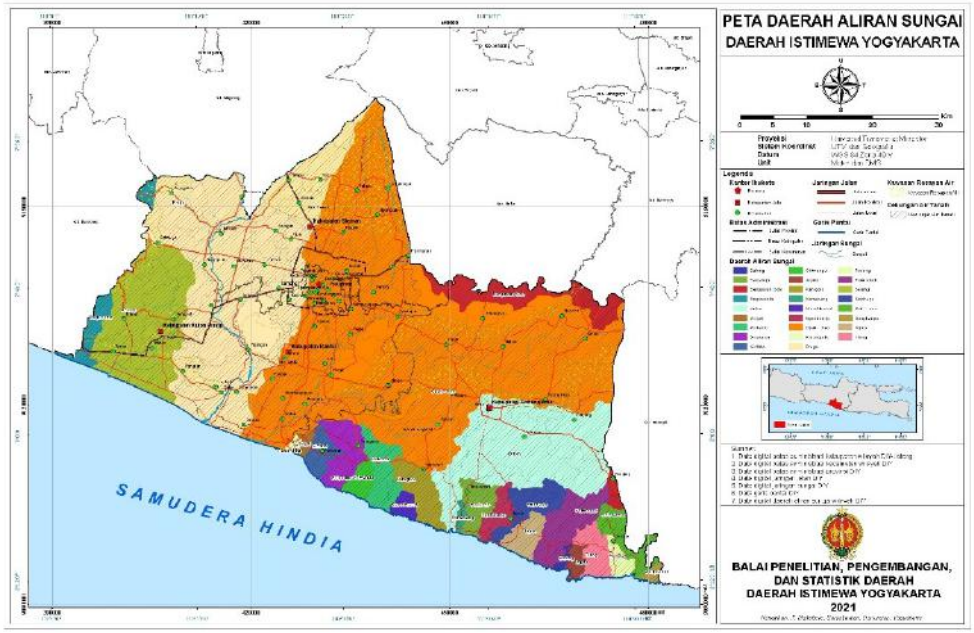

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2022

Gambar 2-7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha. DAS Bribin mencakup areal hulu di Panggung Massive Oyo dan hilir di Pantai Baron. Secara administratif sebagian besar areal DAS Bribin terletak di Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi *aquifer* yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, *aquifer* di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) *aquifer*, yaitu :

1) *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi

dan air baku). Termasuk daerah *mayor aquifer* adalah Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.

2) *Minor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* adalah Formasi Wates, Gumuk pasir.
3) *Poor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambi pitu dan Oyo, dan Andesit tua.
4) *Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada 4 (empat) DAS yang ada di wilayah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2-3 Potensi Ketersediaan Air (juta m^3)

NAMA DAS	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
DAS Serang	129,60	141,72	207,00	234,00	209,03 *	Juta m^3
DAS Progo	3.807,25	6.423,39	6.178,00	5.652,00	227,71 *	Juta m^3
DAS Opak	1.900,89	1.103,39	1.446,00	858,00	667,28 *	Juta m^3
DAS Oyo	1.530,10	756,70	1.090,00	529,00	529,00 *	Juta m^3

*Keterangan: *) Sementara*

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022 *) Sementara*

Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m^3, DAS Progo sebesar 622,64 juta m^3, DAS Opak sebesar 653,04 juta m^3, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m^3, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m^3. Sehingga kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan tahun 2021 sebesar 1.605 juta m^3.

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki

potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2-4 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2021 (m^3/detik)

Sub Elemen	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Sungai Progo (Duwet)	0,02	209,79	0,18	183,54	0,30	561,00	0,20	345,41	0,20*	345,41*
Sungai Bedog (Guwosari)	0,01	49,84	0,18	33,66	0,05	30,90	1,84	28,90	1,84*	28,90*
Sungai Code (Kaloran)	0,02	10,95	0,01	38,25	0,01	12,70	0,18	8,55	0,18*	8,55*
Sungai Winongo (Padokan)	0,03	37,93	0,01	20,06	0,09	25,40	0,01	16,30	0,01*	16,30*
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,49	9,93	0,05	6,66	0,27	6,72	0,49	5,68	0,49*	5,68*
Sungai Opak (Pulo)	0,14	4,06	0,27	4,8	0,06	3,5	0,12	4,91	0,12*	4,91*

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, *) Sementara*

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Wilayah sungai bawah tanah yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup areal seluas 924,27 Km^2. Debit rerata SBT Bribin sebesar 0,95 m^3/detik, SBT Ngobaran 0,70 m^3/detik dan SBT Baron debit rerata 0,10 m^3/detik.

Tabel 2-5 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS

Sungai	Kapasitas (Liter/Detik)
Bribin	956
Ngobaran	700
Baron	800

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1.200 Km^2, meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, sebagaimana ditunjukan pada gambar di bawah ini. Grafik tersebut menunjukkan potensi yang jauh melebihi kebutuhan, satuan yang digunakan adalah dalam m^3/detik sepanjang tahun dengan diskrit waktu per setengah bulan. Namun demikain, kenyataannya pada waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mengimbangi cukupnya prasarana pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Pada beberapa wilayah memang potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Tabel 2-6 Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan

Progo – Opak – Serang	
Imbangan Air – Hidrologi Rerata Tahunan dalam Juta M^3	
Curah Hujan pada WS	8.769
	Hujan 2.119 mm/tahun
Hilang dalam system	3.469
Aliran WS	5.300
Imbangan Air – Penggunaan Rerata Tahunan dalam Juta M^3	
Aliran pada WS	5.300
Konsumsi Bersih	1.060

Irigasi	947	
RKI	113	
Terbuang ke laut		4.240
Total		5.300

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

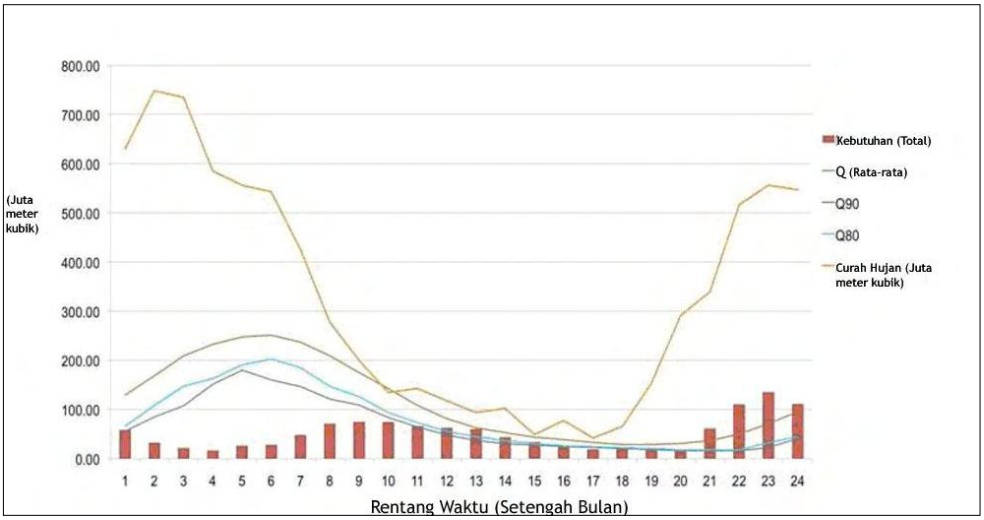

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar 2-8 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

DIY merupakan wilayah yang dominan dalam hal kebutuhan air di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang (WS POS), terdapat kawasan strategis nasional poros Utara-Selatan (Tempel-Parangtritis) dan kawasan strategis nasional Metropolitan Yogyakarta, serta Ekogeowisata Karst di Gunungkidul. Untuk kawasan strategis Provinsi meliputi pusat pengembangan budidaya pertanian di Kulon Progo dan Sleman, pusat pengembangan budidaya pertanian lahan kering di Wonosari.

Total kebutuhan air per periode pada WS POS dibedakan menjadi Irigasi, Domestik, Komersial & Industri. Dapat dilihat bahwa kebutuhan untuk irigasi semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian, disamping juga adanya peningkatan efisiensi. Kebutuhan irigasi pada tahun 2035 turun 4,849 m^3/detik (16%) dibanding pada periode awal Tahun 2015. Untuk kebutuhan domestik mengalami peningkatan

permintaan sebesar 5,804 m^3/detik (79%), sedangkan kebutuhan komersial & industri terjadi peningkatan 1,011 m^3/detik (45%). Dengan demikian komposisi pemakaian air di WS POS mengalami pergeseran dari semula 81% irigasi, 17% domestik, 2% komersial & industri pada Tahun 2015, menjadi 67% irigasi, 29% Domestik, dan 4% komersial & industri pada tahun 2035. Grafik Kebutuhan Air di WS POS selengkapnya disajikan pada Gambar berikut:

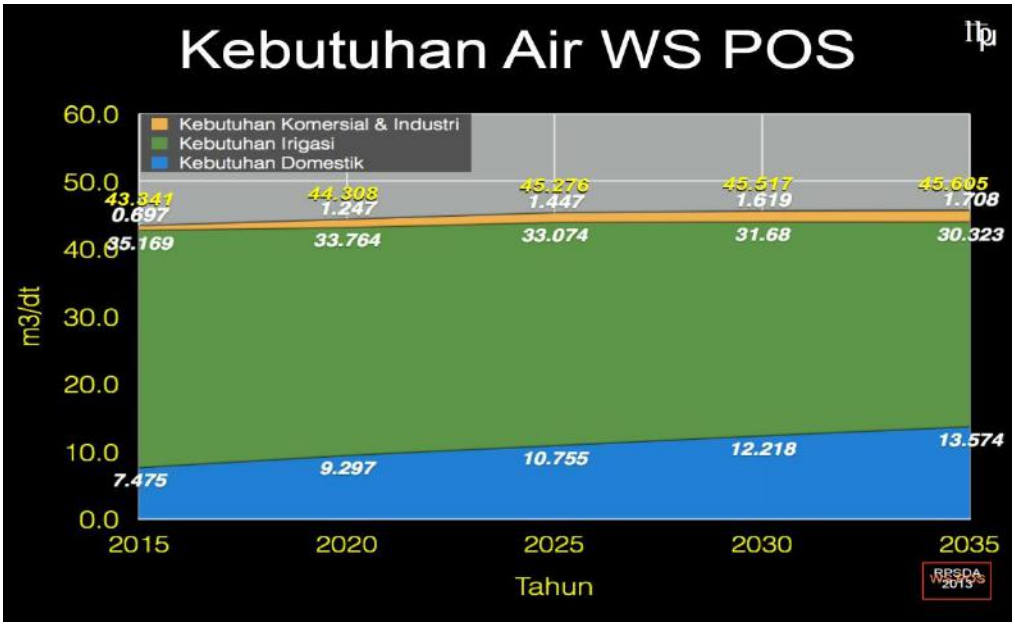

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar 2-9 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini.

Penggunaan lahan di DIY didominasi permukiman, tanaman semusim lahan kering, kebun dan tanaman campuran, tanaman semusim lahan basah, dan hutan tanaman. Dominasi penggunaan lahan terbesar yaitu permukiman seluas 89.483,47 Ha atau sebesar 28,20%. Berikutnya lahan pertanian yang didominasi

tanaman semusim lahan kering seluas 77.534,70 Ha atau sekitar 24,43%, kebun dan tanaman campuran seluas 55.090,38 Ha atau sekitar 17,36%, dan tanaman semusim lahan basah seluas 54.735,94 Ha atau sekitar 17,25 %. . Hutan tanaman seluas 21.050,31 Ha atau sekitar 6,63 %. Penggunaan lahan DIY secara lengkap seperti tercantum pada Tabel berikut.

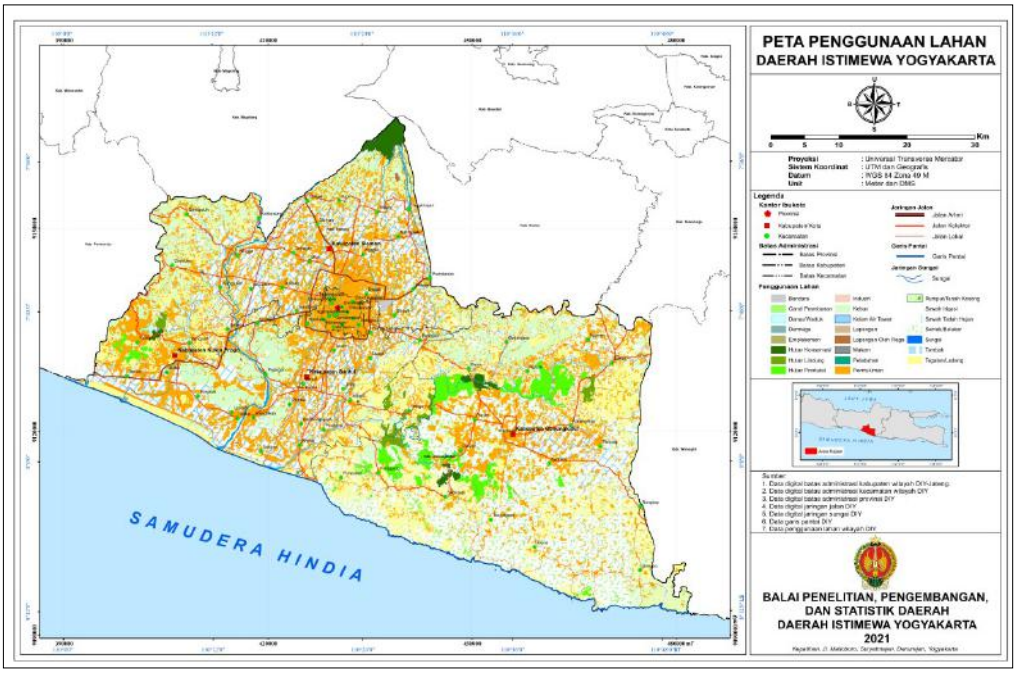

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-10 Peta Penggunaan Lahan DIY

Tabel 2-7 Penggunaan lahan di DIY Tahun 2022

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Bangunan Permukiman	89.483,47	28,20%
Tanaman Semusim Lahan Kering	77.534,70	24,43%
Tanaman Semusim Lahan Basah	54.735,94	17,25%
Kebun dan Tanaman Campuran	55.090,38	17,36%
Hutan Tanaman	21.050,31	6,63%
Semak dan Belukar	13.299,26	4,19%
Bangunan Bukan Permukiman	1.543,89	0,49%

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Lahan Terbuka	1.135,81	0,36%
Sungai	2.766,78	0,87%
Kolam Air Asin	284,40	0,09%
Kolam Air Tawar	137,42	0,04%
Waduk dan Danau Buatan	244,55	0,08%
Candi	42,94	0,010%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.1.1.7 Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir

Batasan wilayah pesisir seperti diatur dalam Undang Undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ~~dan laut~~, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Wilayah pesisir DIY meliputi wilayah pesisir di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, terdiri dari 13 Kapanewon Pesisir yaitu; Temon, Wates, Panjatan, Galur, di Kabupaten Kulon Progo, Srandakan, Sanden, dan Kretek di Kabupaten Bantul, Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul . Luas wilayah pesisir DIY pada matra darat adalah identik dengan luas wilayah kapanewon pesisir yaitu 736,2 Km^2 atau sekitar 23,1% dari total luas wilayah darat DIY. Ditambah matra lautnya yang sepanjang garis pantai 113 km x 12 mil laut = 2508,6 Km^2, maka luas total wilayah pesisir DIY adalah 3.244,8 Km^2 . Luas total wilayah pesisir DIY tersebut lebih luas dari luas total seluruh daratan DIY 3.173,87 Km^2. Wilayah pesisir DIY berupa matra darat dan matra laut tersebut memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1) Perikanan tangkap laut (matra laut)
   Kondisi perikanan tangkap di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun. Sumber daya perikanan tangkap yang potensial di DIY meliputi berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, serta ikan karang. Jenis ikan pelagis kecil yang potensial meliputi ikan layang dan ikan kembung. Ikan jenis pelagis besar, diantaranya madidihang dan cakalang. Jenis ikan demersal yang nilai produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan karang yang potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisangpisang dan ikan kerapu karang.

Beberapa jenis komoditi lain yang nilai produksinya tinggi dan potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita.
Potensi sumber daya perikanan laut yang besar tersebut masih belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi *underfishing* karena pemanfaatannya masih jauh berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumber daya perikanan di selatan DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan.
Sementara, bila dilihat lebih luas, DIY berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 yang mencakup 8 provinsi yang meliputi selatan Jawa hingga Nusa Tenggara dengan total potensi 491.700 ribu ton/tahun. Dengan sifat laut yang *open access*, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ikan yang lebih luas pula.

2) Ekosistem terumbu karang
Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.

3) Ekosistem Mangrove
Ekosistem mangrove merupakan habitat berisi komunitas tumbuhan air yang berada di daerah tropis sepanjang pantai yang terlindung atau di muara sungai. Ekosistem mangrove sering disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut dan merupakan suatu ekosistem transisi antara darat dan laut. Di dalam hutan mangrove, perairan dan tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2018 seluas 8 ha di Pantai Baros Kabupaten Bantul dan seluas 9 Ha di kawasan Pasirmendit, Jangkaran, Temon, Kulon Progo. Kawasan hutan mangrove Baros telah ditetapkan dengan SK Bupati Bantul No. 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul seluas 132 Ha.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12 spesies mangrove teridentifikasi di kawasan

pesisir Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (*Avicennia marina, Avicennia alba, Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Sonneratia caseolaris* dan *Nypa fruticans*) dan 6 komponen mangrove asosiasi (*Acanthus ilicifolius, Hibiscus tiliaceus, Ipomoea pes– caprae, Pandanus tectorius, Sesuvium postulacastrumdan Terminalia cattapa*)

4) Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir menyimpan cadangan air lengas yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus, bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan leresede. Lebatnya tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh berbagai hewan khususnya burung.

Berbagai macam jejak aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapatan situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kapanewon Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

5) Pariwisata

Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 wisata pantai di DIY yang terdiri dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai Kabupaten Kulon Progo yang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau wisatawan macanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan

sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

6) Energi Baru Terbarukan
   Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5kWh/m dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada pukul 10.00 WIB - 14.30 WIB hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4 m/s. Bahkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari.

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039 bertujuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan Perda DIY No 5 Tahun 2019 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan dan keamananan dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan struktur ruang wilayah yang berada pada kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan

Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel-Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan materi reviu RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi reviu RTRW DIY di antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, di mana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (*Airport City*) serta Aerotropolis di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.

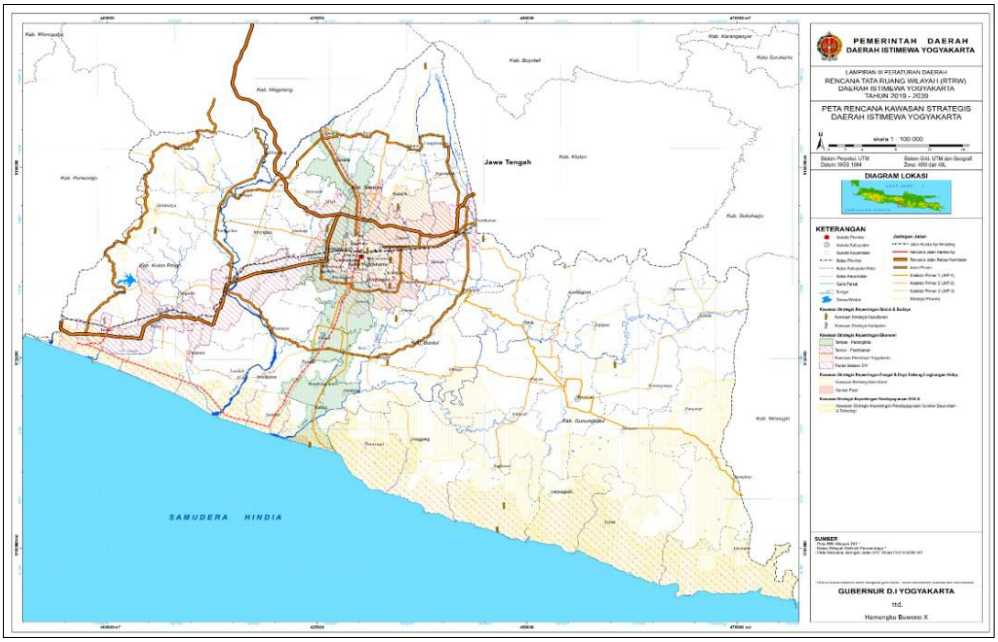

Sumber: Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW DIY tahun 2019 – 2039

Gambar 2-11 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019

Rencana pola ruang wilayah DIY sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019 – 2039 terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Adapun kawasan lindung di DIY sesuai pasal 28 Perda DIY nomor 5 tahun 2019 terdiri dari berbagai fungsi lindung sebagai berikut:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan konservasi;
d. Kawasan lindung geologi;
e. Kawasan ruang terbuka hijau;
f. Kawasan rawan bencana alam; dan
g. Kawasan cagar budaya.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lahan di DIY dengan peruntukan sebagai

kawasan Budidaya sesuai pasal 57 Perda DIY nomor 5 tahun 2019 terdiri dari berbagai fungsi budidaya sebagai berikut :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan perikanan;
e. Kawasan peruntukan pertambangan;
f. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan peruntukan pariwisata;
h. Kawasan peruntukan permukiman;
i. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
j. Kawasan peruntukan lainnya.

Luasan lahan untuk masing-masing peruntukan lahan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2-8 Peruntukan lahan di DIY Sesuai Perda No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY

Kawasan Lindung di DIY	Sub Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Hutan Lindung	2.312,80
	Kawasan Resapan Air	49.850,90
Kawasan perlindungan setempat	Sempadan Pantai	1.311,10
	Sempadan Sungai	5.454,79
	Kawasan Sekitar Waduk	72,20
Kawasan Konservasi	Cagar Alam	11,88
	Suaka Margasatwa	619,59
	Taman Nasional Gunung Merapi	2.047,62
	Taman Hutan Raya	634,10
	Taman Wisata Alam	1,03
	Hutan Penelitian	101,91
Kawasan lindung geologi	Cagar Alam Geologi	751,46

Kawasan Lindung di DIY	Sub Kawasan	Luas (Ha)
	Kawasan perlindungan air tanah	80.238,68
	Kawasan sekitar mata air	Undefined
Kawasan RTH	Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo	7.998,39
Kawasan rawan bencana alam	Rawan Bencana Geologi	3.355,86
	Rawan tanah longsor	42.132,00
	Rawan Tsunami	7.317,00
	Rawan Gelombang Pasang	119.781,00
	Rawan Banjir	138.546,00
	Rawan Gempa Bumi	323.071,00
	Rawan Kekeringan	323.522,00
Kawasan Cagar Budaya	Cagar Budaya Prambanan, Cagar Budaya Kraton, Cagar Budaya Pakualaman, Cagar Budaya Kotagede, Cagar Budaya Kota Baru, Cagar Budaya Imogiri, Cagar Budaya Kerto – Pleret, Kawasan Cagar Budaya Lainnya	*Undefined*

Kawasan Budidaya di DIY	Sub Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	13.411,70
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	19.140,78
Kawasan Peruntukan pertanian	Kawasan budidaya tanaman pangan	*Accumulated*
	Kawasan lahan pangan beririgasi	50.827,52
	Kawasan lahan pangan tidak beririgasi	100.408,43
	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	104.905,76
	Kawasan budi daya perkebunan	21.467,08
	Kawasan perikanan tangkap	0-12 mil laut

Kawasan Budidaya di DIY	Sub Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Peruntukan perikanan	Kawasan perikanan budi daya (Kawasan minapolitan di 4 kabupaten)	*uncalculated*
Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pertambangan mineral logam	4.308,86
	Pertambangan mineral bkn logam dan batuan	4.073,88
	Pertambangan rakyat	2.084,06
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri	5.589,79
	Sentra industri kecil dan menengah	*uncalculated*
Kawasan Peruntukan pariwisata	Wisata Alam, Wisata Pendidikan, Wisata Petualangan, Wisata Purbakala, Wisata Budaya, Wisata Pedesaan, Wisata Belanja, Kampung Wisata, Wisata Kuliner, Sentra Kerajinan, Wisata Minat Khusus, Wisata Dirgantara, Agro – Ekowisata, Wisata Karst, Hutan Wisata, Desa Wisata, Wisata Religi, Wisata Tirta	
Kawasan Peruntukan Permukiman	permukiman di seluruh Kota Yogyakarta	3.207,02
	permukiman di Kabupaten Sleman	24.352,53
	permukiman di Kabupaten Bantul	19.479,58
	permukiman di Kabupaten Gunungkidul	22.971,02
	permukiman di Kabupaten Kulon Progo	17.217,64
Pertahanan dan keamanan	kawasan instalasi militer	
	kawasan instalasi kepolisian	
Kawasan Peruntukan lainnya.	Kaws peruntukan riset dan pendidikan tinggi	
	Kaws peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil	
	Kaws peruntukan pemanfaatan ruang dlm bumi	

Kawasan Budidaya di DIY	Sub Kawasan	Luas (Ha)
	ruang dalam bumi dangkal	
	ruang dalam bumi dalam	
	Kawasan pelabuhan	23,07
	Kawasan bandar udara	893,39

Sumber: Perda DIY No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY; Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambaran secara umum peruntukan lahan di DIY tersaji dalam Peta Pola Ruang berikut:

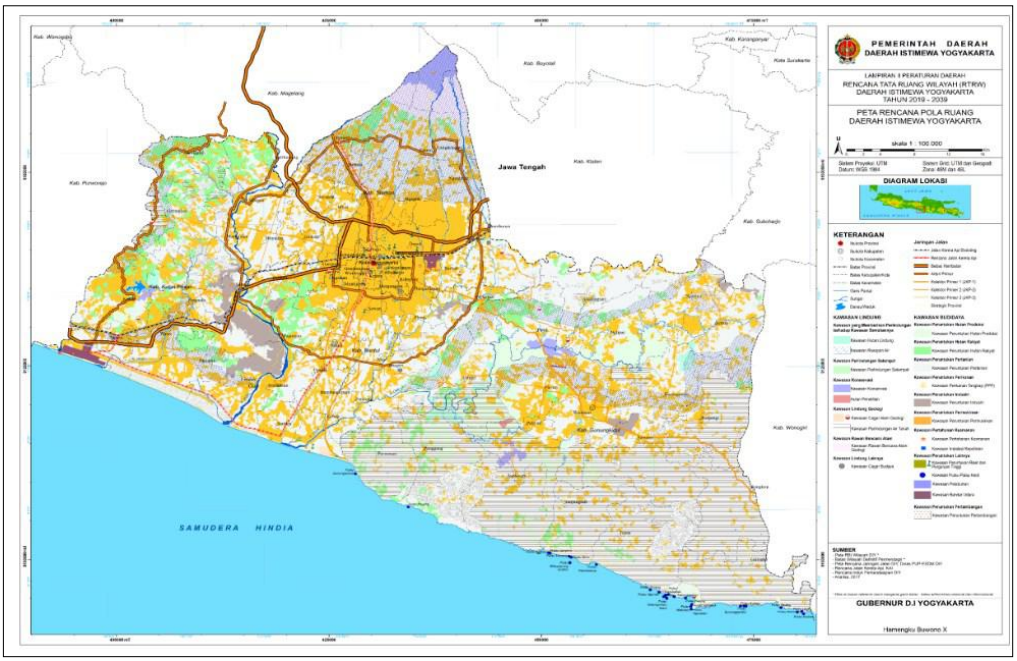

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-12 Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 – 2039

2.1.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039, meliputi:

a. Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat di Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan

Kapanewon Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) ha.

b. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek; Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semin, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Wonosari; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Pakem, Kapanewon Prambanan, dan Kapanewon Turi; dan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Temon.

c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Tepus.

d. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo.

e. Kawasan rawan bencana banjir di Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Galur, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Wates; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping,

Kapanewon Kalasan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Tempel; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Panggang, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari.

f. Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, di Kabupaten Bantul; Kapanewon Galur, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Lendah, Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Sleman, di Kabupaten Sleman.

g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di Kabupaten Sleman yakni Kapanewon Prambanan; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Pengasih, Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Samigaluh; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Wonosari, dan Kapanewon Playen.

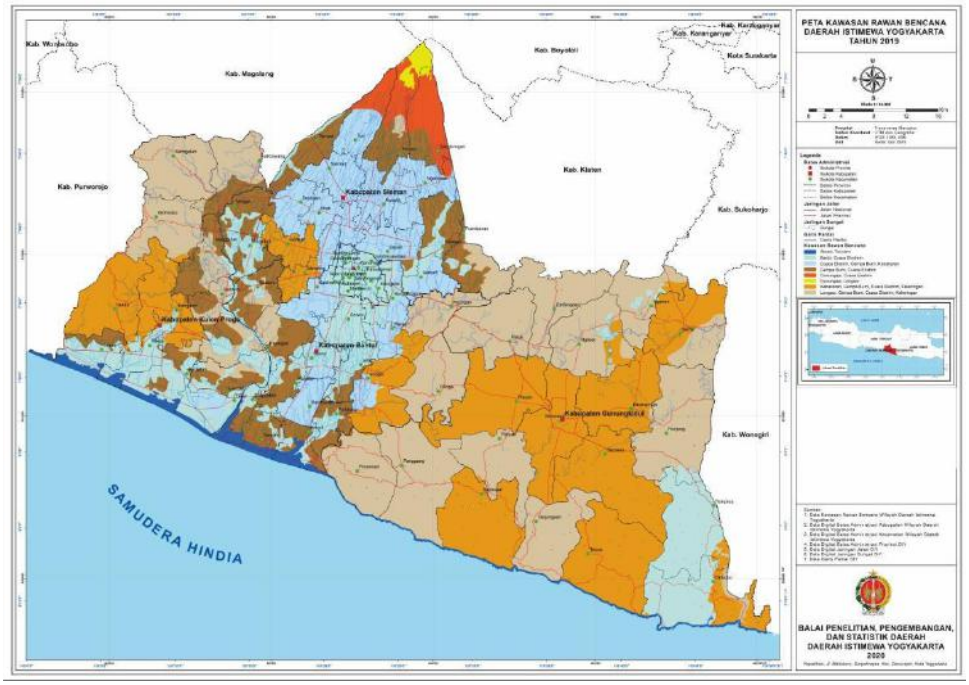

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana DIY

Tabel 2-9 Kawasan Rawan Bencana di Wilayah DIY Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Kawasan Rawan Bencana (KRB)	Luas KRB (Ha) pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
1	KRB Banjir	n/a	n/a	138.546,00	154.155,32	154.155,32
2	KRB Banjir Bandang	n/a	n/a	2.347,00	0,00	0,00
3	KRB Gelombang Ekstrim dan Abrasi	n/a	n/a	119.781,00	2.170,19	2.170,19
4	KRB Kekeringan	n/a	n/a	323.522,00	313.314,97	313.314,97
5	KRB Letusan Gunungapi	n/a	n/a	9.302,00	9.370,56	9.370,56
6	KRB Dampak Cuaca Ekstrim	n/a	n/a	2.155,00	128.300,57	128.300,57
7	KRB Tanah Longsor	n/a	n/a	42.132,00	42.434,54	42.434,54
8	KRB Terdampak Gempa Bumi	n/a	n/a	323.071,00	182.115,00	182.115,00
9	KRB Terdampak Tsunami	n/a	n/a	7.317,00	7.246,46	7.246,46

No	Jenis Kawasan Rawan Bencana (KRB)	Luas KRB (Ha) pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
10	KRB Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	n/a	n/a	36,00	36,00	36,00
11	KRB Terdampak Kegagalan Teknologi	n/a	n/a	161,00	146,63	146,63
12	KRB Kebakaran Hutan dan Lahan	n/a	n/a	323.363,00	220.853,54	220.853,54

*Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022, *) data sementara*

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko bencana dianalisis melibatkan variabel Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan, dan Tingkat Kapasitas yang ada pada suatu daerah. Tingkat Bahaya (*hazard*) diperoleh diantaranya dengan menghitung parameter fisik suatu kawasan seperti topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, ketebalan tanah, jenis batuan dasar, penutup lahan, dan parameter lain yang terkait dengan suatu jenis bahaya tertentu. Penilaian Tingkat bahaya juga memperhatikan catatan sejarah kejadian bencana masa lalu pada daerah tersebut. Rincian Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan, Tingkat Kapasitas, dan Tingkat Risiko Bencana di DIY, seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2-10 Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2021

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan			Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
			Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan Lingkungan		
1.	Tanah Longsor	RENDAH	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	RENDAH
2.	Tsunami	RENDAH	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	RENDAH
3.	Gelombang Pasang dan Abrasi	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	RENDAH
4.	Banjir	RENDAH	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5.	Gempa Bumi	SEDANG	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	TINGGI
6.	Kekeringan	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI
7.	Erupsi Gunung Api	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan			Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
			Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan Lingkungan		
8.	Banjir Bandang	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH
9.	Cuaca Ekstrim	SEDANG	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	SEDANG
10.	Kegagalan Teknologi	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
11.	Epidemi dan Wabah Penyakit	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG
12.	Pandemi Covid-19	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG
13.	Liquifaksi	RENDAH	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	RENDAH
14.	Kebakaran Hutan dan Lahan	RENDAH	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH
15.	Kebaran Gedung dan Permukiman	RENDAH	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	RENDAH
16.	Konflik Sosial	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber: IRBI DIY, 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tingkat Bahaya di DIY berada terdistribusi pada rentang kelas rendah dan sedang. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu Tanah Longsor, Tsunami, Gelombang Pasang, Banjir, Erupsi Gunung Api, Banjir Bandang, kegagalan teknologi, likuifaksi, dan kebakaran. Bencana yang memiliki tingkat bahaya sedang yaitu gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kebakaran gedung. Penentuan tingkat bahaya tersebut diperoleh berdasarkan luas kawasan terpapar bahaya, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan nonalam, selama ini masih relatif kecil.

Tabel 2-11 Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	142,24	140,92	125,15	124,15	119,56 *

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022, BNPB;IRBI 2020, BNPB; B-002/BNPB/PERB/SS.01.02/01/2023

Selama tahun 2018 -2022, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah longsor, banjir, angin ribut dan kebakaran. Pada tahun 2018 sebanyak 216 kejadian longsor terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 kejadian bencana yang sering terjadi masing-masing angin ribut 147 kali dan longsor 506 kali kejadian. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan korban meninggal akibat bencana karena terjadinya pandemi Covid 19. Pada tahun 2022 menunjukkan korban meninggal 0 dan luka luka 10 orang.

Tabel 2-12 Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Bencana Alam	Tahun					Satuan	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Longsor	216	506	475	351	617	kali/tahun	BPBD
2	Banjir	12	12	15	16	70	kali/tahun	BPBD
3	Angin Ribut	147	168	167	156	165	kali/tahun	BPBD
4	Kebakaran Rumah dan Pemukiman	270	542	255	187	106	kali/tahun	BPBD
5	Gempa Bumi	124	122	135	245	756	kali/tahun	BPBD
6	Gunung Meletus	12	4	9	2	2	kali/tahun	BPBD
7	Tsunami	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kali/tahun	BPBD
8	Badai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kali/tahun	BPBD
9	Kebakaran Hutan	0	0	0	0	1	kali/tahun	BPBD
10	Kekeringan	1	1	1	0	0	kali/tahun	BPBD

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022

Tabel 2-13 Korban Bencana DIY Tahun 2018 – 2022

Jumlah Korban Bencana	2018	2019	2020	2021	2022
Meninggal	36	13	260	5.269	0*)
Luka-Luka	109	50	12.156	156.987	10*)
Hilang	n/a	0	0	0	0
Menderita	n/a	0	0	0	310
Mengungsi	n/a	29	235	118	593

*Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022 *) angka sementara*

Aspek Demografi

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2018 sebanyak 3.802.872 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir, *sex ratio* penduduk DIY selalu pada kisaran 97 – 98, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan angka *sex ratio* penduduk DIY tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-14 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2018 – 2022

Rincian	2018	2019	2020	2021	2022
Total	3.802.872,00	3.842.932,00	3.668.719,00	3.712.896,00*	4.021.816,00*
Laki-Laki	1.881.478,00	1.901.735,00	1.817.927,00	1.838.821,00	1.984.154,00
Perempuan	1.921.394,00	1.941.197,00	1.850.792,00	1.874.075,00	2.037.662,00
Sex Ratio	97,92	97,97	98,22	98,12	97,37

*Sumber: BPS Provinsi DIY, dalam Aplikasi Jogjadataku 2022 *) angka sementara*

Persebaran penduduk antar wilayah DIY tidak merata. Kabupaten Sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.136.474 jiwa atau 30,61% dari total penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk paling banyak kedua yaitu sebanyak 998.647 jiwa atau sekitar

26,90%. Sementara itu, wilayah yang berpenduduk tersedikit adalah Kota Yogyakarta sebanyak 376.324 jiwa (10,14%).

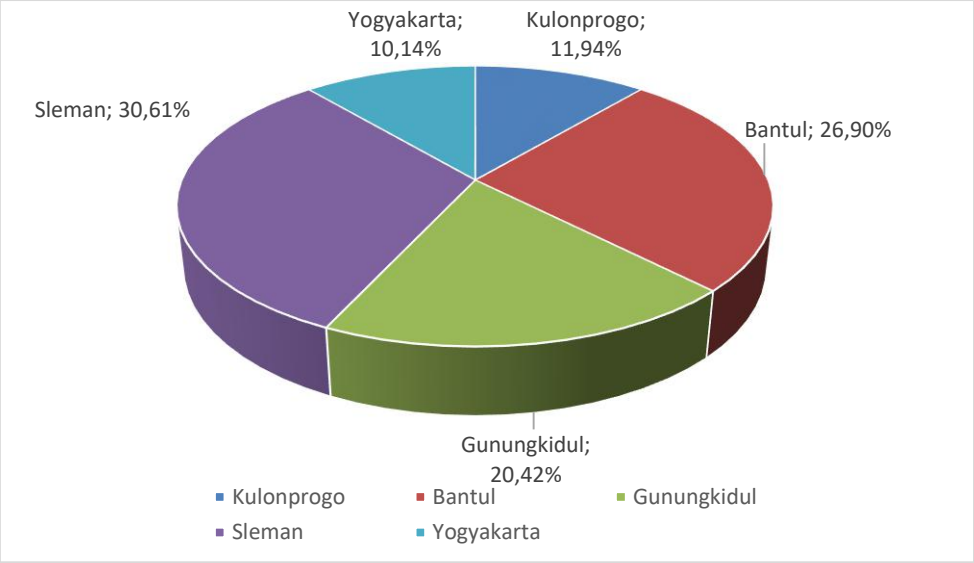

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (Data Diolah)

Gambar 2-14 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY mempunyai usia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun atau sekitar 8,20% dari seluruh penduduk dan usia 30-34 tahun sekitar 7,57%. Dengan kondisi sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia yang berusia produktif di DIY cukup besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut.

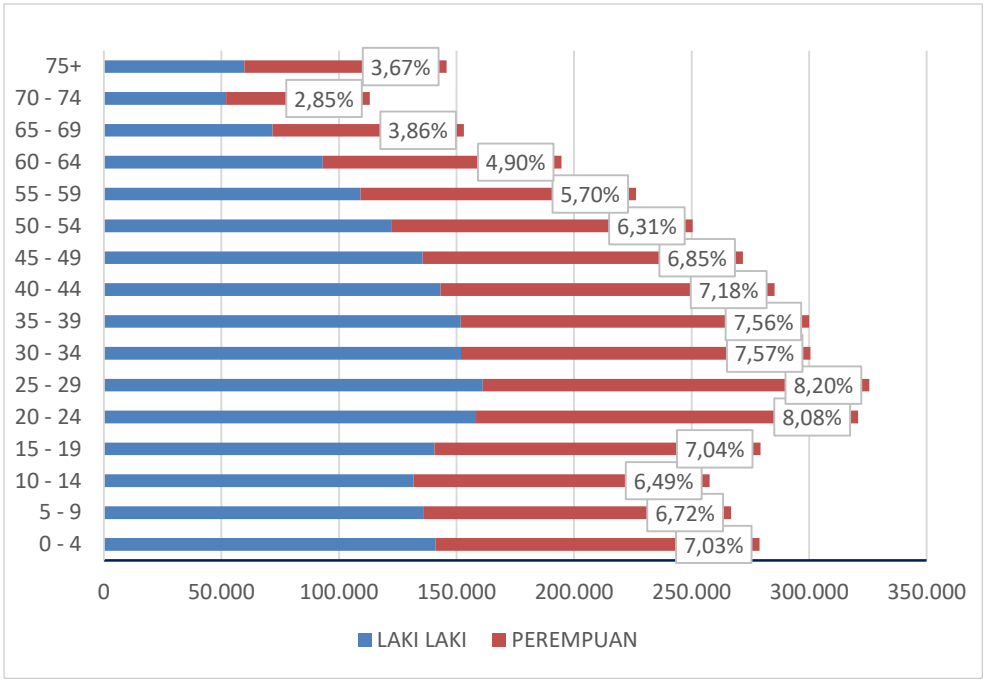

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-15 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imgrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2021), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2020 sebesar 1,61%, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kota Yogyakarta sebesar 0,98% dan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,11%.

Tabel 2-15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 - 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Kulon Progo	1,09%	1,11%	1,06%	1,05%	0,99%*	2,11%*
Kabupaten Bantul	1,24%	1,19%	1,15%	1,16%	1,14%*	1,75%*
Kabupaten Gunungkidul	1,01%	0,95%	0,94%	0,89%	0,88%*	1,97%*
Kabupaten Sleman	1,11%	1,10%	1,11%	1,07%	1,06%*	1,27%*
Kota Yogyakarta	1,22%	1,19%	1,13%	1,04%	0,93%*	0,98%*
DI Yogyakarta	**1,13%**	**1,11%**	**1,08%**	**1,15%**	**1,02%***	**1,61%***

*Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022 Keterangan: *) Angka Proyeksi*

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2021 mencapai 1.165 jiwa per Km2. Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut : (DIY Dalam Angka 2022)

1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.579 jiwa per Km^2,
2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.977 jiwa per Km^2,
3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1970 jiwa per Km^2,
4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 756 jiwa per Km^2, dan
5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 510 jiwa per Km^2.

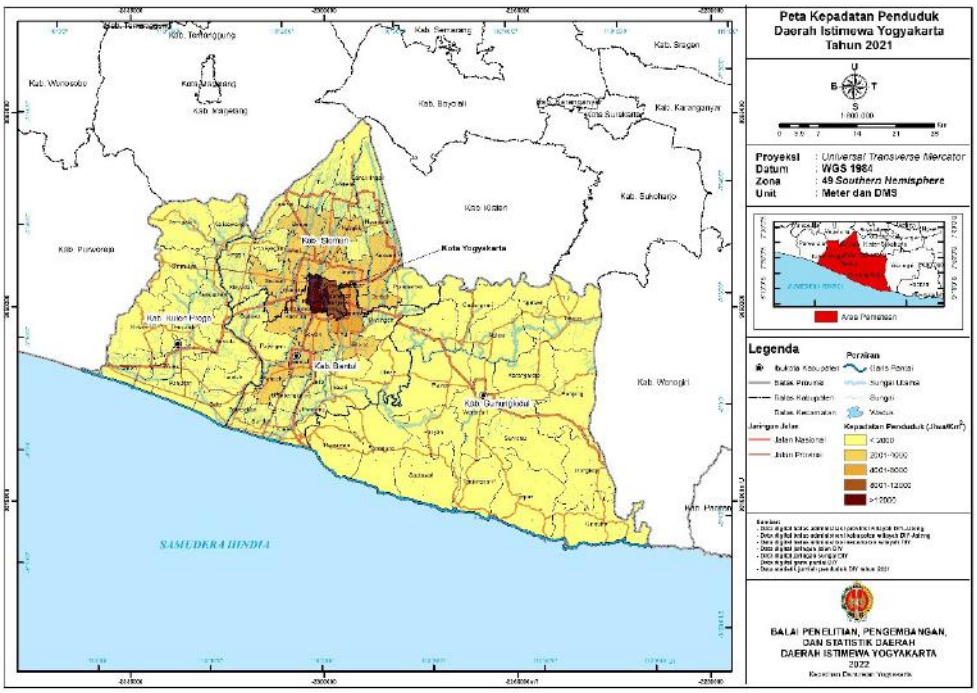

Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2022

Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk DIY

Tabel 2-16 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	1.193,69	1.206,27	1.151,58	1.165,00*	1.262,42
Kulon Progo	726,21	733,83	744,00	756,00 *	764,36
Bantul	1.986,17	2.009,28	1.940,00	1.970,00*	2.099,80
Gunungkidul	495,64	500,03	522,00	510,00 *	522,91
Sleman	2.099,29	2.121,78	1.959,00	1.977,00	2.231,66
Yogyakarta	13.153,78	13.290,43	11.495,00	11.579,00	13.842,77

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sejahtera adalah *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita. Tingkat kemiskinan datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara, indikator pendapatan per kapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukan besarnya rata- rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

2.2.1.1 Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan DIY per September 2022 sebesar 11,49 persen menurun 0,42 persen dibandingkan September 2021, namun naik 0,15 persen dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 463,63 ribu orang dan naik 88,7 ribu orang terhadap Maret 2022. Apabila dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 turun 51,51 ribu orang dan angka ini masih berada di atas angka nasional kemiskinan Indonesia per September 2022 sebesar 9,57%.

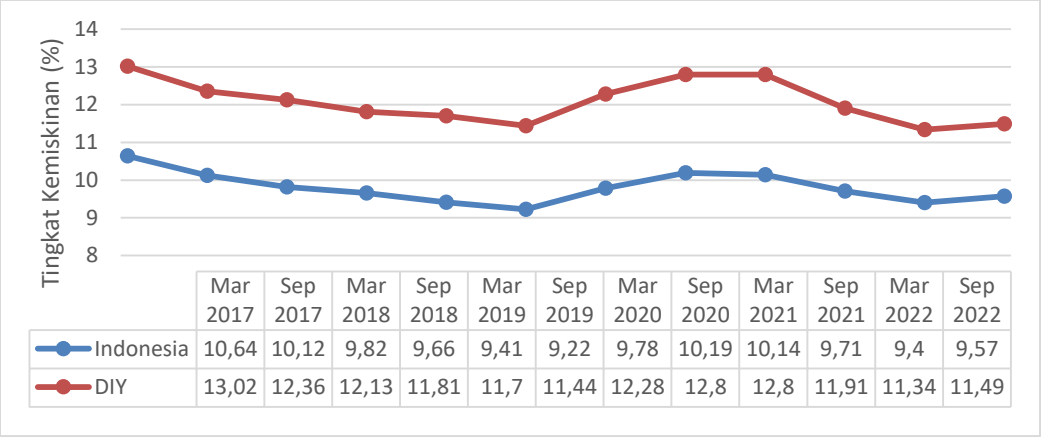

	Mar 2017	Sep 2017	Mar 2018	Sep 2018	Mar 2019	Sep 2019	Mar 2020	Sep 2020	Mar 2021	Sep 2021	Mar 2022	Sep 2022
Indonesia	10,64	10,12	9,82	9,66	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9,4	9,57
DIY	13,02	12,36	12,13	11,81	11,7	11,44	12,28	12,8	12,8	11,91	11,34	11,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015–Maret 2022

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

Tabel 2-17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2022 (%)

Nama Wilayah	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)	2022 (Maret)
DIY	**12,13**	**11,7**	**12,8**	**12,8**	**11,34**
Kulon Progo	18,30	17,39	18,01	18,39	18
Bantul	13,43	12,92	13,5	13,5	10,56
Gunungkidul	17,12	16,61	17,07	17,69	17,69
Sleman	7,65	7,41	8,12	8,12	7,74
Kota Yogyakarta	6,98	6,84	7,27	7,27	6,62

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan di mana tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian, yaitu pertama mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah, kedua menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan, memberikan memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada kalurahan-kalurahan dan kampung-kampung paling miskin, ketiga memperbaiki kualitas kegiatan dan *cost effectiveness*, keempat memberikan ruang partisipasi masyarakat serta memberikan semangat. Pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dari pengambilan keputusan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan dan mendayagunakan potensi, sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Selain hal tersebut, Pemerintah juga perlu melaksanakan program penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

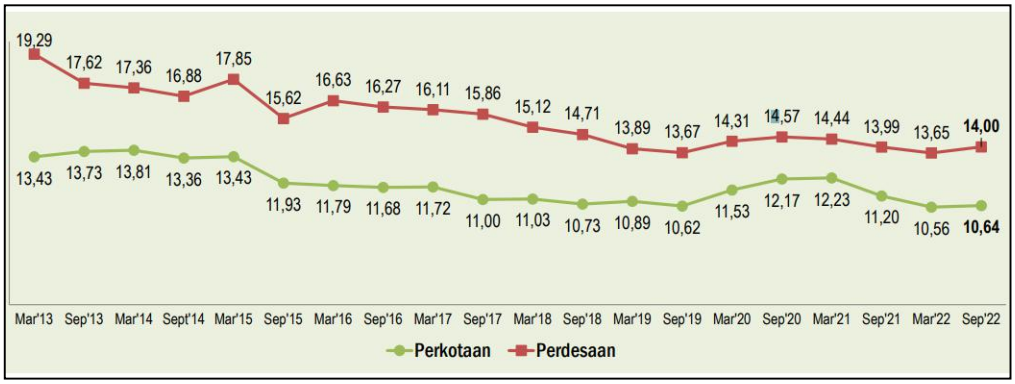

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-18 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di DIY Maret 2013 – September 2022

Pada September 2022 persentase penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan

sebesar 3,36 persen poin. Persentase penduduk miskin periode Maret 2022 - September 2022 di perkotaan naik sebanyak 0,08 persen poin dan di pedesaan naik sebanyak 0,35 persen poin.

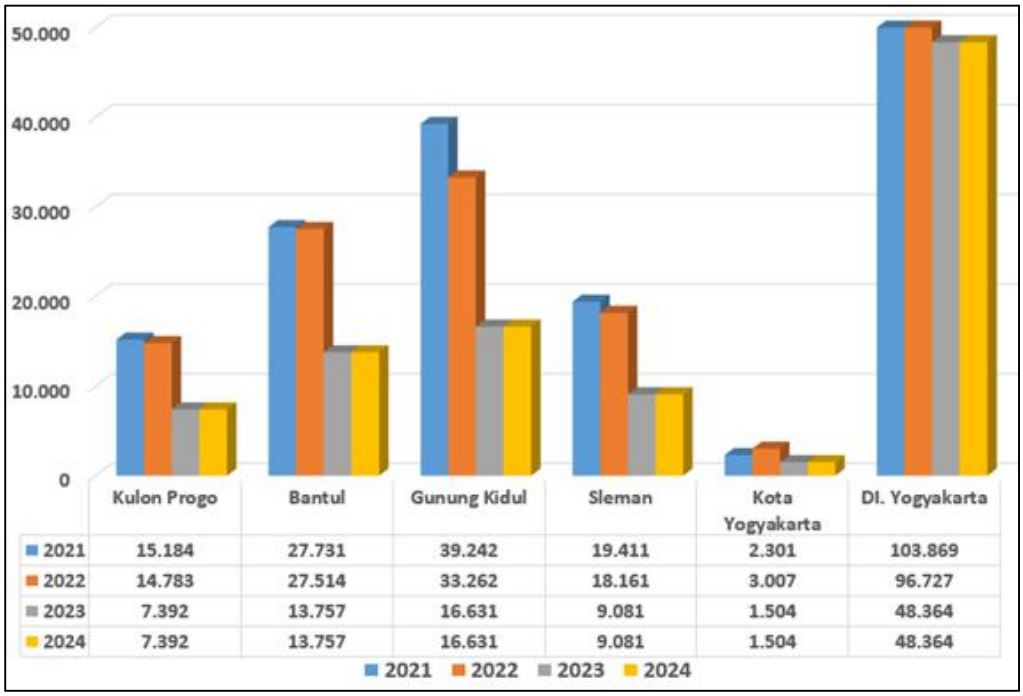

Sumber: Sebermas Bappeda DIY 2022

Gambar 2-19 Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem 2021-2024

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh otoritas kependudukan dan catatan sipil (DUKCAPIL) serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Data P3KE untuk melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program, yaitu yang *exclusion error*, demi menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program bantuan.

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS diperoleh dari: a. rukun tetangga/rukun warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang. Pendaftaran fakir miskin kedalam DTKS tidak otomatis menjadikan nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan

Berdasarkan penilaian, terdapat 15 Kapanewonan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di DIY. Lokasi kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewon tersebut beserta upaya penanggulangan kemiskinannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2-18 Penanggulangan Kemiskinan di 15 Kapanewonan DIY

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
Gunungkidul	Saptosari	- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Sosialisasi Generasi Berencana - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
	Playen	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Gedangsari	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		- Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Nglipar	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Ponjong	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Tepus	- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih - Pengembangan Wisata berbasis potensi lokal
	Karangmojo	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak (putus) sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
Kulon Progo	Sentolo	- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
	Kokap	- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Mitigasi bencana
	Pengasih	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
	Samigaluh	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan - Mitigasi bencana dan konservasi alam
Bantul	Imogiri	- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi - Mitigasi bencana dan konservasi alam
Sleman	Tempel	- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
	Seyegan	- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		- Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
	Prambanan	- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal

Sumber: Surat Gubernur DIY, Nomor 401/0161

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya Rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok. September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Tabel 2-19 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 – 2022 (September 2017- September 2022)

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Pedesaan
September 2017	413.631	352.861
Maret 2018	426.580	366.256
September 2018	432.018	369.606
Maret 2019	452.628	378.873
September 2019	472.666	392.748
Maret 2020	487.173	403.173

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Pedesaan
September 2020	488.461	404.035
Maret 2021	507.007	414.240
September 2021	358.285	438.412
Maret 2022	543.821	455.583
September 2022	573,915	480,767

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya Rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel 2-20 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2022 (%)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Makanan			
Beras	19,95	Beras	23,56
Rokok kretek filter	5,99	Telur ayam ras	3,76
Daging ayam ras	5,76	Daging ayam ras	3,24
Telur ayam ras	4,66	Cabe rawit	2,76
Tempe	2,41	Kue basah	2,69
Non Makanan			
Perumahan	8,52	Perumahan	7,27
Bensin	6,10	Bensin	5,69

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Pendidikan	1,99	Kesehatan	1,69
Listrik	1,82	Kayu bakar	1,54
Perlengkapan mandi	1,41	Listrik	1,35

Lima Komoditas Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, September 2022 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Indikator kemiskinan yang lain dan harus diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Pada September 2021, indeks P1 tercatat sebesar 2,062. Kemudian, pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1,53. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk dari pada di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama. . Pada September 2021 indeks P2 tercatat sebesar 0,532. Satu semester kemudian, pada Maret 2022, indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,508. Selanjutnya pada September 2022, nilai indeks P2 kembali turun menjadi 0,28. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi.

Pada Maret 2020, indeks P1 tercatat sebesar 1,939 Pada September 2020, nilai indeks P1 naik menjadi 2,079. Pada Maret 2021 indeks P1 kembali meningkat menjadi 2,42 danmulai menurun pada September 2021 menjadi 2,062. Kemudian, pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022, penurunan indeks P1 kembali terjadi menjadi sebesar 1,53. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan. Dengan semakin bertambahnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya. Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Adapun indeks P1 di pedesaan mulai memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan Berbeda dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun.

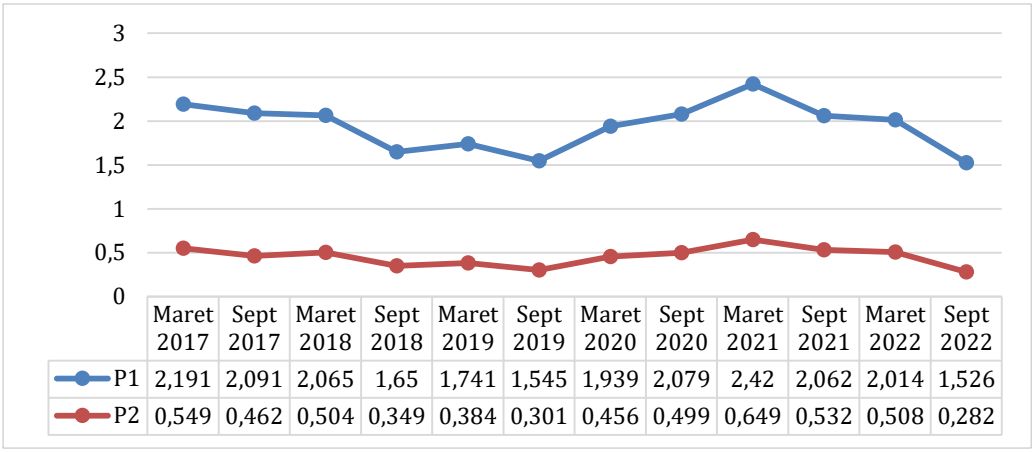

	Maret 2017	Sept 2017	Maret 2018	Sept 2018	Maret 2019	Sept 2019	Maret 2020	Sept 2020	Maret 2021	Sept 2021	Maret 2022	Sept 2022
P1	2,191	2,091	2,065	1,65	1,741	1,545	1,939	2,079	2,42	2,062	2,014	1,526
P2	0,549	0,462	0,504	0,349	0,384	0,301	0,456	0,499	0,649	0,532	0,508	0,282

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-20 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022 (Maret 2017-September 2022)

2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

PDRB DIY selama kurun waktu 2017-2022 menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp119,128 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp138,389 triliun atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp10,980 triliun dan Rp16,321 triliun dengan nilai PDRBnya sebesar 149.369 triliun dan Rp165.690 triliun. Kinerja perekonmian DIY pada tahun 2022 ini didukung oleh semua lapangan usaha yang tumbuh positif bahkan tiga diantaranya mencapai dua digit. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 18,26%, disusul jasa lainnya sebesar 15,04% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,40%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,33%.

Tabel 2-21 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.933.401	13.237.380	14.095.797	14.521.691	16.517.991
Pertambangan dan Penggalian	615.943	713.919	677.483	668.454	713.773
Industri Pengolahan	15.636.603	18.086.378	17755279	18.458.784	19.759.709
Pengadaan Listrik dan Gas	173.689	202.276	198.151	203.054	223.577
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	121.272	139.653	141.444	153.139	162.572
Konstruksi	11.303.630	11.303.630	13.325.553	15.147.860	16.440.153
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.241.621	11.958.914	11.639.485	12.169.431	13.683.701
Transportasi dan Pergudangan	6.783.681	7.960.610	6.327.777	6.609.464	8.477.527
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.304.099	14.631.663	12.234.070	13.689.597	16.379.788
Informasi dan Komunikasi	9.789.586	11.262.725	13.455.358	16.015.667	17.073.157
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.640.944	564.5948	558.2173	5.954.918	6.830.313
Real Estate	8.382.668	9.871.072	10.220.305	10.489.736	11.179.576
Jasa Perusahaan	1.207.970	1.437.497	1.248.376	1.379.630	1.548.813
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.213.350	11.556.325	11.679.911	12.056.096	12.932.982
Jasa Pendidikan	9.711.308	11.472.125	12.276.381	13.234.223	13.913.749
Jasa Kesehatan & KegiatanSosial	3.004.112	3.518.720	4.396.362	4.729.131	5.131.071
Jasa Lainnya	3.109.029	3.655.439	3.134.839	3.888.295	4.721.757

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB	**129.818.357**	**141.068.183**	**138.388.752**	**149.369.169**	**165.690.210**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY ADHB dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2019. Selama periode 2017-2019, PDRB per kapita ADHB bertambah rata-rata sebesar 7,49 %. Nilai PDRB per kapita tahun 2017 adalah Rp31.665 juta kemudian meningkat menjadi Rp36,708 juta di tahun 2019. Pada tahun 2020, PDRB per kapita turun menjadi Rp35,646 juta dan tahun 2021 menjadi Rp38,808 juta.

Tabel 2-22 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	119.128.718	129.818.358	141.068.183	138.388.752	149.369.169
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.762.167	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662
PDRB per kapita ADH Berlaku (juta rupiah)	31,665	34,137	36,708	35,646	38,808
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH Berlaku (%)	7,14	7,81	7,53	-2,89	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010. Nilai riil PDRB per kapita periode 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata sebesar 4,378 %. PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp38,808 juta dari Rp35,646 juta di tahun 2020. PDRB per kapita sangat

dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel 2-23 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
PDRB ADH konstan 2010 (juta rupiah)	98.300.243	104.487.543	101.679.600	107.308.555	41.511.524
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662	4.020.806
PDRB per kapita ADH konstan 2010 (juta rupiah)	25,849	27,190	26.191	27,462	28.029
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH konstan (%)	5,36	5,18	-3,67	4,85	5,82

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Tabel 2-24 Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2017-2022

Sektor Dominan di DIY	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK (Juta Rp)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.930.315	8.101.233	8.184.189	8.532.140	8.584.395	9.076.682
Industri Pengolahan	11.878.962	12.486.855	13.200.727	12.624.114	12.670.357	12.893.390
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.788.711	9.383.603	10.217.177	8.489.706	9.130.595	10.263.112
Laju Pertumbuhan per Sektor (%)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,93	2,16	1,02	4,25	0,61	5,73
Industri Pengolahan	5,74	5,12	5,72	-4,37	0,37	1,76

Sektor Dominan di DIY	Tahun					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,21	6,77	8,88	-16,91	7,55	12,40
Kontribusi per Sektor (%)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,59	8,26	7,83	8,39	8,00	8,04
Industri Pengolahan	12,87	12,74	12,63	12,42	11,81	11,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,52	9,57	9,78	8,35	8,51	9,09
Kontribusi Tiga Sektor Dominan (%)	**30,98**	**30,58**	**30,25**	**29,16**	**28,32**	**28,55**
Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan (%)	**4,80**	**4,80**	**5,44**	**-6,19**	**2,49**	**6,08**

Sumber: BPS, 2023 diolah

Dari sisi Lapangan Usaha dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan tiga sektor utama terhadap perekonomian DIY. Kegita sektor tersebut selama 2017-2022 berkontribusi rata-rata sebesar 29,64% terhadap keseluruhan PDRB DIY. Pada tahun 2022, kontribusi ketiga sektor tersebut sebesar 28,55% terhadap PDRB. Pertumbuhan ketiga sektor tersebut relatif cenderung meningkat, meskipun mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ketiga sektor tersebut mulai membaik, dan mencapai 6,08% pada tahun 2022.

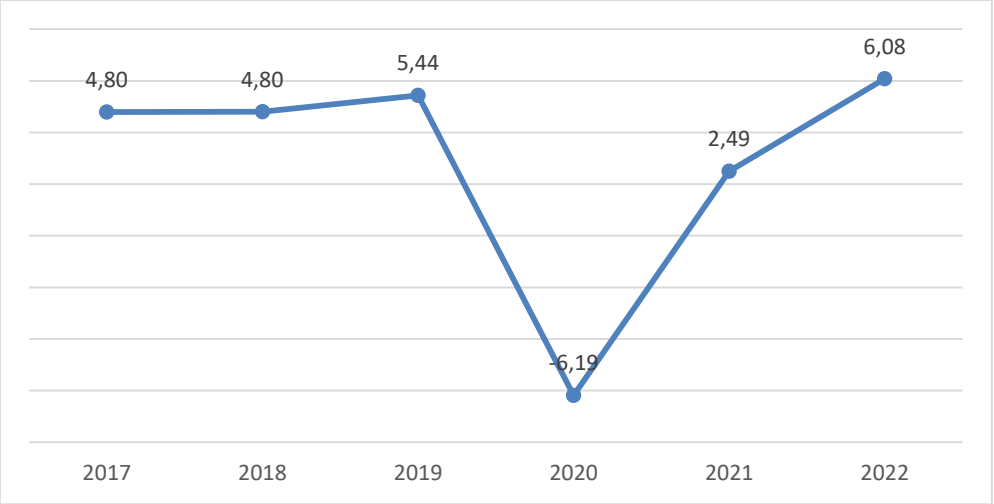

Sumber: BPS, 2023 diolah

Gambar 2-21 Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2017-2022

2.2.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah

Gambar di bawah menunjukkan perkembangan Rasio Gini di DIY dibandingkan dengan kondisi nasional. Selama periode Maret 2017 – September 2021 terlihat bahwa angka Rasio Gini di DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Selama kurun waktu September 2019 sampai dengan September 2021 mengalami peningkatan yang berturut-turut dan kondisinya berada di atas rata-rata nasional yang berarti tingkat kesenjangan penduduk di DIY lebih besar dibandingkan kesenjangan penduduk secara nasional.

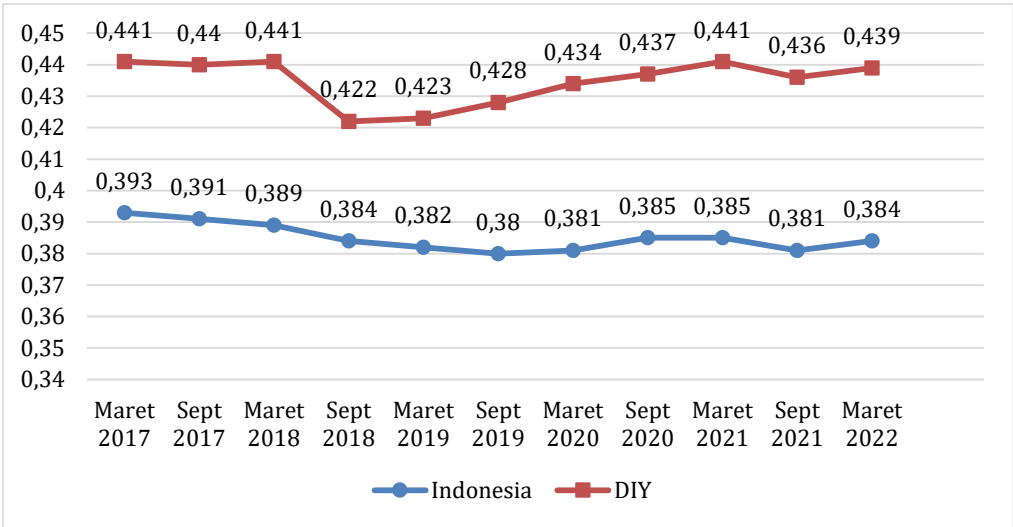

Sumber: BPS-Statistik Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-22 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 – Maret 2022

Indeks Williamson pada periode 2017-2021, pada Gambar di bawah, menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 0,465 di tahun 2017 menjadi 0,4504 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin menurun atau kesenjangan pendapatan per kapita antar wilayah semakin mengecil.

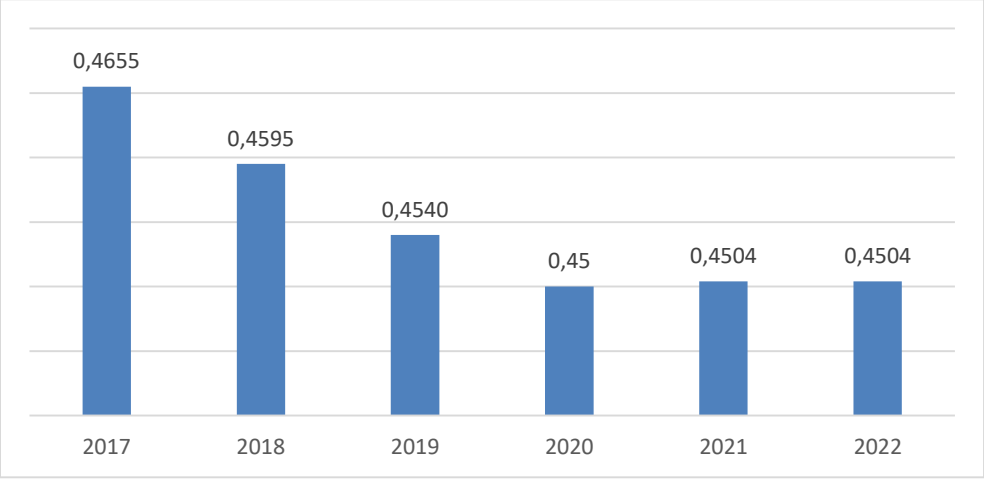

Sumber: BPS-Statistik Provinsi DIY, 2022
Keterangan: Tahun 2022 hanya sampai bulan maret 2022

Gambar 2-23 Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – Maret 2022

Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2020 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Tabel 2-25 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021 (juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	9.060.465	10.312.524	11.995.771	11.654.320	12.443.064
Bantul	22.611.707	24.443.274	26.345.477	26.161.313	28.090.839
Gunungkidul	16.199.842	17.527.716	18.844.736	18.972.196	20.418.147
Sleman	40.063.434	43.803.585	47.580.784	45.833.487	49.500.004
Kota	31.309.045	33.787.580	36.492.640	35.757.539	38.416.518
D I Y	119.128.719	129.818.358	141.047.688	138.306.833	149.369.169

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Ketimpangan pembangunan antara wilayah di DIY disebabkan oleh terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Akibat kesenjangan kapasitas perekonomian, kontribusi PDRB ADHK di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang lebih 50% dari total PDRB DIY, sementara kontribusi tiga daerah lainnya secara rata-rata masih di bawah 40% pada lima tahun terakhir. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,4% dari keseluruhan *output* DIY selama periode 2018 - 2022.

Tabel 2-26 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun 2017-2021

Kabupaten dan Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulonprogo	7.56	7.88	8.40	8.27	8.21
Bantul	18.65	18.51	18.33	18.53	18.49
Gunungkidul	13.31	13.17	13.02	13.29	13.29
Sleman	33.75	33.79	33.77	33.34	33.47
Yogyakarta	26.84	26.64	26.50	26.57	26.55
Total 3 Wilayah (Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul	39.51	39.56	39.75	40.09	39.99

Sumber: BPS Provinsi DIY tahun 2023

2.1.1.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 2-27 Laju Inflasi DIY Tahun 2017-2022

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	0,55	0,42	0,27	0,54	0,59
Februari	-0,05	-0,08	0,40	0,14	0,05
Maret	0,15	0,26	0,07	0,08	0,77
April	0,10	0,46	-0,24	0,01	1,14
Mei	0,08	0,42	0,22	0,07	0,75
Juni	0,46	0,25	0,08	0,05	0,52
Juli	0,56	0,05	-0,08	0,11	0,47

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Agustus	-0,26	0,07	-0,04	0,05	-0.12
September	-0,11	-0,07	0,03	-0,17	1,05
Oktober	0,13	0,18	0,08	0,24	0.11
November	0,46	0,31	0,13	0,45	6,54
Desember	0,57	0,46	0,48	0,71	6,57
Inflasi Tahunan	2,66	2,77	1,40	2,29	6, 49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk DIY. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Tahun 2020 Kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 1,40%. Hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan pariwisata. Sementara, pada sisi permintaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. Pada tahun 2021, digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,71% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,38%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga. Disamping itu pembatasan aktivitas melalui kebijakan PPKM di wilayah DIY sejak bulan Juli 2021 mengakibatkan penurunan produktivitas sektor-sektor ekonomi, yang berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Tingginya masyarakat yang

terpapar Covid-19 di wilayah DIY pada triwulan III juga semakin memperdalam dampak terhadap sektor ekonomi, baik dampak langsung maupun tidak langsung.

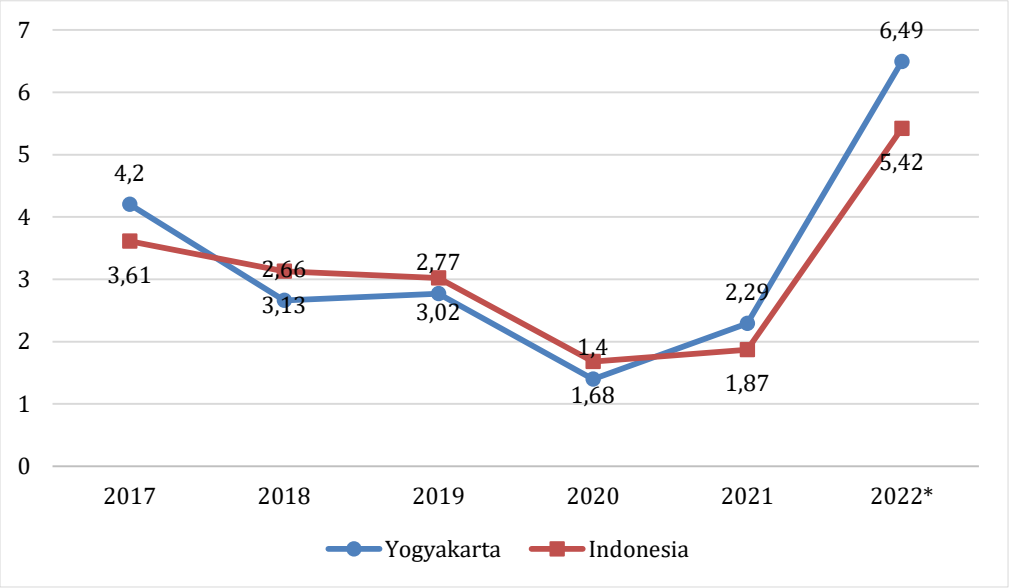

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-24 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2022

Pola inflasi tahunan Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2021 selalu dapat dikendalikan lebih rendah, daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan angka 4,2. Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta berfluktuatif dengan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2021 antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

Tabel 2-28 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	2,71	3,15	3,76
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	2,79	2,63	2,67
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,63	5,63	2,43
4	Sandang	3,84	3,04	3,84
5	Kesehatan	2,76	1,19	5,40
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	2,81	3,34	3,92
7	Transportasi & komunikasi	6,72	2,46	0,37
	Inflasi Kota Yogyakarta	4,20	2,66	2,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tabel 2-29 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2022

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2020	2021	2022*
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,10	1,01	-0,53
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,04	0,02	0,29
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,15	0,11	0,25
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,16	0,15	0,17
5	Kesehatan	0,11	0,13	-0,03
6	Transportasi	1,36	0,17	-0,58
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0	0,02	-0,10
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0	0,40	0,26
9	Pendidikan	0	1,92	2,38
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0	2,40	0,54
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,13	0,65	0,45
	Inflasi Kota Yogyakarta	1,40	2,29	0,11

**Data hingga Oktober Tahun 2022*
Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi di tahun 2021 terbesar adalah Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,59% yang disebabkan

naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,16%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,97%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03%; kelompok kesehatan sebesar 0,20%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,05%; kelompok pendidikan sebesar 0,03%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,08%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,15%. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,03%; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,10%.

Pada bulan Februari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,05% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,02%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin. Bulan Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,77% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,39%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,35%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,37%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,75 %; kelompok kesehatan sebesar 0,01 %; kelompok transportasi sebesar 0,96 %; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 %; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,07 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,87 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,49 %.

Pada bulan April 2022 mengalami inflasi sebesar 1,14% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,26%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,55%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,95%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,74%; kelompok transportasi sebesar 3,24%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,02%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,60%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,32%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok kesehatan sebesar 0,21% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11%.

Pada bulan Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,75% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,81%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,20%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar

rumah tangga sebesar 0,12%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39%; kelompok kesehatan sebesar 0,03%; kelompok transportasi sebesar 1,69%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,43%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,24%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,18%. Sementara kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan relatif stabil.

Pada bulan Juni 2022 mengalami inflasi sebesar 0,52% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,74%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,44%; kelompok kesehatan sebesar 0,31%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,10%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,57%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,84%. Sementara kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,52%, dan kelompok pendidikan relatif stabil.

Pada bulan Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,47% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,25%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31%; kelompok kesehatan sebesar 0,11%; kelompok transportasi sebesar 0,31%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,02%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,37%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,51%.

Pada bulan Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,12% yang disebabkan turunnya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,63% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%. Sementara kelompok yang mengalami kenaikan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11%; kelompok kesehatan sebesar 0,29%; kelompok transportasi sebesar 0,67%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,16%; kelompok pendidikan sebesar 1,08%; dan kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29%. Sementara kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif stabil.

Pada bulan September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm). Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok *administered prices* (AP), di tengah penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok *volatile foods* (VF). Penurunan inflasi inti terutama dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global, di tengah dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang tetap terjaga pada September 2022. Sementara itu, VF mengalami deflasi terutama dipengaruhi oleh deflasi bawang merah, aneka cabai, dan minyak goreng sejalan dengan peningkatan pasokan seiring panen raya di daerah sentra produksi dan pasokan pangan lainnya yang terjaga. Kelompok AP mengalami peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh *first round effect* dari penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Pada bulan Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,11 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin sebesar 0,17%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,26%; kelompok pendidikan sebesar 2,38%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,54%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,45%. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok makanan sebesar -0,53%; kelompok kesehatan sebesar -0,03%; kelompok transportasi sebesar -0,58%; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,10%.

Pada November 2022 mengalami inflasi sebesar 6,54 persen. Andil terbesar yang memicu terjadinya meroketnya inflasi tersebut adalah bensin dan bahan bakar rumah tangga. Pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 5,51 persen yang disebabkan bensin dan bahan bakar rumah tangga.

Secara tahunan, IHK Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan, pada Bulan Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,11% Tingkat inflasi kalender (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 5,45%.

Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteran sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu cara untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan melihat capaian IPM. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah.

Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Capaian IPM sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 dari 79,99 menjadi 79,97. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19. Namun angka IPM meningkat kembali di tahun 2021 setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, yaitu mencapai angka 80,22. Posisi IPM DIY pada tahun 2022 mencapai 80,64 (kategori sangat tinggi), tumbuh 0,52 persen dibandingkan tahun 2021. Peningkatan nilai IPM terjadi pada semua komponen penghitungan IPM.

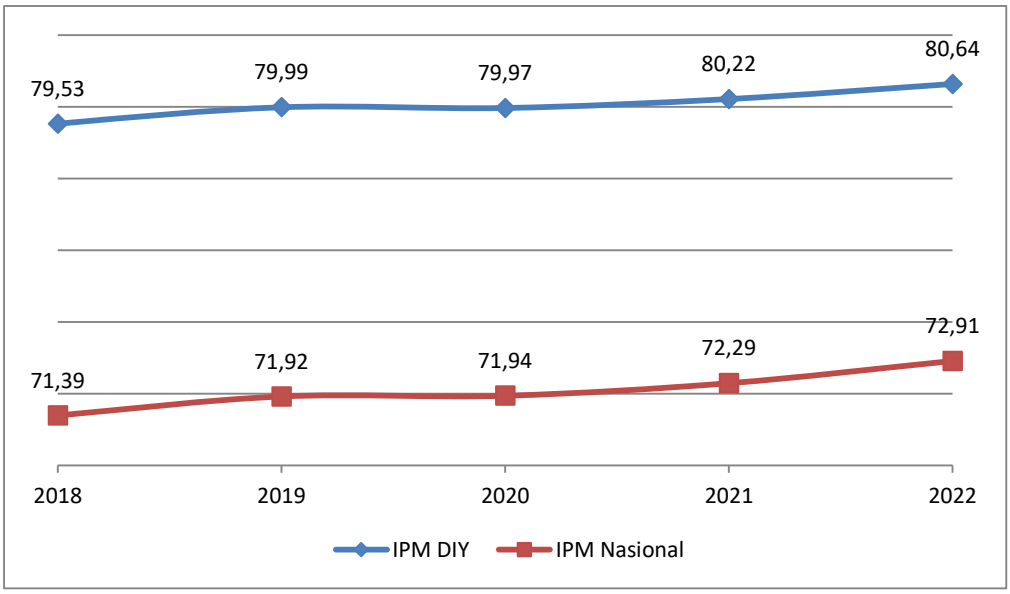

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-25 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2018 – 2021 selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2018 menunjukkan IPM nasional 71,39 sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,53. Sedangkan pada tahun 2022, IPM Nasional menunjukkan angka 72,91 dan untuk DIY mencapai 80,64. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. AHH DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. RLS juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

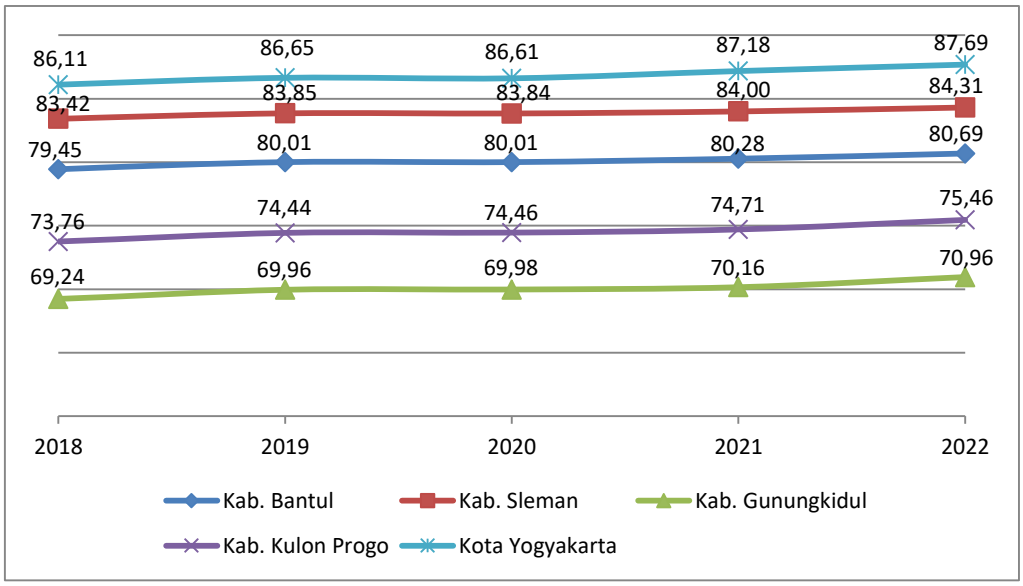

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-26 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Capaian IPM kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori "sangat tinggi" (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori "tinggi" (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori "sedang", namun pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori "tinggi".

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2022 mengindikasikan perkembangan pembangunan manusia yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY kini sudah berstatus sangat tinggi dan tinggi. Capaian IPM Kota Yogyakarta mencapai 87,69 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 84,31 dan 80,69. IPM ketiga daerah ini termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi" (IPM≥80). Capaian IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing

sebesar 75,46 dan 70,96. Masih adanya perbedaan nilai (gap) antara IPM Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul yang cukup besar, yakni 16,73 poin, menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup besar pada pembangunan manusia di DIY. Kendati demikian, ketimpangan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 17,02 poin.

2.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. AMH merupakan indikator dalam urusan pendidikan yang secara langsung merepresentasikan tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf di suatu wilayah. Perhitungan AMH dilakukan dengan melihat proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus memahami atau mengerti apa yang dibaca dan ditulis. AMH dahulu digunakan secara umum sebagai salah satu indikator penting yang merepresentasikan meratanya pendidikan di sebuah wilayah, hal tersebut dikarenakan keterampilan membaca dan menulis dianggap sebagai sebuah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu AMH perlahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah tolok ukur penting yang merepresentasikan akses, kualitas, maupun sistem pendidikan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena capaian AMH di seluruh daerah telah melonjak pesat, salah satunya dengan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan AMH yang sebelumnya masuk ke dalam indikator komposit IPM dikeluarkan dan diganti dengan HLS.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2018 hingga 2021 sebesar 0,39%. Pada tahun 2018 AMH tercatat sebesar 94,93% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 95,22%. Namun pada tahun 2022 AMH mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2021, dari angka 95,22% menjadi 95,15%.

2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2022, HLS DIY meningkat 0,01 tahun menjadi 15,65 tahun (tumbuh 0,06

persen). Pertumbuhan HLS tahun 2022 ini melambat jika dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 0,32 persen.

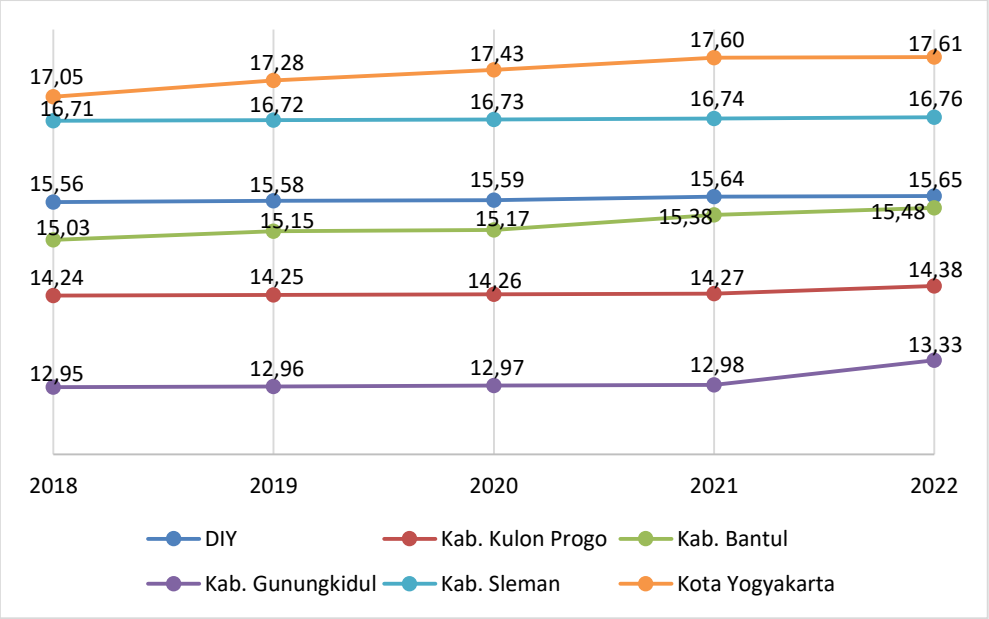

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-27 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)

Pada indikator Harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar 13,33 tahun, Kulon progo sebesar 14,38 tahun, dan Bantul sebesar 15,48 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS provinsi. HLS Sleman (16,76 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,61 tahun) sudah di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Dari data tersebut terlihat bahwa HLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas HLS DIY sedangkan HLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah HLS DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan HLS kabupaten/kota di DIY. Dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian HLS Gunungkidul terendah di antara kabupaten/ kota di DIY. Meskipun ada peningkatan HLS Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun peningkatannya kurang signifikan. Selain itu capaian HLS Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan *gap* yang signifikan dibandingkan dengan capaian HLS di kabupaten/ kota di DIY. Hal ini menunjukkan masih

adanya permasalahan yang perlu digali dan prioritas untuk diselesaikan di Kabupaten Gunungkidul.

2.2.2.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY dan kabupaten/kota di DIY tahun 2017-2021.

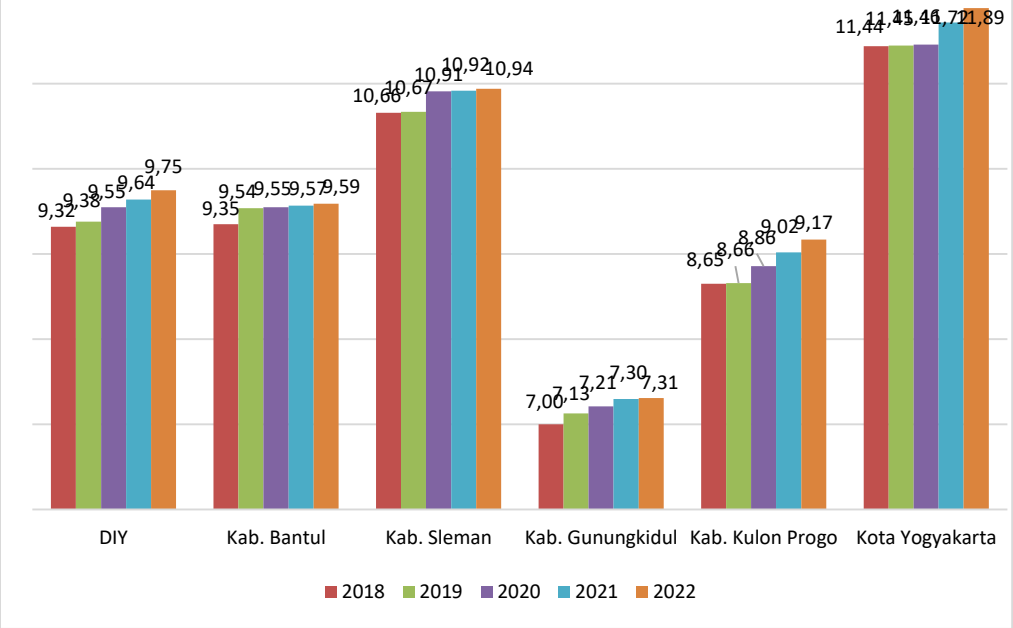

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-28 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)

Dari data tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu 2018-2022 terjadi tren peningkatan capaian RLS DIY yaitu dari 9,32 di tahun 2018 menjadi 9,75 tahun di tahun 2022. RLS DIY tahun 2022 mengalami percepatan dengan bertambah 0,11 tahun menjadi 9,75 tahun (tumbuh 1,14 persen) dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 0,94 persen. Capaian RLS kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun tertinggi adalah Kota Yogyakarta sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2022, RLS tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu mencapai 11,89 tahun. Sedangkan RLS terendah sebesar 7,31 tahun berada di Gunungkidul begitu juga Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Dari gambar di atas juga ditunjukkan adanya ketimpangan (disapritas) capaian RLS yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

2.2.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

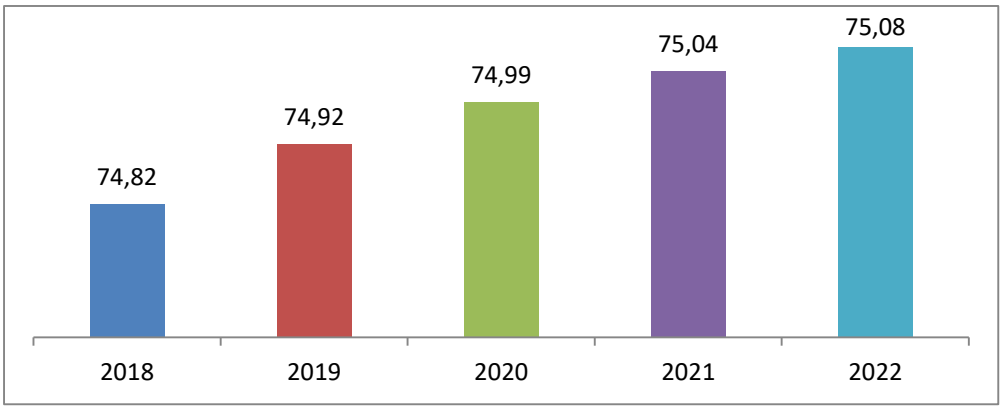

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-29 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)

Angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. AHH di DIY dalam kurun waktu selama tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan, dari awalnya 74,82 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 75,08 tahun pada tahun 2022. Dibanding tahun 2021 yang tumbuh 0,07%, capaian tahun 2022 ini mengalami perlambatan karena hanya bertambah 0,04 tahun (atau 0,48 bulan = 14,4 hari) atau tumbuh 0,05 persen. Meski demikian, AHH saat lahir di DIY masih merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Pada capaian AHH di kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, AHH di Kabupaten Kulon Progo mencapai 75,28 tahun, lebih tinggi dari capaian AHH DIY. Sedangkan capaian AHH pada tahun 2022 terendah di Kabupaten Bantul yang mencapai 73,90. AHH Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dari AHH DIY, sedangkan empat kabupaten/ kota lainnya berada di bawah AHH DIY.

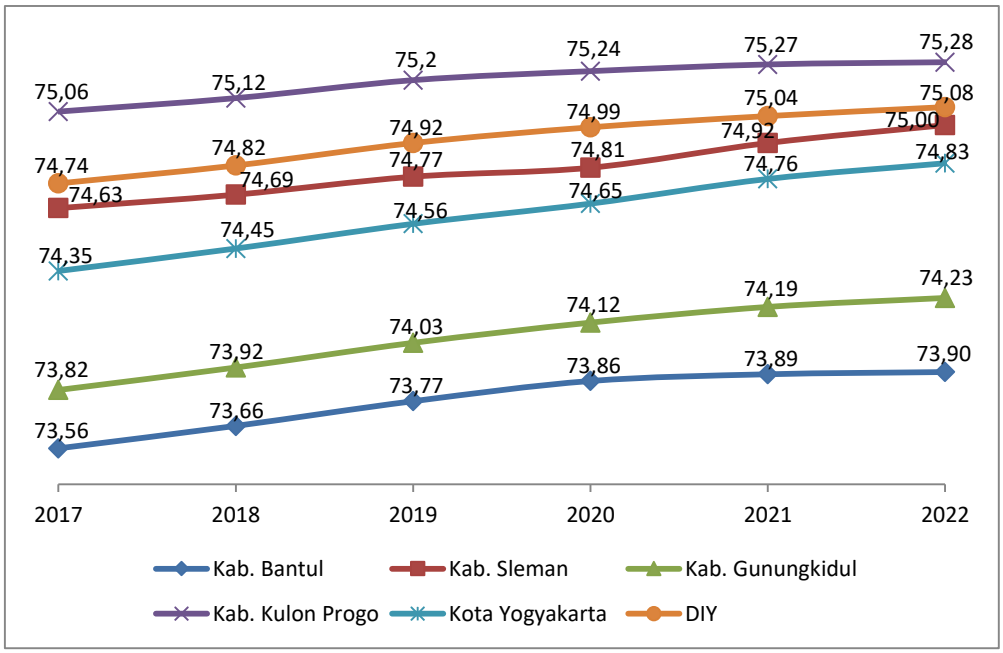

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-30 Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2022 (Tahun)

AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan dalam hal kesehatan. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

2.2.2.6 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein (KEP)

Kualitas hidup SDM salah satunya ditentukan oleh status gizi. Keadaan gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan

fisik, serta mental dan jaringan otak. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 prevalensi balita gizi kurang di DIY yaitu 8,26%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7,94% dan Kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 8,35%. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019, dari 8,35% menjadi 8,30%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2020, dari 8,30% menjadi 8,50%. Sedangkan tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun 2021, dari 8,50% menjadi 10,39%. Pada tahun 2022, jumlah balita gizi kurang sebanyak 8.290 balita (Dataku Bappeda DIY).

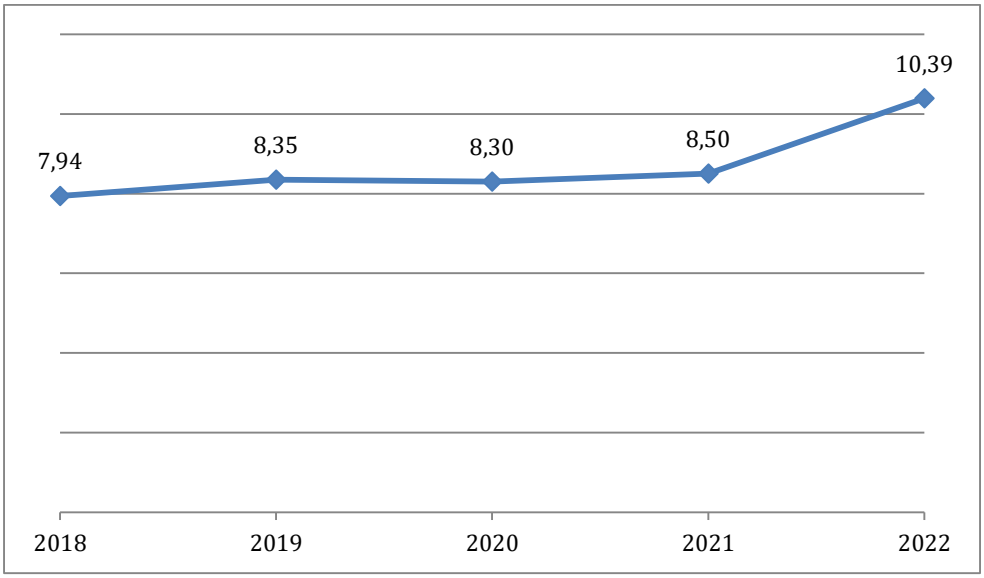

Sumber: dataku Bappeda DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar 2-31 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang DIY Tahun 2018 s.d 2022

Angka prevalensi balita gizi kurang selama empat tahun terakhir masih berkisar pada angka 7-8 yang menunjukan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi balita gizi kurang di DIY belum tercapai secara maksimal. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi kurang paling tinggi adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 10,50% dan terendah di Sleman sebesar 7,00%.

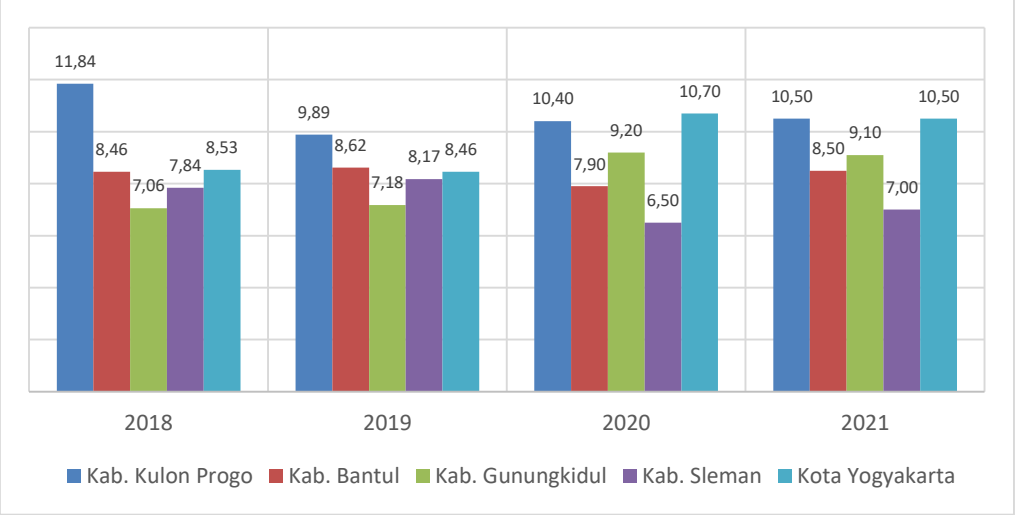

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Gambar 2-32 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein (KEP) di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021 (Persen)

2.2.2.7 Balita Gizi Buruk

Pada saat ini, DIY mengalami permasalahan ganda terkait gizi pada balita. Di satu sisi, masih banyak ditemukan balita menderita gizi kurang dan gizi buruk, namun di sisi lain, balita dengan kasus gizi lebih juga ditemukan di DIY. Jumlah balita gizi buruk di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah balita gizi buruk sebanyak 219 balita. Hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 373 balita. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 312 balita. Namun pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 320 balita.

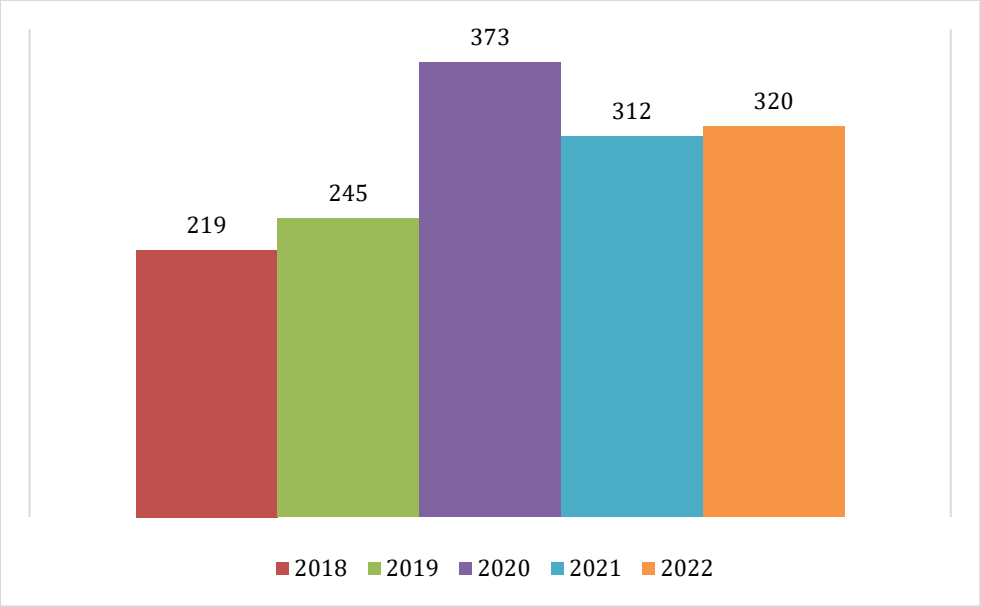

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-33 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2018-2022 (Balita)

2.2.2.8 Persentase Balita *Stunting*

Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. *Stunting* adalah pertumbuhan yang terhambat (tumbuh pendek). *Stunting* terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi Kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal. *Stunting* sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas. *Stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan motorik terlambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental. Anak-anak *stunting* menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat, dan lebih rentan terhadap penyakit

menular. Prevalensi balita *stunting* di DIY pada tahun 2018 sebesar 12,37% dan angka ini turun menjadi 10,69% pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 naik menjadi 11,08%. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi balita *stunting* di DIY sebesar 17,3%, sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY prevalensi balita *stunting* di DIY tahun 2021 sebesar 9,83%. Pada tahun 2022, prevalensi balita stunting di DIY dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 sebesar 16,4%. Sedangkan dari data Dinas Kesehatan DIY menunjukkan persentase balita stunting di DIY sebesar 9,10%. Hal tersebut menunjukkan bawha persentase balita stunting di DIY pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021.

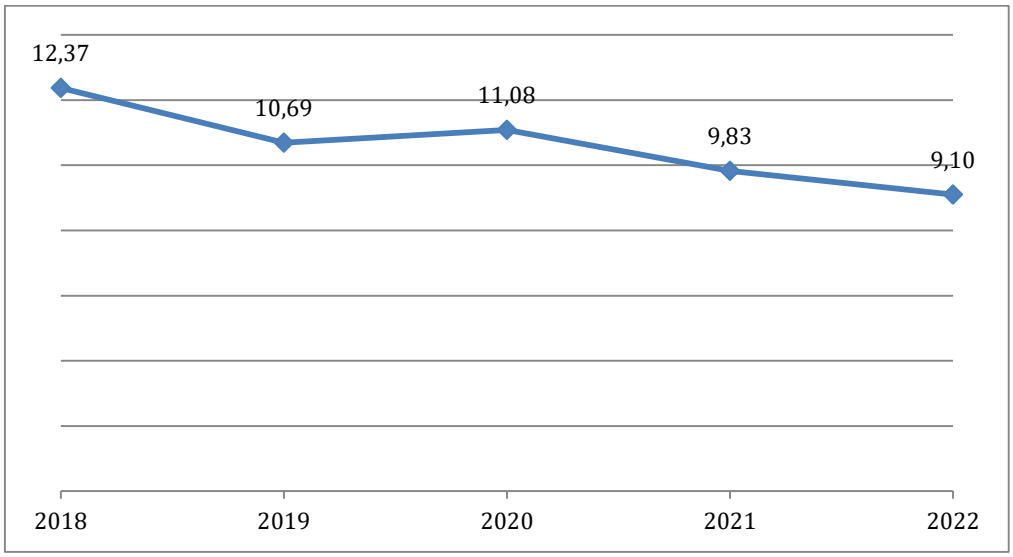

Sumber: dataku Bappeda DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar 2-34 Perkembangan Balita *Stunting* di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022 (Persen)

2.1.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurut *World Health Organization* (WHO), kematian ibu atau *maternal death* menurut adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut BPS, AKI merupakan Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi

kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 kasus kematian ibu sebanyak 34 kasus, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di angka 36 kasus, tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus (data sementara Dinkes DIY).

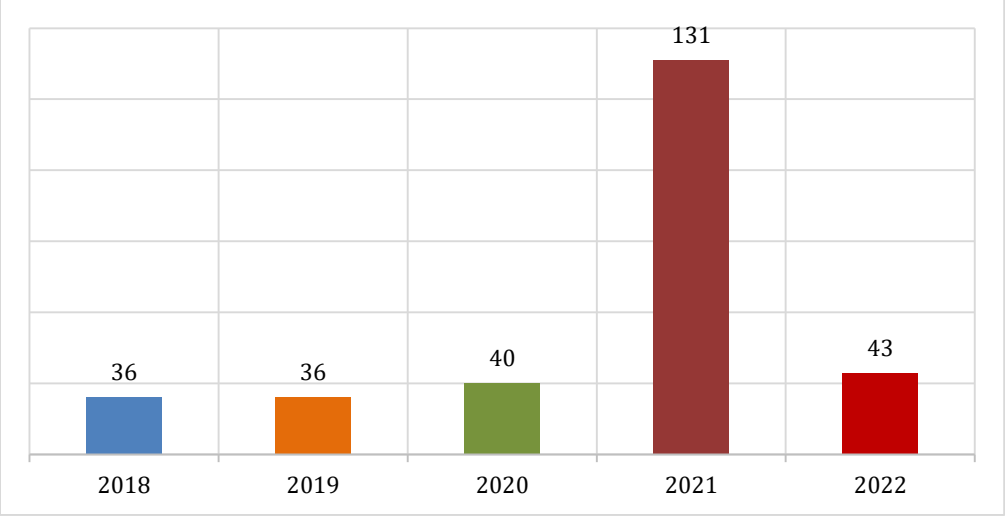

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-35 Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2018-2022 (Orang)

Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah kematian ibu menunjukkan angka yang sama yaitu sebanyak 36 kasus. Tahun 2020 naik menjadi 40 kasus. Pada tahun 2021 kasus kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 131 kasus. Dari 131 kasus tersebut, 80 kasus karena terpapar Covid-19. Pada tahun 2021 paling banyak kasus kematian ibu di Kabupaten Sleman sebanyak 45

kasus dan Kabupaten Bantul 44 kasus. Pada tahun 2022 angka kematian ibu sebanyak 43 kasus, menurun dibandingkan tahun 2021.

2.2.2.9 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Hal ini juga disebabkan karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Menurut BPS, angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat kematian bayi. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Menurut SDKI tahun 2012, angka kematian bayi di DIY mencapai 25 per 1000 kelahiran hidup. Target SDG's pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup). Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2018-2022 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut:

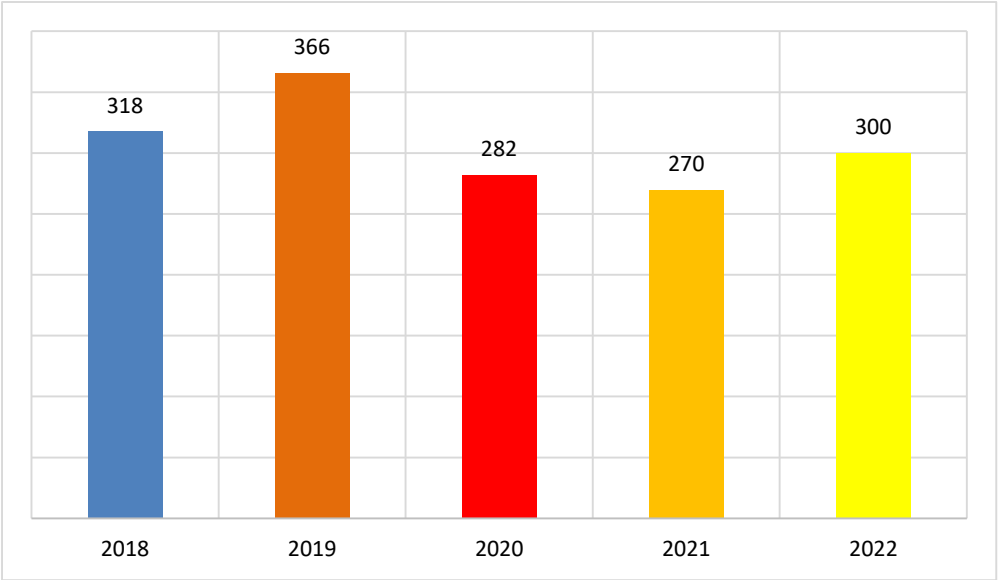

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-36 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2018-2022 (Anak)

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami angka yang fluktuatif tapi cenderung menurun. Angka kematian bayi mengalami kenaikan dari angka 318 pada tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 angka kematian bayi di DIY terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebanyak 282 anak, turun 84 kasus dibandingkan tahun 2019. Sedangkan tahun 2021 turun 12 kasus menjadi 270 anak dibandingkan tahun 2020. Kasus kematian bayi tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Gunungkidul (74 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (30 kasus). Pada tahun 2022, kasus kematian bayi meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi 303 kasus. Kasus kematian bayi tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Bantul (90 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (27 kasus). Sedangkan kasus kematian bayi di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 46 kasus, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 81 kasus, dan Kabupaten Sleman sebanyak 59 kasus. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

2.2.2.10 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan wujud masyarakat yang telah memiliki kesiapan potensi untuk mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi dan terjadi di wilayahnya secara mandiri. Desa siaga adalah salah satu strategi dalam akselerasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat antara lain: masih tingginya kematian ibu dan bayi, tingginya masalah gizi buruk dan angka *stunting*, belum teratasi masalah penyakit menular dan meningkatnya penyakit tidak menular serta penyakit yang resiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB), bencana alam dan lain-lain. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk ditanggulangi. Melalui penggerakan pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang tepat untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan secara dini oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu suatu penggerakan pemberdayaan masyarakat melalui kader dan tokoh masyarakat sebagai penggeraknya. Desa siaga sudah menjadi indikator dalam standart pelayanan minimal Kabupaten/Kota. Data di DIY 100% (438 desa/ kelurahan) telah terbentuk Desa Siaga Aktif.

2.2.2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan/ pasokan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Selama kurun waktu tahun 2019 – 2023, TPAK DIY terlihat fluktuatif namun mempunyai pola kecenderungan yang meningkat. TPAK DIY pada Bulan Februari 2019 tercatat sebesar 73,16%, kemudian pada Bulan Februari 2020 turun menjadi 71,02%. Pada Bulan Februari 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada Bulan Februari 2021 TPT DIY tercatat sebesar 72,81%, sedangkan Bulan Februari 2022 tercatat 74,68%. Pada Bulan Februari 2023 mengalami penurunan dibandingkan Bulan Februari 2022 yaitu tercatat 73,43%.

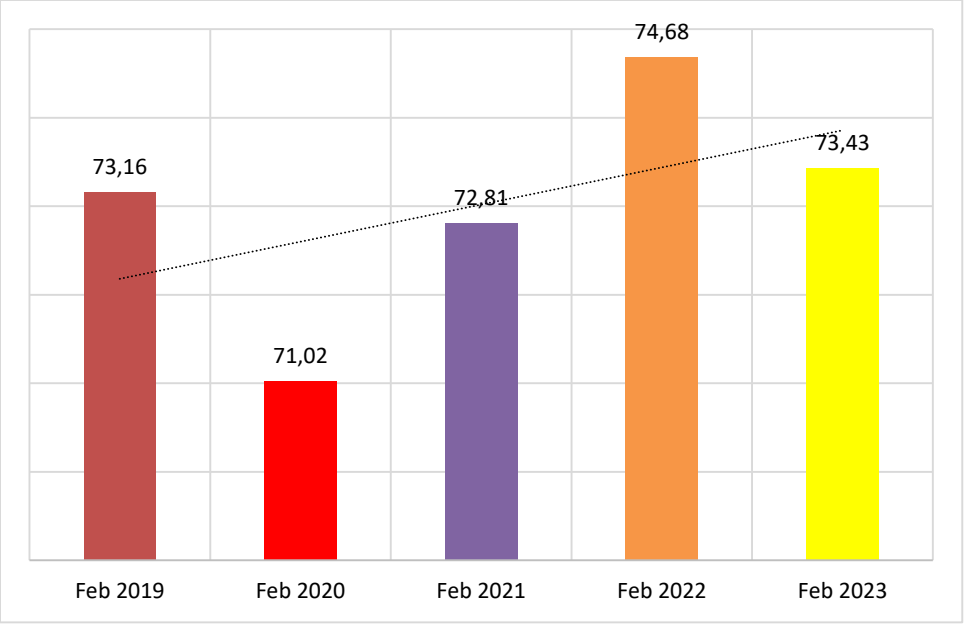

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2019-2022 (Persen)

2.2.2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Berikut merupakan gambaran TPT di DIY periode Februari tahun 2019 – 2023.

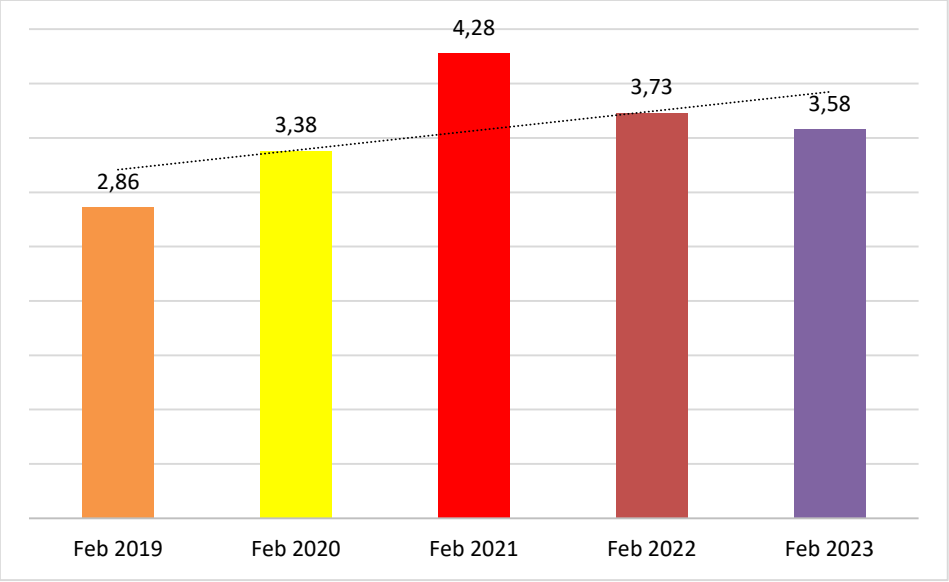

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-38 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2019-2022 (Persen)

Berdasarkan data Bulan Februari 2019, TPT di DIY tercatat sebesar 2,86%. Munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berimbas pada peningkatan TPT tahun 2020 hingga 2021. Pada Bulan Februari 2020 TPT DIY tercatat sebesar 3,38% dan kembali meningkat pada Bulan Februari 2021 menjadi 4,28%. Pada Bulan Februari 2022, TPT DIY menunjukkan penurunan dibandingkan Bulan Februari 2021, dari 4,28% menjadi 3,73%. TPT DIY Bulan Februari 2023 kembali menunjukkan penurunan menjadi 3,58%.

2.2.2.13 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja. Selama lima tahun terakhir, rasio atau persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada Februari tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja sebesar 94,34%, kemudian mengalami peningkatan pada Februari tahun 2020 menjadi

98,95%. Pada Februari tahun 2021 menunjukkan penurunan menjadi 95,72% dan kembali meningkat pada Februari tahun 2022 menjadi 6,27%. Pada Februari tahun 2023 rasio penduduk bekerja juga meningkat menjadi 96,42% dibandingkan tahun 2022.

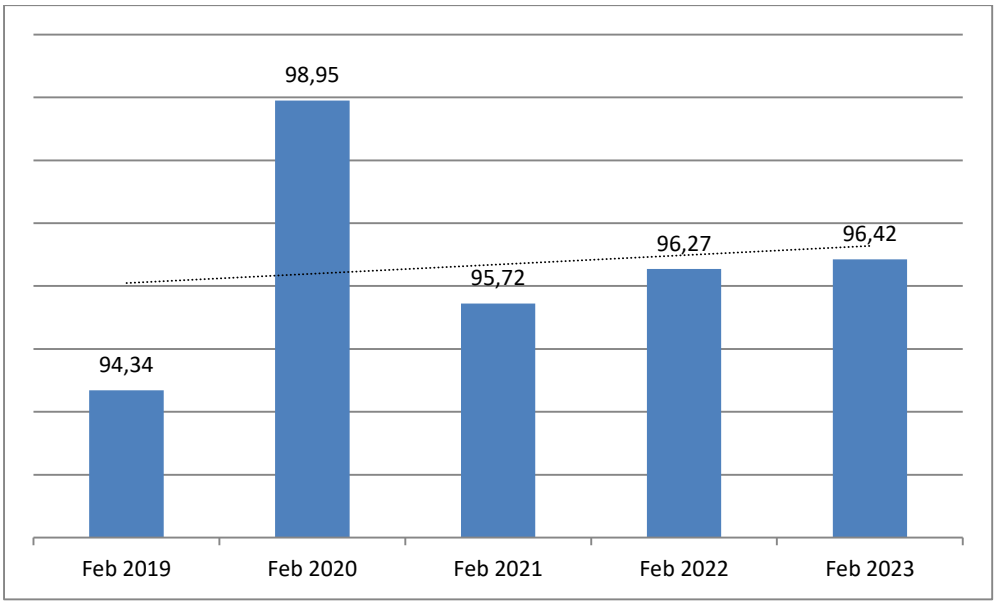

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2019-2023

Gambar 2-39 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2019 – 2023 (Persen)

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Budaya

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Sedangkan mengacu pada Perdais No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat DIY. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada objek kebudayaan meliputi nilai-

nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni. Pengaturan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian kuat, kesinambungan, dan kesatuan budaya mandiri.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur, yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta menyebutkan bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya *(golong gilig)* secara terpadu *(sawiji)* dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak *(sengguh)*, dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun *(ora mingkuh)*. Tata Nilai Budaya Yogyakarta meliputi religio-spiritual; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai semangat keyogyakartaan. Tata nilai tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kekayaan peninggalan pengetahuan dan teknologi leluhur masyarakat DIY sangat beragam, misalnya *pranata mangsa*, arsitektural dan tata lingkungannya, permainan rakyat dan kelengkapannya, olahraga jemparingan, berkuda, *pawukon*, senjata, alat musik tradisional, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional, alat transportasi, sistem bertani, dan lainnya.

Kekayaan budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresi lisan antara lain: sejarah lisan, dongeng, rapalan, parikan, geguritan dan cerita rakyat. Karya bahasa yang sudah dituliskan dalam bentuk manuskrip antara lain serat, prasasti, babad, naskah, dan kitab. Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri untuk menghadapi proses seleksi sosial dan alam dengan upacara daur hidup (upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian), keselarasan alam (merti kali, labuhan), dan upacara penghormatan leluhur (Nyadran, Ruwahan, Suran dan lain-lain).

Perkembangan kesenian di DIY sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perkembangan kesenian di DIY tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *art shop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Tabel 2-30 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2017-2021

Organisasi Budaya	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Organisasi Seni Rupa	17	15	25	25	29
Organisasi Sinematografi	42	42	44	44	44
Organisasi Seni Pertunjukan	5.808	6.420	8.757	8.757	8.757
Tokoh seniman/ budayawan	496	507	504	968	968
Kerajinan Properti Budaya	244	244	276	276	276
Perusahaan Bioskop	3	3	3	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	38	38	38	38	38

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan bioskop dan perusahaan persewaan dan penjualan film tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan organisasi sinematografi, seni pertunjukan dan kerajinan properti budaya di DIY mengalami peningkatan tahun 2017 hingga tahun 2019, namun stagnan dari tahun 2019 hingga 2021. Perkembangan jumlah tokoh seniman/budayawan mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat menurun pada tahun 2019. Produksi film-film pendek produksi Pemerintah Daerah tumbuh berkembang sangat pesat dan beberapa film menjadi viral seperti Film berjudul *Tilik*, *Pemean*, ke Jogja dan lainnya. Sedangkan perkembangan organisasi seni rupa mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir.

Perkembangan kebudayaan di DIY tidak lepas dari dukungan lembaga maupaun sarana prasarana budaya. Perkembangan lembaga dan sarana prasarana di DIY dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2-31 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-2021

Organisasi Budaya	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lembaga Budaya	181	78	186	186	186
Lembaga Pendidikan Budaya	49	49	66	66	66
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107
Galeri Seni Rupa	29	63	70	70	70

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan prasarana budaya tidak ada penambahan jumlah selama lima tahun terakhir. Sedangkan lembaga budaya, lembaga pendidikan budaya, maupun galeri seni rupa mengalami tren meningkat pada tahun 2017 hingga 2019, namun stagnan pada tahun 2019 hingga 2021.

Sampai tahun 2021 DIY memiliki 717 jenis upacara adat dan 35 jenis upacara tradisi yang tersebar di kabupaten kota. Kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamatan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa *mitoni, tetakan, pitung dinanan, slametan, nyatus, nyewu* dan lain-lain. Beberapa kalurahan, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di kalurahan lain, antara lain *merti dusun, ruwatan, labuhan, bersih desa, sedekah bumi* dan sebagainya.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. Pada tahun 2017 hingga 2020 DIY memiliki 56 desa budaya, dan berkembang pada tahun 2021 menjadi 76 desa budaya. Peraturan Gubernur DIY No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY. Selain itu dalam Pergub DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengamanatkan adanya sinergi untuk mengembangkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Yang dimaksud

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam kebhinneka tunggal ika-an. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Jumlah Desa Mandiri Budaya terus meningkat dari 10 desa pada tahun 2017-2020 menjadi 18 desa di tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah ditetapkan 7 desa mandiri budaya, sehingga menjadi 25 desa mandiri budaya.

Tabel 2-32 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Upacara adat	475	478	482	717	717
Upacara tradisi	35	35	35	35	35
Makanan tradisional	180	208	223	276	276
Jenis permaianan tradisional	58	58	58	69	69
Jenis busana tradisional	35	38	38	38	38
Sanggar rias tradisional	405	405	406	536	536
Cerita rakyat	33	37	80	63	63
Naskah kuno	509	509	509	714	714

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pelestarian kebudayaan yang meliputi upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan dengan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Selain keanekaragaman budaya dan kesenian, DIY juga memiliki berbagai kekayaan lain berupa bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya, situs, dan museum. Perkembangan kekayaan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-33 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Bangunan cagar budaya	1.042	1.041	1.077	1.599	1.599
Kawasan cagar budaya	17	20	17	17	17
Benda cagar budaya	807	808	834	1.685	1.687
Situs	339	343	343	343	343
Museum	43	44	47	48	48

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti: Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinaga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jati diri bangsa. Tahun 2017 ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk *tentative list* Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu – Kraton - Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

2.2.3.2 Olahraga

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. Selain itu olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat DIY. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, di samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain. Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang. Berikut perkembangan jumlah sarana prsarasana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perkembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di DIY.

Tabel 2-34 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021

Jenis Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah klub olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Jumlah lapangan/gedung olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
Jumlah kegiatan olahraga	19	13	12	2	4
Jumlah organisasi pemuda	50	74	74	74	56
Jumlah kegiatan kepemudaan	12	11	11	4	6
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah klub olahraga, jumlah lapangan/gedung olahraga dan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) tidak ada perubahan pada lima tahun terakhir. Jumlah organisasi pemuda mengalami peningkatan dari 50 pada tahun 2017 menjadi 74 pada tahun 2018, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 56. Sedangkan jumlah kegiatan olahraga dan jumlah kegiatan kepemudaan mengalami tren menurun dalam lima tahun terakhir.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam *"Hamemayu Hayuning Bawana".* Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal utama yang perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya

manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia yang utama' *(jalmâ kang utâmâ)*, yang berasaskan 'rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaisance* di DIY.

1.) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat dari gambar berikut:

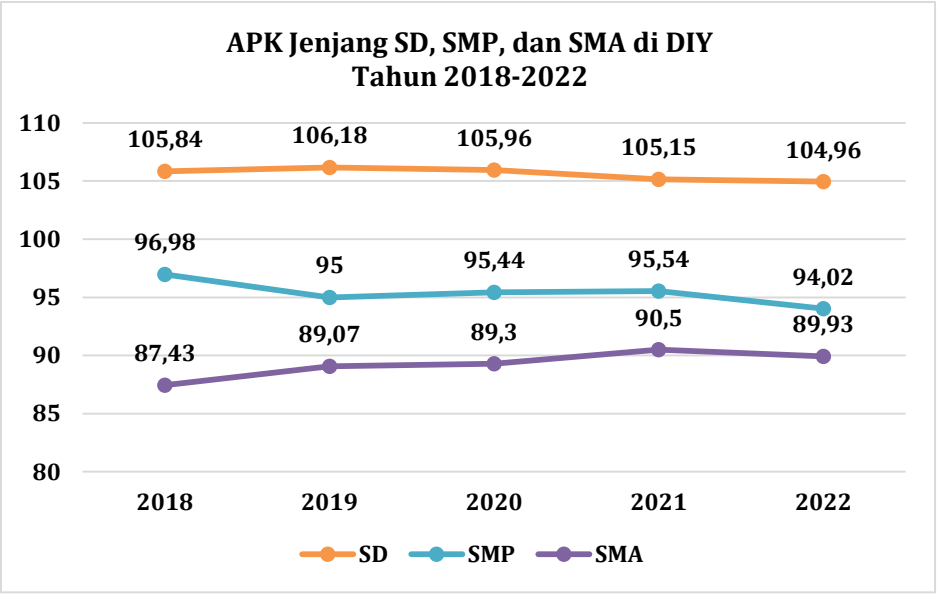

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-40 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022

Dari periode 2018-2022, capaian APK SD/sederajat menunjukkan capaian di atas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Sementara itu capaian APK SLTP DIY/sederajat belum 100% yang menujukkan partisipasi penduduk pada jenjang tersebut masih belum optimal. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Tetapi melihat trend peningkatan APK jenjang SLTA dan sederajat menuju angka 100% menunjukkan semakin banyaknya anak usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA/sederajat.

2.) Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalahpersentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

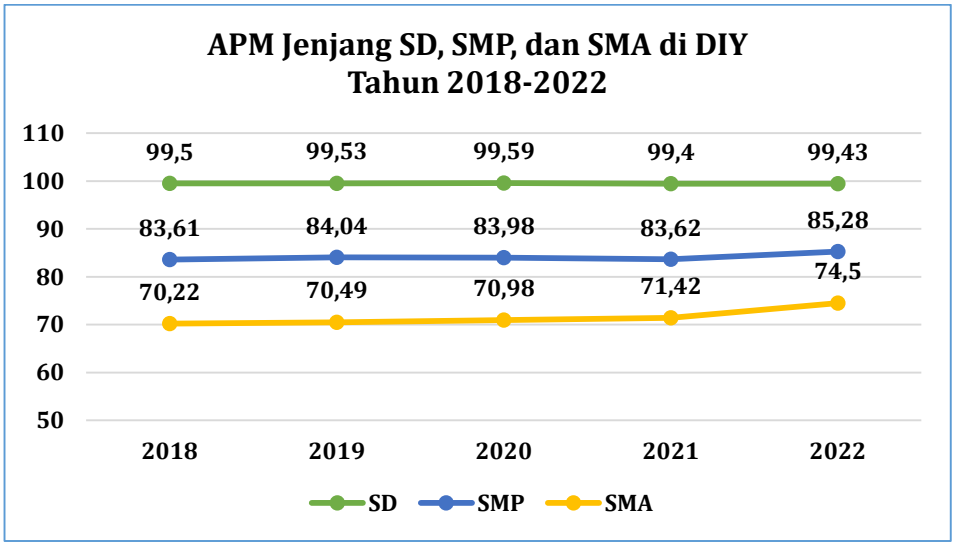

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-41 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah untuk jenjang SD dan tinggal kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Capaian APM DIY untuk jenjang pendidikan SD dan SMP yang mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2021, menunjukkan peningkatan di tahun 2022. Sementara itu, capaian APM tingkat SMA senderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2018-2022.

Dilihat dari capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD pada tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 99,61% sedangkan yang terendah Kota Yogyakarta sebesar 98,93%. Capaian APM SD Kota Yogyakarta lebih rendah dikarenakan adanya peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang masuk SD dengan usia di bawah 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.

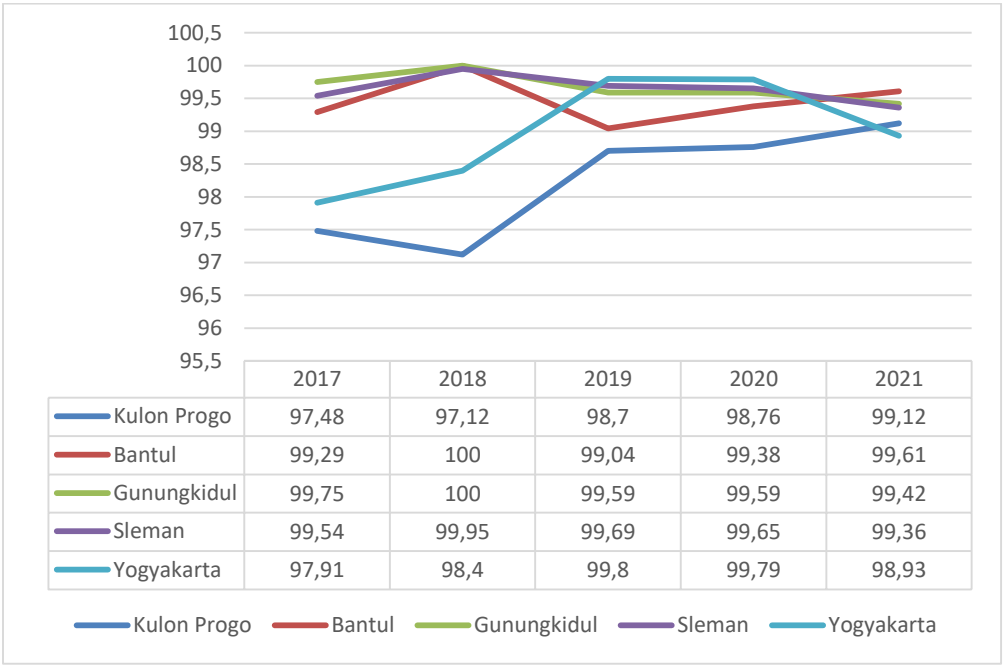

	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	97,48	97,12	98,7	98,76	99,12
Bantul	99,29	100	99,04	99,38	99,61
Gunungkidul	99,75	100	99,59	99,59	99,42
Sleman	99,54	99,95	99,69	99,65	99,36
Yogyakarta	97,91	98,4	99,8	99,79	98,93

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 2-42 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2017-2022 di tiap kabupaten/kota DIY

3.) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

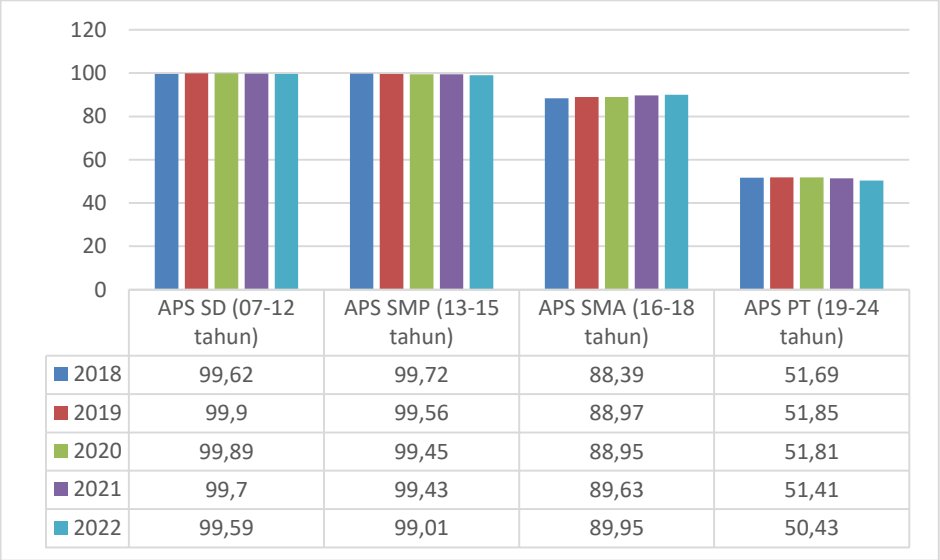

	APS SD (07-12 tahun)	APS SMP (13-15 tahun)	APS SMA (16-18 tahun)	APS PT (19-24 tahun)
2018	99,62	99,72	88,39	51,69
2019	99,9	99,56	88,97	51,85
2020	99,89	99,45	88,95	51,81
2021	99,7	99,43	89,63	51,41
2022	99,59	99,01	89,95	50,43

Sumber: BPS, diolah.

Gambar 2-43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2018-2022

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk APS SD (usia 07-12 tahun) dan APS SMP (13-15 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukan capaian mendekati 100%. Sedangkan APS SMA (16-18) tahun menunjukkan trend meningkat menuju angka 90%. Untuk APS PT (19-24 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend stagnan di kisarana 51% . dari hal tersebut maka perlu mendorong peningkatan APS SMA (16-18 tahun) dan APS PT (19-24 tahun).

4.) Rapor Pendidikan

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sistem pendidikan pemerintah mengembangkan platform Rapor Pendidikan. Melalui platform ini dapat ditunjukkan posisi dan kualitas satuan pendidikan meliputi mutu hasil belajar, keamanan dan inklusivitas, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan sekolah. Hasil Rapor Pendidikan DIY secara ringkas meliputi kemampuan Literasi, Numerasi, Karakter, serta Penyerapan Lulusan SMK disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2-35 Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Tahun 2022

Nama Indikator	Nilai Provinsi	Capaian	Nama Indikator	Nilai Provinsi	Capaian
Kemampuan literasi	2.08	Mencapai kompetensi mininum	Kemampuan literasi	1.96	Mencapai kompetensi mininum
Kemampuan numerasi	1.92	Mencapai kompetensi mininum	Kemampuan numerasi	1.8	Di bawah kompetensi minimum
			Penyerapan lulusan SMK	36.42%	Tinggi
			Kuliah	20.25%	Baik
			Bekerja	47.37%	Sedang
			Wirausaha	26.67%	Perlu Peningkatan
			Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan	76.9%	Memadai

Sumber : Rapor Pendidikan DIY Tahun 2022, diolah

Dari data di atas Kemampuan Literasi jenjang SMA dan SMK telah mencapai kemampuan minimal. Pada indikator Kemampuan Numerasi jenjang SMA sudah mencapai kemampuan minimal tetapi untuk jenjang SMK masih berada di bawah kompetensi minimal. Untuk indikator Penyerapan Lulusan SMK pada kategori tinggi, namun lulusan SMK yang berwirusaha pada

kategori Perlu Peningkatan. untuk Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan pada kategori Memadai.

5.) Akreditasi sekolah

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah. Tingkatan akreditasi terdiri dari A (Amat Baik), B (Baik) dan C (Cukup). Untuk mengetahui gambaran mutu pendidikan sekolah SMA/SMK di DIY bisa dilihat dari sekolah dengan nilai akreditasi A. Persentase SMA/SMK Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY tahun 2018-2021 disajikan pada grafik di bawah ini.

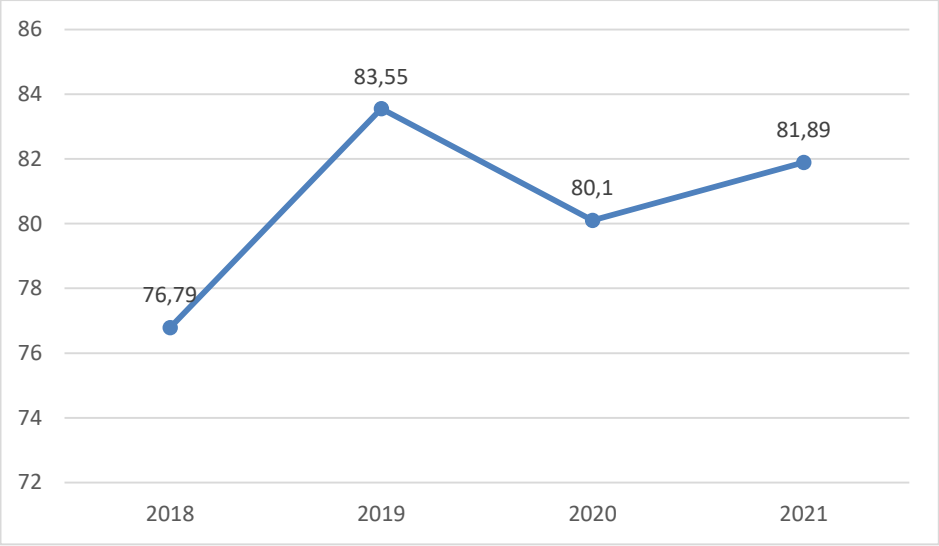

Sumber: Disdikpora DIY, diolah.

Gambar 2-44 Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY Tahun 2018-2021

Dari grafik di atas capaian sekolah SMA/SMK dengan akreditasi A di DIY sudah mencapai 81,89 persen. Namun dilihat secara trend selama 5 tahun terakhir capaiannya cukup fluktuatif dimana pada tahun 2019 mencapai persentase tertinggi sebesar 83,55 persen. Dari gambaran ini perlu meningkatkan dukungan kepada sekolah yang belum mencapai Akreditasi A, dan di sisi lain memberi dukungan agar sekolah dengan Akreditasi A dapat mempertahankan capaiannya.

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

2.3.1.2.1 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Menurut Kategori

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2021.

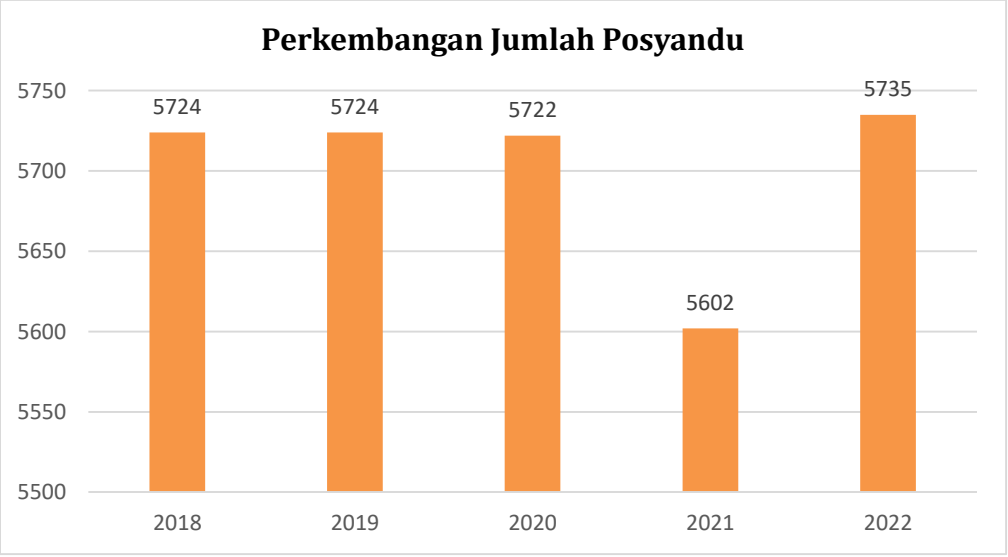

Sumber : Dataku Bappeda DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar 2-45 Grafik Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2018 - 2022

2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2022 sebanyak 422 unit dengan rasio sebesar 10,49 per 100.000 penduduk. Angka ini menurun dibanding tahun 2021 dimana jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tercatat sebanyak 426 unit dengan rasio sebesar 11,5 per 100.000 penduduk.

Menurut standar nasional berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah, setiap 120.000 penduduk harus terdapat minimal satu puskesmas. Sementara itu, jumlah penduduk DIY tahun 2022 berdasarkan proyeksi BPS adalah 4.021.816 jiwa. Dengan demikian kebutuhan puskesmas minimal yang harus dipenuhi sebanyak 34 unit, sedangkan total puskesmas di DIY tahun 2022 adalah 121 unit yang tersebar merata pada setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah DIY dirasa belum perlu untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Standar nasional untuk penyediaan Puskesmas Pembantu (Pustu), berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, menyatakan bahwa minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu untuk setiap 30.000 penduduk di suatu wilayah. Total penduduk DIY tahun 2022 menurut proyeksi BPS sebanyak 4.021.816 jiwa sehingga kebutuhan Pustu minimal sebanyak 134 unit. Namun demikian jumlah Pustu yang ada di DIY sampai tahun 2022 sebanyak 300 unit yang berarti bahwa DIY saat ini telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu.

2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penurunan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2020 ke 2021 yaitu dari sebanyak 93 rumah sakit pada tahun 2020, menjadi 84 rumah sakit pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.970.220 jiwa di tahun 2021,

rasio rumah sakit di DIY tahun 2021 adalah sebesar 2,12 per 100.000 penduduk. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 47.265 jiwa.

Tabel 2-36 Jumlah Dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Rumah Sakit Bersalin	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kulon Progo	9	9	-	-	-	n/a
Bantul	11	11	6	4	1	n/a
Gunungkidul	7	8	1	1	-	n/a
Sleman	22	22	6	6	-	n/a
Yogyakarta	11	12	10	6	1	n/a
D.I. Yogyakarta	**60**	**62**	**23**	**17**	**2**	n/a

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauhmasyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolongrendah yaitu 58,28 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.364 TT (berdasarkan laporan 46 rumah sakit dari total 73 rumah sakit di DIY).

Tabel 2-37 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY

	2017				2018				2019				2020				2021			
Kab/ Kota	JML RS	RS MELAPOR	TT RS MELAPOR	BOR (%)	JML RS	RS MELAPOR	TT RS MELAPOR	BOR (%)	JML RS	RS MELAPOR	TT RS MELAPOR	BOR (%)	JML RS	RS MELAPOR	TT RS MELAPOR	BOR (%)	JML RS	RS MELAPOR	TT RS MELAPOR	BOR (%)
Kulon Progo	8	8	496	50,75	8	7	507	49,60	9	8	548	51	9	9	573	25,01	9	8	15	15,63
Bantul	16	15	1107	44,6	15	15	1107	49,26	16	16	1205	38,6	16	16	1220	33,48	17	16	74	29,1
Gunungkidul	1	1	177	78,5	5	5	338	69,04	3	3	345	71,56	8	7	525	56,99	8	7	17	22,7
Sleman	28	27	2857	44,6	27	26	3032	42,11	27	26	2983	48,71	27	26	2914	37,25	30	20	102	28,3
Kota Yogyakarta	21	18	1853	34,7	21	14	1624	35,67	20	15	1701	1,9	20	10	1471	27,41	20	11	70	21,74

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Berdasarkan standar nasional tentang kebutuhan jumlah Rumah Sakit yang diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk DIY saat ini maka jumlah kebutuhan Rumah Sakit yang ada adalah sebanyak 15 unit[2]. Sedangkan jumlah rumah sakit yang ada pada tahun 2021 adalah 84 unit, jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melayani penduduk DIY.

2.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2021, jumlah tenaga medis di DIY adalah sebanyak 4.287 orang yang terdiri dari 2.350 dokter umum, 710 dokter gigi, dan 1.227 dokter spesialis. Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun tersebut tercatat 0,10. Pada tahun 2022, jumlah tenaga medis di DIY meningkat menjadi 5.646 orang yang terdiri dari 3.354 dokter umum, 987 dokter gigi, dan 1.305 dokter spesialis. Sedangkan rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2022 tercatat tidak mengalami kenaikan yaitu 0,10. Hal ini karena seiring bertambahnya jumlah tenaga kesehatan, jumlah penduduk di DIY juga makin bertambah.

Tabel 2-38 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter umum	1.090	1.446	1.937	2.350	3.354
Dokter spesialis	1.838	1.062	1.397	1.227	1.305
Dokter gigi	1.776	555	487	710	987
Rasio dokter per penduduk	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10
Perawat	7.794	8.269	9.507	10.757	10.355
Bidan	2.019	2.046	2.356	2.281	2.849

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatanini adalah peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi warga yang meliputi ibu, anak, remaja, penduduk usia produktif, dan lanjut usia.

Meksipun pemenuhan akses dan layanan kesehatan relatif baik, namun pemerintah DIY perlu mengoptimalkan agar mendapatkan tataran kualitasnya yang prima. Sehingga pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan transisi demografi dapat berjalan secara maksimal.

2.3.1.2.5 Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2022, jumlah perawat di DIY tercatat sebanyak 10.355 sedangkan jumlah bidan sebanyak 2.849. Total penduduk DIY tahun 2022 menurut proyeksi BPS sebanyak 4.021.816 jiwa. Dengan demikian rasio perawat di DIY tahun 2022 sebesar 257 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2022 sebesar 71 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk.

2.3.1.2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan tren penurunan, dari 97,37% di tahun 2017 menurun menjadi 87,35% di tahun 2021. Akan tetapi hal tersebut tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi penanganan komplikasi kebidanan di populasi karena denominator yang digunakan adalah angka proyeksiibu hamil resiko tinggi. Setiap komplikasi yang terjadi akan diberikan penanganan secara definitif sesuai standar. Penurunan cakupan penanganan komplikasi bisa disebabkan karena jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami penurunan karena deteksi dini terhadap bumil risti yang baik dan pemantauan serta penanganan yang baik terhadap bumil risti sehingga tidak terjadi komplikasi.

Tabel 2-39 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021

Wilayah	Tahun														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	bumil risti/ kompli-kasi	bumil risti/ kompli-kasi ditangani	(%)	bumil risti/ kompli-kasi	bumil risti/ kompli-kasi ditangani	(%)	bumil risti/ kompli-kasi	bumil risti/ kompli-kasi ditangani	(%)	bumil risti/ kompli-kasi	bumil risti/ kompli-kasi ditangani	(%)	bumil risti/ kompli-kasi	Bumil risti/ kompli-kasi ditangani	(%)
Kab. Kulon Progo	1.329	1.329	100,0	1.457	1.457	100	1.267	1.267	87	1.073	1.073	100,0	1.175	1.144	97,36
Kab. Bantul	2.854	2715	95,1	3.031	3.031	100	3.143	3.143	103	2.954	2.954	100,0	2.914	2.802	96,15
Kab. Gunungkidul	3.693	3693	100,0	1.789	1.473	82	1.783	1.405	79	1.738	1.237	71,00	1.723	1.217	70,63
Kab. Sleman	3.110	2934	94,3	3.084	2.661	86,3	3.041	2.435	100	2.909	2.137	73,46	2.815	2.269	80,60
Kota Yogyakarta	1.009	1.009	100,0	1169	1169	100	1.067	1.067	100	962	962	100	827	827	100 %
DIY	11.995	11680	97,37	10.530	9.791	92,98	10.301	9.317	90,44	9.636	8.363	86,78	9.454	8.259	87,35

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

2.3.1.2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Menurut Dinas Kesehatan DIY 2022, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2021 mencapai 87,99% di atas rata–rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidanan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 100,00% menurun pada tahun 2019 menjadi 99,9% dan menjadi 87,99 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2-40 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompentensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

WILAYAH	TAHUN														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	CakupanPersalinan oleh tenaga kesehatan berkom-petensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	CakupanPersalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	CakupanPersalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	CakupanPersalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	CakupanPersalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)
Kab. Kulon Progo	4995	4993	100	5.086	5.085	99,94	4.865	4.862	99,94	4.738	4.733	99,94	5622	4476	99,94
Kab. Bantul	12375	12373	100	12.931	12.928	99,98	13088	13087	99,98	12708	12705	99,99	13932	11777	84,53
Kab. Gunungkidul	7340	7332	99.9	7.540	7.528	99,84	7.723	7.712	99,86	7.640	7.630	99,87	7513	7149	95,16
Kab. Sleman	14015	14014	100	13869	13869	100	13474	13.468	100	12948	12839	99,98	13431	12381	92,18
Kota Yogyakarta	3617	3617	100	3.587	3.587	100	3.346	3.344	99,91	3.127	3.127	100	3.304	2760	83,54
DIY	42342	42329	100	43.005	43.005	100	42.496	42.473	99,9	41.161	41.034	99,69	43.802	38543	87,99

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

2.3.1.2.8 Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkappada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukan peningkatan cakupan desa/kelurahan UCI DIY mencapai angka 100%. Hal ini berarti tujuan UCI sudah tercapai sempurna di DIY. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan UCI.

Tabel 2-41 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

Wilayah	2017			2018			2019			2020			2021*)		
	Jml desa	Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%
Kulon Progo	88	86	97,7	88	88	100	88	88	100	88	88	100	88	4	4,5
Bantul	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100
Gunungkidul	144	142	98,61	144	144	100	144	144	100	144	144	100	144	140	97,2
Sleman	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	42	48,8
Kota Yogyakarta	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100
DIY	438	434		438	438	100	438	438	100	438	438	100	438	306	69,86

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

2.3.1.2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Walaupun angka capaian gizi di DIY sudah jauh melampaui target nasional, tetapi penderita gizi buruk masih terdapat di DIY. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi buruk di DIY adalah 0,136%. Dari 5 kabupaten dan kota di DIY, prevalensi gizi buruk di 4 kabupaten sudah sesuai harapan, yaitu <1%. Situasi gizi di DIY dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dari gambar berikut ini:

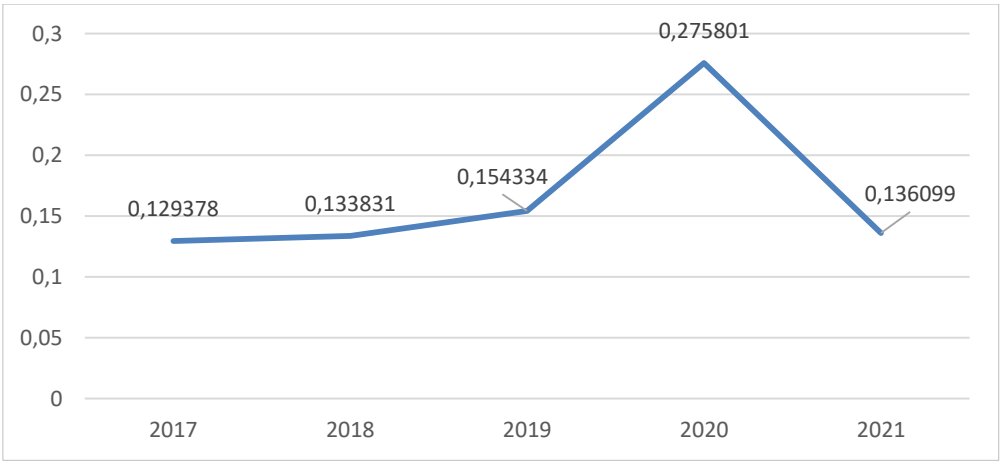

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Gambar 2-46 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, artinya sebanyak 387 balita yang mengalami gizi buruk (dengan indikator BB/TB), semuanya mendapatkan perawatan. Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

2.3.1.2.10 Pola Penyakit

Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti: hipertensi, stroke, diabetes dan kanker melebihi angka nasional. Gangguan kesehatan jiwa sebagai bagian dari penyakit tidak menular di DIY menunjukkan angka yang cukup tinggi dibanding nasional. Menurut Data RisetKesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa di DIY sebesar 2,7 permil. Angka ini, lebih tinggi dari prevalensi rata-rata nasional sebesar 1,7 permil. Artinya 3 orang dari setiap 1.000 orang penduduk DIY mengalami gangguan jiwa berat. Kulon Progo menempati kasus teratas dengan prevalensi 4,67, disusul Bantul 4,0, Kota Yogyakarta 2,14, Gunungkidul 2,05 dan Sleman sebesar 1,52. Sedangkan prevalensi penduduk DIY yang didiagnosis Tuberkulosis (TBC) paru berdasarkan Riskesdas tahun 2013, sebesar 0,3% (nasional 0,4%). Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan hasil Riskesdas 2007 sebesar 0,36%. Meskipun demikian perlu diwaspadai adanya kenaikan jumlah penderita TBC kebal obat (*Multi Drug Resistance*/MDR dan *Extensively Drug Resistance*/XDR). Prevalensi penyakit saluran pernafasan lainya yaitu asma dan penyakit paru obstuktif kronis (PPOK) di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 merupakan 3 besar tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan NTT.Tercatat untuk asma sebesar 6,9% (nasional 4,5%) dan untuk PPOK 3,1% (nasional 3,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan paru dan pernafasan khususnya TBC dan asma di wilayah DIY harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, beberapa penyakit menular yang masih perlu mendapat perhatian adalah diare, pneumonia balita, DBD, TBC paru. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, sedangkan tingginya angka gangguan jiwa dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat di masyarakat.

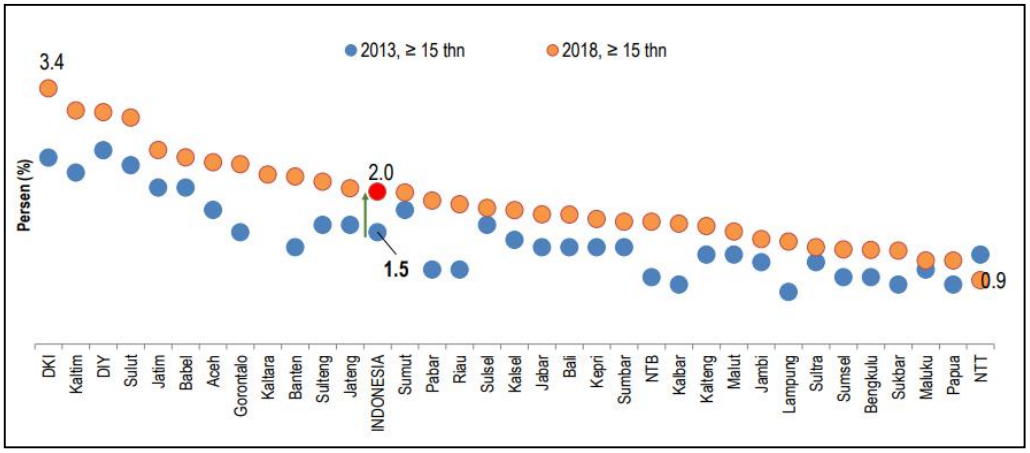

Sumber: Riskesdas 2018

Gambar 2-47 Prevalensi Diabetes Melitus Berdasarkan Diagnosis Dokter Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018

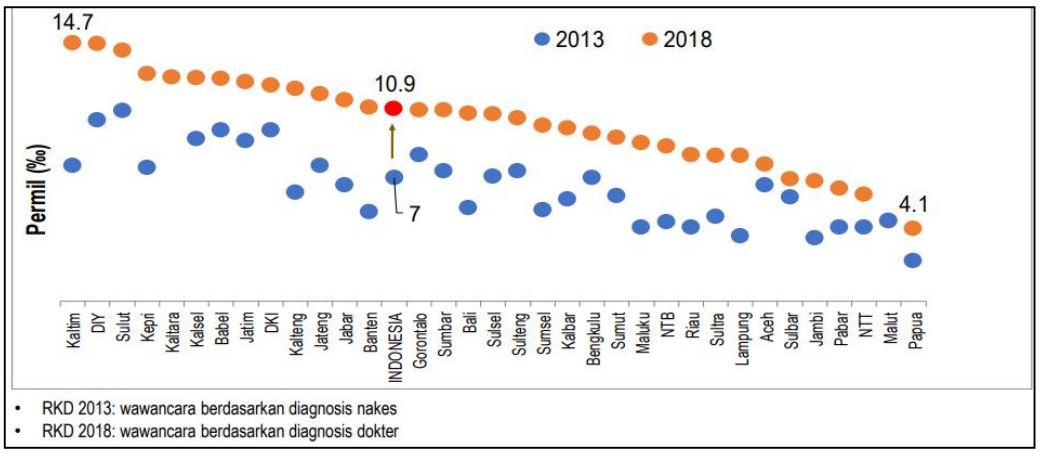

Sumber: Riskesdas 2018

Gambar 2-48 Prevalensi Stroke* (Per mil) Berdasarkan Diagnosis Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018

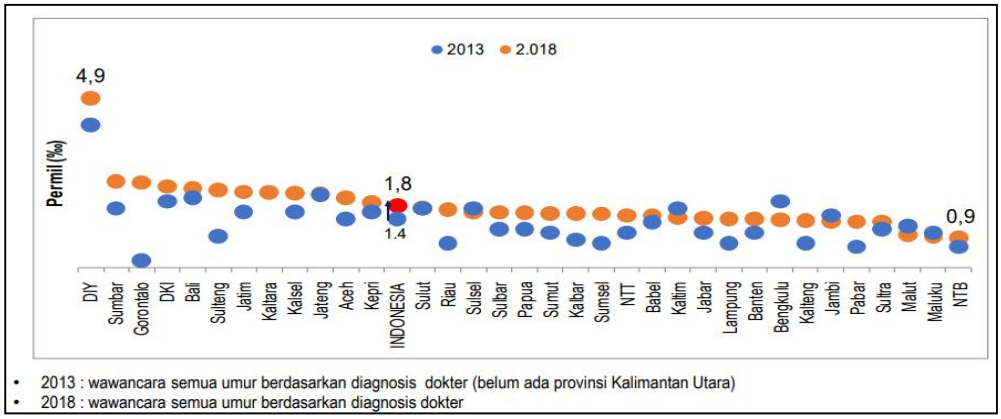

Sumber: Riskesdas 2018

Gambar 2-49 Prevalensi Kanker Berdasarkan Diagnosis Dokter Menurut Provinsi (Per mil), 2013-2018

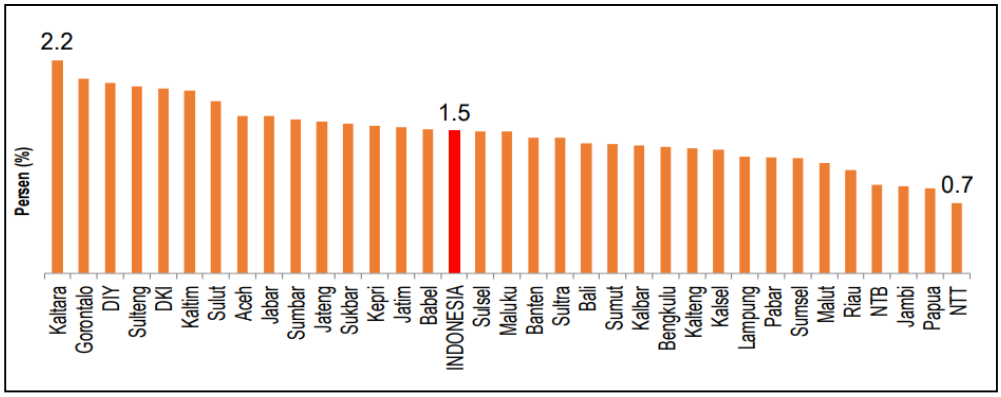

Sumber: Riskesdas 2018

Gambar 2-50 Prevalensi Penyakit Jantung (Diagnosis Dokter) Pada Penduduk Semua Umur Menurut Provinsi, 2018

Beberapa penyakit menular juga membutuhkan perhatian di DIY diantaranya: HIV AIDS, Tuberkolosis (TBC), DBD, malaria, dan penyakit yang bersumber dari binatang lainnya (anthrax, flu burung, pes, leptosfirosis). Kasus HIV DIY sampai dengan tahun 2021 sebanyak 5.954 kasus dengan 1.919 kasus telah memasuki fase AIDS.

Tabel 2-42 Jumlah Kasus HIV 2017-2021

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2021	335	1.403	516	1.486	1.454	5.954
2020	319	1.294	502	1.360	1.392	5.627
2019	294	1.191	445	1.247	1.335	5.264
2018	265	1.064	369	1.119	1.212	4.781
2017	204	880	293	907	976	4.212

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Tabel 2-43 Jumlah Kasus AIDS 2017-2021

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2021	105	446	289	440	296	1919
2020	105	422	251	425	291	1820
2019	95	384	234	402	285	1726
2018	86	362	230	369	274	1642
2017	75	324	158	354	246	1485

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Sedangkan untuk Demam Berdarah *Dengeu* (DBD), tahun 2021 terjadi penuruan kasus yang sangat signifikan, kasus dari tahun 2020 sebesar 3.623 kasus menurun di tahun 2021 menjadi 1.187 kasus atau sebesar 205,2% . Penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian di DIY adalah TBC dan Malaria. Penyakit TBC juga mengalami peningkatan kasus, dari tahun 2020 sebesar 2.228 kasus meningkat di tahun 2021 menjadi 2.258 kasus atau sebesar 1,34%. Masih terdapat kabupaten di DIY yang belum mendapatkan status eliminasi malaria yaitu Kabupaten Kulon Progo. Penyakit Malaria di tahun 2021 mengalami peningkatan kasus, ditahun 2020 penyakit malaria sebanyak 9 kasus dan ditahun 2021 meningkat menjadi 27 kasus atau meningkat sebesar 200%.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic*

infrastructure) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air (Drainase), Sub Urusan Keciptakaryaan (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya), Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Jasa Konstruksi, Sub Urusan Penataan Ruang.

2.3.1.3.1 Sub Urusan Sumber Daya Air

Daerah irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 terbagi dalam tiga kewenangan yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi terdiri dari:

a. Daerah Irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, di DIY meliputi DI Kalibawang (7.152 Ha), DI Karangtalun (5.159 Ha), dan DI lintas yaitu DI Tuk Kuning (Kabupaten Klaten 115 Ha, Kabupaten Sleman 149 Ha).
b. Daerah Irigasi yang luasnya 1000 - 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Pemda DIY, mempunyai kewenangan seluas 13.987 Ha meliputi 6 DI (9.078 Ha) dan 35 DI lintas kabupaten/Kota (4.909 Ha).
c. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, meliputi 100 DI kewenangan Kabupaten Bantul (8.633 Ha), 182 DI kewenangan Kabupaten Gunungkidul (5.818 Ha), 90 DI kewenangan Kabupaten Kulon Progo (1.533 Ha), 853 DI kewenangan Kabupaten Sleman (21.953 Ha), dan 10 DI kewenangan Kota Yogyakarta (49 Ha).

Pada tahun 2022 dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY, baru 12.136,85 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13,987 ha atau setara dengan 86,77%. Luas layanan irigasi di DIY sebesar 13.987 ha dengan luas irigasi dalam kondisi baik 5.789,45 ha dan panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik 132.401,39 meter. Luas lahan pertanian terlihat menurun karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, diversifikasi tanaman dari padi ke non padi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air.

Tabel 2-44 Prasarana Irigasi

No	Elemen	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Layanan Irigasi (ha)	12.1158,11	13.987,00	13.987,00	13.987,00	13.987,00
2	Panjang Jaringan Sarana Irigasi Dalam Kondisi Baik	93.096,04	119.826,87	133.068,78	100.480,21	132.401,39
3	Luas Layanan Irigasi Dalam Kondisi Baik	4.348,98	5.466,75	6.040,97	4.387,94	5.789,45

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) dan 1 (satu) daerah tangkapan air (DTA) yang ada di wilayah DIY yaitu DAS Serang pada tahun 2021 sebesar 234 juta m^3 dan di tahun 2022 sebesar 209,03 juta m^3, pada DAS Progo tahun 2021 5.653 juta m^3 dan di tahun 2022 sebesar 227,71 juta m^3, DAS Opak tahun 2021 sebesar 858 juta m^3 dan pada tahun 2022 sebesar 667,28 juta m^3, DAS Oyo pada tahun 2021 sebesar 529 juta m^3 dan pada tahun 2022 sebesar 529 juta m^3, DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 1534 juta m^3. Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m^3, DAS Progo sebesar 622,64 juta m^3, DAS Opak sebesar 653,04 juta m^3, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m^3, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m^3. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai Tahun 2020 pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul: 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Pada daerah sulit air pemenuhan air baku melalui sumur air tanah dalam. Sesuai dengan capaian akhir tahun 2022, penambahan layanan penyediaan air dari sumur bor sejumlah 18 titik dari pekerjaan pembangunan sumur bor di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul. Penambahan pembangunan sumur bor tersebut memberikan kontribusi akumulasi jumlah dusun di daerah sulit air pada prioritas utama yang dapat mengakses air bersih dari air tanah yaitu tercapai 130 dusun, yang diperoleh dari 112 dusun sampai dengan tahun 2021 ditambah 18 Dusun di tahun 2022.

Pelaksanaan pengelolaan sungai di DIY merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu poin penting dalam pengelolaan sungai adalah penanganan drainase. Berdasarkan data, terdapat total genangan sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, dan sudah ditangani seluas 5,44 ha setara 34 titik sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data tersebut masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik.

2.3.1.3.2 Sub Urusan Keciptakaryaan

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk DIY.

Jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2022 sebesar 3.811.438 jiwa dari jumlah penduduk DIY sebesar 4.021.816 jiwa sehingga penduduk berakses air minum sebesar 94,77%. Persentase jumlah penduduk berakses air minum tersebut terdiri dari persentase jumlah penduduk berakses air minum yang dilayani melalui jaringan perpipaan sebesar 41,42% dan jaringan non perpipaan sebesar 53,35%, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-45 Data Akses Air Minum Tahun 2022

<table>
<tr><th colspan="3">Akses Layak</th><th rowspan="2">Tanpa Akses</th></tr>
<tr><td colspan="2">Perpipaan</td><td rowspan="2">BJP
(Bukan Jaringan Perpipaan)</td></tr>
<tr><td>PDAM</td><td>SPAMDES</td></tr>
<tr><td>27,34%</td><td>14,08%</td><td>53,35%</td><td rowspan="2">5,23%</td></tr>
<tr><td colspan="3">94,77%</td></tr>
</table>

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir). Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Layanan pengelolaan air limbah domestik erat kaitanya dengan peran Pemerintah DIY untuk menyediakan sanitasi yang layak bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan baik oleh rumah tangga sendiri maupun bersama dengan rumah tangga lain tertentu yang dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di DIY mencapai 96,45%, dimana 21,36% nya memiliki akses aman. Berikut data detail pencapaian akses sanitasi di DIY pada tahun 2022.

Tabel 2-46 Akses Sanitasi di DIY Tahun 2022

BABS	Akses Belum Layak	Akses Dasar	Akses Layak		
			Individu	Bersama	Akses Aman
0%	3,55%	0,74%	67,86%	6,49%	21,36%
Akses Sanitasi		96,45%			

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul: Yogyakarta,Sleman dan Bantul), TPA Kulon Progo dan TPA Gunungkidul.

Tabel 2-47 Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah di DIY

Elemen	2018	2019	2020	2021	2022	satuan
Jumlah TPS	287	287	565	565	647	Unit
Daya Tampung TPS	600	600	660	720	780	Ton
Jumlah Depo Sampah	106	103	101	92	92	Unit
Jumlah TPA	3	3	3	3	3	Unit
Jumlah TPST	61	61	57	69	69	Unit

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

TPA Regional Piyungan telah beroperasi sejak tahun 1996 dan saat ini sudah dalam kondisi penuh. Mulai bulan November 2022 layanan sampah dilakukan dengan menggunakan zona transisi dengan luas sekitar ±2,1 ha. Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus dari seluruh pihak terutama ketiga pemerintah Kota/Kabupaten di Wilayah Kartamantul dalam mengurangi sampah seoptimal mungkin dari sumbernya. Pemda DIY juga telah berupaya untuk menyiapkan lahan dengan luas sekitar ±5,8 ha melalui skema KPBU untuk penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah yang lebih efektif dalam memproses sampah dan memperpanjang umur lahan di TPA.

Peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA akan terus naik setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah (reduksi) di sumber sampah. Peningkatan volume sampah tersebut berlanjut kepada permasalahan lain yang mengikutinya seperti kebutuhan akan pewadahan sampah yang layak, metode pengumpulan yang sesuai dan teratur, lahan untuk TPS serta penanganan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA, kebutuhan akan armada yang layak serta sistem transportasinya yang memadai sampai dengan masalah penyediaan lahan untuk TPA yang layak dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan penanganan permasalahan sampah di daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila diawali dari pokok permasalahannya yaitu pada wilayah pelayanan kebersihan dan sumber sampah, yang dalam hal ini juga mencakup masalah volume timbulan, komposisi sampah serta penanganan sampah di sumber sampah itu sendiri.

Potensi timbulan sampah yang dihasilkan di Wilayah Kartamantul dapat dilihat dari timbulan sampah per kapita dan jumlah populasi. Pada tahun 2021, Wilayah

Kartamantul memiliki jumlah populasi sebesar 2.460.131 jiwa, sehingga potensi timbulan sampah yang dihasilkan di Wilayah Kartamantul adalah sebesar 1.308 ton per hari. Tabel di bawah mengilustrasikan potensi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masing-masing Kota/Kabupaten pada tahun 2021:

Tabel 2-48 Potensi Timbulan Sampah Wilayah Kartamantul Tahun 2021 Menurut *Masterplan*

No.	Wilayah	Timbulan Sampah per Kapita (kg/orang/hari)	Populasi 2021 (jiwa)	Timbulan Sampah (ton/hari)
1	Kota Yogyakarta	0,80	415.509	332
2	Kabupaten Sleman	0,65	1.088.109	707
3	Kabupaten Bantul	0,28	956.513	268
4	Wilayah Kartamantul	0,53	2.460.131	1.308

Sumber: Masterplan DLH Kota Yogyakarta (2021), Masterplan DLH Kab Sleman (2018), Masterplan DLH Kab Bantul (2021), Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (2022), Analisis Konsultan

Pengiriman sampah dari Wilayah Kartamantul ke TPA Piyungan pada tahun 2022 mencapai 728 ton per hari, naik sekitar 45% dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pengiriman sampah terbanyak berasal dari Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 283 ton per hari atau sekitar 39% dari total pengiriman sampah harian, disusul Kota Yogyakarta sebanyak 261 ton per hari atau sekitar 36%. Hal ini berbeda dengan lima tahun sebelumnya, di mana Kota Yogyakarta mendominasi pengiriman sampah ke TPA Piyungan (sekitar 48% dari total pengiriman sampah harian di tahun 2017). Secara total, sampah yang terkelola di Wilayah Kartamantul sekitar ± 880 tph terdiri dari aktivitas pengurangan dan penanganan sampah di sumber hingga kawasan (hulu) sebesar ± 147 tph dan aktivitas penanganan di TPA Piyungan (hilir) sebesar ± 732 tph.

Kegiatan pengurangan dan penanganan di hulu dilakukan melalui aktivitas pembatasan timbulan (contoh: kebijakan pembatasan plastik sekali pakai), kegiatan daur ulang di Bank Sampah, TPS 3R, Sarana Daur Ulang (SDU), TPST, rumah kompos, dan aktivitas Pengepul. Kontribusi aktivitas di hulu ini telah mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke TPA Piyungan sekitar 11,3% dari total timbulan sampah yang dihasilkan Wilayah Kartamantul. Sementara itu sebagian besar sampah (56%) masih bergantung terhadap penanganan sampah di TPA Piyungan. Berikut data timbulan sampah yang masuk di TPA Piyungan pada tahun 2022.

Tabel 2-49 Data Timbulan Sampah Tahun 2022

No	Bulan	Rata-Rata Volume Sampah (Ton/Hari)
1	Januari	751
2	Februari	770
3	Maret	773
4	April	785
5	Mei	657
6	Juni	747
7	Juli	666
8	Agustus	707
9	September	705
10	Oktober	669
11	November	834
12	Desember	824

Sumber: DLHK DIY, 2022

Peningkatan pengurangan dan penanganan sampah di hulu Wilayah Kartamantul diperlukan dalam rangka mengurangi ketergantungan dan memperpanjang umur TPA Piyungan. Dengan demikian, analisis pengembangan sistem hulu dapat membantu untuk melihat ada atau tidaknya risiko kecukupan kuantitas sampah yang diperlukan untuk KPBU TPAS Piyungan. Berikut ini merupakan angka proyeksi timbulan sampah yang digunakan sebagai basis dalam analisis pengembangan sistem hulu:

Tabel 2-50 Angka Timbulan Sampah Terpilih yang Menjadi Acuan Analisis Pengembangan Hulu

No.	Kota/Kabupaten	Timbulan Sampah Per Kapita Tahun 2022 (kg/orang/hari)	Timbulan Sampah Tahun 2022 (ton/hari)	Proyeksi Timbulan Sampah Masterplan Tahun 2027 (ton/hari)
1	Kota Yogyakarta	0,8	332	343
2	Kab. Sleman	0,65	707	747
3	Kab. Bantul	0,28	268	293
Total Wilayah Kartamantul		**0,53**	**1.308**	**1.383**

Sumber: Masterplan Persampahan dan Analisis Konsultan, FBC, 2022

Hingga saat ini, telah selesai dilakukan penataan sampah di Zona A dan Zona B dengan metode terasering. Penataan Zona A telah dilakukan hingga elevasi 140 mdpl sedangkan Zona B hingga elevasi 124 mdpl, sehingga masih dapat digunakan untuk menampung sampah ketika Zona Transisi 1 telah penuh. Saat ini, untuk layanan persampahan di TPA Regional Piyungan sampah yang masuk ditampung di Zona Transisi 1 yang telah beroperasi sejak 31 Oktober 2022 dengan kapasitas tampung sebesar 155.515,99 m2. Dengan asumsi volume sampah masuk sebesar 1.400 m^3/hari, berat sampah 700 ton/hari, faktor kompaksi 1,7 kg/m^3, maka Zona Transisi 1 dapat dipergunakan maksimal selama 157 hari dan diperkirakan penuh pada Bulan Maret 2023. Untuk menyikapi kondisi Zona A, Zona B dan Zona Transisi 1 penuh, maka pada tahun 2022 telah dilakukan penyusunan DED di Zona Transisi II seluas 2 Ha, dengan kapasitas tampung sebanyak 83.742,64 m^3, yang konstruksinya akan dilakukan pada tahun 2023 untuk selanjutnya digunakan untuk menampung sampah yang masuk.

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

1) Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan
2) Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan
3) Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan

4) Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan
jalan di TPA Piyungan: 450 Meter

Selain itu, dengan dana APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY di tahun 2020-2021 telah dilaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Playen Gunungkidul dan Pakem Sleman.

2.3.1.3.3 Sub Urusan Jalan

Pemerintah pusat telah menetapkan fungsi dan status jalan Nasional melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1. Pemda DIY menindaklanjuti Kepmen PUPR tersebut dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 327/KEP/2022 tentang Penetapan Jalan Strategis Provinsi dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2022 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 328/KEP/2022 panjang ruas jalan Kolektor 2 adalah 104,143 Km dan jalan kolektor 3 adalah 307,587 Km. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 327/KEP/2022 panjang jalan strategis Provinsi adalah 262,655 Km.

Terkait dengan SK Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi saat ini sedang berproses, sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi masih berlaku. Berikut peta ruas jalan Provinsi sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016.

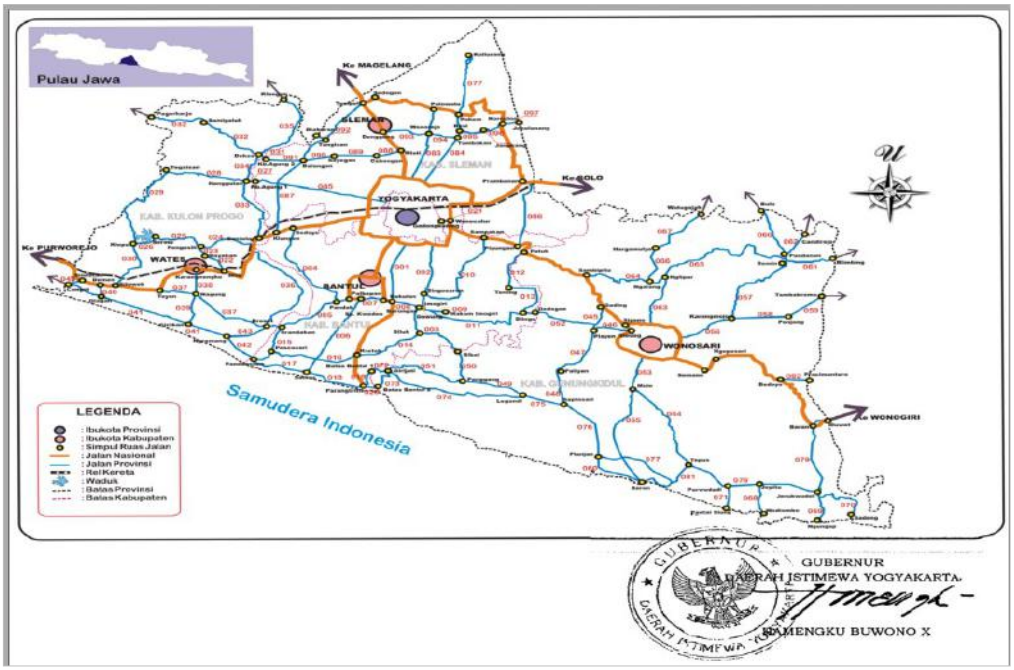

Sumber: lampiran SK Gub. DIY No. 118/KEP/2016

Gambar 2-51 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi

Kondisi kemantapan ruas jalan provinsi mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir masa RPJMD tahun 2017 – 2022. Kondisi kemantapan jalan yang menurun tersebut diakibatkan laju penanganan lebih kecil daripada laju kerusakan jalan. Berikut data kondisi jalan Provinsi di DIY dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2-51 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2018-2022

No	Sub Elemen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jalan Baik (Km)	333,21	357,37	366,52	341,84	301,205
2	Jalan Sedang (Km)	221,33	201,45	177,66	194,45	232,480
3	Jalan Rusak Ringan (Km)	140,37	143,99	155,05	156,94	171,615
4	Jalan Rusak Berat (Km)	65,55	57,65	61,23	67,22	55,150

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Berdasarkan data tersebut, jalan provinsi dalam kondisi mantap yang terdiri dari kondisi jalan baik dan sedang pada tahun 2022 sepanjang 533,685 Km atau setara 70,18%.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah di DIY pada tahun 2018 – 2022 terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 44,4 km. Penambahan panjang jalan nasional diperoleh dari pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang dimaksudkan untuk pengembangan wilayah bagian selatan. Dalam pembangunan jalan JJLS telah disepakati antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian tanggung jawab dan yang menjadi kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh/karang kitri maupun bangunan.

b. Pemerintah pusat dalam hal ini lewat Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban membangun fisik konstruksi jalan berikut bangunan pelengkapnya pada lokasi yang tanahnya telah dibebaskan oleh pemerintah daerah.

Panjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu sepanjang 116,07 Km. Realisasi JJLS hingga akhir tahun 2022 antara lain:

1. Lahan sudah bebas untuk 2 lajur sepanjang 115,37 Km (99,40%)
2. Lahan sudah bebas untuk 4 lajur sepanjang 79,38 km (68,39%)
3. Konstruksi jalan yang telah terbangun sepanjang 94,96 Km (81,81%)

Pembangunan jaringan jalan JJLS masih menyisakan pembangunan jembatan Srandakan 3 dan ruas Kretek–Girijati.

Penambahan panjang jalan provinsi diperoleh dari pengembangan ruas jalan Prambanan – Gading merupakan jalan alternatif untuk aksesibilitas dari Yogyakarta menuju Gunungkidul. Selain itu, ruas jalan ini akan menghubungkan antar KSPN Prambanan, Kawasan Gunung Api Purba dan KSPN Karst Gunungkidul, KSPN Pantai Selatan Yogyakarta, serta membuka akses antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul yang diharapkan dapat membangkitkan ekonomi pada area yang dilalui. Panjang jalan total ruas Prambanan – Gading adalah 27,68 Km, dengan 6,1 Km menggunakan trase eksisting yang sudah ada dan 21,58 Km merupakan trase baru. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun 15,67 kilometer atau 56,61%, sehingga masih

terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan–Gayamharjo sepanjang 9,18 kilometer dan Ngoro-Oro (Tawang)–Ngalang sepanjang 2,83 kilometer.

Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan Jalan Tol di wilayah D.I. Yogyakarta terdiri dari 2 ruas yaitu Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen. Panjang total trase jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo adalah 96,58 km yang dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 sepanjang 35,65 km (Kartasura sampai dengan Batas Provinsi Jateng – DIY), seksi 2 sepanjang 22,36 km (Batas Provinsi Jateng – DIY sampai dengan Junction Sleman) dan seksi 3 sepanjang 38,57 km (Junction Sleman sampai dengan Kulon Progo, Batas Provinsi Jateng – DIY). Target operasional keseluruhan jalan tol ini direncanakan dapat digunakan pada tahun 2026. Jalan tol Yogyakarta – Bawen direncanakan memiliki panjang 75,82 km, segmen yang berada di wilayah Yogyakarta yaitu pada seksi 1 sepanjang 8,8 km (konstruksi *elevated* 4,9 km dan sisanya konstruksi *at grade*).

2.3.1.3.4 Sub Urusan Jasa Konstruksi

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki ketugasan untuk penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pemda DIY telah melakukan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dalam rangka melakukan tanggung jawab dalam bidang jasa konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui antara lain:

1. Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
2. Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an; dan
3. Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Pada tahun 2022 layanan Jasa Pengujian yang dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 944 dokumen LHU (terdiri dari 926 LHU Pelayanan Umum Lab. Konstruksi dan 18 LHU uji Aspiratif). Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lainnya yaitu Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak permintaan tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga/ badan seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberi jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan kehandalan sektor konstruksi. Pada tahun 2022 terdapat jumlah permintaan Tenaga Ahli sebanyak 12.008 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 4.433 orang.

Fenomena di atas tersebut, memberikan gambaran bahwa adanya gap kebutuhan pasar tenaga ahli konstruksi di DIY. Di sisi lain beban pekerjaan tenaga ahli semakin berat karena harus menangani beberapa proyek pada saat yang bersamaan. Selain itu, insentif tenaga ahli di DIY dinilai masih sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hal inilah yang menjadi penyebab para tenaga ahli cenderung lebih memilih pekerjaan yang ada di luar DIY.

Berdasarkan data berikut terlihat bahwa, jumlah tenaga ahli Konstruksi yang tersertifikasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Puncak penurunan jumlah tenaga ahli Konstruksi terjadi di tahun 2020 yang hanya sejumlah 30 orang. Hal ini disebabkan karena adanya kasus

lonjakan Covid-19 pada pertengahan tahun, sehingga peserta yang mendaftar hanya sedikit.

Tabel 2-52 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2018-2022

Data	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi)	orang	300	297	30	92	100

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Hingga November tahun 2022 telah dilakukan sertifikasi terhadap 100 orang Tenaga ahli Konstruksi. Pada Surat Edaran Menteri PUPR No. 02/SE/M/202 menyatakan bahwa, biaya sertifikasi ditanggung oleh APBN sehingga Balai PJK hanya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat (LPJKN). Selain itu, ada juga SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, menyebabkan permohonan SBU dan SKK yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 6 Des 2021. Dengan berlakunya dua SE tersebut di atas, mengakibatkan dampak lain yaitu Asosiasi Profesi sebagai mitra rekruitmen peserta mengaku kesulitan dalam mendapatkan peserta yang bersedia mengikuti sertifikasi sebagai akibat masa transisi LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum.

2.3.1.3.5 Sub Urusan Penataan Ruang

Ruang Wilayah DIY yang terletak pada 7°33'–8°12' Lintang Selatan dan 110°00'–110°50' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 Km^2, meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah DIY untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah provinsi.

Penyelenggaraan tata ruang wilayah DIY, yang merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasil guna demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penyelenggaraan penataan ruang di DIY mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY Tahun 2019 – 2039, dimana pada tahun 2022 RTRW DIY sedang proses revisi menyesuaikan PP No. 21 Tahun 2021 dan direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2023.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Data menunjukkan bahwa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada di dalam Dokumen RTRW mengalami tren peningkatan. Apabila dilihat secara rata-rata, tren peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 1,39% . Peningkatan paling pesat terjadi pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 2,09%. Di bawah ini data kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2-53 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2022

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	Target Kesesuaian (%)	76,50	78,50	79,50	81,00	82,5
	Realisasi Kesesuaian (%)	77,05	78,85	78,95	81,04	82,62
	Belum Terwujud (%)	13,57	15,34	15,24	13,26	12,18
	Tidak Sesuai (%)	09,38	05,81	05,81	05,72	5,21

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar 82,62% dari target sebesar 82,5% atau tercapai sebesar 100,14%. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan total luas kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas total kawasan lindung dan budidaya. meskipun target pada tahun 2022 tercapai, masih terdapat perwujudan

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya pada kawasan lindung perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan sempadan sungai sebesar 23,51%, kawasan sempadan pantai sebesar 18,87% dan kawasan cagar alam geologi sebesar 16,04%. Sedangkan pada kawasan budidaya perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan peruntukan industri sebesar 34,56%, kawasan peruntukkan riset dan pendidikan tinggi sebesar 14,47% dan kawasan peruntukan perkebunan sebesar 11,68%.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terkait juga dengan capaian dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang. capaian Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang pada tahun 2022 sebesar 80,26% dari target sebesar 78,70% atau tercapai sebesar 101,98%. Hasil penilaian keterpaduan program RTRW DIY tahun 2022 sebesar 80,26% dengan klasifikasi berkualitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi aktual program/kegiatan OPD/Instansi di DIY pada tahun 2022 sudah selaras dan mengacu pada program RTRW DIY. Penilaian keterpaduan program RTRW DIY terdiri dari perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan Kawasan strategis. Dari ketiga komponen tersebut nilai terendah ada pada perwujudan struktur ruang yang bernilai 64,13% dengan klasifikasi kurang berkualitas. Sedangkan untuk perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis menunjukkan hasil klasifikasi berkualitas dengan nilai 90,70% dan 100%. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa beberapa program pada indikasi program struktur ruang RTRW DIY masih banyak yang belum terlaksana pada tahun 2022. Selain perwujudan struktur ruang, hasil penilaian keterpaduan program pola ruang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik untuk mendukung perwujudan pola ruang dan kawasan strategis sesuai dengan RTRW.

Terkait RDTR yang sesuai dengan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (terintegrasi dengan OSS) sudah ada empat Peraturan Kepala Daerah dari rencana 25 RDTR, antara lain:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Sleman Timur;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Siung Wediombo;
3. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang RDTR Sleman Barat

Sedangkan RTRW yang sesuai dengan PP 21 Tahun 2021 yaitu dua Perda dari rencana lima Perda Kabupaten/Kota dan satu Perda DIY sebagai berikut:

1. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Yogyakarta; dan
2. Perda Kab Sleman Nomor 13 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sleman

Sementara itu, capaian penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan tahun 2022 yaitu sebesar 55,29% dari target sebesar 54,44% atau tercapai sebesar 101,56%. Capaian ini didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan ruang SRS yaitu telah tersusun sebanyak 18 rencana rinci dari 18 SRS yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rapergub Strategi Pengembangan Wilayah SRS Kasultanan dan Kadipaten, telah tersusun 7 rencana induk dari 18 SRS dan telah tersusun 16 RTBL di 18 SRS. Dari sisi pemanfaatan telah tersusun sebanyak 20 DED di kawasan SRS, telah dilaksanakan 23 pembangunan konstruksi di kawasan SRS dan telah dilaksanakan pengendalian terhadap 14 SRS dari 18 SRS.

Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan Rencana Induk (RI) SRS di klasterisasi menjadi 9 klaster sebagai berikut

1. Tahun 2023 terdapat 4 klaster, yaitu :
    a. RI SRS Karst Gunungsewu dan RI SRS Sokoliman (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
    b. RI SRS Pantai Selatan Gunungkidul, RI SRS Pantai Samas-Parangtritis, RI SRS Pantai Selatan Kulon Progo (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
    c. RI SRS Merapi (Evaluasi Rapergub)
    d. RI Prambanan-Candi Ijo (Evaluasi Rapergub)
2. Tahun 2024 terdapat 2 klaster,
    a. RI SRS Kerto Pleret dan RI SRS Makam Raja Raja Mataram di Imogiri dan RI SRS Masjid dan Makam Raja Raja Mataram di Kotagede (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub);
    b. 2. RI SRS Sumbu Filosofi, RI SRS Keraton, RI SRS Pura Pakualaman, dan RI SRS Kotabaru (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
3. Tahun 2025 terdapat 2 klaster
    a. RI SRS Masjid Pathok Negoro (Babadan, Dongkelan, Mlangi, Plosokuning) (Penyusunan, Evaluasi);
    b. RI SRS Makam Girigondo dan RI SRS Pusat Kota Wates (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)

4. Tahun 2026 terdapat 1 klaster yaitu RI SRS Perbukitan Menoreh (Review dan Evaluasi)

Tabel 2-54 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada 18 SRS Tahun 2022

No	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Sesuai		Belum Terwujud		Tidak Sesuai		Total
		Luas (ha)	Persentase	Luas (ha)	Persentase	Luas (ha)	Persentase	
1	SRS Kraton	260,81	97,11	6,55	2,44	1,22	0,45	268,58
2	SRS Imogiri	1.984,84	96,6	69,89	3,4	0	0	2054,73
3	SRS Sumbu Filosofi	934,72	94,02	44,59	4,48	14,87	1,5	994,18
4	SRS Kotagede	229,62	90,91	18,09	7,16	4,85	1,92	252,57
5	SRS Masjid Pathok Negoro	213,81	70,83	76,98	25,5	11,08	3,67	301,87
6	SRS Merapi	4.593,26	87,78	420,85	8,04	218,37	4,17	5232,48
7	SRS Pantai Samas-Parangtritis	2.450,51	81	383,53	12,68	191,28	6,32	3025,32
8	SRS Kerto Pleret	2.460,20	96,17	98,06	3,83	0	0	2558,26
9	SRS Kotabaru	142,97	79,57	25,43	14,15	11,27	6,27	179,67
10	SRS Prambanan-Candi Ijo	6.572,12	81,46	1.137,77	14,1	358,03	4,44	8067,92
11	SRS Sokoliman	7.413,21	72,06	2.672,77	25,98	201,18	1,96	10287,16
12	SRS Perbukitan Menoreh	14.833,11	58,86	7.198,77	28,57	3.168,61	12,57	25200,49
13	SRS Kars Gunungsewu	47.126,47	78,02	13.211,22	21,87	66,49	0,11	60404,18
14	SRS Pantai Selatan Gunungkidul	37.361,46	95,83	1.526,10	3,91	100,39	0,26	38.987,96
15	SRS Puro Pakualaman	83,62	95,75	2,71	3,11	0,99	1,14	87,32
16	SRS Makam Girigondo	69,15	63,71	38,81	35,75	0,57	0,53	108,54
17	SRS Pusat Kota Wates	2.096,95	64,22	926,35	28,37	241,86	7,41	3.265,15
18	SRS Pantai Selatan Kulon Progo	5.408,45	84,89	602,71	9,46	360,3	5,65	6371,46
	Total	134.235,28	82,71	28.461,19	14,05	4.951,37	3,24	167.647,84

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang SRS keistimewaan pada tahun 2022 sebesar 82,71%, belum terwujud sebesar 14,05% dan tidak sesuai sebesar 3,24%. Nilai kesesuaian paling rendah terdapat pada SRS Perbukitan Menoreh yaitu sebesar 58,86%, belum terwujud paling tinggi pada SRS Makam Girigondo sebesar 35,76% dan tidak sesuai paling tinggi pada SRS Perbukitan Menoreh yaitu sebesar 12,57%.

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau berikut sarana dan prasarana pendukungnya.

Hingga tahun 2022, berdasarkan jumlah baseline sebesar 65.578 RTLH, penanganan RTLH di DIY telah mencapai 65,5% , dimana hingga tahun 2021 telah tertangani sebesar 56,12% dan tahun 2022 sebesar 9,38% terhadap jumlah RTLH Kab./kota se-DIY atau setara dengan 42.953 unit dari baseline RLTH 65.578 unit. Apabila dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah RTLH mengalami peningkatan secara pesat terutama pada tiga tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Penanganan RTLH yang cukup pesat pada tiga tahun terakhir merupakan upaya dan peran dari berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan perusahaan swasta (sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi).

Tabel 2-55 Penanganan RTLH 2018-2022

Lokasi	Data Base	Tertangani				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kota Yogyakarta	2.797	488	1.267	1.612	2.267	2.537
Kabupaten Kulon Progo	14.891	2.005	6.511	7.604	8.031	9.381
Kabupaten Bantul	5.703	1.848	6.310	8.032	9.447	10.397
Kabupaten Sleman	16.347	1.447	5.440	6.976	7.897	9.435
Kabupaten Gunungkidul	25.840	1.934	5.958	7.819	9.159	11.203
Jumlah	65.578	7.722	25.486	32.043	36.801	42.953

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Mulai pada tahun 2022 Pemda DIY juga melakukan Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui pembangunan baru rumah layak huni (PB RLH) yang mengedepankan bentuk rumah tradisional Jawa, yang dilakukan melalui bantuan stimulan untuk masyarakat miskin yang memiliki rumah rusak berat atau tinggal dalam rumah yang memiliki luasan bangunan yang tidak sesuai standar yaitu, 7,2 m2 per jiwa, atau terdapat lebih dari 1 (satu) KK yang tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penanganan pembangunan baru tersebut baru sebanyak 40 unit dengan rincian di Kabupaten Gunungkidul 20 unit, di Kabupaten Bantul 10 unit dan di Kabupaten Kulon Progo 10 unit.

Sebagai dukungan terhadap lingkungan perumahan dan permukiman, jumlah penyediaan PSU layak di kawasan permukiman DIY telah mencapai 424 titik hingga tahun 2022. Jika dilihat capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah capaian tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2020 kegiatan penanganan PSU tidak dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 (seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini).

Tabel 2-56 Penanganan PSU Tahun 2018-2022

Lokasi	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Yogyakarta	-	-	-	2	15
Kab. Kulon Progo	25	35	-	28	26
Kab. Bantul	35	47	-	65	100
Kab. Sleman	65	126	-	102	136
Kab. Gunungkidul	119	61	-	81	148
Jumlah	**244**	**269**	**-**	**278**	**424**

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan SK Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang menjadi *baseline* RPJMD 2018-2022 Pemda DIY mendapat kewenangan untuk menangani kawasan kumuh seluas 110,39 Ha yang tersebar di kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Progres penanganan kawasan kumuh sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai 100% (seperti yang terlihat pada tabel berikut ini).

Tabel 2-57 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK Kabupaten/Kota 2016) dan Progres Penanganan

Kabupaten /Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kelurahan/ Desa	Luas (Ha)	Lokasi	Tahun Penanganan	Status Penanganan
Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	12.91	RW 1,2,4,5,6,7,8,9	2017	Selesai 100%
		Prawirodirjan		RW 1,2,3,5,6,8,10,11 ,12,14,15,16,17, 18	2017	Selesai 100%
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	RW 8,10,11	2018	Selesai 100%
		Patangpuluan		RW 5,6,7,10	2018	Selesai 100%
		Wirobrajan		RW 6,7,9	2018	Selesai 100%
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	RW 1,2,9,11,12	2019	Selesai 100%
		Notoprajan		RW 1,2,3,4	2019	Selesai 100%
		JUMLAH 1	**36.59**			
Bantul	Sewon	Pendowoharjo	11.71	Cepit RT05	2018	Selesai 100%
		JUMLAH 2	**11.71**			
Sleman	Depok	Condong Catur	11.39	Padukuhan Ngropoh, Dusun Ngropoh RT02/ RW23	2018	Selesai 100%

Kabupaten /Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kelurahan/ Desa	Luas (Ha)	Lokasi	Tahun Penanganan	Status Penanganan
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	Padukuhan Turen, Dusun Tegalrejo RT05/ RT02	2018	Selesai 100%
		JUMLAH 3	23.07			
Kulon Progo	Galur	Brosot	14.16	Pedukuhan III Pulo (RT02/RW01 & RW05, RW06)	2018	Selesai 100%
			12.93	Padukuhan Bantengan Lor	2018	Selesai 100%
	Pengasih	Pengasih	9.52	Padukuhan Dayakan (RT16,17/RW 06)	2019	Selesai 100%
			2.41		2019	Selesai 100%
		JUMLAH 4	**39.02**			
JUMLAH 1 s/d 4 KEWENANGAN PROVINSI			**110.39**			

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Pada Tahun 2020/2021 telah diterbitkan kembali SK Kawasan Kumuh dari Kabupaten/kota terbaru , dimana dalam SK tersebut terdapat luasan kawasan yang menjadi Kewenangan DIY dalam penanganannya seluas 160,05 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-58 Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha)

No.	Kabupaten/ Kota	Kapanewon	Kel/Kal	RW/Dusun	Luas {Ha)	Prioritas
1	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	3, 6, 7	12,29	
			Purbayan	8, 11, 13		
			Rejowinangun	3		
2		Wirobrajan	Pakuncen	1, 5, 6	13,75	
			Patangpuluhan	1, 2, 5, 7, 10		
			Wirobrajan	1, 10, 12		
3		Gondokusuman	Baciro	18, 20	10,64	
			Klitren	5		
			Terban	1, 10, 11		
Total Kota Yogyakarta (Ha)					**36,68**	
4	Bantul	Banguntapan	Jambidan	Pamotan RT 1, 3, 4, 5	10,92	

No.	Kabupaten/ Kota	Kapanewon	Kel/Kal	RW/Dusun	Luas {Ha)	Prioritas
5			Potorono	Salakan RT 1, 3, 4, 5, 6	10,29	
6		Bantul	Trirenggo	Bogoran RT 1, 3	12,64	
7		Sewon	Panggungharjo	Jaranan RT 1, 2, 3, 4, 5,	12,44	
8		Pajangan	Guwosari	Dukuh RT 1, 2, 3, 6	10,53	
9		Pajangan	Sendangsari	Benyo RT 4, 7, 8, 9	13,52	
Total Kabupaten Bantul (Ha)					**70,34**	
10	Sleman	Ngaglik	Sariharjo	Jongkang	14,22	
Total Kabupaten Sleman (Ha)					14,22	
11	Kulon Progo	Sentolo	Banguncipto	RT 012-RW006 Padukuhan Ploso	13,11	1
			Sentolo	RT 013-RT 014 RW 007, RT 015 RW 008, Padukuhan Sentolo Lor		
				RT 019 – RT 020 RW 010 Padukuhan Sentolo Kidul		
Total Kabupaten Kulon Progo (Ha)					**13,11**	
12	Gunungkidul	Playen	Logandeng	Padukuhan Siyono Wetan (RT58, 59, 61, 62, 63, 65/ RW 10) Padukuhan Siyono Kidul (RT 42, 43/ RW 08)	14,55	2
13		Wonosari	Wonosari	Padukuhan Gadungsari (RT 1, 2, 3. RW 10, RT12, RT 9, 11/ RW 13)	11,15	3
Total Kabupaten Gunungkidul (Ha)					25,70	
Total DIY		**13 Kawasan**			**160,05**	

Penanganan perumahan pada kawasan miskin seyogyanya dilakukan secara terintegrasi, sehingga akan tuntas per kawasan, selain penanganan dalam bentuk pembangunan baru rumah layak huni maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan Prasarana dan Sarana Umum yang juga diintegrasikan dengan pembangunan prasarana dan sarana Air Minum dan Sanitasi. Selain itu, untuk memenuhi SPM, bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan kegiatan relokasi bagi korban bencana berupa penyediaan rumah yang layak huni. Mulai tahun 2020, kewenangan penyediaan rumah bagi korban bencana semula menjadi kewenangan BPBD beralih menjadi kewenangan DPUPESDM. Menindaklanjuti data BPBD terdapat 5 rumah yang perlu direlokasi. Kemudian terdapat tambahan usulan dari kalurahan di Kapanewon Cangkringan sebanyak 5 rumah, sehingga total terdapat 10 rumah yang perlu direlokasi. Relokasi baru mulai dilaksanakan di tahun 2023 sebanyak 3 unit rumah, kemudian di tahun 2024 rencana relokasi untuk 3 unit rumah.

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan Kota Pendidikan, Kota Budaya, dan Kota Wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di antaranya :

a. Aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan cenderung meningkat setiap tahun. Data Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus *klithih*/kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 56 kasus, tahun 2021 sebanyak 51 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76 kasus.

b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin.
c. Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah DIY berupa pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan menjadikan Yogya sebagai kota sejuta reklame.
d. Kondisi DIY sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
e. Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung/lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak tentram dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di DIY. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram

dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas DIY yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintahyang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi : Tertib Jalan, Tertib Sungai, Tertib Kawasan Pantai, Tertib Kelautan, Tertib Lingkungan, Tertib Sumber Daya Mineral, Tertib Kehutanan, Tertib Perizinan, Tertib Pendidikan, dan Tertib Tata Ruang. Pemda DIY mempunyai harapan besar supaya upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibentuklah Kader Penegak Perda dan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah warga masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta didorong rasa kebersamaan, kekeluargaan secara sukarela mengabdi di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di Desa/Kelurahan. Selanjutnya masih dalam semangat untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemda DIY akan melakukan penguatan dan revitalisasi fungsi Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga.

Kelompok Jaga Warga dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga sebagaimana kemudian diubah melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021

Tentang Kelompok Jaga Warga. Jaga Warga merupakan suatu upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat, seperti kelompok siskamling, kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan, kelompok peduli bencana, dan lain-lain.

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerjasama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya. Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keberadaan Jaga Warga juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial, dan tindak kriminal di masyarakat.

Di satu sisi, baik Polri maupun TNI pada dasarnya telah memiliki konsep tertentu dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keterlindungan warga seperti kebijakan dan strategi Polmas (Pemolisian Masyarakat) di dalam penyelenggaraan tugas Polri serta keberadaan Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh TNI di mana keduanya merupakan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan TNI/Polri bisa bekerjasama, membangun sinergi serta menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan fungsi keterlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Jaga Warga tersebut. Melalui Jaga Warga, permasalahan-permasalahan yang diperkirakan muncul di lingkungan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila, serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).

Berdasarkan data di bawah ini, jumlah pelanggaran perda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah

pelanggaran perda yang terkecil berada di angka 63 kasus di tahun 2020 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 2-59 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2018-2022

No.	Bidang Urusan	Elemen	Tahun					Satuan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	1.397	2.187	63	907	382	Unit/Kasus

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

Beberapa upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah, pengembangan budaya sadar hukum di masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi di sekelilingnya dengan menggunakan kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya

adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Tingkat kriminalitas di wilayah DIY selama tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat kriminalitas di DIY pada tahun 2021 meningkat sebanyak 13,4% bila dibanding 2020. Fenomena tersebut dipicu salah satunya yakni perkembangan wilayah dan kondisi sosial masyarakat. Secara total tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah DIY ada di angka 5.331 selama 2021 naik sebanyak 1.251 kasus di banding 2020 yang berada di angka 4.701. Sebanyak 3.471 kasus selesai, sisanya 1.860 kasus masih dalam proses.

Kasus-kasus yang paling menonjol di antaranya kasus narkoba, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Kasus narkoba tahun 2020, sebanyak 622 kasus, tahun 2021 menjadi 547 kasus (turun 75 kasus atau 12,06%). Kasus KDRT dari 81 kasus tahun 2020 menjadi 75 kasus tahun 2021 (turun 6 kasus atau 7,41%) dan kasus curanmor terjadi penurunan, tahun 2020 ada 148 kasus, sedangkan tahun 2021 ada 106 kasus (turun 28,38%). Kasus curas tahun 2020 ada 63 kasus, sedangkan tahun 2021 ada 48 kasus (turun 15 kasus atau 23,81%). Khusus untuk kasus curat terjadi penurunan. Kasus curat tahun 2020 ada 335 laporan, tahun 2021 ada 370 laporan (naik 35 kasus atau 10,45%). (Sumber: Polda DIY, 2022)

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk "mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat" serta mewujudkan visi dan misi Arah Renaisans Keterlindungan Warga DIY, maka dilakukan berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma sosial, dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menghilangkan rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tentram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan, baik tergabung dalam kelompok mayoritas atau minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik, dan status kelas ekonominya.

Kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat juga akan mempengaruhi kehidupan dan penghayatan demokrasi di DIY. Tingkat kualitas

penghayatan demokrasi di DIY diukur dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikatorkomposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Aspek kebencanaan di DIY menjadi salah satu faktor yang berpengaruh atas kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kondisi risiko bencana di DIY pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di DIY adalah sebesar 126,43. Meskipun cenderung mengalami penurunan setiap tahun, Skor IRBI 126,43 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY kategori sedang.

Tabel 2-60 Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018-2021

Tahun	Angka Indeks
2018	142,24
2019	140,92
2020	140,92
2021	126,43

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Tabel 2-61 Perbandingan Indeks Risiko IRBI DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2021

Tahun	IRBI DIY	IRBI Rata-Rata Nasional
2021	126,43	138,93

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jika disandingkan secara nasional maka IRBI DIY masih di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, angka IRBI DIY sebesar 126,43 masih tergolong sedang sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Terakhir terdapat ancaman penyalahgunaan narkoba yang perlu ditanggulangi. Berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY di bawah merupakan angka persentase penduduk pernah pakai narkoba dalam 1 tahun terakhir di DIY . Pada tahun 2014, angka prevalensi penyalahgunaan di DIY adalah sebesar 2,18%. Angka ini sempat turun menjadi 1,77% pada tahun 2017. Namun demikian pada tahun 2019 angka prevalensi tercatat meningkat sebesar 0,53% menjadi 2,30%. Kenaikan angka prevalensi penggunaan narkoba perlu menjadi perhatian khusus dengan peningkatan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dari sedini mungkin. Sosialisasi dan edukasi terkait hal tersebut masih bersifat insidental di mana tingkat keberlangsungan program rendah dan efektifitas program masih dipertanyakan. Selain itu kemungkinan munculnya *New Psychoactive Substances* atau narkoba sintetis jenis baru juga patut diwaspadai.

Tabel 2-62 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY

Tahun 2014	Tahun 2017	Tahun 2019
2,18%	1,77%	2,30%

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

Tabel 2-63 Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dan Rata-Rata Nasional Tahun 2019

Peringkat	Provinsi	Angka Prevalensi Tahun 2019 (%)
1	Sumatera Utara	6,5%
2	Sumatera Selatan	5,0%
3	DKI Jakarta	3,3%
4	Sulawesi Tengah	2,8%
5	**Daerah Istimewa Yogyakarta**	**2,3%**
Rata-Rata Nasional		**1,8%**

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan secara nasional, angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY tahun 2019 berada pada peringkat 5 secara nasional dengan angka prevalensi sebesar 2,3%. Angka Prevalensi ini juga lebih tinggi dari rata-rata Angka Prevalensi secara nasional sebesar 1,8%. Hal ini

menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY cukup tinggi dan perlu penanganan lebih lanjut.

Dalam hal kondisi politik, stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian, beragam tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, *black campaign* dan praktik menyimpang lainnya. Berikut matriks partisipasi pemilu di DIY.

Tabel 2-64 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun

Wilayah	Pileg			Pilpres					Pilkada			
	2004	2009	2014	2004		2009	2014	2019	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2017	2020
				Putaran I	Putaran II							
Kota Yogyakarta	75.04	66.64	75.88	79.08	75.61	69.21	77.76	84.81	53.32	64.46	70.8	-
Kabupaten Bantul	92.11	74.08	81.2	85.24	82.63	79.11	81.31	87.89	76.52	73.69	75.33	80.32
Kabupaten Kulon Progo	87.04	73.37	80.64	85.41	82.96	73.46	79.32	86.5	75.66	69.7	79.32	-
Kabupaten Sleman	81.3	72.68	81.4	78.81	76.04	77.61	81.72	87.82	77.69	70.67	72.26	75.99
Kabupaten Gunungkidul	82.41	75.14	78.53	79.12	75.26	75.36	76.89	82.96	75.27	71.87	70.12	80.18
DIY	**84.13**	**72.94**	**80.02**	**80.93**	**77.79**	**75.97**	**79.84**	**88.68**	**71.69**	**70.08**	**73.57**	**70.83**

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY

2.3.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan advokasi serta sinergi.

Tabel 2-65 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) /Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun 2018-2022

Jenis PMKS/PPKS	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**660.627**	**637.457**	**n/a**	**102.746**	**n/a**
Anak Jalanan	67	72	n/a	47	132
Eks Psikotik	1.654	1.375	n/a	1.819	4.335
Pengemis	134	147	n/a	111	64
Gelandangan	190	197	n/a	123	72
Anak Balita Terlantar	762	620	n/a	441	431
Anak Terlantar	11.009	9.607	n/a	7.902	5.200
Korban Tindak kekerasan	762	697	n/a	560	238
Pemulung	467	465	n/a	412	327
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.454	12.365	n/a	12.407	11.526
Lanjut Usia Terlantar	42.417	37.442	n/a	33.129	26.525
Penyandang Disabilitas	29.025	27.129	n/a	26.866	28.137
Penyandang Tuna Netra	2.015	1.728	n/a	2.192	1.958
Penyandang Tuna Rungu-Wicara (data gabungan	1.996	1.689	n/a	2.415	1.372

Jenis PMKS/PPKS	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
tuna wicara,rungu,rungu-wicara)					
Penyandang Tuna Daksa	8.761	6.488	n/a	7.630	9.575
Penyandang Tuna Grahita	7.153	6.099	n/a	8.336	2.019
Penyandang Disabilitas Mental	1.635	1.357	n/a	1.819	4.460
Penyandang Disabilitas Ganda	1.390	1.113	n/a	1.468	1.945
Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	301	185	170	185	555
Tidak diketahui jenis kecacatannya	5.131	7.212	n/a	2.021	1.394
Tuna Susila	290	259	n/a	361	90
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	247	225	n/a	170	157
Korban Penyalahgunaan NAPZA	466	439	n/a	323	242
Keluarga Fakir Miskin	550.868	534.994	n/a	n/a	n/a
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.960	4.979	n/a	4.515	4.165
Korban Bencana Alam	61	8	n/a	7.687	21.908
Korban Bencana Sosial	0	117	n/a	80	59
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	303	327	n/a	278	208
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3.712	4.193	n/a	5.127	5.617

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Data PMKS/PPKS di DIY dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, terlihat pada data Tabel Perkembangan PMKS/PPKS DIY di atas, dari masing-masing jenisnya terdapat data yg menunjukkan arah penurunan dan juga arah peningkatan. Pada tahun 2022 terlihat data menurut jumlah terbesar terdapat pada Penyandang Disabilitas sebanyak 28.137 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 26.525 orang, dan Korban Bencana Alam sebanyak 21.908 orang. Pemberian jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS/PPKS lainnya.

2.3.1.6.1 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS/ PPKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

Tabel 2-66 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2018-2022

Jenis PSKS	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Karang Taruna	438	438	438	438	438	Kelompok
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	78	78	78	78	78	Orang
Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial	381	381	387	316	283	Unit
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	5.020	5.130	5.130	5.057	3.073	Orang
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	1.030	1.068	736	1.091	662	Orang
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	223	263	263	229	304	Kelompok

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS/PPKS melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); (e) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel 2-67 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017-2023

No	Nama Balai / Panti Sosial	Kapasitas Daya Tampung						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	185	185	185	185	185	185	185

No	Nama Balai / Panti Sosial	Kapasitas Daya Tampung						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	60	60	60	60	70	70	70
3	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	300	300	300	300	300	300	280
4	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	80	80	80	80	80	80	80
5	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	214	214	224	228	214	228	228
6	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	140	140	140	140	125	140	140

Sumber: Dinas Sosial DIY 2023

Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.3.2.1.1 Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2018–2022, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS DIY, PUK DIY pada tahun 2018 adalah sebesar 3.044,59 ribu orang dan pada tahun 2022 meningkat hingga mencapai 3.217,87 ribu orang.

Tabel 2-68 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (ribu orang), Tahun 2018–2022

Jenis Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	2.226,28	2.246,19	2.228,16	2.334,96	2.336,08
- Bekerja	2.151,25	2.174,71	2.126,32	2.228,52	2.241,13
- Penganggur	75,03	71,48	101,85	106,43	94,94
Bukan Angkatan Kerja	818,30	842,64	904,59	840,83	881,80
Penduduk Usia Kerja	3.044,59	3.088,83	3.132,75	3.175,79	3.217,87
TPAK (Persen)	73,37	72,72	71,12	73,52	72,60
TPT (Persen)	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2022 sebanyak 2.336,08 ribu orang mengalami peningkatan 1,12 ribu orang dari Agustus 2021 sebesar 2.334,96 ribu orang. Pada Agustus 2020, angkatan kerja di DIY sempat mengalami penurunan 0,8% dari tahun sebelumnya sebagaimana merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana banyak angkatan kerja yang bergeser menjadi bukan angkatan kerja misal mengurus rumah tangga. Pada Agustus 2021 jumlah angkatan kerja di DIY mulai ada peningkatan kembali hingga Agustus 2022.

Pada Agustus 2022, sektor perdagangan menjadi sektor tertinggi penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 444,74 orang kemudian diikuti sektor pertanian dan industri masing-masing menyerap sebanyak 402,04 ribu dan 387,21 ribu tenaga kerja. Meski demikian, sektor perdagangan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dibanding Agustus 2021 sebesar 2,12%. Sedangkan pada sektor Akomodasi dan Penyediaan makan dan minum mengalami kenaikan sebesar 1,61% dibanding Agustus 2021. Hal ini dikarenakan mulai normalnya mobilitas penduduk, sehingga pariwisata di DIY berangsur kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19, kembalinya pembelajaran tatap muka juga menjadikan maraknya kembali kos-kosan di DIY.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di DIY masih bisa dipertahankan terbukti dengan diterimanya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk dua (2) kategori yaitu IPK Terbaik Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja.

2.3.2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja *(labor supply)* untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Menurut hasil Sakernas BPS, TPAK DIY pada periode Agustus 2018 hingga Agustus 2021 masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Agustus 2018, TPAK DIY adalah sebesar 73,37%, kemudian terus mengalami penurunan hingga Agustus 2020 yang mencapai angka 71,12% dan kemudian mengalami kenaikan kembali pada Agustus 2021 dengan angka sebesar 73,52%, namun pada Agustus 2022 TPAK DIY kembali mengalami penurunan menjadi 72,60%. Angka TPAK sebesar 72,60% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 73 orang diantaranya disebut sebagai angkatan kerja.

2.3.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan sebagian jumlah angkatan kerja tidak bisa mendapatkan pekerjaan/menganggur. Mekanisme pasar kerja tergantung adanya permintaan dan penawaran (*supply and demand*) tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya *"Gap"* antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur terbuka di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Kondisi ini perlu dijembatani untuk menghubungkan dunia industri/usaha dengan dunia pendidikan. *Link & match* berbasis *market driven* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu segera dilakukan.

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya. *Supply* tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di pedesaan.

TPT di DIY masih lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi Covid-19, namun demikian jumlah pengangguran dan TPT semakin menurun yang menandakan perbaikan ekonomi di DIY. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY sebesar 4,06%, mengalami penurunan 0,5% poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang mencapai 4,56%. Sedangkan, apabila dilihat dari perkotaan dan pedesaan, diperoleh hasil bahwa pada Agustus 2022 TPT di Perkotaan sebesar 4,78% jauh lebih tinggi dibanding pedesaan yang

hanya mencapai 2,06%. Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di pedesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan.

Pada Agustus 2022 penganggur berpendidikan SMA dan SMK masih mendominasi di DIY yaitu mencapai 48,59% meskipun sudah turun dari kondisi Agustus 2021 yang mencapai 53,48%. Sementara itu, penganggur berpendidikan tinggi (diploma dan universitas) pada Agustus 2021 menempati posisi kedua yang mencapai 24,55% pada Agustus 2022 justru menempati posisi penganggur paling sedikit yaitu sebesar 12,74%. Tingginya penganggur berpendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah lulusan yang semakin banyak dan mereka berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mencari dan memilih.

Permasalahan ketenagakerjaan DIY pada tahun 2020 semakin kompleks dengan adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa banyak pelaku usaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan karyawan dan mengurangi jam kerja. Pada Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 mengalami penurunan sebanyak 355,31 menjadi 102,74 ribu orang dibanding dengan Agustus 2021 yang mencapai 458,05 ribu orang. Dari 102, 74 ribu orang tersebut terdiri dari pengangguran (3,34 ribu orang), bukan angkatan kerja (7,54 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,88 ribu orang), bekerja dengan pengurangan jam kerja (89,98 orang).

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak danhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Meningkatnya data kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 turut berkontribusi terhadap meningkatnya

angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPAP2) DIY, antara lain Kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan lain sebagainya. Salah satu layanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya adalah Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (Tesaga). Tidak hanya terbatas melalui media telepon, layanan Tesaga juga dikembangkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas dan pada kondisi pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak mengakses layanan secara daring daripada bertemu langsung. Selain itu melalui media sosial masyarakat lebih memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

2.3.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, capaian IPG terus mengalami peningkatan dan termasuk dalam lima provinsi teratas ranking IPG di seluruh Indonesia. Sedangkan tren IPG DIY dari tahun 2018 sampai dengan 2022, terus mengalami peningkatan bahkan menjadi yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2022.

Tabel 2-69 Capaian IPG DIY Tahun 2018-2022

Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	94,73	94,77	94,80	94.88	94,99

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

2.3.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator- indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY yang diukur melalui IDG. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY tahun 2022**,** Capaian IDG terus mengalami tren peningkatan dari 69,64 di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan posisi berada di angka 76,57. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

Tabel 2-70 Capaian IDG DIY Tahun 2018-2022

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	69,64	73,59	74,73	76,57	76,87

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

2.3.2.2.3 Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Hal yang dinilai paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada Tahun 2021, target dari indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 adalah sebesar 0,46 realisasi capaian sebesar 0,52 dengan persentase capaian sebesar 86,96%, dengan demikian maka target pada tahun

2020 belum tercapai. Capaian ini tercatat sama dengan capaian di tahun 2020. Melihat kondisi prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi maka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Pengembangan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dengan penambahan anggota yang terlibat sesuai dengan dasar berdasarkan Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2019 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang mencabut Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.
- Terselenggaranya layanan Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di tingkat provinsi maupun terbentuknya UPT PPA di kabupaten/kota.
- Pengembangan Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa) menjadi multiplatform komunikasi melalui Whatsapp, Blog, Instagram, Youtube dll.
- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak melalui Radio, Televisi dan Media Cetak.
- Meningkatkan jumlah lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Penerapan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan semakin efektif.
- Mengefektifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sehingga mampu mengembangkan jaringan sampai tingkat Kapanewon dan kalurahan di DIY
- Penerbitan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Tahun 2020-2022

Tabel 2-71 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi Tahun 2017-2022

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	17	16	23	17	13	12
		18 - 25 Th	1	0	1	0	0	0
		25 Th Keatas	2	0	0	0	0	0

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	10	7	12	15	10	6
		Tempat Kerja	4	3	4	1	1	2
		Lainnya	6	6	8	1	2	4
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	19	18	46	63	44	42
		18 - 25 Th	8	24	27	13	14	9
		25 Th Keatas	14	29	28	26	10	12
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	30	52	76	79	55	55
		Tempat Kerja	2	1	4	1	0	2
		Lainnya	9	18	21	22	13	6
Bantul	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	24	32	49	33	46	27
		8 - 25 Th	4	2	4	6	6	1
		25 Th Keatas	4	5	7	5	7	0
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	16	23	31	32	22	12
		Tempat Kerja	4	5	13	4	21	6
		Lainnya	-	11	16	8	16	10
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	30	48	98	75	80	44
		18 - 25 Th	19	20	59	22	53	20
		25 Th Keatas	82	102	157	83	64	67
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	90	138	233	127	160	110
		Tempat Kerja	7	9	12	7	1	3
		Lainnya	34	23	69	46	36	18
Gunungkidul	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	10	6	3	2	19	18
		18 - 25 Th	2	-	0	0	3	0
		25 Th Keatas	2	1	2	1	1	0
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	10	4	4	2	7	7

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Tempat Kerja	3	2	0	0	0	5
		Lainnya	1	1	1	1	16	6
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	17	29	15	12	20	20
		18 - 25 Th	9	1	10	6	17	12
		25 Th Keatas	17	19	20	11	22	33
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	27	35	40	20	39	54
		Tempat Kerja	6	3	1	0	2	3
		Lainnya	10	11	4	9	18	-
Sleman	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	60	56	69	63	38	29
		18 - 25 Th	6	5	1	1	1	2
		25 Th Keatas	14	24	10	2	1	1
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	43	70	42	39	26	23
		Tempat Kerja	14	8	15	10	2	3
		Lainnya	23	7	23	17	12	6
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	79	138	108	72	68	81
		18 - 25 Th	39	50	124	39	54	95
		25 Th Keatas	155	194	291	125	106	148
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	211	275	352	172	185	245
		Tempat Kerja	17	64	20	8	4	16
		Lainnya	45	43	151	56	39	63
Kota Yogyakarta	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	20	12	28	24	27	33
		18 - 25 Th	2	1	1	7	0	4
		25 Th Keatas	6	6	8	9	11	11
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	16	10	19	21	29	30
		Tempat Kerja	9	6	12	3	2	3
		Lainnya	2	3	6	16	7	15
	Perempuan	Kelompok Umur						

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		0 - 17 Th	50	53	55	80	63	81
		18 - 25 Th	79	88	73	141	135	149
		25 Th Keatas	342	299	152	328	312	331
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	275	380	210	438	431	447
		Tempat Kerja	15	22	15	14	10	23
		Lainnya	43	38	55	97	69	91

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

2.3.2.2.4 Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak cenderung meningkat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari dikeluarkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama (PA). Pada tahun 2020, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kepada anak laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan untuk laki-laki berkisar 19,16%, sementara dispensasi kawin untuk anak perempuan meningkat 108% di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 angka dispensasi kawin kembali menurun. Penurunan ini salah satunya didukung oleh penegakan peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2019 bahwa UPT PPA harus mengawal permohonan dispensasi menikah lewat pengadilan agama sejak Mei 2021.

Tabel 2-72 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021 Menurut Jenis Kelamin

No	PA	Dispensasi Kawin					
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	PA Wates	30	15	48	71	23	56
2	PA Bantul	41	82	56	113	58	104
3	PA Wonosari	49	59	49	188	46	172
4	PA Sleman	134	120	169	189	114	119
5	PA Yogyakarta	33	20	20	56	13	51
	D.I. Yogyakarta	**287**	**296**	**342**	**617**	**254**	**502**

Keterangan: Data kondisi per 31 Desember 2018, 2020 dan 2021

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta/Pengadilan Agama

Meningkatnya persentase perkawinan usia anak bisa disebabkan karena kemiskinan, ataupun kehamilan tidak dikehendaki. Alasan terbesar permintaan dispensasi kawin di PA Wonosari adalah karena kehamilan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di PA yang lain meskipun pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ditemui pula alasan seperti mencegah hal negatif.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan pada tahun 2018 hingga 2021 mengenai perkawinan usia anak yang didasarkan pada dispensasi kawin, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan perkawinan anak paling tinggi disusul Kabupaten Gunungkidul. Sementara Kota Yogyakarta adalah daerah dengan perkawinan anak paling rendah. Pengadilan Agama Sleman berkontribusi paling banyak dalam pengeluaran dispensasi kawin. Dalam kurun waktu 4 tahun, dispensasi kawin yang dikeluarkan jumlahnya meningkat nyaris 3 kali lipat dari total 128 pada tahun 2018 menjadi 358 dispensasi kawin pada tahun 2020 dan 233 dispensasi kawin pada tahun 2021. Lebih lanjut, mengenai kondisi terkini Pengadilan Agama Sleman mendapatkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan tahun 2022 lebih banyak dari 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Sleman mencatat pada 2022 ada 253 permohonan dispensasi perkawinan yang terhalang syarat usia. Dari ratusan permohonan itu sebagian besar merupakan perkawinan anak karena hamil di luar nikah atau kehamilan tidak direncanakan (KTD).

Tabel 2-73 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2020 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin

No	Kota/Kabupaten	2018	2019	2020			2021		
		L+P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Dispensasi Perkawinan									
1	Kota Yogyakarta	47	50	9	33	42	8	23	31
2	Kabupaten Bantul	75	123	56	113	169	56	91	147
3	Kabupaten Gunungkidul	79	108	151	190	341	169	49	218
4	Kabupaten Sleman	128	254	169	189	358	94	139	233
5	Kabupaten Kulon Progo	47	45	48	71	119			0
6	**DIY**	**376**	**580**	**433**	**596**	**1029**	**327**	**302**	**629**
Anak Menikah di Bawah Umur									
1	Kabupaten Bantul	70	74	101	56	157	65	141	206
2	Kabupaten Gunungkidul	79	108	151	190	341	169	49	218

No	Kota/Kabupaten	2018	2019	2020			2021		
		L+P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
3	Kabupaten Kulon Progo					0	27	60	87
4	Kabupaten Sleman			241	149	390	94	19	113
5	Kota Yogyakarta	25	26	4	22	26	4	16	20
6	**DIY**	**174**	**208**	**497**	**417**	**914**	**359**	**285**	**644**
Kasus Perkawinan Anak									
1	Kabupaten Bantul					0	56	120	176
2	Kabupaten Gunungkidul	79	108	151	190	341	169	49	218
3	Kabupaten Kulon Progo					0			73
4	Kabupaten Sleman			184	149	333	28	28	56
5	Kota Yogyakarta		48	23		23			46
6	**DIY**	**79**	**156**	**358**	**339**	**697**	**253**	**197**	**569**

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama DIY, 2021
Kementerian Agama DIY, 2021

2.3.2.2.5 Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Data anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2020-2021 cenderung menurun. Data memperlihatkan bahwa angka kasus ABH yang ditangani BPRSR Dinas Sosial DIY pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan jika dibandingkan periode 2018-2019. Meskipun demikian, ada kenaikan angka anak yang berhadapan dengan hukum berjenis kelamin perempuan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 1 ABH perempuan di Bantul dan 2 ABH perempuan di Sleman. Sedangkan ABH laki-laki tersebar di seluruh kabupaten di DIY dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, jika dilihat dari sebaran kasus dan jenis kelamin, data masih menunjukkan tren yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kemunculan ABH paling banyak terjadi di kawasan perkotaan dan sub urban.

Tabel 2-74 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2020-2021

NO	Kabupaten/Kota Asal	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jenis Kelamin		L+P	Jenis Kelamin		L+P
		L	P		L	P	
1	Kulon Progo	7	0	7	3	0	3
2	Bantul	23	0	23	22	1	23
3	Gunungkidul	6	0	6	3	0	3
4	Sleman	38	1	39	19	2	21
5	Yogyakarta	24	1	25	12	0	12
	D.I. Yogyakarta	**98**	**2**	**100**	**59**	**3**	**62**

Keterangan: Merupakan ABH yang ditangani di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY. BPRSR dan di BPRSPA/ Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY

2.3.2.3 Urusan Pangan

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Urusan Pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan. Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

2.3.2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan

konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) dengan skor ideal 100.

Berdasarkan hasil susenas BPS capaian skor PPH tahun 2022 di DIY sebesar 96,80 jauh lebih tinggi dari capaian angka nasional sebesar 87,2. Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor PPH. Capaian skor PPH di atas 90 merupakan kategori cukup ideal yang mendekati angka ideal 100, sehingga kualitas konsumsi pangan di DIY masih lebih baik dari tingkat nasional. Namun demikian tingkat asupan konsumsi pangan di DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras, sehingga perlu ditingkatkan keseimbangan antara 9 kelompok bahan pangan. Sasaran utamanya adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak yang capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan lokal. Hal ini menjadi tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan 4 pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui program/ kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi.

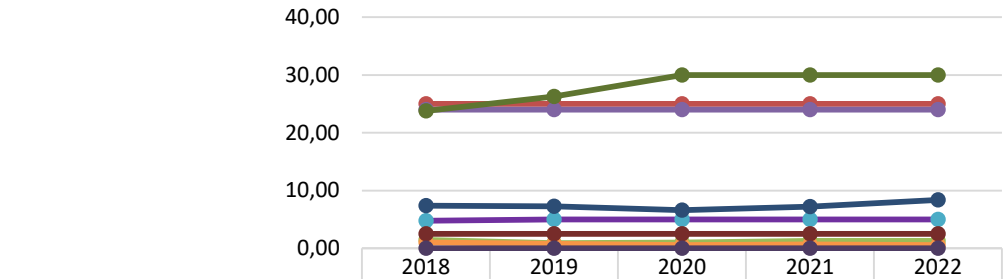

	2018	2019	2020	2021	2022
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,92	91,70	94,70	95,70	96,80
Padi-Padian (Standar 25,0)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Umbi-Umbian (Standar 2,5)	1,44	0,90	1,00	1,30	1,30
Pangan Hewani (Standar 24)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Minyak dan Lemak (Standar 5,0)	4,78	5,00	5,00	5,00	5,00
Buah/Biji Berminyak (Standar 1,0)	1,00	0,80	0,60	0,70	0,60
Kacang-Kacangan (Standar 10,0)	7,39	7,30	6,60	7,20	8,40
Gula (Standar 2,5)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Sayur dan Buah (Standar 26,30)	23,81	26,30	30,00	30,00	30,00
Lain-lain (Standar 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-52 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2022

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan

yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun impor. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemda, jenis pangan pokok untuk cadangan pangan berupa beras ditetapkan sebanyak 322 ton. Pada tahun 2022, terjadi pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk bantuan bencana sebesar 11,658 ton, sehingga sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah cadangan pangan sebesar 280,884 ton. CPPD tersebut dititipkan di BULOG sebesar 31,875 ton dan di Taru Martani sebesar 249,009 ton. Dari jumlah CPPD yang ditetapkan, masih kekurangan sebesar 41,116 ton. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran untuk pengadaan CPPD sebesar 24,865 ton.

2.3.2.3.2 Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan, yaitu persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2022 sebesar Rp628.845 (42,48%) sedikit lebih besar daripada tahun 2021 Rp594.622 (41,94%). Capaian tahun 2021 telah melebihi target akhir RPJMD 38,65%. Kondisi pandemi selama tahun 2020 telah menyebabkan melemahnya perekonomian di DIY yang berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat. Menurut teori dari Ernest Engel, persentase pengeluaran untuk makanan/pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan.

Tabel 2-75 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 2018–2022 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Non Makanan	773.649	793.281	832.693	823.248	851.530
Makanan	529.012	546.445	579.279	594.622	628.845
Total	1.302.661	1.339.726	1.411.972	1.417.870	1.480.374

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tinggi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021, ada peningkatan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan sebesar 0,54% poin. Peningkatan pengeluaran terjadi pada kelompok makanan umbi-umbian, daging, telur dan susu, serta sayuran sedangkan penurunan terjadi pada kelompok padi-padian, ikan/udang/cumi/kerang, buah-buahan serta makanan dan minuman jadi. Turunnya pengeluaran makanan untuk kelompok padi-padian sudah sejalan dengan penurunan tingkat konsumsi padi-padian/beras pada komposisi Skor PPH yang merupakan indikator kinerja lainnya di penyelenggaraan urusan pangan. Rokok yang juga merupakan bagian dari pengeluaran makanan mengalami kenaikan 0,03%. Hal ini sejalan dengan data hasil survei yang dilakukan Komite Nasional Pengendalian Tembakau, tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini. Sesuai teori yang ada, bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan yang meningkat meningkat di suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan.

Hasil pemetaan kerawanan pangan dan gizi di tingkat kalurahan yang ada di seluruh DIY tahun 2022 melalui analisis indikator aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan (data keluarga pra sejahtera), dan aspek pemanfaatan pangan menunjukkan hasil tidak adanya kapanewon dan kalurahan yang terindikasi rawan pangan. Terdapat 1 kapanewon, yaitu Kapanewon Pajangan dan 3 kalurahan yaitu Kalurahan Guwosari, Wirokerten, dan Jambidan di Kabupaten Bantul yang masuk dalam kategori waspada pangan (kuning).

Jumlah kalurahan rawan pangan di DIY menurun dari 7 kalurahan pada 2018 menjadi 4 kalurahan pada tahun 2020 dan menjadi 0 kalurahan pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan untuk menurunkan jumlah kalurahan rawan pangan, yaitu peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di kalurahan tersebut.

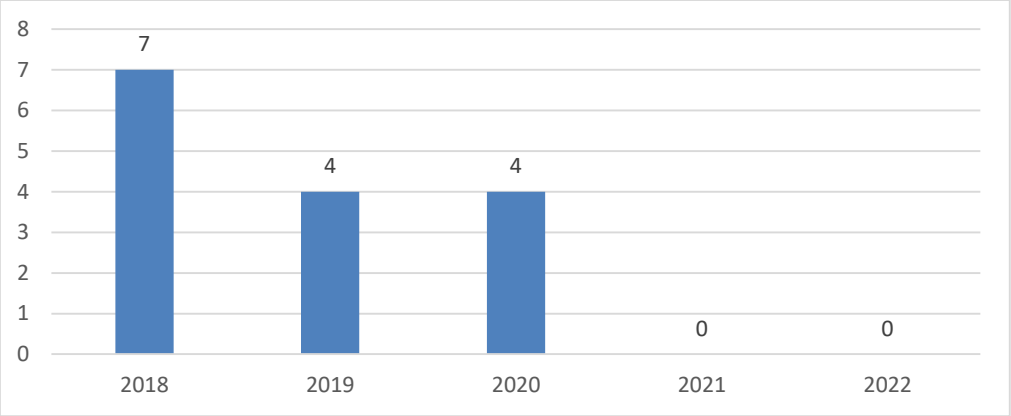

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-53 Kalurahan Rawan Pangan 2018-2022

Peta komposit *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Tahun 2022 ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kapanewon yang masuk kedalam kategori rawan (Prioritas 1, 2 dan 3). Perbandingan hasil komposit FSVA Tahun 2021 dan 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2-76 Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 – 2022

Prioritas	Jumlah Kapanewon			Persentase		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Prioritas 1	0	0	0	0%	0%	0%
Prioritas 2	0	1	1	0%	1,3%	1,3%
Prioritas 3	1	4	3	1,3%	5,1%	3,8%
Prioritas 4	17	16	5	21,8%	20,5%	6,4%
Prioritas 5	35	40	30	44,9%	51,3%	38,5%
Prioritas 6	25	17	39	32%	21,8%	50%

FSVA DIY Tahun 2022 mencakup 78 kapanewon/kemantren yang disusun menggunakan 9 indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Situasi ketahanan pangan di DIY Tahun 2022 menglamai perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kapanewon/kemantren rentan (prioritas 1-3) menurun dari 5 kapanewon/kemantren di tahun 2021 menjadi 4

kapanewon/kemantren di tahun 2022. Terdapat pergeseran lokasi rentan (prioritas 1-3) dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil peta komposit FSVA tahun 2022 menunjukkan kapanewon/kemantren rentan rawan pangan saat ini berada di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu: Kemantren Mergangsan, Kraton, Mantrijeron dan Danurejan. Karakteristik kapanewon/kemantren rentan pangan ditandai dengan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih dan angka kesakitan yang tinggi.

2.3.2.3.3 Distribusi Pangan

Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Tahun 2020 ada penyesuaian nama Toko Tani Indonesia (TTI) menjadi Pasar Mitra Tani (PMT). Lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. Dalam masa pandemi PMT juga pernah melakukan kerjasama dengan *market place online* seperti Aplikasi Gojek/*Goshop* dan Aplikasi Titipku dengan memberikan ongkir murah /diskon ongkir jika belanja di PMT.

Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinyu dengan harga yang terjangkau.

Telah dilakukan upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dan dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 164 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga.

2.3.2.3.4 Konsumsi dan Pengawasan Pangan

Jumlah konsumsi energi penduduk DIY konstan namun cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.219,34 Kkal/kapita/hari sedangkan pada tahun 2022 konsumsi energi penduduk DIY menurun menurun menjadi 2.024 Kkal/kapita/hari Terjadi surplus ketersediaan energi yang pada tahun 2022 berada pada angka 3.732 namun tingkat konsumsi energi justru berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari.

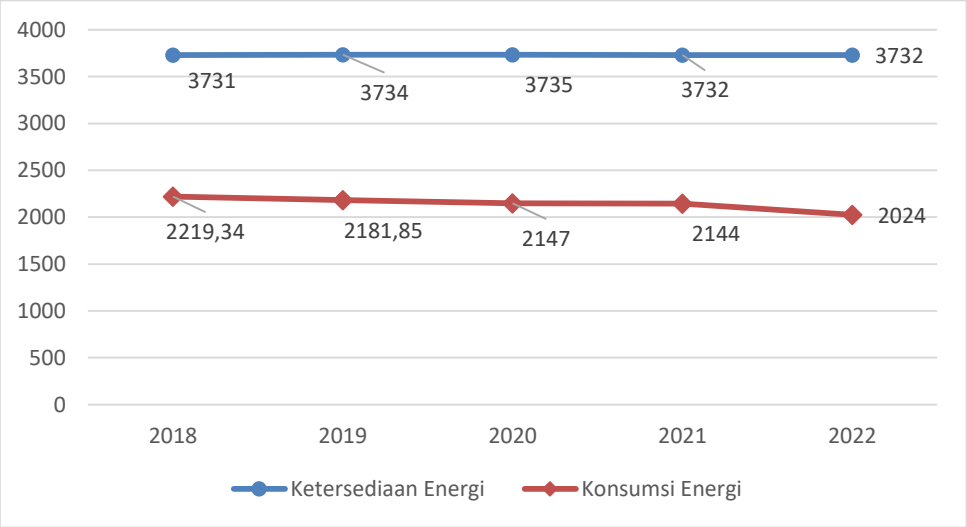

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-54 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2022

Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 68,7 gram/kapita/hari menurun menjadi 62,6 gram/kapita/hari pada tahun 2022. Konsumsi protein tersebut sudah berada di atas angka kecukupan protein yang dianjurkan 57 gr/kapita/hari.

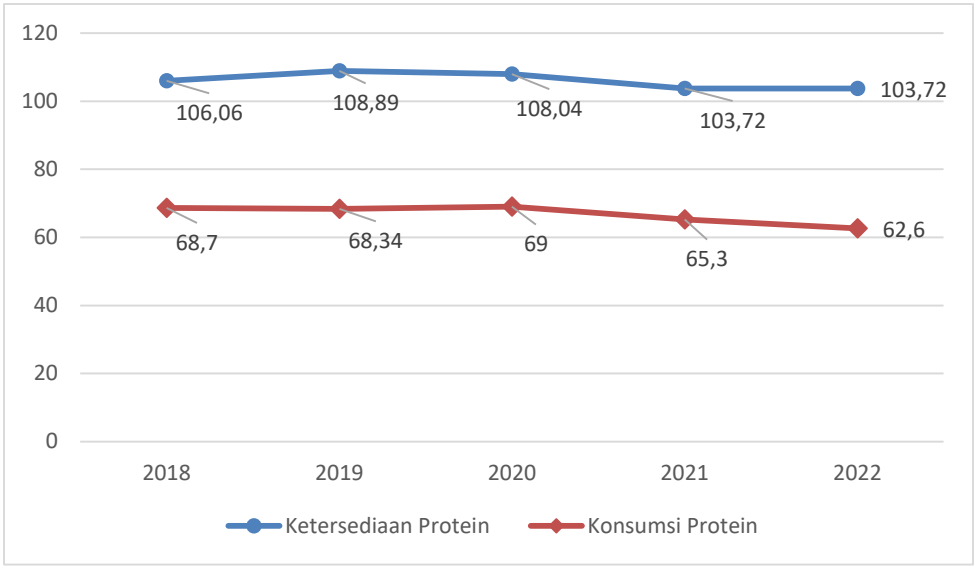

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-55 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2022

Konsumsi energi kelompok padi–padian tahun 2022 sebesar 98,40 kg/kap/tahun lebih rendah dibanding tahun 2021 yang mencapai 100,9 kg/kap/tahun. Konsumsi energi kelompok daging tahun 2022 sebesar 16,29 kg/kap/tahun lebih rendah dibanding tahun 2021 yang mencapai 16,3 kg/kap/tahun. Konsumsi energi kelompok telur, susu, dan ikan di tahun 2022 secara berturut turut adalah 8,51 kg/kap/tahun, 3,48 kg/kap/tahun, dan 12,4 kg/kap/tahun. Untuk konsumsi kelompok telur mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,5 kg/kap/tahun, sedangkan kelompok susu sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,50 kg/kapita/tahun dan konsumsi ikan tetap seperti pada tahun 2021.

Tabel 2-77 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2018-2022

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kg/Kap/Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
I. Padi-padian	108,70	104,50	102,40	100,90	98,40

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kg/Kap/Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Beras	88,30	83,40	82,20	81,40	80,60
b. Jagung	0,70	0,80	1,40	0,70	0,70
c. Terigu	19,70	20,30	18,80	18,80	17,10
II. Umbi-umbian	11,80	11,70	12,90	16,70	15.49
a. Singkong	7,90	7,20	8,30	11,40	10,90
b. Ubi jalar	1,80	1,80	1,90	2,40	2,20
c. Kentang	2,1	2,70	2,70	2,90	3,20
III. Pangan Hewani	40,80	42,40	42,00	39.98	40.68
a. Daging ruminansia	6,10	7,80	6,90	5,50	5,48
b. Daging unggas	10,10	10,70	11,00	10,80	10,81
c. Telur	8,30	8,10	7,90	8,50	8,51
d. Susu	4,00	3,80	3,70	3,50	3,48
e. Ikan	12,30	12,00	12,50	12,40	12,40

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Apabila dilihat dari produksi daging sapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, sedangkan daging domba dan daging kambing pada tahun 2022 mengalami penurunan daripada tahun 2021. Begitu juga untuk produksi telur dan daging unggas, tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021.

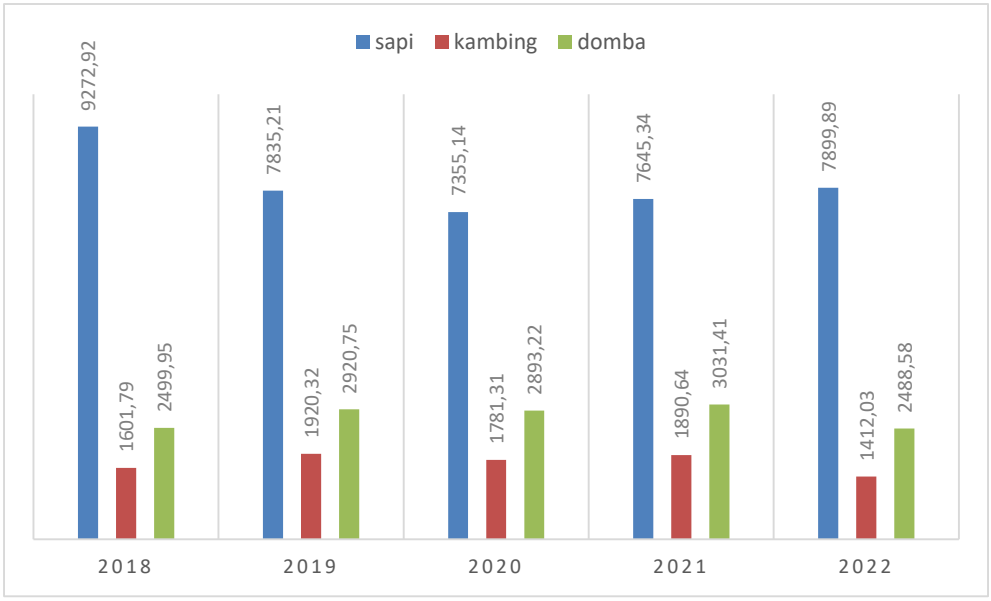

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-56 Produksi Daging di DIY Tahun 2018-2022 (Ton/Tahun)

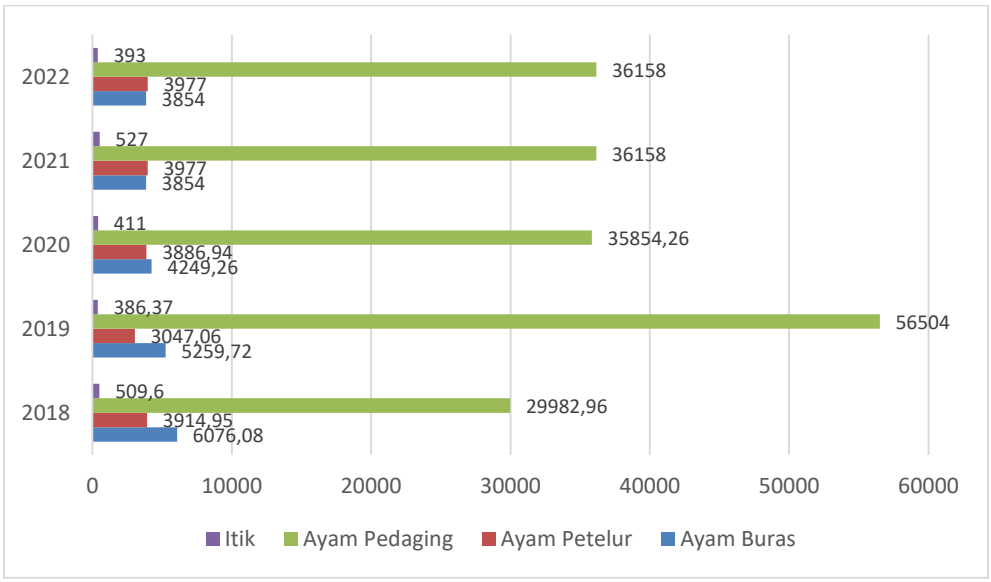

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-57 Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2022 (dalam ton)

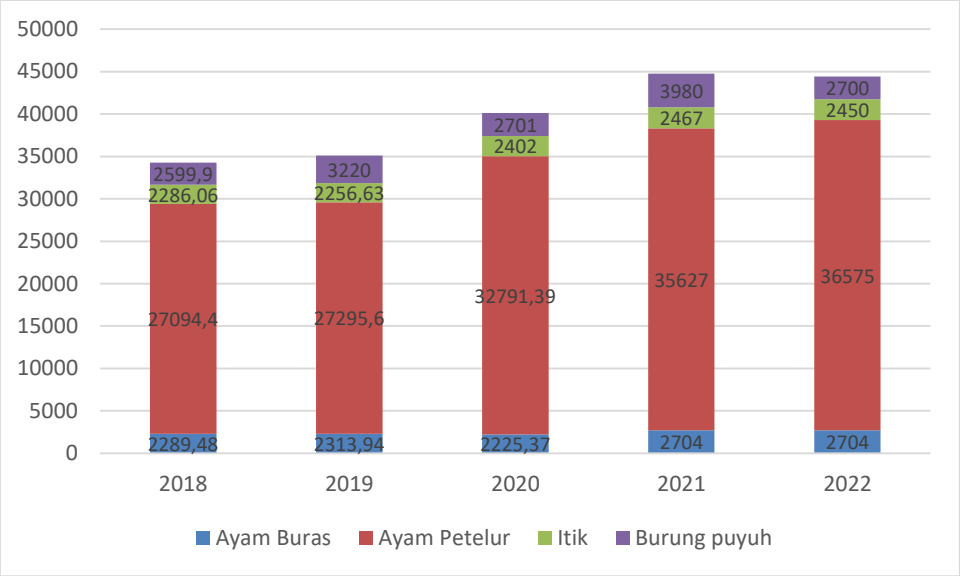

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-58 Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2022 (dalam ton)

2.3.2.3.5 Pengawasan Pangan

Aspek keamanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, diamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan olahan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu mengandung bahan berbahaya (cemaran kimia), cemaran mikroba (cemaran biologis) serta benda-benda yang tidak diperbolehkan dalam pangan (cemaran fisik). Oleh karena itu pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang bersifat koordinatif berdasarkan kewenangan masing-masing OPD dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan *Good Agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP), pasca panen dengan *Good Handling Practices* (GHP), pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP), distribusi dengan *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Retailing Practices* (GRP), sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi.

Adanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) mendukung terjaganya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat DIY melalui pengawasan pre market dan post market. Pada tahun 2022 ini sudah ada 28 kelompok usaha yang memperoleh izin edar Produk Domestik (PD) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tersebar di Sleman 13 unit, Kulon Progo 3 Unit, Bantul 10 Unit dan Kota Yogyakarta 2 unit. Selanjutnya sudah terbit 9 Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT untuk unit penanganan PSAT. terakhir Perpanjangan Sertifikat *Packing House* (PH) pada tahun 2022 diberikan kepada 1 unit usaha rumah kemas.

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaanya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, denganberlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyayogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kalurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti *magersari, ngindung, anganggo turun-temurun*, dan *hanggayuh* (atau *anggadhuh*) melalui *serat kekancingan*.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang- undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50

Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan:

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU Nomor 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan TanahKasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten padadasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 3 Perdais DIY Nomor 1/2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Dalam rangka menjalankan urusan pertanahan Pemda DIY telah melakukan penerbitan IPL sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk mendukung program strategis nasional dan program prioritas daerah. Izin penggunaan lokasi (IPL) yang telah diterbitkan dari tahun 2015-2022 sebanyak 24 SK IPL.

Pada tahun 2022 telah terbit Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta acuan dalam penyesuaian sertifikat pada tanah kalurahan.

Capaian sasaran pemda bidang pertanahan diukur berdasarkan indikator bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan. Pada tahun 2022 capaian sebesar 22.242 bidang didapatkan dari realisasi pendaftaran sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten sebanyak 13.837 bidang Tanah SG/ PAG ditambah dengan pendaftaran

sertifikasi tanah desa sebanyak 8.405 bidang. Capaian indikator tersebut dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-78 Capaian bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa						
1	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	7.928	10.279	12.437	15.335	22.242

Sumber: DPTR DIY, 2022

Capaian program pemda fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Capaian ini diukur melalui indikator persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. Pada tahun 2022 capaian sebesar 98,12% dari target tahun 2022 sebesar 88,67% Capaian ini didukung melalui realisasi pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten (bobot 60%) yaitu sebesar 50,05% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah, pemeliharaan dokumen dan pengawasan ditambah realisasi pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (bobot 40%) sebesar 24,06% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah desa, penetapan peraturan desa dan pengajuan kekancingan.

Tabel 2-79 Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

No	Program/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						
1	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	%	31,57	46,51	61,25	74,11	98,12

Sumber: DPTR DIY, 2022

Pemenuhan alas hak terkait tanah/sertifikasi juga dilakukan pada tanah dengan status tertentu seperti adanya tanah tutupan, tanah enclave dan tanah yang diperoleh dari proses tukar menukar dengan tanah kas desa. Tanah dengan status tertentu sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan legalisasi atau diberikan alas hak yang mengakibatkan pemanfaatan tanah belum dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2-80 Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY

No	Kabupaten	Kapanewon/ Kalurahan	Bidang	Luas	Keterangan
1	Bantul	Kap. Kretek Kal. Prangtritis	256 bidang	1.080.840 m2	Terletak di eks Padukuhan Sono dan Grogol
		Kap. Sanden Kal. Gadingharjo	21 bidang	80.207 m2	Terletak di Padukuhan Karanganyar
2	Kulon Progo	Kap.Kokap Kal. Hargomulyo	1 bidang	104.115 m2	Terletak di Padukuhan Tapen, Grindang dan Tlogolelo

Sumber : DPTR, 2022

Tabel 2-81 Inventarisasi Tanah Enclave di DIY

No	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (m2)
Tanah Enclave Kasunanan				
1	Bantul	Imogiri	Karangtengah, Kebonagung, Girirejo, Karangtalun, Mangunan, Imogiri	21.909.603
		Dlingo	Temuwuh, Jatimulyo, Muntuk, Dlingo, Terong	48.308.074
		Pleret	Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran	14.890.068
		Banguntapan	Singosaren, Jagalan	1.007.301
		Total		87.091.776
Tanah Enclave Mangkunegaran				
2	Gunungkidul	Gedang Sari	Tegalrejo	10.086.716
		Ngawen	Beli, Jurangjero, Kampung, Sambirejo, Tancep. Watu Sigar	48.896.943
		Total		58.983.659
Tanah enclave Kasunanan + Tanah enclave Mangkunegaran				94.725.707

Sumber : DPTR, 2022

Sesuai ketentuan yang ada, pemanfaatan SG dan PAG dilakukan melalui permohonan pengajuan izin kekancingan dan harus memperhatikan tata ruang, yang kemudian akan diterbitkan kekancingannya. Terkait dengan pemanfaatan SG/PAG secara umum pelaksanaannya sudah sesuai dengan izin yang diberikan meskipun masih terdapat pelanggaran pemanfaatan yang tidak sesuai dengan izinnya. pada tahun 2019 permohonan kekancingan yang masuk sebanyak 282 permohonan dan telah terbit rekomendasi sebanyak 106. pada tahun 2020 permohonan kekancingan yang masuk sebanyak 656 dan telah terbit rekomendasi sebanyak 417. Pada tahun 2021 terdapat 323 permohonan kekancingan yang masuk dan telah terbit rekomendasi sebanyak 585. Pada tahun 2022, permohonan izin kekancingan yang sudah terbit rekomendasi sebanyak 102 permohonan.

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1 Kualitas Air Sungai

Pada tahun 2022, telah dilakukan pemantauan terhadap 10 (sepuluh) sungai secara periodik setiap tahun, yaitu pada Bulan Juni, Agustus dan Oktober. Pemantauan dilakukan pada titik – titik pantau dari hulu sampai hilir. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk memotret kondisi kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau belum yang menjadi salah satu langkah dalam upaya penentuan kebijakan program dan kegiatan dalam pengendalian pencemaran air sungai. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas Air di DIY.

Tabel 2-82 Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2022

No	Nama Sungai	Indeks Pencemaran	keterangan
1	Bedog	5,45 – 10,33	cemar sedang – cemar berat
2	Belik	3, 62 – 11,90	cemar ringan - cemar berat
3	Bulus	4,54 – 8,05	cemar ringan - cemar sedang
4	Code	3,06 – 22,84	cemar ringan - cemar berat
5	Gajahwong	3,66 – 12,38	cemar ringan - cemar berat
6	Kuning	3,17 – 9,37	cemar ringan - cemar sedang
7	Konteng	6,82 - 11,94	cemar sedang – cemar berat
8	Oyo	5,24 – 7,73	cemar sedang
9	Tambak Bayan	5,28 – 16,08	cemar sedang – cemar berat
10	Winongo	3,57 – 9,85	cemar ringan - cemar sedang

Sumber : IKPLHD DIY, 2022

Dari data indeks pencemaran air sungai di DIY tersebut, dengan jumlah data titik pantau sebanyak 271 titik diperoleh nilai indeks kualitas air sungai (IKA) di DIY pada tahun 2022 sebesar 32,14. Nilai IKA di DIY merupakan nilai agregasi nilai IKA Provinsi dan nilai IKA Kabupaten/Kota di DIY. Angka IKA tersebut, belum memenuhi target tahun 2022 yang merupakan akhir periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sebesar 42,50.

a. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tanggamaupun peternakan dan UMKM.
b. Operasional kegiatan industri dan izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar.
c. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.
d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
e. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.
f. Pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Dampak lain dengan tercemarnya air sungai di DIY adalah pemanfaatan untuk air baku air minum PDAM menjadi tidak dapat dilakukan. Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya harus mengambil air baku dari sumber mata air di lereng Gunung Api Merapi yang berada di Kabupaten Sleman, sebab kualitas air yang masuk perkotaan Yogyakarta masih buruk. Hal ini memberikan beban biaya yang lebih besar untuk mendapatkan air minum karena harus mengambil dari kabupaten lain.

Pemerintah DIY membuat program kerja dalam mengatasi pencemaran air tanah oleh bakteri koli di daerah perkotaan dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, salah satunya adalah pembuatan IPAL komunal atau sekarang disebut Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T) - Skala Permukiman.

Selain hal di atas, juga dilakukan program Merti Kali oleh komunitas pecinta sungai maupun oleh pemda yang didukung oleh masyarakat. Namun sayangnya sumber masalah yaitu pengaturan tata kelola air limbah dari sumber pencemar di bagian hulu masih lemah.

2.3.2.5.2 Kualitas Air Tanah

Pengukuran kualitas air tanah pada tahun 2022 dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY. Pengujian terhadap air tanah dengan sampel air sumur diambil pada pengkajian dilakukan di 5 Kabupaten/Kota dengan total 472 sampel. Lokasi-lokasi tersebut telah ditentukan melalui studi awal dan dipastikan dapat mewakili karakteristik air tanah yang terdapat di wilayah DIY. Lokasi sampel pengujian kualitas air tanah ini dipilih dari sumur-sumur warga yang berada dekat dengan sumber pencemar tertentu seperti kawasan industri, sentra kerajinan, TPA, dan rumah sakit. Hasil pengujian kualitas air tanah di DIY pada tahun 2022 (data masih sementara) masih menggunakan hasil tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-83 Rekapitulasi Triwulan III 2020 PKAM DIY Kualitas Air Sumur dan Minum 2021

Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana diambil Sampel	Sarana Memenuhi Syarat	Sarana Tidak Memenuhi Syarat
Bantul	221	167	54
Kulon Progo	18	6	12
Gunungkidul	16	16	0
Sleman	133	28	105
Yogyakarta	84	78	6
Total	472	277	177

Sumber: IKPLHD, 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kualitas air sumur yang tidak memenuhi syarat sebanyak 177 sarana, dengan lokasi terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 105 sarana dan untuk sarana di Kabupaten Gunungkidul semua memenuhi persyaratan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air tanah Kabupaten Sleman layak menjadi perhatian. Salah satu dampak pencemaran air tanah terhadap manusia adalah penyakit diare. Pada tahun 2022 tercatat ada 15.602 kasus baru penyakit diare di DIY. Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air tanah antara lain:

- Perubahan penggunaan lahan yang belum sesuai tata ruang, sehingga resapan air tanah berkurang karena semakin banyaknya lahan terbangun yang menghalangi infiltrasi air bukan ke dalam tanah.

- Pengelolaan jamban terpadu yang belum optimal, khususnya bagi keluarga yang memiliki jarak jamban dengan sumur yang masih di bawah 10 meter. Selain itu beberapa IPAL komunal yang dibangun pemerintah, kurang dalam pemeliharaannya, sehingga menjadi jenuh dan justru IPAL komunal ini menjadi sumber pencemaran air yang baru.
- Pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa di DIY yang masih menggunakan air tanah untuk keperluan operasional sehari-hari tanpa didukung penggunaan teknologi hemat air yang dapat mengurangi penggunaan air tanah secara berlebih.
- Kebiasaan masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan dengan masih melakukan pembuangan limbah domestik sembarangan.

2.3.2.5.3 Kondisi Kualitas Udara

Pemantauan udara di DIY pada tahun 2021 tidak lagi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melainkan oleh Pemerintah Pusat dengan metode *Manual Passive*. Lokasi pemantauan udara meliputi perwakilan daerah padat transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Parameter kualitas udara yang digunakan adalah NO_2 dan SO_2 dan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2-84 Indeks Kualitas Udara (IKU) DIY Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu		Rataan	
		NO_2 (Âmg/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO_2 (Âmg/m3) (Sulfur Dioksida)	NO_2 (Âmg/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO_2 (Âmg/m3) (Sulfur Dioksida)	Indeks	
1	Bantul	14,35	6,66	0,36	0,33	0,35	86,34
2	Sleman	12,91	9,07	0,32	0,45	0,39	83,99
3	Kota Yogyakarta	12,79	4,27	0,32	0,21	0,27	90,74
4	Kulon Progo	9,94	5,29	0,25	0,26	0,26	91,32
5	Gunungkidul	10,26	3,75	0,26	0,19	0,22	93,21
6	DIY	12,05	5,81	0,30	0,29	0,30	89,12

Sumber : IKPLHD DIY, 2022

Hasil pemantauan terhadap sampel udara pasif di DIY tahun 2022 menunjukkan kualitas udara masih tergolong baik. Hasil perhitungan data kualitas udara dengan metode passive sampler diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,12. Nilai IKU tersebut masih di bawah target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu sebesar 89,74 namun mengalami peningkatan dibanding IKU tahun 2021 sebesar 88,57.

Upaya pengurangan debu dilakukan dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan memperluas jangkauan kendaraan umum bus Trans Jogja agar masyarakat menjadikan transportasi umum tersebut menjadi transportasi utama dalam melakukan mobilitas di DIY. Selain itu penertiban terhadap proyek-proyek pembangunan agar memenuhi pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan. Kegiatan seperti car free day setiap minggu juga dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran udara di DIY.

2.3.2.5.4 Kondisi Hutan dan Lahan

Berdasarkan status hutan, luas hutan DIY mencapai 84.921,65 ha yang terdiri atas hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah seluas 19.035,09 ha dan hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (hutan rakyat) dengan luasan mencapai 65.886,56 ha. Data luasan hutan DIY berdasarkan status dan fungsi hutan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-85 Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan

No	Status/Fungsi	Luas (ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	**Berdasarkan status hutan**					
1	Hutan Negara	19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.035,09	19.035,09
2	Hutan rakyat	78.400,27	79.262,58	79.262,58	65.886,56	65.886,56*
B	**Berdasarkan fungsi hutan**					
1	Hutan konservasi	3.455,42	3.455,42	3.455,42	3.454,09	3.454,09
2	Hutan lindung	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
3	Hutan produksi	13.421	13.421	13.421	13.421	13.421

*Sumber : Dataku Bappeda DIY 2022, *) Sementara*

Berdasarkan kondisi hutan DIY yang luasnya mencapai 84.921,65 ha, masih terdapat lahan kritis baik diluar maupun didalam kawasan hutan yang memerlukan penanganan. Luas lahan kritis secara nasional ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana surat keputusan tentang penetapan lahan kritis nasional terakhir ditetapkan tahun 2018 dengan SK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional. Berdasarkan surat keputusan tersebut, luas lahan kritis di DIY ditetapkan seluas 79,123,00 ha. Sampai dengan tahun 2022, DIY telah melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan untuk mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) baik melalui sumber dana APBD/APBN maupun swasta yang dilakukan oleh DIY periode 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-86 Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2022

No	Tahun Pelaksanaan RHL	Luas (ha)	% rehabilitasi lahan kritis
1	2018	311,04	0,39
2	2019	1.099,00	1,39
3	2020	985,42	1,25
4	2021	922,22	1,17
5	2022	1.162,50	1,47

Sumber : Dinas LHK 2022

Berdasarkan parameter yang digunakan untuk menentukan nilai IKTL, kondisi tutupan lahan sangat berpengaruh terhadap nilai IKTL sebagai komponen nilai IKLH. Kualitas lahan dinilai melalui perhitungan IKTL dimana nilai IKTL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Untuk menghitung IKTL, diperlukan data luas tutupan lahan (LTL) yang dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.

2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen),
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati,
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan indeks tutupan lahan DIY 2018-2022, nilai IKTL DIY memiliki kecenderungan mengalami penurunan dari sebesar 60,86 pada tahun 2018 menjadi 58,82 di tahun 2022. Berdasarkan data capaian IKTL DIY dan faktor yang mempengaruhi nilai IKTL tersebut maka upaya membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IKTL DIY. Data capaian IKTL DIY 2018-2022 sebagaimana grafik berikut ini.

Gambar 2-59 Data capaian IKTL DIY 2018-2022

2.3.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial, dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara terpadu implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tahun 2022, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.841.337 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.693.834 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.833.136 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP-el sebesar 99,71%

Tabel 2-87 Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2022 (Orang)

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Wajib KTP Telah Perekaman	Angka Perekaman
2017	3.587.921	2.736.850	2.695.705	98,50%
2018	3.631.015	2.778.157	2.728.559	98,21%
2019	3.656.108	2.801.298	2.781.908	99,31%
2020	3.671.189	2.817.907	2.809.057	99,69%
2021	3.677.446	2.827.301	2.812.568	99,48%
2022	3.693.834	2.841.337	2.833.136	99,71%

Keterangan :
Sumber : Biro Tata Pemerintahan - Setda DIY 2023

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 98,28%, bisa diartikan bahwa dari jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 895.931 orang, ada sekitar 880.552 anak yang sudah memiliki akta kelahiran 1,72% dari jumlah anak tersebut belum memiliki akta kelahiran disebabkan antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Tabel 2-88 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
2017	954.963	905.692	94,84%
2018	960.762	906.734	94,38%
2019	952.767	900.449	94,51%
2020	956.606	904.743	94,58%
2021	952.330	899.391	94,44%
2022	895.931	880.552	98,28%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY, 2023

Selanjutnya, tiap anak juga diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di DIY total kepemilikan KIA sejumlah 847.783. Sampai dengan Desember 2022 terdapat 671.513 anak atau 79,12% yang telah memiliki KIA dari total 848.773 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Di bidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada 2021 sebanyak 59.264 dokumen.

Tabel 2-89 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah KIA	Wajib KIA	Persentase Kepemilikan
2017	136.885	851.071	16,08%
2018	319.279	852.858	37,44%

Tahun	Jumlah KIA	Wajib KIA	Persentase Kepemilikan
2019	476.662	854.810	55,76%
2020	563.773	824.684	68,36%
2021	635.866	848.361	74,95%
2022	671.513	848.773	79,12%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Total wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY sejumlah 848.361. Sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.866 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Di bidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada 2021 sebanyak 59.264 dokumen.

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Tabel 2-90 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Status IDM				
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
IDM 2018	0	5	175	183	29
IDM 2019	0	0	139	204	49
IDM 2020	0	0	99	226	67
IDM 2021	0	0	72	211	109
IDM 2022	0	0	11	197	184

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022

Kondisi Desa/Kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM pada Tahun 2022, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 11 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY.

Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga, antara lain sebagai berikut.

2.3.2.7.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Permasalahan mengenai LPM adalah bagaimana peran LPM sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di kalurahan dalam proses pembangunan. Seluruh kalurahan/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK.

Tabel 2-91 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY

No	Kabupaten/ Kota	LPMD	LPMK	Jumlah
1	Kab. Bantul	75	-	75
2	Kota Yogyakarta	-	46	46
3	Kab. Kulon Progo	87	-	87

No	Kabupaten/ Kota	LPMD	LPMK	Jumlah
4	Kab. Gunungkidul	144	-	144
5	Kab. Sleman	86	-	86
	Total	**392**	**46**	**438**

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

2.3.2.7.2 Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

Tabel 2-92 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021

Kabupaten / Kota	2018			2019			2020			2021			2022		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kulon Progo	960	776	80,83	960	792	82,50	960	827	86,14	959	698	72,8	959	951	99,17
Bantul	1.141	913	80,01	1.141	913	80,01	1.139	912	80,07	1.016	754	74,2	1.148	1.125	98
Gunungkidul	1.465	1245	84,98	1.468	1.299	88,48	1.469	1.345	91,55	1.470	1.374	93,5	1.470	1.469	99,93
Sleman	1.529	1197	78,28	1.530	1.233	80,58	418	158	37.79	1.534	1.035	67,5	1.535	1.443	94,01
Kota Yogyakarta	623	379	60,83	623	366	58,74	623	393	63,08	623	445	71,4	623	594	95,35
DIY	**5.718**	**4510**	**78,87**	**5.722**	**4.603**	**80,44**	**4.609**	**3.635**	**78,86**	**5.602**	**4.306**	**76,9**	**5.735**	**5.582**	**97,33**

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

Jumlah Posyandu yang aktif tercatat meningkat dari 4.306 di tahun 2021, menjadi 5.582 di tahun 2022. Kabupaten Gunungkidul adalah wilayah yang paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang ditunjukkan dengan data bahwa 99,93% posyandu secara aktif memberikan pelayanan kesehatan di tahun 2022.

2.3.2.7.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kalurahan setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan kalurahan.

Lembaga perekonomian kalurahan seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi. Data BUMDesa di DIY tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-93 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2023

No	Kabupaten	Jumlah kalurahan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bantul	75	50	50	68	68	72	73
2	Kulon Progo	87	87	87	87	87	87	87
3	Gunungkidul	144	92	119	133	133	144	144
4	Sleman	86	50	50	55	61	63	72
	Jumlah	**392**	**279**	**306**	**343**	**349**	**366**	**376**

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

2.3.2.7.4 Profil Kalurahan dan Kelurahan

Profil kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data kalurahan dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengguna Profil kalurahan dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat kalurahan/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai kalurahan dan kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kalurahan, DIY mendorong setiap kalurahan agar dapat menyusun profil kalurahan yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui pelatihan *entry* profil desa, pembentukan Tim Pokja Profil Kalurahan/Kelurahan, serta dijadikannya Profil Kalurahan sebagai syarat

utama dalam penilaian Lomba kalurahan sehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar.

Tabel 2-94 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa

No	Kabupaten/Kota	kalurahan/ kelurahan	Kalurahan Yang Telah Mempunyai Profil Kalurahan				%
			2018	2019	2020	2021	
1	Kabupaten Kulon Progo	88	88	88	88	88	100,00
2	Kabupaten Bantul	75	75	75	75	75	100,00
3	Kabupaten Gunungkidul	144	144	144	144	144	100,00
4	Kabupaten Sleman	86	86	86	86	86	100,00
5	Kota Yogyakarta	45	45	45	45	45	100,00
Jumlah		438	438	438	438	438	100,00

Sumber:DP3AP2 DIY

2.3.2.7.5 Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2-95 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Sumber Dana		
		DIY	Kabupaten/ Kota	Swadaya Masyarakat
1	Pemda DIY	875.000.000	-	-
2	Kota Yogyakarta		383.513.950	49.054.185
3	Kab. Bantul		486.975.400	2.480.454.000
4	Kab. Gunungkidul		295.242.900	32.922.362.166
5	Kab. Kulon Progo		338.625.000	557.830.000
6	Kab. Sleman		366.548.000	68.300.000
Jumlah		875.000.000	1.870.905.250	36.078.000.351
Total		2.745.905.250		36.078.000.351
Total Pem +Masy		38.823.905.601		
% swadaya masyarakat		92,93		

Sumber: BPPM DIY,2020

Dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat kalurahan sangat tinggi mencapai 92,93%.

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Perubahan struktur penduduk ditandai dengan penurunan jumlah penduduk usia anak-anak (<15 tahun) dan disertai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan menciptakan jendela peluang (*windows of opportunity*) bagi pemerintah untuk investasi sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Penjelasan ini membawa implikasi bahwa jendela kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk melakukan investasi modal manusia sekaligus melakukan akselerasi penciptaan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk usia kerja. Namun, jendela kesempatan ini pun dapat membawa DIY pada kondisi *demographic trap* yangakan menghasilkan persoalan serius jika tidak dimanfaatkan, karena tingginya jumlah penduduk produktif yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pengkajian mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapaindikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini terkait bonus demografi, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasaan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB, Pernikahan Dini, Perceraian dan *unmet need*.

2.3.2.8.1 Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate (TFR)*

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, TFR DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012.

Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. Angka TFR 2,1 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1.

TFR yang ada saat ini perlu dipertahankan, untuk itu berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan pengaturan migrasi penduduk. Penduduk tumbuh seimbang bila TFR mencapai 2,0.

Data yang dirilis oleh BKKBN menunjukkan TFR DIY tahun 2021 di angka 1,91. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1,81. Namun demikian capaian ini berada di bawah TFR ideal atau "*Replacement level fertility*" pada angka 2,1.

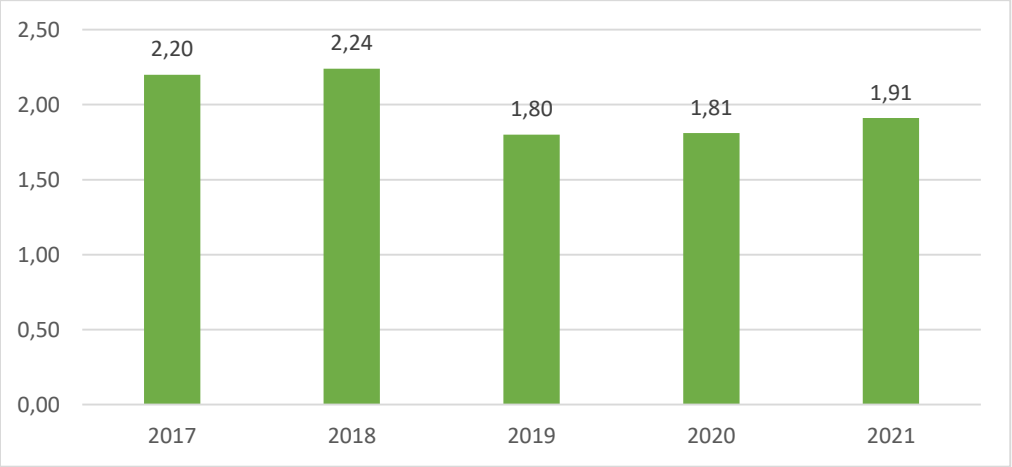

Sumber : BKKBN Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-60 Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI

2.3.2.8.2 Perubahan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data BPS, proyeksi penduduk periode 2010-2035, khususnya dalam hal komposisi umur penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang

signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Jumlah penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

Tabel 2-96 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2015-2035

Penduduk	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**	**2045**
Laki-laki	1.815.800	1.935.400	2.058.900	2.184.900	2.308.400	2.428.300	2.547.700
Perempuan	1.853.400	1.983.800	2.120.400	2.260.400	2.398.400	2.533.700	2.668.900
Total	3.669.200	3.919.200	4.179.300	4.445.300	4.706.800	4.962.000	5.216.600
Komposisi Umur (%)							
0-14	21,00	20,30	20,30	20,50	20,50	20,20	19,90
15-64	69,50	69,50	68,60	67,30	66,50	66,00	65,80
65+	9,60	10,20	11,10	12,20	13,00	13,80	14,30
Dependency Ratio (000)	44,00	43,90	45,80	48,50	50,40	51,60	52,00
Fertilitas							
TFR	1,82	1,84	1,85	1,85	1,86	1,86	1,87
GRR	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
NRR	0,90	0,88	0,89	0,90	0,90	0,91	0,92
CBR	14,20	14,40	14,20	13,70	13,30	13,40	13,60
Jumlah Kelahiran (000)	52,20	56,60	59,40	60,80	62,60	66,30	70,90

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015

Dependency Ratio (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa kenaikan angka

ketergantungan yang tajam akan terjadi kurang lebih pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2035. Peningkatan angka ketergantungan disebabkan peningkatan penduduk lanjut usia yang sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

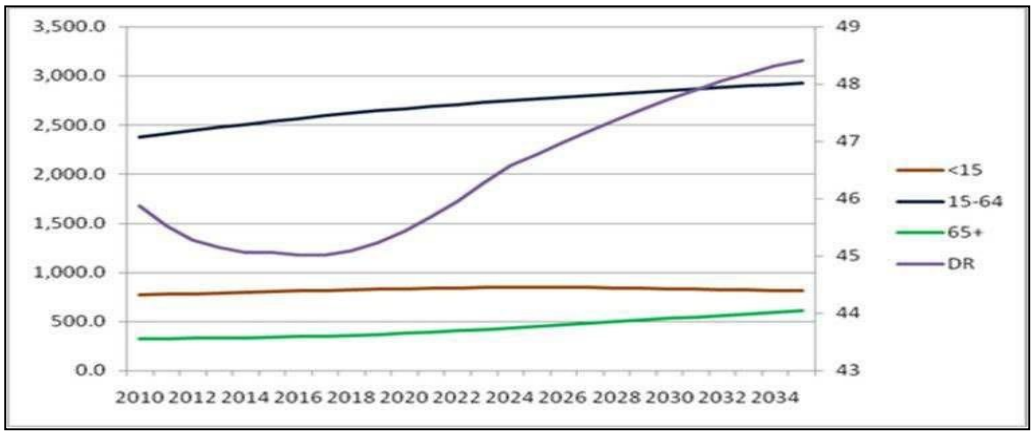

Gambar 2-61 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035

Grafik di atas memperlihatkan dinamika angka ketergantungan DI DIY. Angka ini mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2017 dan diperkirakan akan mulai meningkat pada tahun 2018 sebagai pertanda bahwa fase pertama bonus demografi telah tercapai. Artinya, DIY akan menghadapi permasalahan yang saling komplementer. Di satu sisi, persoalan yang muncul pada fase pertama berkaitan dengan ketidakseimbangan pasar kerja yang mengakibatkan belum semua usia produktif bekerja secara layak. Di sisi lain, permasalahan pada tahap kedua terkait dengan semakin membesarnya jumlah lansia.

2.3.2.8.3 Akseptor KB

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per Km^2 atau meningkat 26%

dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010. Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemda DIY menggencarkan berbagai upaya yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya adalah dengan melakukan penjaringan akseptor KB.

Dalam Kamus Kependudukan dan Keluarga Berencana dijelaskan bahwa akseptor merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu wilayah. Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Rasio akseptor KB DIY sejak tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-97 Rasio Akseptor KB Tahun 2018 s.d. 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Jumlah Peserta KB	381.029	375.708	378.902	389.575	309.641	316.842
Jumlah Pasangan Usia Subur	535.615	500.930	429.862	510.169	493.677	514.631
Rasio	71,14	75,00	88,15	76,36	62,72	61,57

**) Data sementara*

Sumber: BKKBN Provinsi DIY , 2023

2.3.2.8.4 Pernikahan Dini

Pemda DIY berusaha meningkatkan kapasitas bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), melakukan inisiasi dalam pembentukan PIK R dan melakukan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di 78 Kapanewon pada tahun 2017.

Tabel 2-98 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2016		2021	
		P	L	P	L
1.	Yogyakarta	31	15	17	19
2.	Bantul	8	37	31	81
3.	Kulon Progo	11	23	17	24
4.	Gunungkidul	51	72	16	56
5.	Sleman	36	83	24	75
	Jumlah	137	230	105	255

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2021 diolah

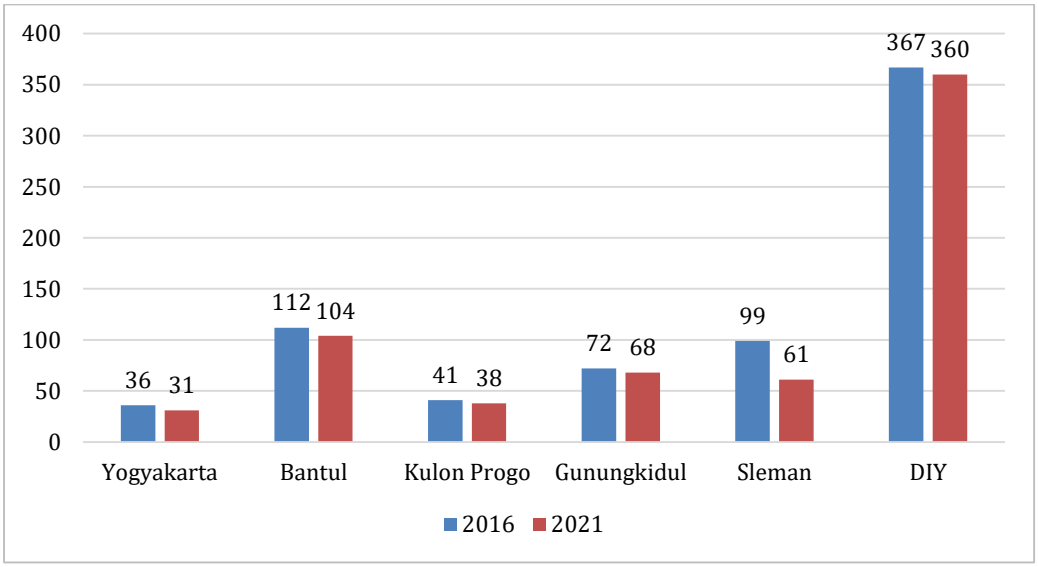

Gambar 2-62 Pernikahan Dini (Perkawinan Usia <18 Tahun) Tahun 2016 dan 2021

2.3.2.8.5 Perceraian

Angka perceraian di DIY tercatat mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Namun pada tahun 2022, angka perceraian di DIY meningkat cukup tajam yakni sebanyak 1.380 kasus. Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan angka perceraian tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.921 kasus. Data mengenai angka perceraian di DIY sejak tahun 2018 hingga 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-99 Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2022

No	Kabupaten /Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kulon Progo	679	602	539	483	561
2	Bantul	1.393	1.357	947	1.436	1.523
3	Gunungkidul	1.490	1.456	1.387	1.051	1.400
4	Sleman	1.658	1.593	1.717	1.158	1.921
5	Yogyakarta	637	710	698	599	702
6	**DIY**	**5.857**	**5.718**	**5.288**	**4.727**	**6.107**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Berdasarkan sumber permohonan, perceraian dibagi dalam kategori permohonan suami serta gugatan istri. Data menunjukkan bahwa angka perceraian dari gugatan istri jauh lebih tinggi atau meningkat dari 3.870 kasus di tahun 2019 menjadi 4.360 di tahun 2020. Sementara peningkatan angka perceraian dari kategori permohonan suami dari 1.418 kasus di tahun 2019 bertambah menjadi 1.450 kasus.

Tabel 2-100 Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2019 dan 2020

No	Wilayah PA	2019			2020		
		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan	
			Permohonan Suami	Gugatan Istri		Permohonan Suami	Gugatan Istri
1	PA Wates	525	148	377	590	134	456
2	PA Bantul	1.228	342	886	1.392	359	1.033
3	PA Wonosari	1.299	360	939	1.401	380	1.021
4	PA Sleman	1.459	409	1.050	1.783	436	1.347
5	PA Yogyakarta	777	159	618	644	141	503
	Jumlah	**5.288**	**1.418**	**3.870**	**5.810**	**1.450**	**4.360**

Sumber: Data Gender dan Anak 2021; DP3AP2 DIY

2.3.2.8.6 Unmet Need

Unmet need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KB-nya tidak terpenuhi. Hasil SDKI DIY 2017 menunjukkan bahwa 6,2% perempuan berstatus menikah di DIY mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang belum terpenuhi dengan 2% belum terpenuhi untuk menjarangkan kelahiran dan 4% belum terpenuhi untuk membatasi kelahiran. Secara umum menurut SDKI DIY 2017, terjadi peningkatan persentase wanita kawin umur 15-49 yang ingin ber KB dari 81% menjadi 82%. Penurunan persentase jumlah wanita kawin umur 15-49 yang belum terpenuhi kebutuhan ber KB dari 11% menjadi 6%.

Capaian Unmet Need DIY di tiap wilayah kabupaten/kota menunjukkan hasil yang fluktuatif dan cenderung menurun dari 2018 hingga 2020, namun meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena unmet need ini berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.

Tabel 2-101 Perkembangan *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2022

No	Kabupaten /Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kulon Progo	10,25	10,25	8,23	8,89	12,90
2	Bantul	9,76	10,55	9,99	9,20	17,20
3	Gunungkidul	8,80	9,48	8,82	8,87	13,90
4	Sleman	9,50	9,04	7,95	7,13	19,10
5	Yogyakarta	15,14	14,15	12,10	12,05	20,50

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

2.3.2.8.7 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana

Pelayanan KB yang berkualitas ditandai dengan tingkat komplikasi, ketidakberlangsungan dan kegagalan yang rendah atau berada dalam batas toleransi. Keberadaan sarana dan prasarana ini dibutuhkan khususnya untuk memberikan akses yang memadai kepada masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan akan pelayanan KB. Dalam pelaksanaannya, upaya memperluas jangkauan pelayanan dan mendekatkan tempat pelayanan medis KB kepada akseptor dilaksanakan di Rumah Sakit. Sedangkan, pelayanan non medis dilaksanakan melalui Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD.

Tabel 2-102 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2022

No	Klinik KB	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PKBRS	39	40	50	45	51
2	Pemerintah	144	146	149	147	150
3	Swasta	206	150	193	221	199
4	PPKBD	438	438	438	438	442
5	Sub PPKBD	5.356	5.359	5.361	5.358	5.337

Keterangan :

a. *PKBRS : Program KB Rumah Sakit*

b. *PPKBD : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa*

c. *Sub PPKBD : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun)*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2.3.2.8.8 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan pelayanan KB adalah petugas pelayanan KB. Pemerintah menargetkan tersedianya 100 bidan per 100.000 penduduk dan 40 dokter umum per 100.000 penduduk.

Tabel 2-103 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2022

Tahun	Petugas			Jumlah
	Dokter	Bidan	PKB	
2018	110	545	244	899

Tahun	Petugas			Jumlah
	Dokter	Bidan	PKB	
2019	106	514	221	841
2020	80	415	236	731
2021	18	405	217	640
2022	135	2.320	184	2.639

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya selalu menurun dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2022 jumlah dokter dan petugas KB di DIY diketahui meningkat 312% dibanding tahun sebelumnya.

2.3.2.8.9 Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan KB kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran, melainkan juga menyangkut ketentraman spiritual dan keharmonisan keluarga.

Pendataan Keluarga pernah dilakukan oleh BKKBN mengklasifikasikan keluarga Indonesia ke dalam lima tahapan keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Namun saat ini secara nasional, untuk Pendataan Keluarga 2021 tidak lagi mengenal pengelompokan keluarga berdasarkan tahapan seperti Pra-Sejahtera hingga Keluarga Sejahtera III Plus. Sehingga kalau ada daerah yang memerlukan pentahapan seperti itu, BKKBN mempersilahkan untuk melakukannya sendiri sesuai kebutuhan daerah. Dalam hal ini BKKBN DIY merilis data tahapan keluarga sejahtera pada aplikasi Jogja Dataku BAPPEDA DIY sebagai berikut.

Tabel 2-104 Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2018-2022

Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Total	1.039.651,00	1.040.668,00	1.040.668,00	n/a	n/a
Keluarga Prasejahtera	121.926,00	122.042,00	122.070,00	n/a	n/a

Keluarga Sejahtera Tahap 1	619.065,00	606.271,00	606.243,00	n/a	n/a
Keluarga Sejahtera Tahap 2	298.060,00	312.355,00	312.355,00	n/a	n/a

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera II.

2.3.2.8.10 Program Bina Keluarga

Pemerintah mencanangkan program Bina Keluarga,yang terdiri tiga kategori, yakni: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Dalam program ini, keluarga difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan dalam rangka membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar, serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua.

Tabel 2-105 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	BKB					BKR					BKL				
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	387	387	291	291	290	130	130	135	135	139	115	115	137	137	149
Bantul	304	299	316	317	317	89	92	107	106	122	117	117	132	124	143
Gunungkidul	481	369	379	379	390	98	103	110	110	131	137	135	151	151	171
Sleman	213	187	186	187	212	147	138	142	143	151	180	163	166	166	182
Yogyakarta	255	241	242	245	251	86	84	97	101	115	113	113	133	135	152
Jumlah	1.640	1.483	1.414	1.419	1.460	550	547	591	595	658	662	643	719	713	797

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Pada rentang tahun 2018 - 2022 BKB, BKR, dan BKL justru berkecenderungan meningkat. Mengingat kompleksnya persoalan terkait penduduk usia remaja,

peningkatan jumlah BKR ini sudah semestinya diupayakan. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Upaya penguatan instansi pelaksana BKR dinilai perlu dilakukan mengingat dalam program ini diselenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan orang tua sehingga dapat lebih terampil dan bijaksana dalam pengasuhan remaja.

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Pertumbuhan wilayah menuntut penyediaan ruang, sarana dan prasarana baru sehingga sebagai implikasinya terjadi perubahan dan pertumbuhan kebutuhan aksesibilitas transportasi.

Dalam konteks pembangunan di wilayah DIY, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DIY tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DIY, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya yang berkelanjutan.

Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan layanan transportasi secara menyeluruh, yang direncanakan berdasarkan pola pergerakan. Fungsi utama sistem jaringan transportasi adalah mewadahi pola hubungan kegiatan dan pergerakan yang diwujudkan dalam jalur jalan sehingga kegiatan dan pergerakan saling terkait secara utuh dan terpadu. Sistem pergerakan meliputi perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dan mewadahi keterkaitan fungsional antar kegiatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan wilayah tetangganya dalam kerangka suatu sistem hirarki kota.

Tabel 2-106 Jumlah Pergerakan, Bangkitan dan Tarikan di DIY

Rank	Kecamatan	Bangkitan (perjalanan/hari)	Tarikan (perjalanan/hari)
Kabupaten Kulon Progo			
1	Wates	33.961	49.676
2	Sentolo	37.562	30.779

Rank	Kecamatan	Bangkitan (perjalanan/hari)	Tarikan (perjalanan/hari)
3	Pengasih	33.620	29.157
4	Lendah	32.960	26.222
5	Panjatan	25.815	21.408
Kabupaten Bantul			
1	Kasihan	68.628	54.245
2	Banguntapan	68.121	51.843
3	Sewon	57.835	52.628
4	Bantul	39.131	60.472
5	Imogiri	37.676	30.763
Kabupaten Gunungkidul			
1	Wonosari	53.440	64.766
2	Playen	40.816	35.718
3	Ponjong	32.615	28.381
4	Semanu	32.092	27.382
5	Karangmojo	30.780	27.430
Kabupaten Sleman			
1	Depok	114.371	168.411
2	Mlati	77.381	78.533
3	Ngaglik	76.346	70.734
4	Gamping	76.057	63.162
5	Sleman	55.035	68.497
Kota Yogyakarta			
1	Umbulharjo	48.808	76.739
2	Gondokusuman	28.668	52.851
3	Jetis	17.677	40.186
4	Mergangsan	22.157	31.110

Rank	Kecamatan	Bangkitan (perjalanan/hari)	Tarikan (perjalanan/hari)
5	Mantrijeron	26.155	25.455

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah pergerakan terbesar berada di Kabupaten Sleman dengan zona berasal dari Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Gamping dan Kapanewon Sleman dan diikuti oleh Kota Yogyakarta.

Konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain adalah adanya berbagai jaringan antara daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan aksesibilitas terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya (angkutan pribadi maupun angkutan umum).

Penyediaan prasarana/simpul transportasi di DIY terutama di wilayah perkotaan yogyakarta meliputi Terminal, *Park and Ride*, Stasiun Kereta Api, dan Bandar Udara.

a. Terminal
   Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 2 (dua) titik Terminal Tipe B, yaitu: Terminal Jombor yang berlokasi di Kabupaten Sleman, dan Terminal Wates yang berlokasi di Wates, Kulon Progo.

b. *Park and Ride*
   Sistem *Park and Ride* di DIY sebenarnya sudah diakomodasi di dalam titik-titik simpul eksisting, seperti di Bandara, Stasiun KA, dan Terminal Bus (khususnya di Terminal Tipe A, B dan sebagian Tipe C, karena sesuai dengan regulasi yang ada maka setiap titik-titik simpul tersebut harus menyediakan lahan parkir. Namun perlu dicatat bahwa wilayah DIY hanya memiliki 2 (dua) terminal Tipe A (yaitu Terminal Giwangan dan Terminal Dhaksinarga) dan 2 (dua) terminal Tipe B (yaitu Terminal Jombor dan Terminal Wates). Selain itu adalah terminal Tipe C yang berada di tiap-tiap Kabupaten.

   Selain *Park and Ride* yang berlokasi pada terminal di Kota maupun Kabupaten di DIY, Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2008 telah membangun 2 (duat) fasilitas *Park and Ride* yang melayani angkutan umum perkotaan Trans Jogja, yaitu *Park and Ride* Gamping, Dongkelan,

Adisutjipto dan Prambanan. Sedangkan untuk kebutuhan lahan parkir khususnya dalam rangka mendukung pariwisata telah dibangun 4 (empat) tempat khusus parkir yaitu:

- tempat khusus parkir Abu Bakar Ali;
- tempat khusus parkir Ngabean;
- tempat khusus parkir Senopati; dan
- tempat khusus parkir XT Square.

c. Bandara

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 2 Bandara yaitu Bandar Udara Internasional Adisutjipto dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan bandar udara baru di Yogyakarta yang menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Per tanggal 29 Maret 2020. Terdapat beberapa antarmoda pendukung pada Bandar Udara International Yogyakarta, yaitu Damri, Satelqu, dan Kereta Api Bandara YIA.

d. Stasiun Kereta Api

Terdapat 3 stasiun yang melayani perjalanan melalui moda berbasis rel di DIY yaitu Stasiun Yogyakarta (YK) yang dikenal sebagai Stasiun Tugu merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A, Stasiun Lempuyangan (LPN) yang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe B dan Stasiun Maguwo (MGW) yang merupakan stasiun kereta api bandara kelas II. Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan, Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Kinerja Urusan Perhubungan sampai dengan Tahun 2022

A. Kinerja Lalu Lintas

Degree of Saturation (*DS*) atau biasa disebut derajat kejenuhan merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja lalu lintas yang sangat penting dikaji untuk mengetahui kemampuan dari suatu ruas dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. DS maksimum yang masih diperbolehkan ialah DS ≤ 0,75 yang diartikan ruas jalan tersebut masih dapat melayani kendaraan yang lewat dengan baik, sedangkan apabila lebih dari itu maka jalan tersebut sudah tidak mampu melayani kendaraan yang lewat dan memerlukan alternatif penanganan. Nilai DS pada ruas-ruas jalan di KPY yang cukup penting disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-107 Tabel Derajat Kejenuhan di Jalan Perkotaan Tahun 2019 dan 2021

No Ruas Jalan	Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Tipe Ruas	Arah Arus	DS	
					2019	2021
1	Jl. Abubakar Ali	Kolektor Sekunder	4/2 D	Timur - Barat	1,12	0,47
2	Jl. Diponegoro	Kolektor Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,9	0,75
3	Jl. Mataram	Kolektor Sekunder	2/2 UD	Dua Arah	0,89	0,81
4	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Kolektor Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,83	1,03
5	Jl. Jenderal Sudirman (Tugu)	Kolektor Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,81	1,40
6	Jl. Kleringan	Kolektor Sekunder	2/1	Satu Arah	0,8	0,69
7	Jl.Margo Utomo/ P. Mangkubumi	Kolektor Sekunder	2/1	Satu Arah	0,74	0,70
8	Jl. Malioboro	Kolektor Sekunder	2/1	Satu Arah	0,58	0,56
9	Jl. Panembahan Senopati	Kolektor Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,54	0,40
10	Jl.RE. Martadinata	Arteri Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,79	1,29

Berdasarkan *data V/C Ratio* sesuai Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang pada ruas Jalan Provinsi pada tahun 2022 dapat diperoleh hasil bahwa pada wilayah dengan ciri perkotaan (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman) mempunyai DS tertinggi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Dari hasil analisis didapatkan bahwa DS tertinggi secara umum terjadi pada jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.15-17.15.

Data pada jam puncak tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar ruas jalan provinsi di DIY berada pada tingkat pelayanan C dan D dimana pada tingkat pelayanan tersebut arus dari stabil menuju tidak stabil dan kecepatan cenderung mulai melambat.

B. Kinerja Angkutan Umum

Pengembangan angkutan umum di perkotaan DIY dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi perjalanan orang menggunakan angkutan pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalan. Trans Jogja adalah layanan angkutan umum yang mengusung Layanan Angkutan umum yang berada di wilayah DIY yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa jenis yang meliputi Angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Selain layanan angkutan berbasis jalan terdapat juga layanan angkutan berbasis rel.

Layanan angkutan dalam trayek meliputi :

a. Angkutan Perkotaan Yogyakarta

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja yang dilayani sampai saat ini sejumlah 18 rute seperti dan untuk trayek tambahan (Teman Bus trayek 12, 13, 14) Layanan angkutan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta saat ini didukung oleh Bus Trans Jogja dan layanan Teman Bus (*Buy The Service*). Pada tahun 2022 angkutan Umum Perkotaan dengan sistem *Buy The Service* telah melayani 18 jalur dan 95 armada. Layanan operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 WIB – 21.30 WIB dan selama pandemi mengalami pengurangan waktu operasional dari pukul 06.00 WIB – 19.00 WIB. Kemudian untuk layanan *Buy The Service* dengan Koridor Ngaglik sejumlah 6 Bus, Godean sejumlah 10 Bus dan Ngemplak sejumlah 14 Bus dengan cadangan sebanyak 4 Bus.

Tabel 2-108 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017 s.d. 2022

No.	Tahun	Penumpang Terangkut	
		Trans Jogja	
		penumpang/ hari	penumpang/ tahun
1.	2017	8.218	5.999.335
2.	2018	8.056	5.880.610
3.	2019	7.150	5.282.737
4.	2020	7.607	2.776.667
5.	2021	4.132	1.508.450
6.	2022	8.144	1.715.567

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Angkutan Antar Kota dalam Provinsi, Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah armada untuk layanan AKDP cenderung stabil, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 banyak perusahaan otobus yang pailit sehingga Perusahaan otobus tidak dapat mengoperasionalkan armadanya. Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021, dari 45 Trayek yang terdaftar dalam SK Gubernur hanya terdapat 5 trayek yang beroperasi secara rutin dan trayek tersebut dilayani oleh Damri melalui intervensi pemerintah pusat.

Tabel 2-109 Trayek AKDP yang terlayani di DIY

No	Trayek	*Load Factor* (%)
1	Jogja - Bantul - Brosot	21,25
2	Jogja - Wates	21,25
3	Jogja - Wonosari	21,25
4	Jogja - Parangtritis	30,3
5	Palbapang - YIA	14,6

c. Angkutan Pedesaan Dalam Provinsi.

Berdasarkan hasil Studi Evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021 terdapat potensi penanganan angkutan pedesaan provinsi yang terdiri dari trayek:

1) Imogiri – Panggang – Parangtritis
2) Jogja – Imogiri
3) Jogja – Parangtritis
4) Gamping – Sentolo – Wates – YI
5) Godean – Terminal Kenteng – Dekso – Kalibawang - Samigaluh

Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek meliputi :

a. Angkutan Sewa Khusus, Angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, Pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasi teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

b. Taksi, Angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer

Data jumlah dan jenis angkutan di DIY tahun 2018-2022 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah di semua jenis angkutan. Penurunan sangat drastis tercatat pada jenis angkutan AKDP dan taksi. Jumlah penumpang perkotaan terangkut menunjukkan tren peningkatan. Pada triwulan ketiga

tahun 2022 tercatat jumlah penumpang sebanyak 8.144 penumpang per hari atau 2,223.441 penumpang per tahun.

Tabel 2-110 Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2018-2022

No	Jenis Angkutan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Angkutan AKDP	493	482	98	54	-**
2	Taksi	1025	505	503	503	164
3	Angkutan Perkotaan	315	184	149	172	172

**) data sampai dengan November 2022*
***) data belum tersedia*

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2022

Layanan Angkutan berbasis Rel :

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang rencana induk Perkeretaapian Provinsi Tahun 2017 – 2036, strategi pengembangan perkeretaapian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada pengembangan Jalur Utara – Selatan dan Timur – Barat. Perngembangan jaringan perkeretaapian meliputi jaringan kereta api penumpang dan Jaringan kereta Api barang.

Salah satu layanan angkutan umum berbasis rel saat ini adalah layanan kereta api jarak jauh, perkotaan dan Bandara. Layanan tersebut masuk dalam koridor Bandara Kulon Progo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan. Pada koridor tersebut terdapat Layanan angkutan kereta api perkotaan dengan relasi perjalanan Yogyakarta – Solo dan sebaliknya, untuk kereta api bandara relasi Stasiun Yogyakarta – Wates – Bandara Internasional Yogyakarta.

Angkutan Tradisional

Dalam mengetahui dan membatasi jumlah angkutan becak dan andong di Yogyakarta dengan melakukan pendataan transportasi tradisional. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah pada naungan Dinas Perhubungan DIY melakukan pendataan, untuk mengetahui jenis dan jumlah transportasi tradisional.

Tabel 2-111 Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Berdasarkan Hasil Survei

Jenis Kendaraan	Jumlah
Becak Wisata	63
Becak Non Wisata	52
Andong	32
Total	**147**

Sumber: Kajian Pendataan Pendaftaran Jenis Jumlah dan Pentapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional, 2022

C. Kinerja Keselamatan Jalan

Data kecelakaan yang dipergunakan dalam analisis evaluasi kinerja keselamatan jalan di DI Yogyakarta, diperoleh dari data yang tercatat dalam *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS) Kepolisian Republik Indonesia yang diperoleh Ditlantas Polda DIY. Data tersebut merekam seluruh kejadian kecelakaan di DIY untuk seluruh jenis ruas jalan dan status jalan dari Jalan Desa, Jalan Kota/Kabupaten, Jalan Provinsi hingga Jalan Nasional pada tahun 2021-2022.

Tabel 2-112 Jumlah Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Kejadian	MD	LB	LR	Panjang (km)	Kejadian /km
Kabupaten Bantul	765	79	0	900	162,15	4,72
Kabupaten Kulon Progo	377	47	0	643	175,14	2,15
Kabupaten Gunungkidul	306	30	0	410	306,84	1,00
Kabupaten Sleman	465	52	0	557	116,32	4,00
Jumlah	1913	208	0	2510	760,45	2,52

Sumber:: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

Tren kenaikan angka kejadian kecelakaan per km pada jalan provinsi terjadi di semua kabupaten di DIY, dengan Kabupaten Bantul masih berada pada posisi tertinggi, disusul Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Angka kejadian kecelakaan per km pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Rasio jumlah kecelakaan per km jalan provinsi sampai dengan tahun 2022 adalah 2,52 dari target 0,9. Artinya dari data tersebut terlihat bahwa angka kecelakaan per km jalan provinsi masih sangat tinggi dengan faktor dominan terjadinya kecelakaan didominasi oleh faktor manusia seperti tidak menaati peraturan lalu lintas, lengah, melebihi batas kecepatan maksimal dan beberapa faktor eksternal diluar kewenangan Dinas Perhubungan DIY seperti kondisi jalan yang belum ideal seperti lebar bahu, lebar lajur dan jarak pandang yang belum memadai dan genangan air hujan

Tabel 2-113 Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM Panjang Ruas Jalan

Rank	No Ruas	Nama Ruas	Kabupaten	Panjang	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus /km
1	021	Gedongkuning - Wonocatur	Bantul	1,20	30	25,00
2	001	Yogyakarta - Bakulan (Parangtritis)	Bantul	8,35	119	14,25
3	005	Bantul - Srandakan	Bantul	8,95	120	13,41
4	008	Bakulan - Barongan	Bantul	3,18	37	11,65
5	002	Yogyakarta - Barongan	Bantul	9,80	109	11,12

Sumber:: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

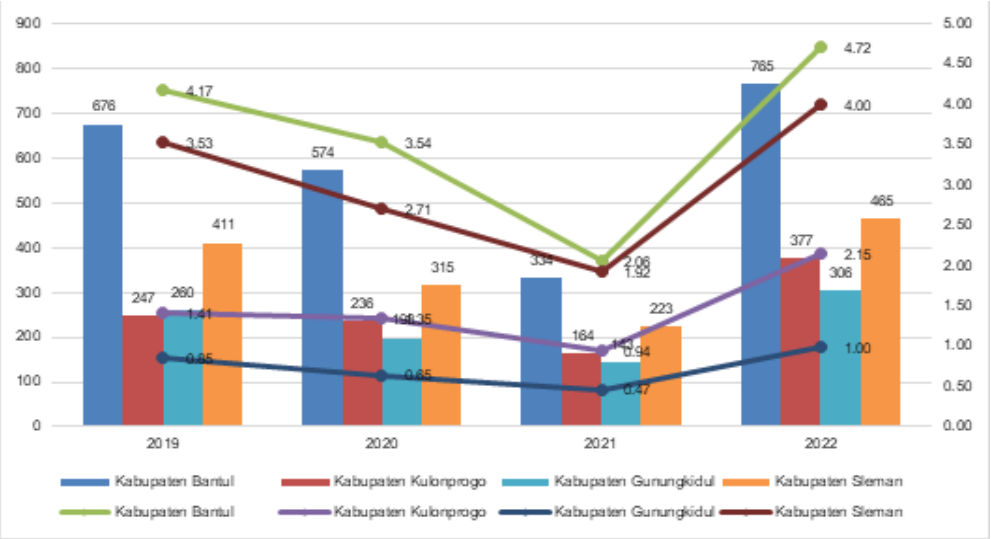

Sumber : Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

Gambar 2-63 Jumlah Kasus DAN Kasus/Km Periode 2019-2022 Jalan Provinsi DIY

Dalam rangka pemenuhan fasilitas sarana prasaranan perlengkapan jalan sebagai fungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan pada jalan provinsi di DIY.

Tabel 2-114 Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Terpasang	Kebutuhan	Persentase	Kekurangan
1	APJ Surya	unit	298	3.044	10	2.746
2	APJ Listrik	unit	3.023	12.164	25	9.141
3	Warning light TS	unit	110	376	29	266
4	Rambu	unit	3.203	4.215	76	1.012
5	RPPJ	unit	427	722	59	295
6	Delineator	buah	9.260	19.520	47	10.260
7	Pagar	meter	5.780	19.520	30	13.740
8	Paku	buah	14.252	20.527	70	6.275

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Terpasang	Kebutuhan	Persentase	Kekurangan
9	Cermin Tikungan	unit	563	1.003	56	440
Rata-rata terpasang					45	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022

Layanan Teknologi Transportasi

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep *Area Traffic Control Systems* (ATCS). Dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan tahun 2021 telah terpasang 64 unit ATCS atau 56,14% dari 114 simpang yang direncanakan. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan *signal bus priority*, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung *signal bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di *Control Room* ATCS Dinas Perhubungan DIY. Sampai tahun 2022 sejumlah 22 simpang ATCS sudah terpasang dari target yang direncanakan untuk pemasangan ATCS sebanyak 30 simpang. memberikan manfaat yang sangat besar secara ekonomi, sosial dan lingkungan bahkan budaya. Selain wilayah hutan yang

Tabel 2-115 Rekapitulasi jumlah ATCS di DIY

No	Kewenangan	Jumlah Total	Terpasang ATCS	Belum Terpasang ATCS
1	BPTD X	39	33	6
2	DIY	65	31	34
3	Kota	37	21	16
4	Sleman	9	7	2
Total		150	92	58

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal http://jogjaprov.go.id. OPD DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pelayanan publik maupun keperluan internal.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis digital tersebut adalah memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya, pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi, pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia. Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi dan promosi, dapat disebarkan secara digital melalui berbagai platform, seperti videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat, dan lebih efektif.

Untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mendorong percepatan implementasi tanda tangan elektronik dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hingga akhir tahun 2021 sudah ada 130 orang pejabat di lingkungan Pemda DIY yang menggunakan Sertifikat Elektronik. Dinas Kominfo DIY juga membangun aplikasi Sadewa sebagai sarana penandatanganan dokumen elektronik secara berjenjang di lingkungan Pemda

DIY. Disamping itu, Diskominfo juga melakukan pendampingan terhadap aplikasi kenaikan pangkat dan paperless office untuk dapat terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Pada tahun 2021, untuk mendukung penerapan Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan pemerintah untuk banyak menggunakan sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Keamanan Informasi dan Persandian membangun *Security Operation Center* (SOC). SOC merupakan pusat operasi yang terdiri dari perangkat audio visual pemantauan, sensor pemantauan, perangkat komunikasi, dan perangkat pendukung. Dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi di Pemda DIY, khususnya terkait dengan pembangunan SOC, maka pada tahun 2021 dibentuk Tim JOGJAPROV CSIRT periode tahun 2021. Salah satu tugas utamanya adalah penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi di Pemda DIY.

Selain itu, pada tahun 2021 melakukan *Penetration Testing* (*pentest*) untuk menguji keamanan informasi pada 10 aplikasi yang digunakan oleh Pemda DIY. Pencapaian kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100%. Selanjutnya, sesuai dengan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui bidang Keamanan Informasi dan Persandian juga mengelola jaringan telekomunikasi internal Pemda DIY dengan jumlah titik yang terkoneksi 600 titik, kemudian juga dilakukan *upgrade* dan relokasi perangkat PABX untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Dari kedua target tersebut, dapat terselenggara 100% sesuai indikator yang ditentukan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemda DIY telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana interaksi pemerintah kepada masyarakat serta merespon berbagai masukan dari masyarakat melalui berbagai kanal media sosial yang dimiliki Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk memberikan layanan informasi terpadu tentang DIY, Pemda DIY telah membangun aplikasi "Jogja Istimewa" yang bisa diakses melalui telepon pintar (*smartphone*) dengan penambahan fitur pembayaran tiket elektronik (*e-ticket*) pada Museum Sonobudoyo sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna, demikian juga dengan perkembangan pandemi covid-19 telah dibangun berbagai sistem informasi, di antaranya corona.jogjaprov.go.id dan ayovaksin.jogjaprov.go.id. Untuk memudahkan layanan internet bagi warga masyarakat juga telah dibangun beberapa titik *free WiFi*. Demikian juga untuk

dapat mengetahui kondisi secara *real time* di berbagai objek wisata telah dibangun kamera pengawas yang dapat diakses melalui mam.jogjaprov.go.id maupun melalui layanan aplikasi "Jogja Istimewa".

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengampu jaringan intranet Pemda DIY, saat ini mengampu 269 titik jaringan intranet Pemda DIY yang tersebar di seluruh DIY, dengan rincian sebagai berikut:

a. 194 titik menggunakan jalur Fiber Optik;

b. 74 titik menggunakan jalur *Wireless*, 12 BTS;

c. 1 titik menggunakan VPN.

Pembangunan jaringan fiber optik Pemda DIY dimulai pada tahun 2013 mengacu pada *blueprint* pengembangan *backbone* fiber optik yang dibuat dalam 3 tahap yaitu dimulai dari koridor timur, koridor tengah-utara-barat, dan koridor selatan berupa kabel tanam dan kabel udara. Selanjutnya pembangunan *fiber optic* diprioritaskan untuk SMAN/SMKN dan optimalisasi jaringan instansi Pemda DIY dari jaringan *wireless* menjadi *fiber optic*.

Tabel 2-116 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2013	12.227	-	12.227
2014	21.876	12.007	33.883
2015	3.140	13.154	16,294
2016	-	1.000	1.000
2017	-	702	702
2018	-	11.575	11.575
2019	-	4.450	4.450
2020	-	379.875	379.875
2021	-	5.350	5.350
2022	-	22.500	22.500

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
Total	37.243	455.613	492.856

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

Pada tahun 2018 sebanyak 118 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) bergabung ke dalam jaringan intranet Pemda DIY dan pada tahun 2020 semua SMAN/SMKN di DIY sudah terhubung dengan jaringan intranet Pemda DIY, baik menggunakan jalur kabel fiber optik maupun wireless. Selanjutnya untuk memperkuat dan memperbaiki kapasitas jaringan internet pada SMAN/SMKN, maka jaringan *wireless* harus ditingkatkan menjadi jaringan fiber optik, karena kebutuhan *bandwidth* internet untuk kegiatan belajar di sekolah SMAN/SMKN rata-rata membutuhkan 200 mbps dan itu hanya bisa difasilitasi dengan jaringan fiber optik.

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan layanan publik melalui diseminasi informasi. Pemberdayaan dan penguatan peran sumber daya informasi dan komunikasi diarahkan kepada komunitas masyarakat yang berbasis budaya, sedangkan dari sisi pengelolaan informasi di pemerintah daerah, dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di antaranya pembinaan terhadap PPID pembantu, pengembangan aplikasi pelayanan informasi, dan penyusunan SOP integrasi kehumasan OPD se-Pemda DIY.

2.3.2.10.1 Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di DIY dengan indikator persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dapat dilihat dari hasil Komisi Informasi DIY. Adapun data sengketa informasi beberapa tahun terakhir secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-117 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kades Caturtunggal, Depok, Sleman	001/I/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Sela
2.	Camat Ngemplak, Sleman	002/V/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
3.	Kades Tirtoadi, Mlati, Sleman	003/VIII/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantah Kota Yogyakarta	004/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantah Kab. Bantul	005/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	PPID Utama Pemda DIY	006/IX/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Putusan Ajudikasi
7.	Kepala Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	007/X/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
8.	PPID Utama Kab. Sleman	008/X/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Damai
9.	Kades Sidomoyo, Godean	009/X/KIDDIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
10.	Kepala Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman	010/XI/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-118 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	001/II/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
2.	Kepala Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	002/IV/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
3.	Kepala Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY	003/V/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantor Pertanahan Bantul, DIY	004/V / KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

5.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	005/VII / KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-119 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wonokromo Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY	001/II/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
2.	Pemerintah Kabupaten Sleman	002/I/KID DIY-PS/2020	Anggaran	Kesepakatan Mediasi Damai dan Putusan Ajudikasi
3.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	003/II/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/III/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
5.	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	005/IV/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	006/VII/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
7.	Kades Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta	007/VIII/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Mediasi
8.	Kepala Desa Sendangagung, Kec. Minggir, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	008/X/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
9.	Kepala Desa Sinduadi Kec. Mlati,	009/XI/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
	Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta			
10.	Kepala Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman DIY	010/XI/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-120 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Lumbungrejo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	001/I/KID DIY-PS/2021	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Widodomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman	002/VI/KIDDIY-PS2021	Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-121 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022

No	Termohon	No. Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul	001/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Depok, Panjatan, Kulon Progo	002/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
3.	Lurah Maguwoharjo, Depok, Sleman	003/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/IV/KIDDIY-PS/2022	LHKPN	Putusan Ajudikasi
5.	Pemkab Sleman	005/V/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi

No	Termohon	No. Registrasi	Objek	Keterangan
6.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	006/V/KIDDIY-PS/2022	Salinan eksekusi	Putusan Mediasi
7.	Pemkot Yogyakarta	007/V/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
8.	Pemkab.Kulon Progo	008/v/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
9.	Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah	009/VI/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Komisioner	Putusan Ajudikasi
10.	Perkumpulan Simponi	010/VII/KIDDIY-PS/2022	Aggaran	Putusan Ajudikasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

2.3.2.10.2 Sub Urusan Aplikasi Informatika

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan subdomain untuk halaman daring informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin kedaulatan informasi di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui pemanfaatan domain resmi website pemerintah daerah di mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada telah menggunakan domain resmi jogjaprov.go.id dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis web yang bisa diakses publik lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2021 ada 441 domain web pemerintah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakan domain resmi.

2.3.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selama kurun waktu 2018-2022, jumlah koperasi di DIY cenderung mengalami pertumbuhan negatif. Tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 berkurang sejumlah 19 unit (1,1%) dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar 1.717 unit. Jumlah koperasi aktif di DIY pada tahun 2022 mencapai rasio 84,56% dari total koperasi di DIY, menurun dari tahun 2021 yang mencapai 86,36%. Jumlah koperasi pasif di DIY mengalami peningkatan dari semula 271 unit pada

tahun 2021 menjadi 310 unit pada tahun 2022. Volume usaha koperasi di DIY pada tahun 2022 sebesar Rp4.404.185 juta, naik lebih banyak dibanding pada tahun 2021 yang mencapai Rp4.272.359 juta. Sedangkan aset koperasi di DIY pada selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2021 aset koperasi sebesar Rp4.003.885 juta, lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.422.833 juta. Namun pada tahun 2022 aset koperasi kembali meningkat menjadi Rp4.394.943.

Tabel 2-122 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi	1.989	1.918	1.938	1.988	2.008
1.1	Koperasi Aktif	1.926	1.722	1.758	1.717	1.698
1.2	Koperasi Pasif	63	196	180	271	310
4	Volume Usaha Koperasi (juta rupiah)	4.394.362	4.325.218	4.142.871	4.272.359	4.404.185
5	Aset Koperasi (juta rupiah)	5.302.476	4.562.978	4.422.833	4.003.885	4.394.943

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Banyaknya koperasi di DIY jika dilihat berdasarkan jenis usaha, yang paling dominan adalah koperasi konsumen sebanyak 1014 (51%). Koperasi konsumen merupakan koperasi yang anggotanya berperan sebagai pemilik dan pembeli. Sedangkan koperasi penghasil barang/jasa atau koperasi produsen hanya 202 (10%) terhadap total jumlah koperasi di DIY.

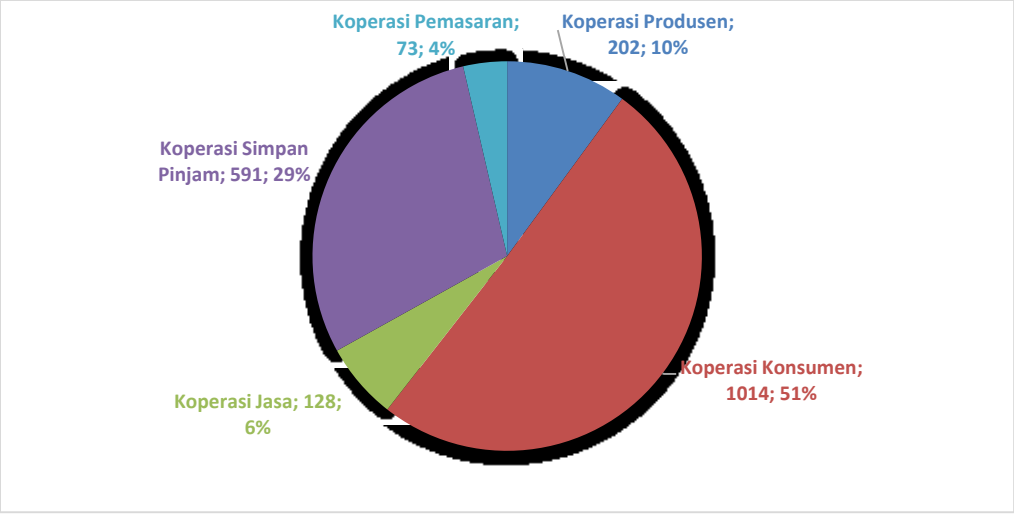

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022 (diolah)

Gambar 2-64 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2022

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DIY tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 22.669 unit usaha (7,08%) dari semula 320.255 unit usaha pada tahun 2021 menjadi 342.924 unit usaha pada tahun 2022. Dilihat dari aspek jenis usaha, mayoritas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berasal dari sektor Industri Pengolahan dengan jumlah 255.788 unit usaha atau sebesar 74,59% dari total UMKM di DIY, diikuti oleh sektor Perdagangan dengan jumlah 54.750 unit usaha atau 15,97% dari total UMKM di DIY. Sementara itu sektor kehutanan memiliki jumlah UMKM paling sedikit dibanding sektor lainnya yang hanya mencapai 14 unit usaha pada tahun 2022.

Tabel 2-123 Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020-2022

No	Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Sektor Pertanian	30.262	1.590	1.652
2	Sektor Perdagangan	46.482	49.893	54.750
3	Sektor Kelautan dan Perikanan	1.039	444	462
4	Sektor Kehutanan	24	14	14
5	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	76	97	97

No	Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha	Tahun		
		2020	2021	2022
6	Sektor Transportasi	6.686	6.668	6.664
7	Sektor Komunikasi	82	115	116
8	Sektor Pariwisata	502	144	148
9	Sektor Jasa Kesehatan	136	126	201
10	Sektor Konstruksi	670	698	699
11	Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	511	872	872
12	Sektor Jasa Pendidikan	184	209	212
13	Sektor Industri Pengolahan	171.539	238.577	255.788
14	Ekonomi Kreatif	16.994	9.660	10.098
15	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.490	11.073	11.151
	Jumlah Total	**277.677**	**320.255**	**342.924**

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

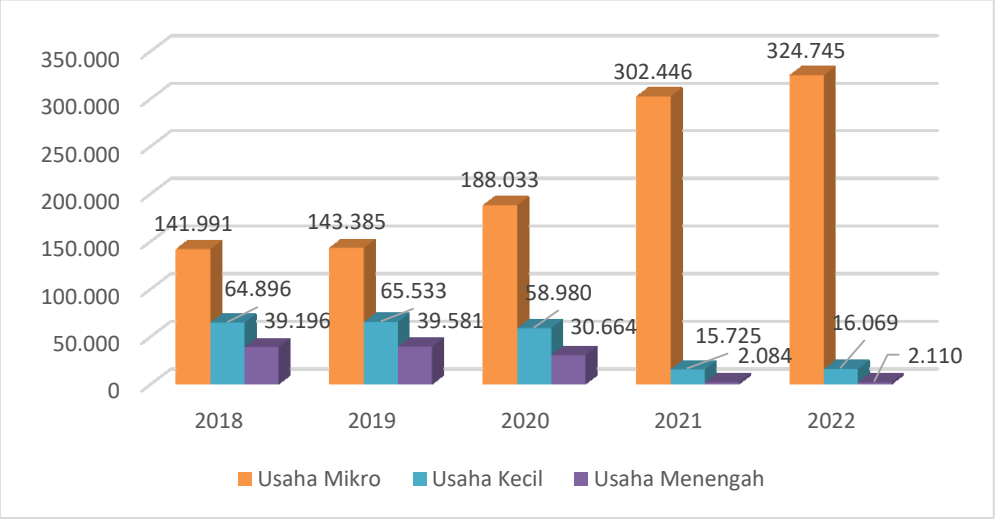

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-65 Jumlah UKM di DIY Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2018-2022

Koperasi dan UKM diharapkan menjadi penggerak perekonomian utama di DIY, mengingat mayoritas perekonomian di DIY didominasi oleh sektor koperasi dan UKM. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara untuk sektor UKM diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UKM.

Untuk meningkatkan skala usaha UMKM, berbagai skema pembiayaan telah digulirkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat karena pembiayaan ini merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha. Saat ini, berbagai alternatif sumber pinjaman untuk kegiatan usaha telah tersedia, salah satunya pembiayaan bunga rendah dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui tambahan modal, UMKM dapat melakukan pembelian aset produktif atau sebagai sarana untuk memperlancar aliran kasus kas untuk kegiatan produksi. Untuk itu, Pemda DIY memberikan pelatihan pendampingan agar pelaku usaha khususnya UMKM memiliki tata kelola usaha yang layak. Sampai dengan November 2022, total plafon pinjaman yang telah disalurkan di DIY mencapai 6,2 Triliun Rupiah. Dalam kurun waktu 2018-2022 penyaluran kredit menjadi salah satu indikasi pertumbuhan kegiatan daerah khususnya UMKM.

Tabel 2-124 Perkembangan KUR, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Plafon (Triliun)	2,84	3, 00	3,94	5,87	6,22
Outstanding (Triliun)	0,15	0,39	0,97	3,12	4,76
Debitur	104,676	109,464	130,259	165,550	140,039

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, 2022

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah didorong olehpertumbuhan investasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi, terutama PMDN, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

Kegiatan penanaman modal adalah tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut. Sementara itu, kegiatan PMA juga memiliki peran strategis dalam membawa teknologi baru ke DIY. Kegiatan PMA yang sering diikuti kehadiran tenaga kerja asing, mesin atau metode kerja modern diharapkan dapat memberikan pengetahuan teknologi industri baru di DIY.

Investasi DIY diutamakan untuk industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif. Kegiatan investasi di DIY diupayakan untuk jenis kegiatan industri yang ramah lingkungan. Dengan demikian, investasi yang tumbuh di DIY diharapkan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan serta karakteristik masyarakatnya. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun 2018 – 2022 menunjukan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2022 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 12.03%. Realisasi Investasi di DIY sampai dengan Tahun 2022 (kumulatif) mencapai Rp 36,4 triliun dengan investasi PMDN mencapai Rp 24,9 triliun dan PMA mencapai 11,4 triliun seperti yang ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 2-125 Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah)

Tahun	Investasi PMDN	Investasi PMA	Total Investasi	*Growth*	*Growth* %
2018	10.949.163,46	9.126.508,08	20.075.671,54	7.221.483,08	56,18%
2019	17.248.001,99	9.345.955,08	26.593.957,07	6.518.285,52	32,47%
2020	19.931.377,69	9.485.961,96	29.417.339,65	2.823.382,58	10,62%
2021	22.692.648,19	9.803.584,43	32.496.232,62	3.078.892,97	10.47%
2022	24.967.647,19	11.437.953,24	36.405.600,44	3,909,367.82	12,03%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

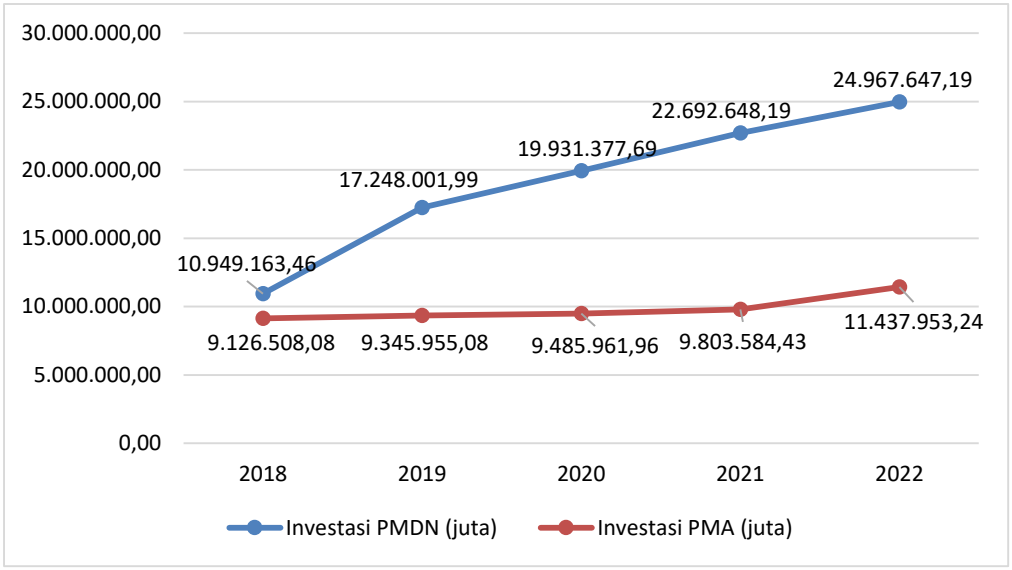

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-66 Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2018 s.d 2022

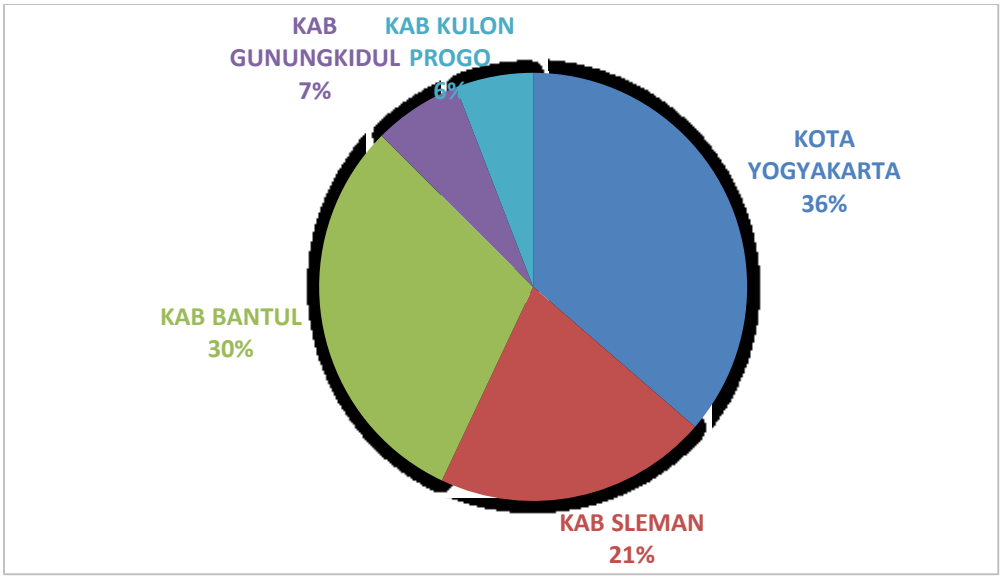

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-67 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan II 2022

Secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi tersebut. Investasi di DIY sampai triwulan II tahun 2022 masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta (36%) dan Kabupaten Bantul (30%), mengalami pergeseran dari tahun 2021 yang sebelumnya didominasi oleh Kota Yogyakarta (42%) dan Kabupaten Sleman (41%). Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, maka ketimpangan antar wilayah akan semakin melebar. Dengan demikian, permasalahan penyebaran investasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo diharapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal.

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Tujuan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga di DIY, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam UU kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan DIY diarahkan pada pembangunan *softskill* dan *hardskill* pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan

masyarakat merupakan pengembangan *softskill*. Sedangkan pengembangan *hardskill* pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Jumlah klub olahraga pada tahun 2022 terdapat 1.207 buah.

Tabel 2-126 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga dan Sarana Olahraga di DIY

Uraian	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pemuda dan Olahraga						
Jumlah Klub Olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	Klub
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	Unit
Jumlah kegiatan olahraga	13	12	2	4	4	Kali
Jumlah organisasi pemuda	74	74	74	56	56	Unit
Jumlah kegiatan kepemudaan	11	11	4	6	3	Kali
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10	Unit

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

2.3.2.14 Urusan Statistik

Dalam penyelenggaraan urusan statistik di lingkup pemerintah, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data. Data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan

membuat kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif. Pengambilan keputusan penting tidak boleh dilakukan tanpa adanya data. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.

Perpres tersebut menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di Instansi Pusat maupun Daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY No 3 Tahun 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah (DIY). Dalam penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah DIY dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, maka penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yang meliputi:

1. Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI.
2. Data harus memiliki metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informaasi data.
3. Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
4. Data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk, adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kode Referensi dan /atau data induk dibahas dan sepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Dari keempat prinsip Satu Data Indonesia tersebut, saat ini prinsip satu data yang dapat dipenuhi adalah metadata, sehingga formulasi penghitungan indikator urusan statistik adalah perbandingan elemen data yang sudah memiliki metadata dengan seluruh elemen data. Penghitungan capaian per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2-127 Perbandingan Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata dengan Seluruh Elemen Data

Tahun	Jumlah elemen Data yang sudah memiliki Metadata	Jumlah keseluruhan elemen Data	Persentase
2022	1809	4522	40%

Beberapa turunan dari Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2020 yang telah disusun diantaranya adalah Keputusan Gubernur Nomor 34/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Satu data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didalamnya juga membentuk Simpul Jaringan DIY. Forum ini memiliki tugas umum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data dan rencana aksi serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang meliputi penyelenggaraan data statistik dan geospasial. Selanjutnya, telah terbit Keputusan Gubernur Nomor 262/KEP/2022 tentang Penunjukan Unit Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional di DIY, yang terdiri Koordinator, Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial.

Selain itu, DIY telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY tahun 2022-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 251/KEP/2022, yang merupakan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY tahun 2022-2024. Tahun 2022 DIY juga telah menetapkan Daftar Data dan Daftar Data prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun 2023.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tugas dan Fungsi Urusan Statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial.

Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program dan kegiatan urusan Statistik, Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 tahun 2022 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut UPT BPPSD Bappeda DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (non spasial) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan stakeholders penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya.

Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah yang dikelola oleh Bappeda DIY, dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY, merupakan wujud upaya dalam memperbaiki tata kelola data, manajemen data dan kualitas data dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, aplikasi Dataku dan Geoportal DIY.

Dataku dan Geoportal DIY dikelola secara online oleh seluruh Perangkat Daerah (OPD DIY) dan instansi vertikal di DIY serta Kabupaten/Kota sebagai sumber data sekunder. Masing-masing Perangkat Daerah dan instansi memiliki *Person in Charge* yang kemudian disebut dengan Tim Satu Data Pembangunan Daerah dan

bertanggung jawab terhadap validitas dan ketersediaan data pada variabel tertentu. Tim Satu Data Pembangunan Daerah memiliki kemampuan personil yang cekatan dalam updating data dan dapat mempublikasikan data secara akurat. Setiap OPD, instansi, dan kabupaten/kota memiliki user dan password dan wajib melakukan input data secara online pada aplikasi Dataku dan Geoportal DIY sesuai dengan periodesasi dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Dataku dapat diakses pada alamat http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/.

Gambaran umum tentang penyediaan data statistik telah dituangkan dalam *Standard Operating Procedure (*SOP) Aplikasi Dataku Nomor: 557/11996 tanggal 15 Juni 2021 dan telah diperbarui dengan SOP Nomor: 050/16219 tanggal 12 September 2022 yang ruang lingkupnya meliputi: Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data, Penyimpanan dan Penyebarluasan Data, Penambahan Elemen Data, Penghapusan Elemen Data dan Integrasi Data

Tabel 2-128 Penyediaan Data Statistik Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Sektor/Bidang Urusan	44
2	Cakupan Tahun/Series	2009-2022
3	Jumlah Elemen Data	6.508
4	Produsen Data/Sumber Data/Instansi yang Terlibat	42
5	Jumlah Pengakses Data di Aplikasi Dataku Tahun 2022	493.899
6	Jumlah Pengguna Data di Aplikasi Dataku Tahun 2022	366.541
7	Jumlah total hits Aplikasi Dataku	1.046.189

Geoportal DIY adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemda DIY dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah. Geoportal DIY dapat diakses pada alamat http://geoportal.jogjaprov.go.id/.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumber daya wilayah, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pembina data geospasial dengan Nota

Kesepakatan Nomor 1.1/KA-BIG/HK.01.03/9/2022 dan Nomor 119/15301/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan data dan Informasi Geospasial di DIY. Disamping itu juga bekerjasama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di DIY yang memiliki fakultas atau jurusan kebumian. Diantaranya menyusun Rencana kerja dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (PPIDS) yang telah tetapkan pada tanggal 28 September 2022, dengan nomor 119/02937/2022 dan Nomor 902809/UN1/FTK/LKFT/HK/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di DIY. Pemenuhan kebutuhan SDM disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial (IG) Pasal 2 Ayat 3, Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG terdiri atas Geografer, Surveyor, Tenaga Ahli Bidang IG, dan Tenaga Terampil Bidang IG.

Dalam hal teknologi dalam rangka berbagi pakai data geospasial, DIY telah menerapkan geoportal yang dikembangkan dengan *platform open source* yaitu *Geonode*. Dalam berbagai data dilakukan menggunakan *services* yang disediakan oleh geoportal tersebut diantaranya *Web Map Service* (WMS)*, Web Feature Service* (WFS) dan *Catalogue Sevices for Web* (CSW). WMS dan WFS berkaitan pada berbagi pakai data dalam bentuk layanan dimana WMS data peta diberikan dalam bentuk image sementara pada WFS data peta diberikan dalam bentuk feature sehingga masih dapat dikelola lagi. Disediakan CSW memungkinkan katalog data yang terdapat pada Geoportal DIY dapat dikoneksikan dan dibaca oleh Geoportal Pusat/ Ina-Geoportal dan dimonitor oleh BIG melalui sistem monitoring geoportal Simojang.

Kondisi eksisting Aplikasi Geoportal saat ini cukup optimal. Namun demikian effort menuju kondisi yang optimal selalu diupayakan dengan cara perluasan jangkauan kompilasi data geospasial dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh OPD Pemda DIY untuk berkontribusi membangun data geospasial tematik sesuai tugas dan fungsi OPD masing masing, dengan meningkatkan literasi geospasial dikalangan ASN pada umumnya agar pemahaman tentang geospasial dan tentang kebutuhan data geospasial menjadi lebih baik. Kompilasi data geospasial dilaksanakan dengan kegiatan desk OPD untuk mengupayakan terwujudnya produsen data tunggal untuk sebuah data geospasial dengan tema/sub tema tertentu dan skala tertentu. Untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data geospasial tersebut diperlukan standar yang ditetapkan bersama. Desk data geospasial menghasilkan sekitar 150 tema data dengan

konten unsur lokasi di dalamnya dan berpotensi dikembangkan menjadi data geospasial. Geoportal DIY saat ini berisi 55 tema data geospasial dan terus akan dikembangkan. Sebagian besar berupa data pendukung penyusunan rencana tata ruang serta data geospasial dasar.

Terkait dengan pemanfaatan data geospasial, JIGD DIY juga telah memanfaatkan data penginderaan jauh sebagai sumber data, utamanya data penginderaan jauh sistem satelit yang berupa data digital hasil perekaman sensor satelit penginderaan jauh dari berbagai jenis sensor satelit. Perolehan data digital penginderaan jauh satelit di JIGD DIY melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh yang merupakan event rutin tahunan yang diselenggarakan oleh PUSTEKDATA LAPAN (sekarang tergabung dalam PUSDATIN BRIN). Dalam rakornas citra satelit tersebut terdapat mekanisme identifikasi kebutuhan data digital citra satelit di daerah. Sejak tahun 2019 JIGD DIY selalu mengajukan form kebutuhan data digital citra satelit yang meliputi beberapa jenis sensor, meliputi sensor optik baik itu multispektral dan pankromatik yaitu LANDSAT TM, MODIS, SPOT MS, PLEIADES, dan juga jenis sensor radar seperti TERRA SAR. Dewasa ini yang paling sering dicari pemanfaat adalah data citra resolusi sangat tinggi (CRST) seperti citra satelit PLEIADES yang memiliki resolusi spasial 2m untuk sensor multispektral dan 0.5 meter untuk sensor pankromatik. Pemanfaatan data digital citra satelit resolusi sangat tinggi ini biasanya digunakan sebagai bahan penyusunan peta dasar skala detil untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan juga untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan lahan, dalam rangka monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Zonasi Ruang yang berlaku.

2.3.2.15 Urusan Persandian

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah tergelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se-Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah DIY tergelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se-DIY serta UTP Jajaran Persandian Muspida yang meliputi :

1.) Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se-Indonesia ;
2.) Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY ;
3.) Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU ;
4.) Jajaran POLDA ;

5.) Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY). Khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Jumlah kasus/insiden peretasan sistem informasi milik Pemerintah Daerah DIY (Pemda DIY) pada tahun 2019 sebanyak 12 insiden. Jumlah kasus peretasan sempat turun menjadi 10 insiden pada tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2021 tercatat meningkat 3 indisen menjadi 13 insiden dan mengalami kenaikan menjadi 26 insiden pada tahun 2022. Jumlah kasus/insiden peretasan pada sistem informasi milik Pemda DIY ini masih tergolong tinggi, sehingga perlu perhatian lebih lanjut.

Tabel 2-129 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi Milik Pemda DIY

Tahun	Jumlah Peretasan
2017	10 insiden
2018	13 insiden
2019	12 insiden
2020	10 insiden
2021	13 insiden
2022	26 insiden

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Ini adalah indeks pertama di Indonesia dan bahkan dunia yang secara khusus mengukur hal tersebut. Terdapat 8 dimensi dalam IPK yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender dan tata kelola budaya. Skor IPK tahun 2020 untuk tingkat nasional mencapai 54.65. Dari 34 Provinsi, skor IPK tertinggi diraih DIY dengan skor 71,74. Dimensi dengan skor tertinggi ada pada dimensi ketahanan sosial budaya, sedangkan yang terendah adalah dimensi ekspresi budaya.

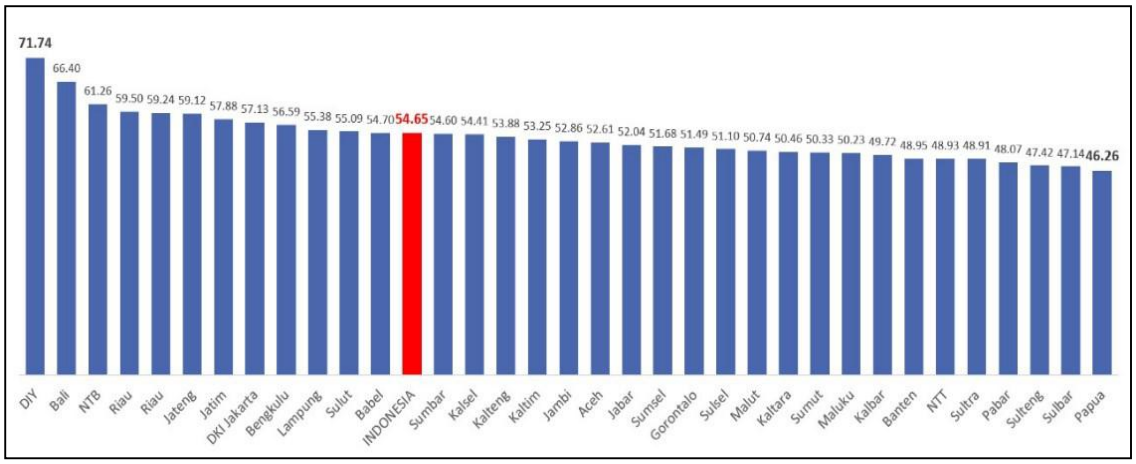

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2020

Gambar 2-68 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020

Gambaran umum kondisi eksisting sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multikultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, Kontemporer.

Tabel 2-130 Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2018-2022

Aspek	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Group kesenian	6.477	8.826	8.826	8.826	8826*	Grup
Jumlah Gedung kesenian	107	107	107	107	107	Unit
Museum dan Pusat Kebudayaan	47	48	48	48	48	Unit
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	124	347	332	513	503*	Kali
Benda cagar budaya yang dilestarikan	834	1.685	1.687	1.687	1.687*	Buah
Situs cagar budaya yang dilestarikan	343	343	343	343	343*	Buah
Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	17	17	17	17*	Kawasan
Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	1.197	2.045	2.045	2.045	2.045*	Buah
Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11,46	13,1	11,97	12,22	12,67	%
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	11,58	12,32	13,27	14,22	15,18	%
Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	13,25	17	45,78	16,89	20	%
Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	n/a	5	10	18	25	Desa
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	1.077,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	530*	unit
Jenis Makanan Tradisional	223,00	276,00	276,00	276,00	276	jenis
Jenis Busana Tradisional	38,00	38,00	38,00	38,00	38	jenis
Lembaga Budaya	78,00	186,00	186,00	186,00	186*	lembaga
Motif Batik	185,00	235,00	235,00	235,00	235	motif

Aspek	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Motif Lurik	64,00	66,00	66,00	66,00	66	motif
Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah	144,00	206,00	206,00	262,00	262*	arsip

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Dilihat dari zamannya, sumber sejarah dibedakan dalam sumber sejarah kuno, sumber sejarah masa Kerajaan Islam, sumber sejarah zaman Kolonial, dan sumber sejarah kontemporer (sekarang). Sumber sejarah yang terkelola sampai tahun 2021 sebanyak 700 macam yang tersimpan di beberapa tempat antara lain di Keraton, Puro Pakualaman, museum-museum, Perpustakaan Daerah DIY, Perpustakaan Biro Hukum. Yogyakarta yang menyandang julukan sebagai kota perjuangan, kota budaya, kota pendidikan menyimpan banyak sumber sejarah dalam berbagai jenisnya, yaitu sumber sejarah artefak (kebendaan seperti arsip, rekaman-rekaman, prasasti, foto, gua, candi, monumen, koin, dan lain-lain), sumber sejarah tertulis (babad, kitab, serat, naskah-naskah, surat resmi pemerintahan, peraturan-peraturan dari zaman klasik hingga kontemporer, majalah, koran, dan lain-lain), sumber sejarah lisan (kisah yang diemban para tokoh-tokoh sejarah yang hidup pada zamannya), dan sumber sejarah sosial kemasyarakatan (berupa *folklore*, dongeng, karyasastra, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain). Sumber sejarah tersebut akan menjadi bukti kebenaran sejarah, dan apabila dirangkai akan menjadi mozaik sejarah peradaban di DIY.

Museum sebagai mozaik sejarah peradaban masyarakat menyebar di sebagian besar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Menurut catatan, di DIY telah berkembang sekitar 42 museum atau sekitar 15% dari museum di Indonesia baik yang sudah dikenal masyarakat maupun belum pernah dikenal. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan salah satu museum tertua dan terbanyak koleksinya di Indonesia.

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, terdiri dari koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, filologika, keramologika, senirupa, teknologi. Saat ini benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sebanyak 43.235 buah, sudah diinventarisir sejumlah 11.031 buah (25,51%), belum diinventarisir sejumlah 32.204 buah (74,48%). Koleksi yang dipamerkan

pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo unit I sebanyak 1.184 buah. Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo Unit II sebanyak 810 buah.

Dari sekian banyak museum tersebut, baru 36 museum yang masuk Barahmus, dan baru 40% yang memiliki standar pelayanan yang baik. Dua museum yang diproyeksikan sebagai museum internasional adalah Museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat.

Kerjasama kebudayaan yang telah diwujudkan sebagai media diplomasi budaya antara lain adalah: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama "*Jali Roso*" untuk *National Concert Hall Dublin*, misi kebudayaan ke *Denizli International Festival* di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canbera, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo.

Tabel 2-131 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2017-2021

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	1.041,00	1.077,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	Unit
Benda Cagar Budaya	808	834	1.685,00	1.687,00	1.687,00	Buah
Kawasan Cagar Budaya	17	20	17	17	17	Kawasan
Situs	343	343	343	343	343	Situs
Jumlah Monumen Sejarah	70	70	89	89	89	Buah
Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah	144	144	206	206	262	Arsip
Pelaku Sejarah	21	21	21	21	21	Tokoh
Museum	44	47	48	48	48	Buah
Cerita Rakyat	37	80	63	63	63	Buah
Naskah Kuno	509	509	714	714	714	Naskah

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali.

Perpaduan yang harmonis antara representasi masa klasik, masa sekarang, dan masa lalu akan menghasilkan Renaisans Yogyakarta. Renaisans Yogyakarta menuju masyarakat yang berperadaban baru dengan mengandalkan kekuatan kebudayaan perlahan-lahan menemukan titik simpulnya dengan kesadaran dan kemauan bersama untuk mempertahankan tanda- tanda kejayaan Yogyakarta di masa lalu sebagai bahan pembelajaran kepada generasi penerus dan masyarakat dunia tentang mozaik peradaban Yogyakarta yang menyemesta. Semangat *golong gilig* dan *manunggaling kawula lan gusti* telah mendasari pelaksanaan amanah- amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Proses cipta, rasa. karsa dan karya yang dihasilkan oleh para leluhur yang pernah mengenyam hidup di Yogyakarta berpadu dengan kreativitas dan inovasi antar generasi memperkaya dan menambah keragaman budaya di Yogyakarta.

DIY telah menyusun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan DIY dapat dibuktikan dengan keberhasilannya menerjemahkan Revolusi Mental dalam Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan segala bidang di DIY yang berlandaskan pada kebudayaan. Pasca dilaksanakannya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta telah meningkatkan proses pembangunan kebudayaan di DIY. Hingga saat ini telah banyak perkembangan yang dihasilkan oleh DIY.

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi seni budaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 – 2016 terlihat bahwa jumlah potensi seni budaya di wilayah DI Yogyakarta terus mengalami perubahan maupun mengalami penambahan seiring dengan aktivitas di bidang seni budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki keunggulan potensi kesejarahan, kepurbakalaan, dan tokoh seniman dan budayawan yang relatif banyak dengan oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni.

Jejak-jejak sejarah semenjak zaman prasejarah hingga kontemporer masih dapat dilihat di DIY. Kehidupan manusia-manusia purba pernah terjadi di pegunungan selatan Yogyakarta. Tidak semua masyarakat yang pernah berdiam di DIY meninggalkan sisa-sisa warisan hasil perjuangan hidup pada masanya yang masih

dapat dilihat pada saat ini. Simbol-simbol eksistensi dan kejayaan tersebut belum tentu bertebaran pada satu kesatuan geografis tertentu, namun dapat diklasifikasikan ke dalam situs, struktur, benda, bangunan maupun kawasan yang dalam bahasa UU No 11 Tahun 2010 disebut sebagai cagar budaya. Cagar budaya sangat bernilai bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri, ilmu pengetahuan, sosial ekonomi dan bahkan politik.

Runtutan masa dari prasejarah, Hindu, Budha, Islam, Cina, masa kolonialisme Belanda dan Inggris hingga kemerdekaan meninggalkan cagar budaya yang beragam dengan karakteristik cagar budaya masing-masing. Saat ini tersedia sarana kebutuhan sehari-hari manusia yang ditinggalkan para leluhur. Contohnya : istana, masjid, gereja, candi, vihara, pabrik, perguruan tinggi, taman pendidikan.

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihatdari telah dijabarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mensyaratkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang melakukan pengkajian sebelum menetapkan suatu satuan geografis tertentu untuk menjadi cagar budaya. Tim Ahli Cagar Budaya sudah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Cagar budaya di DIY yang berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs, tanpa struktur budaya dapat diindikasikan berjumlah 2.205 buah. Masih dimungkinkan penemuan-penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar.

Berbagai peristiwa sejarah pun baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-

naskah baik yang berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya.

Tabel 2-132 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs	Kawasan Cagar Budaya	Total
Kota Yogyakarta	58	141	11	5	215
Kabupaten Bantul	55	50	7	7	119
Kabupaten Gunungkidul	57	506	7	1	571
Kabupaten Kulon Progo	316	234	11	1	562
Kabupaten Sleman	62	44	163	20	289
Belum diidentifikasi		15			
DIY	548	975	199	34	1756

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Museum sebagai kekuatan keistimewaan, sebagai nafas keistimewaan, menguatkan keistimewaan, dan jati diri bangsa. DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 15 % museum di Indonesia berada di Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi museum negeri Sonobudoyo dilakukan secara multiyears. Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Sampai tahun 2021 tercatat ada 53 museum dan 3 semi museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Kabupaten Sleman (18 museum), Kota Yogyakarta (19 museum) dan Kabupaten Bantul (14 museum). Sedangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul (1 museum) dan Kabupaten Kulon Progo (1 museum) masih jarang ditemukan museum. Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia. Saat ini sejumlah 33 museum telah menjadi anggota BARAHMUS.

Tabel 2-133 Jumlah Museum per Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021

Tahun	DIY	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2018	47	15	16	1	1	22
2019	48	15	17	1	1	22
2020	48	16	17	1	1	18
2021	53	18	14	1	1	19

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pengembangan museum memerlukan strategi yang tepat karena diindikasikannya berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, diantaranya adalah citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpan, museum disejajarkan objek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar instansi terkait, perlu adanya *Grand* Disain Permuseuman DIY yang melibatkan seluruh *stakeholder*.

Nilai-nilai ketradisionalan telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan 482 upacara adat, 35 tradisi,58 permainan tradisional, 180 makanan tradisional, walaupun dilaksanakan tidak secara merata.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan.

Tabel 2-134 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2018-2021

Jenis Data	2018	2019	2020	2021
Upacara Adat	482	717	717	717
Upacara Tradisi	35	35	35	35
Permainan Tradisional	58	69	69	69
Cerita Rakyat	80	63	63	63

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

DIY terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Desa budaya tidaklah sama dengan desa wisata karena desa wisata lebih menonjolkan pada peningkatan nilai jual sebuah desa daripada pelestarian nilai-nilai di dalamnya. Dari target 438 desa/kalurahan di 78 Kapanewon dapat mencapai 50 % yang menjadi desa budaya. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama- sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbaruinya SK 325/Kpts/1995 yang menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya setelah dinilai oleh tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya. Desa Budaya diharapkan dapat menjadi wahana bagi upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian segala potensi budaya yang ada di desa.

Tabel 2-135 Kalurahan/Kelurahan Budaya di DIY per Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 351/Kep/2021 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya

Tahun	DIY	Sleman	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2018	56	12	12	15	15	2
2019	56	12	-	15	15	-
2020	56	12	-	15	15	-
2021	76	19	19	19	16	3

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Selama periode periode pra sejarah, klasik, Islam dan asing baik Eropa maupun Asia, DIY merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda yang cukup banyak dan lengkap. Objek Budaya Benda dan Tak Benda merupakan komponen dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Pemda DIY dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Budaya benda diartikan sebagai segala sesuatu wujud hasil karya budaya yang dapat dirasakan melalui indera penglihatan dan indera peraba yang memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu, langka, dan berumur lebih dari 50 tahun meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya

dan kawasan cagar budaya. Sedangkan budaya tak benda diartikan sebagai seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat.

Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di DIY. Upaya Pemda DIY dalam mendapatkan apresiasi budaya benda dan budaya tak benda DIY dilakukan melalui: pelindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi), pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

Perkembangan jumlah warisan budaya DIY yang diakui sebagai kekayaan budaya baik nasional maupun internasional pada periode 2017 hingga 2022 menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2022 sudah terdapat total 337 warisan budaya yang sudah diapresiasi baik pada skala nasional maupun internasional.

Tabel 2-136 Jumlah Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	179	208	244	274	300	337

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia yaitu perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki

kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa *bibliofil* adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi icon peradaban baru dan *Rennaisance* Yogyakarta. Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit

perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, perpustakaan unit Grhatama Pustaka Jl. Janti Banguntapan Bantul, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, dan Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Di DIY sejak tahun 2015 setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan desa/kelurahan dan telah menerima bantuan sarana prasarana perpustakaan dalam bentuk buku, rak buku dan computer melalui hibah Pemda DIY.

Tabel 2-137 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Tahun 2018 s.d Tahun 2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Kulon Progo	92	92	92	92
Kabupaten Bantul	75	75	75	75
Kabupaten Gunungkidul	148	148	148	148
Kabupaten Sleman	86	86	86	86
Kota Yogyakarta	45	45	45	45

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Kunjungan masyarakat ke perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakinberagam dan memiliki keunikan.

Tabel 2-138 Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2018 s.d. 2022

Kabupaten/Kota	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022*	
Jumlah Pustakawan DIY	56	66	65	70	90	Orang
Jumlah Pustakawan Kabupaten/Kota	43	54	54	54	70	Orang
Kabupaten Kulon Progo	11	11	11	11	17	Orang
Kabupaten Bantul	10	12	13	13	16	Orang
Kabupaten Gunungkidul	8	8	8	8	10	Orang

Kabupaten/Kota	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022*	
Kabupaten Sleman	8	8	8	8	10	Orang
Kota Yogyakarta	6	15	15	15	17	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022
**) Data Sementara*

Tabel 2-139 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018-2023

Sub Elemen	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.870.667	3.001.428	1.601.069	2.132.858	2.223.606	555.902
Jumlah pengunjung perpustakaan						
Tingkat Pemda DIY	738.757	793.695	566.226	892.446	995.492	248.873
Kabupaten Kulon Progo	335.239	341.944	152.919	214.541	176.997	299.127
Kabupaten Bantul	358.217	365.381	198.112	240.224	198.185	244.014
Kabupaten Gunungkidul	322.171	361.799	175.899	198.872	164.069	85.992
Kabupaten Sleman	587.216	598.961	231.492	293.542	242.172	125.082
Kota Yogyakarta	529.067	539.648	276.421	293.233	241.918	418.738
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	2.245.100	3.196.500	3.220.511	3.265.200	3.265.200	4.073.907

**)Data sementara*
Sumber: Dataku Bappeda DIY & DPAD DIY, 2023

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga mampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2022, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut.

Tabel 2-140 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah

Sub Elemen	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah	245.350	252.017	257.132	225.584	246.826
Jumlah koleksi eksemplar buku yg tersedia di Perpustakaan	350.930	359.444	359.691	357.510	396.855

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah *Jogja Library for All* (JLA) yang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip, *Center of Excellence*, *Kyoto Corner*, Yogyasiana, Pustaka Nusantara. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, *Radio Frequency Identification* (RFID), Jogja *Library for All, Jogja Mobile Library, Webgis*, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital serta yang terbaru adalah *iJogja* yaitu perpustakaan digital yang dapat diakses melalui *smart phone*/PC. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara bertahap.

Jogja Mobile Library adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk semakin memudahkan kita mendapatkan informasi buku perpustakaan di wilayah DIY. Aplikasi ini selain untuk mencari informasi buku yang sedang di cari di perpustakaan, bisa juga untuk mencari *update* informasi buku baru di perpustakaan favorit yang ada DIY.

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan- kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

Aplikasi iJogja diharapkan akan mempopulerkan sistem peminjaman perpustakaan digital di DIY. Aplikasi ini dibuat agar dapat meningkatkan kecepatan dan kepraktisan dalam layanan perpustakaan khususnya perpustakaan digital. Dengan adanya aplikasi ini maka untuk meminjam buku tidak memerlukan pelayanan petugas untuk mengambilkan buku dan menerima pengembaliannya karena sudah dibatasi jangka waktu peminjamannya. Kemudian juga memperluas jangkauan layanan aksesibilitas layanan perpustakaan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu karena dilakukan secara *online* internet, sampai akhir tahun 2016 koleksi digital yang dapat dipinjam yaitu 2.232 koleksi.

Jogja Library Center yang berdiri pada masa revoluasi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyasiana

yang berupa dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, *Compact Disc*, *VCD,* radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC merupakan juga peninggalan bersejarah *(heritage)*. Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan *wifi area*, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellent, Kyoto Corner* yaitu bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Perfektur Kyoto adalah Kyoto Corner (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar, kemudian juga ada Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.

Rumah Belajar Modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di DIY yang nantinya akan dikembangan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Sewon antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain diarena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan,ceramah.

Gedung perpustakaan Grhatama Pustaka menyediakan layanan perpustakaan yang sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahunUNESCO dan tiga penerbit buku raksasa *the International Publishers Association* (IPA), *the International Booksellers Federation* (IBF), *the International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) menetapkan ibu kota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Potensi kearsipan di DIY dipengaruhi oleh sejarah panjang DIY baik sebagai provinsi maupun sebagai kerajaan. Keistimewaan DIY perlu dikuatkan melalui strategi pengelolaan arsip yang optimal. Bukti-bukti otentik perjalanan peradaban DIY terkandung di dalam arsip. Banyak pihak bertanggung jawab atas penyelamatan arsip.

Tabel 2-141 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2022

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pengelolaan arsip secara baku	36	39	48	48	48	Unit
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	5	4	5	5	Kegiatan
Jumlah Arsiparis	91	84	93	102	102	Orang
Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	5.500	6.605	9.370	19.439	17.510*	Berkas
Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis	81.145	82.177	36.292	4.717	18.114*	Orang

**) Data sementara*
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

DIY telah mengembangkan aplikasi sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan aplikasi sistem informasi daftar katalog khasanah arsip statis (SIDKKAS). Sistem ini dapat diibaratkan pameran virtual kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Urusan Pariwisata

Kunjungan wisatawan ke DIY cenderung meningkat selama kurun waktu 2018-2021. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan nusantara ke DIY tercatat sejumlah 6.116.354 kunjungan dan 433.027 kunjungan wisatawan mancanegara. Bertambah sejumlah 843.636 untuk wisatawan nusantara dan 16.654 untuk wisatawan mancanegara dibanding tahun 2018. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik nusantara maupun mancanegara. Sepanjang tahun 2020 kunjungan wisatawan nusantara

ke DIY hanya mencapai 1.778.580 kunjungan, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 69.968 kunjungan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia dan mengakibatkan terbatasnya mobilitas manusia. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan baik nusantara ke DIY kembali mengalami peningkatan. Tercatat sejumlah 4.279.985 kunjungan wisatawan nusantara ke DIY sepanjang 2021. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY pada tahun 2021 hanya 14.740 kunjungan. Tahun 2022 pariwisata DIY mulai menggeliat kembali, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara ke DIY berjumlah 47.080 orang, sedangkan untuk wisatawan nusantara berjumlah 6.427.035 orang.

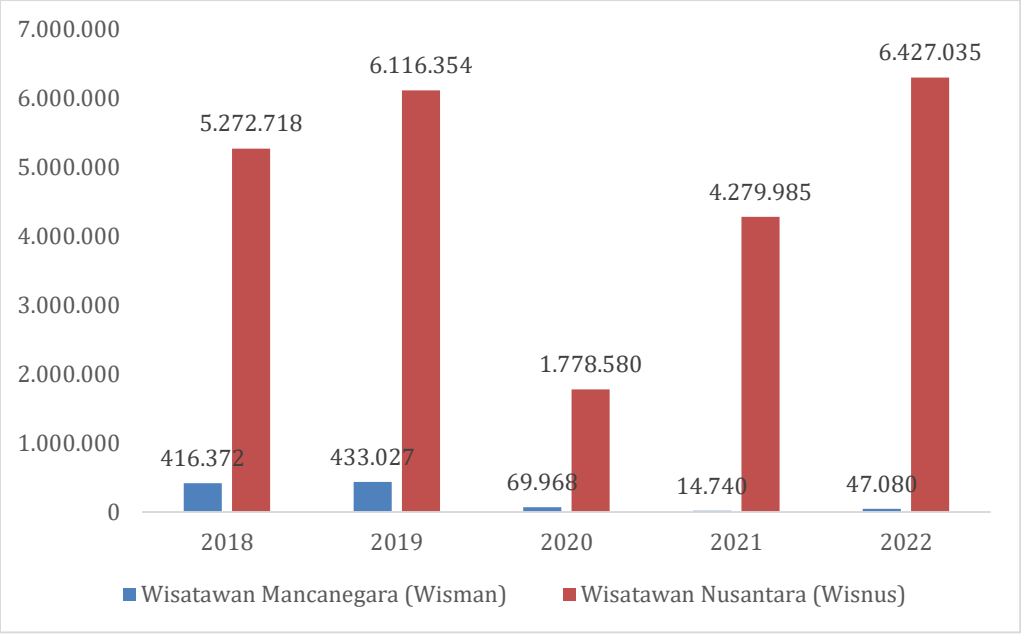

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2023

Gambar 2-69 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2018-2022 (Orang)

Seiring dengan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah pada penghujung tahun 2022 memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata di DIY. Fakta bahwa DIY masih menjadi daerah tujuan wisata kedua setelah Bali juga turut andil dalam mempengaruhi lama tinggal wisatawan di DIY baik wisatawan nusantara

maupun mancanegara. Lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,40 hari apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,24 hari. Sementara itu, lama tinggal untuk wisatawan nusantara terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai 2021, namun pada tahun 2022 lama tinggal wisatawan nusantara mulai mengalami kenaikan menjadi 1,44 hari apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 1,41 hari.

Tabel 2-142 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2018-2022 (Hari)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	2,15	2,31	1,95	2,24	2,40
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,99	1,99	1,65	1,41	1,44

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan di Objek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW) mengalami kenaikan pada tahun 2019. Pada tahun tersebut tercatat peningkatan sebesar 1.808.606 kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi 28.324.394 kunjungan. Sementara itu pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan di ODTW DIY menjadi 10.830.143 kunjungan dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 7.854.170. Penutupan sejumlah objek wisata serta pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi penyebab utama terjadinya penurunan tersebut. Namun pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan di Objek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW) mengalami kenaikan cukup tinggi menjadi 19.275.989 kunjungan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai upaya Pemerintah yang didukung oleh masyarakat untuk mendorong pemulihan ekonomi sektor pariwisata misalnya dengan penyelenggaraan *event-event* pariwisata di Objek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW) dan mendorong program *Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability* (CHSE) dengan mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek kegiatannya.

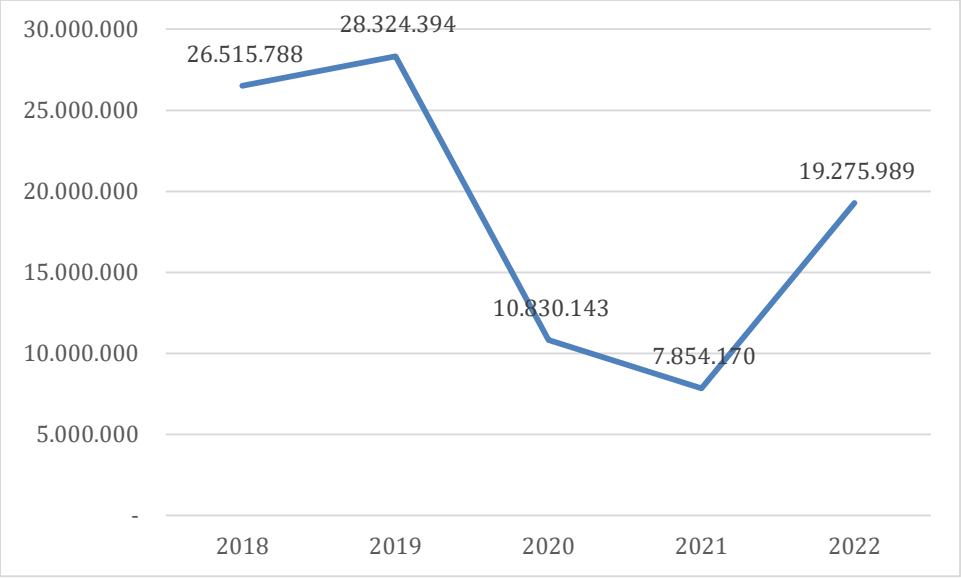

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2023

Gambar 2-70 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW di DIY Tahun 2018-2022 (Orang)

Apabila dilihat sebaran kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara di Objek Daya Tarik Wisata berdasarkan Kabupaten/Kota, terdapat ketimpangan komposisi persentase antar wilayah. Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada tahun 2022 dengan jumlah kunjungan 6.107.098 orang, diikuti dengan Kabupaten Bantul sebesar 5.714.140 orang. Sementara itu, Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara pada tahun 2022 dengan kunjungan sebesar 63.557 orang dan diikuti Kota Yogyakarta sebesar 62.261 orang.

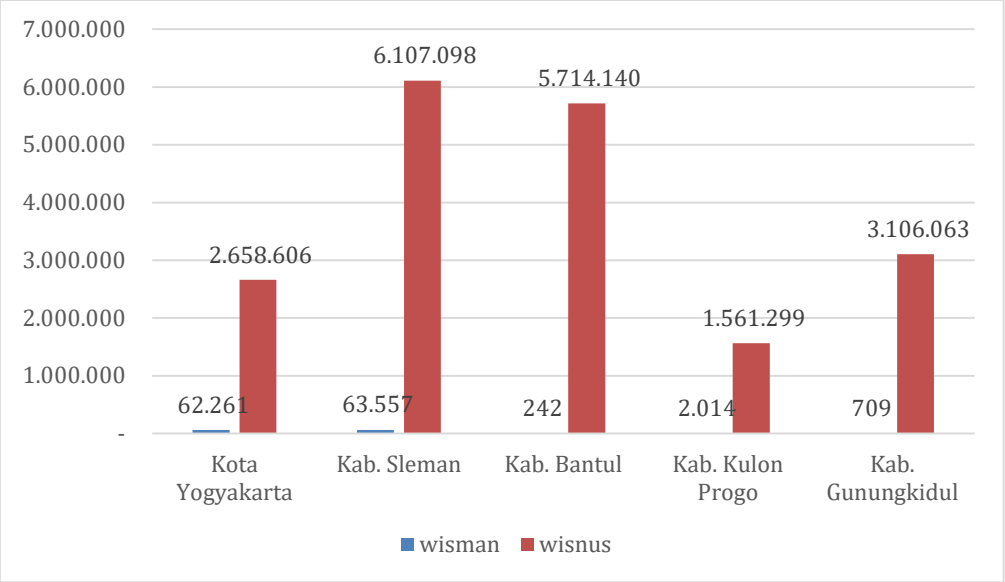

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2023

Gambar 2-71 Sebaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Orang)

2.3.3.2 Urusan Pertanian

Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:

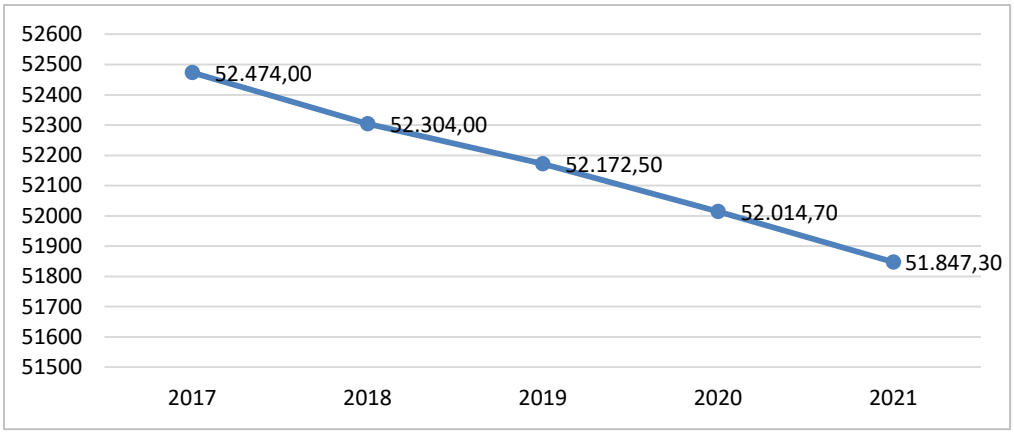

Sumber: BPS Prov.DIY, 2022

Gambar 2-72 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY

Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Dalam hal ini tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menjadi fokus utama dalam sektor pertanian DIY. Produksi tanaman pangan di DIY pada tahun 2022 relatif mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Mesikupun demikian, terdapat beberapa jenis tanaman pangan yang produksinya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah dan Ubi Jalar. Perubahan iklim diduga menjadi penyebab sehingga mempengaruhi mundurnya masa tanam. Sementara itu, pada tahun 2022, beberapa jenis tanaman pangan mengalami kenaikan jumlah produksi dibanding tahun 2021, yaitu Padi Ladang, Kacang hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

Tabel 2-143 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2018-2022 (ton)

Jenis tanaman pangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Padi Sawah	497.599	621.202	653.128	670.059	669.434
Padi Ladang	214.907	189.778	195.013	204.982	211.342
Jagung	-	309.221	366.031	358.880	358.880
Kacang Kedelai	10.931	5.041	7.969	8.675	6.903
Kacang Hijau	376	226	531	508	488

Jenis tanaman pangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Kacang Tanah	80.172	80.682	75.119	78.845	69.511
Ubi Kayu	890.898	778.806	1.073.314	882.073	1.049.159
Ubi Jalar	4.113	3.149	2.765	2.717	3.251

**) Angka Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Sementara itu, peternakan di DIY masih didominasi oleh ternak unggas dan ternak kecil. Pada tahun 2020, jumlah ternak unggas di DIY melonjak tajam menjadi 16.448.394 ekor. Kondisi 2022 jumlah populasi ternak unggas berjumlah 17.381.767 ekor mengalami peningkatan 446.185 ekor dibanding tahun 2021. Sementara itu, populasi sapi perah dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa Sapi Perah merupakan jenis ternak yang tidak dominan dilakukan di DIY karena baik iklim maupun topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah.

Tabel 2-144 Populasi Ternak di DIY Tahun 2018-2022 (ekor)

Populasi ternak di DIY	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Ternak Sapi Potong	313.425	304.423	309.259	323.308	313.566
Ternak Sapi Perah	3.747	3.873	3.520	3.500	3.499
Ternak Kecil	610.417	610.173	620.906,	617.824	622.618
Unggas	15.632.193	15.691.163	16.448.394	16.935.582	17.381.767

**) Angka Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.3.3.3 Urusan Kehutanan

Penyelenggaraan urusan kehutanan dimaksudkan untuk mendapatkan aneka manfaat dari fungsi hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hutan yang dikuasai oleh negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hutan yang dikelola dengan baik dan benar akan memberikan manfaat yang sangat besar secara ekonomi, sosial dan lingkungan bahkan budaya. Selain wilayah hutan

yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, DIY juga memiliki wilayah dengan status hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (hutan rakyat) seluas ± 65.886,56 ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan DIY adalah sebagai berikut.

Tabel 2-145 Luas Hutan di DIY berdasarkan fungsi (Ha)

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)	%	Keterangan
1	Hutan konservasi	3.316,87	17,33	Dikelola oleh Kementerian LHK dan Balai TAHURA DLHK DIY
2	Hutan lindung	2.297,61	12,01	Dikelola oleh Dinas LHK melalui UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
3	Hutan produksi	13.519,47	70,66	Dikelola oleh Dinas LHK melalui UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
	Total	19.133,95	100,00	

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

a. Hutan Konservasi

Pasca berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan konservasi yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah pengelolaan kawasan taman hutan raya (TAHURA). DIY mengelola kawasan konservasi hutan Bunder berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Bunder menjadi Taman Hutan Raya. Luas kawasan TAHURA bunder seluas 634,10 ha sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.144/Menhut-II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bunder seluas 634,10 ha yang dikelola oleh Balai TAHURA Bunder yang merupakan UPTD Dinas LHK.

Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi salah satu isu utama pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Penilaian efektifitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mancapai tujuan yang ditetapkan. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

daratan di Indonesia menggunakan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Berdasarkan penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Kementerian LHK pada tahun 2022, nilai efektifitas pengelolaan TAHURA Bunder termasuk dalam kategori efektif dengan nilai 70%, namun demikian nilai tersebut masih dapat ditingkatkan.

b. Hutan Lindung

Hutan lindung ditetapkan sebagai kawasan lindung karena keberadaannya didalam menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), sedangkan dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Hutan lindung DIY seluas 2.160 ha yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta. Pemanfaatan kawasan hutan lindung DIY sampai dengan saat ini mampu menggerakan perekonomian desa di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan. Pemanfaatan kawasan hutan lindung DIY didominasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang dikerjasamakan dengan koperasi atau kelompok tani hutan yang berada di sekitar kawasan hutan seperti seperti di Mangunan, Kalibiru dan lainnya.

c. Hutan Produksi

Hutan dengan fungsi sebagai hutan produksi di DIY seluas 13.519,47 ha yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 122 tahun 2018 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta seluas 15.581 yang didalamnya termasuk kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas 2.160 ha. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang fungsinya ditetapkan untuk memproduksi/menghasilkan hasil hutan utamanya adalah hasil hutan kayu.

Hutan produksi yang dikelola Balai KPH Yogyakarta menghasilkan produk utama berupa kayu dan daun minyak kayu putih. Selain tanaman jati, tanaman kayu putih menjadi salah satu hasil kehutanan yang potensial di DIY. Hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Pengembangan

tanaman kayu putih di DIY mengalami kendala produktifitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Data mengenai hasil hutan di DIY tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-146 Hasil Hutan di DIY Tahun 2018-2022

No	Uraian	Volume				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Hasil Hutan non HPH					
a.	Kayu Bulat	457.45	1.103,90	2.249,84	2.566,26	2.982,00*
b	Kayu Hutan Rakyat	120,235.40	153.069,32	69.085,70	95.420,08	20.376,09 *
c	Kayu Gergajian (m^3)	1,025.30	6.171,34	3.931,62	2.982,38	2.066,97*
d	kayu olahan (m^3)	1.025,30	1.065,12	22.783,69	7.505,71	5.704,15*
2	Hasil Hutan Ikutan					
	Bambu	3.304.247	127.330	4.822.205	13.500.256	-*
4.	**Produksi hasil hutan non kayu**					
a.	Produksi Daun kayu putih (ton)	n/a	5.358,25	4.384,75	4.599,00	2.791,46
b	Minyak kayu putih (liter)	n/a	39.323	40.353	42.317	27.560*

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Selain kerusakan hutan, permasalahan lain yang dihadapi dalam sumber daya alam yang berupa tanah adalah terjadinya lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah oleh proses erosi tanah yang berkepanjangan. Lahan kritis yang disebabkan oleh proses erosi ini banyak ditemukan di wilayah pegunungan tua yang sudah tidak lagi memperoleh suplai pembentukan tanah kecuali dari proses proses biologis yang berupa

dekomposisi bio massa dan pelapukan batuan oleh makhluk hidup. Data mengenai lahan kritis di DIY disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-147 Luas Lahan Kritis di DIY (Ha)

Kategori	2011	2013	2018
Kritis	33.088	25.272	78.333
Sangat Kritis	471	845	790
Jumlah	33.559	26.117	79.123

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.4.1 Sub Urusan Ketenagalistrikan

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yaitu pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Pemerintah terus fokus dalam pemerataan akses listrik yang ramah lingkungan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga di Indonesia akan mendapatkan aliran listrik 100% pada tahun 2022. Hal ini juga dilakukan oleh Pemda DIY untuk bisa melayani akses listrik sesuai standar keselamatan untuk rumah tangga di DIY. Pencapaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2022 sebesar 99,99% dan rasio desa berlistrik sebesar 100% sesuai data Rasio Elektrifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM RI. Berdasarkan data usulan bantuan listrik terbaru dari Kapanewon se-DIY per bulan Oktober tahun 2022 diperoleh data rumah tangga yang masih menyalur sebanyak 6.798 rumah tangga sebagai berikut:

Tabel 2-148 Data Usulan Bantuan Listrik Untuk Rumah Tangga Belum Berlistrik Atau Masih Menyalur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga
1	Gunungkidul	2.385
2	Kulon Progo	893
3	Sleman	1.433
4	Bantul	2.087
	Total	**6.798**

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Data tersebut merupakan data terbaru, di mana belum dilakukan verifikasi apakah seluruh NIK yang masuk dalam daftar usulan adalah bersubsidi atau non subsidi. Berdasarkan data usulan perluasan jaringan listrik pedesaan ke PLN untuk menangani rumah tangga miskin yang jauh dari jaringan listrik (gerumbul), di 15 kapanewon miskin adalah sebagai berikut:

Tabel 2-149 Rumah Tangga Miskin Yang Belum Berlistrik Sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Jauh dari Jaringan Listrik PLN

No.	Kabupaten	Jumlah Sasaran Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1	Gunungkidul	7	22
2	Bantul	2	5
3	Kulon Progo	5	37
4	Sleman	1	10
Jumlah		**15**	**74**

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Penambahan jumlah sambungan listrik sesuai standar keselamatan sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sudah tercapai 13.907 sambungan rumah (SR) dengan penambahan jumlah SR terpasang pada tahun 2022 adalah 1.952 SR.

Berikut data penambahan jumlah SR dan kumulatif totalnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2-150 Jumlah Sambungan Rumah Untuk Listrik Sesuai Standar Keselamatan Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Jumlah SR	Total Jumlah SR
1.	2017 (baseline)	3.848	3.848
2.	2018	2.729	6.577
3.	2019	1.591	8.168
4.	2020	1.875	10.043
5.	2021	1.912	11.955
6.	2022	1.952	13.907

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.3.3.4.2 Sub Urusan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah DIY Tahun 2020-2050 merupakan kebijakan Pemda DIY mengenai rencana pengelolaan energi tingkat daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Rencana Umum Energi Nasional. RUED memiliki visi yaitu terpenuhinya kebutuhan energi di DIY secara berkelanjutan, berkeadilan, dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi di DIY. Sasaran energi DIY meliputi penyediaan dan pemanfaatan energi, pasokan energi dan cadangan energi, pemenuhan kebutuhan energi final, konservasi energi, diversifikasi pasokan energi, peningkatan akses energi masyarakat. Pasokan energi ke DIY adalah merupakan penyediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan gas (LPG) dari PERTAMINA serta energi listrik dari PLN yang dipasok melalui sistem kelistrikan Jawa Madura Bali (JAMALI). Pasokan energi bahan bakar adalah berupa Minyak Bumi, Gas Bumi dan EBT BBN (yaitu biofuel yang terkandung dalam BBM) dari PERTAMINA. Pasokan energi listrik adalah terdiri atas pasokan listrik dari PLN melalui sistem kelistrikan JAMALI serta EBT listrik lokal. Pemakaian energi final adalah pemakaian BBM, BBN, gas

(LPG), dan listrik. Kebutuhan energi sektoral adalah kebutuhan energi total untuk seluruh sektor pengguna (baik berupa bahan bakar maupun listrik) yaitu sektor-sektor transportasi, industri, rumah tangga, komersial, serta sektor lainnya.

Kebijakan terkait dengan EBT dan konservasi energi sesuai dengan RUED DIY adalah meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat DIY, mengakselerasikan pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi di DIY, mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi di DIY, serta mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan di DIY. Bauran energi yang telah dicapai DIY pada tahun 2021 berdasarkan surat dari Dewan Energi Nasional pada bulan November tahun 2022 adalah 93,56% minyak bumi, 6,44% energi baru terbarukan (EBT), gas bumi 0%, dan batu bara 0%. Potensi EBT di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil. Berikut capaian bauran energi di DIY tahun 2021.

Tabel 2-151 Capaian Bauran Energi di DIY Tahun 2021

No.	Jenis	TOE	Persentase (%)
1.	Energi Baru Terbarukan	50.429	6,44
2.	Minyak Bumi	732.487	93,56
3.	Gas bumi	0	0
4.	Batu bara	0	0

Sumber : Dewan Energi Nasional, 2022

Capaian EBT di DIY terdiri dari listrik sebesar 11.126 TOE dan non listrik 39.302 TOE. Minyak bumi masih mendominasi, dan DIY tidak memiliki pembangkit gas bumi dan batubara.

Tabel 2-152 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2018-2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)					
Potensi					
Kapasitas (MWp)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tonne of Oil Equivalent (TOE)	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00 *
Terpasang					
Kapasitas (MWp)	0,258	0,258	0.584	0,578	1,07
TOE	0,41	0,41	0,41	668,51	1.231,84 *
PLTBayu					
Terpasang					
kapasitas	131,00	131,00	131,00	131,00 *	131,00 *
TOE	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60 *
PLTBagasse					
Potensi					
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50 *
TOE	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00 *
Terpasang					
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50 *
TOE	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00 *
PLTSampah					
Potensi					
kapasitas	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00 *
TOE	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00 *
Terpasang					
kapasitas	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00 *
TOE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00 *
Bioethanol					
Potensi					
kapasitas	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00 *
TOE					
TOE	-	n/a	18.060,00	18.060,00	18.060,00 *

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Terpasang					
kapasitas	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00 *
TOE	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00 *
Biogas Ternak Sapi					
Potensi					
kapasitas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 *	15.000,00 *
TOE	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00 *	2.768,00 *
Terpasang					
kapasitas	2.979,00	3.179,00	3.379,00	3.379,00 *	3.379,00 *
TOE	651,41	680,56	709,72	709,72 *	709,72 *
Biogas Sanitasi					
Potensi					
kapasitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 *
TOE	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00 *
Biogas Ampas Tahu					
Potensi					
kapasitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 *
TOE	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00 *
Biomassa Pellet					
Potensi					
kapasitas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 *
TOE	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00 *

**) Sementara*
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

2.3.3.4.3 Sub Urusan Kegeologian

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan amanat bahwa pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai, termasuk cekungan air tanah di dalamnya. Hal ini memberikan dampak kewenangan pengelolaan air tanah yang semula di urusan ESDM berpindah pada urusan sumber daya air. Perizinan air tanah berdasarkan surat Kepala BBWS SO No.SA0203-Aq.4.2/339 tanggal 9 April 2020, bahwa pelaksanaan perizinan air

tanah tetap dilaksanakan oleh instansi teknis sebelumnya yang menyelenggarakan perizinan air tanah, sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Hal ini dipertegas dengan surat Edaran Gubernur DIY No.691/6927/SE/IV/2020 tanggal 24 April 2020, bahwa pelaksanaan perizinan air tanah dan penetapan nilai perolehan air masih dilaksanakan oleh Pemda DIY sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

Sampai saat ini kondisi penurunan muka air tanah di DIY masih dalam kategori aman yaitu <20%. Kondisi air tanah dalam kategori aman ini harus dijaga, apalagi di DIY pemanfaatan air tanah masih lebih tinggi dibandingkan air permukaan. Hal ini salah satunya disebabkan karena harga air baku untuk air tanah lebih rendah daripada tarif air permukaan, yang mengakibatkan porsi penggunaan air tanah oleh pelaku usaha lebih besar daripada penggunaan air permukaan. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah yang telah dilakukan Pemda DIY, kondisi rerata penurunan muka air tanah di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-153 Rerata Penurunan Muka Air Tanah Di DIY tahun 2018 – 2022

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
Musim	H (%)	K (%)	H (%)	K (%)	H (%)	K (%)	H (%)	K (%)	H (%)	K (%)
Sleman	5.96	7.97	5.80	8.07	5.64	7.51	5.56	7.27	5.62	7.07
Yogyakarta	8.12	10.29	8.52	10.58	8.11	10.26	8.07	9.92	8.24	9.54
Bantul	3.53	5.06	3.51	5.04	3.39	4.57	3.32	4.53	4.59	3.69
Kulon Progo					4.45	5.49	2.45	2.76	5.03	6.92

H : Hujan; K : Kemarau
Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Rerata penurunan muka air tanah pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan pada saat musim hujan. Rerata penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya karena pengusahaan

air tanah di Kota Yogyakarta lebih banyak dibandingkan Kabupaten lainnya. Rerata penurunan muka air tanah baik pada musim hujan dan musim kemarau masih dalam kategori aman yaitu kurang dari 20%. Namun, pengusahaan air tanah harus mempertimbangkan perbandingan antara total volume pengusahaan air tanah dengan total volume cadangan dinamis air tanah yang dapat dimanfaatkan. Apabila volume pengusahaan air tanah lebih kecil dari volume ketersediaan air tanah, maka keberadaan air tanah pada akuifer tetap terjaga/tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Diperlukan upaya berkesinambungan antara *stakeholder* terkait agar dapat mengendalikan air tanah dan menjaga keberlangsungan sumber air untuk kebutuhan hidup di masa depan.

2.3.3.4.4 Sub Urusan Mineral dan Batubara

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lingkup kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi yaitu:

a. pemberian sertifikat standar dan pemberian izin;
b. pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; serta
c. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Selain itu pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan;
c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Luas kawasan peruntukan pertambangan di DIY sebesar 10.647,99 ha, sedangkan luas pengusahaan pertambangan yang diperoleh dari luas izin yang diterbitkan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Kontrak Karya (KK) sampai saat ini adalah sebesar 3.926,7 ha,

atau sebesar 7,84% dari luasan kawasan peruntukan pertambangan. Berikut data luas pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2-154 Luas Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

No.	Jenis Izin	Luas (Ha)
1.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	895,68
2.	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT JMI	2.977,09
3.	Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	28,93
4.	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	25
	Total	3.926,7

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Perbaikan lingkungan pasca tambang dilakukan melalui penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang yg telah disetujui Gubernur, disusun oleh pemegang IUP sebelum IUP terbit. Pelaksanaan dilakukan oleh pemegang IUP dan penilaian dilakukan oleh Pemda bersama Inspektur Tambang Kementerian ESDM. Sedangkan pada lokasi pertambangan rakyat, Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang dilakukan oleh Pemda dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang IPR bersama Pemda. Rencana reklamasi dan pasca tambang disesuaikan dengan kondisi lapangan, kesepakatan dengan pemilik lahan dan kesesuaian dengan tata ruang. Bentuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang telah dilakukan yaitu pengembalian alur sungai melalui penguatan tanggul, revegetasi dan pembuatan jenjang agar tidak terjadi longsor.

Pertambangan tanpa izin (PETI) masih banyak terjadi di DIY. Pemda DIY melalui BP3ESDM bertugas menginventarisasi lokasi dan data PETI seperti jumlah dan jenis alat serta jumlah pekerja. Dalam usaha penyelesaian permasalahan PETI telah dilakukan operasi gabungan antara pemda melalui OPD terkait dengan aparat penegak hukum. Namun, beberapa kali operasi gabungan yang telah dilakukan ini mengalami kegagalan, di mana saat di lapangan, semua kegiatan pertambangan tersebut dihentikan serta alat berat dan pekerja telah dimobilisasi.

2.3.3.5 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2021, nilai ekspor DIY tercatat senilai 557 Juta US$ jauh lebih besar dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 398,80 Juta US$. Sedangkan sampai Desember 2022, nilai ekspor DIY mencapai 583,3 Juta US$ dengan negara tujuan terbesar Amerika Serikat disusul Jerman dan Jepang. Sedangkan nilai ekspor DIY menurut golongan barang, didominasi 3 komoditas dengan kontribusi terbesar yaitu golongan pakaian jadi bukan rajutan sebesar 36,62%; perabot, penerangan rumah sebesar 11,67 % dan barang rajutan sebesar 11,04%. Sementara itu, sampai Desember 2022 nilai impor DIY mencapai 145,6 Juta US$. Impor DIY diantaranya berasal dari Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Vietnam. Negara pemasok barang impor terbesar adalah Tiongkok dan Hongkong masing-masing sebesar 38,67% dan 18,68%. Sedangkan kelompok komoditas impor terbesar adalah filamen buatan sebesar 24,73% dari total impor, disusul kain tenunan khusus sebesar 9,68% dan kain rajutan sebesar 8,10%.

Tabel 2-155 Nilai Ekspor Impor DIY Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (nilai FOB)	424,71	403,70	398,80	557,00	583,30
Impor (nilai CIF)	101,97	95,40	124,50	153,80	145,60
Rasio E/I	4,17	4,23	3,20	3,62	4,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tercatat pada tahun 2018-2021 jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY cenderung peningkatan. Realisasi jumlah kumulatif

penerbitan SIUP pada tahun 2021 sebanyak 66.316 SIUP, meningkat cukup drastis apabila dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun 2018 yang tercatat sejumlah 52.199 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY pada periode 2018-2021 masih didominasi oleh golongan pengusaha kecil, tercatat di tahun 2021 sebanyak 45.468. Sementara itu, sejak perizinan menggunakan OSS (*Online Single Submission*) terbitan SIUP menjadi cukup sulit untuk dikategorikan menjadi pengusaha besar, menengah, mikro, kecil. Data perkembangan jumlah SIUP berdasarkan golongan usaha di DIY pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-156 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2018-2021

No	Golongan Usaha	2018	2019	2020	2021
1	Pengusaha Besar	1.125	1.145	1.158	1.165
2	Pengusaha Menengah	3.235	7.199	9.531	11.101
3	Pengusaha Kecil	44.404	44.627	45.155	45.468
4	Pengusaha Mikro	3.435	5.317	6.652	8.585
Jumlah		**52.199**	**58.288**	**62.496**	**66.319**

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan dapat dilihat dari margin perdagangan dan pengangkutan (MPP). MPP menggambarkan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan pengangkutan, nilai MPP yang tinggi menunjukkan rantai distribusi perdagangan yang tidak efisien. Pola distribusi sejumlah komoditas pangan di DIY cukup bervariasi, pada tahun 2021 semua komoditas mengalami kenaikan MPP dari tahun 2019. Nilai MPP untuk komoditas beras dan daging ayam ras pada tahun 2021 berturut-turut sebesar 25,73% dan 33,49%, lebih besar daripada nilai nasional 11,31% dan 25,49%. Sementara itu, komoditas yang sering mendorong terjadinya inflasi seperti bawang merah dan cabai merah memiliki MPP yang cukup tinggi dibanding dengan komoditas beras dan daging ayam ras. Pada tahun 2021, nilai MPP untuk komoditas bawang merah sebesar 43,33%, melonjak cukup tinggi dari MPP pada tahun 2019 yang hanya mencapai 27,97%. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas cabai merah, pada tahun 2021 nilai MPP untuk cabai merah sebesar 33,78% jauh lebih tinggi daripada tahun 2019 yang hanya mencapai 27,97%. Namun demikian, nilai MPP untuk komoditas bawang merah

dan cabai merah di DIY masih di bawah dari capaian nasional yang pada tahun 2021 berturut-turut sebesar 47,39% dan 40,41%.

Tabel 2-157 Perkembangan Margin Perdagangan dan Pengangkutan di DIY (%), Tahun 2018-2021

Komoditas	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Daging Ayam Ras	22,06	33,37	n/a	33.49
Beras	22,02	14,82	17,78	25.73
Cabai Merah	46,72	27,97	n/a	33.78
Bawang Merah	60,53	27,97	n/a	43.22

Sumber: BPS RI, 2022

2.3.3.6 Urusan Perindustrian

Industri di DIY didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah sebesar 98.408 unit usaha pada tahun 2022. Jumlah IKM di DIY sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan puncaknya pada tahun 2021 menjadi 96.954 unit usaha. Hal tersebut disebabkan karena dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya IKM di DIY yang gulung tikar. Namun pada tahun 2022 jumlah IKM di DIY sudah mulai mengalami kenaikan menjadi 98.408 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 361.984 orang dari semula 356.634 orang. Diharapkan IKM mampu menjadi pendorong utama perekonomian di DIY karena keberadaan IKM dirasa mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.

Tabel 2-158 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Unit Usaha	94.840	97.013	96.597	96.954	98.408
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	351.425	360.242	355.319	356.634	361.984
Nilai Investasi (Rp ribu)	1.949.721.275	2.084.560.293	1.992.422.000	1.999.794.000	2.029.791.000

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Produksi (Rp ribu)	12.749.270.525	13.041.847.616	12.465.398.000	12.511.520.000	13.224.676.000
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp ribu)	7.335.019.754	7.537.466.747	7.204.311.000	7.230.967.000	7.339.432.000

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Selama kurun waktu 2018-2022 jumlah perusahaan Industri Besar/Sedang di DIY cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan, tercatat sebanyak 390 perusahaan Besar/Sedang lebih sedikit jika dibanding tahun 2018 yang mencapai 425 perusahaan Industri Besar/Sedang. Namun demikian, mulai tahun 2020 berangsur kembali mengalami kenaikan sedikit demi sedikit hingga pada tahun 2022, jumlah Perusahan Industri Besar/Sedang yang aktif di DIY tercatat sebesar 507 perusahaan.

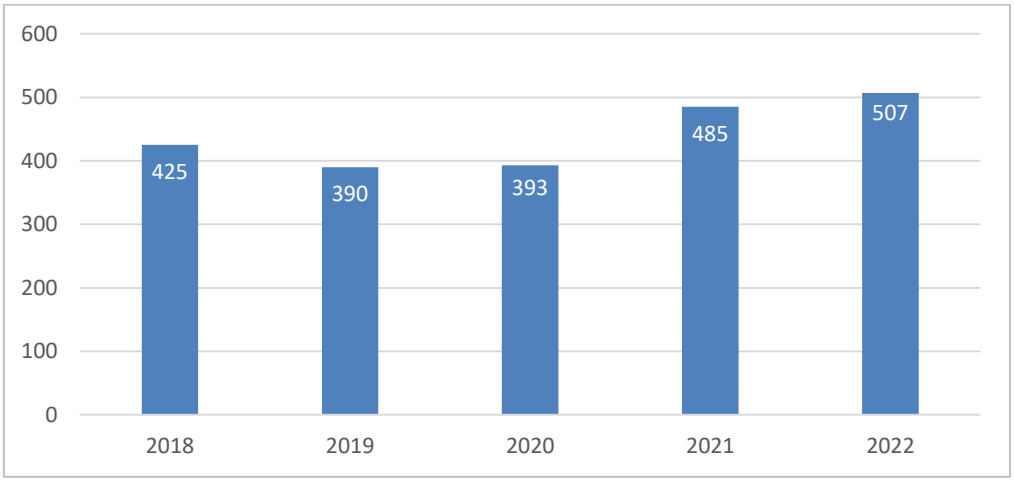

Sumber: BPS Provinsi .DIY, 2022

Gambar 2-73 Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di DIY, 2018-2022

Apabila dilihat sebaran jumlah perusahaan industri besar/sedang berdasarkan Kabupaten/Kota, pada tahun 2022 terdapat penurunan jumlah perusahaan industri besar/sedang di Kota Yogyakarta menjadi 74 perusahaan yang sebelumnya ditemukan sebanyak 75 perusahaan di tahun 2021. Sedangkan untuk Kabupaten yang lain, semua mengalami penambahan jumlah perusahaan

industri besar/sedang. Namun demikian, terdapat ketimpangan sebaran perusahaan industri besar/sedang antar wilayah. Kabupaten Sleman menjadi wilayah paling banyak terdapat perusahaan industri besar/sedang, pada tahun 2022 sebanyak 220 perusahaan, terjadi penambahan 9 perusahaan dari tahun 2021. Sementara itu, dari tahun 2021 ke 2022 peningkatan jumlah industri besar/sedang terbanyak ada di Kabupaten Bantul yaitu dari 167 pada tahun 2021 menjadi 193 pada tahun 2022.

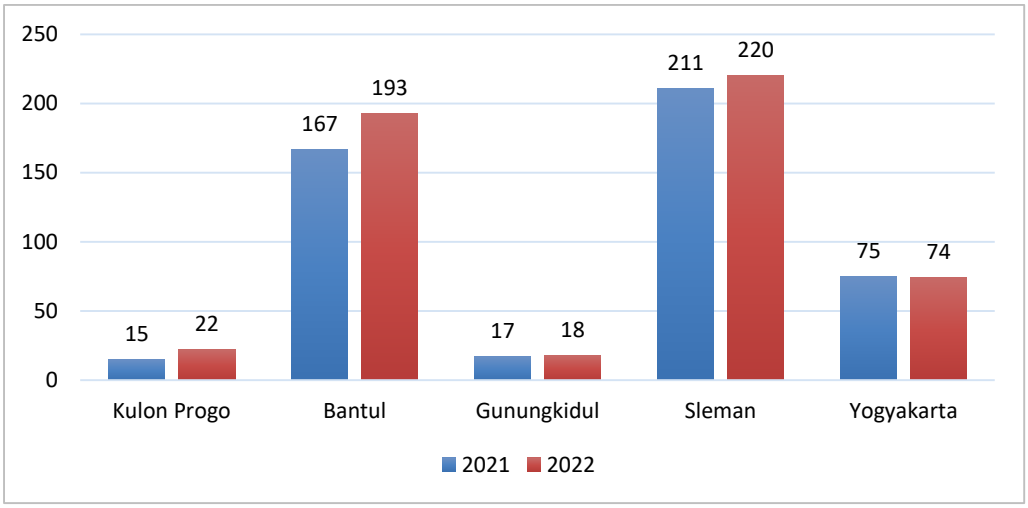

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-74 Jumlah Perusahaan Industri Besar/Kecil Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

Jika dilihat dari kelompok usaha, pada tahun 2022 ada tiga kelompok usaha yang paling dominan di DIY yaitu industri makanan, pakaian jadi dan furnitur, masing-masing secara berurutan tercatat sebanyak 88, 69, dan 73 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan terbawah dengan jumlah perusahaan di bawah 10 terdapat pada kelompok usaha dengan produk utama minuman; tembakau; kertas dan barang dari kertas; produk batu bara, minyak bumi, dan gas alam; farmasi, obat kimia dan obat tradisional; karet, barang dari karet, plastik; logam dasar; komputer, barang elektronik dan optik, peralatan listrik; suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; dan alat angkutan lainnya. Jumlah perusahaan pada kelompok tersebut hanya berkisar 1-9 perusahaan.

2.3.3.7 Urusan Transmigrasi

Pemda DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Selama kurun 2018-2022, Pemerintah Daerah DIY telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak kurang lebih 218 KK terdiri dari 691 jiwa. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2018 hingga 2022 mayoritas transmigran berasal dari Bantul dengan jumlah 68 KK, sedangkan jumlah terendah dari Kulon Progo dengan jumlah 25 KK. Berikut adalah data realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal di DIY selama 2018-2022.

Tabel 2-159 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	10	30	10	30	0	0	5	16	8	29
Sleman	23	72	13	43	0	0	0	0	12	47
Bantul	28	95	20	54	0	0	5	16	15	47
Kulon Progo	16	44	7	24	0	0	0	0	2	7
Gunungkidul	10	28	15	50	0	0	5	17	14	42
Jumlah	87	269	65	201	0	0	15	49	51	172

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

2.3.3.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami peningkatan sejak 2018-2022. Pada tahun 2018 ketersediaan ikan di DIY 30,33 kg/kapita/tahun, kemudian meningkat menjadi 35,55 kg/kapita/tahun di tahun 2022. Walaupun terjadi peningkatan selama 2018-2022, ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:

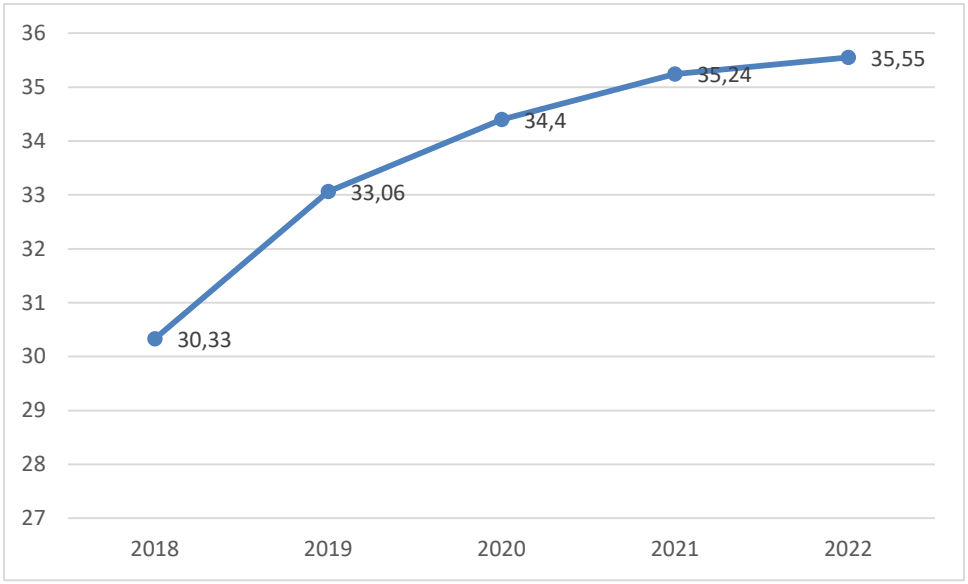

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-75 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2018-2022

Konsumsi ikan di DIY pada kurun waktu 2018-2021 menunjukkan tren meningkat. Konsumsi ikan di DIY tahun 2021 mencapai 34,82 kg/kapita/tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Namun demikian konsumsi ikan DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang mencapai 55,37 kg/kapita/tahun. Oleh karena itu, kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Tingkat konsumsi ikan di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:

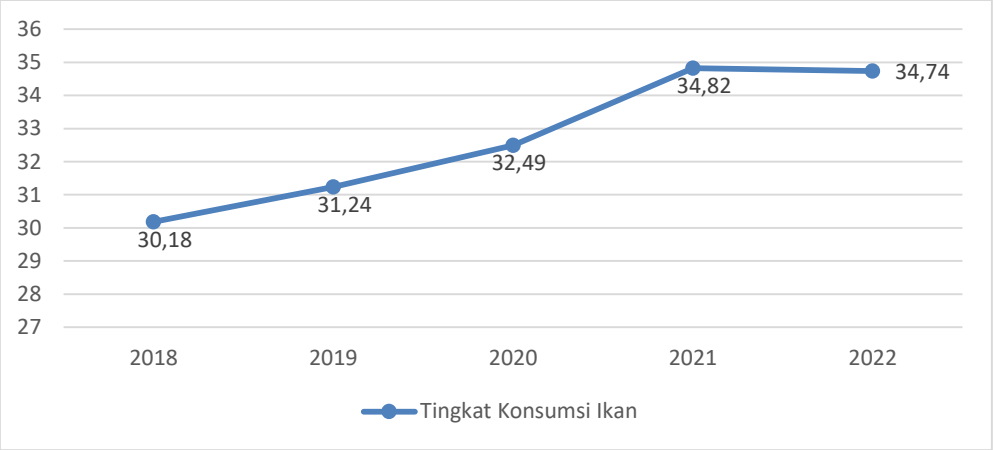

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-76 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2018-2022

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya mendominasi jumlah produksi perikanan DIY secara keseluruhan. Pada tahun 2022, produksi perikanan budidaya 97.640 ton, atau 93,25% dari total produksi perikanan DIY. Peningkatan ini terjadi dikarenakan keberhasilan budidaya perikanan air tawar khususnya di kabupaten Sleman yang selama ini menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Selain itu didukung pula dengan bertambahnya usaha budidaya lahan kering di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan menggunakan sistem terpal, serta pemanfaatan embung untuk budidaya perikanan.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 tercatat 7.072 ton atau 6,75% terhadap seluruh produksi perikanan di DIY. Meskipun tren hasil produksi perikanan tangkap cenderung meningkat, namun budaya melaut yang masih tergolong baru ditambah dengan nelayan tangkap DIY yang sebagian besar merupakan nelayan sambilan di mana bertani menjadi mata pencaharian pokok menyebabkan upaya peningkatan aktivitas penangkapan ikan di laut relatif tidak mudah dilakukan. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu masih merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY. Oleh karena itu, di kemudian hari perlu adanya optimalisasi teknologi prakiraan cuaca di laut serta mitigasi bencana laut, agar kedepannya nelayan dapat menentukan trip melaut yang dapat dilakukan. Berikut grafik

pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap DIY selama kurun waktu 2018-2022.

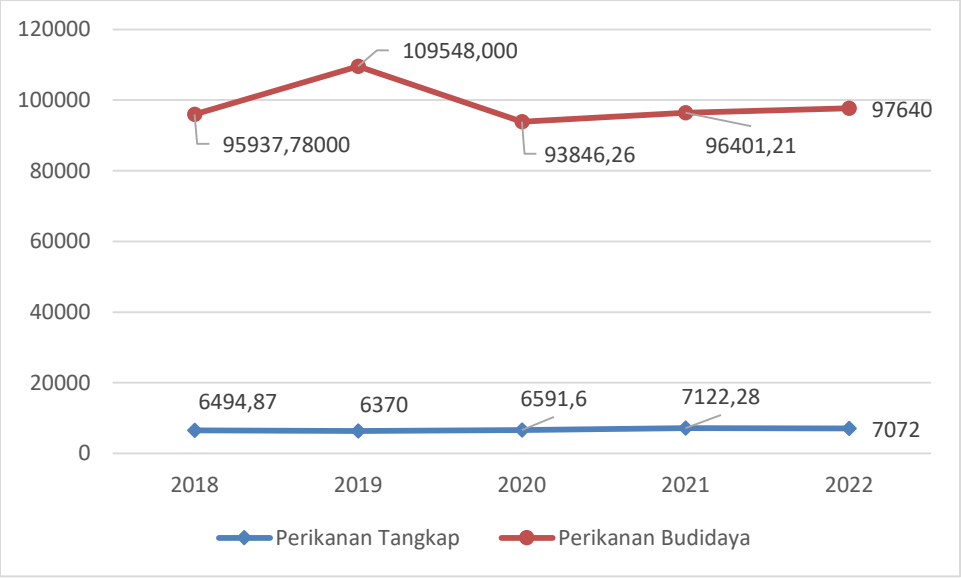

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-77 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2018-2022

Hal yang cukup berpengaruh pada sektor perikanan di DIY adalah sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana perikanan. Jumlah nelayan laut di DIY pada tahun 2020 diketahui mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, nelayan di DIY tercatat berjumlah 4.416 orang yang terdiri atas 376 orang nelayan penuh, 1.455 nelayan sambilan utama, dan 2.585 orang nelayan sambilan tambahan. Sedangkan untuk kapal penangkap ikan di laut, pada tahun 2021 tercatat sejumlah 553 unit. Jumlah ini berkurang 33 unit dibanding tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah nelayan di DIY kembali berkurang 30 orang menjadi 4.386 yang terdiri dari 376 nelayan penuh, 1.450 nelayan sambilan utama dan 2.560 nelayan sambilan tambahan. Sedangkan untuk kapal penangkap ikan, kondisi tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021.

Tabel 2-160 Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2018-2022

Jumlah Nelayan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Nelayan Laut	**4.068**	**5.166**	**4.386**	**4.416**	**4.386**
Nelayan Penuh (orang)	870	376	376	376	376
Nelayan Sambilan Utama (orang)	2.654	1.459	1.450	1.455	1.450
Nelayan Sambilan Tambahan (orang)	544	3.331	2.560	2.585	2.560
Nelayan Perairan Umum Daratan					
Nelayan Sambilan Utama (orang)	2.302	3.164	3.319	3.306	3.306
Rumah Tangga Perikanan	**4.109**	**14.822**	**14.572**	**16.142**	**15.072**
Perikanan Laut (RTP)	1.807	4.599	4.490	5.450	4.990
Perairan Umum (RTP)	2.302	10.223	10.082	10.692	10.082

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel 2-161 Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran di DIY Tahun 2018-2022

Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran (Unit)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Perahu Motor Tempel	427	495	495	495	495
b. Kapal Motor	52	86	58	58	58
- Kapal Motor 5-10 GT	6	6	6	6	6
- Kapal Motor 11-20 GT	38	38	38	38	38
- Kapal Motor 21-30 GT	6	6	6	6	6
- Kapal Motor 31-40 GT	8	8	8	8	8
Jumlah	485	586	553	553	553

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

2.3.4.1.1 Jumlah Produk Hukum Daerah

Selama kurun waktu lima tahun sejak 2017, ribuan produk hukum telah dihasilkan oleh Sekretariat Daerah DIY sebagai bentuk pelaksanaan ketugasannya. Data mengenai jumlah produk hukum daerah DIY yang dihasilkan selama 2017-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-162 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2017-2022

No	Produk Hukum	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perda Keistimewaan	3	1	0	0	0	1
2	Perda yang Sudah Diundangkan	9	15	14	12	8	13
3	Peraturan Gubernur	83	138	82	123	132	110
4	Keputusan Gubernur	288	328	321	399	469	408
8	Instruksi Gubernur	2	3	4	7	39	32
9	Surat Edaran Gubernur	18	13	12	12	42	16
10	Keputusan Sekretaris Daerah	42	22	42	71	94	64
11	Perjanjian Gubernur	10	18	4	11	11	10
12	Perjanjian Sekda	40	52	23	51	39	64
	Jumlah	495	590	502	686	834	718

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011. Dalam proses penyusunan tersebut dilakukan antara Pemerintah Daerah DIY (eksekutif) bersama DPRD DIY (legislatif).

2.3.4.1.2 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik ini berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Penilaian terhadap standar pelayanan publik pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup 9 variabel dan 19 indikator. Adapun 9 variabel tersebut, yaitu Standar Pelayanan Publik ; Maklumat Layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik ; Sarana dan Prasarana, Fasilitas ; Pelayanan Khusus ; Pengelolaan Pengaduan ; Penilaian Kinerja ; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan ; dan Atribut. Nilai maksimal atau total dari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah 100 yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 0-50 tingkat kepatuhan rendah (zona merah) ; 51-80 tingkat kepatuhan sedang (zona kuning) ; dan 81-100 tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau).

Selama 2016-2021, DIY memperoleh nilai atau tingkat kepatuhan yang variatif. Pada Tahun 2016, Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY adalah sebesar 43,57 pada tingkat kepatuhan rendah kemudian meningkat menjadi 71,15 pada tingkat kepatuhan sedang pada Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, 2021, dan 2022, DIY mencapai tingkat kepatuhan tinggi atau berturut-turut sebesar 95,65; 97,05; dan 91,15.

Tabel 2-163 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	43,57 (Rendah)	71,15 (Sedang)	95,65 (Tinggi)	n/a	n/a	97,05 (Tinggi)	91,15 (Tinggi)

Sumber : ORI, 2016-2022

2.3.4.1.3 Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan untuk mendapat gambaran tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY. Pelaksanaan survei ini merupakan implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Kedua peraturan perundangan tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam SKM terdapat 4 kategori nilai, yaitu 1) Nilai interval 25,00-64,99 termasuk kinerja pelayanan tidak baik, mutu pelayanan D ; 2) Nilai interval 65,00-76,60 termasuk kinerja pelayanan kurang baik, mutu pelayanan C ; 3) Nilai interval 76,61-88,30 termasuk kinerja pelayanan baik, mutu pelayanan B ; dan 4) Nilai Interval 88,31-100,00 termasuk kinerja pelayanan sangat baik, mutu pelayanan A.

Perkembangan selama 2016-2021 menunjukkan bahwa nilai SKM Pemda DIY cenderung meningkat dari sebesar 78,26 pada Tahun 2016 naik menjadi 84,73 pada Tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat total 95 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) telah melakukan SKM yang mana 17 UPP (18%) memperoleh mutu pelayanan Sangat Baik (A) dan 78 UPP (82%) memperoleh mutu pelayanan Baik (B).

Tabel 2-164 Survei Kepuasan Masyarakat 2016-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Survei Kepuasan Masyarakat(SKM)	78,26	77,97	79,61	82,69	83,64	84,73	85,36

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

2.3.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Salah satu dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan kebutuhan sarana, di antaranya berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi, dan penunjang lainnya. Selain itu, Sekretariat DPRD juga memfasilitasi berbagai agenda DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Salah satu fasilitasi fungsi DPRD DIY yang dilakukan yakni fungsi legislasi, dimana dalam periode 2017-2022 setidaknya sudah dapat mengakomodir pembentukan Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Daerah Istimewa) sebagai berikut:

Tabel 2-165 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan pada Tahun 2017-2021

No	Uraian	Jumlah Produk Hukum				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Program pembentukan perda (Propemperda)	11	16	17	12	11
2	Rancangan Perda yang disetujui DPRD	11	16	16*	12	11
3	Rancangan Perda yang diusulkan DPRD	5	6	5	3	6

Sumber : DPRD DIY Tahun 2022

Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1 Urusan Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Hal ini berarti perencanaan daerah tidak hanya memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, melainkan juga memperhatikan aspek kepemilikan rencana (*sense of ownership*). Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sesuai amanat pemerintah, dalam menyusun dokumen perencanaan, Pemerintah DIY telah menggunakan pendekatan *money follow program* yakni pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan penganggaran ini mendukung pendekatan perencanaan yang: a.) holistik tematik, yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; b.) terintegrasi, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan c.) spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan

informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integtrasi dan pemantauan di lapangan.

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran perangkat daerah periode tahun 2018-2022, Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah adalah sebagaimana grafik berikut.

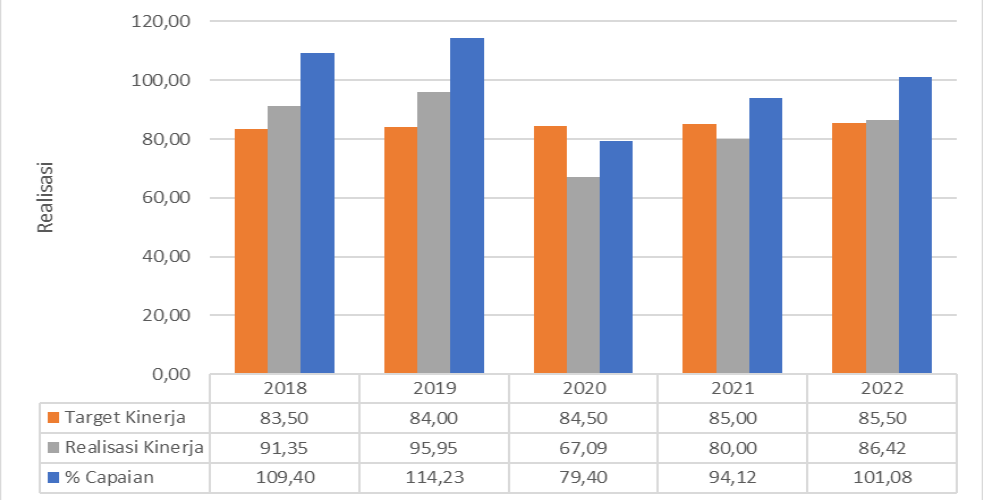

	2018	2019	2020	2021	2022
Target Kinerja	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50
Realisasi Kinerja	91,35	95,95	67,09	80,00	86,42
% Capaian	109,40	114,23	79,40	94,12	101,08

Gambar 2-78 Grafik Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah

Grafik di atas menunjukan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah berkisar antara 79,40% - 114,23% dengan rata rata capaian tahunan sebesar 97,81%. Berdasarkan persentase capaian tersebut, perlunya mendorong peningkatan terwujudanya integrasi, sinkronisasi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.

2.3.5.2 Urusan Keuangan

Transparansi pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Penyusunan APBD DIY didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hingga tahun 2021, Pemda DIY tercatat telah menerima opini WTP sebanyak sebelas kali berturut-turut.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan Presiden tentang transformasi digital, antara lain: a). Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; b). Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; c). Mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital; d). Mempersiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Implementasi KKPD (kartu kredit pemerintah daerah). Selanjutnya Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Diikuti dengan dikelurkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan

dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menyambut baik hal tersebut dengan menyusun peraturan peta jalan ETPD. Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait pendapatan daerah, hingga kini Dana Perimbangan masih menjadi andalan Pemda DIY dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat. Proporsi Dana Perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah DIY setidaknya selama kurun waktu 2017-2021 dengan besaran yang cenderung fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal DIY terhadap Pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal DIY. Sementara itu, PAD DIY terus mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2021. Adapun PAD DIY berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berbeda dengan PAD DIY, pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat terus meningkat sepanjang 2017-2020. Pendapatan ini antara lain berasal dari hibah serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Gambaran mengenai distribusi pendapatan daerah menurut komponen di DIY tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut.

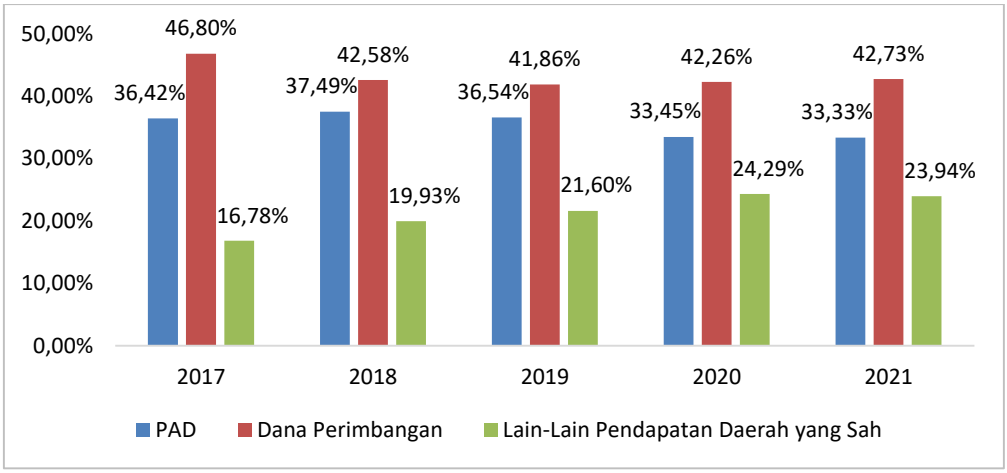

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar 2-79 Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY 2017-2021

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diterapkanlah suatu sistem yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sistem tersebut dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah. Pembentukan BLUD diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibiltas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Pemda DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada Tahun 2021, Pemda DIY memiliki 8 (delapan) BLUD, yakni SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, SMKN 3 Wonosari, Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), RSJ Grhasia, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) DIY, Balai Laboratorium dan Kalibrasi Kesehatan (BLKK) DIY, dan RS Khusus Paru Respira. Jumlah BLUD tersebut diperkirakan akan bertambah khususnya BLUD yang berasal dari SMK Negeri karena terdapat beberapa SMK yang sedang berproses melengkapi persyaratan untuk menerapkan BLUD, baik persyaratan subtantif, teknis, dan administratif.

2.3.5.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

2.3.5.3.1 Pergeseran Paradigma dari Administrasi ke Manajemen ASN

Paradigma manajemen kepegawaian telah mengalami pergeseran dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Administrasi ASN merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program, dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN. Pemda DIY yang memiliki banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pionir dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Tabel 2-166 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021

No.	Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	44	47	3
2.	Jabatan Administrator	215	225	10
3.	Jabatan Pengawas	640	676	36
4.	Jabatan Pelaksana	3.139	7.165	4.026
5.	Jabatan Fungsional	5.728	8.091	2.363
6.	CPNS	738	0	0
	Jumlah	10.504	16.204	6.438

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified sytem*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas "merit" yang menekankan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini:

(1) Rekrutmen

Proses awal dari manajemen ini adalah rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi atau lembaga terkait. Termasuk dengan memperhatikan Analisis Jabatan yang direncanakan oleh pemerintah seperti kebutuhan pegawai, kewenangan, tanggung jawab, hak, syarat-syarat, dan lainnya sebagai penunjang jabatan yang akan ditempati oleh calon ASN. Secara umum, dalam merekrut pegawai ASN menurut kepada anjab (analisis jabatan) adalah menentukan hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan Analisis Beban Kerja meliputi beban kerja yang akan ditempuh oleh pegawai seperti jam kerja dan untuk mengetahui informasi jabatan yang telah dilakukan melalui proses penelitian untuk mendapatkan

kinerja sesuai dengan jabatan tersebut. Untuk rekruitmen digunakan sistem CAT (*computer assessment test*) baik untuk CPNS maupun Pegawai Non PNS.

(2) Pengembalian Pegawai

Untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Pemda menerapkan sistem ini sebagai salah satu penunjang tercapainya Reformasi Birokrasi dalam lingkup ASN. Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi ini. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan tugas belajar, izin belajar, seminar, pelatihan, kursus serta diklat teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai dalam menduduki jabatannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memaksimalkan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi lebih baik.

(3) Promosi

Promosi yang dilakukan di sini adalah adanya kenaikan pangkat jika terdapat kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan aparatur sipil negara. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk bisa menuju kepada jabatan ini jika kinerja yang dilakukan telah maksimal dan telah mendapatkan nilai yang objektif dari pemerintah atau kepala instansi yang berkaitan sehingga bisa dilakasanakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi serta kompetensinya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan promosi, sehingga profil jabatan masing-masing pegawai merupakan acuan yang sangat diperlukan.

(4) Kesejahteraan

Kesejahteraan setiap ASN perlu diperhatikan sehingga pada setiap tahunnya terdapat perubahan kebijakan mengenai pemenuhan kesejahteraan aparatur sipil negara seperti dalam pemberian tunjangan untuk PNS yang telah ditentukan dan dianggarkan pada tiap tahunnya. Namun, tunjangan tidak semata-mata diberikan begitu saja, yang bersangkutan harus mengikuti tahap yang telah menjadi syarat untuk proses Reformasi Birokrasi. Besarnya tunjangan yang didapat oleh pegawai tergantung kepada kinerja, tanggung jawab, beban dan resiko yang telah dilakukan.

(5) Disiplin

Manajemen kinerja merupakan pembinaan dan penilaian pegawai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja dari pegawai yang bersangkutan baik PNS ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Pembinaan ini dilakukan menurut kepada prestasi dan sistem karir. Setelah pembinaan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka diterapkan disiplin etika yang harus diterapkan oleh pegawai. Kode etik yang tidak sesuai dengan peraturan, maka diperlukan sanksi yang tegas untuk tetap berjalannya rencana untuk mencapai Reformasi Birokrasi.

(6) Pensiun

Hingga tahap akhir dari manajemen ASN ini yaitu pensiun maka berakhir tugas sebagai ASN di instansi terkait. Pada tahap akhir ini, masih merupakan bagian dari pemenuhan kesejahteraan pegawai. Di sini, diberikan tunjangan sebagai penghormatan dan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut untuk melayani masyarakat dan mengabdi kepada negara.

Tabel 2-167 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
2017	12.712	24.330	-11.618	52,25
2018	11.387	16.204	-4.817	70,27
2019	11.347	16.204	-4.857	70,02
2020	10.558	16.204	-5.646	65,16
2021	10.504	16.204	-5.700	64,48

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif sehingga bisa mendapatkan pejabat yang kompeten di bidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah

dengan *merit system* melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, objektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, sistem merit di DIY pada tahun 2018 mendapatkan skor 324,5 termasuk dalam kategori "III" dengan predikat "baik". Pada tahun 2019 skor sedikit turun menjadi 313,5 dikarenakan perubahan bobot skor, skor ini masih termasuk dalam kategori III dengan predikat "baik". Adapun pada tahun 2020 capaian skor sistem merit meningkat menjadi "342", capaian ini termasuk dalam kategori "IV" dengan predikat "sangat baik". Meskipun terdapat peningkatan, capaian sistem merit di DIY masih terdapat catatan pada beberapa aspek masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Tabel 2-168 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2021

Tahun	Skor	Kategori	Predikat
2018	324.5	III	Baik
2019	313.5	III	Baik
2020	342	IV	Sangat Baik
2021	Tidak Dilakukan Penilaian		

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

(7) Arus Besar Purna Tugas Pejabat Struktural Pemda DIY 2021-2024

Pos jabatan struktural di lingkup Pemda DIY dalam 3 tahun ke depan akan ditandai dengan arus besar purna-tugas Pejabat Struktural Pemda DIY (hingga tahun 2024). Berdasar Data dari BKD DIY (Januari 2022), arus purna tugas pejabat struktural itu tersaji sebagai berikut:

Tabel 2-169 Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024

Eselon	Pensiun s/d 2021	Pensiun s/d 2022	Pensiun s/d 2023	Pensiun s/d 2024	Total Pensiun s/d 2024
I	0	0	1	0	1
II	3	2	3	5	13
III	31	34	28	17	110
IV	79	55	47	52	233
Jumlah	113	91	79	74	357

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

Arus purna-tugas yang sedemikian besar itu perlu direspon dan diantisipasi dengan penyiapan kader-kader pengganti yang perlu mulai diidentifikasi, ditemukenali, termasuk dibekali agar siap menggantikan pos-pos jabatan itu dengan lebih mumpuni. Perlu segera dilakukan proses penelusuran melalui *assessment* atau *talent-pool* atau *talent-scout* dan dilanjutkan dengan pembekalan melalui diklat, pemagangan, kursus, dan lain sebagainya untuk meng-upgrade kompetensi dan kapasitas para calon penerus pos struktural Pemda DIY di masa depan tersebut.

2.3.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan serta kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti-bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif dan valid. Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah sebagai kebijakan publik harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. DIY melalui unit pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kegiatan kelitbangannya.

Perhitungan indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%. Proses pemilihan rekomendasi yang akan digunakan sebagai referensi untuk perencanaan adalah melalui beberapa tahapan yaitu:

a. pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY;
b. pemilahan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan
c. penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2017-2022.

Adapun capaian hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2-170 Capaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Daerah, 2020-2022

Tahun	Rekomendasi Terpilih	Total Rekomendasi	Perentase
2020	121	168	72,02 %
2021	63	67	94,03 %
2022	73	73	100 %

Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi entitas kelitbangan di DIY untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerjasama dengan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini, diperlukan sinergisitas entitas kelitbangan di DIY yang terdiri ASN Jabatan Fungsional Peneliti baik dari Pemda DIY maupun instansi vertikal, Dunia Akademisi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk kelitbangan yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. Upaya mewujudkan sinergisitas tersebut telah diinisiasi oleh Pemda DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya rakor kelitbangan dan pertemuan ilmiah yang menjadi wadah sekaligus wahana bagi para insan kelitbangan dalam berbagi gagasan dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan DIY.

2.3.5.5 Urusan (Unsur) Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.

Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah

perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 kapanewon dan 48 kalurahan di DIY, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerja sama daerah.

2.3.5.6 Urusan (Unsur) Penghubung

Unsur penghubung daerah melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat. Perwujudan pelaksanaan fungsi penunjang adalah pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan Pemda DIY di Ibukota Jakarta, pemberian pelayanan penunjang terhadap perangkat Pemda DIY yang bertugas di Ibukota Jakarta dan masyarakat DIY yang ada di Ibukota Jakarta, pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta dan sekitarnya. Pelaksanaan urusan penghubung daerah dilakukan oleh Badan Penghubung Daerah melalui penyediaan SDM dan sarana prasarana pendukung diantaranya Gedung Griya Jogja (berlokasi di Menteng Jakarta Pusat), Layanan Anjungan DIY di TMII, Wisma Jogja (berlokasi di Pedati Jakarta Timur), dan pelayanan kendaraan bagi aparatur Pemda DIY yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat Pemda DIY. Adapun fasilitas penginapan dan Anjungan DIY di TMII dapat diakses oleh semua masyarakat dengan tarif sesuai Peraturan

Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya mewujudkan *clean government* and *good governance* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain dimaksudkan bahwa: 1) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan internal menjadi bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal. Khususunya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi akan terwujud jika tata kelola pemerintahan tidak lagi memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pencegahan korupsi memberikan garansi bagi penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, yang pada akhirnya dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik.

Efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian. Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*contro*l) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sampai dengan Bulan Desember 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler serta pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2022 terhadap 37 OPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2022 telah diberikan sejumlah 944 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 914 (96,82%). Pada bulan Desember 2022 diterbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang menambah jumlah rekomendasi yang diberikan sehingga mempengaruhi pada jumlah perhitungan persentase penyelesaian. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tindak lanjut pemeriksaan paling lama 60 hari setelah hasil pengawasan atau pemeriksaan diserahkan, sehingga untuk LHP yang terbit Bulan Desember belum ditindaklanjuti secara keseluruhan.

Atas tiap rangkaian pengawasan yang dilakukan pada umumnya akan terdapat temuan yang kemudian akan diberi rekomendasi. Kemudian atas temuan dan rekomendasi tersebut akan dilakukan upaya tindaklanjut hasil pemeriksaan di wilayah DIY pada waktu berkenaa. Berdasarkan data hingga tahun 2022, hasil pemeriksaan oleh BPK RI dan APIP - Inspektorat DIY pada Tahun 2017-2022

setidaknya terdapat tindaklanjut atas hasil pemeriksaan yang sudah mencapai rata-rata sekitar 99,35%.

Tabel 2-171 Temuan, Rekomendasi, dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2017-2022

No	Sub Elemen	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**							
1.1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	Temuan	9	18	26	24	18	10
1.2	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Rekomendasi	27	62	65	60	38	32
1.3	Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Temuan	271	359	518	725	499	359
1.4	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Rekomendasi	650	903	1.284	1.942	940	944
2	**Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan**							
2.1	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	99,00	99,79	99,60	100,00	100,00	94,88
2.2	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	96,82

Sumber : Inspektorat DIY, 2022

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Pemerintah Daerah DIY terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan objek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap objek pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

2.3.7.1 Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan wakil Gubernur

Keistimewaan DIY ditetapkan sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan oleh DPR RI pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. Ditetapkannya DIY sebagai Daerah Istimewa tak lepas dari adanya Amanat 5 September 1945 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai tanggapan atas diterimanya Piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno. Secara umum Amanat 5 September 1945 tersebut mencakup tiga hal, yaitu :

1.) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2.) Semua urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan.
3.) Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi momentum yang sangat strategis terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini karena pada masa itu belum ada kerajaan di nusantara maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan keistimewaan yang ditetapkan

tersendiri oleh Pemerintah Pusat dengan operasional pemerintahan yang dipegang langsung Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Gubernur dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur.

Pemda DIY selain melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan yang mencakup : (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur , (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan , (d) pertanahan , dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Pelaksanaan Urusan Keistimewaan DIY dari tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan kualitas kegiatan yang mengarah kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca ditetapkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, telah dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Ruang Garuda Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, pada Rabu 10 Oktober 2012. Dasar Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017 berdasarkan Keppres Nomor 87/P/Tahun 2012 tertanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY Masa Jabatan 2012-2017 dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017.

Penyusunan regulasi tindak lanjut Undang-undang Keistimewaan terkait Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada tahun 2014. Penetapannya pada tahun 2015 dengan Perdais Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada tanggal 10 Mei 2016 dilakukan pelantikan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur dikarenakan KGPAA Paku Alam IX wafat pada tanggal 21 November 2015. Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 55/P Tahun 2016 tentang Penetapan Wakil Gubernur DIY Sisa Masa Jabatan 2012-2017. Selanjutnya pada hari Selasa 10 Oktober 2017 dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Istana Presiden Jakarta berdasarkan

Keppres 107/P tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 tanggal 6 September 2017.

2.3.7.2 Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Dalam Urusan kelembagaan DIY dibentuk berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Ketentuan dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, bahwa Perangkat Daerah DIY dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien. Dalam perspektif keistimewaan ini, kelembagaan di DIY dibentuk didasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, yaitu dengan cara memperkuat relasi antara provinsi dengan kabupaten/kota yang tidak hanya sekedar struktur di provinsi tetapi juga pola hubungannya dengan kabupaten/kota sehingga koordinasi dan integrasi bisa berjalan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Bentuk kelembagaan DIY ini bisa menjadi keunggulan komparatif DIY dibanding daerah otonomi lain.

Selanjutnya implementasi bentuk kelembagaan yang mencirikan keistimewaan DIY dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1

tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, diantaranya dengan adanya lembaga yang menangani kewenangan keistimewaan sebagai berikut:

a. Paniradya Kaistimewan;
b. Parampara Praja,
c. Kundha Kabudayan,
d. Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

Ciri lain penyelenggaraan urusan keistimewaan dari unsur lembaga Pemerintah Daerah DIY, adalah melaksanakan dan mengisi serta makin memperkuat keistimewaan DIY di bawah koordinator urusan keistimewaan di masing-masing lembaga di atas. Dan agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat/rakyat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang–undangan mengenai pemerintahan daerah, kecamatan maupun desa, dengan mendasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Penugasan tersebut diantaranya dengan latar belakang sebagai berikut:

a. Keistimewaan DIY didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul DIY;
b. Keistimewaan DIY sudah dan masih tetap hidup, diterima dan menjadi milik seluruh masyarakat DIY;
c. Substansi keistimewaan DIY tidak hanya pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, melainkan mencakup kelembagaan, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan;
d. Ruang lingkup penyelenggaraan dan tujuan keistimewaan DIY meliputi seluruh masyarakat DIY yang ada di Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren hingga Kalurahan/Kelurahan;

Dengan latar belakang tersebut, maka keberhasilan pelaksanaan keistimewaan DIY tidak hanya diselenggarakan oleh Pemda DIY, tetapi merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

2.3.7.3 Urusan Kebudayaan

Sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, visi DIY yaitu "Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera". Percepatan pencapaian visi tersebut semakin jelas setelah ditetapkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan DIY serta Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Percepatan ini juga didukung oleh komitmen kebijakan dan anggaran oleh pemerintah pusat melalui alokasi Dana Keistimewaan. Untuk mengukur kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat 4 indikator capaian sasaran yakni:

a. Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan;
b. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum;
c. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya;
b. Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Indikator Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda yang cukup banyak dan lengkap meliputi periode pra sejarah, klasik, Islam dan asing baik eropa maupun asia. Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga Indikator jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Benda dan Tak Benda di DIY didukung melalui kegiatan perlindungan (penyelamatan, perawatan, pemeliharaan dan pemugaran), selain itu didukung pula dengan adanya promosi publikasi. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

2.3.7.4 Urusan Pertanahan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY dilakukan dengan berbagai cara meliputi pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan; penerbitan sertifikat Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa; penerbitan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa; serta penerbitan izin pengelolaan tanah kas desa. Hingga tahun 2022, telah dilakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 13.837 bidang dan telah terbit sertifikat untuk 9.985 bidang tanah. Jumlah Tanah Desa bersertifikat sampai dengan tahun 2020 mencapai 16.068 bidang. Adapun 150 bidang di antaranya sedang dalam proses penyesuaian pencatatan sertifikat tanah desa pada tahun 2020.

Selain itu juga telah terbit 392 Peraturan Desa serta 856 izin pengelolaan tanah kas desa. Program pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan juga diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ditemukan sejumlah 217 bidang tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Selain itu juga terdapat gap antara jumlah bidang tanah yang digunakan dengan jumlah Izin Gubernur yang diterbitkan. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa terdapat 623 bidang tanah yang digunakan tetapi hanya 167 izin gubernur yang dikeluarkan. Hasil monitoring dan evaluasi ini tentu menjadi acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY yang lebih baik.

Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di DIY dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, di DIY terjadi permasalahan pertanahan baik dalam bentuk tukar menukar maupun non-tukar menukar. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan disesuaikan dengan jenis permasalahan yang terjadi.

2.3.7.5 Urusan Tata Ruang

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya menunjang perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan. Oleh karena itu, Pemda DIY berencana mengembangkan Jaringan Jalan di DIY, yang memiliki nilai strategis dan istimewa.

Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dibangun untuk merevitalisasi kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan. JJLS merupakan salah satu solusi berkelanjutan terhadap upaya untuk menekan ketimpangan pembangunan wilayah selatan. JJLS dibangun membentang dari Kulon Progo, Bantul, hingga Gunungkidul, sepanjang 116,07 km. Keberadaan akses berupa jalan yang memadai untuk 4 lajur ini, dimungkinkan sebagai pengungkit terhadap akses wisata atau sarana pendukung lainnya, seperti bandara atau pelabuhan dengan spot-spot pertumbuhan lainnya di selatan Jawa. Adanya JJLS mengakibatkan kawasan selatan menjadi semakin terbuka terhadap kawasan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah bagian selatan, sehingga keberadaan jalan yang memiliki lebar 24-60 meter itu, menjadi penting untuk segera diwujudkan.

Pembiayaan melalui Dana Keistimewaan (urusan tata ruang) pada tahun 2014 hingga saat ini. Alokasi dana keistimewaan untuk pembangunan JJLS, terutama pada alokasi pengadaan tanahnya, menjadi titik ungkit dalam melakukan percepatan pembangunan JJLS di DIY. Pembangunan JJLS merupakan kolaborasi, dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Keduanya menyepakati pembagian tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam rangka terwujudnya pengembangan wilayah Pantai Selatan khususnya pembangunan jalan JJLS.

Sumbu filosofi merupakan garis nyata yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih atau Tugu Golong-Gilig, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Panggung Krapyak. Keberadaan sumbu filosofi jelas ada dan nampak berbeda dengan garis imajiner. Sumbu filosofi pada dasarnya adalah aset yang harus dijaga dengan hati-hati untuk eksistensi Keistimewaan Yogyakarta dan masa depan DIY.

Penataan sumbu filosofi memiliki tujuan: 1) Merevitalisasi keberadaan symbol simbol sumbu filosofi (Panggung Krapyak, Kawasan Kraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, hingga Tugu Jogja) sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup; 2) Menata Kawasan Malioboro untuk mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor; serta 3) Menata dan mengelola SDM yang memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan.

Berikut capaian kinerja Urusan Keistimewaan:

Tabel 2-172 Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
	IKU KEISTIMEWAAN											
1	Sasaran Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,22	12,04	15,67*

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
2	Sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	51,81	54,44	55,28*
3	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	86,96	92,31	91,30	92,31*
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	7.919	7.919	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	21.877	22.283*

**angka sementara*

Sumber : Paniradya Kaistimewan diolah 2022

Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk melihat aspek daya saing meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, rasio kewirausahaan dan kriminalitas. Selama lima tahun terakhir, capaian atas indikator-indikator tersebut menunjukan dinamika yang fluktuatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat DIY selalu di atas rata rata nasional. Nilai tukar petani mengalami kecenderungan menurun dan bahkan pada dua tahun terakhir berada di bawah angka 100, yang berarti bahwa indeks yang diterima oleh petani lebih kecil dibandingkan indeks yang dibayarkan oleh petani. Indikator presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan menunjukan bahwa masyarakat DIY memiliki pola konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Indikator presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan menunjukan bahwa masyarakat DIY memiliki pola konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi

makanan. Indikator rasio ekspor impor yang selalu diatas nilai satu menunjukkan DIY memiliki daya saing dalam perdagangan Internasional. Indikator kriminalitas menunjukkan peningkatan resiko penduduk terkena kejahatan selama tiga tahun terakhir. Indikator rasio ketergantungan di DIY relatif stabil pada angka 44-46.

2.3.8.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Daya saing daerah dari sisi ekonomi dapat diukur dari daya beli masyarakat, yang menunjukan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan indikator untuk mengukur daya beli masyarakat. Masyarakat dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dinikmati sebagai dampak dari ekonomi yang membaik. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan DIY cenderung meningkat, yaitu sebesar Rp13.946.000 pada tahun 2018 menjadi Rp14.482.000 pada tahun 2022. Pada nilai tersebut DIY berada diatas nilai rata rata nilai nasional yang sebesar Rp11.479.000 dan di peringkat kedua setelah DKI Jakarta yang sebesar Rp18.927.000 (Badan Pusat Statistik, 2022). Perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2018-2022) pengeluaran perkapita yang disesuaikan DIY dapat dilihat pada gambar di bawah.

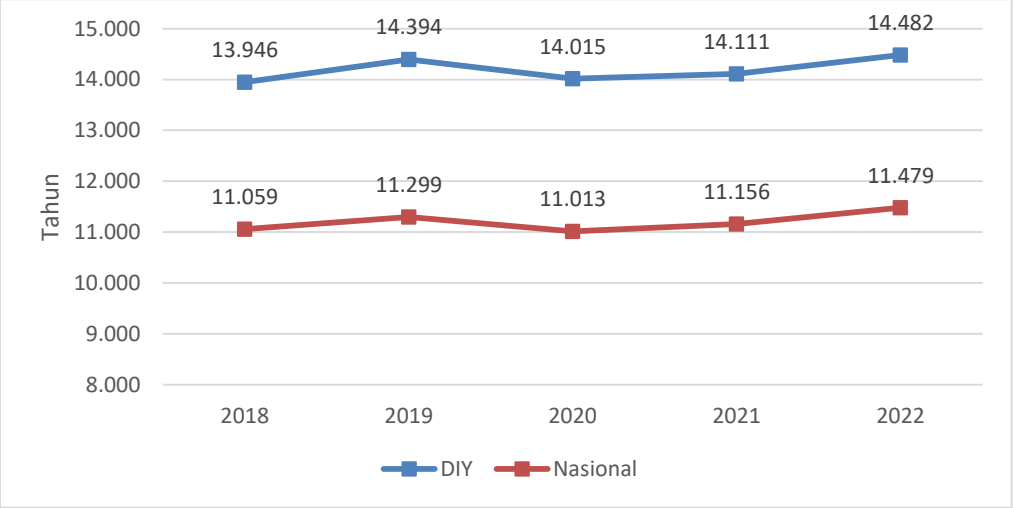

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-80 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2018-2022 (dalam ribu)

Dari sisi kewilayahan, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Yogyakarta menempati peringkat tertinggi dengan nilai Rp19.319.000,-, sedangkan Kabupaten Gunungkidul pada posisi terbawah dengan nilai Rp9.874.000,-. Nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan untuk masing-masing kabupaten/kota di DIY pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah.

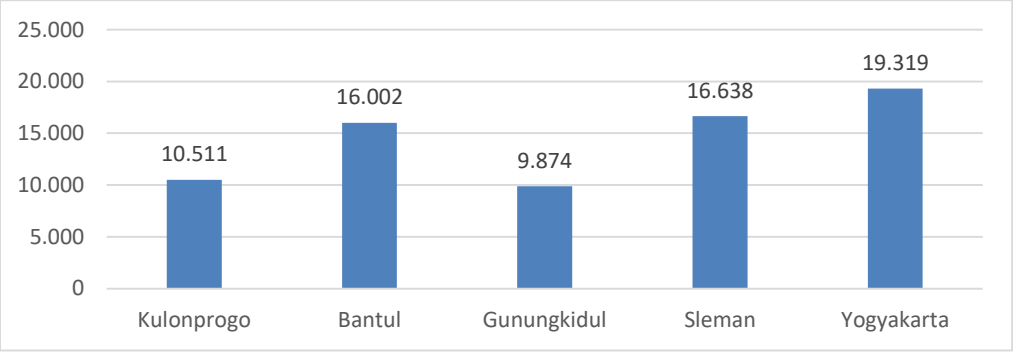

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-81 Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan)

2.3.8.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menjadi indikator daya saing di sektor pertanian. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap harga yang dibayar petani (Ib). Secara konsep, NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Nilai NTP lebih dari 100 artinya petani mengalami surplus karena kenaikan harga barang/jasa yang diproduksi lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi, sedangkan NTP kurang dari 100 memberikan arti bahwa petani mengalami defisit karena kenaikan harga yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Nilai Tukar Petani DIY cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 NTP DIY sebesar 100,77 turun menjadi 98,40 pada tahun 2022. NTP DIY tersebut berada dibawah NTP nasional yaitu 107,33 atau peringkat tiga terbawah diantara provinsi yang lain diatas Provinsi Bali dan Nusa Tenggara

Timur. Perkembangan NTP DIY selama tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

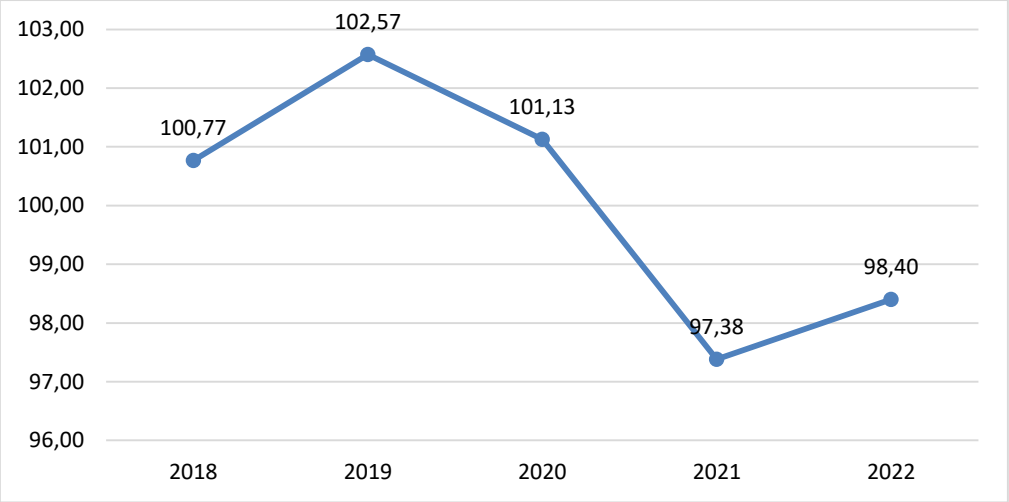

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-82 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2018-2022

Berdasarkan sub sektor, perkembangan NTP peternakan selama tahun 2018-2022 menunjukan defisit karena selalu dibawah angka 100. Adapun NTP subsektor yang konsisten di atas angka 100 adalah perkebunan dan hortikultura. NTP holtikultura merupakan subsektor yang konsisten mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat tiga subsektor yang nilai NTP nya dibawah 100 yaitu perikanan, peternakan dan tanaman pangan. Data perkembangan NTP per subsektor DIY Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

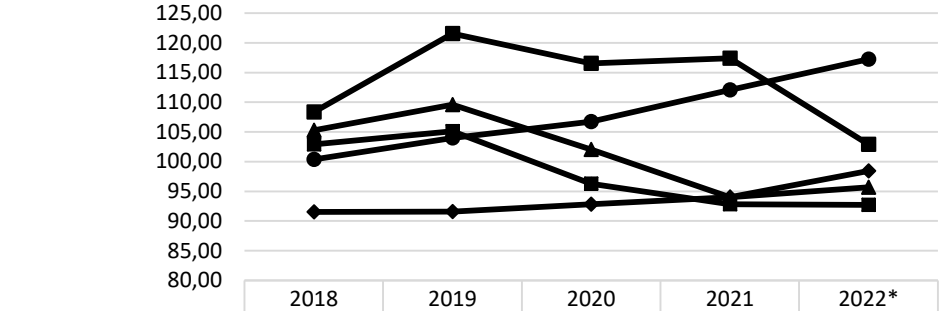

	2018	2019	2020	2021	2022*
Tanaman Pangan	105,29	109,57	102,05	94,02	95,68
Hortikultura	100,37	104,00	106,75	112,07	117,24
Perkebunan	108,34	121,56	116,56	117,41	102,90
Peternakan	91,54	91,60	92,84	93,99	98,41
Perikanan	102,88	105,11	96,27	92,83	92,73

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-83 NTP Per Subsektor Tahun 2018-2022

2.3.8.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Konsumsi Bukan Makanan)

Hukum Engel menjelaskan bahwa rumah tangga atau masyarakat dapat dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang baik ketika persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dari konsumsi makanan atau lebih dari 50%. Persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan tersebut dapat menjadi indikator daya saing sebab masyarakat atau daerah dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok (makanan) apabila memiliki nilai lebih dari 50%. Persentase pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan perkotaan dan pedesaan DIY selama tahun 2018-2022 cenderung menurun yaitu dari tahun 2018 sebesar 59,39% turun menjadi 57,52% pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahun 2022 persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan DIY berada diatas rata rata nasional yaitu sebesar 49,86% sekaligus nomor tiga tertinggi nasional setelah Provinsi DKI Jakarta sebesar 62,25% dan Bali sebesar 57,73%.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten di DIY yang memiliki persentase dibawah 50% selama lima tahun terakhir. Sedangkan kabupaten/kota lainnya cenderung konsisten memiliki nilai lebih dari 50%. Pada tahun 2022, Kota Yogyakarta memiliki presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi

bukan makanan tertinggi sebesar 66,90%, diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 58,45% dan 56,37%.

Tabel 2-173 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di DI Yogyakarta Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Gunungkidul	47.75	46.61	48.14	45.96	46.43
Kulon Progo	51.59	53.12	54.78	51.99	53.86
Bantul	60.60	58.65	57.53	57.29	56.37
Yogyakarta	63.47	60.68	62.54	63.73	66.90
Sleman	62.02	63.82	62.61	61.23	58.45
D.I Yogyakarta	**59.39**	**59.21**	**58.97**	**58.06**	**57.52**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Persentase terbesar pengeluaran konsumsi bukan makanan selama tahun 2018-2022 berturut-turut adalah kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian diikuti aneka barang dan jasa; barang tahan lama; pajak, pungutan, asuransi dan seterusnya. Persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-174 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan DIY Tahun 2018-2022 (dalam persen)

Kelompok Bukan Makanan	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	24,61	25,75	24,88	26.52	27.98
Aneka Barang dan Jasa	16,40	16,70	16,67	16.71	15.28
Barang tahan lama	10,26	7,95	8,76	6.82	5.92
Pajak, pungutan, asuransi	3,52	3,50	3,70	4.72	5.19
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	2,58	2,62	2,84	2.10	1.92
Keperluan pesta dan upacara	2,03	2,69	2,12	1.19	1.23
Total	**59,39**	**59,21**	**58,97**	**58.06**	**57.52**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

2.3.8.4 Rasio Ekspor-Impor

Daya saing di sektor perdagangan luar negeri suatu daerah dapat ditelusuri melalui indikator rasio ekspor impor. Daerah dianggap memiliki daya saing yang baik apabila persentase rasio ekspor impornya lebih dari satu atau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Rasio ekspor-impor DIY selama tahun 2018-2022 selalu di atas satu, hal ini menunjukkan DIY memiliki daya saing di perdagangan internasional. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, sepuluh komoditi ekspor terbesar DIY selama periode Januari-Desember 2022 adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot penerang rumah, barang-barang rajutan, barang-barang dari kulit, jerami atau bahan anyaman, kayu, barang dari kayu, minyak atsiri, kosmetik, wewangian, plastik dan barang dari plastik, bulu unggas, dan kertas/karton. Sepuluh komoditas tersebut berkontribusi 91,21 persen dari keseluruhan ekspor DIY. Adapun 10 negara tujuan utama ekspor antara lain Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Australia, Belanda, Inggris, Korea Selatan, , Tiongkok, Singapura, dan Thailand.

Tabel 2-175 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (nilai FOB)	424.71	403.70	398.80	557.00	583.30
Impor (nilai CIF)	101.97	95.40	124.50	153.80	145.60
Rasio E/I	4.17	4.23	3.20	3.62	4.01

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

2.3.8.5 Angka Kriminalitas

Indikator kriminalitas dapat digunakan untuk melihat daya saing daerah. Daerah yang memiliki angka kriminal tinggi akan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Jumlah kejahatan di DIY cukup berfluktuasi selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 5.317 turun sampai 4.599 kasus pada tahun 2019 kemudian naik kembali menjadi 5.331 kasus pada tahun 2021 sebelum akhirnya turun kembali menjadi 5.166 kasus pada tahun 2022. Pada rentang tahun tersebut, tercatat pelaku kejahatan kategori anak menunjukkan peningkatan dari 17 pelaku di tahun 2018 menjadi 257 di tahun 2022. Perkembangan jumlah

kejahatan yang dilaporkan menurut kabupaten/kota di DIY selama tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-176 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Gunungkidul	287	271	224	281	296
Yogyakarta	1,178	744	633	633	736
Kulon Progo	441	443	546	485	395
Bantul	796	937	953	1,322	1,330
Sleman	2,615	2,204	2,345	2,610	2,409
DIY	5,317	4,599	4,701	5,331	5,166

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Resiko penduduk terkena kejahatan di DIY juga tercatat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, dari setiap 100.000 penduduk terdapat sebanyak 146 penduduk memiliki resiko terkena kejahatan. Angka ini sempat turun pada tahun 2019 menjadi 120 penduduk, akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 139 penduduk. Perkembangan resiko penduduk terkena kejatahan selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-177 Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Gunungkidul	38	36	30	38	39
Yogyakarta	285	172	145	145	196
Kulon Progo	98	103	126	112	89
Bantul	85	92	93	128	133
Sleman	246	181	190	212	212
DIY	146	120	121	137	139

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Kasus kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat DIY adalah kejahatan jalanan yang dikenal dengan sebutan klitih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY mencatat dalam rentang tahun 2018-2022 kasus klitih cenderung meningkat, dari 32 kasus di tahun 2018 menjadi 76 kasus di tahun 2022. Tercatat jumlah kasus kejahatan jalanan selama tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 234 kasus. Data kasus kejahatan jalanan di DIY pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-178 Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2022

No	Kesatuan	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	MAPOLDA DIY	-	-	-	1	0	1
2	POLRESTA Yogyakarta	9	13	12	10	30	74
3	POLRES Sleman	10	6	21	16	32	85
4	POLRES Bantul	11	-	15	21	4	51
5	POLRES Kulon Progo	2	-	6	2	6	16
6	POLRES Gunungkidul	-	-	2	1	4	7
Jumlah		32	19	56	51	76	234

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2023

2.3.8.6 Tingkat Ketergantungan /Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dapat menjadi pendekatan untuk indikator daya saing daerah karena dapat menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Daya saing daerah dapat dianggap baik bila nilai rasio ini semakin kecil. Perkembangan rasio ketergantungan di DIY selama tahun 2018-2022 relatif stabil di angka 44-46. Hal ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja di DIY mempunyai tanggungan sebanyak 44-46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio beban tanggungan penduduk DIY tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-179 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio ketergantungan
	0-14	15-64	65+		
2018	21,72	68,93	9,34	100	45
2019	21,40	69,02	9,57	100	45
2020	20,41	68,78	10,81	100	45
2021	20,21	68,72	11,07	100	46
2022	20,20	69,24	10,55	100	44

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 diolah

2.3.8.7 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukan besarnya jumlah wirausaha dibandingkan dengan total seluruh penduduk usia kerja. Salah satu cara untuk melihat besarnya wirausaha di daerah adalah dengan melihat proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dalam data SAKERNAS. Data bulan Februari 2022 berikut menunjukan bahwa jumlah orang yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di DIY hanya 3,63%. Mayoritas penduduk tentu masih mencari penghidupan dengan menjadi buruh atau karyawan. Dalam RPJMN RI, ditargetkan tahun 2024 rasio kewirausahaan secara nasional mencapai angka 4 persen. Jika dilihat pada data berikut, rasio kewirausahaan di DIY tahun 2018 dan 2019 telah mencapai angka di atas 4 persen. Namun demikian, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Dampak Covid-19 terhadap kondisi bisnis dan keuangan diduga berpengaruh terhadap penurunan ini. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2022 sudah mulai meningkat kembali pada angka 3,63 persen. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pelonggaran aktifitas ekonomi selama tahun 2022.

Tabel 2-180 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2022

Status Pekerjaan	Persentase (%)
Berusaha sendiri	18.03
Berusaha dibantu buruh tak tetap/pekerja keluarga	18.28
Berusaha dibantu buruh tetap	3.63
Buruh/karyawan	39.06
Pekerja bebas di pertanian	1.90
Pekerja bebas di non pertanian	4.03
Pekerja tak dibayar	15.06

Sumber: Sakernas BPS, 2022

Tabel 2-181 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2018-2022

Status Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	2022
Berusaha dibantu buruh tetap	4,24	4,08	3,81	3,53	3,63

Sumber: Sakernas BPS, 2022

2.4 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DIY SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN

Tahun 2022 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (RPJMD DIY Tahun 2017-2022). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 (RKPD DIY Tahun 2022) berpedoman pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Adapun dokumen RPJMD DIY 2017-2022 telah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (RPJPD DIY Tahun 2005-2025).

Tema RKPD DIY Tahun 2022 adalah ***"Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta."*** Tema tersebut berpedoman pada Tujuan dan Sasaran

Pembangunan dalam RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan bersangkutan, serta mempertimbangkan aspek tema indikatif dan arah kebijakan umum pembangunan pada RPJMD tersebut. Pilihan tema pembangunan RKPD DIY tersebut juga memperhatikan aspek kewenangan keistimewaan DIY, mempedomani RKP 2022, memperhatikan tematik serta konteks identifikasi masalah serta evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Tema Pembangunan RKPD DIY 2022 disusun dengan asumsi bahwa (1) Pandemi COVID-19 akan berakhir pada tahun 2021; (2) Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi tahun 2022 pasca berakhirnya pandemi; (3) Proyek Infrastruktur Nasional tetap masuk di Tahun 2022.

RKPD DIY Tahun 2022 memiliki 5 prioritas daerah yakni:

1 Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi);
2 Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
3 Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial;
4 Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari;
5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Kondisi transisi pandemi COVID-19 menuju transisi endemi dan upaya-upaya pemulihan sosial ekonomi yang mengikuti menjadi konteks tema RKPD tersebut.

Dengan konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan DIY di atas, bagian ini merupakan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Tahun 2022. Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja indikator sasaran daerah, Program Pemda, sasaran OPD, program dan kegiatan/sub kegiatan, sesuai dengan *cascading* RPJMD DIY 2017-2022

Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur s.d. Tahun 2022

Pelaksanaan kinerja Sasaran Pemda sampai dengan Tahun 2022 pada 14 indikator kinerja utama menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY sesuai RPJMD DIY 2017-2022. Capaian Indikator-indikator tersebut sampai dengan Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 2-182 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Reali-sasi	% Realisasi Thd Target RPJMD	% Realisasi Thd Target RKPD	Keterangan
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,68	81,30	80,64	98,73	99,19	Data IPM 2022
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70,32	70,32	76,57			Data 2021, data 2022 belum tersedia.
2	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,3635	0,4382	0,459	73,73	95,25	Sumber: BPS DIY 16 Januari 2023 (s.d September, 2022)
		Persentase angka kemiskinan	Persen	7	11	11,49	35,86	95,55	BRS 16 Januari 2023; Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 11,49 persen. Sebelumnya pada Maret 2022 sebesar 11,34 Sumber BPS DIY, September 2022
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi	persen	12,04	12,04	12,22			Dataku (Update 5 Oktober 2022)
4	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,34	5,40	5,15	96,44	95,37	Angka tahun 2022 (BRS TW IV 2022, rilis 6 Februari 2023)
		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka Indeks	66,15	66,15	59,918	90,58	90,58	Data dari DLHK yang dikirim via email tanggal 30 Desember 2022
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	82,5	82,5	82,62			Dataku (Update 15 Desember 2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Reali-sasi	% Realisasi Thd Target RPJMD	% Realisasi Thd Target RKPD	Keterangan
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	54,44	54,44	55,29			Dataku (Update 30 Desember 2022)
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Wiliamson	Indeks	0,4489	0,4575	0,4504	99,67	101,55	Isian di Dataku baru sampai tahun 2021. Data 2022 : Belum Ada
6	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK ((WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3))	WTP	WTP	WTP	WTP			Angka Tahun 2021
		Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai AKIP	A	AA	AA (91,09)			Angka update sesuai Surat KemenPAN dan RB Nomor B/788/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	persen	91,30	91,30	96,30			Angka update dari LKPJ 2022
8	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	21.877	21.877	22.242			Dataku (Update 30 Desember 2022)

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS; https://sengguh.jogjaprov.go.id/ ; Dataku; LKPJ 2022; (10 Maret 2023) diolah.

Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Program Pemda Tahun 2022

Program Pemda merupakan kekhususan yang menjadi pembeda antara *cascading* kinerja Pemda DIY dibanding *cascading* Pemda lain secara umum. Program Pemda merupakan program antara yang menjadi semacam penghubung antara indikator kinerja daerah (Gubernur) dengan Indikator

Eselon II. Berikut ini adalah posisi program pemda dalam cascading kinerja Pemda DIY pada periode 2017 sd 2022.

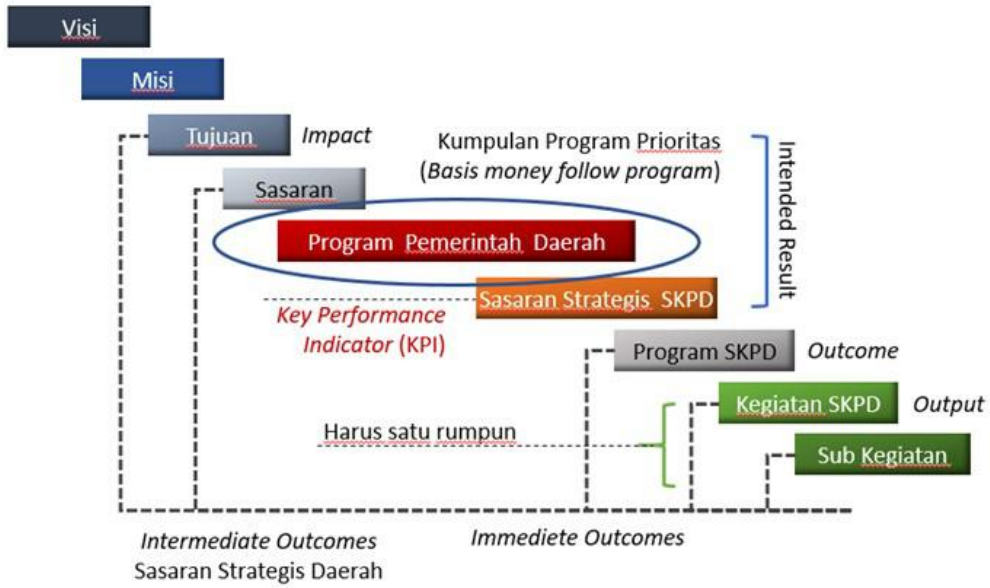

Gambar 2-84 Posisi Program Pemda dalam Cascading RPJMD DIY Tahun 2017-2022

Pemda DIY memiliki 12 program pemda dengan jumlah 33 indikator kinerja. Secara umum tingkat ketercapaian target Program Pemda dari periode tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2-183 Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun									
				2018		2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	13,20	11	33,91	11,49	26,30	12,10	14,32	12,59	14,35	13,20	19,83

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun									
				2018		2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,12	15,51	15,56	15,66	15,58	15,82	15,59	15,97	15,64	16,12	15,65
3	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	Orang	220	200	217	205	245	210	238	215	257	220	284
4	Presentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju	Persen	8,98	5,96	25	6,71	25,14	7,47	25,14	8,22	48,83	8,98	66,79
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,49	75,06	74,82	75,20	74,92	75,32	74,99	75,41	75,04	75,49	75,08
6	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Kab/ Kota	5	2	2	3	2	4	2	5	2	5	3
7	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	Persen	21,62	20,72	25	21,17	25	21,62	25	21,62	30,16	21,62	32,39
8	*Total Fertility Rate*	Angka	2,1	2,1	2,2	2,1	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,1	1,91
9	Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelu-rahan	60	36	36	42	42	48	48	54	54	60	60
10	Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)	Persen	7,33	12,59	15,58	10,99	16,50	9,6	12,10	8,39	13,73	7,33	13,31
11	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	Persen	0,4	0,2	0,277	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,49	0,4	0,47
12	Jumlah Penduduk Miskin	Angka	278.509	484.947	450.250	376.260	440.890	343.101	503.140	309.021	474.490	278.509	463.630
13	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Angka	14.593	13.552	13.946**	13.813	14.394**	14.073	14.015**	14.333	14.111**	14.593	17.764
14	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan	Persen	15,17	11,22	11,58	12,21	12,32	13,20	13,27	14,18	14,22	15,17	15,18
15	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	20,00	12,99	13,25	13,41	17,00	15,05	36,60	16,82	16,89	20	20

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun									
				2018		2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
16	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan	Persen	46,00	42,32	41,58	43,00	41,04	44,00	40,27	45,00	39,39	46,00	40,05
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,07	2,78	3,37	2,60	3,14	2,42	4,57	2,24	4,56	2,07	4,06
18	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/ Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)	Desa	20	N/A	N/A	5	0	10	10	15	18	20	25
19	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	42,50	34,2	40,25	36,40	38,65	38,60	38,43	40,80	35,42	42,50	32,14
20	Indeks Kualitas Udara	Angka Indeks	89,74	87,06	84,24	87,73	85,25	88,40	89,14	89,07	88,57	89,74	89,16
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	66,20	55,50	60,86	58,18	59,70	60,86	58,32	63,05	58,34	66,2	58,82
22	Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	125	155	155,38	150	148,53	145	125,15	135,00	124,15	125	119,56
23	Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	Persen	78,7	74,7	75,2	75,2	75,88	76,7	66,26	77,20	78,66	78,70	80,26
24	Persentase Peningkatan PDRB Pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)	Persen	40,26	40,21	39,49	40,23	39,75	40,24	40,09	40,25	40,08	40,26	39,94
25	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi	Persen	83	61	71,90	67	79,84	72	81,46	78,00	81,45	83	81,28
26	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
27	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Rupiah	9.626.994.395	9.424.672.744	19.033.326.876	9.818.077.561	18.277.128.626	9.953.610.205	9.016.510.978	9.237.591.665	13.406.469.567	9.626.994.395	28.102.350.141
28	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	Persen	8,80	8,50	8,28	8,60	8,50	8,70	8,95	8,75	8,47	8,8	84,30/ 8,43

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun									
				2018		2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
29	Nilai internal integritas organisasi	Persen	4,60	4,20	4,86	4,30	4,82	4,40	8,60	4,50	86,92	4,60	84,00*/ 8,4
30	Nilai eksternal persepsi korupsi	Persen	6,00	5,40	5,81	5,60	5,97	5,80	9,33	5,90	8,18	6	84,3*/ 8,43
31	Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
31	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan	Persen	100	25	30	25	25	75	100	100	100	100	100
32	Prosentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persen	88,67	31,57	31,78	46,51	50,08	59,45	61,25	73,16	74,11	88,67	98,12

Ket.: Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS;, https://sengguh.jogjaprov.go.id/ , Dataku ; (19 Januari 2023) diolah.

Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Sasaran OPD Tahun 2022

Capaian Sasaran Perangkat Daerah/ Eselon II Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2-184 Capaian Sasaran OPD Tahun 2022

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	Rerata nilai ujian SMA	58,41	58,41	N/A	N/A
			Rata-rata hasil ujian nasional SMK	Rerata nilai ujian SMK	58,29	58,29	N/A	N/A
			Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	Persen	98,63	98,63	98,66	100,03
			Capaian APK Pendidikan Menengah	Persen	99,74	99,74	119,58	119,89

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
			Capaian APK Pendidikan Khusus	Persen	86,50	86,50	91,84	106,17
		Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	Persen	11,80	11,80	11,86	100,51
		Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	Peringkat	8	8	N/A	N/A
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	%	94,25	94,25	96,45	102,33
		Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah penduduk berakses air minum	%	94,14	94,14	94,77	100,67
		Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	86,25	86,25	86,77	100,60
		Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	100	100	100,66	100,66
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	99,57	99,57	108,28	108,75
		Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	97,50	97,50	98,12	100,64
		Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	%	100	100	99,99	99,99
		Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Izin	115	115	115	100
		Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	7,4	7,4	7,75	104,73

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
3	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	87,81	87,81	92,76	105,64
		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	%	100	100	100	100
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	%	44,49	44,49	45,86	103,08
		Meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	%	88,67	88,67	103,58	116,82
4	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah	Persentase Rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan Hsil Evaluasi menjadi Rekomendasi di Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	%	80	80	84,38	105,47
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	85,5	85,5	86,42	101,08
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100
		Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Rupiah	6.967.568.518	6.967.568.518	15.486.233.611	222,26
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	juta rupiah	331.897	331.897	367.870	110,84

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
		Meningkatnya status kawasan konservasi	Peningkatan status kawasan konservasi	Persen	100	100	100	100
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	9.873.321	9.873.321	8.783.026	88,96
		Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	14.215.611	14.215.611	12.893.390	90,70
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	peringkat	4	4	10	40
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Persentase kualitas manajemen SDM aparatur	persen	85	85	88,89	104,58
11	INSPEKTORAT	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	90	90	95,85	106,50
12	DINAS KESEHATAN	Terwujudnya Perilaku Sadar Sehat	Persentase Puskesmas Melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Persen	100	100	100	100
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	Persen	73,28	73,28	76,33	104,16
		Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang bermutu	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan	Persen	81,3	81,3	81,3	100
		Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	persen	75	75	84,34	112,45

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio	0,45	0,45	0,49*	91,11*
		Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Umur menikah pertama perempuan	tahun	24,4	24,40	25,75	105,53
		Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	Persen	98	98	107,43	109,62
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	100	100	90,58	90,58
		Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta rupiah	764.545	764.545	1.115.771,8*	145,94
15	DINAS PERHUBUNGAN	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	%	49,79	49,79	52,24	104,92
16	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB	juta rupiah	7.327.757	7.327.757	7.814.167**	106,64
		Terwujudnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	91,12	91,12	96,8	106,23
		Pemenuhan Pangan Masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	38,65	38,65	41,39	92,91
17	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	%	100	100	388,23	388,23

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
		Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	instansi/ lembaga	15	15	15	100
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	angka	3,06	3,06	3,19	104,25
19	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan	Nilai Akreditasi Badan Diklat	Skor	93	93	93	100
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	angka	80	80	80	100
21	DINAS SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	44,28	44,28	47,27	106,75
		Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	51,60	51,60	65,34	126,63
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	2.625	2.625	2.670	101,71
		Terwujudnya Kesempatan Kerja	Jumlah kesempatan kerja	orang	2.149.001	2.149.001	2.241.131	104,29

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
		Terwujudnya Hubungan Industrial yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	kasus	50	50	62	124,00
23	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	Juta Rupiah	44.798.028	44.798.028	53.972.182	120,48
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal dan Eksternal)	nilai	86	86	87,84	102,14
24	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM	Nilai omset koperasi tahun n	juta rupiah	4.308.794	4.308.794	4.404.185	102,21
			Nilai omset UKM tahun n	Rp Milyar	11.347	11.347	11.700	103,11
		Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	persen	0,40	0,40	0,47	117,50
25	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	100	100	100	100
26	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggan, dan persandian serta persuratan	%	88	88	93,28	106,00
27	BIRO ORGANISASI	Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah	%	88	88	88,46	100,52
		Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	83	83	94,30	113,61

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	unit penyelenggara pelayanan publik	31	31	95	306,45
28	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	persen	90	90	93,73	104,14
29	BIRO HUKUM	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	%	100	100	100	100
30	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100	130	130
31	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	4	4	4	100
			Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	lembaga	4	4	4	100
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	persen	27	27	28,66	106,15
		Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	berkas	7.500	7.500	8.965	119,53

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
33	DINAS KEBUDAYAAN	Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	Buah	768	768	827	107,68
			meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	Persen	7,4	7,4	7,75	104,73
			peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	Persen	12,79	12,79	13,14	102,74
			Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY	persen	4,75	4,75	5,53	116,42
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Rerata Desa/ Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan	desa/kel	360	360	360	100
35	PANIRADYA KAISTIMEWAN	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Kepada Parampara Praja	persen	78	78	87,67	112,40
		Meningkatnya Kualitas Implementasi Urusan Keistimewaan	Rerata presentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	persen	98,2	98,20	98,11	99,91
		Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	persen	83	83	83	100
36	SEKRETARIAT DPRD	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96,50	96,50	128,44	133,10

No	OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	%
		Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2. Skor Indeks Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	90	90	90,60	100,67

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Program s.d. Tahun 2022

Berdasarkan data sengguh.jogjaprov.goi.id, pada tahun 2022 dari total 273 indikator program, sebanyak 231 indikator telah tercapai atau dengan persentase 83,09% dan sebanyak 42 indikator belum tercapai.

Evaluasi Pelaksanaan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY nomor 86 tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu dilakukan untuk menjamin pembangunan daerah dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, Pemerintah Daerah DIY mendorong OPD untuk melakukan pengendalian internal dengan dukungan sistem informasi Sengguh (https://sengguh.jogjaprov.go.id) secara rutin (Pasal 23, Pergub DIY no. 86 Tahun 2020). Berikut ini adalah ringkasan kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan sub kegiatan pada akhir tahun 2022 di Pemda DIY.

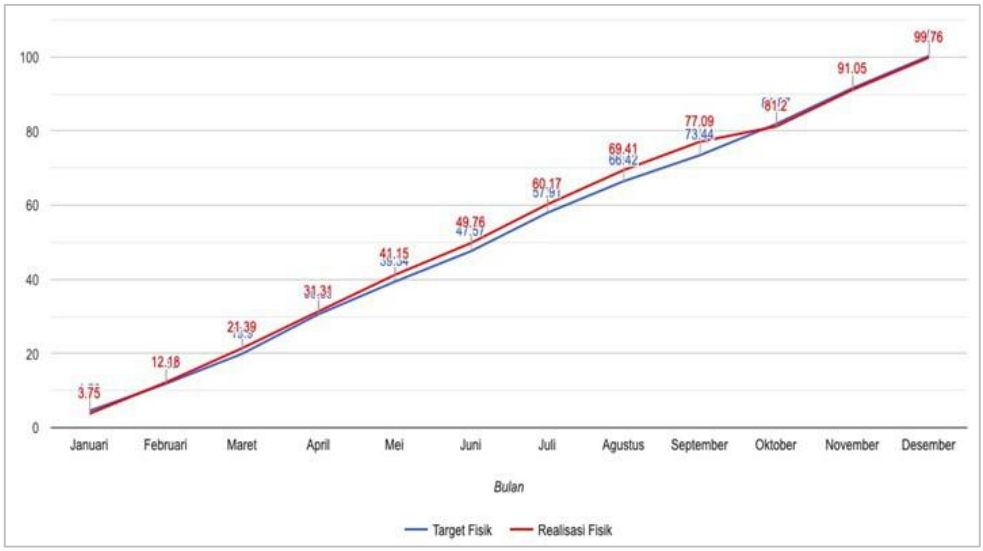

Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/ 19 Januari 2023, diolah.

Gambar 2-85 Realisasi Fisik Triwulan IV, 2022 (31 Desember 2022)

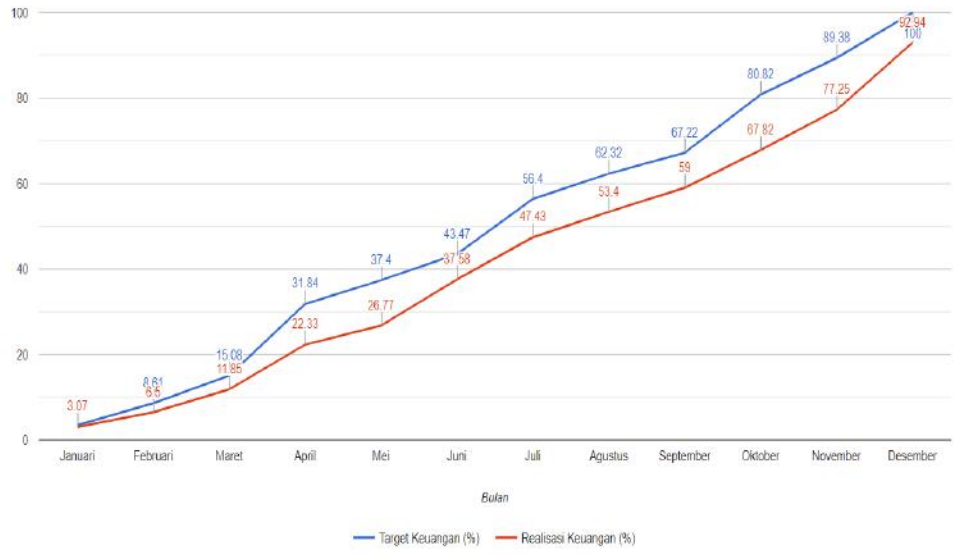

Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/ 19 Januari 2023, diolah.

Gambar 2-86 Realisasi Keuangan Triwulan IV, 2022 (31 Desember 2022)

Kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang didukung dengan APBD sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilaporkan sebagai berikut,

1. Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 memiliki kinerja fisik sebesar 99,76% dari target sebesar 100% sehingga terdapat deviasi sebesar 0,24%. Deviasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan deviasi fisik triwulan III, 2022 sebesar 0,62%, serta triwulan II sebesar 1,13%. Deviasi fisik tersebut diantaranya disebabkan oleh,
   a. Realisasi fisik sub kegiatan pada 19 PA/ KPA Pemda DIY yang tidak mencapai 100% antara lain sebagai berikut.

Tabel 2-185 Realisasi fisik sub kegiatan yang tidak mencapai 100 persen

No.	OPD/ PA/ KPA	Program	Sub kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Keu (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	45	42.496.294.574	96,63	99,99
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5	84	1.421.299.361.873	95,34	99,97
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5	41	26.450.154.467	96,36	99,97
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8	36	120.936.389.406	97,52	99,96
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	34	33.497.419.640	97,14	99,96
6	Dinas Sosial	7	57	83.066.708.004	91,60	99,89
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	16	63	493.279.808.541	92,13	99,87
8	Dinas Pariwisata	5	41	39.336.350.770	96,29	99,86
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11	45	95.324.419.627	94,85	99,75
10	Biro Bina Mental Spiritual	2	21	46.051.820.800	86,61	99,68
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	37	49.506.557.916	88,45	99,66
12	Rumah Sakit Paru Respira	2	11	54.086.276.642	71,21	99,54
13	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	2	25	76.705.270.984	83,49	99,53

No.	OPD/ PA/ KPA	Program	Sub kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Keu (%)	Realisasi Fisik (%)
14	Balai Pemuda dan Olah Raga	4	26	42.344.258.500	92,07	99,41
15	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2	19	3.412.689.800	94,51	99,36
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	41	141.584.686.754	98,71	98,36
17	Sekretariat DPRD	3	53	138.178.307.336	82,10	96,98
18	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	4	38	23.661.968.288	86,54	96,20
19	Balai Latihan Pendidikan Teknik	3	23	9.625.263.544	62,41	94,83

Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/ Januari 2023, diolah

b. pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang tidak terselesaikan karena (a) tidak cukup waktu untuk melakukan indent (pemesanan) yang akan melampaui tahun anggaran seperti pada pengadaan mobil bertenaga baterai, atau (b) ketiadaan barang pada e-katalog pada beberapa sub kegiatan terkaitmengalami kemunduran jadwal pelaksanaan (c) pemutusan kontrak karena wanprestasi penyedia barang/jasa yang tidak dapat memenuhi perjanjian penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak seperti pada pengadaan gamelan berbahan logam, dan penyelesaian konstruksi Rehabilitasi Joglo Panembahan.
c. Belum optimalnya realisasi subkegiatan yang didanai dengan transfer Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terdapat output subkegiatan DID yang tidak optimal karena baru dicairkan pada bulan Desember, sehingga durasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan seperti OP Embung dan OP Irigasi.
d. Duplikasi penganggaran bantuan hibah APBD pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada satu lembaga penerima yakni LOTA, sehingga yang direalisasikan oleh salah satu OPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
e. Tidak terrealisasinya sub kegiatan karena Kementerian terkait tidak menyelenggarakan kegiatan seleksi, misalnya pada Dinas Sosial yang tergantung pada kegiatan Seleksi PSKS Prestasi dari Kementerian Sosial.

2. Sedangkan pada kinerja keuangan dari target triwulan IV sebesar Rp5.879.828.898.255 (100%) dengan realisasi sebesar Rp5.464.626.597.279 (92,94%). Deviasi realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV, 2022 sebesar Rp415.202.300.976 atau sekira 7,06%. Persentase deviasi tersebut relatif lebih kecil daripada deviasi

keuangan sampai dengan Triwulan III sebesar 11,88% dan triwulan II, 2022 sebesar 8,04%. Deviasi keuangan disebabkan oleh efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan (jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, gaji/ tunjangan), efisiensi/ sisa lelang/ pengadaan barang/ jasa, sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan yang sifatnya jaga-jaga/ buffer (pemulasaraan jenazah, daln lain-lain), sisa at cost perjalanan dinas, dan tidak terselesaikannya output pada sub kegiatan dengan berbagai faktor penghambat.

Tabel 2-186 Laporan Rekapitulasi Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun 2022

No	SKPD	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)
					Rp	%		Rp	%	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	44	31.713.477.434	31.713.477.434	100,00	100,00	29.578.822.680	93,27	100,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	34	21.764.723.454	21.764.723.454	100,00	100,00	20.798.763.281	95,56	100,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	36	26.306.663.572	26.306.663.572	100,00	100,00	24.391.977.565	92,72	100,00
4	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	32	29.468.038.717	29.468.038.717	100,00	100,00	25.018.259.803	84,90	100,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	4	61	1.477.275.462.949	1.477.275.462.949	100,00	100,00	1.401.481.099.819	94,87	100,00
6	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	3	26	11.486.856.663	11.486.856.663	100,00	100,00	11.203.978.560	97,54	100,00
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4	48	27.627.483.882	27.627.483.882	100,00	100,00	26.126.891.393	94,57	100,00
8	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	2	21	10.458.550.757	10.458.550.757	100,00	100,00	9.261.533.334	88,55	100,00
9	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	2	19	3.412.689.800	3.412.689.800	100,00	100,00	3.225.337.672	94,51	99,36
10	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	2	15	45.679.709.379	45.679.709.379	100,00	100,00	37.787.137.294	82,72	100,00
11	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	2	18	15.528.401.212	15.528.401.212	100,00	100,00	14.411.366.595	92,81	100,00
12	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	3	23	9.625.263.544	9.625.263.544	100,00	100,00	6.007.365.109	62,41	94,83

No	SKPD	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)
					Rp	%		Rp	%	
13	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	2	16	6.444.029.236	6.444.029.236	100,00	100,00	5.554.365.901	86,19	100,00
14	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	2	19	8.241.714.663	8.241.714.663	100,00	100,00	5.216.497.845	63,29	100,00
15	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	2	23	6.177.295.450	6.177.295.450	100,00	100,00	5.360.254.203	86,77	100,00
16	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	4	26	42.344.258.500	42.344.258.500	100,00	100,00	38.984.957.339	92,07	99,41
17	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	2	22	30.586.978.587	30.586.978.587	100,00	100,00	28.674.429.134	93,75	100,00
18	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2	24	21.893.798.458	21.893.798.458	100,00	100,00	20.697.833.948	94,54	100,00
19	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	2	23	21.884.923.683	21.884.923.683	100,00	100,00	19.743.201.716	90,21	100,00
20	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	2	23	26.708.170.598	26.708.170.598	100,00	100,00	25.648.839.534	96,03	100,00
21	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	2	23	24.195.025.889	24.195.025.889	100,00	100,00	23.400.897.947	96,72	100,00
22	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH	3	21	836.536.590	836.536.590	100,00	100,00	792.574.048	94,74	100,00
23	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN	3	17	10.342.364.950	10.342.364.950	100,00	100,00	9.485.036.769	91,71	100,00
24	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	2	19	5.056.939.050	5.056.939.050	100,00	100,00	4.771.129.313	94,35	100,00
25	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2	22	3.281.143.400	3.281.143.400	100,00	100,00	3.192.036.262	97,28	100,00
26	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	2	18	2.564.092.218	2.564.092.218	100,00	100,00	2.451.851.073	95,62	100,00
27	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	3	17	6.478.868.519	6.478.868.519	100,00	100,00	6.125.869.030	94,55	100,00
28	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	2	22	5.948.706.230	5.948.706.230	100,00	100,00	5.792.628.946	97,38	100,00

No	SKPD	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)
					Rp	%		Rp	%	
29	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	3	17	8.276.292.800	8.276.292.800	100,00	100,00	8.098.865.350	97,86	100,00
30	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	2	16	44.424.004.565	44.424.004.565	100,00	100,00	29.896.178.824	67,30	100,00
31	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	2	21	6.019.198.461	6.019.198.461	100,00	100,00	5.139.452.727	85,38	100,00
32	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	2	23	5.811.362.100	5.811.362.100	100,00	100,00	5.247.180.740	90,29	100,00
33	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	2	35	14.544.539.680	14.544.539.680	100,00	100,00	12.364.985.429	85,01	100,00
34	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	2	24	5.911.954.450	5.911.954.450	100,00	100,00	5.082.856.424	85,98	100,00
35	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	2	25	6.604.119.097	6.604.119.097	100,00	100,00	5.672.222.427	85,89	100,00
36	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2	20	10.424.820.750	10.424.820.750	100,00	100,00	10.278.866.451	98,60	100,00
37	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	3	26	2.830.446.750	2.830.446.750	100,00	100,00	2.689.676.075	95,03	100,00
38	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	2	21	46.051.820.800	46.051.820.800	100,00	100,00	39.884.434.526	86,61	99,68
39	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4	15	6.588.603.500	6.588.603.500	100,00	100,16	6.462.284.204	98,08	100,00
40	BIRO HUKUM	4	31	6.207.750.482	6.207.750.482	100,00	100,00	6.115.435.385	98,51	100,00
41	BIRO ORGANISASI	3	30	4.341.794.000	4.341.794.000	100,00	100,00	3.912.066.207	90,10	100,00
42	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	5	28	2.099.825.300	2.099.825.300	100,00	100,00	2.033.416.635	96,84	100,00
43	BIRO TATA PEMERINTAHAN	10	40	7.832.914.756	7.832.914.756	100,00	100,00	6.495.558.248	82,93	100,00
44	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	4	38	23.661.968.288	23.661.968.288	100,00	100,00	20.476.341.913	86,54	96,20
45	DINAS KEBUDAYAAN	2	43	328.455.276.761	328.455.276.761	100,00	100,09	316.277.501.526	96,29	100,00
46	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	41	141.584.686.754	141.584.686.754	100,00	100,00	139.759.951.978	98,71	98,36
47	DINAS KESEHATAN	5	49	98.225.293.955	98.225.293.955	100,00	100,00	55.092.986.938	56,09	100,00

No	SKPD	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)
					Rp	%		Rp	%	
48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	35	35.227.685.684	35.227.685.684	100,00	100,00	34.728.737.426	98,58	100,00
49	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	8	36	120.936.389.406	120.936.389.406	100,00	100,00	117.935.217.722	97,52	99,96
50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	12	51	85.982.221.199	85.982.221.199	100,00	100,00	80.551.387.713	93,68	100,00
51	DINAS PARIWISATA	5	41	39.336.350.770	39.336.350.770	100,00	100,00	37.878.121.361	96,29	99,86
52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	16	63	493.279.808.541	493.279.808.541	100,00	100,00	454.439.109.304	92,13	99,87
53	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	11	53	18.333.667.152	18.333.667.152	100,00	100,00	17.611.291.638	96,06	100,00
54	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5	84	1.421.299.361.873	1.421.299.361.873	100,00	100,00	1.355.088.284.318	95,34	99,97
55	DINAS PERHUBUNGAN	5	47	118.716.554.718	118.716.554.718	100,00	100,00	110.879.753.662	93,40	100,00
56	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	6	35	13.618.565.258	13.618.565.258	100,00	100,00	13.080.515.879	96,05	100,00
57	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9	37	49.506.557.916	49.506.557.916	100,00	102,27	43.788.871.736	88,45	99,69
58	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	43	40.972.857.758	40.972.857.758	100,00	100,00	40.011.192.457	97,65	100,00
59	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	5	41	26.450.154.467	26.450.154.467	100,00	100,00	25.487.422.151	96,36	99,97
60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	11	45	95.324.419.627	95.324.419.627	100,00	100,00	90.418.335.420	94,85	99,75
61	DINAS SOSIAL	7	57	83.066.708.004	83.066.708.004	100,00	100,00	76.087.704.209	91,60	99,89
62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	45	42.496.294.574	42.496.294.574	100,00	100,00	41.064.508.394	96,63	99,99
63	INSPEKTORAT	3	39	29.011.657.600	29.011.657.600	100,00	100,00	26.822.663.417	92,45	100,00
64	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	2	22	5.846.613.900	5.846.613.900	100,00	100,00	5.490.653.150	93,91	100,00
65	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	3	23	3.180.676.200	3.180.676.200	100,00	100,00	3.036.676.691	95,47	100,00
66	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	2	22	3.524.858.100	3.524.858.100	100,00	100,00	3.367.876.546	95,55	100,00

No	SKPD	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)
					Rp	%		Rp	%	
67	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN	2	23	7.202.770.600	7.202.770.600	100,00	100,00	6.708.147.037	93,13	100,00
68	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	2	22	3.520.252.486	3.520.252.486	100,00	100,00	3.326.252.907	94,49	100,00
69	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	2	17	17.752.256.367	17.752.256.367	100,00	100,00	16.800.355.892	94,64	100,00
70	PANIRADYA KAISTIMEWAN	2	30	27.420.562.280	27.420.562.280	100,00	100,00	26.763.967.805	97,61	100,00
71	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	2	18	1.885.032.700	1.885.032.700	100,00	100,00	1.878.389.623	99,65	100,00
72	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	2	25	76.705.270.984	76.705.270.084	100,00	100,00	64.044.807.020	83,49	99,53
73	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	2	11	54.086.276.642	54.086.276.642	100,00	100,00	38.516.984.767	71,21	99,54
74	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	34	33.497.419.640	33.497.419.640	100,00	100,00	32.537.832.839	97,14	99,96
75	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	2	2	3.828.837.186	3.828.837.186	100,00	100,00	3.620.401.914	94,56	100,00
76	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	2	2	1.807.250.867	1.807.250.867	100,00	100,00	1.706.860.649	94,45	100,00
77	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	2	2	3.041.781.491	3.041.781.491	100,00	100,00	3.148.947.456	103,52	100,00
78	SEKRETARIAT DAERAH	1	11	63.940.755.596	63.940.755.596	100,00	100,00	60.905.584.472	95,25	100,00
79	SEKRETARIAT DPRD	3	53	138.178.307.336	138.178.307.336	100,00	100,00	113.445.035.659	82,10	96,98
80	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	2	15	17.621.881.600	17.621.881.600	100,00	100,00	17.289.507.925	98,11	100,00
Summary		300	2339	5.879.828.899.155	5.879.828.898.255	100,00	100,03	5.464.626.597.279	92,94	99,78

Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/ Januari 2023, diolah

Evaluasi Pelaksanaan RKPD s.d Triwulan Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Sasaran Pemerintah Daerah dapat dilihat pada link berikut:
https://bit.ly/TabelEvaluasiRKPDDIYTriwulanI2023

2.5 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.5.1.1 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan serius, dan di banyak negara masalah ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu kemiskinan kemudian dijadikan sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut UNDP, penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi.

Penghapusan kemiskinan juga menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai contoh adalah salah satu hal yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Jumlah kemiskinan di DIY sempat mengalami peningkatan dengan adanya pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berakibat pada bertambahnya kemiskinan di DIY.

Persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34% dan turun 0,57 poin dibandingkan September 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dan turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang.

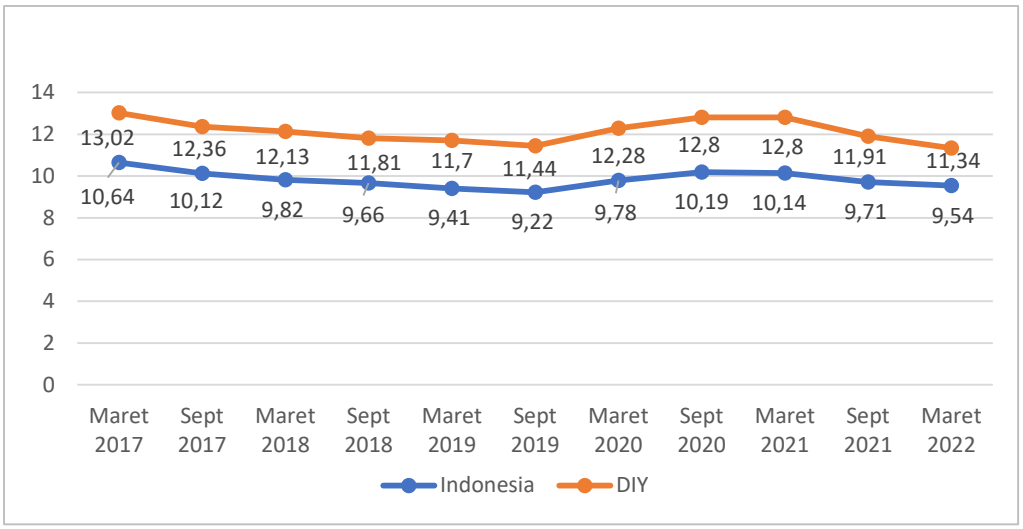

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-87 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2017 - Maret 2022)

Peningkatan kemiskinan di DIY pada September 2020 diduga terjadi karena pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Namun, seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian, tingkat kemiskinan di DIY juga kembali menurun mulai September 2021. Pelonggaran pembatasan serta cakupan vaksinasi yang luas menyebabkan aktivitas ekonomi kembali meningkat.

Pada tingkat kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota ini sekaligus menggambarkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di DIY.

Tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2021 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 18,39%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,69% dan Kabupaten Bantul 13,5%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memilki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (12,8%) yaitu 8,12% untuk Kabupaten Sleman dan 7,27% untuk Kota Yogyakarta.

Tabel 2-187 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)

Nama Wilayah	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)
DIY	13,02	12,13	11,70	12,28	12,8
Kulon Progo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,38
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,5	14,04
Gunung Kidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Pemberantasan kemiskinan tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini. Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 % atau sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021). Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran

masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem agar arahan Presiden untuk kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024 dapat terwujud. Hal-hal yang masih menjadi permasalahan penanggulangan kemiskian khususnya kemiskinan ekstrem menurut Bappenas diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah
2. Keterbatasan kemampuan SDM penyelenggara
3. Belum semua daerah memilik kelembagaan TKPKD
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal
5. Pelaksaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
6. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan bagi masyarakat dapat terlaksana. Tanpa jaminan kesehatan maka masyarakat, khususnya yang berada pada ekonomi bawah bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi : pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan dan yang Kedua, dia akan berobat dengan melakukan berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dan sebagainya). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun kepemilikan jaminan kesehatan secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pendanaan Layanan Kesehatan Perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top up) layanan kesehatan perorangan, sedangkan sumber dana dari Pemerintah / Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang.

Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah *universal health coverage* (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95%. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Pencapaian ini bahkan melebihi angka cakupan nasional. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Permasalahan utama yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, ialah di mana seseorang tidak masuk dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS, padahal *updating* data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural.

Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

2.5.1.2 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan

secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2016 hingga 2022 digambarkan sebagai berikut:

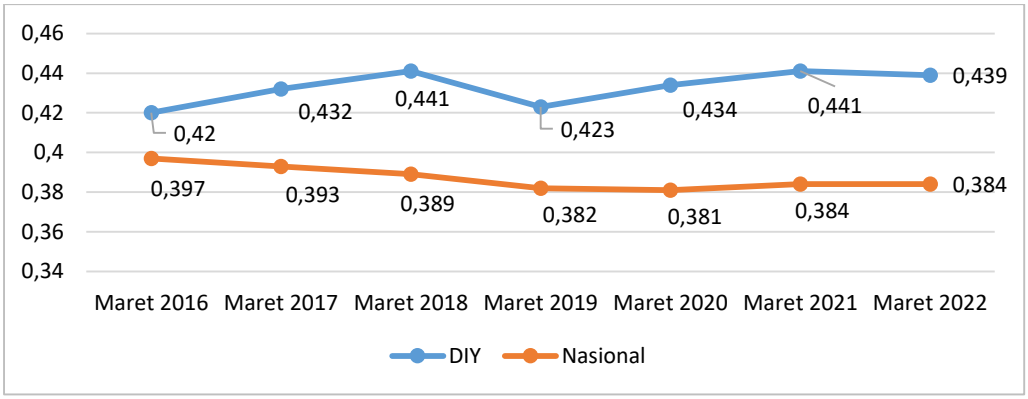

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-88 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun. Angka Indeks Gini DIY pada tahun 2021 menyamai tahun 2018 ketika terjadi krisis ekonomi global, sedangkan Indeks Gini Nasional pada tahun 2018 justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan DIY masuk ke dalam kategori ketimpangan sedang, namun Indeks Gini DIY merupakan yang tertinggi secara nasional. Kembali meningkatnya Indeks Gini DIY sejak tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021. Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan metode rasio gini adalah sebesar 0,439. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2021 yang besarnya 0,441. Rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,446 dan nilainya

lebih rendah dibandingkan rasio gini Maret 2021 yang sebesar 0,448. Rasio gini di daerah perdesaan pada Maret 2022 mencapai 0,332. Rasio gini tersebut lebih rendah bila dibanding rasio gini Maret 2021 sebesar 0,334.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan adanya daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan adanya daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah. Secara kewilayahan, tingkat ketimpangan pendapatan di daerah perdesaan mengalami kecenderungan menurun, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang cenderung meningkat. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di perdesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.

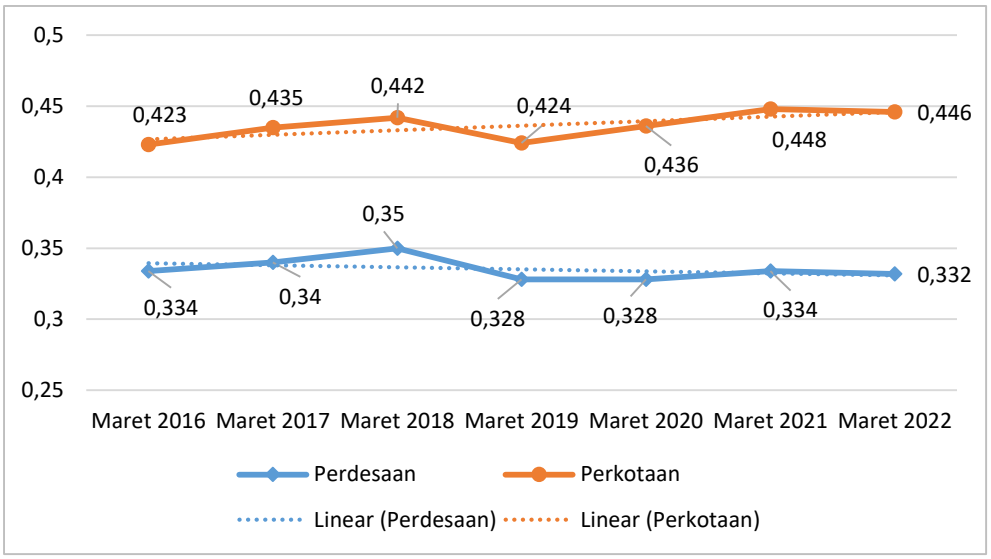

Sumber: BPS Provinsi DIY (Data Diolah)

Gambar 2-89 Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022

2.5.1.3 Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Gambaran perkembangan Indeks Williamson DIY disajikan dalam gambar berikut:

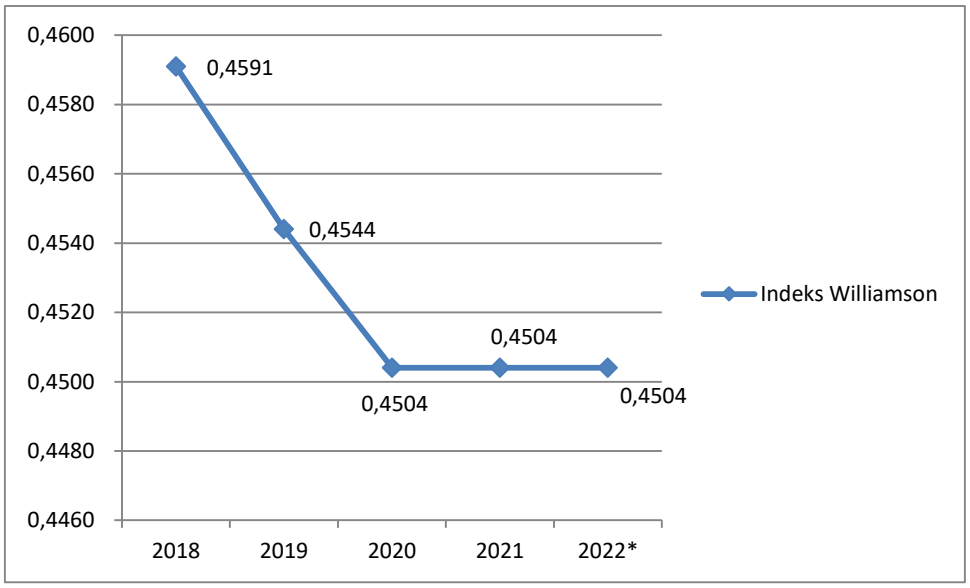

Sumber: BPS Provinsi DIY 2021, Jogja Dataku diakses 10 Februari 2023

Gambar 2-90 Indeks Williamson DIY Tahun 2018-2022

Nilai Indeks Williamson DIY Tahun 2021 adalah 0,4504. Indeks tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode 2018 sampai 2020 yang turun dari 0,4591 menjadi 0,4504. Nilai Indeks Williamson tetap sampai dengan tahun 2022 yang berarti tidak ada penurunan atau peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di Kabupaten/Kota DIY. Proporsi realisasi investasi rata-rata terbesar pada tahun 2018 - 2022 berada di Kota Yogyakarta (36%). Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 7%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor sekunder dan terserier.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi IPM yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 87,69 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,31) dan Bantul (80,69) masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 75,46 dan Gunungkidul sebesar 70,96 termasuk dalam kategori "Tinggi". Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi. Data IPM pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,28 tahun) dan terendah di Bantul (73,9 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran perkapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran perkapita Kota Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2022 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Gunungkidul.

2.5.1.4 Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana

Keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu yang krusial. Gagasan mengenai konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai SDGs. Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya

alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Statistik Lingkungan Hidup DIY Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS, beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh DIY antara lain menurunnya kuantitas dan kualitas air, menurunnya kualitas sumberdaya hutan dan lahan akibat bencana alam dan ulah manusia terutama pencurian kayu, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya pencemaran air.

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53. Jika dirinci per komponen penyusun IKLH, kondisi yang mengalami penurunan terjadi pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA pada tahun 2018 sebesar 40,25 menjadi 35,42 pada tahun 2021. Sedangkan, IKTL sebesar 60,86 pada tahun 2018 menurun menjadi 58,34 pada tahun 2021. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) justru mengalami perbaikan dari sebesar 84,24 pada tahun 2018 menjadi 88,57 pada tahun 2021. Penurunan kualitas air juga terkonfirmasi melalui data pencemaran air sungai. Berdasarkan data tahun 2021., yang disampaikan DLHK DIY, bahwa secara rata-rata kandungan *Biological Oxygen Demand* (BOD) di Sungai Code adalah 21,15 mg/L. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang melebihi ambang batas maksimum nilai baku mutu klas I yaitu 2 mg/l. Demikian juga kandungan *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada air Sungai Code yang rata-rata sebesar 56,80 mg/L. Hal tersebut berada di atas nilai baku mutu klas I yang ditetapkan (10 mg/l).

Pembangunan di DIY juga harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. Hal ini mengingat DIY diidentifikasi mempunyai beberapa kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman serta sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di semua kabupaten di DIY, sedangkan gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Wilayah DIY juga mempunyai beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Hasil pendataan Pusat Data *Emergency Operation* (PAMOR) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan bulan oktober terjadi 1.654 kali kejadian bencana di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 566 kali gempabumi (skala kecil), 526 kali tanah longsor dan 234 kali angin kencang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data kejadian bencana di DIY sepanjang tahun 2021 terjadi sebanyak 907 kejadian bencana dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 274 kali tanah longsor, 190 kali angin kencang dan 151 kali kebakaran. Sementara pada tahun 2020 terjadi 1412 kejadian bencana di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 423 kali tanah longsor, 339 kali angin kencang dan 226 kali kebakaran.

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.5.2.1.1 Urusan Pendidikan

1.) Belum meratanya layanan pendidikan yang berkualitas.

Berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan wawasan keilmuan seperti halnya sekolah, perpustakaan, laboratorium, jaringan jalan di pedesaan, dan lainnya telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik namun belum merata persebarannya, masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah DIY. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Menurut BPS tahun 2022 HLS Indonesia sebesar 13,10 tahun. Untuk wilayah DIY, HLS rata-rata 15,65 atau berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, HLS di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY, bahkan HLS Gunungkidul sebesar 13,33 tahun merupakan yang terendah di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan di DIY.

2.) Mutu pendidikan yang belum optimal

Mutu pendidikan dapat diukur melalui Akreditasi Sekolah. Data sampai dengan akhir tahun 2021persentase sekolah SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY mencapai 81,89%. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi atau capaian akreditasinya belum mencapai A sebanyak 19,11%. Pada sisi lain, keberhasilan pendidikan yang bermutu juga diukur dari raport pendidikan dua hal yang utama adalah asesmen terhadap kemampuan literasi dan numerasi dan keterserapan Lulusan SMK. Pada tahun 2022 secara umum capaian kemampuan literasi sekolah SMA/SMK dan Sederajat di DIY dalam kategori Mencapai Kompetensi Minimum, sedangkan kemampuan Numerasi pada jenjang SMA dan Sederajat pada kategori Mencapai Kompetensi Minimum, sedangkan jenjang SMK dan Sederajat masih di bawah kompetensi minimum. Pada aspek penyerapan SMK di dunia kerja pada kategori tinggi dengan catatan pilihan berwirausaha lulusan SMK pada kategori Masi Perlu Peningkatan.

3.) Masih terjadinya disparitas aksesibilitas pendidikan penduduk antar wilayah

Berdasarkan data perkembangan rata-rata lama sekolah di DIY sejak tahun 2017-2021, kabupaten/kota yang capaiannya rata-rata lama sekolah di atas DIY yaitu Kota Yogyakarta dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling tinggi disusul Sleman dan Bantul. sedangkan untuk daerah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY. Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta yang paling tinggi di DIY pada angka 11,72 di tahun 2021, cukup jauh capaiannya dibandingkan Gunungkidul memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang paling rendah di DIY dengan nilai sebesar 7,30 tahun pada 2021. Perbedaan yang signifikan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, merupakan indikasi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. hal ini dikuatkan pada hasil raport pendidikan 2022 pada jenjang SMA/SMK dan sederajat juga terlihat kesenjangan indeks karater antar wilayah bercorak urban dan rural di DIY.

4.) Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah

Rendahnya minat penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tercermin pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Masih banyak tenaga kerja yang pendidikan yang tidak bersekolah/belum pernah sekolah dan menamatkan pendidikan dasar denganpersentase

41,42% di tahun 2021. Tenaga kerja dengan jenjang Pendidikan menengah sebesar 40,05% dan jenjang diploma/universitas sebanyak 13,71%. Masih tingginya penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, belum tamat SD, dan jenjang pendidikan dasar tersebut berpotensi menyebakan daya saing dan kualitas ketenagakerjaan rendah.

2.5.2.1.2 Urusan Kesehatan

1.) Tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa beberapa PTM berada di atas rata-rata nasional seperti penyakit jantung, hipertensi, Diabetes Melitus, Stroke, Kanker, Asma, Penyakit Ginjal Kronis, dan termasuk gangguan jiwa.

PTM seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. Tingginya prevalensi PTM di DIY berbanding lurus dengan tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY. Hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber-PHBS di tahun 2020 baru mencapai 42%, dengan indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok di dalam rumah.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan PTM adalah perubahan struktur penduduk DIY dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring dengan tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi di DIY. Kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat.

Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu : a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas

SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.

2.) Tingginya kasus beberapa Penyakit Menular

Beberapa penyakit menular yang menjadi permasalahan utama secara nasional menurut Kementerian Kesehatan RI adalah HIV AIDS, Tuberkulosis (TBC), malaria sedangkan untuk DIY selain ketiga penyakit menular di atas, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi permasalahan karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kasus kematian akibat DBD.

Pada tahun 2021, jumlah akumulasi kasus HIV di DIY sebanyak 5.954 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 81 kasus. Penemuan kasus baru HIV lebih banyak ditemukan pada laki-laki (68,5%) dengan kasus tertinggi pada rentang usia 25-49 tahun. Sedangkan kasus baru AIDS sebanyak 94 kasus dengan kasus terbanyak pada rentang usia 40-49 tahun. Upaya-upaya peningkatan pemahaman terhadap HIV AIDS dan menghilangkan stigma HIV AIDS di masyarakat diharapkan akan menguatkan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di DIY.

Untuk penyakit TBC, *success rate* penyakit TBC pada tahun 2021 sebesar 88,05% meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 85,40. Permasalahan penanganan TBC di DIY adalah masih rendahnya cakupan penemuan TBC *(case detection rate)* yaitu 3.308 kasus dari target penemuan sebesar 9.074. Pelibatan peran lintas sektor dan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan cakupan penemuan kasus TBC di DIY.

Penyakit menular lain yang menjadi perhatian di DIY adalah malaria. Meskipun seluruh kabupaten/kota di DIY telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria, tetapi masih ada kasus malaria di yang terjadi. Daerah perbukitan menoreh merupakan daerah endemis malaria yang penangananya diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah perbukitan menorah.

Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit menular yang memerlukan perhatian di DIY karena tingginya kasus dan angka kematianya seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan HIV-AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2021 kasus DBD di DIY sebanyak 1.188 menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak

3.623. Kasus dengan kematian akibat DBD di DIY tahun 2021 sebanyak 12 orang dengan jumlah kematian terbanyak di Kabupaten Kulon Progo.

Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillans berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.

3.) Prevalensi Balita *Stunting* di DIY masih Cukup Tinggi

Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi balita stunting di DIY sebesar 17,3% sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY prevalensi balita stunting di DIY tahun 2020 sebesar 11,08% dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,40%.

Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal sehingga diperlukan peran multi sektor multi *stakeholder* dalam pencegahan dan penangananya. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melaui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung stunting seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.

4.) Distribusi Tenaga Medis yang belum Merata

Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebaranya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten. Ketimpangan ini seperti terlihat dari data jumlah tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), jumlah dokter umum di Kabupaten Sleman (713 orang) dan Kota Yogyakarta (377 orang) yang sebesar 1090

orang bila dibandingkan dengan 3 kabupaten (Kabupaten Bantul 157 orang, Kabupaten Kulon Progo 152 orang, dan Kabupaten Gunungkidul 205 orang) lain yang sebesar 514 orang terdapat perbedaan yang cukup besar.

Upaya yang perlu dilakukan yaitu pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layananan dan penguatan layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan seperti di daerah selatan DIY dan jalur perbukitan menoreh sebagai antisipasi terjadinya permasalahan-permasalahn kesehatan di daerah tersebut

5.) Angka Kematian Ibu masih belum bisa ditekan

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dari yang sebelumnya sebanyak 40 kasus di tahun 2020 menjadi 131 kasus di tahun 2021 karena dalam masa pandemi covid 19. Dari 131 kasus kematian ibu di tahun 2021, 80 diantaranya karena terpapar covid 19, selain itu pandemi covid 19 menyebabkan kendala terhambatnya layanan Kesehatan Ibu dan Anak. Seiring dengan menurunnya kasus covid di tahun 2022, terjadi pula penurunan kasus kematian ibu menjadi 43 kasus di tahun 2022. Mekipun terjadi penurunan kasus kematian ibu melahirkan di tahun 2022, masih menjadi perhatian di DIY dalam pencegahan dan penanganannya.

Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi covid-19 perlu dilakukan inovasi dan adaptasi untuk meminimalisir resiko covid-19.

6.) Adanya Ancaman Wabah

Hasil kajian Indeks Resiko Bencana DIY di tahun 2020 menunjukkan bahwa resiko bencana di DIY. Kondisi ini menuntut kewaspadaan dini dan upaya penanganan termasuk di sektor kesehatan. Selain itu perlu diwaspadai munculnya penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah akibat perubahan iklim, mobilitas penduduk, dan kondisi lingkungan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal diamatkan bahwa

kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan.

Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.

7.) Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta / *Universal Health Coverage* (UHC) agar seluruh penduduk memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.

Sampai dengan periode Januari 2022, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Yogyakarta mencapai 92,42% artinya pada tahun 2022 DIY tidak mencapai UHC dengan kata lain masih ada penduduk yang belum mendapat akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permasalahan kepesertaan menjadi permasalahan utama dalam pencapaian UHC di DIY, hal ini dikarenakan belum sinkronya data kepesertaan PBI JKN dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemda DIY bersama mitra *stakehoder* secara rutin telah melaksanakan koordinasi kepesertaan PBI JKN di DIY, namun beberapa kendala masih dihadapi dalam pendataan kepesertaan PBI JKN yaitu *updating* data yang sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh kabupaten/kota di DIY setelah diusulkan ke Kementerian Sosial RI tidak menjadi bagian dari *updating* DTKS sebagai dasar penentuan penerima program JKN KIS. Selain itu, kendala terbatasnya akses data BPJS Kesehatan terkait

pelaksanaan program JKN di wilayah kerja menyebabkan data kepesertaan masih belum selaras dengan data yang dimiliki Pemda DIY.

Upaya-upaya yang dilakukan terkait permasalahan tersebut yaitu sinkronisasi data kepesertaan dengan BPJS Kesehatan dan kabupaten/kota dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI JKN yang sebagai usulan *updating* penerima PBI JKN dalam DTKS.

Dari sisi pelayanan jaminan kesehatan, Pemda DIY melalui Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial DIY (BapelJamkesos DIY) menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Layanan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta. Jaminan Kesehatan Semesta merupakan sistem jaminan kesehatan di DIY yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat. Penerima manfaat dari layanan Jamkesta adalah Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga yang meliputi masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kelompok masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang secara regulasi. Penerima manfaat lain adalah penyandang disabilitas miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan paket manfaat meliputi layanan kesehatan umum dan layanan alat bantu.

2.5.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.) Sub. Urusan Sumber Daya Air dan Drainase

a.) Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan/atau irigasi pertanian rakyat belum mencukupi pada waktu dan wilayah tertentu.

Wilayah DIY masuk dalam DAS Progo Opak-Oyo Serang. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, dan DAS OYO serta DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 7.807 juta m^3. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan pada tahun 2021 sebesar 1.605 juta m^3.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, Namun pada kenyataannya, saat waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mencukupi berdasarkan pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Selain itu pada beberapa wilayah potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Pemenuhan kebutuhan air baku dapat dilakukan melalui pembangunan bendung/waduk, embung, sumur air tanah dalam, dan seterusnya. Sampai dengan saat ini pemenuhan air baku pada daerah sulit air melalui sumur air tanah dalam telah terlayani sebanyak 31 titik dari 151 titik di seluruh kabupaten di DIY, sehingga masih ada 120 titik yang belum terlayani. Untuk pembangunan embung masih perlu dilakukan penambahan embung baru hingga saat ini baru ada 25 embung, Sementara air untuk irigasi, dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY, baru 12.136,85 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13.987 ha atau setara dengan 86,77%.

b.) Sebagian besar daerah irigasi kewenangan pemda DIY belum mencapai indeks kinerja daerah irigasi kategori optimum.
Kinerja layanan irigasi dipengaruhi oleh faktor fisik atau prasarana yang meliputi kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam rangka peningkatan kinerja layanan sistem irigasi keseluruhan faktor tersebut perlu dilakukan peningkatan.

Indeks kinerja daerah irigasi diukur dari parameter kondisi jaringan irigasi, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A. Indeks kinerja daerah irigasi masuk dalam kategori optimum apabila nilainya di atas 77,5%. Berdasarkan data tahun 2022 dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemda DIY, baru 12.136,85 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13,987 ha atau setara dengan 86,77%. Adapun daerah irigasi kewenangan Pemda DIY saat ini yang masuk dalam kategori indeks kinerja optimum saat ini adalah DI Mojo dan DI

Sembuh, dengan nilaipersentase total yaitu 0,58%. Masih banyak daerah irigasi yang belum masuk dalam kategori optimum.

c.) Masih terdapat daerah yang mengalami genangan.
Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga memerlukan sinkronisasi dan kesepakatan dalam penanganan pengelolaan wilayah sungai, termasuk kesepakatan dalam penanganan drainase, dimana perlu adanya pemetaan yang dilakukan oleh Pusat hal-hal terkait drainase yang perlu ditangani oleh Provinsi DIY. Total genangan yang ada adalah sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, yang sudah ditangani seluas 5,44 ha, setara 34 titik sehingga masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik.

d.) Wilayah DIY rawan terhadap daya rusak air.
Wilayah DIY memiliki sumber bencana alam yang tersebar mulai dari gunung berapi, sesar/patahan, erosi dan tanah longsor, hingga potensi banjir dan tsunami. Erupsi gunung api Merapi berpotensi menimbulkan awan panas hingga banjir lahar dingin. Permasalahan banjir juga terjadi di beberapa WS POS. Hal ini disebabkan karena antara lain curah hujan yang tinggi, kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, adanya endapan atau sedimen di muara sungai (delta), atau karena daerah banjir yang memang merupakan dataran rendah. Pada saat ini penambangan bahan galian mineral yang banyak dilakukan di sepanjang sungai-sungai khususnya di sungai wilayah sungai Progo-Opak-Serang (WS POS) berdampak pada lingkungan diantaranya terhadap stabilitas bangunan sarana prasarana sungai, terhadap morfologi sungai yaitu terjadinya penurunan dasar sungai yang cukup signifikan dan berakibat kurang berfungsinya bangunan pengairan serta mengancam stabilitas bangunan pengairan dan prasarana lain. Pada saat kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang sering dihadapi oleh sebagian penduduk di sebagian wilayah di WSPOS terutama di daerah dengan dengan formasi geologi spesifik seperti di Gunungkidul dan Kulon Progo. Pada sisi selatan wilayah DIY mempunyai potensi abrasi dan banjir rob. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap sarana prasarana khususnya pada kawasan selatan apabila tidak dilakukan mitigasi bencana. Berdasarkan data Pusdalop

BPBD DIY tahun 2022, bencana tanah longsor pada tahun 2021 terjadi 351 kejadian, bencana banjir terjadi 12 kejadian, bencana gempa bumi terjadi 245 kejadian, dan bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sejumlah 18 kejadian. Dari data tersebut kejadian bencana tanah longsor lebih mendominasi dibandingkan bencana lainnya.

2.) Sub. Urusan Jalan

a.) Kondisi kemantapan jaringan jalan di DIY masih rendah.
Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kondisi jaringan jalan kewenangan DIY belum seluruhnya dalam kondisi mantap, belum memenuhi standar teknis jalan dan standar keselamatan jalan.

b.) Total panjang ruas jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur No. 118/Kep/2016 sebesar 760,450 kilometer. Kondisi kemantapan jaringan jalan provinsi di DIY pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 71,56% kondisi mantap di tahun 2020, 70,52% kondisi mantap pada tahun 2021, dan di tahun 2022 kondisi jalan mantap 70,18%, sehingga pada tahun 2022 masih ada 29,82% jalan tidak mantap atau setara dengan 226,765 kilometer jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kondisi kemantapan jalan akan menurun apabila penanganan jalan tidak dilakukan dengan optimal. Pada tahun 2022 ini SK Fungsi Jalan Nasional sudah ditetapkan sehingga berdampak pada panjang ruas jalan provinsi di DIY. Beberapa ruas jalan provinsi di DIY berpindah fungsi. Berdasarkan hasil inventarisasi, jalan provinsi yang berpindah fungsi adalah jalan provinsi yang dalam kondisi mantap, sehingga hal ini menambah penurunan kondisi kemantapan jalan provinsi di DIY.

c.) Aksesibilitas jalan di DIY untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud.
Perwujudan aksesibilitas jalan sesuai dengan RTRW DIY dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan jalan berupa:
(1) Pembangunan dan Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
(2) Pengembangan Jaringan Jalan Ruas Jalan Legundi–Gesing penghubung Panggang–Legundi–Gesing

(3) Pembangunan dan peningkatan jalan konektivitas Bandara YIA dengan KSPN Borobudur (Ruas jalan Sentolo–Nanggulan–Dekso–Klangon dan Ruas Jalan Temon–Tegalsari–Samigaluh–Suroloyo–Klangon)
(4) Pembangunan jalan bebas hambatan Ruas Yogyakarta–Bawen dan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo
(5) Pengembangan Jogja Outer Ringroad (JORR) pada ruas Sentolo–Minggir; Minggir–Tempel; Tempel–Prambanan; Sentolo–Imogiri; Imogiri–Piyungan; dan Piyungan–Prambanan.

Sampai dengan tahun 2022 pengembangan jaringan jalan JJLS untuk pengembangan kawasan Selatan masih menyisakan pembangunan jembatan Srandakan 3 dan ruas Kretek–Girijati yang belum mendapatkan kepastian sumber pendanaan. Pembangunan jalan tol di wilayah DIY telah dimulai proses konstruksinya dan direncanakan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Aksesibilitas dari bandara YIA ke KSPN Borobudur telah terlayani melalui peningkatan ruas jalan Sentolo–Nanggulan–Dekso–Klangon. Adapun untuk ruas Temon–Borobudur direncanakan tindak lanjut akan dimulai seiring penetapan IPL tol Yogyakarta–Kulon Progo.

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah masih diperlukan pembangunan ruas jalan. Pengembangan konektivitas melalui pembangunan ruas jalan Prambanan–Gading sebagai alternatif aksesibilitas untuk mendukung potensi Kabupaten Gunungkidul, ditargetkan sampai dengan tahun 2022 adalah 15,67 kilometer atau 56,61% dari total panjang 27,68 kilometer, sehingga masih terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan–Gayamharjo sepanjang 9,18 kilometer dan Ngoro-Oro (Tawang)–Ngalang 2,83 kilometer. Konektivitas antar wilayah juga dilakukan untuk mendukung struktur ruang khususnya di kawasan Pansela yaitu melalui jalan strategis provinsi ruas Panggang–Legundi–Gesing. Pembangunan ruas jalan tersebut masih diperlukan yaitu pada segmen Legundi–Gesing sepanjang 11 kilometer.

3.) Sub. Urusan Cipta Karya

a.) Capaian akses air minum layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses air minum aman.

Capaian penduduk berakses air minum tahun 2022 di DIY adalah 94,77% dengan kondisi akses air minum aman yaitu 27,34% yang

diperoleh dari data pendudukDIY yang telah memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota. Peningkatan akses air minum aman dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah penduduk yang memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota. Berdasarkan rencana induk SPAM Regional DIY terdapat 4 SPAM Regional yang akan dikembangkan. Sampai dengan tahun 2022 hanya SPAM Regional Kartamantul yang telah terselesaikan pembangunannya dengan kapasitas air curah 700 liter/detik atau setara dengan 104.704 sambungan rumah dan diharapkan dapat mensuplai kebutuhan air minum pada PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota di Kartamantul, namun penyerapan sampai dengan tahun 2022 diperkirakan hanya sebesar 17,94% sesuai dengan *Bussiness Plan* PDAB Tirtatama.

b.) Capaian akses sanitasi layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses sanitasi aman.
Akses sanitasi layak di DIY pada tahun 2022 adalah 96,45% di mana 21,36%nya berakses aman. Rendahnya akses aman disebabkan karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik terpusat regional, serta pengolahan persampahan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman adalah melalui penyediaan pengolahan limbah domestik/rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan limbah terpusat. Sistem IPAL Terpusat Sewon saat ini telah memiliki kapasitas pengolahan sebesar 75.000 SR dengan kondisi jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga yang tersambung yaitu 26.188 SR atau 34,92%. Peningkatan jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan sanitasi aman di DIY. Pengelolaan sampah di DIY sekitar 78,8% sampah dikelola sesuai dengan ketentuan yaitu 54,44% penanganan (sampah diangkut ke TPA) dan pengurangan sebesar 24,36%. Masih ada sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. Penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan masih diperlukan dalam rangka penyiapan pengolahan sampah berbasis teknologi, meliputi penyediaan tampungan sampah yaitu konstruksi sel baru di TPA transisi Piyungan dan pematangan lahan, pengadaan lahan, serta penyediaan sarana prasarana lainnya seperti penanganan drainase kawasan permukiman

di TPA Piyungan, penanganan lindi, perkuatan tanggul, penanganan jalan di dalam kawasan, dan pemasangan pagar dan buffer zone.

c.) Pengelolaan bangunan gedung Negara baru dilakukan sebatas pelayanan rekomendasi pembangunan/rehabilitasi, belum tersedia peta jalan menuju bangunan gedung Negara yang andal di wilayah DIY. Keandalan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan kemudahan bangunan gedung sehingga terwujud penyelenggaraan bangunan gedung negara yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Keandalan bangunan gedung secara legal diperoleh dari dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF). Sampai dengan saat ini belum tersedia data terkait capaian keandalan gedung di DIY sehingga diperlukan data dasar dan peta jalan untuk mencapai keandalan bangunan gedung. Layanan yang dilakukan sampai dengan tahun 2022 adalah dalam hal rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung Negara. Rasio pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara masih rendah, tercermin dari kemampuan dalam pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung pada tiap tahunnya hanya mampu 15 bangunan gedung negara.

d.) Penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagai upaya perwujudan pola dan struktur ruang belum dilakukan pada semua satuan ruang strategis.

Berdasarkan Perdais DIY Nomor Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten, perwujudan pola dan struktur ruang pada satuan ruang strategis salah satunya diwujudkan melalui penataan kawasan yang meliputi bangunan gedung dan lingkungannya. Dari 18 satuan ruang strategis yang ada fokus pelaksanaan penataan kawasan dengan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan berada pada kawasan sumbu filosofis. Penyediaan infrastruktur pedestrian yang telah dilakukan akan dilanjutkan dengan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) sebagai ikon baru di kawasan sumbu filosofi yang akan menjadi pusat kebudayaan. Pembangunan JPG sekaligus menjadi visi dan strategi yang dilakukan

dalam pengejawantahan masa lalu dan perencanaan pengembangan DIY di masa mendatang.

Pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan satuan ruang strategis akan dilakukan mengikuti dokumen perencanaan pada masing-masing SRS, baik berupa rencana induk atau RTBL.

4.) Sub. Urusan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

a.) Perwujudan layanan jasa konstruksi belum maksimal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kewenangan pemerintah daerah provinsi pada sub urusan jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga/badan seperti lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional dan badan nasional sertifikasi profesi. Pada tahun 2022 terdapat permintaan tenaga ahli mencapai 12.008 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 4.433 orang dengan asumsi satu tenaga ahli menangani 3 sampai dengan 4 proyek. Capaian tenaga ahli konstruksi bersertifikat di tahun 2022 adalah 63,30% yaitu 1.725 orang dari target 2.725 orang, di mana dalam pemenuhan syarat sertifikasi, diperlukan pelatihan tenaga ahli. Berdasarkan data tersebut maka penyediaan tenaga kontruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi masih belum mencukupi kebutuhan.

Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi di tahun 2022 adalah 75,09% diperoleh dari pembobotan unsur layanan informasi yang terdiri dari profil tim pembina jasa konstruksi provinsi, potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, serta paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala. Layanan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan hanya dapat menampilkan paket bersumber dari dana APBD karena tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi bersumber dari APBN dan sumber pendanaan lainnya tidak bisa terpenuhi. Penyediaan layanan informasi

jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.

Layanan jasa pengujian yang dilakukan oleh pemda DIY telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa penyedia jasa konstruksi baik di DIY maupun di luar DIY. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengujian di laboratorium konstruksi telah terakreditasi. Dalam rangka mempertahankan akreditasi laboratorium harus selalu dilakukan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI. Persyaratan sumber daya yang meliputi SDM berkualitas dan sarana prasarana pendukung untuk operasional pengujian jasa konstruksi harus dilakukan peningkatan untuk mempertahankan akreditasi laboratorium jasa konstruksi.

5.) Sub Urusan Penataan Ruang

a.) Dokumen Rencana Tata Ruang belum sesuai dengan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DIY dan Strategi Pengembangan Wilayah (SPW) pada 18 Satuan Ruang Startegis (SRS) DIY wajib dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sampai tahun 2022, dari total 1 RTRW Provinsi DIY dan 5 RTRW Kab/Kota, baru terdapat dua yang telah ditetapkan sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2021 yaitu RTRW Kota Yogyakarta melalui Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021 dan RTRW Kabupaten Sleman melalui Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2021. Saat ini, RTRW DIY sedang proses revisi menyesuaikan PP No. 21 Tahun 2021 dan direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2023. Sedangkan RTRW Kabupaten Gunungkidul, RTRW Kabupaten Bantul dan RTRW Kabupaten Kulon Progo masih dalam tahap revisi yaitu pada tahapan proses konsultasi dan asistensi untuk memperoleh surat keterangan kesesuaian substansi melalui penyesuaian kawasan hutan, LSD dan penyesuaian basis data.

Untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kota Yogyakarta telah menyelesaikan untuk seluruh kecamatan, namun pada 4 kabupaten yang lain belum semua RDTR telah tersusun dan diterbitkan. Dari total 25 RDTR yang direncanakan di wilayah DIY, baru tersedia 4 (empat)

RDTR yang telah terintegrasi OSS dan ditetapkan pasca terbitnya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yaitu RDTR Kawasan Sleman Timur, RDTR Kawasan Sleman Barat, RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Siung-Wediombo dan RDTR Kota Yogyakarta.

RDTR yang sedang berprogres yaitu: (1) Tahap penyusunan RDTR sebanyak 9 RDTR diantaranya Kabupaten Sleman (RDTR Sleman Tengah), Kabupaten Bantul (RDTR Pantai Selatan, RDTR Perkotaan Bantul), Kabupaten Gunungkidul (RDTR Patuk, RDTR Perkotaan Wonosari, RDTR Pantai Selatan Bagian Timur), dan Kabupaten Kulon Progo (RDTR Perkotaan Kalibawang, RDTR Perkotaan Wates, RDTR BOB, RDTR Perkotaan Kokap), (2) Tahap pra loket di Kementerian ATR/BPN sebanyak 1 RDTR yakni RDTR Pantai Selatan Kabupaten Bantul dan (3) tahap menuju rapat koordinasi lintas sektor di Kementerian ATR/BPN sebanyak 1 RDTR yakni Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan RDTR yang belum disusun terdapat (10) RDTR diantaranya, Kabupaten Sleman (RDTR Sleman Utara), Kabupaten Bantul (RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur), Kabupaten Gunungkidul (RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah, RDTR Pantai Selatan Bagian Barat, RDTR Baturagung Barat, RDTR Barturagung Timur), Kabupaten Kulon Progo (RDTR Kulon Progo Utara, RDTR Kabupaten Kulon Progo Selatan dan RDTR Kulon Progo Tengah).

b.) Kesesuaian pemanfaatan ruang belum maksimal
Hasil penilaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2022 mencapai 82,62% dengan pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 12,18% (kawasan lindung 0%, tubuh air 0%, dan kawasan budidaya 12,92%) dan yang tidak sesuai sebesar 5,21% (kawasan lindung 13,22% , tubuh air 0% dan kawasan budidaya 4,82%).

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung paling besar pada kawasan sempadan sungai (23,51%) dan di kawasan budidaya paling besar pada kawasan peruntukan industri (34,56%). Sedangkan selama 20192022 peningkatan ketidaksesuaian terjadi pada pola ruang sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perubahan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi menjadi kawasan

permukiman yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan zonasi RTRW.

Persentase pola ruang yang belum terwujud terbesar pada kawasan budidaya peruntukan Kawasan Industri (63,74%), Permukiman Perkotaan (21,21%), dan Pelabuhan (37,88%). Peruntukan Kawasan Industri sebanyak 63,74% masih belum terwujud karena jumlah investor yang masuk dan infrastruktur belum optimal.

c.) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil Audit Tata Ruang Tahun 2021 terdapat 12 objek prioritas penanganan untuk ditindaklanjuti dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang pada tahun 2022. Dari 12 objek tersebut 5 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah DIY, 4 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat (Kementerian ATR/BPN) dan 3 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

Pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY. Berdasarkan kegiatan tersebut masih terdapat 182 indikasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditapis berdasarkan kriteria pola ruang yang terdiri dari Kabupaten Bantul sebanyak 25 indikasi, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 32 indikasi, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 58 indikasi, Kabupaten Sleman sebanyak 64 indikasi dan Kota Yogyakarta sebanyak 3 indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran tersebut akan digunakan sebagai dasar objek melakukan audit tata ruang.

Pemerintah Daerah DIY sudah melakukan tindak lanjut berupa pengenaan sanksi administrasi dengan melakukan pemasangan papan peringatan. Pemerintah Daerah DIY juga melakukan koordinasi terhadap upaya tindak lanjut penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten. Kendala yang ada dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang adalah belum adanya Peraturan Gubernur tentang Sanksi Administrasi sehingga yang dijadikan dasar dalam pengenaan sanksi administrasi masih menggunakan Peraturan Menteri serta belum tersedianya PPNS Penataan Ruang atau inspektur pembangunan.

Upaya tindak lanjut ke depan adalah menyusun Materi Teknis tentang Sanksi Administratif untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar ASN Pemda DIY dapat diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan Inspektur

Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang

d.) Dokumen Rencana Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Belum Lengkap

Dalam Perdais 2 Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) dokumen rencana yang diamanahkan untuk disusun yakni Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Induk (RI) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja RRTR tidak perlu disusun, namun dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Pusat karena dasar Perdais tersebut tetap diperbolehkan dengan berganti menjadi Strategi Pengembangan Wilayah (SPW), dan pada saat ini sedang dalam tahapan penetapan Peraturan Gubernur.

Sampai tahun 2022, terhadap RRTR SRS telah ditetapkan SK Gubernur No. 10/Kep/2022 tentang Delineasi SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan telah tersusun 18 dokumen materi teknis RRTR SRS yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rapergub Strategi Pengembangan Wilayah SRS. Untuk RI SRS, telah dilakukan penyusunan mulai tahun 2019 sampai 2022 sebanyak 7 RI dari total kebutuhan 18 RI. Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan RI diklasterisasi menjadi 9 klaster antara lain tahun 2023 terdapat 4 klaster, tahun 2024 terdapat 2 klaster, tahun 2025 terdapat 2 klaster dan tahun 2026 terdapat 1 klaster. Sedangkan untuk RTBL SRS sampai dengan saat ini sudah tersusun sebanyak 16 RTBL yang tersebar pada 18 SRS.

e.) Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang pada SRS

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) di DIY. Persentase kesesuaian untuk keseluruhan 18 SRS pada tahun 2022 sebesar 82,71 %, sedangkan hasilpersentase ketidaksesuaiannya sebesar 3,24 %. Tipologi wilayah tiap SRS yang berbeda menghasilkan perbedaan hasil analisis untuk setiap wilayahnya, sesuai keistimewaannya masing- masing. Nilai ketidaksesuaian masih tergolong kecil untuk wilayah SRS DIY secara keseluruhan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan yaitu penyusunan arahan / insentif dan disinsentif dalam pelanggaran / pencegahan pelanggaran bangunan dan Sinkronikasi terkait dengan peraturan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten

Kendala yang dialami adalah belum tersusunnya Peraturan Gubernur mengenai sanksi adminstratif sehingga pengenaan sanksi masih didasarkan pada Peraturan Menteri yang bersifat umum.

2.5.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

1.) Penanganan rumah tidak layak huni di DIY belum dapat dituntaskan.

Penanganan rumah tidak layak huni di DIY dilakukan melalui program yang bersumber dari berbagai pendanaan baik dari anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lain. Penanganan RTLH dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 42.953 unit dari total target 65.578 unit. Hal ini menjadi salah satu faktor cukup tingginya capaian rumah layak huni di DIY. Berdasarkan data Susenas tahun 2022, jumlah rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di DIY telah mencapai 97,02%. Namun, penanganan belum dapat dituntaskan pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas karena beberapa keterbatasan anggaran, SDM, maupun sinkronisasi antar pelaku. Penanganan rumah tidak layak huni oleh pemda DIY akan diprioritaskan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan miskin ekstrem dan kawasan kumuh dengan luasan 10-15 ha atau kewenangan provinsi serta kapanewon miskin di DIY.

2.) Perubahan penetapan kawasan kumuh di wilayah DIY belum ditindaklanjuti untuk dilakukan penanganan.

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, sampai dengan tahun 2019 Pemda DIY telah melakukan penanganan kawasan kumuh 10 -15 ha secara tuntas. Pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan penyesuaian penetapan kawasan kumuh di tingkat Kabupaten/Kota. Namun, belum disepakati tindak lanjut yang menjadi pedoman penanganan.

3.) Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin.

Harga perumahan yang relatif semakin tinggi, dan kemudahan untuk menjangkau kepemilikan rumah pun semakin sulit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan syarat untuk mengakses kepemilikan perumahan pun semakin ketat, sehingga bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki

perumahan dan permukiman yang layak dan aman semakin sulit. Backlog kepemilikan perumahan di DIY tahun 2022 adalah 284.750 unit, dengan rincian Kulon Progo 7.079 unit, Bantul 62.680 unit, Gunungkidul 10.281 unit, Sleman 115.540 unit dan kota Yogyakarta 85.744 unit. *Backlog* penghunian perumahan di DIY tahun 2022 adalah 115.210 unit.

Tingginya harga lahan juga menyebabkan terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan untuk perumahan, sementara anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutamabagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat terbatas. Keterbatasan tersebut juga terkait dengan faktor alokasi pembangunan perumahan untuk pembangunan perumahan MBR yang belum optimal, penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin yang tidak *bankable*, pengaturan skema rumah sewa bagi masyarakat miskin yang benar-benar tidak bisa menyicil rumah tetapi perlu tempat tinggal dengan menyewa (rusunawa atau melalui skema pasar).

4.) Kawasan permukiman yang ditetapkan berdasarkan RTRW belum secara keseluruhan terlayani dengan prasarana sarana utilitas umum yang memadai.

Pada saat *ini* telah dilakukan penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) sebanyak 1.215 lokasi yang dilakukan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan kajian tahun 2021 kebutuhan PSU di Kabupaten Bantul dan Sleman saja adalah sebanyak 160 lokasi kawasan permukiman, di mana masing-masing lokasi memerlukan 3 sampai dengan 4 titik PSU. Sementara PSU yang telah dilakukan belum semua pada kawasan permukiman, sehingga masih banyak kawasan permukiman yang belum memiliki PSU yang memadai.

5.) Pelestarian budaya rumah tradisional jawa belum maksimal.

Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui pembangunan baru rumah layak huni (PB RLH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, merupakan bagian dari bantuan stimulan untuk masyarakat miskin yang memiliki rumah rusak berat atau tinggal dalam rumah yang memiliki luasan bangunan yang tidak sesuai standar yaitu, 7,2 m^2 per jiwa, atau terdapat lebih dari 1 (satu) KK yang tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang selama ini selalu mengutamakan pada struktur dan konstruksi ketahanan bangunan, menyebabkan rumah lebih banyak dibangun dengan gaya

modern. Pada lokasi– lokasi RTLH yang berada di pedesaan, seringkali rumah-rumah tradisional berganti menjadi rumah modern dan hal ini menyebabkan semakin berkurangnya rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional Jawa.

2.5.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1.) Angka Kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan, cenderung meningkat.

Stabilitas dan kondusivitas wilayah merupakan salah satu prasyarat utama dalam kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Banyak aspek yang dapat menjadi tolok ukur dalam tercapainya stabilitas dan kondusivitas wilayah, salah satunya terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun faktanya kasus kejahatan, khususnya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja cenderung mengalami peningkatan, sehingga sedikit banyak menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data dari POLDA DIY angka kejahatan jalanan di DIY relatif fluktuatif. Namun, secara spesifik kasus kejahatan jalanan di DIY tahun 2022 meningkat secara signifikan hingga mencapai 86 kasus. Berdasarkan data tersebut secara umum kasus kejahatan jalanan di DIY relatif tinggi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat karena jika tidak dilakukan langkah pencegahan segara akan menjadi potensi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat berujung pada perpecahan. Terlebih bahwa DIY menjadi pusat dari lembaga pendidikan serta pariwisata yang menjadi magnet kedatangan dari banyak masyarakat daerah lain bahkan manca negera. Untuk perlu dilakukan berbagai langkah dalam rangka cegah dini dan deteksi dini potensi konflik.

2.) Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY cenderung meningkat

DIY dikenal sebagai daerah dengan beragam predikat, antara lain sebagai Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, dan Kota Pelajar. Beragam predikat tersebut tak pelak menjadikan DIY bak magnet bagi banyak pendatang, baik yang hendak menetap maupun

tinggal sementara di DIY. Banyaknya entitas masyarakat yang ada di DIY membuat DIY menjadi wadah bagi berbagai kelompok kepentingan. Kultur toleran membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk mengartikulasikan, tidak semata ekspresi dalam beragama, kesukuan, etnisitas, bahasa dan ragam budaya lainnya, namun juga beragam kepentingan yang melandasinya. Salah satu ancaman nyata yang mengancam sebagai dampak negatif dari pesatnya dinamika kehidupan di DIY adalah peredaran gelap narkoba.

Besarnya angka pengguna narkoba di kalangan generasi muda tentu berpotensi membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Pemuda sebagai generasi yang diharapkan dapat menjadi penerus dan pemimpin bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif terlarang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait penanganan narkoba serta seluruh elemen masyarakat yang ada sehingga fokus Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat terlaksana secara optimal.

3.) Degradasi terhadap pemahaman nilai-nilai dari Empat Pilar Kebangsaan

Ancaman berupa infiltrasi ideologi lain yang ditawarkan secara menyesatkan seakan ideologi kesepakatan bangsa ini adalah salah dan perlu diganti. Berbagai paham dan ajaran yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan kontril baik berupa deteksi dini maupun upaya pencegahannya yang dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai ke-Pancasilaan yang di dalamnya juga terkandung ajaran kebangsanaan dengan pendalaman Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945 serta berbagai haluan negara yang harus menjadi pedoman hidup warga negara dalam berkehidupan bernegara, berkebangasaan serta bermasyarakat. Upaya pemelintiran paham bernegara biasanya menumpang pada isu-isu terkini yang menjadi bahasan dalam masyarakat, semisal isu kemiskinan, kenaikan harga atauapun kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, maka akan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun yang belum Optimal

Stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian, beragam tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, *black campaign* dan praktik menyimpang lainnya. Berikut matriks pertisipasi pemilu di DIY;

Berdasarkan data KPU atas partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2004, 2009,2014, dan 2019 (baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada), dapat dilihat bahwa angka partisipasi pemilih di DIY relatif fluktuatif. Dalam rangka memberikan upaya penguatan kapasitas bagi para pemilih, kegiatan pendidikan politik diselenggarakan untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan partisipasi guna terpilihnya wakil rakyat yang kompeten dan memiliki kapabilitas yang baik. Penguatan koordinasi dengan beragam pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga mitra juga dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah baik sebelum, saat maupun setelah pesta demokrasi diselenggarakan.

5.) Makin maraknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Hingga tahun 2022, atas penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di DIY ditemukan masih terdapat pelanggaran yang diantaranya meliputi jenis pelanggaran terkait anak jalanan, gelandangan dan pengemis, minuman beralkohol, papan reklame. Tambang, irigasi, sampah,air tanah, bangunan liar, KIR dan Muatan, dan beberapa pelanggaran lainnya. Hal ini menuntut semakin giatnya usaha yang dilakukan untuk meminimalisirnya. Mulai dari yang sifatnya preventif, seperti internalisasi substansi dari Perda/Perkada tersebut, operasi penegakan maupun sampai dengan penanganan pasca pelanggaran.

6.) Peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dalam rangka pengamanan Pemilu serentak 2024.

Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)di masyarakat akan dipersiapkan dalam menghadapi pesta demokrasi secara serentak

pertama di Indonesia. Pemilu 2024 direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilukada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Menghadapi momen pesta demokrasi yang besar itu, secara bertahap akan disiapkan Satlinmas sebagai salah satu garda terdepan di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Terdapat 3 peraturan perundang - undangan yang mengamanatkan 2 personil Satlinmas ditugaskan di tiap TPS, yaitu Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Permendagri No.10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Posisi Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan posisi yang sangat penting. Hal ini karena Satlinmas bertugas mulai dari saat pembuatan TPS hingga selesainya penghitungaan suara dilakukan. Catatan pada Pemilu 2019 yang telah memakan banyak korban jiwa termasuk Satlinmas, hendaknya menjadi umpan perbaikan pada sistem maupun manajemennya.

7.) Pemberdayaan Kelompok Jaga Warga dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kelompok Jaga warga diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban di masyarakat melalui penghidupan kembali fungsi pranata sosial sehingga dapat menyelesaikan masalah di tingkat dasar secara kekeluargaan. Pranata sosial yang hidup di masyarakat mengandung nilai luhur kearifan budaya di DIY dan sistem sosial yang hidup di dalamnya, merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Jaga Warga diberdayakan dalam bentuk kelompok dimaksudkan sebagai upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.

8.) Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Satlinmas Rescue Istimewa (SRI)

SRI mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah, melakukan pencarian, pertolongan dan

penyelamatan korban serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya perlu sarana prasarana operasional di wilayah kerjanya sesuai dengan jenis tugas dan medan yang dikerjakan. Selain sarana prasarana, kapasitas dari SRI sendiri perlu ditingkatkan khususnya pengetahuan dan ketrampilan dalam bertugas. Disamping pada keterlaksanaan tugas, koordinasi dan publikasi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan eksternal perlu diperjelas, mengingat ketugasan SRI seringkali berjalan bersama banyak stakeholder yang berkaitan.

2.5.2.1.6 Urusan Sosial

1.) Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan di DIY.

Tingkat kemiskinan di DIY pada Maret 2022 sebesar (11,34%) angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,54%). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, DIY menempati urutan ke 13 dan tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya tingkat kemiskinan itu juga diikuti dengan tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Pada Maret 2022 Gini Rasio Provinsi DIY sebesar 0,439 menurun sebesar 0,002 dibandingkan Maret 2021. Menurut BPS DIY, tingkat kemiskinan wilayah pesisir DIY sebesar (60%) namun PDRB daerah pesisir ini hanya sekitar (40%) sehingga tingkat kemiskinan di wilayah pesisir ini lebih tinggi.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2022 mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54% dari total penduduk Indonesia.persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%, menurun 0,17% poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60% poin terhadap Maret 2021. Garis kemiskinan Provinsi DIY (menurut BPS pada Maret 2022) sebesar Rp 521.674 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp378.902,00 (72,63%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp142.770,00 (27,37%). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,28 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.232.760,00/rumah tangga/bulan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dan turun 19,7 ribu orang

terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Hal itu terjadi dikarenakan kombinasi guncangan penawaran dan permintaan, yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, penurunan rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita, pada tahap berikutnya sehingga menyebabkan peningkatan kemiskinan. Dalam upaya memahami dampak COVID-19 terhadap sosial dan ekonomi pada wanita, keluarga dengan anak-anak, kelompok rentan, dan orang-orang dengan disabilitas, SMERU pada tahun 2020, melakukan survei rumah tangga terbesar yang tercatat di Indonesia yang diluncurkan antara Bulan Oktober dan Desember 2020 yang dilakukan melalui wawancara kualitatif, lebih dari 12.000 keluarga di 34 provinsi dan 247 kabupaten.

Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai pada bulan Oktober-November 2020 mengatakan pendapatannya lebih rendah dibanding Januari 2020. Proporsi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan lebih tinggi adalah rumah tangga yang memiliki anak (75,3%) dan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (78,3%). Rumah tangga di semua kelompok pendapatan mulai dari termiskin ke terkaya melaporkan terjadinya penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi menjadi miskin atau rentan miskin. Selain penurunan pendapatan mereka juga menghadapi masalah peningkatan pengeluaran. Hampir seperempat responden (24,4%) mengatakan pengeluaran mereka juga meningkat.

Dampak Pandemi Covid-19 telah diakui dan terbukti secara luas yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, kehilangan pekerjaan dan perubahan budaya kerja. Data tentang penyintas covid-19 tersedia dengan cukup baik, namun data mengenai siapa saja yang terdampak langsung maupun tidak langsung tidak dapat dikumpulkan dengan baik, sementara ini bantuan sosial difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam DTKS, oleh karena itu berbagai program yang bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan.

Data tentang penyintas covid-19 tersedia dengan cukup baik, namun data mengenai siapa saja yang terdampak langsung maupun tidak

langsung tidak dapat dikumpulkan dengan baik, sementara ini bantuan sosial difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam DTKS. Oleh karena itu, berbagai program yang bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan. Pergub dan sistem informasi Manunggal Raharja menjadi sarana keterlibatan Pemda DIY dalam peningkatan kualitas verifikasi validasi Data Terpadu Kemiskinan.

2.) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selanjutnya disebut Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih harus menjadi perhatian.

Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki 9 jenis yang dilihat berdasarkan jumlah terbesarnya yaitu : Fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, anak terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, orang dengan HIV/AIDS, anak dengan kedisabilitasan dan kelompok minoritas. Dari Sembilan jenis PPKS tersebut yang masuk dalam tiga besar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas ketiganya masuk dalam katagori kelompok rentan.

Data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 belum bisa diakses namun diasumsikan sama dengan Data tahun 2019. Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS disajikan pada Tabel 3.1 Secara umum jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi DIY cukup besar, data pada Tabel 3.1 menunjukkan jumlah PPKS pada tahun 2018 dan 2019 lebih dari 600.000 jiwa yang terdiri dari anak jalanan, eks psikotik, pengemis, gelandangan, anak balita terlantar, anak terlantan, korban tindak kekerasan, pemulung, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial, sebesar 9.607 anak pada tahun 2019 dan berkurang menjadi 7.902 anak pada tahun 2021. Penyandang disabilitas pada tahun 2019 sebesar 27.129 orang dan berkurang menjadi 26.866 anak pada tahun 2021. Pelayanan kesos pada penyandang disabilitas lebih banyak mengarahkan rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sehingga sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompetitif.

Berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Januari 2020, jumlah rumah tangga miskin DIY mencapai 338,688 rumah tangga. Jumlah Anak telantar Tahun 2021 dalam Pemutakhiran Data PPKS masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial, sebesar 7.902 anak yang tinggal di dalam keluarga miskin. Data penyandang disabilitas Tahun 2021 sebesar 26.866 orang dan anak dengan kedisabilitasan sebesar 1.971 anak, serta sebesar 4,06% yang telah terjangkau pelayanannya. Jumlah lansia di DIY 552,2 ribu jiwa, 6,23% diantaranya merupakan lanjut usia terlantar.

Tabel 2-188 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2016 – 2021.

No	Jenis PMKS/PPKS	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum	184	219	101	55	72	222
2	Anak Balita Terlantar	1826	1.309	762	620	441	431
3	Anak Dengan Kedisabilitasan	3095	2.983	1.931	2.075	1.971	2.012
4	Anak Jalanan	327	348	67	72	47	132
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	18	11	11	13	10	165
6	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	18	115	6	10	29	25
7	Anak Terlantar	14450	13.960	11.009	9.607	7.902	5.200
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	209	170	247	225	170	157
9	Fakir Miskin	361.081	367.540	462.220	322.459	N/A	N/A
10	Gelandangan	171	236	190	197	123	72
11	Korban Bencana Alam	1050	433	61	8	7.687	21.908
12	Korban Bencana Sosial	115	29	0	117	80	59
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4932	4.943	4.960	4.979	4.515	4.165
14	Kelompok Minoritas	1541	1.168	2.313	1021	124	138
15	Korban Penyalahgunaan Napza	468	500	466	439	323	242
16	Korban Trafifcking	1	2	2	1	1	6

No	Jenis PMKS/PPKS	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
17	Korban Tindak Kekerasan	735	829	762	697	560	470
18	Lanjut Usia Terlantar	46242	45.765	42.417	37.442	33.129	26.525
19	Orang dengan HIV/AIDS	2834	3.104	3.712	4.193	5.127	5.617
20	Penyandang Disabilitas	26177	26.547	27.094	27.129	26.866	28.137
21	Pemulung	450	511	467	465	412	327
22	Pengemis	150	170	134	147	111	64
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	329	361	303	327	278	208
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12840	12.405	12.454	12.365	12.407	11.526
25	Tuna Susila	385	406	290	259	361	90

Sumber: Dinsos DIY, 2023
Catatan : Data 2019-2020 sama dikarenakaan Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan

Tingginya kasus anak terlantar jumlahnya pada tahun 2022 sebesar 5.200 anak akan memiliki dampak sosial yang lebih luas, bertambahnya jumlah pengemis dan anak-anak jalanan. Kasus anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah semakin meningkat. Demikian juga dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga bertambah pada tahun 2022. Sementara itu sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai. Dampak lain dari pandemi adalah sistem pembelajaran daring yang menimbulkan kesenjangan yang dialami anak miskin dan tekanan berlebih pada perempuan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Sistem pembelajaran daring mengakibatkan kesenjangan kualitas pendidikan yang semakin tinggi. Siswa dengan kemampuan ekonomi yang baik dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar namun siswa dengan kemampuan ekonomi orang tua yang kurang atau yang tinggal di daerah yang belum mendapatkan jaringan internet tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik, hal itu dapat mengakibatkan kesenjangan kualitas pendidikan di masa yang akan datang.

Sistem pembelajaran daring juga meningkatkan beban ibu rumah tangga karena kewajiban mendampingi putra putrinya mengikuti pembelajaran, banyak diantara ibu rumah tangga ini yang juga harus mencari nafkah untuk keluarganya, kondisi ini mengakibatkan meningkatnya ketidaksetaraan gender, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki atau kepala keluarga dalam pendidikan anak. Dari permasalahan sistem pembelajaran daring yang menimbulkan kesenjangan yang dialami anak miskin dan tekanan berlebih pada perempuan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mulai melakukan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan memerhatikan protokol kesehatan selain itu peran partisipasi laki-laki untuk mendamingi anak-anaknya dalam belajar di rumah juga diperlukan untuk menunjungan pendidikan anak.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Berikut Data Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY tahun 2016-2022.

Tabel 2-189 Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2016 – 2022

No	Jenis PSKS	2016	2017	2018	2019	2021	2022	Satuan
1	Pekerja Sosial Profesional	0	1	3	3	-	-	Orang
	Pekerja Sosial Fungsional	35	33	36	36	-	41	Orang
	Pekerja Sosial Masyarakat	4767	4960	5020	5130	5057	3073	Orang
2	Taruna Siaga Bencana	1034	1058	1030	1068	1091	662	Orang
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial	370	372	381	381	316	283	Lembaga

No	Jenis PSKS	2016	2017	2018	2019	2021	2022	Satuan
4	Karang Taruna	438	438	438	438	438	438	Lembaga
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	12	11	12	12	12	12	Lembaga
6	Keluarga Pioner	30	30	30	30	30	-	Keluarga
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	163	193	223	263	229	308	Lembaga
8	Penyuluh Sosial Masyarakat	-	54	48	43	120	120	Orang
9	Penyuluh Sosial Fungsional	5	5	5	7	6	-	Orang
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78	78	78	78	78	78	Orang
11	Dunia Usaha	42	42	45	57	238	237	Lembaga

Sumber: Dinsos DIY, 2023
Catatan : Data 2019-2020 sama dikarenkaan Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada tabel di atas Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2016 – 2022 menunjukkan data yang fluktuatif dari tahun 2016-2022. Tahun 2021 PSM di DIY berjumlah 5.057 orang yang tersebar pada Kota Yogyakarta sebanyak 1.150 orang, Kabupaten Bantul sebanyak 692 orang, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1.124 orang, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.428 orang dan Kabupaten Sleman sebanyak 663 orang. Persebaran jumlah

PSM pada tiap daerah yang masih bervariatif menunjukkan bahwa masih belum merata PSM di DIY bahkan pada tahun 2022 jumlah PSM di DIY menurun dan hanya berjumlah 3.020 orang sehingga perlu didorong penumbuhan PSM di daerah. PSM bekerja secara langsung menangani permasalahan sosial yang ada di tingkat desa.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada tabel di atas Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2016 – 2022 menunjukkan penurunan data dari tahun 2019 berjumlah 381 lembaga hingga tahun 2021 berjumlah 316 lembaga. Hal tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar lembaga sosial tersebut dapat bergerak dalam penanganan berbagai masalah sosial baik menangani permasalahan anak terlantar, gelandangan, pengemis, lansia dan permasalahan sosial lainnya.

Penyuluh sosial masyarakat adalah relawan sosial yang bekerja atas inisiatif sendiri atau karena ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan/kelurahan. Pada pelaksanaan dilapangan, Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan data jumlah Pensosmas di DIY terbilang fluktuatif. Data tahun 2021 berjumlah 120 orang, dimana keadaan tersebut masih mengalami kekurangan yang seharusnya berjumlah 438 orang, idealnya satu kalurahan/kelurahan memiliki satu Pensosmas. Pensosmas berkedudukan di kalurahan/kelurahan.

3.) Perlu diperhatikan Penanganan Lanjut Usia dan Rasio Ketergantungan Lansia Mengingat Tingginya Usia Harapan Hidup di DIY.

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk DIY pada tahun 2022 adalah 75,08 tahun merupakan angka tertinggi di Indonesia. Perkembangan UHH di DIY dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan yang disajikan pada grafik berikut.

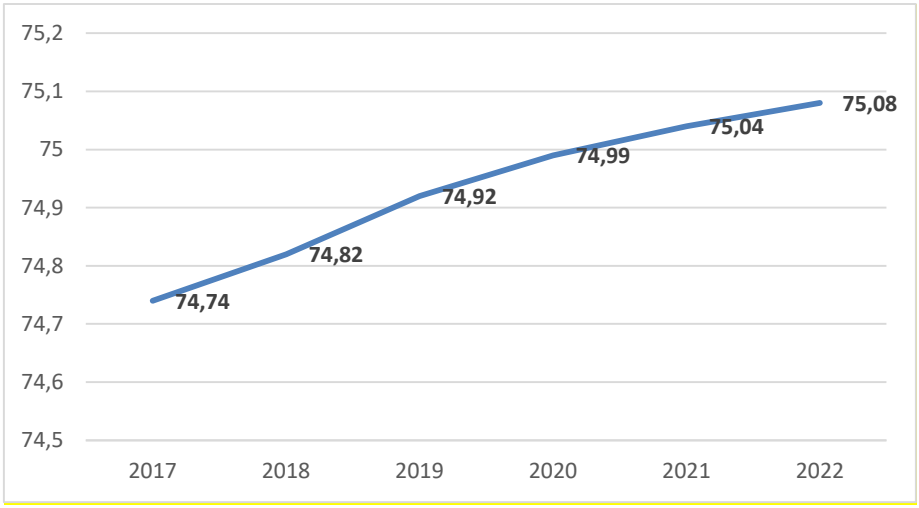

Sumber: BPS DIY, 2023

Gambar 2-91 Perkembangan Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2017-2022

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. Capaian pembangunan manusia pada Provinsi DIY yang disajikan pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 capaian pembangunan manusia berada pada level 80,22. Secara umum, capaian ini terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2021. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,23 dibandingkan tahun 2020. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM selama periode 2017-2021 selalu berada dalam kategori IPM tinggi (70≤IPM<80). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM D.I. Yogyakarta tercatat selalu lebih tinggi dan selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian posisi kualitas pembangunan manusia di DIY sampai tahun 2021 masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pencapaian pembangunan manusia secara nasional. Perbedaan level ini terjadi karena titik awal proses pembangunan di DIY khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya

terjadi lebih awal dibandingan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

UHH yang tinggi membawa konsekuensi kepada pemenuhan layanan lansia terutama layanan dasar seperti kesehatan, jaminan sosial, dan kebutuhan lansia untuk mengaktualisasikan dirinya. Berdasarkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan, strategi yang perlu dilakukan yaitu :

- Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu,
- Peningkatan derajat kesehatan dan kualiitas hidup lanjut usia,
- Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia
- Penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan,
- Penhormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia.

UHH yang tinggi juga diikuti dengan kenaikan jumlah lanjut usia terlantar, sebagian besar lanjut usia terlantar ini belum memiliki jaminan atau asuransi Kesehatan. Namun, jumlah dan kapasitas panti atau balai rehabilitasi sosial untuk melayani lanjut usia terlantar belum mencukupi. Di samping itu dengan tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DIY, resiko lansia menjadi pengidap Penyakit Tidak Menular seperti kardiovaskuler, kanker dan lain-lain menjadi meningkat (meningkatkan Rasio Ketergantungan pada Lansia).

Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan jaminan sosisal kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksudkan adalah lanjut usia, perempuan pada rumah tangga miskin dan kaum difabel. Usia Harapan Hidup yang terus meningkat juga diikuti bertambahnya jumlah lanjut usia terlantar, diantara para lanjut usia dan lanjut usia terlantar sebagian besar belum memiliki jaminan kesehatan. Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai payung kebijakan dalam memberikan intervensi kepada lansia di DIY baik yang potensial maupun non potensial. Dalam Peraturan Daerah tersebut disampaikan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia meliputi :

- pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

- pelayanan kesehatan;
- pelayanan kesempatan kerja;
- pelayanan keterampilan/pelatihan;
- pelayanan mendapatkan kemudahan dalam
- penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
- pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- bantuan sosial dan
- Perlindungan Sosial

Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, sistem, prosedur, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga perlu dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a.) Memberikan fasilitas kepada PSKS untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

b.) Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkokoh budaya semangat dan jiwa K2KS secara sinergis, terarah, terencana dan berkelanjutan.

4.) Peningkatan Perhatian Terhadap Difabel Kurang Terpenuhi

Penyandang disabilitas PPKS di DIY pada tahun 2021 adalah 26.866 orang, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 28.137 orang, jumlah tersebut cukup besar, dan dari survei yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami dampak lebih berat karena tidak dapat melakukan akses kesehatan untuk melakukan terapi ataupun berobat, juga mengalami kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak pandemi. Sehingga kedepannya, pembangunan Inklusif yang mencakup kepentingan kelompok rentan harus dikedepankan. Dari permasalahan berikut maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah mengenai Difabel dan Lanjut Usia. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang harus mewujudkan DIY yang inklusif, dari sektor sosial, kesehatan, fisik sarana prasarana, regulasi dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan pendidikan, dan lain-lain.

5.) Wilayah DIY Rentan Terhadap Bencana Alam.

Wilayah DIY terletak di wilayah sungai dan gunung berapi. Oleh karena itu DIY menjadi rentan terhadap bencana alam, baik itu bencana letusan Gunung Merapi, Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut maupun bencana kekeringan. Menurut data PPKS yang sebelumnya disebut PMKS, Korban Bencana Alam pada tahun 2022 tercatat 21.908

jiwa, dan korban bencana sosial sebanyak 59 jiwa. Kerugian material yang ditimbulkan juga berpengaruh pada kesejahteraan sosial masyarakat baik fisik maupun psikologis.

Dikarekanakan wilayah fisik DIY merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Sehingga, memerlukan strategi khusus untuk meminimalisir kerugian berupa harta,benda, bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kesiapsiagaaan bencana. Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) atau *Community Based Disaster Preparedness* (CBDP) adalah program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, di DIY program tersebut sudah terlaksana dengan baik, namun perlu terus ditingkatkan berkaitan dengan manajemen kebencanaan. Hal ini akan mendukung pelaksanaan dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap kebencanaan yang juga merupakan bagian dari SPM Sosial dan selama ini telah didukung dengan menggerakkan Tagana untuk turut menangani kegiatan lapangan saat terjadi bencana.

2.5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.5.2.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

1.) Peningkatan pengangguran terbuka

Pandemi Covid-19 berdampak pada peningakatan pengangguran di DIY. Angka TPT DIY tahun 2020-2022 berada pada kisaran 4%. Walaupun sudah ada kecenderungan munurun, yaitu dari 4,57% pada tahun 2020 ke 4,06 pada tahun 2022, namun dalam tiga tahun terakhir angka TPT DIY masih relatif lebih tinggi dari periode 2016-2019. Pada periode tersebut, angka TPT DIY masih berhasil ditekan di bawah 4%. Menurut data Sakernas bulan Agustus 2022, masih ada penduduk usia kerja yang terdampak oleh pandemi covid-19. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2022 sebanyak 102,74 ribu orang. Angka ini memang relatif sudah menurun dibandingkan dengan Agustus 2021 yang mencapai 458,04 ribu orang. Namun demikian, akhir-akhir ini kondisi perekonomian sedang tidak diuntungkan oleh kondisi inflasi

serta adanya ancaman resesi baik di tingkat global maupun lokal yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya pengangguran.

2.) Masih rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat produktivitas adalah jam kerja. Semakin tinggi jam kerja, maka pendapatan atau upah/ gaji seseorang cenderung semakin tinggi. Berdasarakan data Sakernas Agustus 2022, pekerja penuh di DIY (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 67,06%. Sementara itu, pekerja tidak penuh di DIY pada mencapai 32,94% yang terdiri dari pekerja paruh waktu sebesar 28,18% dan pekerja setengah penganggur sebesar 4,76%.persentase pekerja penuh ini relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, pekerja penuh di DIY mencapai 74,01%, tahun 2018 mencapai 71,46% dan 2019 mencapai 69,37%. Selain itu, terlihat juga kecenderungan penurunanpersentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja penuh.

Indikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan. Penyerapan tenaga kerja di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2022 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 568,29 ribu orang (25,36%), diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 479,56 ribu orang (21,40%). Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 18,52%, yang mencakup 319,84 ribu orang (14,27%) berpendidikan Universitas dan 95,12 ribu orang (4,24%) berpendidikan Diploma.

3.) Masih rendahnya daya saing tenaga kerja

Daya saing tenaga tenaga kerja masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional. Berdasarkan world talent ranking (IMD), misalnya, peringkat Indonesia masih berada di nomor 50 untuk tahun 2021. Capaian tersebut lebih rendah dari Thailand (43) atau Malaysia (28).

2.5.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.) Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Trend selama 5 tahun menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih fluktuatif dan jumlahnya berada di atas angka 1.000 korban per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 1.615 kasus dan terus melandai, hingga tahun 2021 tercatat sebesar 1.169 korban telah ditangani oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY. Lebih lanjut, pandemi Covid berdampak pada terjadinya kekerasan berbasis gender online. Di samping itu, eksternalitas negatif dari dibukanya bandara internasional YIA menambah resiko peluang Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY

Meskipun angka terus melandai, namun hingga tahun 2021 DIY belum berhasil memenuhi target penekanan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 0,46 sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Pada tahun tersebut, dengan segala upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya DIY baru mampu menekan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada angka 0,52.

Walaupun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak jumlahnya naik turun dan prevalensinya belum memenuhi target yang di harapkan, namun secara nasional Indeks Perlindungkan Khusus Anak Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPS, menunjukan DIY pada rangking 12 nasional dengan indeks 74,14, dengan kata lain, kondisi perlindungan khusus anak di DIY lebih baik dari 25 provinsi lainya di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan beberapa strategi yaitu : dengan memaksimalkan upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah kasus, penanganan terpadu bagi korban kekerasan dan pemberdayaan pasca kasus. Hal tersebut dilakukan dengan Pembenahan kelembagaan melalui pembentukan UPT Balai Pelindungan Perempuan dan Anak yang akan efektif pada tahun 2023, menerbitkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan Anak 2023-2027 sebagai reviu dan menjamin ketindaklanjutan program dan kegiatan yang terbaik dalam pelindungan anak. Melalui Pergub PUG sebagai pengarah dalam pembangunan responsive gender di DIY. Selain itu, DIY telah memiliki layanan P2TP2A Rekso Dyah Utami untuk korban kekerasan yang akan dikombinasikan dengan UPT P2TP2A, serta Kerjasama lintas sektor dan pentahelix yang sudah berjalan dalam perlindungan korban kekerasan.

Sehingga, diharapkan akan mampu mengatasi beberapa poin masalah tentang kekerasan pada perempuan dan anak.

2.) Terjadinya berbagai Praktik Buruk yang Mengancam Pemenuhan Hak-Hak Anak seperti Perkawinan Dibawah Umur dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Data dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di DIY pada periode 2019-2021 mengalami fluktuasi di semua jenis kelamin. Secara total, sebelum pandemi Covid 19, yaitu tahun 2019 jumlah putusan dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah 583 putusan. Angka tersebut naik pada awal pandemi, yaitu tahun 2020 sehingga terdapat 959 putusan dispensasi. Pada tahun selanjutnya, angka ini kembali menurun sehingga terhitung ada 756 putusan dispensasi kawin.

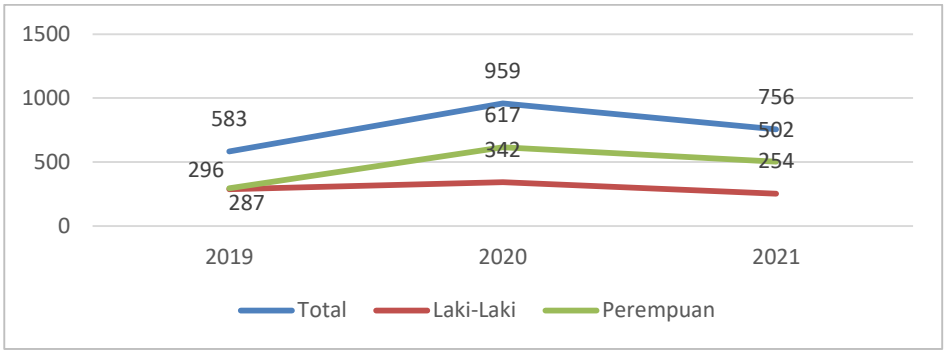

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama DIY

Gambar 2-92 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021

Salah satu faktor yang mempengaruhi semakin tingginya angka dispensasi ini adalah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Selain itu, permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama ini berhubungan erat dengan kehamilan tidak diinginkan. Berdasarkan data mengenai alasan permohonan dispense nikah, mayoritas alasan permohonan adalah karena telah terjadi kehamilan tidak diinginkan pada anak perempuan. Terdapat 758 persalinan remaja dan kehamilan

tidak diinginkan di DIY pada tahun 2021. Lebih lanjut, Sleman (185 KTD) dan Kota Yogyakarta (175 KTD) menjadi wilayah dengan jumlah persalinan remaja dan kehamilan tidak diinginkan tertinggi di DIY.

Selain itu, masih terdapat Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, dari 100 kasus yang ditangani Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di tahun 2020, angkanya turun menjadi 62 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan persebarannya, rata-rata anak berasal dari Kabupaten Bantul (23 anak), Kabupaten Sleman (21 anak), dan Kota Yogyakarta (12 anak). Ketiga wilayah terbesar ini masih sama dengan data tahun 2020. bahwa kawasan perkotaan masih menjadi dominasi asal kasus ABH. Oleh karena itu, pada wilayah-wilayah tersebut perlu diupayakan pencegahan sejak dini dengan melibatkan keluarga, aparat kepolisian, masyarakat, dan pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui asas umum pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yaitu dengan cara *moralistic* dan *abolistic*. Cara moralistic berfokus pada pembinaan moral. Sedangkan pendekatan abolistic menitik beratkan pada penghilangan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan oleh anak, menutup kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum dalam aksi kejahatan, dan membangkitkan kewaspadaan masyarakat.

Penanganan terhadap berbagai praktik buruk yang mengancam pemenuhan hak-hak anak dilakukan dengan pendampingan dan perlindungan terhadap anak-anak dengan mensukseskan program Provinsi dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak sebagai pengarah dalam pemenuhan hak anak di DIY dan Kerjasama lintas sektor yang sudah berjalan dalam pembangunan ketahanan keluarga, diharapkan akan mengatasi permasalahan terkait anak.

Permasalahan Perkawinan Usia Anak dan ABH perlu akselerasi dalam penanganannya. Untuk itu, pada tahun 2023 akan dibentuk PUSPAGA DIY sebagai lembaga konseling bagi anak – anak yang mengalami Kehamilan tidak diinginkan sebagai penyebab tertinggi perkawinan usia anak, dan anak – anak yang rentan menjadi korban dan pelaku kekerasan untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum (ABH), serta konseling dan mendampingi keluarga dan pengasuhan anak agar tumbuh kembang anak dapat optimal.

3.) Resiko meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Risiko tingginya KBGO semakin meningkat seiring dengan meningkatnya interaksi masyarakat di dunia maya. Sejak memasuki periode pandemi, ketergantungan pada teknologi internet tidak hanya pada cara manusia bekerja, namun juga pola-pola relasi sosial. Penetrasi pengguna internet tertinggi nampak pada kelompok pelajar dan mahasiswa. Dengan tingginya akses tersebut, selain memberikan dampak positif juga rentan terjadi penyalahgunaan antara lain dengan munculnya KBGO.

Di DIY belum ada data pasti yang bisa menggambarkan kondisi riel kekerasan berbasis gender online (KBGO). Namun melihat data secara nasional bersumber dari Safenet, pada 2021 kasus KBGO menjadi kasus pelanggaran hak digital paling tinggi. Dari 1.098 kasus, 828 merupakan kasus KBGO. Lembaga Rifka Annisa mencatat di tahun 2020 ada sebanyak 20 kasus KBGO di wilayah DIY. Memasukkan KBGO dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi kemajuan yang positif, meskipun aspek KBGO dalam UU TPKS belum mangakomodasi kompleksitas permasalahan KBGO sebagaimana yang terdata oleh Safenet. Namun UU TPKS ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem dan mekanisme layanan dan isu literasi digital menjadi penting untuk dikampanyekan, terutama untuk meningkatkan kesadaran pada risiko KBGO.

Dalam periode ini, DIY menghadapi tantangan dalam (1). mengupayakan peningkatan pemahaman tentang kekerasan yang masuk dalam kategori KBGO serta layanannya dan (2) meningkatkan kapasitas seluruh lembaga layanan dalam KBGO.

4.) Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Ranah Politik dan Pengambilan Keputusan

Upaya mendorong partisipasi perempuan di ranah politik dan pengambilan keputusan secara nasional salah satunya dilakukan dengan menerapkan kebijakan afirmasi melalui mekanisme kuota 30% dalam pengajuan bakal calon dan calon legislatif, anggota KPU, serta pendirian dan kepengurusan partai politik. Upaya ini penting karena partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan memiliki korelasi erat dengan upaya mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan. Partisipasi aktif perempuan di lembaga-lembaga trias politica memungkinkan hadirnya kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan kelompok marginal lainnya. Sampai saat ini, kebijakan

afirmasi kuota 30% belum tercapai di DIY. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY,persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif legislative, dan yudikatif di DIY hingga tahun 2021 paling tinggi hanya mencapai 25%, yakni pada tahun 2018.

Tabel 2-190 Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

2017	2018	2019	2020	2021
18,26	25,00	25,00	24,92	24,92

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY

2.5.2.2.3 Urusan Pangan

1.) Kurangnya penerapan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

Kualitas konsumsi pangan dapat tercermin dari indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2022 sudah mencapai 96,8, di atas rata-rata nasional dan hampir optimal. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bahwa skor beberapa kelompok pangan belum mencapai ideal, sedangkan beberapa kelompok bahan pangan lain sudah melebihi nilai anjuran, sehingga perlu diturunkan karena ada kekhawatiran dalam jangka panjang akan memicu timbulnya penyakit degeneratif. Kelompok bahan pangan yang sudah melebihi nilai anjuran sesuai data PPH tahun 2022 (DPKP DIY, 2022) meliputi padi-padian, pangan hewani (daging, susu, telur), minyak dan lemak, serta gula. Sementara itu, kelompok pangan yang masih perlu didorong untuk mencapai nilai ideal adalah umbi-umbian dan kacang-kacangan. Selain itu, dari aspek keamanan pangan, masih ditemui pangan beredar yang belum memenuhi kaidah keamanan pangan. Data dari BPOM Yogyakarta menyebutkan bahwa pengujian terhadap sampel pangan tertarget menunjukkan sebesar 27,09% pangan tidak memenuhi syarat pada tahun 2021. Selain itu, keracunan yang disebabkan oleh makanan merupakan penyebab terbesar ketiga kasus keracunan di DIY pada tahun 2021. Berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (2022), dapat diketahui juga bahwa masih terdapat Pangan Segar

Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji tidak memenuhi syarat sebesar 9,88% pada tahun 2021.

2.) Kurangnya pengelolaan pangan tercecer (*food loss*)

Isu food loss di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan hasil di tahapan pascapanen menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs). Data dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2021 Tetap (DPKP DIY, 2022) menunjukkan beberapa contoh pangan strategis yang mengalami food loss cukup besar antara lain: gabah, jagung, bawang merah, telur ayam buras, dan daging sapi masing-masing sebesar 4,92%, 7,16%, 3,24%, 3,86%, dan 5% dibandingkan total pemakaian pada tahun 2021. Data ini belum termasuk pangan yang berkurang pada saat proses distribusi maupun konsumsi yang sering disebut food waste. Kehilangan hasil pada tahap produksi pada umumnya terjadi pada saat panen akibat penggunaan mesin pemanen di tingkat petani masih rendah sehingga banyak hasil yang tercecer. Sementara itu, kehilangan hasil pada tahap pasca panen dan pengolahan terjadi karena masih terbatasnya infrastruktur yang ada seperti alat pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil-hasil pertanian.

3.) Masih terdapat wilayah atau populasi penduduk DIY dalam kondisi rentan pangan

Berdasarkan-data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, pada tahun 2022 di DIY sudah tidak terdapat desa dalam kategori rawan pangan. Namun demikian, masih ada sejumlah 3 desa (kalurahan) yang berstatus waspada pangan. Sementara itu, berdasarkan data *Food Safety* and *Vulnerability Atlas* (DPKP DIY, 2021), dapat diketahui bahwa terdapat 5 kecamatan (kapanewon) yang berada dalam kondisi rentan. Penyebab status desa waspada pangan maupun kecamatan rentan pangan sebagian besar terkait dengan aspek kemiskinan dan kesehatan.

Sementara itu, data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) DIY menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2017-2021. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan kondisi di mana konsumsi makanan harian suatu individu tidak mencukupi kebutuhan energi ideal. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan DIY sejak tahun 2017 hingga 2019 selalu lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Namun prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan DIY pada

tahun 2021 sebesar 10,18, di atas rata-rata nasional sebesar 8,49, sehingga masih perlu upaya perbaikan.

2.5.2.2.4 Urusan Pertanahan

1.) Kegiatan Strategis Nasional dan Daerah Memerlukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tepat Waktu

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di DIY sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdiri dari Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo, Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo, Double Track Jawa Selatan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul Kulon Progo).

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 353/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY No.163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, program prioritas pembangunan DIY tahun terkait dengan pembangunan infrastruktur prioritas yaitu pembangunan Jalan Temon-Borobudur, pembangunan Jalan Prambanan-Gading, pembangunan dan pengembangan TPA Regional Piyungan, Pembangunan SPAM Regional Kamijoro, pembangunan SPAM Regional Kartamantul, pembangunan SPAM Regional dari Bendungan Bener, dan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Jumlah SK penetapan lokasi yang telah terbit pada periode tahun 2015 – 2022 terdapat 24 SK. Untuk pelaksanaan PSN dan program prioritas DIY, masih terdapat proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang belum terselesaikan seperti jalan tol Solo- Yogyakarta – Kulon Progo seksi 3, dan beberapa rencana program strategis lain belum mulai proses pengadaan tanahnya.

2.) Belum Dapat Dilakukan Legalisasi Alas Hak pada Status Tanah Tertentu

Masih terdapat tanah dengan status tertentu yang belum dapat dilegalisasi atau diberikan alas hak. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan tanah tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (aset dan akses) pada jenis

tanah tertentua diantaranya tanah tutupan, tanah enklave, dan tanah hasil tukar menukar.

Tanah tutupan di DIY terdapat di Kabupaten Bantul. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada tahun 2021 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Kasultanan, Gubernur DIY, dan Kanwil BPN DIY terkait penyelesaian tanah Tutupan dengan dilakukan redistribusi tanah (penataan kembali) dengan memberikan status hukum kepemilikan kepada para penghuni/pengelola yang rencananya akan dilakukan di 2024, karena di tahun 2023 masih akan disusun masterplan di tanah tutupan, sosialisasi cipta kondisi dan pemasangan patok.

Tanah enklave adalah tanah yang asal usulnya dari Kasunanan dan Mangkunegaran bukan tanah Kasultanan. Untuk Tanah enklave sebelumnya sudah dilakukan pensertifikatan hak milik atas nama Kasultanan, namun dalam perjalanan waktu dihentikan pensertifikatannya sehingga sekarang statusnya menjadi terkatung katung (tidak ada kepastian). Pada tahun 2022 dilakukan pengkajian status terkait dengan tanah enklave untuk kemudian dapat diambil kebijakan.

Tanah yang diperoleh dari hasil tukar menukar adalah proses tukar menukar tanah kalurahan dengan masyarakat. Berdasarkan Pergub DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, bahwa setiap tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah milik warga harus mendapat ijin dari Kasultanan dan Kadipaten. Kendala yang ada adalah beberapa tukar menukar belum diajukan dikarenakan tidak ada bukti pendukung atau catatan sama sekali di Pemerintah Kalurahan walaupun keduanya sudah saling menguasai dan pemerintah kalurahan tidak berani mengeluarkan keputusan lurah sebagai salah satu syarat.

3.) Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten dan tanah Desa Belum Seluruhnya Tersertifikasi

Jumlah bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 14.044 bidang. Sampai dengan 2022 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar untuk disertipikatkan sebanyak 13.873 bidang dan telah diterbitkan sertipikat sebanyak 9.985 bidang. Sedangkan terkait dengan tanah desa terbagi sebagai berikut:

a.) Jumlah bidang Tanah Desa belum bersertipikat berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 34.211. Sampai dengan tahun 2022 jumlah bidang telah terdaftar untuk disertipikatkan sebanyak 1.139 bidang dan belum ada yang terbit karena kegiatan baru dimulai di tahun 2022.

b.) Jumlah bidang Tanah Desa yang telah bersertipikat berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 16.068 bidang. Sampai tahun 2022 telah didaftarkan untuk dilakukan perubahan pencatatan sertipikat menjadi Hak Pakai Pemerintah Desa di atas Tanah Milik Kasultanan / Kadipaten sebanyak 7.266 bidang sedangkan yang belum sebanyak 8.802 bidang.

c.) Bidang Tanah Desa yang telah bersertipikat sebanyak 16.068 bidang masih harus dilakukan penetapan Hak Milik Kasultanan / Kadipaten dan dilanjutkan dengan pendaftaran kembali sertipikat hak pakai Pemerintah Desa di atasnya.

4.) Masih terdapat Pemanfaatan Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang Belum sesuai Ketentuan/Perencanaan

Pemanfaatan SG dan PAG secara umum sudah sesuai dengan permohonan kekancingan yang diajukan, terhadap pemanfaatan yang belum memiliki kekancingan dilakukan sosialisasi dan dihimbau untuk dapat melakukan permohonan pengajuan izin kekancingan dan harus memperhatikan Tata Ruang, apabila tidak sesuai dengan Tata Ruang tentunya tidak diproses kekancingannya dan diberikan peringatan apabila melakukan aktifitas pembangunan serta dilakukan pemasangan papan peringatan.

Terkait Pemanfaatan tanah desa secara umum pelaksanaannya sudah sesuai dengan izin yang diberikan walaupun masih ada sebagian kecil pelanggaran seperti pengalihan ijin kepada pihak lain dan pemanfaatn tidak sesuai dengan ijin yang diterbitkan. Selain itu masih banyak pemerintah desa yang tidak jujur terkait pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga yang belum berizin. Terhadap pelanggaran ini dilakukan pengawasan berupa teguran sampai dengan pemerintah kalurahan untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dan melakukan usulan pencabutan izin terhadap Keputusan Gubernur.

2.5.2.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

1.) Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY pada periode 2018-2022 berkisar pada angka 60,05-61,60. Nilai IKLH DIY tahun periode 2018-2022 berkisar pada angka 59,92-61,69. Nilai IKLH DIY tahun 2022 merupakan nilai IKLH terendah dalam periode 2018-2022, yaitu sebesar 59,92.. Kondisi IKLH DIY saat ini berada di bawah nilai IKLH nasional sebesar 70,27 dengan klasifikasi nilai IKLH DIY masuk dalam kategori kurang baik.

Komponen pembentuk IKLH dengan kisaran nilai paling rendah yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), dengan nilai IKA periode 2018-2022 pada kategori kurang dengan tren mengalami penurunan dari 40,35 menjadi 32,14. Penurunan indeks kualitas air ini disebabkan tingginya angka coli total dan coli tinja dari aktivitas domestik dan pertanian, phospat dari aktivitas domestik dan usaha laundry skala mikro, serta pencemar dari usaha/kegiatan yang outlet air limbahnya belum memenuhi baku mutu. Selain itu debit air sungai fluktuatif berdasarkan musim.

Terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat Kondisi hutan dan lahan di DIY mempengaruhi nilai indeks kualitas tutupan lahan yang merupakan salah satu komponen penyusun IKLH. Upaya penanggulangan lahan kritis yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam rangka meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan relatif masih sangat kecil. Berdasarkan data pengukuran yang dilakukan oleh Dinas LHK, capaian IKTL DIY cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data realisasi IKTL di tahun 2018 sebesar 60,86 turun menjadi 58,82 di tahun 2022. Berdasarkan data luas lahan yang telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan sampai dengan tahun 2022 mencapai luasan 4.469,69 ha, maka penanganan lahan kritis yang dilakukan oleh DIY baru mencapai 5,65% dari total lahan kritis DIY sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional dimana lahan kritis DIY ditetapkan seluas 79.123,00 ha.

2.) Kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masih kurang.

Berdasarkan kajian jogja hijau terdapat 213 kelurahan/kalurahan yang mengisi kuesioner dari total 392 kelurahan/kalurahan di DIY, sebanyak

179 kelurahan/kalurahan tidak mengisi kuesioner. Dari kajian tersebut didapatkan bahwa dalam pilar pengelolaan lahan terbuka (RTH), pemanenan air hujan (konservasi air), pengelolaan sampah mandiri dan konservasi energi, kelurahan/kalurahan yang sudah mendapatkan nilai baik (≥90) yaitu sebanyak 11 kalurahan/kalurahan yang terdiri dari 3 kalurahan di Kab Sleman (dari total 86 kalurahan), 1 kalurahan di kab Bantul (dari total 75 kalurahan), 4 Kalurahan di Kab Kulon progo (dari total 87 kalurahan), 2 kalurahan di Kab Gunungkidul (dari total 144 kalurahan) dan 1 kelurahan kota Yogyakarta (dari total 45 kelurahan).

3.) Tingkat ketaatan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY masih rendah

Tingkat ketaatan usaha/kegiatan rendah yaitu sebesar 45%, sebanyak 36 unit taat dan 44 unit tidak taat dari total 80 unit usaha/kegiatan yang diawasi. Ketaatan usaha/kegiatan terdiri dari 4 (empat) kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menentukan tingkat ketaatan ijin usaha/kegiatan harus terpenuhi keempat kriteria tersebut sehingga sulit untuk dicapai oleh usaha/kegiatan. dengan rincian ketidaktaatan yaitu 23 unit usaha tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan 18 unit usaha tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3.

Dengan terbitnya PP 22 Tahun 2021 berkonsekuensi terhadap: semakin rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY bertambah menjadi 185 unit yang terdiri dari 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit dan hotel, 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

Selain itu berdasarkan regulasi yang berwenang melakukan pengawasan adalah PPLH. Saat ini di Pemda DIY hanya ada 4 orang PPLH, sehingga memerlukan penambahan SDM PPLH untuk mencapai rasio PPLH yang ideal.

4.) Belum Terselesaikannya penyusunan dokumen RPPLH Provinsi

Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai bulan september mencapai 20,79 % dan penanganan sampah mencapai 47,94 % hal ini

masih di bawah target jakstrada yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal. Pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya. Dari data sistem pengelolaan sampah nasional diketahui bahwa terdapat 16 unit TPS3R aktif dan 91 unit bank sampah di kab Bantul; 22 unit TPS3R aktif dan 263 unit bank sampah di Sleman serta; 2 unit TPS3R aktif dan 370 unit bank sampah di Yogyakarta. Jumlah ini yang masih sangat kurang untuk dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan.

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode controlled landfill. Selain itu sampah yang masuk ke TPA Piyungan tidak hanya residu, serta sampah belum terpilah dengan lebih dari 50% berupa sampah organik. Berdasarkan perhitungan teknis, kapasitas pelayanan sampah di TPA Piyungan sudah habis meskipun telah dilakukan penataan di zona A dan B (sel eksisting 10 ha). Pemda DIY telah menyiapkan lahan di zona transisi tahap 1 pada tahun 2022 dan zona transisi tahap 2 pada tahun 2023. Dikarenakan kapasitas tampung zona transisi juga sangat terbatas, sedangkan proses KPBU untuk pengolahan dengan teknologi masih memerlukan waktu sampai dengan tahun 2026/27 maka diperlukan pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan secara signifikan, dan/atau pengembangan sel baru untuk di luar zona transisi untuk pengelolaan sampah.

2.5.2.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.) Belum adanya *database* yang terintegrasi terkait dengan jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara merupakan hal penting yang harus diwujudkan Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara. Jika warga negara tidak memiliki dokumen adminitrasi kependudukan, maka tidak akan terdata oleh pemerintah sehingga akan menyulitkan untuk mendapatkan pelayanan publik maupun bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem. Namun demikian, sampai saat ini di DIY belum ada *database* terkait jumlah penduduk

rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta penduduk rentan lain yang terintegrasi.

Permasalahan lain yang dialami dalam pelayanan kependudukan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, belum semua masyarakat memahami adanya pelayanan online pendaftaran penduduk di Dinas Dukcapil. Kondisi ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.

2.) Cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal.

Permasalahan lain terkait dengan Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sampai dengan 31 Oktober 2022 terdapat 661.718 anak atau 77,96% yang telah memiliki KIA dari total 847.783 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Jika anak-anak tidak memiliki KIA, maka akan berpotensi menyulitkan anak-anak dalam pendaftaran pada sekolah formal maupun dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah, meskipun hingga saat ini masih dapat diakses menggunakan Akta Kelahiran.

2.5.2.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Kalurahan

Aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan Kalurahan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Secara spesifik masih terdapat permasalahan di Kalurahan, diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan, rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, dan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan.

Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui skema intervensi berupa pembinaan yang kolaboratif dari Pemerintah Daerah

DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY kepada Pemerintah Kalurahan di DIY. Aktor utama dan pertama yang harus diintervensi adalah aparat pemerintah kalurahan yang diharapkan dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tingkat kedisiplinan, mekanisme kerja, hingga pada capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kalurahan sehingga mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 72 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY. Bahkan menurut Surat yang ditandatangani Wakil Gubernur bernomor 401/0161 tahun 2022 disebutkan bahwa ada 15 Kapanewon penanggulangan kemiskinan. Tentu saja hal tersebut merupakan sumbangan dari Kalurahan yang ada di tingkat bawahnya.

Belum optimalnya tata Kelola kalurahan dapat juga dilihat dari masih rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, hal ini terlihat masih banyaknya Pemerintah Kalurahan yang mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa dalam bentuk Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli kalurahan masih di bawah jumlah dana transfer dari lembaga supra-desa.

Masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan. Aparatur Pemerintah Kalurahan merupakan ujung tombak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, namun saat ini kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY masih tergolong rendah. Data rata-rata pendidikan SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY tahun 2021 masih didominasi lulusan SMA dengan rentang usia 40-60 tahun. Sehingga peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kalurahan harus terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan responsivitas aparatur dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Optimalisasi TIK juga masih menjadi permasalahan yang menghambat tata Kelola di Kalurahan, meskipun konektivitas sudah tidak lagi menjadi kendala. Saat ini seluruh kantor kalurahan di DIY yaitu sebanyak 392 Kalurahan sudah terkoneksi dengan internet, namun kualitas jaringan serta perluasan pemanfaatannya masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan teknologi informasi di Kalurahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.

2.) Perlu Reformasi Kalurahan untuk percepatan pembangunan desa/kalurahan

Reformasi Kalurahan dimaknai sebagai perubahan model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kemakmuran masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masatah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Reformasi Kalurahan menyangkut reformasi pemerintahan Kalurahan dan reformasi perekonomian Kalurahan. Reformasi Pemerintahan Kalurahan dilaksanakan dengan memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan kelembagaannya. Reformasi perekonomian Kalurahan/Kelurahan dilaksanakan dengan meningkatkan nilai lebih aset dan sumberdaya aiam lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3.) Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan

Ketimpangan perdesaan dan perkotaan di DIY ditandai oleh gambaran makro yang nyata dan kontras. Kawasan perkotaan DIY didominasi oleh Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi Yogyakarta. Sementara itu, kawasaan perdesaan mendominasi hampir semua wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian Kabupaten Bantul. Hal ini kemudian berbanding lurus dengan data-data ekonomi, terutama persentase kemiskinan dan indeks ketimpangan di lima daerah ini. Secara umum, persentase kemiskinan tertinggi berada di Gunungkidul, Kulon Progo, dan disusul Bantul. Sementara Sleman dan Kota Yogyakarta

memiliki persentase kemiskinan yang jauh lebih rendah dibandingkan tiga daerah lainnya. Dari sudut pandang regional, hal ini menunjukkan fenomena ketimpangan yang cukup parah. Bagian ini akan melihat secara lebih mikro kondisi ketimpangan desa-desa di kawasan rural dan urban serta ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan baik dari sisi ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan non-ekonomi (dimensi kualitas hidup).

Secara umum, pada periode Maret 2015 – Maret 2022, tingkat kemiskinan di DIY menunjukkan kecenderungan yang menurun, baik dari sisi jumlah maupunpersentase. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi peningkatan kemiskinan. Pada Maret 2015 tingginya kemiskinan dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu, pada Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang diantaranya disebabkan wabah Covid-19. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2015 sampai dengan Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2015 mencapai 550,23 ribu orang. Sampai dengan September 2019, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 109,3 ribu orang. Namun dengan adanya wabah Covid-19, jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 475,72 ribu orang pada Maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sampai dengan Maret 2021. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 506,45 ribu orang. Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 454,76 ribu orang. Jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 19,7 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin secara absolut di DIY paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan di DIY tercatat sebanyak 315,46 ribu orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 139,30 ribu orang. Sementara itu, secarapersentase, penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 13,65%. Dengan demikian, secara rata-rata terdapat sekitar 14 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama,persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,56%.

Selama periode Maret 2021 – Maret 2022, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY turun sebanyak 43,2 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 8,5 ribu orang. Dengan demikian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin DIY berkurang sebanyak 51,7 ribu orang. Pada periode yang sama,persentase penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 1,67% poin. Adapunpersentase penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,79% poin. Dalam setahun terakhir persentase kemiskinan DIY turun sebanyak 1,46% poin.

Namun persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY terlihat berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Pada Maret 2021, indeks P1 tercatat sebesar 2,420. Kemudian, pada September 2021, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,062. Pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,014. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2021 indeks P2 tercatat sebesar 0,649. Satu semester kemudian, pada September 2021, indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,532. Selanjutnya pada Maret 2022, nilai indeks P2 kembali turun menjadi 0,508. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa

kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan D.I. Yogyakarta. Nilai indeks P2 perkotaan selama setahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada Maret 2021 indeks P2 perkotaan sebesar 0,646. Satu semester berikutnya, nilai indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,560. Selanjutnya pada Maret 2022, indeks P2 kembali turun menjadi 0,484. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perdesaan semakin membaik. Di perdesaan D DIY, indeks P2 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada Maret 2021, indeks P2 perdesaan sebesar 0,649. Satu semester berikutnya nilai indeks P2 turun menjadi 0,451. Selanjutnya pada Maret 2022, indeks P2 naik kembali menjadi 0,579. Walaupun mengalami kenaikan pada Maret 2022, nilai tersebut terlihat lebih rendah jika dibandingkan kondisi Maret 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin membaik.

perempuan pemilik usaha kecil dan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

4.) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kurang Mendapatkan Perhatian.

Terdapat tiga kabupaten di DIY yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Ketiga kabupaten tersebut, memiliki luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 2.169.326 jiwa atau hampir 60% total penduduk DIY. Kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY sebesar 41,04% dari total PDRB DIY. Daerah tersebut memiliki potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap DIY menurut data pada tahun 2020 masih sangat rendah yakni 6.545 ton.

Namun, sepertinya potensi ekonomi wilayah pesisir selatan DIY masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kondisi tersebut antara lain dapat dilihat dari data gabungan PDRB dari ketiga kabupaten di wilayah selatan, yang dirilis BPS DIY tahun 2021, yang hanya sebesar 41,04% dari total PDRB DIY. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan total PDRB dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Selain itu, faktor yang kurang menguntungkan adalah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah selatan DIY jika dibandingkan dengan wilayah utara DIY.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IDM) tahun 2022 menyatakan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Gunung Kidul masih memerlukan perhatian khusus terkait akses sarana pasarana yang mendukung kegiatan sosial budaya, ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Dukungan berbagai elemen pembangunan diharapkan semakin memantapkan desa/kalurahan dalam mencapai kemandirian.

Tabel 2-191 Status IDM Tahun 2022 Menurut Kalurahan di DIY

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Kalurahan	Status IDM 2022
1	Kulon Progo	Temon	Jangkaran	Mandiri
2	Kulon Progo	Temon	Sindutan	Maju
3	Kulon Progo	Temon	Palihan	Maju
4	Kulon Progo	Temon	Glagah	Maju
5	Kulon Progo	Wates	Karangwuni	Mandiri
6	Kulon Progo	Panjatan	Garongan	Mandiri
7	Kulon Progo	Panjatan	Pleret	Mandiri
8	Kulon Progo	Panjatan	Bugel	Mandiri
9	Kulon Progo	Galur	Banaran	Mandiri
10	Kulon Progo	Galur	Karangsewu	Mandiri
11	Bantul	Srandakan	Poncosari	Maju
12	Bantul	Sanden	Gadingsari	Mandiri
13	Bantul	Sanden	Srigading	Mandiri
14	Bantul	Kretek	Parangtritis	Mandiri

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Kalurahan	Status IDM 2022
15	Bantul	Kretek	Tirtohargo	Mandiri
16	Gunung Kidul	Panggang	Girikarto	Maju
17	Gunung Kidul	Panggang	Giriwungu	Maju
18	Gunung Kidul	Tepus	Sidoharjo	Mandiri
19	Gunung Kidul	Tepus	Tepus	Maju
20	Gunung Kidul	Tepus	Purwodadi	Mandiri
21	Gunung Kidul	Saptosari	Krambilsawit	Maju
22	Gunung Kidul	Saptosari	Kanigoro	Maju
23	Gunung Kidul	Girisubo	Balong	Maju
24	Gunung Kidul	Girisubo	Jepitu	Maju
25	Gunung Kidul	Girisubo	Tileng	Mandiri
26	Gunung Kidul	Girisubo	Pucung	Mandiri
27	Gunung Kidul	Girisubo	Songbanyu	Mandiri
28	Gunung Kidul	Tanjungsari	Kemadang	Mandiri
29	Gunung Kidul	Tanjungsari	Ngestirejo	Maju
30	Gunung Kidul	Purwosari	Giripurwo	Mandiri
31	Gunung Kidul	Purwosari	Giricahyo	Maju

Sumber: Kementrian Desa,PDT Dan Transmigrasi, 2022

Masyarakat di wilayah pesisir DIY memiliki banyak potensi ekonomi. Potensi tersebut berupa potensi wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, potensi pariwisata dan pertanian. Potensi ekonomi masyarakat pesisir tersebut didukung dengan sudah merebaknya UMKM yang bergerak pada sektor makanan, oleh-oleh, dan permainan pendukung wisata. Ekonomi masyarakat pesisir dapat diberdayakan dengan cara memasarkan produknya dengan teknik pemasaran yang efisien dan efektif untuk menarik pembeli adalah dengan melakukan digital branding dan marketing.

Peraturan Daerah DIY No. 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) DIY Tahun 2011-2030 dan Pergub DIY No. 38 Tahun 2011 tentang RSWP3K Tahun 2011-2031 merupakan Upaya teknokratis Pemerintah Daerah DIY untuk

meningkatkan perekonomian di kawasan Pantai Selatan (PANSELA). Terwujudnya akses Jalan Lintas Selatan DIY sepanjang 125,125 km dari Karangnongko di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Jerukwudel di Kabupaten Kabupaten Gunungkidul dan hingga tembus perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, akan sangat strategis untuk mewujudkan program Pemerintah DIY yaitu Misi dan Visi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, bahwa Pantai Selatan menjadi Halaman Depan DIY dan Konsep Among Tani, Dagang Layar (ATDL).

Upaya lain dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir antara lain :

a.) Pemberian bantuan dan jaminan sosial.

b.) Penyediaan akses sarana prasarana dasar.

c.) Pemberdayaan kelompok nelayan.

d.) Akses transportasi menuju tempat wisata dan penumbuhan, pengembangan wisata yang bersertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*).

5.) Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Digital Economy* Masih Kurang Berkembang.

DIY memiliki keunggulan pada kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Pemuda dan telah tingginya penggunaan sistem informasi. Di sisi lain sektor usaha kecil menengah menjadi sendi ekonomi utama penduduk DIY. Kemajuan sektor UKM sudah mulai memasuki digital economi diantaranya dengan metode penjualan online, jasa antar online dan layanan lainnya. Namun Provinsi DIY juga ketimpangan wilayah yang tinggi sehingga pemberdayaan masyarakat melalui UKM ataupun usaha kecil pribadi masih lebih banyak tersentral di kabupaten kota yang sudah rendah angka kemiskinannya dan lebih banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas.

Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat berubah mengikuti perubahan termasuk cara melakukan interaksi pada semua aspek kehidupan, terjadinya pandemic COVID-19 memperkuat terjadinya perubahan tersebut. Usaha kecil mikro yang dapat bertahan adalah usaha yang melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) yaitu dengan melakukan pemasaran secara online. Teknik pemasaran yang digunakan sangat sederhana menggunakan media sosial dan sarana sederhana. Kondisi ini mendukung perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi digital. Masyarakat sasarannya meliputi: rumah tangga miskin, perempuan pemilik usaha kecil dan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

6.) BUMKal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Stagnan.

Sejak tahun 2017 perkembangan jumlah Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan (BUMKal) di DIY cukup pesat, setiap tahun terjadi pembentukan baru dan peningkatan strata kategori. Namun perlu senantiasa diupayakan peningkatan kapasitas bagi pengelola maupun aparat Desa/Kalurahan agar mampu berperan dan memberdayakan lembaga ekonomi desa ini agar berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2-192 Jumlah BUMDes/BUMKal DIY

Tahun	Jumlah BUMDes/BUMKal DIY
2017	183
2018	279
2019	306
2020	343
2021	349
2022	366

Sumber: Dataku, Oktober 2022

Tabel 2-193 Data BUMKal di DIY Menurut Kategori Tahun 2022

Kabupaten	Belum Terbentuk	Dasar	Tumbuh	Kembang	Maju	Jumlah
Bantul	3	16	30	20	6	**75**
Kulon Progo	0	8	41	32	6	**87**
Gunungkidul	0	15	60	60	9	**144**
Sleman	23	25	31	4	3	**86**
Jumlah	**26**	**64**	**162**	**116**	**24**	**392**

Sumber : Biro Bermas per 30 September 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes telah memberikan peta jalan kepada pemerintah desa dan supra desa serta pengelola BUMDes untuk lebih berkembang dan profesional dalam mengelola usahanya. Dengan adanya peraturan ini keberadaan BUMKal merupakan entitas badan hukum yang bisa memperluas usahanya baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ke tiga. Masih banyak permasalahan pada BUMKal itu sendiri, baik SDM, tata kelola dengan pemerintah desa sebagai pemilik modal, manajemen maupun pemasarannya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas bagi pengelola dan pemilik (dalam hal ini Pemerintah Kalurahan) BUMKal. Pelatihan ini tentunya harus disesuaikan dengan kondisi (status) dan jenis usaha BUMKal tersebut. Jika statusnya dasar tentunya akan berbeda materi pelatihan dengan BUMKal yang sudah tumbuh, berkembang atau mandiri. Dan yang kalah penting juga adalah perlunya reorganisasi dan digitalisasi pengelolaan BUMKal.

7.) Peran LPMD/K Sebagai Mitra Pemerintah Kalurahan Dalam Proses Pembangunan di Kalurahan.

Dalam pembangunan kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) merupakan mitra kerja dari pemerintah kalurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) sangat berpengaruh terhadap pembangunan, oleh karena itu Lurah sebagai kepala tertinggi dalam Pemerintahan Kalurahan maka seharusnya bisa bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) begitu

juga dengan masyarakat. Dasar hukum keberadaan LPMD adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Selain itu, di dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakat Desa yang terdiri antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 94 juga disebutkan bahwa dalam manajemen Pemerintahan Desa dan manajemen pembangunan desa, peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisapasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan Kalurahan, diperlukan peran optimal dari LPMD/K, dan masih banyak ditemui masalah baik dari sisi Sumber Daya Manusia, pelaksanaan ataupun pengelolaan LPMD/K. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kualitas LPMD/K. Dari berbagai permasalahan sektor pemberdayaan masyarakat yang ada maka dibutuhkan strategi untuk penanggulannya.

Peran LPMD/K yang optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui muskal dan musrenbangkal serta mengawal usulan perencanaan pembangunan kalurahan agar sesuai dengan usulan masyarakat dan perundang undangan. Saat ini sumber pendapatan / keuangan kalurahan yang berasal dari perolehan pajak dan restribusi daerah, dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi terlampau cukup baik. Oleh karena itu, keberadaan LPMD/K sangatlah penting untuk bisa mengontrol proses pembangunan desa.

LPMD/K harus bisa memerankan semua elemen di kalurahan terutama para pemuda dan perempuan. Peran pemuda sebagai kader pembangunan kalurahan harus terus digalakkan agar proses regenerasi peran pembangunan bisa berlanjut. Selain itu, peran perempuan dalam pembangunan juga harus di optimalkan, mengingat selama ini gerak peran perempuan lebih banyak di sektor dasar kebutuhan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain lain. Untuk itu kualitas pengelolaan LPMD/K harus ditingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia, dukungan prasarana, kemajuan teknologi dan unsur

pendukung agar peran LPMD/K dapat lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.5.2.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

1.) Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Grand Desain Pembangunan Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) mengamanatkan setiap tingkatan wilayah untuk menyusun suatu GDPK. Dokumen strategis ini merupakan suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan. GDPK berisi 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

DIY telah menyusun GDPK pada tahun 2018, dan melakukan review terhadap dokumen ini pada semester kedua tahun 2022. Namun, hingga saat ini GDPK DIY hanya berfungsi sebagai sebuah pedoman rekayasa dinamika kependudukan. Dokumen ini belum menjadi sebuah regulasi baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah yang sah dan mengikat. Sementara, pengesahan dokumen ini sebagai peraturan daerah diperlukan karena GDPK semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penyusunan RPJMD.

2.) Tingginya *unmet need* kebutuhan ber-KB

Unmet need Keluarga Berencana (KB) adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Data unmet need dapat dibaca sebagai persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Data memperlihatkan bahwa unmet need seluruh Kabupaten/Kota di DIY meningkat sangat tinggi di tahun 2022. Unmet need KB yang tinggi cenderung membawa dampak negatif bagi kualitas hidup perempuan, seperti peningkatan angka kematian ibu dan kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menekan unmet need di DIY seperti dukungan kebijakan dan program pembangunan terkait kesehatan reproduksi dan KB, penyediaan akses

informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi yang lebih luas bagi masyarakat, serta peningkatan akses keluarga miskin terhadap pelayanan KB.

Tabel 2-194 Perkembangan *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

No	Kabupaten /Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kulon Progo	10,25	10,25	8,23	8,89	12,90
2	Bantul	9,76	10,55	9,99	9,20	17,20
3	Gunungkidul	8,80	9,48	8,82	8,87	13,90
4	Sleman	9,50	9,04	7,95	7,13	19,10
5	Yogyakarta	15,14	14,15	12,10	12,05	20,50

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023.

3.) Belum maksimalnya penggunaan kontrasepsi modern

Berdasarkan data BKKBN pada tiga tahun terakhir,persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR) di DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, mCPR DIY adalah 53,79%. Angka ini sempat naik pada tahun 2020 yaitu pada angka 57,10%. Namun, penggunaan kontrasepsi modern di DIY Kembali turun pada 2021 sehingga pada angka 55,60%. Angka ini tidak memenuhi target BKKBN yang berusaha menaikkan pemakaian kontrasepsi modern hingga mencapai angka 62,40% pada tahun 2021. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya pengguna kontrasepsi tradisional, karena secara umum CPR naik namun rendah pada mCPR.

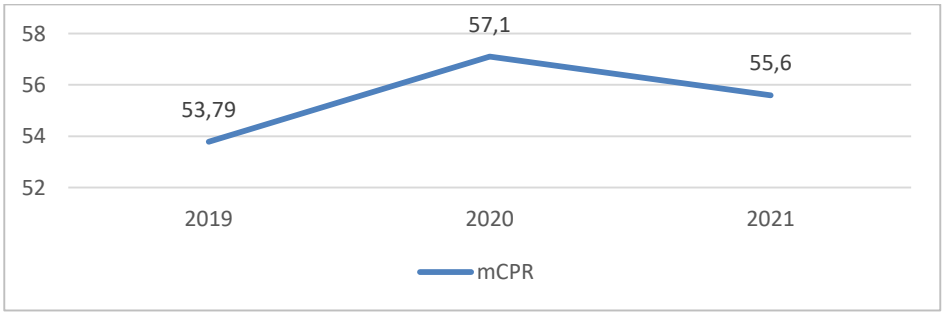

Sumber: BKKBN (data diolah)

Gambar 2-93 Perkembangan mCPR DIY, 2019-2021

4.) Meningkatnya Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun yaitu angkatan kerja. *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 berdasar data BPS di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2-195 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020

Uraian	*Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk		
	2010	2015	2020
DIY	45,8	44,9	45,6

Sumber : BPS (2020)

Sementara menurut Proyeksi Penduduk 2015-2045 yang dirilis Bappenas, DIY mengalami penurunan pada piramida penduduk di usia produktif, dan mengalami kenaikan pada piramida penduduk di usia lanjut usia, khususnya perempuan. Hal ini selaras dengan tingginya Usia Harapan Hidup di DIY dan banyaknya migrasi masuk ke DIY dari warga luar DIY yang berusia lanjut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 (Data Agustus 2020: 71,12%) serta Migrasi masuk DIY banyak diwarnai penduduk usia lansia sementara migrasi keluar DIY banyak dari penduduk usia produktif. Apabila dielaborasikan dengan data Prevalensi Penyakit Tidak Menular yang cukup tinggi di DIY, maka Rasio Dependency yang tinggi akan juga disertai dengan resiko penyakit tidak menular yang semuanya memerlukan antisipasi dan penanganan yang memadai. Di sisi kebijakan, juga telah disusun regulasi mengenai kelompok rentan seperti Disabilitas, Kelanjutusiaan, Pemenuhan Hak Anak, Kesetaraan Gender dan lain-lain, yang menjadi modal untuk menindaklanjuti *Dependency Ratio* dan masalah terkait kelompok rentan di DIY.

Untuk mengatasi masalah *Dependency Ratio* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu : mengupayakan kualitas kesehatan lansia sehingga tidak ada beban tambahan, memberdayakan lansia produktif melalui usaha ekonomi produktif, dan meningkatkan lowongan pekerjaan di DIY sehingga meningkatkan TPAK.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan pemaksimalan potensi yang dimiliki baik internal maupun eksternal yaitu Angka harapan hidup DIY tinggi (2021: 75,04) dan adanya RAD Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan lansia di DIY, serta kondisi mayoritas lansia DIY tinggal di rumah bersama keluarga sehingga tidak dalam kondisi terlantar (2021 : 94.42 %). Berbagai kondisi tersebut diharapkan akan mampu mengatasi beberapa poin masalah tingginya jumlah penduduk usia non-produktif, khususnya usia diatas 65 tahun.

5.) Tingginya permasalahan keluarga yang kemudian berefek pada permasalahan sosial lanjutan di masyarakat

Data dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian kawin di DIY pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dengan tren peningkatan jumlah pada gugatan istri. Dengan rincian, jumlah gugatan istri yang hampir 3 kali lipat gugatan suami. Pada Tahun 2020, pandemi turut mempengaruhi alasan perceraian khususnya terkait permasalahan ekonomi. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk mempengaruhi tingkat keharmonisan dan relasi dalam keluarga. Namun penyebab perceraian pada tahun 2021 tercatat lebih beragam di mana faktor pendidikan, kondisi keuangan, dan dampak teknologi informasi mempengaruhi terjadinya perceraian.

Tabel 2-196 Jumlah Gugatan Perceraian di DIY Tahun 2020-2021

No	Wilayah PA	2020			2021		
		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan	
			Permohonan Suami	Gugatan Istri		Permohonan Suami	Gugatan Istri
1	PA Wates	584	144	440	621	164	457
2	PA Bantul	1279	341	938	1607	406	1.201
3	PA Wonosari	1373	378	995	1390	397	993
4	PA Sleman	1667	568	1.099	1661	426	1.235
5	PA Yogyakarta	645	145	500	663	166	497
	Jumlah	**5.548**	**1.576**	**3.972**	**5.942**	**1.559**	**4.383**

Sumber: Data diolah (2022))

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa warga DIY masih rentan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY pada tahun 2021 terdapat 899 kasus KDRT terjadi di DIY. Data ini berarti 73% dari total 1.235 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama Tahun 2021.

Lebih lanjut, data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terdahap perempuan dan anak tidak terbatas pada konflik internal pasangan menikah saja. Bahkan, 654 kasus kekerasan terjadi pada penduduk yang belum menikah. Dengan demikian, kekerasan juga terjadi pada bentuk-bentuk relasi selain suami istri yang ada dalam rumah tangga. Termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Jika dikaitkan kembali pada kondisi pandemi, resiko kekerasan seperti ini meningkat karena orang tua mengalami tekanan berlipat begitu pandemi terjadi.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga adalah hal yang wajib segera diupayakan di DIY. Tidak hanya secara mikro oleh masing-masing keluarga, namun diperlukan upaya terstruktur, sistematis, dan *massif* dari Pemerintah Daerah sehingga kondisi ketahanan keluarga dapat terwujud.

Tabel 2-197 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan di DIY Tahun 2020 dan 2021

No.	Lokasi Lembaga	Jenis Kelamin	TEMPAT KEJADIAN						
			2020			2021			
			Rumah Tangga	Tempat Kerja/ Sekolah	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja/ Sekolah	Lainnya	Jumlah
1.	Kulon progo	Laki-laki	15	1	1	10	3	0	13
		Perempuan	79	1	22	53	0	15	68
2.	Bantul	Laki-laki	32	4	8	22	34	3	59
		Perempuan	127	7	46	153	1	43	197
3.	Gunung kidul	Laki-laki	2	0	1	7	0	16	23
		Perempuan	20	0	9	37	2	20	59
4.	Sleman	Laki-laki	39	10	17	18	13	9	40

No.	Lokasi Lembaga	Jenis Kelamin	TEMPAT KEJADIAN						
			2020			2021			
			Rumah Tangga	Tempat Kerja/ Sekolah	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja/ Sekolah	Lainnya	Jumlah
		Perempuan	172	8	56	168	4	56	228
5.	Yogyakarta	Laki-laki	21	3	16	27	2	9	38
		Perempuan	438	14	97	404	10	96	510
6	Provinsi	Laki-laki							
		Perempuan							
D.I. Yogyakarta		**Laki-laki**	**109**	**18**	**43**	**84**	**52**	**37**	**173**
		Perempuan	**836**	**30**	**230**	**815**	**17**	**230**	**1,062**
		Total	**945**	**48**	**273**	**899**	**69**	**267**	**1,235**

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY
Sumber data: Sekretariat Forum Perlindungan Kekerasan DIY

Solusi untuk mengatasi masalah angka perceraian dan KDRT yaitu dengan optimalisasi kerjasama lintas sektor dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sehingga keluarga di DIY bisa melaksanakan 8 fungsinya dengan baik. Selain itu juga dengan mengoptimalkan potensi internal dan eksternal yaitu. Perda Ketahanan Keluarga sebagai pengarah dalam pembangunan ketahanan keluarga di DIY dan Kerjasama lintas sektor yang sudah berjalan dalam pembangunan ketahanan keluarga, diharapkan akan mengatasi beberapa masalah dalam perwujudan keadilan sosial diantaranya budaya patriarki dan beberapa elemen penting dalam Perda Ketahanan Keluarga belum terealisasi. Seperti contohnya Konselor Ketahanan Keluarga, serta masalah semakin terbukanya arus informasi yang memungkinkan akulturasi dengan budaya luar dan tingginya angka kemiskinan DIY.

2.5.2.2.9 Urusan Perhubungan

1.) Tingkat kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan Propinsi dikategorikan mendekati arus tidak stabil pada jam-jam puncak.

Tingkat kepadatan lalu lintas diukur dengan nilai derajat kejenuhan (DS) atau nilai perbandingan antara volume dan kapasitas dari ruas jalan (V/C ratio). Nilai derajat kejenuhan tersebut menjadi parameter atau indicator yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan peringkat prioritas penanganan. Berdasarkan data V/C Ratio sesuai

Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang pada ruas Jalan Provinsi pada tahun 2022 dapat diperoleh hasil bahwa pada wilayah dengan ciri perkotaan (kota Yogyakarta, Kab. Sleman) mempunyai DS tertinggi yang lebih besar dibadingkan dengan kabupaten yang lain. Rincian gambaran DS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a.) Kabupaten Bantul
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Yogyakarta - Barongan (Brimob Imogiri) dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,70 pagi hari, 0,46 pada siang hari, dan 0,72 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,73.

b.) Kabupaten Kulon Progo
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Dayakan-Pengasih dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,5 pagi hari, 0,32 pada siang hari, dan 0,64 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,64.

c.) Kabupaten Sleman
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Yogyakarta-Kaliurang dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,76 pagi hari, 0,59 pada siang hari, dan 0,9 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,9.

d.) Kabupaten Gunung Kidul
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Bibal-Panggang dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,62 pagi hari, 0,19 pada siang hari, dan 0,54 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,62.

e.) Kota Yogyakarta
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan KH Ahmad Dahlan dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,82 pagi hari, 0,69 pada siang hari, dan 0,89 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,89.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa DS tertinggi secara umum terjadi pada jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.15-17.15. Data pada jam puncak tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar ruas jalan propinsi di DIY berada pada tingkat pelayanan C dan D dimana pada tingkat pelayanan tersebut arus dari stabil menuju tidak stabil dan kecepatan cenderung mulai melambat.

Kondisi tersebut mengakibatkan waktu tempuh menjadi lebih lama, peningkatan emisi gas buang, inefisiensi ekonomi, dan peningkatan kondisi stress pengguna jalan. DS pada jam puncak pagi dan diakibatkan

oleh banyaknya kendaraan yang melakukan mobilitas di ruas jalan untuk melakukan aktivitas bepergian seperti ke sekolah ataupun bekerja dan sebaliknya. Pada wilayah Kota Yogyakarta juga memiliki hambatan samping tinggi hingga sangat tinggi dimana hambatan samping ini merupakan dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktifitas samping segmen jalan. Aktivitas yang terjadi di samping jalan sangat berpengaruh terhadap kinerja lalu lintas, dan paling berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan.

Tabel 2-198 Prioritas Penanganan Ruas Jalan Berdasarkan Peringkat Kinerja terburuk

No	No Ruas	Ruas Jalan	Wilayah	Derajat Kejenuhan			Rank
				Pagi	Siang	Sore	
1	84	Yogyakarta - Kaliurang (Gardu PLN)	Kabupaten Sleman	0,76	0,59	0,9	1
2	85	Yogyakarta - Kebonagung 1 (DPN Giant Swalayan)	Kabupaten Sleman	0,49	0,50	0,90	1
3		Jalan KH. Ahmad Dahlan	Kota Yogyakarta	0,82	0,69	0,89	3
4		Jalan Pabringan	Kota Yogyakarta	0,60	0,82	0,87	4
5	85	Yogyakarta - Kebonagung 1 (Ruko Bantulan)	Kabupaten Sleman	0,77	0,62	0,87	5
6		Jalan Wates (Dpn Pasar Buah Gamping)	Kota Yogyakarta	0,63	0,61	0,85	6
7		Jl. Seturan (STIE YKPN)	Kabupaten Sleman	0,75	0,66	0,84	7
8		Jalan Jenderal Sudirman (Dpn Phoenix Hotel)	Kota Yogyakarta	0,57	0,65	0,83	8
9		Jalan Panembahan Senopati	Kota Yogyakarta	0,56	0,65	0,76	9
10		Jalan Am Sangaji (Depan Gurame Bangjo)	Kota Yogyakarta	0,75	0,68	0,75	10

Sumber: data diolah (2022)

DS yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan kapasitas jalan yang sangat rendah, dan peningkatan

volume kendaraan yang dipicu oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan berakibat pada masih rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Manajemen lalu lintas dilakukan untuk mengatasi permasalahan DS yang tinggi. Namun penyelenggaraan ATCS yang sudah tersedia di DIY belum bersinergi dengan baik dalam hal pengelolaan karena masih berbasis kewilayahan. ATCS (*Area Traffic* Control *System*) adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pasa suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimaisasi dan koordinasi lampu lalu lintas disetiap persimpangan jalan. Pada saat ini ATCS yang terhubung dengan *control room* di Dinas Perhubungan masih sebatas pemantauan dan belum pada fungsi pengaturan dan pengendalian. Fungsi pengaturan dan pengendalian dilakukan dengan meningkatkan ATCS menjadi ATMS *(Advanced Traffic Managemen Systems)* sebagai bagian dari ITS *(Intelligent transportation system).*

Akibat manajemen lalu lintas yang belum optimal diperlukan suatu rekayasa lalu lintas sebagai upaya untuk menurunkan DS. Pelaksanaan rekayasalalu lintaspada beberapa kawasan/jalan telah memberikan signifikan namun masih terdapat beberapa ruas yang belum dapat dilkasanakan secara tuntas dan memberikan hasil optimum.

2.) Penggunaan Angkutan umum lebih rendah dari penggunaan kendaraan pribadi.

Secara sistem, layanan angkutan umum sudah tersedia mulai dari Angkutan Perdesaan dalam propinsi, AKDP dan angkutan perkotaan. Kinerja system layanan ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a.) Kondisi saat ini tidak terdapat layanan angkutan pedesaan dalam provinsi yang melayani wilayah DIY di 5 kabupaten kota. Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021 terdapat potensi penanganan angkutan pedesaan provinsi yang terdiri dari trayek:

- Imogiri – Panggang – Parangtritis
- Jogja – Imogiri
- Jogja – Parangtritis
- Gamping – Sentolo – Wates – YIA

- Godean – Terminal Kenteng – Dekso – Kalibawang - Samigaluh

b.) Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan. Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021, dari 45 Trayek yang terdaftar dalam SK Gubernur hanya terdapat 5 trayek yang beroperasi secara rutin dan trayek tersebut dilayani oleh Damri melalui intervensi Pemerintah Pusat.

Tabel 2-199 Trayek AKDP yang terlayani di DIY

No	Trayek	*Load Factor* (%)
1	Jogja - Bantul - Brosot	21,25
2	Jogja - Wates	21,25
3	Jogja - Wonosari	21,25
4	Jogja - Parangtritis	30,3
5	Palbapang - YIA	14,6

Sumber: data diolah (2021)

c.) Layanan angkutan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta saat ini didukung oleh Bus Trans Jogja dan layanan Teman Bus (*Buy The Service*). Secara total angkutan perkotaan melayani berapa trayek yaitu 18 jalur yang diselenggarakan oleh Pemda DIY dan, 3 jalur (Teman Bus trayek 12, 13, 14).
Pada tahun 2022 jumlah armada Trans Jogja yang siap operasi adalah 116 sedangkan yang siap guna operasi sebanyak 128 Armada. Layanan operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 WIB – 21.30 WIB dan selama pandemic mengalami pengurangan waktu operasional dari pukul 06.00 WIB – 19.00 WIB. Kemudian untuk layanan Buy The Service (Teman bus) dengan Koridor Ngaglik 16 Bus, Godean 10 Bus dan Ngemplak 14 Bus dengan cadangan sebanyak 4 Bus.

Berdasarkan data Kinerja Angkutan Perkotaan Transjogja, dari layanan tersebut di atas didapatkan hasil load faktor sebesar 10,13 % untuk hari libur dan 9,72% untuk hari kerja. Nilai rata-rata penilaian terhadap SPM Transjogja yaitu 0.942 dan standar

minimum adalah 0.92 maka pelayanan SPM Transjogja telah memenuhi stardar, namun masih perlu ditingkatkan untuk beberapa aspek seperti aspek keteraturan dimana indikatornya adalah tersedianya informasi layanan, *headway* dan waktu henti di halte.

Simpul transportasi dan fasilitas pendukung masih memerlukan pengembangan dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum secara menyeluruh. Pengembangan *park and ride* sebagai bagian dari penyelenggaraan multimoda di DIY merupakan bagian dari *push strategy* untuk menumbuhkan minat orang menggunakan angkutan umum.

3.) Angka kecelakaan pada ruas jalan propinsi di DIY masih lebih tinggi dari target nasional.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa pada jalan propinsi di wilayah DIY rata-rata setiap hari terjadi 14,72 kecelakaan, dengan rata-rata korban meninggal dunia sebanyak 1,45 orang, korban luka berat sebanyak 0,02 orang dan korban luka ringan sebanyak 18,50 orang dan kerugian material sebesar 2,3 miliar.

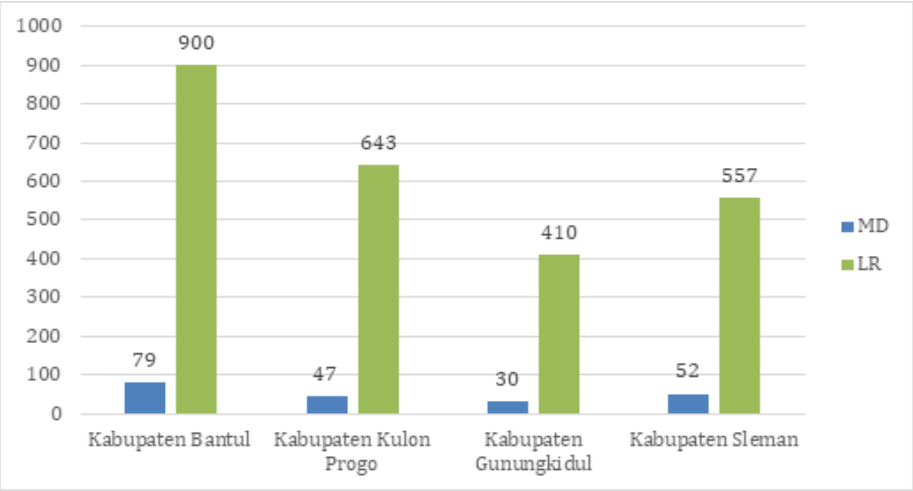

Sumber: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

Gambar 2-94 Jumlah Korban Kecelakaan Jalan Provinsi di DI Yogyakarta Tahun 2022

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016-2021, jumlah kecelakaan di DIY mengalami peningkatan rata-rata setiap tahun sebesar 17,39%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -17,95% seiring dengan adanya pandemi Covid-19, dimana diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat, tetapi pada tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan kembali mengalami kenaikan sebesar 6,66% seiring dengan meredanya pandemi Covid-19. Tingkat Fatalitas (korban meninggal dunia dibandingkan jumlah kasus) rata-rata tahun 2018 – 2021 sebesar 9,108% dengan tingkat fatalitas tertinggi di tahun 2018 sebesar 11,123%. Tingkat fatalitas ini masih di bawah tingkat fatalitas Nasional rata-rata pada tahun 2018 – 2022 yaitu sebesar 24,312% dengan tingkat fatalitas tertinggi di tahun 2018 sebesar 27,297%.

Tabel 2-200 Data Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2016 – 2021

Tahun	Kasus Kecelakaan	Tingkat Fatalitas			Kerugian Material
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
2016	3.808	544	12	4.883	2.221.838.000
2017	4.313	398	49	5.963	2.879.731.000
2018	4.729	526	16	6.698	2.786.635.000
2019	6.113	498	7	7.706	2.722.255.008
2020	5.016	437	1	6.341	2.344.035.500
2021	5.350	452	3	6.390	2.393.687.000

Sumber : Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Ditlantas Polda DIY, 2022

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan di DIY adalah:

a.) Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas.

b.) Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Sebagai cintoh masih ditemukan pelanggaran terkait *Over Dimension Over Loading (ODOL)*

c.) Faktor kondisi lingkungan fisik

Faktor lingkungan fisik merupakan elemen ekstristik yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan dan cuaca tertentu dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas, seperti jalan basah/licin, jalan rusak, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Indeks fatalitas per 100.000 penduduk di DIY rata-rata tidak memenuhi target Rencana Umum Nasional Keselamatan. Pada tahun 2020, indeks fatalitas sempat memenuhi target Rencana Umum Nasional Keselamatan disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang cukup ketat kala itu. Tetapi meskipun pada tahun 2021 pandemi belum berakhir, tampak bahwa indeks fatalitas melonjak drastis mencapai 12,17.

Tabel 2-201 Target Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2021-2040

Tahun	Prediksi Jumlah kematian (jiwa)	TARGET 1		TARGET 2	
		Indeks fatalitas per 100.000 penduduk	Persentase Penurunan Indeks fatalitas per 100.000 penduduk	Indeks fatalitas per 10.000 kendaraan	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas per 10.000 kendaraan
2010 *Tahun dasar)*	31.234	13,14	-	3,93	-
2025	27.838	9,53	30%	1,37	65%
2030	23.852	7,62	40%	0,98	75%
2035	20.246	6,04	55%	0,78	80%
2040	16.640	4,63	65%	0,59	85%

Sumber: RUNK 2021-2040

Tabel 2-202 Perbandingan antara Target Rencana Umum Nasional Keselamatan dengan Indeks Fatalitas Riil di DIY

Tahun	Meninggal Dunia	Jumlah Penduduk	Indeks Fatalitas per 100.000 Penduduk		Jumlah Kendaraan	ndeks Fatalitas per 10.000 Kendaraan	
			Riil	Target		Riil	Target
2017	442	3.762.200	11,75	11,30	1.311.073	3,37	2,95
2018	446	3.802.872	11,73	11,04	1.409.840	3,16	2,75
2019	434	3.842.932	11,29	10,77	2.918.976	1,49	2,55
2020	377	3.668.719	10,28	10,51	3.020.175	1,25	2,36
2021	452	3.712.896	12,17	10,25	3.125.720	1,45	2,16

Sumber: DIY Dalam Angka Tahun 2020 dan Tahun 2022 (Data diolah, 2022)

Penyediaan fasilitas keselamatan perlu terus dioptimalkan karena data menunjukkan bahwapersentase sepeda motor yang mengalami kecelakaan menduduki peringkat paling tinggi dibandingkan dengan kendaraan lain yaitu rata-rata sebesar 85,71% (dari tahun 2016 – 2021).

Menurut data yang diperoleh dari BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY, pada wilayah DIY terdapat tiga satuan pelaksana unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) yaitu Kulwaru (Kulon Progo), Kalitirto (Sleman), dan Taman Martani (Sleman). Jumlah kendaraan yang melakukan di Tahun 2021 meningkat sebesar 119,32% dari 4.073 kendaraan menjadi 8.933 kendaraan. Padahal, jumlah kendaraan yang masuk UPPKB di Tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 3% dari Tahun 2020. Dari seluruh kendaraan yang masuk UPPKB tersebut, pelanggaran kendaraan didominasi oleh kendaraan yang melanggar daya angkut *(overload)*.

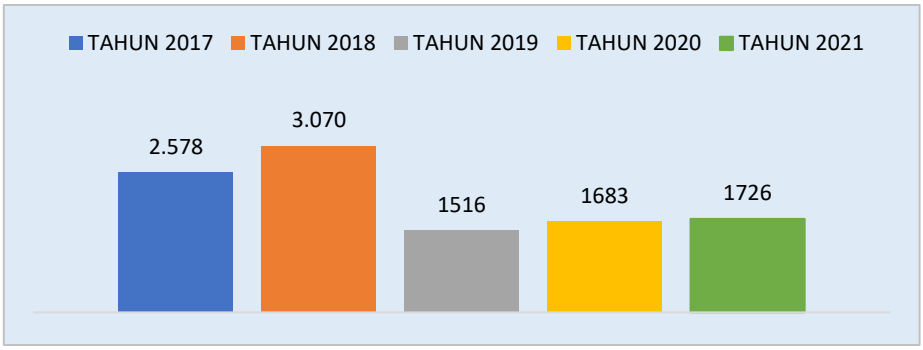

Sumber: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Gambar 2-95 Data Pelanggaran Batas Muatan Kendaraan Tahun 2017 – 2021

4.) Tingkat emisi dari sektor transportasi yang masih tinggi pada kawasan tertentu

Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor dan transportasi darat di DIY terbukti menjadi penyebab meningkatnya polusi udara. Sebab, penyumbang terbesar emisi di Yogyakarta berasal dari transportasi darat kendaraan bermotor. Adapun beberapa permasahan dalam menyumbang tingginya emisi di DIY adalah:

a.) Pertumbuhan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil tidak dapat dikendalikan serta tingkat emisi yang berada di atas ambang batas.

b.) Penyelenggaraan angkutan *non motorized* dan pedestrianisasi masih terbatas. Penyediaan fasilitas pejalan kaki belum memenuhi standar serta banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya. Layanan angkutan tradisional terdiri dari dua jenis moda angkutan yaitu Becak dan Andong dengan fungsi layanan sebagai angkutan pariwisata. Pada kondisi saat ini angkutan tradisional yang berada di wilayah DIY untuk andong sebesar 462 Andong dan 336 becak di kawasan sumbu Filosofi.

c.) Layanan angkutan umum yang melayani kawasan belum menjadi prioritas dan masih berbahan bakar fosil.

d.) Penyediaan TKP dalam kawasan yang mendukung pedestriasnisasi masih sangat terbatas.

2.5.2.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

1.) Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang berbeda berdasarkan karakter wilayah. Secara umum, skor Indeks Literasi Digital per provinsi ada di rentang 3,71 hingga 3,18. Skor tertinggi dimiliki oleh DIY dengan skor 3,71. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mengacu kepada kerangka kerja yang tercantum dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis dalam merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Literasi digital tersebut diukur merujuk kepada pilar digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture.

Berdasarkan survei Status Literasi Digital Indonesia 2021 yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di daerah perkotaan memiliki indeks literasi digital tinggi sebesar 52,5% dan indeks literasi digital 47,5%. Sedangkan di daerah perdesaan indeks literasi digital tinggi sebesar 49,8% dan indeks literasi digital 50,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terdapat selisih persentase indeks literasi digital tinggi di perkotaan sebesar 2,7 persen dibandingkan dengan pedesaan alias kawasan rural. Sebagai daerah dengan roda perekonomian yang relatif lebih maju, literasi digital masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Demikian juga yang terjadi di DIY, literasi masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutama di pedesaan, sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah.

2.) Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD

Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Data jumlah aplikasi tahun 2022 tercatat lebih dari 400, diperlukan penataan aplikasi berdasarkan clastering. Terdapat beberapa aplikasi yang melalukan penggandaan dalam proses bisnis. Adanya penataan aplikasi diharapkan peningkatan dalam hal integrasi data dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Penataan aplikasi Pemda DIY dilakukan dengan rekomendasi TIK yang

dapat memberikan arah standarisasi dalam pengembangan dan pemeliharaan. Domain Tata kelola SPBE diperlukan dalam mewadahi integrasi seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk itu dibutuhkan peta rencana arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service/layanan dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini, akan tetapi peta rencana arsitektur terkait dengan kebijakan pusat sebagai acuan sampai saat ini belum.

3.) Tantangan dalam transformasi digital penyelenggaraan Pemerintahan

Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (big data), dan kecerdasan artifisial (artificial intelligent). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan agile organization yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

4.) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang belum handal

Pemda DIY tercatat memiliki 279 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 194 unit kerja, media wireless sebanyak 74 unit kerja, 1 unit kerja menggunakan media Virtual Private Network (VPN) dan 10 unit kerja masih belum terkoneksi dengan jaringan intra Pemda DIY. Dengan adanya unit kerja yang masih menggunakan media wireless atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi di dalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan wireless, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal. Unit kerja yang masih menggunakan jaringan wireless memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati bandwidth dengan kapasitas terbatas,

untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti yang masih menggunakan media wireless menjadi media fiber optik. Selain itu sistem kabel fiber optik Pemda DIY yang belum menggunakan topologi ring membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan melakukan rekonfigurasi jaringan fiber optik Pemda DIY agar mempunyai backup link yang handal dengan tetap memperhatikan peta arsitektur SPBE Nasional.

5.) Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat

Sampai akhir 2022, masih terdapat sejumlah blank spot (area/Kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY. Kebutuhan layanan internet tidak saja untuk komunikasi antar-warga, melainkan juga dibutuhkan dalam mengakses pelayanan publik yang kini sudah semakin banyak yang berbasis layanan online, termasuk juga dalam konteks pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam masa pandemi, yang mensyaratkan siswa memiliki perangkat akses serta layanan internet. Selain itu, akses layanan internet juga dibutuhkan oleh warga pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam mengakses pasar serta memasarkan produknya. Selain aksesibilitas, literasi digital, termasuk digital marketing bagi pelaku UMKM juga belum optimal dan menjadi tantangan dalam pembangunan TIK di DIY ke depan.

2.5.2.2.11 Urusan Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah

1.) Terdapat penurunan volume usaha akibat pelambatan perekonomian pada tahun 2020-2021. Data menunjukan volume usaha Koperasi tahun 2020 hanya mencapai Rp 4,099,703 Juta Rupiah. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 4,491,041 Juta Rupiah. Meskipun tahun 2021 kondisi cenderung membaik, namun capaian volume usaha masih berada di bawah tahun 2019 yaitu hanya mencapai Rp 4,220,806 Juta Rupiah. Tahun-tahun mendatang, koperasi masih akan mengalami tantangan seiring dengan adanya ancaman terjadinya resesi global dan pelambatan perekonomian nasional.

2.) Partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi masih rendah

Keberlangsungan koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggotanya, tingkat partisipasi anggota dapat dilihat dari rutin atau tidaknya penyelanggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan data dari BPPSD DIY, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2021 sekitar 1.062 unit sementara jumlah koperasi aktif sebanyak 1.717 unit. Artinya ada sebanyak 38,15% koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Sementara apabila dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 1.436 unit, pada tahun 2019 berkurang menajdi 1.323 unit, pada tahun 2020 berkurang menjadi 1.106 unit, dan pada tahun 2021 menjadi 1.062 unit.

3.) Masih rendahnya skala usaha UMKM

Kapasitas usaha mikro dan kecil di DIY masih mengalami keterbatasan. Berdasarkan data survei yang ada pada sistem Sibakul Jogja, dari 261.634 pelaku usaha yang terdata, baru sekitar 2.324 yang sudah aktif dalam marketplace. Dari sisi produksi, masih banyak pelaku usaha dengan frekuensi produksi yang rendah yaitu 98,45% pelaku usaha berproduksi seminggu sekali.

4.) Masih rendahnya daya saing produk UMKM

Mayoritas produk UMKM belum terstandarisasi/tersertifikasi. Berdasarkan data survei yang ada pada sistem Sibakul Jogja, apabila diitinjau dari sisi keamanan pangan, sebanyak 99% pelaku usaha yang belum mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), Sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sertifikat Halal, serta Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Hal tersebut mengakibatkan produk yang dihasilkan (terutama produk makanan) belum memiliki daya saing untuk berkompetisi di pasaran.

5.) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi pada Koperasi dan UMKM

Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi pada Koperasi dan UMKM dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat tekonologi informasi untuk menghadapi era persaingan di pasar global. Berdasarkan data survei yang ada pada sistem Sibakul Jogja, jumlah pelaku usaha yang belum menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana promosi sebanyak 96%.

2.5.2.2.12 Urusan Penanaman Modal

1.) Masih rendahnya kegiatan investasi di DIY

Nilai investasi di DIY baik PMDN maupun PMA, masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian di wilayah lain. Menurut data dari BKPM RI, pada tahun 2021, realisasi PMA di DIY mencapai 21.813,6 Ribu US$ dan realisasi PMDN mencapai Rp 2.761.270 Juta. Berdasarkan realisasi tersebut, DIY menempati peringkat 32 untuk PMA dan peringkat 29 untuk PMDN.

Pertumbuhan investasi menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi nasional 2020-2024 ditargetkan rata-rata tumbuh 5,7-6.0% dengan investasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan tersebut dengan tumbuh 6,6-7,0%. Dengan kondisi tersebut, DIY diharapkan dapat meningkatkan besaran realisasi investasinya terlebih saat ini DIY sudah didukung dengan ketersediaan layanan bandara internasional baru yang potensial untuk mendongkrak aliran barang dan manusia

2.) Penanaman modal yang belum berkualitas

Kualitas investasi masih menjadi sorotan dalam RPJMN 2020-2024. Kegiatan investasi masih belum mampu menyukseskan transformasi struktural perekonomian Indonesia terutama karena kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar dan belum banyak yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Kondisi serupa juga terlihat di DIY. Investasi pada sektor sekunder seperti industri pengolahan cenderung mengalami pelambatan. Kegiatan investasi di DIY beberapa tahun terakhir ditopang oleh sektor tersier terutama kegiatan kontruksi. Investasi pada sektor konstruksi seperti Bandara atau Jaringan Kereta Api memang penting sebagai prasyarat konektivitas antar wilayah dan layanan logistik. Namun demikian, untuk memperkuat struktur perekonomian, investasi pada sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian. Melalui sektor industri manufaktur, komoditas yang dihasilkan sektor primer menjadi bernilai

tambah dan bahkan memberikan peluang untuk kegiatan ekspor. Di sisi lain, saat ini sektor industri pengolahan memiliki serapan tenaga kerja yang cukup signifikan besarnya.

Lebih lanjut, arahan RPJMN 2020-2024 penanaman modal juga mestinya bergeser dari sektor yang berbasis sumber daya alam (*resource base*) ke sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

3.) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi investor

Untuk mencapai target pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN, perlu didorong deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan. Survey EoDB menempatkan Indonesia pada peringkat 73 pada tahun 2020. Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk dapat memperbaiki peringkat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, dimana Indonesia masih menempati peringkat 6 di antara 8 negara ASEAN.

Sementara itu Dalam laporan tahunan Institute for Management Development (IMD) *World Competitiveness Center* pada tahun 2019, peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu dari posisi ke-43 menjadi posisi ke-32. Namun berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI) yang dikeluarkan oleh *World Economy Forum*, posisi Indonesia menurun dari peringkat 45 pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 pada tahun 2019. Dua aspek yang membuat Indonesia turun peringkat yaitu efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Dari sisi pemerintah, yang menjadi sorotan utama bagi para pelaku usaha yaitu masih tingginya biaya-biaya tak perlu (*redundancycost*). Sementara dari sisi bisnis, yang menjadi perhatian utama yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Dalam konteks nasional, kajian *Competitiveness Index* (*Asian Competitiveness Institute* - NUS) tahun 2021 memberikan DIY peringkat ke 8 Indeks Daya Saingnya atau menurun jika dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya yang meraih urutan ke 6. Aspek yang masih kurang di DIY menurut kajian tersebut adalah kelembagaan pemerintah serta kondisi keuangan/bisnis serta ketenagakerjaan.

2.5.2.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1.) Masih Tingginya Pemuda Korban Kejahatan dan Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan.

Berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Pemuda 2018, proporsi pemuda korban kejahatan mencapai 2,37% yang merupakan terbesar se-Indonesia. Selain itu, proporsi pemuda yang memiliki keluhan kesehatan 8,83% berada di atas angka nasional 7,68%.

2.) Masih perlu ditingkatkannya wirausaha muda dan kompetensi tenaga kerja Pemuda

Kontribusi pemuda dalam wirausaha sangat diharapkan dalam menyongsong agenda Indonesia maju pada pada tahun 2045. Pada Sakernas DIY Agustus 2020 diketahui bahwa 21 dari 100 pemuda DIY bekerja berstatus wirausaha. Pemuda yang berusaha sendiri mendominasi status wirausaha pemuda, yaitu mencapai 64,76%. Hanya sebagian kecil pemuda wirausaha yang berstatus berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar. Hal ini menunjukkan kewirausahaan pemuda cenderung berada dalam skala kecil dengan mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja tidak dibayar. Sementara itu, kompetensi kerja pemuda dapat dilihat dari kategori pekerjaan *white collar* atau pekerja profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha. Tahun 2021 proporsi pemuda dengan kategori *white collar* di DIY baru sebesar 26,10%.

3.) Pengangguran di Usia Muda

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di DIY pada tahun 2021 sebesar 7,97%. TPT pemuda DIY lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, dan secara gender lebih didominasi laki-laki.

4.) Minimnya Sarana Olahraga

Sarana olahraga merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan bakat dan prestasi masyarakat di bidang olahraga. Jumlah sarana olahraga di DIY hingga tahun 2021 baru memiliki 2 (dua) fasilitas olahraga berstandar internasional; Stadion Mandala Krida dan GOR Amongraga, serta 6 (enam) fasilitas olahraga berstandar nasional. Dilihat dari Rasio ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan salah satunya untuk olahraga, menurut Laporan Nasional *Sport Development Index* (SDI) Kemenpora Tahun 2021 DIY memiliki rasio ruang terbuka sebesar 0,29 urutan terbawah nomor lima secara nasional.

5.) Budaya berolahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Budaya olahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Perkembangan era Industri 4.0 membawa dampak dalam cara belajar, cara bekerja dan gaya hidup Sedentary atau kurang gerak. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko obesitas, dan gangguan penyakit. Tingkat partisipasi olahraga di DIY masih cukup rendah. Hasil SDI Kemenpora (2021) menyebutkan angka partisipasi olah raga di DIY sebesar 25,33% masih di bawah rata-rata masih di bawah rerata nasional 32,83%.

2.5.2.2.14 Urusan Statistik

1.) Belum terpenuhinya 4 prinsip menuju satu data Indonesia

Berdasarkan pelaksanaan empat prinsip menuju satu data indonesia, dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu data Indonesia di DIY (data pembangunan daerah) pada proses pengumpulan data-data sektoral terutama untuk usulan data-data baru, ada beberapa data yang masih belum memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia (kode refeerensi, metadata, standar data dan interoperabilitas) sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia tersebut dengan cara verifikasi dan validasi data setiap 3 bulan sekali yang dilakukan dengan OPD statistik sektoral dan didampingi BPS selaku Pembina data.

2.) Pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih belum maksimal

Dasar pembentukan Simpul Jaringan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial di DIY masih banyak kendala yaitu minimnya sarana prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mendukung pengelolaan geospasial, selain itu keterbatasan SDM yang berkompeten (berlatar belakang pendidikan ilmu kebumian seperti Geografi, Geodesi, Penataan Ruang, dll) dalam pengelolaan geospasial baik di level OPD dan Bappeda DIY sebagai pembina data geospasial.

2.5.2.2.15 Urusan Kebudayaan

3.) Proses Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya menghadapi ancaman perkembangan wilayah

Lokasi sebagian besar kawasan cagar budaya yang berada di wilayah urban Kota Yogyakarta dapat mengancam eksistensi cagar budaya karena dampak pengembangan kota. Beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh dalam menjaga citra visual asli kawasan antara lain terkait transportasi. jaringan jalan. pemukiman. dan pendirian bangunan. Oleh karena itu. perlu diperhatikan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan beban kawasan. Sarana prasarana dapat berpengaruh positif saat berfungsi sebagai fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata. Akan tetapi. sarana prasara ini dapat mengancam kelestarian cagar budaya jika kemunculannya tidak terkendali. Permasalahan lain juga terkait dengan keberadaan beberapa kawasan cagar budaya seperti Sokoliman. Ambarketawang. Ambarbinangun. justru terletak jauh dari berbagai dampak pembangunan kota. tetapi cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolasikan.

4.) Perlindungan nilai-nilai budaya khas DIY sebagai panutan dan jatidiri masyarakat Yogyakarta

Dialektika antara globalisme dan lokalisme sesungguhnya telah menjadi sejarah panjang bagi semua negara di dunia, baik di dunia Timur maupun di dunia Barat. Globalisme yang diletakkan sebagai tesa dan lokalisme yang diletakkan sebagai antitesa, telah melahirkan baik berupa ketegangan-ketegangan hubungan antara keduanya maupun kompromi-kompromi atau sintesa yang lahir di antara keduanya; sintesa yang terjadi dapat berupa perpaduan harmoni antara keduanya maupun kebaruan dan pembaruan yang dilahirkan oleh keduanya. Memang sulit menandai yang lebih dulu antara globalisme dan globalisasi, namun keduanya jelas sekali merupakan ujung sejarah dari suatu perjalanan dan perjumpaan yang panjang. Kebudayaan khas DIY juga tidak dapat mengelak dari ayunan gelombang globalisasi, DIY kaya akan nilai-nilai adi luhung yang merupakan kearifan lokal yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Puro Pakulaman. Namun, kehidupan masyarakat yang dinamis seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya dalam

masyarakat DIY. Sebagian anggota masyarakat mampu beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai budaya luar yang dipandang baik sebagai salah satu acuan dalam menjalankan kehidupan. Namun, terdapat pula anggota masyarakat yang hanya mampu mengadopsi kulitnya saja tanpa bisa mengolah esensi nilai yang ada didalamnya. Terakhir, terdapat kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan. Adanya kelompok-kelompok yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya keragaman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

2.5.2.2.16 Urusan Perpustakaan

1.) Tingkat Literasi Masih Rendah

Dilihat dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2020, posisi DIY masih berada dibawah beberapa provinsi lain dengan nilai skor 18,00. Nilai ini berada pada peringkat ke-6 dibawah Provinsi Kalimantan Selatan (48,70), Kepulauan Bangka Belitung (28,83), Gorontalo (28,18), Kalimantan Timur (20,78), dan DKI Jakarta (18,91).

BPS melalui pengukuran Nilai Budaya Literasi pada tahun 2019 rata-rata nasional 55,03 point dimana DIY berada pada urutan teratas dengan 76,27 point. Meskipun posisi DIY paling tinggi namun melihat hasil survei internasional lembaga PISA pada tahun 2019 menyimpulkan Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. artinya masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan budaya literasi di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya

2.) Masih Rendahnya Minat Baca Masyarakat

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan *World Bank dan International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk tingkat DIY, indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat

yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasikan buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

3.) Masih Rendahnya Kunjungan Ke Perpustakaan

Berdasarkan survei diketahui bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia baru sebesar 0,02%. Jumlah ini belum ideal, karena berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, jumlah kunjungan ke perpustakaan umum yang ideal setiap hari adalah 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Kunjungan ke perpustakaan dalam setahun pada tahun 2021 sebanyak 2.073.461 orang dengan jumlah yang harus dilayani 3.265.200 orang, jika dikonversi secara harian maka jumlah kunjungan ke perpustakaan setiap hari rata-rata 0,17% masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

4.) Masih Belum idealnya ketersediaan koleksi

Menurut data dari DPAD DIY, pada tahun 2021 terdapat total 1.333.470 koleksi perpustakaan di DIY. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY, rasio ketersediaan koleksi dengan tingkat penduduk per kapita di DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 0,3922. Jumlah ini belum ideal jika dibandingkan dengan standar IFLA/UNESCO yakni sebesar 1:2 (0,5).

5.) Kualitas penyelenggaraan Perpustakaan masih belum optimal

Persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan di DIY menurut data DPAD DIY pada tahun 2021 baru mencapai 13,69%. Artinya, dari total jumlah perpustakaan di DIY sebanyak 4.009 perpustakaan, baru terdapat 549 perpustakaan yang menerapkan penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

2.5.2.2.17 Urusan Kearsipan

1.) Jumlah Lembaga yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Masih Belum Optimal.

Pada capaian kinerja pemerintah daerah Program pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan (RPJMD DIY 2017-2022) pada tahun 2021 dari target 110 institusi baru tercapai 86 institusi.

2.) Jumlah Lembaga yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Masih Belum Optimal.

Saat ini terdapat 58 % arsip statis yang belum diolah. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DI Yogyakarta, Jumlah arsip

statis yang sudah diolah saat ini sebanyak 2.468 boks atau sekitar 42 % dari jumlah khasanah arsip statis yang ada di DPAD DIY, yakni sejumlah 5.895 boks. Masih terdapat 3.427 boks (58 %) arsip statis yang belum diolah.

3.) Pemanfaatan arsip melalui media penelusuran online belum optimal.

Jumlah pemanfaatan arsip melalui media penelusuran online, yakni Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) https://arsip.jogjaprov.go.id/ dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) http://dpad.jogjaprov.go.id/siks/ dalam tahun ini sejumlah 17.822 nomor berkas atau sekitar 36% dari jumlah arsip yang masuk entri dalam SIKS dan JIKN sebanyak 49.044 nomor berkas arsip.

2.5.2.2.18 Urusan Persandian

1.) Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang.

Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah DIY. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. pada tahun 2021 terdapat 13 insiden peretasan atau gangguan kemanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Saat ini dan di masa mendatang. pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer. tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia.

2.) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian.

Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti *firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Vulnerability Assessment Tool, Log Analysis, SIEM*, perangkat kontra penginderaan,

jammer, kendaraan operasional, dll. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war* sehingga terjadi insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, sampai dengan Bulan Oktober tahun 2022, terdapat 26 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Insiden akan lebih mudah ditangani dengan ketersediaan perangkat yang dibutuhkan.

2.5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.5.2.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

1.) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut

DIY memiliki panjang pantai 135,24 Km dan luas perairan 251.130 Ha. Berdasarkan data dari Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada perairan Samudra Hindia Selatan DIY, tingkat pemanfaatannya baru mencapai 30,93% dari potensi yang boleh ditangkap. Dengan potensi kelautan tersebut seharusnya DIY memiliki jumlah nelayan yang memadai, namun profesi nelayan di DIY sebagian besar belum menjadi sumber matapencaharian utama. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan penuh. Menurut data dari BPPSD DIY, pada tahun 2022 jumlah nelayan penuh di DIY 376 orang sementara jumlah nelayan sambilan utama sebanyak 1.450 orang dan nelayan sambilan tambahan sebanyak 2.560 orang.

Selain itu, sebagian besar kepemilikan kapal oleh nelayan di DIY adalah perahu motor tempel (PMT), sehingga hasil yang diperoleh sangat terbatas dikarenakan jangkauan PMT hanya berada di bawah 12 mil laut. Sementara kepemilikan kapal di atas 30 GT untuk dapat menjangkau potensi ikan dengan nilai ekonomis tinggi di laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif masih sedikit jumlahnya dan tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Data jumlah kepemilikan kapal 21-30 GT di DIY antara tahun 2017-2022 menunjukan hanya ada 6 kapal yang beroperasi. Sementara jumlah PMT sebanyak 366 kapal pada tahun 2017, meningkat menjadi

427 kapal pada tahun 2018 dan menjadi 495 kapal pada tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengoperasionalkan kapal >30 GT, sehingga memilih menggunakan PMT yang lebih mudah dan murah dalam pengoperasionalannya.

Di sisi lain, prasarana perikanan tangkap laut yang ada di DIY belum dimanfaatkan secara optimal. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum dapat beroperasi dikarenakan masalah sedimentasi sehingga tidak ada kapal penangkap ikan yang dapat mendarat di PP Tanjung Adikarta. Sementara itu, meskipun banyak kapal dari luar DIY yang melakukan penangkapan ikan di wilayah DIY, namun hasil tangkapannya tidak didaratkan di pelabuhan perikanan DIY, khususnya di Sadeng. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelabuhan, khususnya terkait dengan pelelangan ikan perlu terus diperbaiki.

2.) Pembangunan perikanan tangkap dan perikanan budidaya belum menerapkan prinsip minabisnis dan minaindustri

Pengelolaan perikanan budidaya di DIY sebagian besar masih dilakukan secara tradisonal baik dalam teknis budidaya maupun pemasarannya, di mana para pembudidaya tersebar di berbagai tempat dan belum berbasis kawasan dengan kelembagaan pengelola yang terpadu. Hal ini menyebabkan proses produksi perikanan tidak efisien, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. Begitu juga untuk perikanan tangkap, kebutuhan biaya operasional yang tinggi belum sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, kelembagaan nelayan yang belum optimal menyebabkan ketergantungan nelayan terhadap tauke sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Hal ini juga berdampak pada daya tawar nelayan terhadap harga tangkapan ikan yang rendah karena sudah ditentukan oleh tauke. Kondisi ini juga tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan maupun nelayan yang sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 berada di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera.

3.) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di DIY

Tingkat konsumsi ikan di DIY masih sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional. Angka konsumsi ikan nasional mencapai 55,37 Kg/kapita/tahun pada tahun 2021. Sementara itu, walaupun tingkat konsumsi ikan di DIY dari tahun 2017-2021 menunjukkan trend

peningkatan, tingkat konsumsi ikan DIY hanya sebesar 34,82 Kg/Kapita/tahun pada tahun 2021.

2.5.2.3.2 Urusan Pariwisata

1.) Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia diperkirakan belum akan pulih alam waktu dekat. Pada tahun 2022, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia hanya sebesar 5.471.277 orang. Angka tersebut menurun jauh dari tahun 2019 yang mencapai 16.106.954 orang. Pemulihan pasar wisatawan mancanegara sangat tergantung pada perkembangan situasi pandemi. Menurut data dari UNWTO, sampai dengan akhir tahun 2022, angka kedatangan wisatawan internasional di tingkat global masih terkontraksi hingga minus 37%. Regional asia pasifik mengalami kontraksi paling dalam hingga mencapai minus 77% dibandingkan tahun sebelumnya *(year on year).*

2.) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan di DIY

Lama tinggal wisatawan secara keseluruhan masih relatif rendah. Pada tahun 2022, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara yang diukur dari lama menginap di jasa akomodasi hanya mencapai 2,04 hari. Sementara itu, untuk wisatawan nusantara, hanya mencapai 1,34 hari.

Jika dilihat lebih lanjut, capaian lama tinggal wisatawan di DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan destinasi prioritas lain di Indoensia. Pada bulan Desember tahun 2022, rata-rata lama menginap Wisnus secara nasional mencapai 1,54 hari dan Wisman 2,75 hari. Capaian DIY pada bulan tersebut mencapai 2,77 hari untuk wisman dan 1,54 untuk wisnus. Capaian tersebut masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Bali yang mencapai 2,95 hari untuk wisman dan 2,19 hari untuk wisnus.

2.5.2.3.3 Urusan Pertanian

1.) Alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup tinggi terutama lahan sawah beririgasi

Berdasarkan data BPS DIY tahun 2013-2021, luas lahan sawah mengalami penurunan dengan rata-rata 559,96 ha/tahun. Selain itu, upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tataran kabupaten/kota masih belum optimal dikarenakan hingga tahun 2022

baru kabupaten Sleman yang menetapkan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.) Tingkat kesejahteraan petani belum optimal

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data dari BPS DIY, NTP untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan pada kurun waktu 2018 – 2022 rata-rata sebesar 104,11.. Angka ini telah melampaui angka minimal kesejahteraan petani, yaitu 100. Namun kondisi tersebut tidak merata di semua subsektor, karena NTP subsektor tanaman pangan dan peternakan masih di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh usaha tani yang kurang efisien serta kurangnya penerapan prinsip agribisnis. Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS DIY menunjukkan bahwa sebanyak 437.288 rumah tangga usaha pertanian atau sebesar 88,71% merupakan rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.

3.) Keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian

Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS DIY menunjukkan bahwa sebanyak 52,19% petani utama berusia di atas 54 tahun, sedangkan hanya sebesar 4,66% yang berusia di bawah 35 tahun. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (2021) juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2021 jumlah petani milenial/petani muda baru sebanyak 641 orang. Dari aspek pendidikan, sebesar 54,92% petani merupakan lulusan SD dan tidak/belum tamat SD. Selain itu, sebesar 44,56% rumah tangga petani tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi serta baru 20,45% petani yang dapat menggunakan internet. Di sisi lain, terkait aspek kelembagaan, data dari Statistik Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani (Kementerian Pertanian, 2021) menyatakan bahwa kategori kelompok tani dengan jumlah terbesar di DIY adalah kelompok tani kelas pemula yang sebesar 33,66%.

2.5.2.3.4 Urusan Kehutanan

1.) Nilai/Kontribusi PDRB sektor pertanian dari subsektor kehutanan masih rendah

Nilai produksi kehutanan yang menjadi variabel dalam penghitungan PDRB suatu daerah terdiri dari produksi Kayu bulat, produksi kayu olahan, dan produksi hasil hutan non kayu. Sementara aktivitas lain yang memberikan kontribusi terhadap sektor lain misalnya pemanfaatan jasa lingkungan, industri hasil hutan tidak terpotret sebagai hasil kinerja sektor/urusan kehutanan. Berdasarkan nilai produksi subsektor kehutanan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dalam PDRB DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 580,39 juta rupiah atau sekitar 6,76% dari PDRB sektor pertanian. Angka tersebut merupakan angka terendah (ADHK) dalam kurun 5 tahun terakhir dan tren dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan. Sementara Nilai produksi subsektor kehutanan atas dasar harga berlaku (ADHB) dalam PDRB DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 1.004,25 juta rupiah atau sebesar 6,92% dari PDRB sektor pertanian. Potensi produksi hasil kehutanan yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan nilai PDRB adalah dari produksi hasil hutan kayu baik dari dalam kawasan hutan maupun hutan rakyat serta dari hasil hutan non kayu.

2.) Kesejahteraan masyarakat disekitar hutan yang masih rendah

Luas total kawasan hutan DIY seluas 19.133,95 ha dan yang menjadi kewenangan DIY seluas 16.358,6 ha yang meliputi hutan konservasi TAHURA Bunder seluas 777,6 ha dan 15.581 ha merupakan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan. Berdasarkan data luas kawasan hutan yang dikelola dengan skema perhutanan sosial, DIY telah memberikan akses legal kepada 5.005 KK dengan jumlah ijin/Surat Keputusan sebanyak 45 dokumen dengan total luas mencapai 1.556 ha atau sekitar 8,13% dari luas kawasan hutan DIY. Potensi pemberian ijin melalui skema perhutanan sosial masih dapat dioptimalkan sampai dengan 10% terhadap luas kawasan hutan DIY sehingga masyarakat di sekitar hutan mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya hutan.

Jumlah KTH (Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Rakyat/HR) yang teregistrasi DLHK DIY sampai dengan Oktober 2022 adalah sebanyak 663 kelompok, terdiri dari 564 kelompok Pemula, 98 kelompok Madya dan 1 kelompok Utama.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Perhutanan Sosial adalah masih minimnya akses masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya ekonomi, seperti permodalan maupun bantuan usaha. Kondisi eksisting KTH yang ada di DIY masih banyak yang berada dikategori/kelas pemula, sementara untuk dapat mengakses bantuan modal peningkatan ekonomi produktif, KTH tersebut setidaknya harus menempati kelas Madya.

3.) Pengelolaan kawasan konservasi masih dapat ditingkatkan efektifitas pengelolaannya

Kementerian LHK telah memiliki instrumen untuk melakukan penilaian efektifitas sebuah kawasan konservasi yaitu *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK Nomor. SK. 4/KSDAE/KK/KSA.1/1/2022 tentang Penetapan Nilai Efektifitas Penilaian Kawasan Konservasi Sampai dengan Tahun 2021, nilai efektifitas pengelolaan TAHURA Gunung Bunder sebesar 70% atau msauk kategori efektif. Berdasarkan SK tersebut, dari 6 kawasan hutan konservasi yang ada di DIY yang nilainya 70 – 81 %, nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Gunung Bunder merupakan yang terendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai efektifitas pengelolaan untuk TAHURA dari yang ada dikelola oleh pemda seluruh indonesia nilai 0% – 82% posisi TAHURA Gunung Bunder masuk dalam kelompok 7 besar.

4.) Kondisi pemantapan kawasan hutan belum mantap

Berdasarkan data pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas LHK, kondisi penataan kawasan hutan sampai dengan tahun 2022 mencapai 93,7%. Kondisi tersebut merupakan rata-rata dari 87,83% batas kawasan hutan yang terpelihara dari total panjang batas kawasan hutan sepanjang 511.43 Km dan permasalahan tenurial yang sudah terselesaikan sebesar 99,58% dari total tenurial seluas 1.414.73 ha.

2.5.2.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1.) Masih terdapat penduduk yang belum terlayani akses listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan.

Rasio elektrifikasi di DIY sudah mencapai 99,99% dan rasio desa berlistrik sudah100%, namun masih ada 6.798 KK yang masih menyalur meliputi kategori rumah tangga bersubsidi maupun non subsidi. Rumah tangga berlistrik menyalur ini belum menikmati listrik sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, sehingga diperlukan

penanganan khususnya untuk rumah tangga yang masuk dalam kategori subsidi atau rumah tangga miskin.

2.) Masih terdapat pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan ketentuan.

Data pemegang izin usaha ketenagalistrikan pada tahun 2022 adalah 220 pengguna. Masa berlaku IO/IUPTLS maksimal 5 tahun. Penentuan izin usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter. Apabila terdapat parameter penilaian turun dan mengakibatkan turunnya penilaian, maka dapat mengakibatkan pelaksanaan izin pengusahaan air tanah dan izin usaha ketenagalistrikan yang semula sesuai ketentuan menjadi tidak sesuai ketentuan. Pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang sudah sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan baru sejumlah 75 pengguna atau 34,1%. Pemegang izin usaha ketenagalistrikan masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan.

3.) Masih tingginya pemanfaatan air tanah dalam

Pengguna air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. Pemakaian air tanah dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, dan bahan pembantu atau proses produksi. Pengusahaan air tanah dapat dilakukan sepanjang penyediaan air, tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi. Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan rencana pengelolaan air tanah, kelayakan teknis dan ekonomi, fungsi sosial air tanah, dan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah. Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah kecuali untuk keperluan sehari-hari dan/atau pertanian rakyat, wajib memperoleh izin dari Gubernur. Dari pengguna air tanah dalam di DIY, yang tercatat mendapat izin sejumlah 280 pengguna. Pengguna air tanah

yang memiliki izin harus dipastikan mengambil sesuai ketentuan, sementara itu pengguna air tanah yang di luar berizin diindikasikan masih terjadi.

4.) Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah.

Bauran energi yang telah dicapai 93,56% minyak bumi dan 6,44% energi baru terbarukan. Potensi energi baru terbarukan di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil.

5.) Pendelegasian pengelolaan pertambangan ke daerah perlu ditindaklanjuti untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lingkup kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi yaitu:

a.) pemberian sertifikat standar dan pemberian izin;
b.) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; serta
c.) pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Selain itu pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

a.) pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
b.) penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan;
c.) pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

2.5.2.3.6 Urusan Perdagangan

1.) Masih rendahnya pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha perdagangan di DIY

Jika dilihat dalam Buku Profil Perdagangan Indonesia 2021 (BPS), rata-rata balas jasa dan upah pekerja di sektor perdagangan di DIY masih relatif rendah yaitu sebesar 31,74 juta rupiah. Sementara itu, nilai rata-rata untuk tingkat nasional mencapai Rp38,20 juta rupiah per tahun. Produktivitas sektor perdagangan ini mestinya masih dapat ditingkatkan lagi mengingat posisi DIY sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah jawa bagian selatan. Selain itu, pergerakan wisatawan maupun aktivitas pendidikan, juga dapat menjadi potensi penggerak kegiatan perdagangan lokal dan regional.

2.) Masih adanya permasalahan terkait stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Sampai dengan Desember 2022, inflasi kota Yogyakarta tahun berjalan (*year to date*) sudah mencapai 6,49 %. Permasalahan kenaikan harga-harga ini bahkan menjadi perhatian besar Presiden dan Pemerintah Pusat. Meskipun inisiatif pengendalian inflasi telah segera dilakukan, namun potensi ketidakstabilan harga masih menjadi ancaman terutama dengan belum kondusifnya situasi perekonomian dan politik global. Gangguan rantai pasok antar negara berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas tertentu.

Lebih jauh lagi, secara struktural masih terdapat permasalahan dalam rantai perdagangan di DIY. Sebagai contoh, jika dilihat dari besaran Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP), terdapat peningkatan untuk beberapa bahan pokok. MPP daging ayam ras dari 22,06% pada tahun 2018 menjadi 33,49% pada tahun 2021. Bahkan komoditas lain memiliki MPP yang jauh lebih tinggi seperti bawang merah yang mencapai 43,22% pada tahun 2021. Semakin tingginya MPP menunjukan rantai distribusi dari produsen ke konsumen belum efisien atau masih cukup panjang. Panjangnya distribusi tersebut, tentu membawa risiko sulitnya pengendalian harga dan stok barang.

3.) Masih rendahnya nilai ekspor DIY

Peranan DIY dalam realisasi ekspor nasional masing sangat rendah. Tahun 2022, proporsi nilai ekspor DIY hanya 0,21% dari total ekspor Indonesia. Nilai ekspor pada tahun tersebut mencapai 583,3 Juta US$

(BPS). Jika dibandingan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekspor DIY tahun 2022 mencapai 4,66%. Pertumbuhan ekspor tersebut mengindikasikan perbaikan perekonomian pasca terdampak oleh pandemi covid-19. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 25,8%. Keberadaan Bandara YIA mestinya dapat dimanfaatkan sebagai pintu keluar produk ekspor DIY. Arah pemulihan yang telah dirasakan pada tahun 2022 masih menghadapi tantangan terutama dengan situasi perekonomian global, terutama mitra dagang DIY, yang sedang menghadapi ancaman resesi ekonomi.

4.) Masih belum sepenuhnya pelaku perdagangan mengadopsi perubahan perilaku konsumen saat ini seperti dalam hal penjualan secara daring

Mengacu pada Buku Profil Perdagangan Indonesia 2021, baru ada sekitar 38,93% pelaku usaha perdagangan di DIY yang memanfaatkan internet. Angka ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya mencapai 29%. Namun demikian, saat ini kecenderungan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring semakin meningkat. Kondisi pandemi pada satu sisi memaksa banyak konsumen untuk menggunakan sarana transaksi daring untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Dengan adanya perubahan perilaku ini, diperlukan upaya agar pelaku usaha perdagangan di DIY mampu beradaptasi pada proses bisnis yang berlaku saat ini.

2.5.2.3.7 Urusan Perindustrian

1.) Pelambatan produktivitas sektor industri pengolahan

Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan yang diukur dari PDRB sektor industri pengolahan dibagi dengan tenaga kerja sektor industri pengolahan menunjukan kecenderungan pelambatan. Pada masa sebelum pandemi, yaitu kurun waktu 2015-2019, rata-rata pertumbuhan produktivitas sektor industri pengolahan hanya 0.76% atau jauh di bawah rata-rata seluruh lapangan usaha yang mencapai 5,41%. Dari sisi mikro, salah satu penyebab rendahnya angka tersebut adalah pelambatan di sisi output produksi sektor ini. Pandemi Covid-19

memperparah pelambatan tersebut. Indeks Produksi yang menunjukan seberapa besar output sektor industri pengolahan, mengalami penurunan pada tahun 2020. Indeks produksi yang telah mencapai angka 162,63 pada tahun 2019 turun menjadi 136,75 pada tahun 2020 atau hampir sebesar kondisi tahun 2016. Hal tersebut tentu menunjukan kemunduran bagi sektor industri pengolahan jika dilihat dari sisi output yang dihasilkan.

2.) Industri mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan pemasaran. penyediaan bahan baku dan aspek kualitas produk

Survei Industri Mikro dan Kecil BPS tahun 2020 menunjukan dari total 146.658 usaha/perusahaan IMK di DIY ada sebanyak 78,98% mengalami kesulitan. Jenis kesulitan yang dialami diantaranya kesulitan bahan baku sebesar 26,58%, kesulitan pemasaran sebesar 19,67%, dan kesulitan tenaga kerja sebesar 12,85%.

3.) Masih belum berkembangnya industri-industri berbasis inovasi dan teknologi

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Lebih lanjut, Kemenperin melaui Making Indonesia 4.0, mencoba fokus pada 5 sektor industri, yaitu industri makanan dan minuman; industri tekstil dan busana; industri otomotif; industri kimia; dan industri elektronika. Industri di DIY baik yang bersakala mikro, kecil, sedang dan besar masih didominasi oleh industri makanan, tekstil dan busana. Di sisi lain, meskipun perkembangan teknologi sudah cukup maju, namun mayoritas pelaku usaha industri belum memanfaatkannya secara optimal. Sebagai contoh, berdasarkan data survei industri mikro dan kecil, baru sekitar 22% yang menggunakan internet untuk kegiatan usahanya.

4.) Masih perlunya penguatan struktur industri lokal melalui pemanfaatan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor

Penguatan struktur industri lokal diperlukan terutama dalam hal penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dengan demikian, diharapkan ada penurunan ketergantungan atas barang impor dan juga dapat terjadi hilirisasi atas komoditas dan bahan baku yang diproduksi dari sektor primer di dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, per November 2022 terdapat 165 perusahaan di DIY yang telah memiliki sertifikasi TKDN seperti PT Mega Andalan Kalasan (peralatan kesehatan) dan CV Karya Hidup Sentosa (Mesin & Peralatan Pertanian). Selain itu terdapat juga produk-produk lain seperti batik, aksesoris rajutan, permesinan, furniture dan lainnya yang telah memiliki sertifikasi TKDN. Namun demikian, TKDN antar program tersebut masih cukup bervariasi mulai dari 12% hingga 99%. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya penguatan struktur industri di dalam negeri untuk dapat memastikan lebih banyak produk dari sektor primer dapat dimanfaatkan dalam industri lokal.

2.5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.5.2.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

1.) Dinamika kebijakan terkait birokrasi

Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam *road map* RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang tahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritikal yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumberdaya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik.

2.) Belum sinkronnya kelembagaan dengan Perencanaan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia; Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, dan tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi kelembagaan perangkat daerah mengikuti program yang diarahkan sebagai motor penggerak perwujudan dari visi misi Kepala Daerah dan penyesuaian terhadap regulasi atau kebijakan dari pusat terkait dengan urusan program dan kegiatan.

3.) Belum disusunnya peta proses bisnis organisasi

Peraturan Menteri PANRB nomor 11 tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun peta proses bisnis guna mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi tepat ukuran dan tepat proses. Peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selain itu, agar proses bisnis dapat selaras dan sinergi diantara OPD, diperlukan suatu kejelasan ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai "Cor Bisnis OPD', yang sesuai dengan ciri atau karakter kelompok ketugasannya, sehingga jelas dapat dibedakan antara ruang lingkup atau cakupan 'cor bisnis' Biro Setda, Dinas Teknis dan Badan penunjang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4.) Belum optimalnya budaya inovasi pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya terkait dengan penumbuhan inovasi, pengembangan sistem

pelayanan dan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi budaya inovasi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan tanggap terhadap kebutuhan mereka. Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis perlu menyusun strategi inovasi dalam memberikan pelayanan publik, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Sejak tahun 2014, Pemda DIY sudah mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia dan minimal 1 (satu) inovasi berhasil masuk dalam Top 99 dan/atau Top 45. Adapun data capaian dan keikutsertaan dalam KIPP dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2-203 Keikutsertaan dan Capaian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

2019	2020	2021	2022
33 inovasi (28 dari OPD/UPT dan 5 dari SMA/SMK) seluruhnya diikutsertakan dalam KIPP tahun 2019 Menggapai Mimpi Sahabat RImba - Balai KPH DIY masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dan ikutserta dalam UNPSA (United Nation Public Service Award) yang diselenggarakan oleh PBB. Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu *Jogja*	38 inovasi kategori umum diikutsertakan dalam KIPP tahun 2022 (33 dari OPD/UPT dan 5 dari SMA/SMK) serta 1 kategori khusus. Melintas Batas Ruang Kelas bersama JOGJABELAJARCLASS - Balai Tekkomdik DIY berhasil lolos ke TOP 45 Inovasi Pelayanan publik 2020. JOGJAPLAN : Perencanaan Pembangunan DIY yang ORDINATE (Konsisten,	50 Inovasi yang diusulkan kepada Biro Organisasi Setda DIY pada tahun 2021; 10 inovasi kategori umum dan 1 inovasi kategori khusus dalam KIPP tahun 2021. Rajutan Sibakul Jogja" cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha - Dinas Koperasi dan UKM DIY Berhasil lolos TOP Inovasi	33 inovasi yang diusulkan kepada Biro Organiasi Setda DIY pada tahun 2022. 15 inovasi kategori umum dan 2 inovasi kategori khusus DIFAGANA, Difabel Siaga Bencana berhasil lolos dalam TOP 99 KIPP 2022 dan dalam tahap selanjutnya yaitu Presentasi dan Wawancara

2019	2020	2021	2022
Library for All) - Balai Layanan Perpustakaan DIY berhasil lolos TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dan ikutserta dalam UNPSA (*United Nation Public Service Award*) yang diselenggarakan oleh PBB.	Respondif, Dinamis dan Akuntabel) dengan *e planning* - BAPPEDA DIY berhasil lolos 5 *Outstanding Achievement Of Public Service Innovation* 2020	terpuji (TOP 45) KIPP 2021	

Sumber : Biro Organisasi Setda DIY

5.) Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini baru berfokus pada tata kelola pemerintah yang bersifat umum dan instansional, belum mampu menjawab isu strategis tata kelola pemerintahan yang bersifat lintas sektor atau antar instansi pemerintah untuk menjawab isu Pembangunan Daerah

Pemerintah berkelas dunia yang memberikan dampak nyata bagi kinerja pembangunan yang menjadi cita-cita periode akhir *grand design* dikhawatirkan tidak dapat tercapai apabila strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam *Road Map* reformasi birokrasi tidak segera disesuaikan. Semangat kolaboratif yang efektif perlu dikedepankan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, strategi pendekatan RB Tematik memiliki urgensi yang cukup tinggi agar dapat segera diaplikasikan pada perubahan Road Map Reformasi Birokrasi

Perlu dilakukan *refocusing* dan penajaman Tujuan Reformasi Birokrasi melalui 2 (dua) cara/jalan yaitu :

a.) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dengan sasaran: 1) terciptanya tatakelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah; dan 2) Budaya Birokrasi SATRIYA BerAKHLAK dengan ASN yang profesional; dan

b.) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan sasaran penyelesaian isu tematik yang dapat mendukung ketercapaian target Pembangunan Daerah (Kemiskinan, Reformasi Kalurahan, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan lain sebagainya)

6.) Dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan yang belum optimal.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah DIY yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengoordinasian terhadap pelayanan administrative. Sekretariat Daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam mendesain kebijakan yang komprehensif, berkualitas dan memenuhi aspek timely manner (tersedia pada saat dibutuhkan). Oleh karena itu, perlu dukungan pelayanan pimpinan diantaranya dalam hal koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait dan urusan administrasi pimpinan. Namun pada saat ini, dukungan terhadap tugas tersebut masih belum optimal dikarenakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perumusan arah kebijakan yang masih kurang efektif, dukungan sarana prasana (termasuk penggunaan sistem informasi digital) dan kapasitas SDM yang masing kurang memenuhi kebutuhan ideal baik secara kuantitas atau kualitas.

7.) Belum Optimalnya Kerjasama Antar Daerah/dengan Pihak Ketiga

Kerjasama antar daerah merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengadakan relasi dengan daerah lain termasuk pihak ketiga baik swasta maupun luar negeri untuk melaksanakan secara bersama sebuah urusan yang dilandasi persamaan kepentingan dengan maksud untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Kerjasama antar daerah juga dapat diartikan sebagai suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami pengertian tersebut maka kerja sama daerah merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga daerah harus terus melakukannya secara sistematis dan berkesinambungan. Tantangan dalam kerjasama adalah identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, sehingga kerja sama daerah yang dilakukan merupakan kebutuhan prioritas daerah serta optimalisasi pemanfaatan Kerjasama yang sudah dilakukan.

8.) Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.

Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat Kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 Kapanewon dan 48 kalurahan di DIY, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 Kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerjasama daerah.

9.) Proses penyusunan produk hukum daerah belum komprehensif dan efektif.

Produk hukum yang berkualitas menjadi jaminan atas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dinamika pada sektor hukum saat ini terdapat upaya penataan dan penyederhanaan regulasi (termasuk produk hukum daerah) yang menjadi program prioritas nasional. Hal ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan adanya penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Pada proses penyusunan produk hukum daerah, terdapat kendala sistemis yang menyebabkan proses penyusunan menjadi belum komprehensif dan efektif. Kendala sistemis tersebut diantaranya rancangan produk hukum daerah yang dari segi substansi belum terstruktur dengan baik, masih tingginya ego sektoral, besarnya peran faktor eksternal yang kemudian berpengaruh pada proses penyusunan produk hukum daerah dan harmonisasi produk hukum daerah dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau sederajat. Sehingga, diperlukan perbaikan atas proses penyusunan produk hukum baik yang termasuk mulai dari proses penyiapan (penyusunan kajian, naskah akademik), proses penyusunan, hingga proses harmonisasi serta sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan efektif.

10.) Kualitas Pengadaan Barang/Jasa di DIY masih perlu ditingkatkan.

Hal ini didasarkan pada capaian sebagai berikut:

a.) Realisasi belanja pada Bela pengadaan dan Katalog Lokal DIY dibandingkan dengan Pagu Anggaran e-Purchasing belum memenuhi target nasional sebesar 75%.

b.) Persentase jumlah paket pengadaan yang dilakukan pencatatan, transaksional dan tender/seleksi melalui SPSE baru mencapai 54,94 % sehingga masih perlu ditingkatkan.

c.) Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) belum memenuhi 24 unsur kematangan level 4 (level strategis).

d.) Persentase peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemda DIY baru mencapai 52,65%.

11.) Sistem tata niaga pangan yang belum efisien

Pada sisi produsen permasalahan disebabkan produksi bersifat musiman menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk hasil pertanian. Saat panen produk tersedia di pasar dalam jumlah melimpah sebaliknya sebelum dan sesudah saat panen terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Selain itu, inefisiensi juga disebabkan produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada konsumen. Di sisi lain, pasar daging sapi dan daging ayam ras, struktur pasar bersifat oligopoli. Pada komoditas beras penelitian tersebut menyimpulkan pedagang besar dan grosir menguasai pasar oleh karena mereka mempunyai jaringan yang luas. Sementara pada komoditas cabai, distributor utama, pedagang besar, dan pedagang grosir yang menguasai pasar, dari hulu hingga hilirnya. Dari sini dapat terlihat bahwa kuasa untuk menentukan harga sangat jarang berada di tangan petani serta pihak yang mendapatkan margin tertinggi biasanya adalah pedagang pengepul dan pedagang eceran.

12.) Masih kurangnya tingkat inklusi keuangan

Inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 (OJK, 2019), Indeks Inklusi Keuangan DIY sebesar 76,12%, masih sedikit di bawah rerata nasional yang sebesar 76,19%. Kondisi ini hanya setingkat lebih baik dibanding Jawa Tengah di regional Jawa-Bali. Kondisi ini juga didukung oleh belum meratanya akses keuangan antar kabupaten/kota di DIY. Kajian Ekonomi dan Akses Keuangan Daerah (OJK DIY, 2019) menyatakan bahwa terdapat disparitas terkait dengan indikator-indikator yang biasa digunakan dalam melihat kinerja lembaga keuangan dan perbankan, misalnya jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan indikator lainnya menunjukkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di DIY. Kajian yang sama juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar 42% dari total industri mikro dan kecil yang ada di sektor unggulan yang belum mengakses kredit perbankan.

13.) Belum tersedianya kebijakan yang memadai untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur wilayah.

Pada periode RPJMD 2017-2022 sampai dengan tahun 2021 telah diterbitkan 22 kebijakan di bidang pembangunan wilayah dalam rangka pencapaian 4 program pemda, yaitu Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur; Program Tata Kelola Lingkungan Hidup; Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang serta Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah. Dari 22 kebijakan tersebut, terdapat 1 surat keputusan menteri ESDM, tidak ada kebijakan berupa peraturan daerah, terdapat 1 peraturan gubernur, 15 surat edaran gubernur, 3 surat keputusan gubernur dan 2 instruksi gubernur. Berdasarkan implementasi, kebijakan tersebut belum memberikan hasil/dampak yang signifikan terhadap pencapaian target program pemda dan/atau IKU Gubernur sampai dengan akhir RPJM 2017-2022 yaitu IKLH dengan target sebesar 66,15 baru tercapai sebesar 59,43 dan indeks Williamson dengan target 0,4489 baru tercapai sebesar 0,4504.

14.) Masih diperlukan upaya sinergis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi bina mental spiritual secara memadai dan efektif menuju harmoni kehidupan dalam keragaman agama, etnis dan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan dalam pluralitas religi, etnis dan budaya masyarakat DIY sebagai provinsi toleransi, pelaksaaan fasilitasi kehidupan beragama perlu dilakukan secara memadai, berkeadilan, efektif dan sinergis, berupa dukungan sarana spiritual maupun kelembagaan bina spiritual dalam bentuk pembinaan mental spiritual, festival keagamaan, penguatan peran dan penghargaan bagi Kaum Rohis sebagai panutan agama berbasis budaya, pencegahan konflik keagamaan, optimasi peran lembaga amil zakat dan lembaga pengelola wakaf, serta dukungan penyelenggaraan pondok pesantren. Sesuai dengan Perda DIY Nomor 10 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di DY perlu mendapatkan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi, karakteristik, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi daerah, sehingga bisa berperan otpmal dalam pendidikan karakter generasi penerus (santri), agar bermoralitas unggul, toleran, moderat, serta berwawasan kebangsaan.

2.5.2.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

1.) Sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan ketugasan belum memadahi. khususnya bangunan gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro.

Dinamika kegiatan DPRD DIY yang semakin meningkat sudah tidak dapat diakomodir secara representatif dan memadahi pada Gedung DPRD DIY yang berlokasi di Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta. Selain itu, status gedung yang merupakan salah satu bangunan *heritage* dan adanya rencana pembangunan kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian serta rencana *Jogja Planning Galery*, membuat gedung tersebut sulit untuk dikembangkan secara optimal untuk mendukung kegiatan DPRD DIY. Sehingga diperlukan pengadaan gedung yang lebih representatif dan akomodatif yang berada di luar kawasan Malioboro.

2.5.2.5 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang

2.5.2.5.1 Perencanaan

1.) Target indikator makro pembangunan daerah belum semuanya tercapai.

Sampai dengan tahun 2021, target indikator makro pembangunan daerah masih terdapat yang belum tercapai. Target indikator yang belum tercapai diantaranya target penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan wilayah dan ketimpangan antar pendapatan, IKLH dan lainnya. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas-sektor perencanaan belum optimal. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya: Periodisasi perencanaan jangka menengah yang tidak sama antar level pemerintahan. Dinamika kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan. Pola hubungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regular dan urusan keistimewaan belum padu.

2.) Sumber pendanaan alternatif pembangunan daerah untuk mengatasi semakin rendahnya kapasitas fiskal belum dapat terealisasikan.

Sampai dengan tahun 2022, sumber alternatif pendanaan sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal DIY untuk

melaksanakan pembangunan daerah masih belum dapat terealisasi. Hal ini ditunjukan skema pembiayaan pembangunan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang diinisiasi oleh DIY belum ada yang dapat direalisasikan.

2.5.2.5.2 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1.) Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai

Sektor Aparatur menjadi satu hal yang butuh perhatian, karena kebijakan nasional yang dinamis sehingga menuntut respon cepat dalam bentuk regulasi daerah maupun kegiatan ikutannya. Kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. Pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga Rencana Pengembangan Kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa saja yang masih ada. Dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yakni upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kediklatan.

Kurang optimalnya pengelolaan sistem manajemen SDM yang memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Talenta/potensi yang dimiliki oleh setiap ASN diukur sehingga mendapatkan nilai yang dimanfaatkan untuk membuat peta karir.

2.) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta

Pelaksanaan manajemen talenta yang optimal membutuhkan beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi meliputi peta jabatan, profil talenta, standar metode dan penentuan tingkatan potensial, standar kompetensi jabatan, penilaian kinerja, pola karier, program pengembangan talenta, tim seleksi, basis sumber daya manusia, sistem informasi manajemen talenta PNS dan anggaran. Salah satu infrastruktur yang belum terpenuhi secara optimal adalah profil talenta. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, hingga saat ini baru 49,56% pegawai yang telah dipetakan potensinya. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk

memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan manajemen talenta membutuhkan akuisisi, pengembangan, penghimpunan, dan penghargaan terhadap talenta. Proses pengembangan talenta membutuhkan pengembangan kompetensi diantaranya melalui *corporate university.*

3.) Belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

Pada tahun 2022 jumlah PNS Pemda DIY sebanyak 10.510 orang, terdiri dari 5.519 orang perempuan dan 4.991 orang laki-laki. Dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY. Selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksakan tugas dan fungsi suatu lembaga.

4.) Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan predikat "sangat baik" dalam penerapan Sistem Merit setelah dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun demikian, Pemda DIY masih terdapat catatan penerapan sistem merit, salah satunya terkait dengan kedisiplinan pegawai, dari data Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Daerah DIY tahun 2021 hingga 2022, jenis hukuman disiplin (hukdis) sedang jumlahnya mengalami kenaikan. Di tahun 2021 ditemukan 3 pelanggaran yang mengakibatkan penjatuhan hukdis sedang, sedangkan di tahun 2022 naik menjadi 4 pelangaran.

5.) Belum optimalnya mutu layanan kepegawaian

Layanan yang dilakukan oleh BKD ditujukan untuk (data jumlah seluruh pegawai). Dengan jumlah pegawai lebih dari 13.000, maka diperlukan sarana prasarana pelayanan secara fisik maupun manajemen kepegawaian yang baik. Data Kepegawaian memerlukan *Big Data* serta keamanan yang diprioritaskan untuk menjamin ketepatan pelayanan dan otomatisasi seluruh peristiwa kepegawaian. Selain itu, perbaikan infrastruktur melalui pemenuhan gedung negara yang memadahi sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan guna

peningkatan layanan kepegawaian, karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak memadai.

6.) Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY belum dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), seharusnya setiap PNS berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JPL). Namun demikian, berdasarkan data dari Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2021, Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/pengembangan kompetensi sejumlah 640 (6,09%) dari total 10.504 ASN di Pemda DIY. Selain itu kewajiban pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang ideal sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. Pasang surutnya pandemi menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian model pembelajaran di samping karena alokasi anggaran yang harus diprioritaskan untuk belanja lain yang bersifat wajib/mengikat. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi telah menginisiasi *Corporate University* melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Corporate University Pemerintah DIY. Dengan demikian, pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemda DIY, meskipun sudah ada OPD yang menjadi *leading sector* (Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan Badan Kepegawaian Daerah DIY), namun untuk mendorong keberhasilan pengembangan kompetensi ASN diperlukan sinergitas seluruh OPD dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi keberadaan *corporate university.* Melalui *corporate university,* seluruh OPD di Pemda DIY diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kompetensi pegawai.

7.) Dinamika kebijakan terkait kepegawaian

Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam *road map* RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang tahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan

tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritikal yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumberdaya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik.

8.) Sarana prasarana pendukung sesuai standar dan persyaratan akreditasi LAN

Sebagai pusat pengembangan kompetensi, dari sisi infrastruktur unit kerja Pendidikan dan Pelatihan memerlukan sarana prasarana yang ramah difabel, Pengembangan kamar asrama sesuai standar hotel berbintang, mobil *shuttle* untuk peserta PKN, sarana prasarana olahraga, smoking area, pengembangan sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengembangan perpustakaan, *pengembangan sarana prasarana smart learning (learning management system, campus management system, content management system, knowledge management system).*

2.5.2.5.3 Urusan Keuangan

1.) Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyusunan anggaran belanja, yaitu kesepakatan bersama KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS serta evaluasi RAPBD dan perubahan RAPBD tergantung pihak eksternal

Pelaksanaan pengajuan evaluasi RAPBD dan Perubahan RAPBD telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Namun dalam prakteknya, terdapat Standar Operasional Prosedur yang harus dipenuhi di Kementerian Dalam Negeri RI sehingga masih perlu penyesuaian terutama dalam hal tata kala waktu.

2.) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali secara optimal.

Untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat, Pemda DIY masih mengandalkan pendapatan transfer. Hal ini ditunjukkan oleh

proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah yang masih dominan dibandingkan PAD. Pada Tahun 2021 tercatat 66,54% sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer diikuti 33,33% PAD dan 0,13% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketergantungan fiskal terhadap pusat harus ditekan sehingga kemandirian fiskal daerah akan meningkat. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menurunkan hasil dari retribusi dan pajak yang diterima Pemda DIY. Perlu upaya optimalisasi PAD mulai dari inventarisasi potensi maupun intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

3.) Pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota baru dilaksanakan setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menindaklanjuti hal tersebut dengan memproses penyusunan peraturan peta jalan ETPD. Selain itu dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi digital, Pemda DIY masih perlu memperhatikan beberapa hal sesuai arahan Presiden tentang transformasi digital, antara lain: a). Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; b). Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; c). Mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital; d). Mempersiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Implementasi KKPD (kartu kredit pemerintah daerah) pada Pemerintah Daerah DIY memerlukan peraturan baru dan harmonisasi dengan peraturan-peraturan turunan terkait.

4.) Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Inventarisasi Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara tertib dan baik, sehingga berpotensi untuk dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak

lain tanpa ijin BMD tersebut hanya akan membebani APBD dalam hal biaya pemeliharaan dan pengamanan, sedangkan potensi PAD dari pendayagunaan BMD tersebut akan berkurang.

5.) Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum optimal.

Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan amanat-amanat terkait penerapan PPK-BLUD Pemda DIY belum dapat sepenuhnya dilakukan. Terdapat beberapa kebijakan yang pengaturannya perlu dituangkan dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan amanat-amanat yang belum dilaksanakan oleh BLUD. Pencatatan dan penatausahaan keuangan di BLUD selama ini dilakukan secara manual sehingga dalam pelaksanaan tidak terdapat keseragaman dan pegawai di bidang keuangan sering mengalami kesulitan, terutama untuk BLUD baru. Sementara itu terkait penetapan BLUD yang belum optimal disebabkan oleh pengajuan usulan seringkali tidak disertai kesiapan kualitas dan kuantitas SDM yang cukup, di Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan/Daerah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang akan menerapkan BLUD.

6.) Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) belum optimal

Pembinaan BUMD belum didukung dengan regulasi (Permendagri) yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara evaluasi BUMD. Pembinaan BUMD membutuhkan dukungan dari lintas OPD Pemda DIY, antara lain dalam pembinaan PT AMI terkait transportasi perlu dilakukan bersama BAPPEDA DIY dan Dinas Perhubungan DIY, dalam pembinaan PT Taru Martani terkait penugasan cadangan pangan perlu dilakukan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Selain itu dalam penelaahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran BUMD perlu dukungan dari tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam hal bisnis dan keuangan.

Pembinaan BUKP oleh Pemda DIY maupun Pembina Tingkat II dan Pembina Teknis bersifat pembinaan dan pengawasan eksternal, sedangkan dalam pengawasan BUKP diperlukan Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada struktur dan sistem operasional BUKP sebagaimana pada BUMD lainnya.

2.5.2.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

1.) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan ketercapaian target pembangunan daerah masih rendah

Perhitungan indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%.

Proses pemilihan rekomendasi yang digunakan sebagai referensi untuk perencanaan melalui beberapa tahapan yaitu:

a.) pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY;
b.) pemilahan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan
c.) penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2017-2022

Pada tahun 2021 terdapat 63 (94,03%) rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 67 rekomendasi yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022. 63 rekomendasi terpilih tersebut terdiri dari urusan perencanaan 15, perumahan dan kawasan permukiman 8, pekerjaan umum dan penataan ruang 2, ketenagakerjaan 4, pariwisata 7, energi dan SDM 9, kominfo 6, kebudayaan 3, pangan 9.

Hasil rekomendasi sebagian bersifat sangat teknis sehingga perlu diterjemahkan kembali untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan. Setiap tahun dilaksanakan minimal 1 penelitian mandiri oleh peneliti Bappeda DIY. Jumlah penelitian tersebut masih sangat kurang mengingat beragamnya perencanaan pembangunan yang harus didukung dengan bukti/data.

2.5.2.5.5 Urusan Penghubung

1.) Fasilitasi terhadap masyarakat DIY di Jakarta belum optimal.

Pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY di Jakarta merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan tugas dalam urusan penghubung. Dinamika serta cakupan masyarakat DIY di Jakarta yang

luas mengakibatkan meningkatnya tuntutan atas fasilitasi yang diberikan.

2.) **Dukungan dalam penyelenggaraan dan fasilitasi untuk mendukung promosi potensi seni budaya dan industri kreatif DIY masih perlu ditingkatkan.**

Perlu penguatan dukungan terhadap penyelenggara unsur penghubung dan teknologi informasi dalam mendukung promosi potensi seni budaya dan industri kreatif DIY.

3.) **Tindaklanjut kebijakan terkait Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)**

Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Selanjutnya mengingat Pemerintah telah menetapkan lokasi IKN sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka antisipasi terhadap kebijakan selanjutnya terkait lokasi kedudukan Badan Penghubung perlu dipersiapkan.

2.5.2.6 Unsur Pengawasan Pemerintahan

1.) **Kapasitas penyelenggaraan unsur pengawasan untuk mendukung pelaksanaan reformasi kalurahan perlu ditingkatkan**

Kapasitas penyelenggaraan unsur pengawasan perlu ditingkatkan seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan yang meningkat dalam penyelenggaraan urusan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan reformasi kalurahan dalam rangka pencapaian Visi Misi Gubernur 2022-2027. Selanjutnya, pengawalan terhadap pelaksanaan reformasi kalurahan perlu kajian dan koordinasi lebih mendalam dengan semua pihak yang terkait, diantaranya untuk menetapkan ruang lingkup dan kewenangan urusan pengawasan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2.) **Metode pengawasan eksisting yang sudah tidak efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah**

Penyelenggaraan pemerintah daerah kini berkembang pesat dengan berbagai dinamika diantaranya perubahan tata kerja akibat dampak Pandemi Covid-19, bertambahnya ketugasan mandatory pelaksanaan tugas pengawasan, dan transformasi sistem informasi digital dalam kepemerintahan. Hal tersebut membuat metode pengawasan yang

eksisting tidak lagi efektif dan efisien. Sehingga untuk mempertahankan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal, diperlukan pembaharuan metode sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif dengan memanfaatkan tata kerja baru dan perkembangan sistem informasi digital.

2.5.2.7 Urusan Keistimewaan

Urusan Keistimewaan yang didanai menggunakan dana keistimewaan telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013 dengan dinamika yang berbeda beda baik terkait waktu dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Regulasi tersebut selalu ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat DIY. Terakhir penyusunan *Grand Desain* Keistimeewaan yang merupakan haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Diharapkan dengan disusunya grand desain ini permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY bisa terpecahkan. Secara umum. dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidah pembangunan urusan keistimewaan.
2. Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan
3. Belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaaan dan hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah. sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaaan untuk kesejahteraaan masyarakat sangat besar
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan . sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan
5. Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangggguran
6. Situasi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan

Secara khusus terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY di setiap urusan yakni :

1.) Urusan Kelembagaan

a. Pelaksana kegiatan diurusan kelembagaan semakin banyak terutama di Kabupaten/Kota terkait penugasan urusan keistimewaan
b. Kurang meratanya pemahaman terkait perencanaan keistimewaan
c. Masih perlunya sosialisasi yang massif terkait kebijakan dalam pelaksanaan urusan
d. Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan terkait urusan kelembagaan masih terbatas
e. Perlunya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kegiatan keistimewaan

2.) Urusan kebudayaan

a.) Belum tergalinya dengan optimal keterkaitan nilai-nilai kebudayaan dengan isu-isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan kemiskinan.
b.) Kurang optimalnya pengelolaan Data dan Informasi Aset asset Budaya baik benda maupun tak benda
c.) Belum meratanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat
d.) Berkurangnya jumlah maestro maestro seni budaya di Yogyakarta
e.) Lunturnya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja di jalanan. vandalisme
f.) Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan tehadap cagar budaya dan warisan budaya, tantangan untuk melestarikan warisan budaya tak benda dan pemeliharaan fisik warisan budaya cagar budaya
g.) Keterlibatan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dalam rangka melestarikan nilai-nilai kearifan budaya
h.) Perkembangan zaman, globalisasi, dan modernisasi menjadi tantangan untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal budaya

i.) Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk seluruh masyarakat, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mendukung pemeliharaan kegiatan kebudayaan, mengekspresikan seni dan budaya.
j.) Upaya untuk menjadikan sumbu filosofi sebagai nominasi warisan dunia ke UNESCO

3.) Urusan Pertanahan

a.) Pensertipikatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang cukup lama karena proses dari tahap pendaftaran hingga penerbitan yang sangat kompleks.
b.) Penanganan permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang terkendala karena informasi yang diberikan oleh pihak terkait kurang lengkap.
c.) Kegiatan penegasan batas wilayah yang terkendala akibat hilang/rusaknya patok batas, serta data narasumber yang kurang lengkap.
d.) Terbatasnya kapasitas pemeliharaan naskah-naskah pertanahan
e.) Beberapa lahan status lahannya tidak jelas

4.) Urusan tata ruang

a.) Tekanan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai objek penataan ruang semakin tinggi;
b.) Densifikasi dan intensitas pemanfaatan ruang yang terus meningkat mengakibatkan Bangunan dan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan semakin "tenggelam" di antara gedung-gedung tinggi sehingga secara langsung akan menegaskan bahkan mendegradasikan ciri-ciri keistimewaan;
c.) Komersialisasi ruang yang terus menguat dalam pembangunan di Yogyakarta secara langsung telah melunturkan filosofi pembangunan tata ruang Yogyakarta berbasis keistimewaan
d.) Konsentrasi Kekuasaan atas ruang oleh pihak-pihak tertentu (pemilik kapital) telah menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah atas ruang keistimewaan Yogyakarta dan berdampak langsung atas hilangnya akses masyarakat

terhadap ruang beserta isinya. baik yang bersifat publik maupun private.

e.) Tata ruang dan tata bangunan khususnya di perkotaan dan fenomena kota yang tertutup oleh media iklan luar ruang merupakan bukti penataan kota yang "acak-acakan" sekaligus mengindikasikan tidak digunakannya filosofi keistimewaan Yogyakarta (misalnya poros sumbu imajiner dan Golong-Gilig) dalam proses penataan ruang dan pembangunan kota;

f.) Menurunnya harmoni lingkungan dan sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemacetan. pencemaran lingkungan. intensitas bencana. dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lain.

g.) Belum optimalnya Koordinasi. integrasi. sinkronisasi serta sinergi antara substansi RTRW dan RDTR dengan rencana tata ruang keistimewaan Yogyakarta khususnya pada area SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

h.) Regulasi yang mengatur tentang Tata Ruang dinilai masih sangat normatif menyulitkan memasukkannya nilai-nilai filosofis keistimewaan Yogyakarta dalam dokumen perencanaan ruang;

i.) Sistem kelembagaan penataan ruang keistimewaan masih lemah. khususnya terkait dengan duplikasi kewenangan antar instansi. lintas kabupaten maupun antar kabupaten dengan DIY.

j.) Masih terbatasnya keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang keistimewaan Yogyakarta. mengakibatkan tata ruang hanya menata wadah kegiatan manusia. tanpa memperhatikan sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB)

3.1.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Selama periode 2018 sampai 2022, perekonomian DIY mengalami perkembangan yang positif, meskipun mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Perekonomian kembali menunjukkan perkembangan ekspansif dengan pertumbuhan positif di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp98,024 trilyun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp129,818 trilyun yang meningkat di tahun 2019 menjadi Rp104,487 trilyun (ADHK) dan Rp141,068 trilyun (ADHB). Nilai PDRB ADHK dan ADHB masing-masing turun menjadi Rp. 101,679 triliun dan Rp138,388 trilyun pada tahun 2020. Setelah itu, PDRB ADHK dan ADHB meningkat menjadi Rp112,898 trilyun dan Rp165,690 trilyun di tahun 2022.

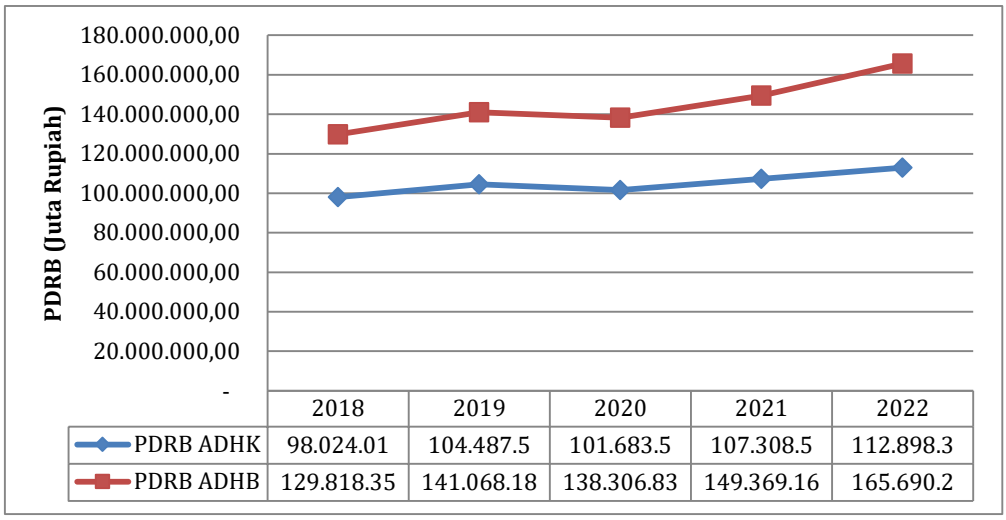

	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK	98.024.01	104.487.5	101.683.5	107.308.5	112.898.3
PDRB ADHB	129.818.35	141.068.18	138.306.83	149.369.16	165.690.2

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 3-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2018 - 2022

Lima lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB DIY tahun 2022 adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022 seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata. Pada tahun 2022, sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi sebesar 11,93% yang diikuti oleh pangsa Informasi dan Komunikasi sebesar 10,30%, Informasi dan Komunikasi 10,72%, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,97%, Konstruksi 9,92% serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 8,89%.

Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini.

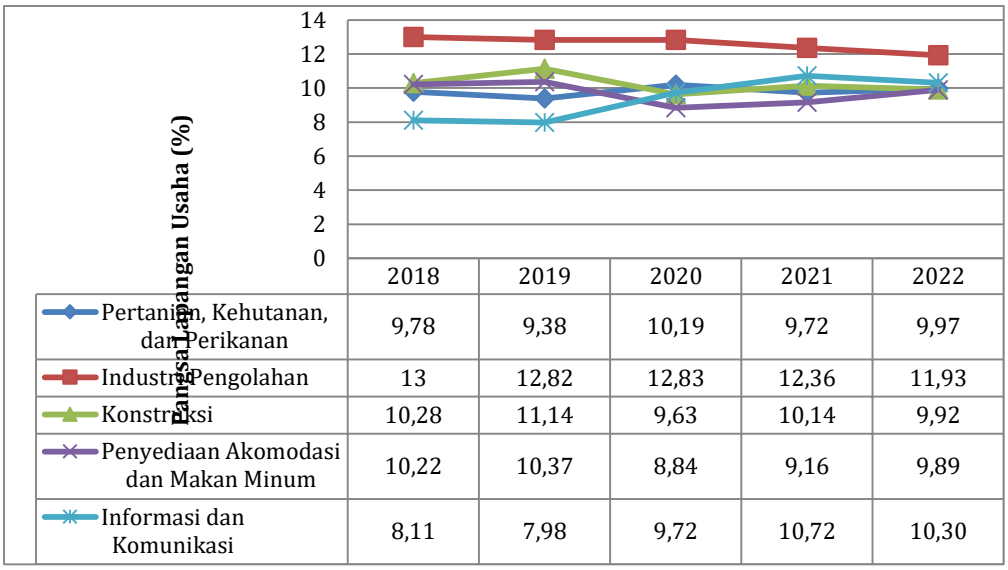

	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,78	9,38	10,19	9,72	9,97
Industri Pengolahan	13	12,82	12,83	12,36	11,93
Konstruksi	10,28	11,14	9,63	10,14	9,92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,22	10,37	8,84	9,16	9,89
Informasi dan Komunikasi	8,11	7,98	9,72	10,72	10,30

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 3-2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY , 2018 - 2022 (%)

Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu.

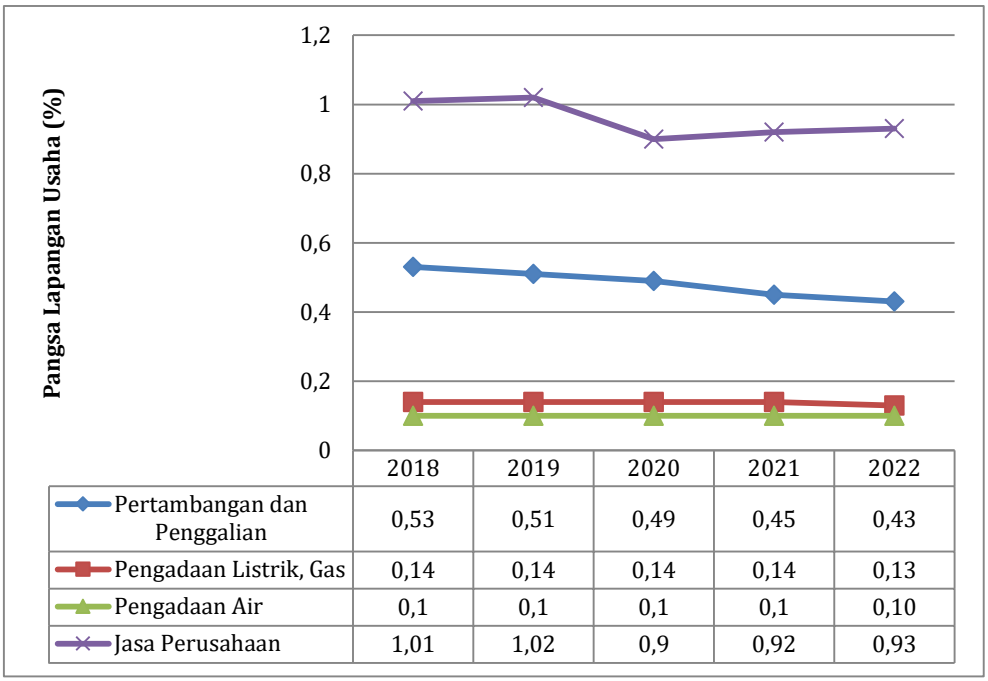

	2018	2019	2020	2021	2022
Pertambangan dan Penggalian	0,53	0,51	0,49	0,45	0,43
Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13
Pengadaan Air	0,1	0,1	0,1	0,1	0,10
Jasa Perusahaan	1,01	1,02	0,9	0,92	0,93

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 3-3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2018 – 2022

3.1.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluran dominan pembentukan PDRB menurut pengeluaran selanjutnya diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2018-2022, semua jenis pengeluaran mengalami kecenderungan peningkatan, meskipun semua pengeluaran mengalami penurunan akibat dampak pandemi pada tahun 2020.

Secara umum, kontribusi tiap pengeluaran menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun selama periode 2018 - 2022. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 60% namun perkembangannya menunjukkan tren menurun sampai menjadi 61,63% pada tahun 2022 dari 66,68% di tahun 2018. Pada tahun 2022, pangsa Konsumsi Pemerintah menurun sejak tahun 2019 menjadi 64,32% (2021).

Tabel 3-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018 - 2022

Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	86,753,197.0	92.459.989,0	92.753.542,0	96.073.981,0	102.110.288,0
Konsumsi LNPRT	4,095,046.0	4.613.731,6	4.378.319,0	4.470.000,0	4.819.205,0
Konsumsi Pemerintah	21.346.113,0	22.458.454,0	22.889.807,0	23.707.981,0	24.184.623,0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	43.173.678,0	49.519.128,0	44.319.423,0	49.030.849,0	53.972.182,0
Perubahan Inventori	1.435.491,0	1.501.126,0	1.631.021,0	1.793.056,0	17.984.439,0
Ekspor Luar Negeri	8.749.632,0	8.970.892,0	7.782.029,0	9.769.620,0	10.616.051,0
Impor Luar Negeri	7.206.068,0	6.934.236,0	5.326.062,0	5,864.623,0	5.944.711,0
Net Ekspor Antar Daerah	-28.469.631,0	-31.188.901,0	-30.121.245,0	-28.935.461,0	-2.,865.868,0
P D R B	129.877.458,0	141.400.183,0	138.306.833	149.408.404,0	165.690.210,0

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Tabel 3-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2018 - 2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi RT	66,8	65,39	67,02	64,3	61,63
Konsumsi LNPRT	3,15	3,26	3,16	2,99	2,91
Konsumsi pemerintah	16,44	15,88	16,54	15,44	14,6
PMTB	33,24	35,02	32,03	32,82	32,57
Perubahan Inventori	1,11	1,06	1,18	1,2	1,09
Ekspor LN	6,74	6,34	5,62	6,54	6,41
Impor LN	5,55	4,9	3,85	3,93	3,59
Net Ekspor Antar daerah	-21,92	-22,06	-21,7	-19,37	-15,61
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY 2023

3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2018-2022 menunjukkan dinamika dengan terjadinya kontraksi di tengah periode (tahun 2020) dengan tingkat pertumbuhannya -2,69%. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan kembali menunjukkan perkembangan ekspansif. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,60%, Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,53% yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,15% yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,31%.

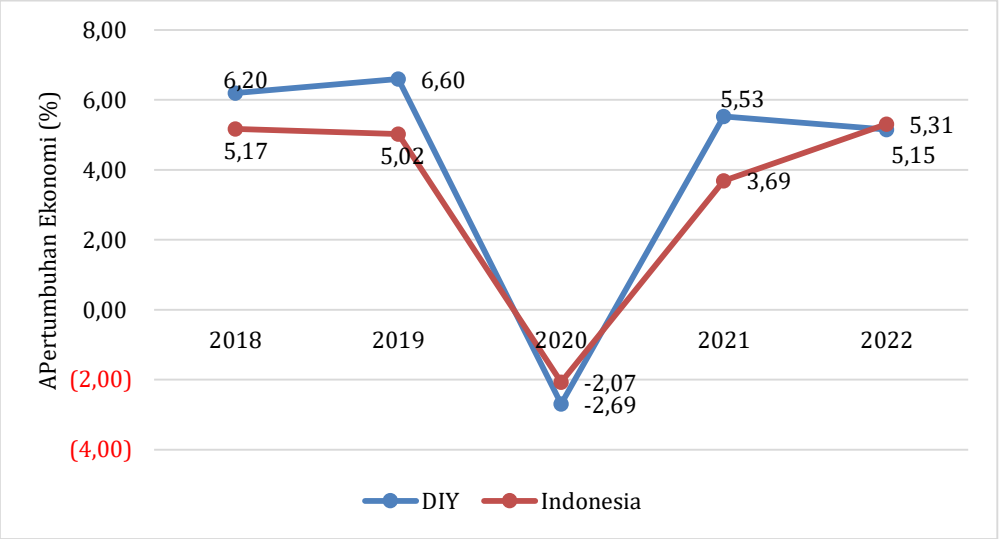

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 3-4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2018 - 2022

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di tahun 2022 di dukung pertumbuhan positif semua lapangan usaha. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi dengan tingkat pertumbuhan di atas 10% adalah sektor Transportasi dan Pergudangan (18,26%), Jasa Lainnya (15,04%) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (12,40)%.

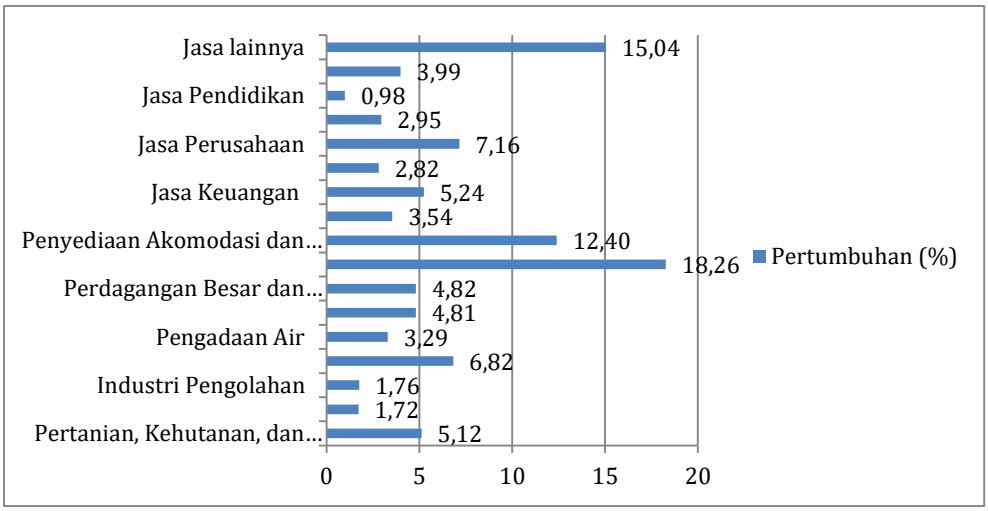

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 3-5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2022

Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika perubahan harga-harga secara umum selama kurun waktu lima tahun, 2018-2022. Selama dua tahun terakhir terjadi kenaikan harga dengan mencapai tingkat Inflasi tertinggi terjadi selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 6,49%.

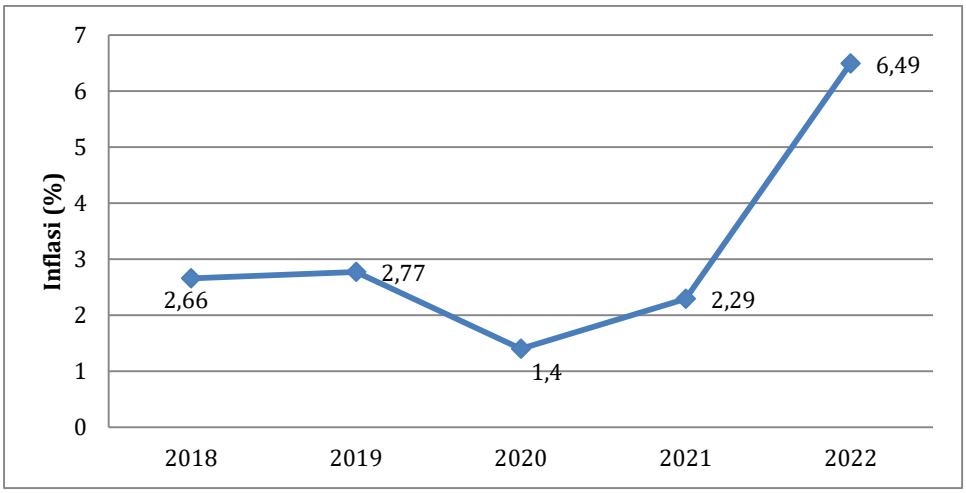

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 3-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2018 - 2022

ICOR

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. ICOR di tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR turun dari 4.81 di tahun 2019 menjadi -9.68 di tahun 2020. Pada tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 5,32 dan menjadi 5.55 di tahun 2022.

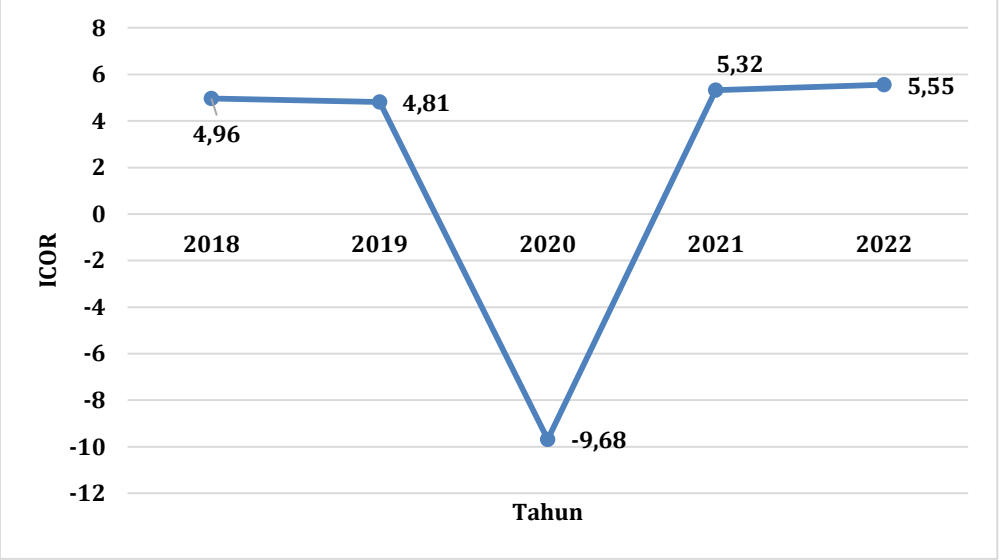

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 dan Bappeda DIY, 2023

Gambar 3-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2018- 2022

Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2018-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren meningkat selama 2019-2021 dan kemudian menurun di tahun 2022.

Tabel 3-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.226.280	2.246.190	2.228.160	2.334.960	2.336.080
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	75.030	71.480	101.850	106.430	94.950
TPT (%)	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Angkatan kerja di tahun 2021 berjumlah 2.334.960 orang dan meningkat sebanyak 1.120 orang menjadi 2.336.080 orang dari tahun sebelumya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan penurunan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 106.430 orang pada tahun 2021 menjadi 94.950 orang di 2022. Selama dua tahun terakhir terjadi penurunan TPT sebesar 0,5 poin yaitu dari 4,56% (2021) menjadi 4,06% (2022)

Kemiskinan

Dalam periode 2018-2022 jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun dan telah berkurang, namun terjadi peningkatan di tahun 2020 akibat dampak pandemik Covid - 19. Selama dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Selama periode pasca tahun 2020 penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 39.510 orang yaitu dari 503.140 orang di tahun 2020 dan menurun menjadi 463.630 orang di tahun 2022.

Tabel 3-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2018 - 2022 (September)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	450,25	440,89	503,14	474,49	463,63
Tingkat Kemiskinan (%)	11,81	11,44	12,8	11,91	11,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2020, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat 1,36 poin dari 11,44% di tahun 2019 menjadi 12,8% di tahun 2020. Setelah itu, tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,49% di tahun 2022.

Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan *Indeks Williamson* (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW DIY tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata. Pada tahun 2022, ketimpangan regional sama dengan tahun 2021 yaitu 0,4504.

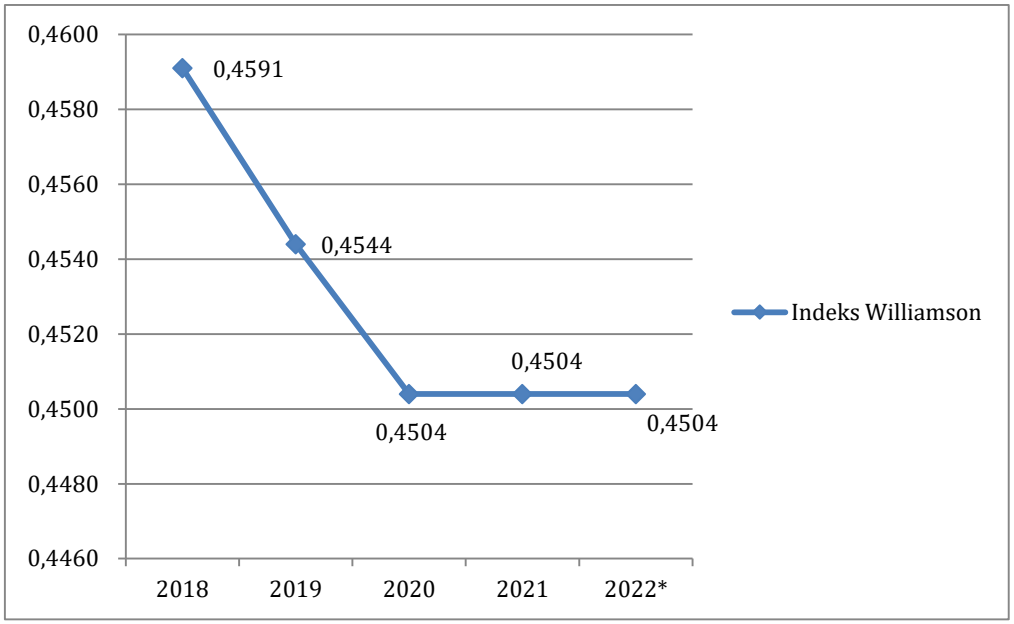

Sumber: BPS Provinsi DIY 2021, Jogja Dataku diakses 10 Februari 2023

Gambar 3-8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2018-2022

1.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Indeks Gini meningkat sebesar 0,037 poin dari 0,422 di tahun 2018 menjadi 0,459 di tahun 2022

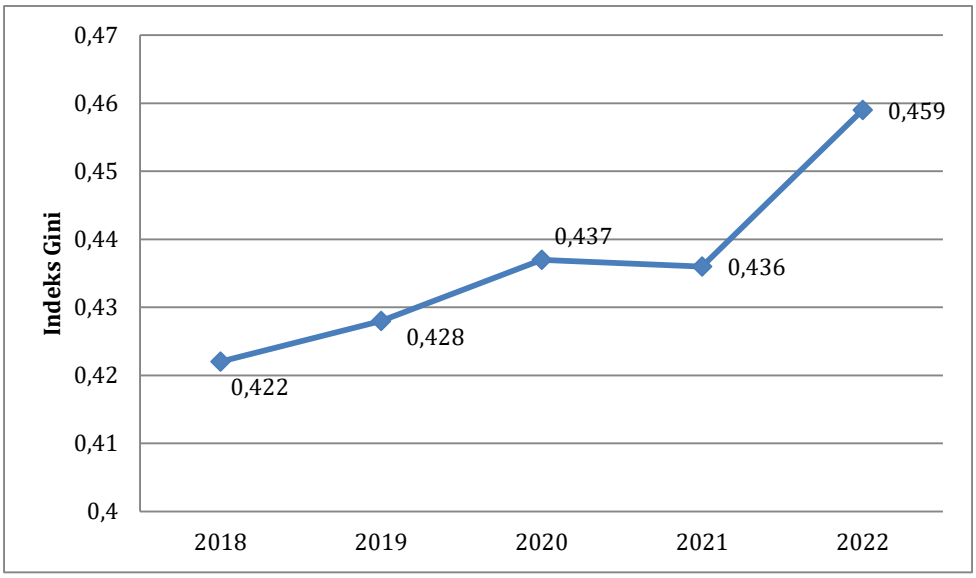

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 3-9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2018 - 2022 (September)

Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024

Tabel 3-5 Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2024

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,1 – 5,6%
Inflasi	2 - 4%
ICOR	5,2 – 5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8-3,45
Tingkat Kemiskinan	10,16%
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,419
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	0,441
Indeks Pembangunan Manusia	81,38 - 81,56

Sumber: BPPSD Bappeda DIY (2022)

3.1.7.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diharapkan terus meningkat setelah terjadinya *rebound* perekonomian sejak tahun 2021 dan diikuti tahun 2022 yang telah mendorong perekonomian ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi yang

positif. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dan dinamika aktivitas perguruan tinggi. Aktivitas pariwisata kembali menunjukkan dinamika yang positif terutama dimulai di akhir tahun 2021 seiring dengan menurunnya penularan secara signifikan terutam adi tahun 2022 dan gencarnya vaksinasi serta perluasan inisiatif pariwisata yang mempraktekkan CHSE. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalam kontraksi adalah sektor jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di lain pihak dampak resesi di beberapa negara pada tahun 2023 diprediksi masih melemahkan daya beli masyarakat internasional sehingga permintaan atas produk ekspor DIY dan jumlah wisatawan asing yang datang diperkirakan akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan dinamikan pariwisata DIY. Semakin kondusifnya perekonomian meskipun terdapat kendala dampak resesi dunia mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi antara 5,1 dan 5,6% di tahun 2024.

3.1.7.2 Inflasi

Perbaikan kondisi perekonomian yang ditandai antara lain dengan peningkatan permintaan akan menjadi faktor *demand-pull* bagi kenaikan harga barang konsumsi. Meskipun ada dorongan harga secara umum untuk meningkat, namun praktek Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY yang selama ini efektif dapat meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Tingkat inflasi di tahun 2024 diperkirakan mencapai 2 sampai 4 %.

3.1.7.3 ICOR

Perekonomian di tahun 2023 sudah diharapkan menuju kondisi *rebound* yang semakin baik namun pada aspek operasionalisasi perusahaan masih terdapat kendala terutama untuk meningkatkan aliran barang modal untuk melakukan efisiensi operasional usaha ataupun meningkatkan keluaran usaha. Hal tersebut mendorong tingkat ICOR yang belum dapat mendekati kondisi sebelum pandemi yang telah mencapai tingkat ICOR di bawah 5%. Pada tahun 2024, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,2 sampai 5,8%.

3.1.7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja

semakin meningkat. Tingkat pengangguran sempat mencapai tingkat tertinggi di tahun 2020 sejak tahun 2016 yaitu sebesar 4,57% akibat dampak pandemi. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 3,45 sampai 3,8% di tahun 2024.

3.1.7.5 Kemiskinan

Kenaikan pendapatan per kapita yang diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita kelompok menengah ke bawah dan kelompok miskin serta rentan miskin. Perbaikan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 10,16% di tahun 2024.

3.1.7.6 Indeks Gini

Perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong menurunnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah sehingga ketimpangan antar individu di DIY dapat menurun. Pada tahun 2024, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini diharapkan dapat menurun menjadi 0,419.

3.1.7.7 Indeks Williamson

Pada tahun 2021 dan 2022, *rebound* nya aktivitas perekonomian lebih banyak dinikmati oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terutama akibat meningkatnya aktivitas pariwisata terutama melalui sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2024, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2024 adalah 0,441.

3.1.7.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang secara konsisten dilaksanakan pada sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan akan terus mendorong peningkatan pembangunan manusia. Hal ini mendorong adanya kenaikan IPM yang diproyeksikan di tahun 2024 sebesar 81,38 – 81,56.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 telah berpedoman pada undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali untuk

pajak kendaraan bermotor,bea balik nama kendaraan bermotor serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2025 sesuai amanat undang-undang.

Dalam penyesuaian dan persiapan pelaksanaan pemungutan pendapatan berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah akan melakukan beberapa tahapan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB,BBNKB serta Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di tahun anggaran 2025,mempersiapkan regulasi pendukung terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah,mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan opsen pajak .

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 2022, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Selain perubahan kebijakan pada Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer. Transfer Ke Daerah (TKD) diredesain dengan basis kinerja. Struktur Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah DIY terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Keistimewaan.

Penghitungan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah daerah penghasil, daerah pengolah, dan daerah non penghasil terdampak eksternatitas negatif. Pemerintah dalam menetukan pagu Dana Alokasi Umum mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta berbasis *unit cost* yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, karakteristik wilayah.

Kerangka pendanaan yang disusun dalam *Grand* Desain Keistimewaan tahun 2022-2042 pada semua urusan yaitu Tata cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata ruang tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka perekonomian negara sangat mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah DIY.

Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dirancang dengan skenario *Moderate* karena mengacu pada asumsi bahwa kondisi perekonomian Indonesia selama 20 tahun ke depan cukup baik yakni pertumbuhan ekonomi diasumsikan kurang lebih berkisar 5%, dan inflasi dapat dikendalikan.

Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistematis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
4) Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, yaitu:
    a. urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
    b. urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
    c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
    d. urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
    e. bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.

6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD.

Sedangkan kebijakan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat terdiri atas:

1) Arah kebijakan penggunaan DBH
   a. mengoptimalkan kebijakan DBH earmarked yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan;
   b. memanfaatkan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat:
   c. meningkatkan sinergi pendanaan DBH dengan sumber pendanaan lainnya; dan
   d. mengelola DBH secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
2) Arah kebijakan penggunaan DAU
   a. memanfaatkan DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundangan, antara lain untuk penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemenuhan SPM;
   b. memanfaatkan DAU untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
   c. meningkatkan sinergi pendanaan DAU dengan sumber pendanaan lainnya; dan
   a. mengelola DAU secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
3) Arah kebijakan penggunaan DAK
   a. memanfaatkan DAK sesuai dengan target keluaran (output) dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang yang telah disepakati bersama Kementerian Negara/Lembaga;
   b. mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
   c. meningkatkan sinergi pendanaan DAK dengan sumber pendanaan lainnya; dan
   d. mengelola DAK secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
4) Arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan
   a. memanfaatkan Dana Keistimewaan sesuai rencana kebutuhan dana keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Dana

Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait;

b. memanfaatkan dana keistimewaan untuk mengatasi isu strategis di DIY, khususnya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM;
c. meningkatkan tata kelola pemanfaatan dana keistimewaan yang partisipatif;
d. memperbaiki mekanisme tata kelola dana keistimewaan melalui keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemda DIY;
e. meningkatkan sinergi pendanaan Dana Keistimewaan dengan sumber pendanaan lainnya; dan
f. mengelola Dana Keistimewaan secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2) Prioritas
   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi

kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3) Tolok ukur dan target kinerja
   Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.
4) Optimalisasi belanja
   Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
5) Transparansi dan Akuntabel
   Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
   ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak
   mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi
   menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan
   Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sumber Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber penerimaan pembiayaan DIY berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penganggaran SiLPA tahun 2024 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Pinjaman Daerah Tahun 2024 dilakukan Pemerintah Daerah DIY kepada Lembaga Keuangan Bank yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infratruktur daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Pojk.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur bahwa modal inti Bank Umum sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) pada akhir Desember tahun 2024. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk membayar pokok hutang pinjaman.Sedangkan pemberian pinjaman diberikan kepada bahwa Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), yang merupakan lembaga perkreditanmilik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat.

Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2022-2027. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti perkiraan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah dan proyeksi variabel-variabel keuangan daerah di atas maka proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-6 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Uraian	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH	**5.418.443.469.042**	**5.751.056.739.358**	**6.015.690.520.574**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.135.796.486.700**	**2.233.040.238.938**	**2.249.283.552.344**
Pajak Daerah	1.865.533.536.818	1.959.426.865.770	2.019.555.786.270
Retribusi Daerah	36.120.490.654	37.910.520.559	74.663.534.100
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113	110.119.268.734	114.962.158.724
Lain-lain PAD yang Sah	128.033.684.115	125.583.583.875	40.102.073.250
PENDAPATAN TRANSFER	**3.275.406.482.342**	**3.510.440.000.420**	**3.758.801.468.230**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.274.535.188.852	3.509.604.094.000	3.757.817.663.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490	835.906.420	983.805.230
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.240.500.000**	**7.576.500.000**	**7.605.500.000**
Pendapatan Hibah	7.240.500.000	7.576.500.000	7.605.500.000
Jumlah Pendapatan	**5.418.443.469.042**	**5.751.056.739.358**	**6.015.690.520.574**
BELANJA	**5.809.255.306.456**	**6.000.056.739.358**	**6.276.999.255.541**
BELANJA OPERASI	**3.750.932.719.031**	**3.723.645.619.208**	
Belanja Pegawai	1.672.852.588.187	1.685.387.504.583	-
Belanja Barang dan Jasa	1.462.675.452.620	1.329.971.724.901	-
Belanja Subsidi	78.451.861.160	91.553.295.477	-
Belanja Hibah	502.164.697.064	590.803.519.247	-
Belanja Bantuan Sosial	34.788.120.000	25.929.575.000	-
BELANJA MODAL	**738.185.023.303**	**860.505.415.936**	**-**
Belanja Modal Tanah	160.094.957.821	240.119.414.802	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.656.018.343	173.014.021.467	-

Uraian	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.101.185.387	200.205.491.752	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.901.875.390	232.048.430.500	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.430.986.362	15.063.342.015	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	54.715.400	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	**46.582.052.344**	**26.021.177.076**	**-**
Belanja Tidak Terduga	46.582.052.344	26.021.177.076	-
BELANJA TRANSFER	**1.273.555.511.778**	**1.389.884.527.138**	**-**
Belanja Bagi Hasil	797.667.233.679	805.675.843.238	-
Belanja Bantuan Keuangan	475.888.278.099	584.208.683.900	-
Jumlah Belanja	**5.809.255.306.456**	**6.000.056.739.358**	**6.276.999.255.541**
Total Surplus/(Defisit)	**(390.811.837.414)**	**(249.000.000.000)**	**(261.308.734.967)**
PEMBIAYAAN	**390.811.837.414**	**249.000.000.000**	**261.308.734.967**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**564.487.394.414**	**554.000.000.000**	**573.508.734.967**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	554.487.394.414	550.000.000.000	457.508.734.967
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	116.000.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	4.000.000.000	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**564.487.394.414**	**554.000.000.000**	**573.508.734.967**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**173.675.557.000**	**305.000.000.000**	**312.200.000.000**
Penyertaan Modal Daerah	173.675.557.000	300.000.000.000	300.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	9.700.000.000

Uraian	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
Pemberian Pinjaman Daerah	-	5.000.000.000	2.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**173.675.557.000**	**305.000.000.000**	**312.200.000.000**
Pembiayaan Netto	**390.811.837.414**	**249.000.000.000**	**261.308.734.967**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**-**	**-**	**-**

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam pidato visi dan misi pada tanggal 7 Agustus 2022 sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022-2027 menyampaikan visi ***"Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.***," dan misi yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya 'Pancamulia', menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa

ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) Good-governance pada berbagai tingkatan.

Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyandang maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (territorial speciality), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman

permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional (*specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART-C)),

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 yang telah dirancang beserta target sebagai berikut.

Tabel 4-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: "Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.,"

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	*Base-line*	Target Tahun
					2022	2024
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	IGI (*Inclusive Growth Index*)			6,24	6,42
		Indeks Kebahagiaan			72,27	73,41
			1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,16
			1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15	5,1-5,6
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	30,23
				TPT	4,06	3,45-3,8
				Inflasi	6,49	2-4
			1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,38 – 81,56
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,78
		Indeks Williamson			0,450	0,441
2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pelindungan sumber daya setempat	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah		2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,09
		Indeks Reformasi Birokrasi			A	A

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	*Base-line*	Target Tahun
					2022	2024
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*	Opini BPK	WTP	WTP
				SAKIP	AA	AA
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi
4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			sedang	sedang
			4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	82,62
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	113,11

4.2 PERUMUSAN TEMA PEMBANGUNAN

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut serta dengan mempedomani kebijakan nasional yang dituangkan dalam RKP 2024. Selain itu juga melakuka internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah di DIY seperti Paradigma Abad Samudra Hindia, Keistimewaan DIY, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – SDG's).

Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Tema RKPD Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Posisi RKPD 2024 dalam RPJPD

tersebut menjadi strategis karena menjadi salah satu tahun penentu pencapaian visi jangka panjang daerah. Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah: **"Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera."** Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Mewujudkan Pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya Pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengentahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci dari visi jangka panjang tersebut adalah **pendidikan, budaya, pariwisata, pembangunan sosiokultural dan sosioekonomi**. Selanjutnya Visi Misi tersebut diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terbagi dalam tahapan lima tahunan. Sasaran pokok pembangunan dari RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya DIY sebagai pusat Pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
    a. Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah
    b. Tersedianya sumberdaya Pendidikan yang handal
    c. Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap Pendidikan
    d. Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY
    e. Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
    f. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya
    g. Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah tinggi.

2. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:

    a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
    b. Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan
    c. DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur
    d. Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif
    e. Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan benda Cagar Budaya
    f. Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata
    g. Masuknya DIY dalam *culture itinerary/culture map* tingkat Asia Tenggara

3. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:

    a. Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata
    b. Tersedianya fasilitas pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal
    c. Meningkatnya kualitas paket wisata yang variative baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dana tau oleh pelaku wisata
    d. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara
    e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW.

4. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:

    a. Terselenggaranya pemerintahan yang professional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum
    b. Terciptanya kelambagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang mantap

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah.
d. Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai
e. Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industry kreatif di Asia Tenggara
f. Terpenuhinya peningkatan keamanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama
g. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak dan remaja
h. Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi
i. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajad sosial dan kesehatan yang tinggi

Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang tersebut telah ditetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan. Penekanan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025) adalah untuk "*penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energ*i.". perumusan tema pembangunan Tahun 2024 disesuaikan dengan penekanan pembangunan pada lima tahun keempat RPJPD 2005-2025 tersebut. Rumusan tema pembangunan tahun 2024 tersebut juga merupakan kesinambungan dari tema-tema pembangunan sebelumnya, termasuk sasaran pokok dan arah kebijakan tahapan ketiga RPJPD 2020-2025.

Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2024

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2022-2027. Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan

kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumberdaya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik. Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2022-2027 yaitu:

1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat
2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik

Selanjutnya agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Hidup-kehidupan-	1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
penghidupan Masyarakat	2. Penghidupan ekonomi yang layak 3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	baru berbasiskan sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		Meningkatkan tata kelola kalurahan	1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kalurahan 2. Peningkatan tata kelola keuangan 3. Optimalisasi penggunaan TIK
		Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengembangan sumber-sumber PAD	1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 2. Meningkatkan pendapatan melalui potensi non pajak
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan 3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia 5. Meningkatkan produktifitas penggunaan sumber daya alam lokal
		Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pembangunan wilayah selatan	2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 3. Memperkuat ketahanan keluarga
		Meningkatkan penawaran Investment *Project Ready to Offer* di wilayah selatan	Meningkatkan kerjasama pendanaan (investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berdasarkan pemetaan potensi kerjasama
		Meningkatkan kapasitas ketangguhan *(resiliency)* dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan ketangguhan (*resiliency*) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan 3. Memanfaatkan teknologi untuk penanganan bencana
		Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya *Good Governance*	Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi	1. Memperkuat manajemen ASN 2. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		digital dan pemenuhan SPM	
		Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda
		Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	1. Meningkatkan rasa toleransi 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 3. Meningkatkan literasi TIK masyarakat
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Menurunnya risiko bencana	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa
		Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Sumber: Raperda RPJMD DIY 2022-2027,

Berangkat dari perumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut yang kemudian dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan untuk mengarahkan pencapaiannya maka Tema RKPD Tahun 2024 sebagai tahun pertama RPJMD Tahun 2022-2027 dapat mengandung tema pemerataan ekonomi dan pemerataan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Internalisasi Tema RKP Tahun 2024 dengan Tema RKPD Tahun 2024

Tahun 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 diharapkan memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik. Isu serta risiko terkait dengan pandemi COVID-19 telah bergeser menuju pada kondisi ketidakpastian global dan nasional. Di tengah usaha perbaikan indikator ekonomi dalam menghadapi tekanan global serta ketidakpastian yang masih tinggi, tahun 2024 juga menjadi tahun politik dengan agenda pemilu dan transisi. Oleh karena itu, pada tahun 2024 juga dilakukan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Penyusunan RKP tahun 2024 juga merespon isu-isu pembangunan di berbagai tingkatan baik isu di tingkat global, nasional, maupun lokal diantaranya:

1. Isu global, meliputi:
   - Stabilitas politik global
   - Pasokan pangan dan energi
   - Resesi

- Inflasi
- Investasi melambat
- Perubahan iklim

2. Isu nasional, meliputi:
   - Efek resesi global
   - Inflasi
   - Daya beli
   - Tahun politik
3. Isu Lokal, meliputi:
   - Bencana dan daya dukung lingkungan
   - Pemantapan pemulihan ekonomi
   - Daya beli
   - Pengangguran
   - Pemerataan
   - Kemiskinan
   - *Stunting*
   - Kualitas sumber daya manusia

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Rancangan RKP Tahun 2024, yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN tahun 2020-2024, tema tersebut mengupayakan pemenuhan target-target sasaran akhir RPJMN 2020-2024 serta penciptaan fondasi yang kokoh untuk periode 2025-2029. Upaya tersebut dicapai melalui 2 sasaran pembangunan yaitu:

a) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan
b) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan

Berdasarkan tema dan sasaran diatas, terdapat 8 arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Penguatan daya saing usaha
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara
8. Pelaksanaan pemilu 2024

Dalam 8 arah kebijakan tersebut, terdapat 13 *Highlight Major Project* yang dilakukan dalam RKP Tahun 2024 yaitu:

Tabel 4-3 13 Highlight Major Project yang dilakukan dalam RKP Tahun 2024

Arah Kebijakan	*Major Project*
Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1. *Major Project* Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan	1. *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2. *Major Project* Reformasi Pendidikan Ketrampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0) 3. *Major Project* Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan	1. *Major Project* Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 2. *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM 3. *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas 4. *Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	1. *Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 2. *Major Project* Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
Penguatan daya saing usaha	1. *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM
Percepatan pembangunan ibu kota nusantara	*1. Major Project* Ibu Kota Nusantara *2. Major Project* Wilayah Adat Papua (Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay)
Pelaksanaan pemilu 2024	Didukung oleh proyek-proyek prioritas

Adapun Prioritas Nasional tahun 2024 sebagai berikut:

1. PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6 : Membangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Terdapat 16 *Highlight Major Project* dari 44 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang dilanjutkan dalam RKP Tahun 2024 yaitu:

Tabel 4-4 16 *Highlight* Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang dilanjutkan dalam RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional		Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 2. Destinasi Pariwisata Prioritas 3. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 4. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) 5. Pengelolaan Terpadu UMKM
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Pembangunan Ibu Kota Negara 2. Wilayah Papua. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting 2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 4. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
PN 5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 2. Transformasi Digital 3. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) 4. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman
PN 6	Membangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Melalui arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4-5 Tabel Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator	Target Tahun 2024
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 – 5,7
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7
Rasio Gini (nilai)	0,374 – 0,377
Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	107-110
Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	105-108

Tema RKPD DIY Tahun 2024

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasioanl (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024.

Tema pembangunan tahun 2024 yaitu:

"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Pemerataan aksesibilitas layanan publik
   Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan

merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut

2. Pemerataan aktivitas ekonomi
   Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.

4.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2024 *"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"* dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Keenam (6) rumusan Priroutas Pembangunan DIY tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut

Tabel 4-6 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	*Base-line*	Target Tahun
					2022	2024
1.	*"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"*	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,16
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15	5,1-5,6
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,00	30,23
				TPT	4,06	3,45-3,8

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	*Base-line*	Target Tahun
					2022	2024
				Inflasi	6,49	2-4
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,38 – 81,56
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,78
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,09
5.		Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*	Opini BPK	WTP	WTP
				SAKIP	AA	AA
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	82,62
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	113,11

Prioritas pembangunan Tahun 2024 tersebut selanjutnya diselaraskan juga dengan Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4-7 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah

PN Nasional		Prioritas DIY
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)

PN Nasional		Prioritas DIY
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
PN 5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 6	Membangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 5 Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan

4.4 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu masukan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, berisi sejumlah pemikiran-pemikiran DPRD mengenai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 sekaligus penekanan terhadap permasalahan-permasalahan penting untuk segera diselesaikan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 mengatur DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini berada pada posisi yang spesifik, dimana dokumen perencanaan pembangunan berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 belum tersusun. Visi-Misi Gubernur/Wakil Gubernur sebagai bahan dasar penyusunan Perda RPJMD baru saja disampaikan pada saat prosespengisian jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Periode 2022-2027 bulan Agustus 2022 yang lalu.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Tahun 2024 disusun dengan mendasarkan pada dua sisi latar belakang yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Pertama, disusun dengan mendasarkan pada basis data yang bersumber dari berbagai lembaga, baik BPS, Perguruan Tinggi, Dinas/Instansi Pemerintah Daerah, serta data hasil penelitian lainnya. Kedua, sebagai bagian pelaksanaan representasi rakyat yang diwakili, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD memuat masukan-masukan, usulan-usulan, dan harapan warga masyarakat yang disampaikan melalui forum reses dan penjaringan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD, sambang warga, sosialisasi produk hukum daerah, Rapat Dengar Pendapat Umum baik audiensi maupun public hearing, dan sebagainya. Dalam dimensi ini, DPRD berusaha seoptimal mungkin menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan mendasarkan pada basis data atau aspirasi masyarakat bukan pandangan asumtif dan subyektif Anggota Dewan.

Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan arahan dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang dan misi pembangunan jangka pendek di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisi lain penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini juga sekaligus sebagai penguatan terhadap proses perencanaan pembangunan (proses politis). Dengan demikian proses perencanaan diharapkan lebih berkualitas dengan semakin banyaknya perspektif yang melatarbelakangi. Adapun tujuan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD meliputi:

1. Memberikan bahan masukan, arahan sekaligus usulan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2024.
2. Penguatan fungsi representasi Anggota DPRD dengan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, sambang warga, sosialisasi produk hokum daerah, Rapat Dengar Pendapat Umum baik audiensi maupun public hearing.
3. Penguatan arah dan fokus pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, khususnya target pada tahun 2024.

4. Memudahkan penyusunan dokumen RKPD, sehingga akan semakian memudahkan penyusunan KUA dan PPAS, RKA SKPD, dan semakin mengefektifkan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
5. Mengarahkan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana.
6. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY secara adil dan merata, sebagai muara dari proses pembangunan daerah yaitu masyarakat yang sehat, sejahtera, dan bahagia

Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi DPRD

Pembangunan daerah DIY menunjukkan dinamika yang cukup menarik pada kurun waktu Tahun 2022. Meskipun masih diliputi suasana pandemi Covid-19, namun kinerja pembangunan di DIY menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan. Indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan di DIY sepertinya sudah "on the track". Pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka positif, bahkan dalam Triwulan pertama dan kedua melampaui dari capaian nasional. Demikian pula dengan ekspor DIY ke mancanegara pada kurun waktu 2021 juga menunjukkan pergerakan angka yang signifikan tidak kalah dengan Tahun 2019 saat sebelum pandemi. Hal ini tentu patut untuk diapresiasi bersama sebagai sebuah capaian yang positif.

Namun sisi lain pembangunan di DIY juga menunjukkan data yang paradoksal, dimana ada beberapa capaian pembangunan yang belum mampu menembus target dalam target RPJMD 2017-2022 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pendapatan (Indeks Gini), dan presentase angka kemiskinan. Permasalahan serius ini masih ditambah pula dengan ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar. Semenjak RPJMD ditetapkan, ketiga hal tersebut belum pernah mencapai target sebagaimana seharusnya. Capaian ini sangat "njomplang" bila dibandingkan dengan kinerja pada Tata Kelola Pemerintahan yang mendapatkan hasilsangat memuaskan sebagaimana target. Problematika inilah yang harus terus diselesaikan dalam proses pembangunan daerah selanjutnya.

Memasuki Tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2020-2025, maka pembangunan daerah diarahkan pada penguatan upaya pencapaian unggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut,

penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Tahap IV inilah sebagai bagian akhir dari agenda besar target dalam RPJPD 2005-2025 yaitu "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera". Momentum ini harus mampu dimaksimalkan untuk menopang ketercapaian target lima tahun terakhir RPJPD DIY. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19, maka dituntut kerja keras semua pemangku kepentingan untuk bisa bangkit dan melesat cepat menyesuaikan dengan pola kehidupan baru pasca pandemi. Seluruh sektor kehidupan harus bergerak cepat melakukan penyesuaian dan akselerasi langkah dalam mencapai tujuan pembangunan DIY, pembangunan yang melahirkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan berkeadaban. Pondasi terhadap langkah cepat tersebut telah kita miliki dengan capaian kinerja pembangunan pada kurun waktu 2022, dimana kebijakan pemulihan sosialekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah menunjukkan capaian yang menggembirakan.

4.4.2.1 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan

Persoalan kebijakan pembangunan di D.I. Yogyakarta masih fokus pada persoalan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (Rasio Gini), dan kesenjangan infrastruktur pembangunan wilayah. Ketiga isu kebijakan pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema utama dalam pembahasan kebijakan publik, khususnya ekonomi pembangunan. Di bidang pemerintahan, tema-tema utama kebijakan juga dipusatkan dalam mendorong terselesaikannya ketiga tema persoalan tersebut, meskipun bidang pemerintahan juga mempunyai banyak persoalan yang terkait dengan isu sosial dan politik nasional.

Tuntutan perkembangan jaman mengharuskan pemerintahan daerah mempunyai semangat inklusif, adaptatif terhadap perkembangan teknologi untuk membangun kebijakan daerah yang mampu memberikan perubahan-perubahan positif ke depan. Persoalan Keistimewaan Yogyakarta seharusnya bukan menjadi satu hambatan dalam pengembangan tata pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah, akan tetapi menjadi faktor mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4.2.1.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

- Permasalahan
  1. Belum maksimalnya layanan publik, kebijakan daerah yang belum berpihak, hingga pada kepuasan masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi pembangunan daerah
  2. Terkait pemberdayaan desa terdapat persoalan layanan dasar, minimnya pertumbuhan ekonomi, hingga kemampuan desa untuk bertumbuh dalam era otonomi daerah.
- Rekomendasi
  1. Meningkatkan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.
  2. Penguatan aparatur daerah.
  3. Evaluasi organisasi pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik.
  4. Memperjelas tata kelola BKK Kalurahan dan mempermudah persyaratannya (misal: tidak harus mandiri budaya tetapi minimal sudah termasuk desa prima, preneur, wisata, budaya, maritim, dll).
  5. Menjadikan BKK Kalurahan untuk percepatan Reformasi Kalurahan dan Mandiri Budaya.
  6. Maksimalisasi program dan kegiatan sesuai dengan yang diusulkan oleh desa/kalurahan (sesuai hasil musrembang kalurahan) melalui BKK Kalurahan.
  7. Hibah Rumah Ibadah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan kondisi harga barang dan jasa serta kebutuhan rumah ibadah, misal dibuat skema 25 juta, 50 juta, dan 100 juta.
  8. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam fasilitasi pengajian dengan menambah jumlah peserta pengajian, misalnya 500 orang peserta.

4.4.2.1.2 Penunjang Urusan Pemerintahan

- Permasalahan
  1. Penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik dan pengendalian penduduk belum optimal
- Rekomendasi
  1. Meningkatkan layanan pembuatan E-KTP.

2. Penyediaan database E-KTP untuk semua urusan layanan pemerintah dan kebijakan publik berbasis TIK.
3. Pengendalian keamanan dan ketertiban melalui pendataan E-KTP berbasis TIK.

4.4.2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Permasalahan
  1. Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan, pengelolaan lembaga masyarakat masih kurang optimal, dan angka kemiskinan DIY masih tinggi.
- Rekomendasi
  1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat di tingkat kalurahan/kelurahan melalui pelatihan perangkat maupun pengurus organisasi di tingkat kalurahan/kelurahan.
  2. Mendesain Rencana Induk pengembangan kalurahan/kelurahan dan BUMDES yang terintegrasi dengan RPJMD dan RPJP Daerah.
  3. Pengembangan Profil kalurahan/kelurahan berbasis teknologi informasi sebagai basis data pembangunan.
  4. Sinergitas program kegiatan lintas instansi di kalurahan/kelurahan agar memudahkan dalam mengukur, menilai, dan keberlanjutan.

4.4.2.1.4 Komunikasi dan Informatika

- Permasalahan
  1. Berita hoaks, masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai pengguna informasi dan layanan publik, sehingga layanan yang disediakan tidak maksimal, dan belum adanya integrasi informasi dari kabupaten/kota dengan Provinsi dalam Smart Provinsi.
- Rekomendasi
  1. Membangun ekosistem digital tingkat Provinsi (DIY).
  2. Mengintegrasikan layanan digital dengan kabupaten/kota.
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya dan SDM Jogja Smart Province/JSP melalui pendidikan dan pelatihan.
  4. Membuat payung hukum terkait layanan terintegrasi dengan kabupaten/kota.

4.4.2.1.5 Penanganan Bencana

- Permasalahan
  1. belum seluruh desa siap menghadapi bencana, SDM dalam kebencanaan belum semua memadai, sinergitas antar lembaga dalam mengedukasi masyarakat tentang bencana belum optimal, dan belum adanya peta rawan berbancana berbasis dusun/kampung.
- Rekomendasi
  1. Melatih masyarakat desa tanggap dan tangguh dalam mitigasi bencana, SOP (tata cara pelaporan, tata kelola dalam kebencanaan, dan tindak lanjut).
  2. Bersama Pemkot/Pemkab memfasilitasi organisasi relawan kebencanaan baik untuk peningkatan SDM maupun operasional organisasi dan membangun pusat data.
  3. Pentingnya pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat maka program tersebut perlu ditingkatkan kuantitas program dan sasarannya baik di tingkat masyarakat maupun sekolah melalui kerjasama dengan Palang Merah Indonesia DIY/Kab/Kota.
  4. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung di dusun/kampung dalam penanggulangan bencana.
  5. Membuat peta rawan bencana berbasis dusun/kampung dalam bentuk offline dan online.
  6. Roadmap dan SOP kebencanaan serta gladi lapang perlu ditingkatkan dalam simulasi beragam bencana.
  7. Mengkonsolidasikan dan mensinergikan organisasi relawan yang dibentuk kabupaten/kota dalam kalurahan/kelurahan tanggap bencana dan kapanewon/kemantren dalam forum koordinasi dan komunikasi.
  8. Membangun jaringan organisasi yang bergerak dalam kebencanaan secara terstruktur dan berjenjang agar memudahkan komunikasi dan informasi.
  9. Membuat EWS (early warning system) atau deteksi dini bila terjadi bencana dan sistem informasi kebencanaan.
  10. Membuat data digital tentang bencana, relawan kebencanaan, sistem pelaporan, dan SOP yang terintegrasi dengan kabupaten/kota agar setiap kejadian bencana bisa tercatat, diketahui kondisinya dan penanganannya.

4.4.2.1.6 Urusan Ketertiban, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Permasalahan
  1. Pelanggaran Perda dan berita hoaks melalui media sosial.
- Rekomendasi
  1. Sosialisasi dan penegakan Perda yang terukur dan berkesinambungan.
  2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
  3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas di tingkat kalurahan/kelurahan melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu mendukung program kegiatan Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Maritim, Desa Mandiri, dll predikat di kalurahan/kelurahan bertugas.

4.4.2.1.7 Urusan Keistimewaan Yogyakarta

- Permasalahan
  1. Belum optimalnya kebijakan yang terintegrasi dalam tata ruang antara Pemda DIY dengan kabupaten/kota, belum adanya penataan daerah sumbu filosofis (Merapi – Tugu – Kraton – Panggung Krapyak – Parangkusumo) baik dari sisi tata ruang, berupa arsitektur maupun budaya.

- Rekomendasi
  1. Membangun komunikasi dengan kabupaten/kota dalam integrasi tata ruang.
  2. Membuat grand design arsitektur dan tata ruang di sumbu filosofi.
  3. Membuat grand design budaya masyarakat di sumbu filosofi.

4.4.2.2 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Perekonomian

4.4.2.2.1 Urusan Pangan

- Permasalahan
  1. Rendahnya perhatian aspek ketahanan pangan.
  2. Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, karena masih bertumpu pada beras dan/terigu.
  3. Masih terdapat wilayah yang waspada, rentan rawan pangan di DIY.

4. Masih rendahnya pengawasan pangan yang beredar di pasaran.
5. Belum terjadi sinergi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan di DIY.
6. Panjangnya rantai distribusi pangan di DIY.
7. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan di DIY khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.

- Rekomendasi
  1. Menjadikan ketahanan pangan bagi masyarakat DIY sebagai prioritas program urusan pangan.
  2. Terwujudnya ketahanan pangan perlu didorong melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan, pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, promosi, dan kampanye yang berkesinambungan dengan target serta sasaran yang jelas dan terukur agar memberikan dampak yang jelas terhadap tercapainya ketahanan pangan di DIY.
  3. Mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di DIY secara seimbang, oleh karenanya Pemerintah Daerah DIY didorong mewujudkan Green Economy.
  4. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun pedesaan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan tentunya dapat mengurangi pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sehingga kesejahteraan rumah tangga akan pangan semakin meningkat. Kegiatan ini harus dilakukan dengan target dan sasaran yang jelas, terukur, serta berkesinambungan agar memberikan dampak yang jelas sehingga pencapaian persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk pangan dapat sesuai target yang diharapkan.
  5. Meningkatkan penganekaragaman cadangan pangan yang tidak hanya pada gabah kering giling maupun beras.
  6. Mengoptimalkan regulasi dalam tata kelola distribusi pangan di DIY untuk menjaga kestabilan pangan di DIY.
  7. Memprioritaskan wilayah waspada dan rentan rawan pangan sebagai prioritas program pengentasan wilayah kerentanan pangan khususnya yang ada di wilayah Kota Yogyakarta mengingat Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang sangat aksesibel.
  8. Mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder baik di tingkat DIY, kabupaten/kota, kemantren/kapanewon, maupun kelurahan/kalurahan dalam membangun ketahanan pangan di DIY.

9. Optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
10. Pengembangan UMKM berbasis pangan di Kota Yogyakarta perlu untuk dilakukan terobosan-terobosan dalam memperoleh sertifikasi halal dan legalitas IRT (Industri Rumah Tangga). Hal ini sering mengalami kendala oleh karena kualitas air yang tercemar bakteri ecoli.
11. Perlunya pengembangan industri pengolahan pangan melalui program bimbingan teknis tata cara pengolahan makanan beku.

4.4.2.2.2 Urusan Kelautan dan Perikanan

- Permasalahan
  1. Rendahnya budaya bahari di masyarakat DIY karena sejatinya masyarakat DIY adalah petani bukan nelayan.
  2. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai sekarang karena adanya kesalahan desain pembangunan.
  3. Adanya gap produksi perikanan budidaya dan perikanan ikan tangkap di DIY.
  4. Keterbatasan SDM kelautan dan perikanan.
  5. Tingginya biaya operasional kegiatan kelautan.
  6. Belum adanya pemanfaatan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan.
- Rekomendasi
  1. Meningkatkan budaya bahari masyarakat di DIY yang ada untuk mengoptimalkan potensi alam yang ada dengan peningkatan kapasitas SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tangkapan ikan, insentif bagi nelayan.
  2. Mengoptimalkan program-program kelautan dan perikanan yang berkesinambungan, tepat sasaran, dan terukur sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan PDRB sektor perikanan di DIY.
  3. Optimalisasi untuk memberikan fasilitasi secara optimal bagi pembudidaya ikan untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau, pelatihan, pemasaran dan akses pasar serta bibit ikan yang berkualitas baik, diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY.
  4. Melakukan redesign Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto agar bisa segera dimanfaatkan sehingga tidak menjadi proyek mangkrak,

mengingat banyak permasalahan terkait dengan konstruksi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adi Karto. Perlunya dibuat tata kala (tenggat waktu) terkait keberlangsungan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga jelas target yang akan dicapai dengan proses pembangunan Pelabuhan Adi Karto tersebut.

5. Optimalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Gesing perlu segera diwujudkan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan di DIY.
6. Melakukan optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk urusan perikanan dan kelautan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di DIY.

4.4.2.2.3 Urusan Pertanian

- Permasalahan
  1. Masih rendahnya SDM pertanian.
  2. Banyaknya permasalahan pengembangan ternak dari hulu ke hilir.
  3. Rendahnya minat generasi muda (generasi milineal) untuk terjun pada kegiatan pertanian.
  4. Tata kelola dan distribusi subsidi pupuk yang mengalami banyak kendala di lapangan, yang sangat merugikan petani baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pupuk.
  5. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk kegiatan pertanian.
- Rekomendasi
  1. Perlunya peningkatan kesejahteraan petani di DIY dengan optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No. 11/2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan program-program yang berkesinambungan, terukur, serta jelas target dan sasarannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada petani di DIY.
  2. Regenerasi petani muda. Perlunya insentif generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Program-program pemberdayaan petani milineal perlu dirancang dengan memperhatian target dan sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan dengan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lain.
  3. Perlunya optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan kabupaten terkait dengan pelaksanaan Perda tentang Perlindungan

Lahan Pertanian berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY.

4. Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seperti yang dimandatkan oleh Perda DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan aturan-aturan turunannya untuk mendukung implementasi di lapangan, serta mendorong kabupaten untuk menetapkan Perda PLP2B.
5. Pemda DIY lebih mendorong pelatihan, fasilitasi petani untuk melakukan inovasi pada nilai tambah produk olahan hasil pertanian.
6. Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi peningkatan pengembangan populasi ternak dari hulu ke hilir untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DIY.
7. Perlunya diatur tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif, efisien, merata baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
8. Pengembangan pupuk organik sebagai alternatif penyediaan pupuk bagi petani yang lebih efektif dan efisien.
9. Optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan pertanian termasuk pengembangan saluran irigasi.

4.4.2.2.4 Urusan Kehutanan

- Permasalahan
  1. Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan karena peningkatan produk kayu primer yang dihasilkan pada Tahun 2020.
  2. Berkurangnya area hutan konservasi.
  3. Minimnya SDM pengelola hutan rakyat.
  4. Belum optimalnya penggunaan dana keistimewaan untuk sektor kehutanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kehutanan.
- Rekomendasi
  1. Naiknya PDRB sektor kehutanan yang menghasilkan produk primer kayu yang dihasilkan tentunya perlu segera dilakukan penanaman pohon kembali (reforestasi).
  2. Membangun dan memperluas area konservasi hutan.

3. Pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelembagaan hutan rakyat, selalu mempunyai perpektif untuk menjaga lingkungan, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan.
4. Rehabilitasi lahan krisis perlu menjadi prioritas penanganan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan produksi hasil hutan non kayu, seperti minyak kayu putih.
6. Pemanfaatan dana keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat kehutanan di DIY.

4.4.2.2.5 Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Permasalahan
  1. Omzet koperasi mengalami penurunan.
  2. Penurunan omzet pada koperasi yang bergerak di sektor riil.
  3. Likuiditas koperasi mengalami penurunan karena sebagian anggota tidak bisa mengangsur dan anggota lain mengambil simpanan.
- Rekomendasi
  1. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil.
  2. Kebijakan bantuan untuk koperasi ditingkatkan.
  3. Sektor UKM diperlukan pendampingan dan fasilitasi jejaring kemitraan.
  4. Para pengelola koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya.
  5. Pertumbuhan wirausaha baru harus ditingkatkan terutama dari kalangan muda, ditandai adanya 100 pengusaha baru disetiap kabupaten/kota.
  6. Mendorong koperasi dan UMKM untuk bisa terlibat dalam program Industri Kreatif.
  7. Mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk mengembangkan pelaku-pelaku UMKM dari kalangan difabel sehingga perlu pengembangan UMKM klaster difabel.

4.4.2.2.6 Urusan Penanaman Modal

- Permasalahan
  1. Penumbuhan investasi di DIY menurun pada Tahun 2020 akibat dampak Covid-19.
  2. Dibanding daerah lain investasi di DIY masih tertinggal.
  3. Keterbatasan sumber alam DIY dalam menarik investor perlu dicarikan format yang tepat.
  4. Minat penanaman modal di DIY yang belum merata antar kabupaten.

4.4.2.2.7 Urusan Pariwisata

- Permasalahan
  1. Jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang menurun pada Tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19.
  2. Perlu obyek wisata yang baru untuk menarik wisatawan.
  3. Perlu memulihkan kunjungan wisatawan mancanegara.
  4. Peningkatan sarana obyek wisata untuk angkutan umum yang terbatas menuju obyek wisata baru.
- Rekomendasi
  1. Perlunya pengembalikan citra wisata ke DIY yang aman dan favorit.
  2. Fasilitasi dan penerapan protokol kesehatan (CHSE) di obyek wisata.
  3. Pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata.
  4. Penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi obyek wisata.
  5. Pengembangan wisata berbasis komunitas Desa Wisata.
  6. Penggunaan Dana Istimewa untuk menunjang pariwisata di DIY melalui Desa Wisata.
  7. Tumbuhnya obyek wisata baru di 50% kalurahan di DIY.

4.4.2.2.8 Urusan Perdagangan

- Permasalahan
  1. Nilai ekspor yang tumbuh di DIY membutuhkan bahan baku produk dari luar DIY.
  2. Tumbuhnya toko jejaring di DIY yang menyebabkan melemahnya pedagang tradisional.

3. Perlu kebijakan monitoring dari Pemda DIY pada kabupaten/kota terkait penguatan pasar tradisional.

- Rekomendasi
  1. Peningkatan ekspor komoditas DIY harus terus ditingkatkan, pendampingan dari Pemerintah Daerah DIY terus dilakukan.
  2. Diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha, dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional
  3. Persaingan usaha sektor perdagangan ini sangat kompetitif perlu perlindungan bagi pedagang kecil.
  4. Pemantauan toko jejaring untuk antisipasi jangan sampai mematikan usaha dan minat berusaha dengan banyaknya toko jejaring di pedesaan.
  5. Fasilitasi peningkatan keterampilan dalam perdagangan bagi pelaku UKM perlu ditingkatkan.
  6. Monitoring pada kabupaten/kota kebijakan penguatan pasar tradisional.
  7. Tumbuhnya nilai ekspor DIY setiap tahun minimal 10%.
  8. Pengelola pasar tradisional harus melarang praktik rentenir atau bank plecit di pasar tradisional yang menjerat para pedagang kecil.

4.4.2.2.9 Urusan Perindustrian

- Permasalahan
  1. Kebutuhan bahan baku untuk industry IKM di DIY dari luar DIY.
  2. Belum semua kawasaan industri diminati perusahaan untuk membangun industrinya.
  3. Menurunnya permintaan produk industri dari pasar domestik maupun mancanegara akibat pandemi Covid-19 pada produk-produk tertentu.
- Rekomendasi
  1. Produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih baik dari pesaingnya.
  2. Produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya berbasis warisan budaya.
  3. Adanya inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif melalui pendampingan pengusaha di setiap kabupaten/kota.
  4. Permasalahan bahan baku industri IKM karena keterbatasan sumber daya alam DIY diatasi melalui fasilitasi Pemda DIY dengan jaminan ketersediaan bahan baku.
  5. Fasilitasi IKM dalam meningkatkan produktifitasnya.

6. Tumbuhnya IKM baru sebanyak 50 IKM di setiap kabupaten/kota setiap tahunnya.

4.4.2.3 Rekomendasi Bidang Pembangunan

4.4.2.3.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Perlu adanya upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih hingga mencapai 100%.
2. Pembangunan sumur bor dalam di daerah-daerah sulit air yang jauh dari sumber air dan sumur bor skala yang lebih kecil di daerah-daerah tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan pipanisasi.
3. Percepatan operasional pengelolaan SPAM Bendungan Kamijoro oleh PDAM Tirtatama untuk mendorong kemandirian pengelolaan air minum.
4. Pembangunan sistem irigasi melalui pendekatan kebudayaan guna mengintegrasikan dengan konsepsi keistimewaan DIY yang memiliki sejarah sebagai wilayah agraris dengan penopang sektor pertanian berbasis tradisi.
5. Perlu upaya peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
6. Perlu menjadi perhatian masalah konektivitas antar daerah-daerah yang memiliki potensi perekonomian yang prospektif namun terkendala masalah jalan seperti daerah sentra pertanian, daerah tujuan wisata, dan juga wilayah perbatasan.
7. Pemerintah DIY perlu membuat sistem pemeliharaan jalan terpadu yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (fast respon) dan didukung oleh teknologi informasi dan media sosial sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan dan status tindaklanjutnya secara transparan.
8. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana jalan seperti penerangan jalan umum, rambu-rambu, dan marka jalan yang tidak hanya berada di jalan provinsi, tetapi sampai dengan jalan desa yang masih terbatas sarana dan prasarana jalannya.

4.4.2.3.2 Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

1. Program bantuan bagi masyarakat yang masih memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada pada Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota disinergikan pelaksanaannya dan menggunakan basis

data yang sama sehingga target penuntasan jumlah penduduk yang memiliki tempat tinggal layak dapat mencapai angka 100% dan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan program tersebut.

2. Penataan kawasan pemukiman baru sebagai konsekuensi dari perkembangan masyarakat akibat pembangunan perlu disinergikan dengan visi misi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara.
3. Penegakan aturan tentang pembangunan perumahan dan gedung yang memiliki ciri khas keistimewaan Yogyakarta perlu ditingkatkan sehingga arsitektur bangunan yang ada dapat mencerminkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan.

4.4.2.3.3 Urusan Perhubungan

1. Perlu dipertimbangkan potensi pembukaan jalan alternatif untuk mengakses objek wisata serta pembangunan transportasi massal menuju objek-objek wisata.
2. Restrukturisasi angkutan massal termasuk angkutan antar wilayah di DIY serta angkutan pedesaan guna mempermudah mobilitas masyarakat juga mempermudah akses masyarakat untuk jalur distribusi barang yang menjadi usaha dari masyarakat.
3. Perlu dibangun konektifitas antarmoda dan intermoda angkutan umum yang dapat menghubungkan antara stasiun, terminal, bandara, kawasan pelayanan publik, pemerintahan, pariwisata, pendidikan, kawasan kuliner, dan kawasan lain yang menjadi pusat mobilitas masyarakat.
4. Pemerintah DIY harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan memberikan inovasi pelayanan transportasi umum yang baik, layak, dan nyaman yang dapat mempermudah akses mobilitas masyarakat serta sosialisasi pentingnya transportasi massal.

4.4.2.3.4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Perlunya inovasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan kebutuhan listrik di DIY.
2. Pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum di daerah-daerah pedesaan, daerah semi terisolir, serta perbatasan dan perlu

dipertimbangkan menggunakan PJU Tenaga Surya yang merupakan salah satu inovasi energi baru terbarukan.

3. Pemerintah DIY harus terus melakukan evaluasi kondisi pertambangan di DIY berikut dengan langkah reklamasi paska tambang dan pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup secara berkala.
4. Pemerintah DIY perlu melakukan pencegahan sejak dini dengan memperketat perizinan usaha tambang termasuk pada aspek AMDAL dan Program Reklamasi Paska Tambang.
5. Dalam penegakan hukum pertambangan termasuk dalam penertiban tambang liar oleh masyarakat perlu dipertimbangkan untuk melakukan upaya persuasif dan potensi pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang, agar wilayah pertambangan tersebut selain bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur, juga bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah tambang.
6. Pemerintah DIY perlu mengupayakan pelaksanaan Reklamasi Paska Tambang yang menjadi kewajiban dari pemilik IUP berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

4.4.2.3.5 Urusan Lingkungan Hidup

1. Pemerintah DIY harus meningkatkan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau secara massif untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan hidup.
2. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari sektor hulu ke hilir dengan memperkuat pengelolaan sampah secara partisipatif dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) sejak dari rumah tangga berbasis kelurahan/kalurahan.
3. Memperbanyak pembangunan TPS 3R skala kecil untuk memotong distribusi sampah ke TPA Piyungan.
4. Penguatan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah seperti bank sampah dan kelompok pengelola sampah lainnya.
5. Pemerintah DIY harus memastikan bahwa Tahun 2024 pengelolaan TPA Piyungan tidak lagi mengalami kendala dan sudah dimulainya pengelolaansampah dengan menggunakan teknologi yang mengubah sampah menjadi energi dan produk yang bermanfaat lainnya.

4.4.2.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Perlu ditingkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat DIY.
2. Perlu ditingkatkan sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan sehingga menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Di era digital ini, perlu digunakan model-model sosialisasi yang adaptif dengan teknologi informasi dan media sosial.
3. Evaluasi pemanfaatan SIPD agar benar-benar berfungsi menjadi alat untuk mempermudah perencanaan pembangunan di daerah.

4.4.2.4 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

4.4.2.4.1 Urusan Pendidikan

- Permasalahan
  1. Peningkatan kualitas pendidikan;
  2. Tenaga kependidikan;
  3. Sarana dan prasarana pendidikan;
  4. Sekolah ramah anak;
  5. Pendidikan berbasis budaya;
  6. Pemantapan budaya adilihung;
  7. Antisipasi nilai-nilai budaya asing;
  8. Banyak ijazah siswa yang masih ditahan sekolah terutama karena belum melunasi pembayaran sekolah terutama di sekolah SMK/SMA.
- Rekomendasi
  1. Kebijakan pembebasan pengunaan dana BOS, bagi siswa di SMA dan SMK.
  2. Sinergitas antara guru, orang tua, anak dan lembaga pendidikan.
  3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
  4. Meningkatkan jumlah beasiswa bagi warga DIY kurang mampu di sekolah dan yang kuliah di perguruan tinggi.
  5. Meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya (GTT/PTT) untuk mendukung capaian kualitas peserta didik.

6. Perbaikan manajemen penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang berkeadilan.
7. Fasilitasi dana pendidikan meliputi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya.
8. Meningkatkan cakupan akses pendidikan peserta didik dengan sasaran wajib belajar 12 tahun.
9. Meningkatkan bantuan untuk pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dengan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya.
10. Meningkatkan kualitas lulusan sekolah terutama sekolah kejuruan untuk peningkatan akses lapangan kerja.
11. Perlu diberikan kebijakan dan solusi agar permasalahan penahanan ijazah ini selesai dan pihak sekolah tidak merasa dirugikan.
12. Pemerintah DIY harus lebih meningkatkan Program Pendidikan Inklusi dimana perlu langkah penegakkan kebijakan bahwa sekolah umum harus menjadi sekolah inklusi sebagai wujud keberpihakan pada kaum disabilitas.

4.4.2.4.2 Urusan Kesehatan

- Permasalahan
  1. Balita *stunting*.
  2. Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan.
- Rekomendasi
  1. Mengusulkan indikator terbaru disesuaikan dengan pusat, baik indikator pembangunan, sarana dan prasarana, dan tenaga medis.
  2. Perlu diperhatikan tumbuh kembang, pendidikan anak di masa pandemik dan imunisasi anak serta pemberian tambahan makanan.
  3. Perlu diperhatikan tumbuh kembang anak dan pendidikan anak mandiri di masa pandemik dan imunisasi anak, pemberian makanan tambahan meningkatkan layanan dasar kesehatan, berupa sarana rumah sakit dengan standar dan pemerataan tenaga medis (dokter spesialis) untuk wilayah selatan DIY dan wilayah tertinggal untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk.
  4. Meningkatkan pola hidup sehat dan sadar kebutuhan gizi (kalori) untuk menunjang standar pola hidup sehat dan kecukupan kalori yang erat kaitannya dengan standar hidup sehat menurut WHO.

4.4.2.4.3 Urusan Sosial

- Permasalahan
  1. Penurunan Pendapatan Warga Miskin selama Pandemi
- Rekomendasi
  1. Mengkondisikan DIY bebas gepeng dan anjal.
  2. Meminimalisasi peredaran dan bebas narkoba (keluarga, masyarakat, dan sekolah).
  3. Melakukan pendataan terhadap warga terdampak pandemi Covid-19 yang selama ini tidak termasuk kategori miskin sehingga belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
  4. Melakukan verifikasi data penduduk miskin untuk validitas data sehingga tidak terjadi salah sasaran ketika dilakukan pemberian bantuan sosial.
  5. Peningkatan layanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama bagi warga miskin, gepeng, dan PMKS lainnya serta melakukan pengawasan PMKS terutama gepeng.
  6. Perbaikan data jumlah penduduk miskin untuk menghilangkan adanya data penduduk miskin yang tidak tepat sasaran (inklusi/ekslusi).
  7. Meningkatkan layanan pada program peningkatan PKH untuk hasil yang baik, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

4.4.2.4.4 Urusan Tenaga Kerja

- Permasalahan
  1. DIY memiliki tingkat pengangguran berpendidikan tinggi tertinggi kedua secara nasional dengan angka 24,55%.
  2. Permasalahan ketenagakerjaan terkait kontrak pekerja dan telatnya perusahaan membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Rekomendasi
  1. Peningkatan Tingkat Kesempatan Kerja di DIY harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga angka pengganguran terbuka di DIY bisa ditekan seminimal mungkin.
  2. Perlu diprogramkan pembangunan padat karya untuk menyerap tenaga kerja akibat putus kerja akibat wabah Covid-19, padat karya bisa menjadi pilihan antara senyampang dengan upaya yang lebih terukur.

3. Peningkatan program fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan untuk meningkatkan skill dan kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja DIY sesuai dengan kebutuhan pasar.
4. Pembinaan bagi pekerja kontrak di perusahaan harus dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja sebagai upaya kepastian pemberian jaminan sosial.
5. Pada urusan ketenagakerjaan, perlu dipertimbangkan untuk lebih meningkatkan program pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda untuk menjadi wirausaha baru bidang ekonomi kreatif melalui pelatihan-pelatihan desain grafis.
6. Fasilitasi Padat Karya Ekonomi sebagai sarana penunjang peningkatan ekonomi masyarakat (a.l. sarpras destinasi wisata, pembuatan kandang, saluran irigasi tersier). Fasilitasi dapat menggunakan skema padat karya infrastruktur dengan dua alternatif, 50 juta, dan 100 juta.

4.4.2.4.5 Urusan Transmigrasi

- Permasalahan
  1. Program transmigrasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi yang diberikan pemerintah dan memberangkatkan transmigran melalui Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP).
  2. Sebenarnya masih banyak yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi dalam rangka merubah nasib dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.
  3. Namun karena jumlah alokasi dari pemerintah terbatas tergantung kemampuan pemerintah dalam menyiapkan lahan lokasi transmigran akan ditempatkan.
  4. Selain menyediakan lahan, perlu dikembangkan produk/komoditas unggulan beserta pasarnya untuk menjamin keberlangsungan usaha para transmigran.
- Rekomendasi
  1. Mendesak melakukan penataan ulang dan re-konseptualisasi, tentang pengelolaan dan pelaksanaan transmigrasi;
  2. Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta transmigrasi secara terpadu, agar percepatan akulturasi budaya antara pendatang dan penduduk setempat dapat terbentuk secara harmonis;

3. Perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan program transmigrasi, baik dari daerah asal maupun sampai di daerah tujuan;
4. Perlu melakukan public hearing dan lobbying yang terpetakan secara baik, dengan masyarakat daerah tujuan, agar konsep KSAD dapat terlaksana, dalam rangka untuk kelancaran, dan kesuksesan program transmigrasi;
5. Perlu terus menerus sosialisasi dan motivasi masyarakat, untuk melakukan perluasan lapangan kerja melalui program transmigrasi yang di inisiasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan umum transmigrasi.
6. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk memdapatkan alokasi/kuota calon transmigran yang lebih banyak.
7. Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta transmigrasi secara terpadu.
8. Pengembangan "transmigrasi lokal" untuk warga masyarakat DIY dikaitkan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan juga program pemerataan persebaran penduduk. Lahan untuk penempatan dapat memanfaatkan Sultan Ground maupun Pakualaman Ground.
9. Pelatihan untuk calon transmigran dilakukan dengan pembekalan yang memadai sesuai dengan kebutuhan keterampilan hidup serta kondisi lahan tujuan transmigrasi.
10. Pemenuhan sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi maupun kebutuhan hidup transmigran secara baik, guna menjamin proses penyesuaian awal dan pengembangan kehdiupan baru tidak terhambat.
11. Pemantauan/monitoring secara periodik terhadap kehidupan warga transmigran untuk menghindarkan kegagalan transmigrasi. Beberapa kasus kegagalan transmigran seyogyanya telah diantisipasi lebih awal dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi program.

4.4.2.4.6 Urusan Kebudayaan

- Permasalahan
  1. Belum optimalnya upaya pelestarian yang meliputi penggalian, reaktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya (budaya, adat, dan tradisi) yang menjadi spirit Renaisans Yogyakarta;

2. Peninggalan warisan budaya benda semakin terancam kelestariannya karena dinamika perkotaan;
3. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non-fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
4. Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset, untuk menarik kunjungan wisata belum optimal; dan
5. Kelembagaan pengelolaan kawasan budaya dan organisasi penggerak dan penggiatseni budaya, juga belum dinamika yang lebih dan optimal.

- Rekomendasi
  1. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, khususnya di bidang Kebudayaan, perlu pengawalan khusus, mengingat arti penting nilai-nilai budaya, sebagai ruh dan basis Undang-Undang Keistimewaan dan sekaligus icon Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional.
  2. Peningkatan fasilitasi, dalam rangka perekayasaan budaya asli dalam menghadapi terpaan budaya luar yang masif-global ke dalam budaya Adihulung Yogyakarta.
  3. Pemanfaatan dan optimalisasi fasilitas Taman Budaya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota DIY.
  4. Peningkatan fasilitasi pemeliharaan dan riset budaya, dalam konteks pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai artefak budaya Adiluhung harus terus didukung dan galakan.
  5. Perumusan, pemantapan, dan sosialisasi Simbol-simbol Budaya, sebagai Inti Budaya dan Identitas Keistimewaan DIY, menjadi keniscayaan untuk segeradiwujudkan.
  6. Perlu sosialisasi definisi kebudayaan yang sangat luas pada masyarakat
  7. Implementasi nilai-nilai budaya Yogyakarta perlu di giatkan baik melalui jalur Pendidikan dalam bentuk sekolah berbasis nilai budaya maupun melalui sarana kebudayaan lainnya.
  8. Fasilitasi event seni dan budaya.

4.4.2.4.7 Urusan Keistimewaan

- Permasalahan
  1. Belum banyak informasi yang diterima masyarakat tentang peruntukan Dana Keistimewaan.

- Rekomendasi
  1. Percepatan pembentukan regulasi untuk mempercepat program-program Keistimewaan Yogyakarta.
  2. Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan D.I. Yogyakarta.
  3. Pengelolaan lingkungan berbasis budaya.
  4. Fasilitasi desa menuju Desa Budaya.
  5. Menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya yang berkembang di DIY.
  6. Fasilitasi sosialisasi tentang keistimewaan di seluruh desa.
  7. Pembuatan basis data kebudayaan dan keistimewaan berbasiskan teknologi.

4.4.2.4.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan

- Permasalahan
  1. Perempuan 30% lebih rendah kemungkinannya untuk bekerja dibandingkan laki-laki.
  2. Lebih banyak pekerja perempuan yang tidak dibayar dibandingkan dengan pekerja laki-laki.
  3. Pembangunan gender antar kabupaten/kota menunjukkan capaian yang belum ideal untuk Kabupaten Gunungkidul dibanding kabupaten/kota di DIY.
- Rekomendasi
  1. Pengembangan kapasitas perempuan guna meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) khususnya bagi perempuan. Target dalam SDG's Angka 5 menyebutkan bahwa kesetaraan gender menjadi salah satu agenda penting yang harus dicapai.
  2. Perlunya mendorong penguatan kapasitas perempuan untuk memasuki dunia kerja pada sektor-sektor formal.
  3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbasis pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
  4. Skalanya pemberdayaan perlu untuk terus diperluas bukan hanya pada individu dan kelompok-kelompok kecil, tetapi juga menyasar pada kelompok usaha yang lebih besar.
  5. Mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk lebih memperhatikan sektor ekonomi informal khususnya dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Sehingga menghadirkan kesetaraan pendapatan dengan pekerja laki-laki.

4.4.2.4.9 Urusan Perlindungan Anak

- Permasalahan
  1. Dispensasi pernikahan di DIY masih menunjukkan peningkatan dari 2018 sampai dengan 2020.
- Rekomendasi
  1. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) antara lain dengan menjangkau masa pendidikan bagi anak-anak. Instrumen beasiswa menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi yang tidak mampu. Lama sekolah akan menjadi salah satu pendorong pengurangan angka pernikahan dini.
  2. Skema pendidikan khusus yang mengakomodir kebutuhan perempuan yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan dini.
  3. Optimalisasi program sekolah ramah anak, kampung ramah anak, sopo aruh anak, sebagai bagian internalisasi nilai kebersamaan, kekeluargaan, saling menghargai, dan saling menghormati antara siswa dan remaja.
  4. Penerapan berbagai produk hukum yang membantu penyelesaian persoalan hukum bagi anak-anak.
     a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.
     b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
     c. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
  5. Mendorong penyelesaian masalah hukum secara diversi, atas kebijakan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya perlindungan anak.
  6. Penguatan ketahanan keluarga sebagai langkah pencegahan terhadap konflik anak maupun tindak pidana oleh anak-anak. Penguatan pola asuh anak dengan memperpanjang masa pemberian ASI.

4.4.2.4.10 Urusan Pengendalian Penduduk

- Permasalahan
  1. Distribusi penduduk DIY belum tersebar secara merata di seluruh kabupaten/kota, namun relatif terkonsentrasi di Sleman yang mencapai 30,69 persen atau sebanyak 1,1 juta orang. Selanjutnya Bantul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk kedua terbesar di DIY mencapai 26,87 persen atau 986 ribu orang, disusul Gunungkidul mencapai 20,37 persen atau sebanyak 747 ribu orang. Kulonprogo dan

Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan persentase penduduk yang paling sedikit di DIY. Penduduk DIY yang berada di Kulon Progo tercatat 11,90 persen atau 436 ribu orang dan Kota Yogyakarta sebanyak 10,18 persen atau 373 ribu orangdari total penduduk DIY.

2. Kepadatan penduduk kota perlu dikendalikan untuk menciptakan lingkungan hunian dan tumbuh kembang anak yang sehat.
3. Menurut hasil SP 2020, rasio jenis kelamin mencapai 98,27 dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,85 juta orang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1,82 juta. Dari 3,67 juta penduduk DIY, sebanyak 89,64 persen atau sekitar 3,29 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP dan 10,36 persen atau sekitar 379,93 ribu penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP.

- Rekomendasi
  1. Distribusi penduduk yang tersebar secara merata di seluruh DIY. Transmigrasi lokal bisa menjadi pilihan kebijakan. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk harus didudukkan sebagai landasan hukum dalam perencanaan kebijakan pengendalian penduduk.
  2. Seiring dengan peningkatan angka TFR (total fertility rate) di DIY maka diperlukan pengendalian kelahiran dengan pendekatan insentif dan disinsentif. Bagi yang setuju dengan jumlah tertentu (pembatasan) maka diberikan insentif, sementara bagi yang tidak mengikuti kesepakatan diberlakukan disinsentif (pembatasan jaminan sosial dari Pemerintah Daerah). Pengendalian penduduk bersifat lebih lokalistik antar satu kabupaten dengan kabupaten yang lain.
  3. Pengendalian dan pengaturan tingkat kepadatan hunian untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara fisik maupun non-fisik.
  4. Penegakan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Perda Daerah Istimewa YogyakartaNomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.

4.4.2.4.11 Urusan Pemuda dan Olah Raga

#Urusan Kepemudaan

- Permasalahan

Adanya pandemi Covid-19 banyak membatasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan sehingga pembinaan pemuda lebih banyak pada pendampingan para alumni pelatihan peserta sebelumnya.

- Rekomendasi

Pemda DIY untuk mengoptimalkan pembangunan kepemudaan pada umumnya dan pengembangan kewirausahaan pemuda

#Urusan Olahraga

- Permasalahan
  1. Adanya pandemi Covid-19 membatasi penyelenggaraan banyak kejuaraan olahraga
- Rekomendasi
  1. KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlit dan pemain dengan menaikan bonus bagi atlet yang berprestasi.
  2. KONI Fasilitasi pendampingan seluruh Cabor di DIY dalam persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON 2023) dengan kembali menggiatkan antara lain Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) , Pra PON, dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA).
  3. Pelatihan dan Workshop Kewirausahaan Pemuda.
  4. Petukaran pemuda antar negara.
  5. Pengembangan olahraga rekreasi masyarakat sebagai basis upaya "mengolahragakan masyarakat". Guna Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Kebugaran Masyarakat. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk bersinergi dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) DIY di dalam program pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat.
  6. Perlunya pengembangan penyelenggaraan Sport Tourism dan olahraga tantangan guna memantik kunjungan wisata minat khusus.
  7. Pengaruh media elektronik (gadget) memunculkan kekhawatiran anak-anak terbiasa dengan gadget. Sinergi Bidang Kebudayaan, Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga, bisa kembali melestarikan Olahraga Tradisional Dolanan Anak (gobag sodor, egrang, mainan tradisional, dan lain-lain) yang terkikis oleh gadget. Bentuk kegiatan bisa bersifat edukasi film melalui sanggar-sanggar dan perkumpulan.

8. Perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Olahraga Daerah yang menaungi tiga dimensi keolahragaan, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
9. Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) sebagai tindak lanjut dari rintisan Kelas Khusus Olahraga (KKO).
10. Dengan adanya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menjadi pedoman untuk mengembangkan olahraga di DIY. Selanjutnya bagaimana memetakan cabang-cabang olahraga prestasi berjenjang yang akan dipertandingkan di PON, Sea Games, Asian Games, dan puncaknya di Olimpiade.

4.4.2.5 Rekomendasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.4.2.5.1 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Perlu dilakukan evaluasi perencanaan yang baik dari aspek sasaran, program, serta kegiatan yang lebih baik.
2. Perlu dilakukan koordinasi dalam antar OPD dalam mengatasi; angka kemiskinan, indeks gini/ratio, ipm, dan gap pembagunan antar wilayah.
3. Meningkatkan perencanaan yang lebih cermat, manajemen pelaksanan kegiatan dan peningkatan pengawasan internal yang lebih baik, untuk meningkatkan opini BPK RI yang sudah 12 kali WTP.

4.4.2.5.2 Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang Tepat Terkait Sumber Pembiayaan, meliputi:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
f. Penerimaan Piutang Daerah.

4.4.2.5.3 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

PT Bank BPD DIY

1. Pemenuhan modal Pemda DIY yang harus dipenuhi sampai Tahun 2025 sebesar Rp958.832.000.000,00 harus diberikan kajian kemampuan keuangan daerah dan analisa keuntungan untuk Pemda DIY berdasarkan kajian dalam situasi pandemi Covid-19 dan pemulihannya.
2. Kinerja PT Bank BPD DIY dalam periode 2022-2027 mohon disampaikan target kinerja untuk DPRD DIY.
3. Tugas Bank BPD DIY dalam ikut mengatasi problem DIY: angka kemiskinan, rasio gini, dan ketimpangan wilayah perlu diterjemahkan dalam program dan target yang jelas.
4. BPD harus ikut mengatasi masih banyaknya rentenir di pasar-pasar tradisional yang beroperasi pagi hari jam 05.00-07.30 WIB.

PT AMI

1. Laporan dari unit usaha yang menghasilkan laba harus dijelaskan sehingga bisa dilihat unit penghasil laba yang efisien.
2. Kekurangan penyertaan modal Pemda DIY perlu disampaikan analisa keuntungan dan analisa dampak pandemi Covid-19 pada kemampuan keuangan DIY.
3. Kinerja PT AMI dalam menghasilkan laba harus ditingkatkan.
4. Perbaikan manajemen perusahaan.
5. Biaya belanja subsidi Pemda yang diterima PT AMI perlu dijelaskan laporan PT AMI dalam laporan LKPJ AMJ dan setiap tahun laporan LKPJ
6. Perlu melakukan inovasi dengan melakukan pendataan pelanggan PT Trans Jogja melalui aplikasi *online* untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada pelanggan seperti *KAI Access*

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

1. Status badan hukum diperjelas.
2. Peningkatan laba BUKP harus ditingkatkan pada Tahun 2024.
3. Peran strategis BUKP dalam membantu mengatasi masalah rentenir di pasar
   tradisional.
4. Beroperasi pagi hari mulai jam 05.00-07.30 WIB.

Perumda Air Bersih Tirtatama DIY

1. Mohon ditinjau ulang kajian dalam naskah akademik terkait tujuan perusahaan.

2. Mohon ditinjau ulang rencana laba perusahaan dalam naskah akademik dan rencana bisnis perusahaan dan visi misi direksi.
3. Tahun 2024 ditargetkan mendapatkan laba.

4.4.2.5.4 Kebijakan Pengeloalan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan perencanaan yang lebih efektif dan efisien.
2. Pemanfaatan lokasi tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah agar bisa optimal bisa bekerja sama dengan masyarakat.
3. Peningkatan jumlah sumber daya manusia yang menangani Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA SE-DIY

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas sektor jasa terutama pariwisata dan perdagangan. Kondisi pasca pandemi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong peningkatan dinamika perekonomian dan mendukung pencapaian indikator makro yang lebih baik dibandingkan kondisi saat pandemi. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 5-1 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta, Tahun 2024

Indikator	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26 - 5,76
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,38 - 6,68
Tingkat Kemiskinan (%)	6,13
Indeks Gini	0,389
Indeks Pembangunan Manusia	88,05

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi kisaran 5,26 – 5,76% yang meningkat dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,06 – 5,56%. TPT ditargetkan selalu mengalami penurunan dari 6,65 – 6,95% di tahun 2023 menjadi 6,38 – 6,68% di tahun 2024. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat

kemiskinan juga ditargetkan menurun dari 6,58% di tahun 2023 menjadi 6,31% di tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,393 menjadi 0,38977 Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 87,87 di tahun 2023 menjadi 88,05 di tahun 2024.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang cukup besar dan sebagian daerah tersebut termasuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Di samping itu, kabupaten ini juga termasuk daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Aglomerasi kawasan perkotaan yang terkait dengan pembangunan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman serta prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Tabel 5-2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul, Tahun 2024

Indikator	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,16 - 5,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35 - 3,65
Tingkat Kemiskinan (%)	11,26
Indeks Gini	0,346
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,43

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat dari kisaran 5,05 - 5,50% di tahun 2023 menjadi sebesar 5,16-5,66% di tahun 2024. TPT ditargetkan menurun kisaran 3,65 - 3,95% di tahun 2023 menjadi 3,35-3,65% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun seiring dengan penurunan TPT dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yaitu yaitu dari 12,76% di tahun 2023 menjadi 12,5% di tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan yang turun menjadi 0,346 di tahun 2024. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 81,00 di tahun 2023 menjadi 81,43 di tahun 2024.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang memiliki daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mempercepat capaian pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

Tabel 5-3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024

Indikator	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31 - 5,81
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	2,18 - 2,48
Tingkat Kemiskinan (%)	14,99
Indeks Gini (%)	0,399
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,90

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi 5,31 – 5,81% yang bertambah dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,08 - 5,58%. TPT ditargetkan selalu mengalami penurunan dari 2,50 - 2,80% di tahun 2023 menjadi 2,18 – 2,48% di tahun 2024. Penurunan ini didukung oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun menjadi 16,34% ditahun 2024 dari target 16,72 di tahun 2023. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,403 di tahun 2023 menjadi 0,399 di tahun 2024. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 75,46 di tahun 2023 menjadi 75,90 di tahun 2024.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Percepatan capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul sebagai dampak prioritas pembangunan di kawasan pantai selatan Jawa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di DIY. Adapun target indikator pembangunan

makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

Tabel 5-4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2024

Indikator	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,85 - 5,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,75 - 2,05
Tingkat Kemiskinan (%)	14,46
Indeks Gini	0,315
Indeks Pembangunan Manusia	71,90

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat senantiasa meningkat menjadi kisaran 4,85 – 5,35% di tahun 2024 dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 4,56 – 5,06%. TPT ditargetkan senantiasa mengalami penurunan dengan tingkat penurunan dari 1,8 – 2,10% di tahun 2023 menjadi 1,75 – 2,05% di tahun 2024. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun cukup signifikan dari 14% di tahun 2023 menjadi 13% di tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,321 di tahun 2023 menjadi 0,315 di tahun 2024. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 71,42 di tahun 2023 menjadi 71,90 di tahun 2024.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang signifikan dengan dinamika bisnis cukup besar. Perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan yang mendekati kondisi sebelum pandemi menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian indikator makro yang masih tetap tinggi dibandingkan tiga kabupaten sebelumnya. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

Tabel 5-5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman, Tahun 2024

Indikator	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97 - 5,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,22 - 4,52
Tingkat Kemiskinan (%)	7,21
Indeks Gini	0,413
Indeks Pembangunan Manusia	85,12

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi dari kisaran 4,78 - 5,28% di tahun 2023 menjadi 4,97 – 5,47% di tahun 2024. TPT ditargetkan mengalami penurunan dari 4,47 – 4,77% di tahun 2023 menjadi 4,22 – 4,52% di tahun 2024. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun yaitu dari 6,99% di tahun 2023 menjadi 6,45% ditahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,420 di tahun 2023 menjadi 0,413 di tahun 2024. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 84,87 di tahun 2023 menjadi 85,12 di tahun 2024.

5.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Berikut kebijakan pembangunan keistimewaan berdasarkan urusan keistimewaan di DIY.

Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang Tata cara Pengisian Jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DY pada prinsipnya mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis keistimewaan DIY, karena simbol utama keistimewaan DIY berada pada posisi

Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabat oleh Sultan dan Paku Alam yang bertahta.

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme penetapan, adalah sebuah proses yang demokratis, tercermin dari dilibatkannya peran DPRD dalam proses pengusulan, verifikasi, penetapan, dan usulan pengangkatan/ pelantikan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.

Kelembagaan

Secara lebih singkat, kelembagaan pemda pada masa mendatang adalah kelembagaan pemda yang berkarakter:

1. Kelembagaan Pemda DIY yang adaptif sesuai dinamika kemajuan multi aspek dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam mengembangkan kelembagaan yang efektif.
2. Budaya birokrasi yang inovatif yang berorientasi iptek dan berkarakter luhur yang merupakan bagian dari Budaya SATRIYA yang terus tumbuh dan kembang dalam praktik pelayanan publik dan pemajuan keistimewaan Yogyakarta. Pengembangan budaya birokrasi yang berkemajuan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan berbagai upaya meningkatkan profesionalisme, serta melakukan transformasi sarana prasarana layanan publik yang berbasis teknologi informasi yang mendukung perwujudan *smart government*.
3. Peranan pemda tingkat DIY hingga kalurahan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Arah pengaturan urusan kelembagaan :

1. Mendesain bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Mendesain bentuk kelembagaan dan tatakelola kelembagaan dengan tidak melupakan realitas empiris yang ada di DIY.

Kebudayaan

Dengan diletakkannya budaya sebagai ruh atau spirit bagi segala gerak kehidupan di wilayah DIY dalam kerangka besar keistimewaan DIY, maka perlu adanya langkah-langkah untuk menguatkan nilai budaya ke dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat sekaligus meneguhkan posisi DIY sebagai pusat kebudayaan yang dapat tercermin pada kehidupan masyarakat.

Langkah kedepan yang harus dilakukan adalah: (1) "mengembalikan" nilai-nilai yang memang harus dikembalikan karena nilai-nilai tersebut telah menjadi nilai-nilai keistimewaan budaya DIY, (2) "merehabilitasi", nilai-nilai keistimewaan budaya yang sudah menunjukkan tanda keredupan, (3) "menguatkan", nilai-nilai keistimewaan budaya yang mengalami pelemahan oleh nilai-nilai budaya baru dan oleh generasi baru Yogyakarta, dan (4) "mengembangkan", nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.

Berikut ini arah kebijakan strategis urusan kebudayaan DIY berdasarkan isu pokok, dimana kebudayaan menjadi ruh atas isu pokok yang lain:

1. Arah kebijakan Bidang Kebudayaan
    a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pada pelestarian aset sejarah, asal usul, dan destinasi budaya demi peningkatan kualitas hidup-penghidupan warga;

    b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan tata kelola infrastruktur publik sebagai arena apresiasi pelaku budaya dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya tangible dan intangible

    c. Mewujudkan wilayah konservasi budaya dan lumbung budaya yang dapat menginspirasi pengembangan kebudayaan di tingkat nasional maupun global;

2. Arah kebijakan Bidang Pariwisata
    a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dengan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya lapangan-lapangan kerja disektor industri kreatif di berbagai kawasan

cagar budaya, saujana (lanskap) budaya, desa/kalurahan sebagai kantong/lumbung budaya

b. Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dunia berbasiskan nilai nilai keistimewaan dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

c. Meniingkatkan kualitas pemanfaatan berbagai destinasi wisata demi redistribusi kesejahteraan warga

3. Arah kebijakan Bidang Pendidikan
   a. Mewujudkan pendidikan karakter manusia sosial yang penuh keutamaan berbasiskan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta;

   b. Memperkuat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dan pengkondisian lingkungan pendidikan berkarakter nilai-nilai keistimewaan yang didasarkan pada konteks hidup dan kultur penghidupan masyarakat di sekitarnya (pertanian, maritim dan perdagangan).

4. Arah kebijakan Bidang Ekonomi, Kewirausahaan, dan Ketahanan Pangan
   a. Memperkuat sistem ekonomi berbasis keberagaman potensi kewilayahan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di bidang industri kreatif dan industri pariwisata berbasis aset/potensi budaya lokal.

   b. Mengembangkan sistem produksi dan lumbung pangan yang berbasis pada pengalokasian Sultan *ground*, Pakualaman *ground*, lahan masyarakat, sumber daya kelautan, serta pendayagunaan potensi wilayah.

5. Arah kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keterlindungan Warga
   a. Memperkuat nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan dalam kemanunggalan cipta, rasa, karsa melalui asah asih asuh di antara *multistakeholder* keistimewaan Yogyakarta

   b. Memperkuat keterlibatan desa/kelurahan sebagai mitra pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi dengan memberdayakan lembaga-lembaga lokal organik dan komunitas seni budaya,

c. Memperkuat potensi lembaga lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerukunan, kesehatan dan perlindungan warga.

Pertanahan

Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam agenda penyelenggaraan program dan kegiatan sektor pertanahan berdasarkan pada 3 (tiga) Sasaran Sektor Pertanahan yang meliputi:

1. Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan;
   Sasaran ini merupakan sasaran berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan pertanahan di DIY dalam perspektif kewenangan pemerintahan dalam urusan pertanahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, atau yang sering disebut dengan penyelenggaraan urusan pertanahan reguler. Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan ini merupakan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan kewenangan Pemda DIY di bidang pertanahan. Sasaran ini merupakan salah satu bagian dari Catur Tertib Pertanahan yang otoritasnya ada di Kementerian/Lembaga Pertanahan. Dalam hal ini Catur Tertib Pertanahan terdiri dari 4 aspek, yakni:

   a. Tertib Hukum Pertanahan, yang diarahkan pada:
      1. Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat;
      2. Melengkapi peraturan perundangan di bidang pertanahan;
         a) Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi;
         b) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan hukum agraria.

   b. Tertib Administrasi Pertanahan, yang diarahkan pada program:
      1. Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan;
      2. Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absentee dan tanah-tanah negara;
      3. Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor Agraria maupun di kantor PPAT;
      4. Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah.

c. Tertib Penggunaan Tanah, diarahkan pada usaha untuk:
   1. Menumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah;
   2. Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah; Menyusun petunjuk-petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah;
   3. Melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah, peta kemampuan dan peta daerah-daerah kritis.

d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup, yang diarahkan pada usaha:
   1. Menyadarkan masyarakat bahwa pemeliharaan tanah merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah;
   2. Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah;
   3. Memberikan fatwa tata guna tanah dalam setiap permohonan hak atas tanah dan perubahan penggunaan tanah.

Tata Ruang

Dalam bidang tata ruang, terdapat 4 (empat) nilai dasar yang sangat perlu diletakkan sebagai "rujukan" sekaligus "panduan" dalam penataan ruang DIY di masa datang yang mencakup perencaaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ke 4 (empat) nilai dasar tersebut adalah: (a) *Hamemayu Hayuning Bawana*, (b) sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak, (c) catur gatra tunggal, dan (d) *Pathok Nagoro*.

Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien harus memuat:

1. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Tahap perencanaan tata ruang menghasilkan dokumen rencana tata ruang. Dalam konteks tata ruang keistimewaan, rencana tata ruang yang dimaksud (meliputi Perdais 2 Tahun 2017 Pasal 44):

   a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan

akhir tahun 2021, telah selesai disusun materi teknis RRTR SRS di 18 SRS);

b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun RTBL di beberapa SRS yang dilakukan oleh kabupaten/kota) ;
c. penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun materi teknis rencana induk di empat SRS);
d. berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimaksud RRTR adalah Rencana Detail Tata Ruang yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang; Strategi yang digunakan pada aspek ini adalah:

    a. Melanjutkan Penyusunan RTR skala rinci pada ruang-ruang keistimewaan yang belum ada RTR-nya;
    b. Mendorong Penerapan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Rencana RTR skala rinci (RDTR/PZ) baik RTR skala rinci yang telah menjadi perda maupun yang masih berbentuk dokumen kajian dengan terobosan hukum (Pergub/Perbup/Perwal);
    c. Memperkuat pengendalian dengan mempertajam rekomendasi dalam pemberian izin pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR, instrumentasi insentif disinsentif dan mekanisme pemberian sanksi pelanggar RTR.

4. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat; Strategi yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan ini adalah:
    a. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen RTR yang

telah ada, baik yang berada di ruang-ruang keistimewaan maupun kawasan lainnya;

b. Mendorong antisipasi dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di ruang-ruang keistimewaan.

5. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; Strategi yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan ini adalah:
   a. Mendorong optimalisasi Peran Pemkab/Pemkot dalam mendukung Kinerja Tata ruang sesuai dengan Perdais 2/2017;
   b. Peningkatan koordinasi antar OPD dan antar level pemerintahan Pemda DIY dengan kab/kota dalam tata ruang khususnya pada ruang-ruang keistimewaan;
   c. Mendorong penyelenggaraan pelatihan penataan ruang keistimewaan.
6. Kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DALAM RKPD TAHUN 2024

Usaha perwujudan tema pembangunan RKPD DIY 2024 yaitu "Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan" dilaksanakan melalui Prioritas Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Prioritas pembangunan di atas memiliki keterkaitan dengan Sasaran Pembangunan Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatifnya Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						**1.355.831.093.541,00**							**1.522.129.253.537,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.319.411.093.541,00**							**1.482.067.253.537,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.319.411.093.541,00**							**1.482.067.253.537,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**996.458.320.941,00**						**86,76Nilai**	**1.079.515.749.401,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100%			100 %	110.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	561.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	993.347.755.181,00			-	-	-	100%	1.074.537.654.737,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6733 Orang/ Bulan	993.267.755.181,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	-	-		1.073.793.108.737,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		188.070.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		556.475.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100%			100 %	8.300.000,00			-	-	-	100%	82.278.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	8.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.278.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	222.800.000,00			-	-	-	100%	875.291.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		121.011.990,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.308.780,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		226.125.350,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.486.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		436.359.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	2.462.565.760,00			-	-	-	100%	2.645.732.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.136.049.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.272.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.326.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.373.582.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	306.900.000,00			-	-	-	100%	813.791.924,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	221.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		422.807.924,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		218.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		172.084.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	322.901.672.600,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	401.947.771.336,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter* *Persentase SMA yang melaksanakan UKS*	88,02% 83,58Angka 74,76% 36.10% 85,03Indeks 500siswa 44medali 61,79% 97,31Indeks				83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 %	113.793.512.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	n/a% 83,43Angka 74,61% 34.10% 84,88Indeks 450siswa 42medali 61,64% 97,16Indeks	139.302.750.579,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		156.620.225,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				22795 Peserta didik	7.899.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		10.178.229.380,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		8.459.534.270,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				302 Orang	2.775.107.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		5.221.295.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				14 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		50.827.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				69 Satuan Pendidikan	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		977.754.690,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				170 Satuan Pendidikan	99.261.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		109.187.716.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				14 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		69.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	1.474.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.988.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		110.543.290,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		731.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				118 Satuan Pendidikan	597.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		2.170.299.824,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	161.899.870.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	192.241.652.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		210.718.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				36231 Peserta didik	13.858.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		20.930.663.160,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				425 Peserta Didik	1.540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		7.192.389.930,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				536 Orang	2.835.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.453.647.780,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				14 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		35.727.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				49 Satuan Pendidikan	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.260.216.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				210 Satuan Pendidikan	143.658.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		158.024.251.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				14 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		86.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		664.502.850,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		12.485.660,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		370.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim kebinekaan SMALB* *Iklim inklusivitas SMALB* *Iklim keamanan SMALB* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase SLB yang melaksanakan UKS*	5000siswa 81,02Angka 85,08Angka 30,10% 16medali 83,35Angka 59,52Angka 59,61Angka				80,57 Angka 84,63 Angka 82,90 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 24.10 %	47.208.289.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	5000siswa 80,87Angka 84,93Angka 28,10% 15medali 83,20Angka 59,37Angka 59,46Angka	70.403.368.637,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3660 Peserta Didik	8.402.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		14.038.431.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				14 Peserta Didik	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		5.265.702.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				516 Orang	3.286.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		3.893.583.870,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				9 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		13.768.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	2.053.108.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		4.125.792.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				79 Satuan Pendidikan	23.041.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		25.345.639.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				14 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		29.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		292.208.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		604.365.740,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	10.418.151.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		15.536.666.747,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Orang	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.258.060.540,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten***	**96.45%**			**96.09 %**	**1.100.000,00**						**96.33%**	**507.512.500,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	*Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus*	1tahun			1 tahun	1.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1tahun	507.512.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		507.512.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	***Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan Jumlah rekomendasi perizinan yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah***	**10 dokumen Jumlah 50 dokumen Jumlah**			**10 dokumen Jumlah n/a Jumlah**	**50.000.000,00**						**n/aJumlah 10 dokumen Jumlah**	**96.220.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY*	10dokumen			10 dokumen	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	10dokumen	96.220.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		96.220.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36.420.000.000,00**							**40.062.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**36.420.000.000,00**							**40.062.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya***	**59%**			**53,83 %**	**36.420.000.000,00**						**58,83%**	**40.062.000.000,00**	
	2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	*Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya*	53.69%			50,17 %	36.420.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-	53,67%	40.062.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0001	Pembinaan Muatan Lokal														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				15 Laporan	31.120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		34.232.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan				4 Unit	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		1.870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta														
			Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta				90 Orang	3.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		3.960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK						**3.897.202.320,00**							**13.106.871.290,75**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.897.202.320,00**							**13.106.871.290,75**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.897.202.320,00**							**13.106.871.290,75**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**3.896.452.320,00**						**86,76Nilai**	**6.575.136.080,75**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	82.800.000,00			-	-	-	100%	342.881.084,75	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		84,75	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.464.200,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.122.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.283.400,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		238.011.400,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	1.488.222.320,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	1.584.470.800,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	301.958.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		348.656.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.186.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.235.814.800,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	73.500.000,00			-	-	-	100%	2.170.662.120,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.548.150,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.749.343.970,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		264.770.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				2.251.930.000,00			-	-	-	-	2.477.122.076,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.251.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		2.477.122.076,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	750.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	6.531.735.210,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36.10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	450.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34.10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	6.407.433.230,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		321.053.370,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				10 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		5.786.642.510,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		299.737.350,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase SLB yang melaksanakan UKS* *Iklim inklusivitas SMALB* *Iklim keamanan SMALB* *Iklim kebinekaan SMALB* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional*	5000siswa 81,02Angka 85,08Angka 30.10% 16medali 83,35Angka 59,52Angka 59,61Angka				24.10 % 84,63 Angka 82,90 Angka 80,57 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka	300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	5000siswa 80,87Angka 84,93Angka 28.10% 15medali 83,20Angka 59,37Angka 59,46Angka	124.301.980,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		43.094.370,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		81.207.610,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
		BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA						**56.146.005.300,00**							**97.949.859.788,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**56.146.005.300,00**							**97.949.859.788,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**56.146.005.300,00**							**97.949.859.788,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**8.639.550.700,00**						**86,76Nilai**	**10.377.842.438,00**	
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	97.800.000,00			-	-	-	100%	395.081.720,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.202.870,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		161.172.550,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.761.700,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.920.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.024.600,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	7.480.750.700,00			-	-	-	100%	7.703.423.108,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	700.066.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		786.573.370,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	6.780.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.916.849.738,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	1.061.000.000,00			-	-	-	100%	2.279.337.610,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	51.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		152.856.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.040.830.660,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.650.950,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha***	**9.33%% 3 kelompok Jumlah 3 kelompok Jumlah 9.33%%**			**n/a Jumlah 8.89% %**	**4.705.854.600,00**						**9.23%% n/aJumlah n/aJumlah 9.23%%**	**20.471.983.360,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	*jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan*	30kelompok			20 kelompok	4.705.704.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	25kelompok	20.416.983.360,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				2520 Orang	299.754.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		2.832.787.760,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		205.100.500,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				550 Persentase	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		654.747.390,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				9 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.094.436.310,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				1712 Orang	4.105.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		15.629.911.400,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	*Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi*	1lembaga			1 lembaga	150.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1lembaga	55.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				1 Organisasi	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		55.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	*Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS*	**1623Atlet**			**-**	**41.300.600.000,00**						**264Atlet**	**65.450.033.990,00**	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	*Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional*	2Event			-	1.800.150.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	2Event	8.441.890.600,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				10 Orang	689.746.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		5.527.398.910,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		239.686.590,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				1 Kegiatan	1.110.253.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		2.674.805.100,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	*Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga*	400Atlet			-	300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	370Atlet	3.288.728.520,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		134.303.510,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.154.425.010,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional*	3Lembaga			-	39.500.150.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	3Lembaga	53.719.414.870,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		369.414.870,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				3 Dokumen	39.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		53.350.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan***	**100%Persentase 100%Persentase**			**100% Persentase**	**1.500.000.000,00**						**100%Persentase 100%Persentase**	**1.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan*	1lembaga			1 lembaga	1.500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1lembaga	1.650.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.650.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
		BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN						**7.498.057.700,00**							**16.454.807.081,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.498.057.700,00**							**16.454.807.081,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**7.498.057.700,00**							**16.454.807.081,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**7.024.471.600,00**						**86,76Nilai**	**11.312.796.801,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	82.800.000,00			-	-	-	100%	301.958.360,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.325.100,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.093.060,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.520.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.969.800,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.050.400,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	50%			50 %	3.000.000,00			-	-	-	50%	1.486.269.510,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.486.269.510,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	6.865.271.600,00			-	-	-	100%	9.062.951.951,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6.317.159.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.501.460.990,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	548.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		561.490.961,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	73.400.000,00			-	-	-	100%	461.616.980,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	33.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		74.460.980,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.156.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Putus Sekolah SMA/SMK*** ***Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik*** ***Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman*** ***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**49.49%** **47.01%** **41.50%** **65%** **58.65%** **0,16%** **50Orang** **46.86%** **81,5%** **77.62%** **100%** **86.25%**			**86.10 %** **99,5 %** **77.47 %** **0,20 %** **35 Orang** **50 %** **58.60 %** **49.44 %** **41.46 %** **46.97 %** **46.82 %** **80 %**	**473.586.100,00**						**49.47%** **47.00%** **41.49%** **60%** **58.63%** **0,17%** **45Orang** **46.85%** **81%** **77.57%** **100%** **86.20%**	**5.142.010.280,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter* *Persentase SMA yang melaksanakan UKS*	88,02% 83,58Angka 74,76% 36.10% 85,03Indeks 500siswa 44medali 61,79% 97,31Indeks				83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 %	264.343.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	n/a% 83,43Angka 74,61% 34.10% 84,88Indeks 450siswa 42medali 61,64% 97,16Indeks	4.355.536.680,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		689.370.110,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	264.193.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.666.166.570,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi	55,31Angka 36.10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			-	209.092.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34.10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	465.113.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	209.092.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		465.113.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim inklusivitas SMALB* *Iklim keamanan SMALB* *Iklim kebinekaan SMALB* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase SLB yang melaksanakan UKS*	5000siswa 81,02Angka 85,08Angka 30,10% 16medali 83,35Angka 59,52Angka 59,61Angka				84,63 Angka 82,90 Angka 80,57 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 24,10 %	150.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	5000siswa 80,87Angka 84,93Angka 28,10% 15medali 83,20Angka 59,37Angka 59,46Angka	321.360.600,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		321.360.600,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA						**22.523.484.300,00**							**46.864.453.306,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.523.484.300,00**							**46.864.453.306,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**22.523.484.300,00**							**46.864.453.306,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**903.731.300,00**						**86,76Nilai**	**1.135.367.046,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	72.800.000,00			-	-	-	100%	211.961.860,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.461.790,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.172.350,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.279.720,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		121.748.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	782.431.300,00			-	-	-	100%	824.606.266,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	190.099.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		217.254.730,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	592.332.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		607.351.536,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	48.500.000,00			-	-	-	100%	98.798.920,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.677.920,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.121.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Putus Sekolah SMA/SMK*** ***Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik*** ***Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman*** ***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%			86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	21.619.753.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	45.729.086.260,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter* *Persentase SMA yang melaksanakan UKS*	88,02% 83,58Angka 74,76% 36.10% 85,03Indeks 500siswa 44medali 61,79% 97,31Indeks				83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 %	11.744.277.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	n/a% 83,43Angka 74,61% 34.10% 84,88Indeks 450siswa 42medali 61,64% 97,16Indeks	24.078.904.740,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.052.309.060,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		56.923.680,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		16.280.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	12.427.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		10.692.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	11.731.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		22.942.700.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	9.875.476.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	21.650.181.520,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		234.589.520,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		32.076.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.234.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	8.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		8.448.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5 Satuan Pendidikan	9.866.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		21.368.600.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.234.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL						**35.287.335.956,00**							**61.300.569.365,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35.287.335.956,00**							**61.300.569.365,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**35.287.335.956,00**							**61.300.569.365,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**1.026.326.956,00**						**86,76Nilai**	**1.103.979.395,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	72.800.000,00			-	-	-	100%	92.707.120,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.044.970,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.878.750,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.283.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.500.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	937.426.956,00			-	-	-	100%	979.013.675,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	98.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	838.522.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		979.013.675,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	16.100.000,00			-	-	-	100%	32.258.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	11.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.888.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.370.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	34.261.009.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	60.196.589.970,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter* *Persentase SMA yang melaksanakan UKS*	88,02% 83,58Angka 74,76% 36.10% 85,03Indeks 500siswa 44medali 61,79% 97,31Indeks				83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 %	16.476.548.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	n/a% 83,43Angka 74,61% 34.10% 84,88Indeks 450siswa 42medali 61,64% 97,16Indeks	32.879.028.050,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		480.737.290,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				19 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		61.234.140,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		4.078.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	10.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		32.775.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		27.962.220,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				19 Satuan Pendidikan	16.465.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		32.272.240.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	17.784.461.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	27.317.561.920,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		357.364.920,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		66.719.180,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		28.381.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	13.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		32.219.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				12 Satuan Pendidikan	17.770.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		26.809.420.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		23.457.720,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO						**14.897.990.000,00**							**35.143.354.925,88**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.897.990.000,00**							**35.143.354.925,88**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**14.897.990.000,00**							**35.143.354.925,88**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**821.892.000,00**						**86,76Nilai**	**1.726.986.998,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	72.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	201.766.620,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.229.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.303.620,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.297.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.336.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		123.600.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	693.492.000,00			-	-	-	100%	584.424.588,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	109.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		129.109.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	583.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		455.315.388,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	55.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	940.795.790,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	20.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		46.035.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		890.635.790,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.125.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Putus Sekolah SMA/SMK*** ***Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik*** ***Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman*** ***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**49.49%** **47.01%** **41.50%** **65%** **58.65%** **0,16%** **50Orang** **46.86%** **81,5%** **77.62%** **100%** **86.25%**			**86.10 %** **99,5 %** **77.47 %** **0,20 %** **35 Orang** **50 %** **58.60 %** **49.44 %** **41.46 %** **46.97 %** **46.82 %** **80 %**	**14.076.098.000,00**						**49.47%** **47.00%** **41.49%** **60%** **58.63%** **0,17%** **45Orang** **46.85%** **81%** **77.57%** **100%** **86.20%**	**33.416.367.927,88**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter* *Persentase SMA yang melaksanakan UKS*	88,02% 83,58Angka 74,76% 36.10% 85,03Indeks 500siswa 44medali 61,79% 97,31Indeks				83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 %	6.532.130.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	n/a% 83,43Angka 74,61% 34.10% 84,88Indeks 450siswa 42medali 61,64% 97,16Indeks	13.625.958.607,88	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		576.044.810,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		484.828.520,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		107,88	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	6.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		68.200.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		64.685.170,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	6.525.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		12.432.200.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka				77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	7.543.968.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	19.790.409.320,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		542.094.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				8 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		619.952.630,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		107.881.620,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	9.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		68.200.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.758.895.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				8 Satuan Pendidikan	7.533.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		16.628.700.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		64.685.170,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL						**20.234.814.000,00**							**42.989.274.790,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.234.814.000,00**							**42.989.274.790,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**20.234.814.000,00**							**42.989.274.790,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**801.402.000,00**						**86,76Nilai**	**1.149.347.650,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	72.800.000,00			-	-	-	100%	234.954.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.509.030,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.292.070,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.757.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.286.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		122.108.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	668.102.000,00			-	-	-	100%	787.997.980,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	99.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		123.211.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	568.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		664.786.980,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	60.500.000,00			-	-	-	100%	126.395.170,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.328.530,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.066.640,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	19.433.412.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	41.839.927.140,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim kebinekaan SMA* *Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter* *Persentase SMA yang melaksanakan UKS*	88,02% 83,58Angka 74,76% 36.10% 85,03Indeks 500siswa 44medali 61,79% 97,31Indeks				96,86 Indeks 83,13 Angka 84,58 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 %	7.761.451.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	n/a% 83,43Angka 74,61% 34.10% 84,88Indeks 450siswa 42medali 61,64% 97,16Indeks	15.998.469.520,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		711.642.030,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		61.334.240,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		15.510.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	7.101.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		34.476.750,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.646.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	7.753.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		15.171.860.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka				77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	11.671.961.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	25.841.457.620,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		621.014.020,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		45.695.650,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		24.893.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	13.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		30.416.650,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				12 Satuan Pendidikan	11.657.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		25.094.740.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		24.698.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN						**22.775.732.800,00**							**56.354.282.785,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.775.732.800,00**							**56.354.282.785,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**22.775.732.800,00**							**56.354.282.785,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**843.734.800,00**						**86,76Nilai**	**1.175.980.925,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	72.800.000,00			-	-	-	100%	310.526.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.878.890,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.250.350,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.777.260,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.877.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		140.742.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran*	100%			100 %	724.334.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	804.815.845,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.300.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	195.928.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		241.921.680,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	528.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		559.594.165,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat*	100%			100 %	46.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	60.638.380,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	11.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		26.010.380,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.500.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.128.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	21.931.998.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	55.178.301.860,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran* *Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter* *Persentase SMA yang melaksanakan UKS*	88,02% 83,58Angka 74,76% 36.10% 85,03Indeks 500siswa 44medali 61,79% 97,31Indeks				83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 %	12.273.782.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	n/a% 83,43Angka 74,61% 34.10% 84,88Indeks 450siswa 42medali 61,64% 97,16Indeks	26.305.497.790,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.509.234.650,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				17 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		445.534.430,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		46.048.970,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	15.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		79.800.270,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		153.359.470,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				17 Satuan Pendidikan	12.257.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		24.071.520.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	9.658.216.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	28.872.804.070,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				819 Peserta Didik	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		768.519.290,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				57 Satuan Pendidikan	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		327.442.390,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		58.202.540,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	16.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		65.313.380,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				8 Satuan Pendidikan	9.640.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		27.496.040.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				224 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		157.286.470,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA						**3.440.775.000,00**							**4.918.760.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.440.775.000,00**							**4.918.760.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.440.775.000,00**							**4.918.760.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**801.275.000,00**						**86,76Nilai**	**962.500.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				801.275.000,00			-	-	-	-	962.500.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	801.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		962.500.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	2.639.500.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	3.956.260.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	2.639.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	3.956.260.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.639.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.956.260.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI						**2.214.000.000,00**							**3.308.085.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.214.000.000,00**							**3.308.085.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.214.000.000,00**							**3.308.085.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**115.750.000,00**						**86,76Nilai**	**116.325.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				115.750.000,00			-	-	-	-	116.325.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	115.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		116.325.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	2.098.250.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	3.191.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka				77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	2.098.250.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	3.191.760.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.098.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		3.191.760.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON						**4.575.050.000,00**							**6.623.430.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.575.050.000,00**							**6.623.430.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.575.050.000,00**							**6.623.430.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**566.300.000,00**						**86,76Nilai**	**583.330.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				566.300.000,00			-	-	-	-	583.330.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	566.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		583.330.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	4.008.750.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	6.040.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36.10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	4.008.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34.10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	6.040.100.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	4.008.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		6.040.100.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA						**2.479.650.000,00**							**3.736.425.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.479.650.000,00**							**3.736.425.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.479.650.000,00**							**3.736.425.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**75.150.000,00**						**86,76Nilai**	**82.665.000,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				75.150.000,00			-	-	-	-	82.665.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	75.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		82.665.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	2.404.500.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	3.653.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	2.404.500.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	3.653.760.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.404.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		3.653.760.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH						**3.530.320.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.530.320.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.530.320.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**170.320.000,00**						**86,76Nilai**	**0,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				170.320.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	170.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	3.360.000.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30,10 %	3.360.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	3.360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI						**3.206.254.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.206.254.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.206.254.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**427.254.000,00**						**86,76Nilai**	**0,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				427.254.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	427.254.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%			86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	2.779.000.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30,10 %	2.779.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.779.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK						**4.586.050.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.586.050.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.586.050.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**139.300.000,00**						**86,76Nilai**	**0,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				139.300.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	139.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	4.446.750.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	4.446.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	4.446.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI						**2.055.462.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.055.462.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.055.462.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**42.962.000,00**						**86,76Nilai**	**0,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				42.962.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	42.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 99,5 %	2.012.500.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	2.012.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.012.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA						**4.324.574.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.324.574.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.324.574.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**101.824.000,00**						**86,76Nilai**	**0,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				101.824.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	101.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	4.222.750.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36.10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	4.222.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34.10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	4.222.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN						**2.175.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.175.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.175.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**52.750.000,00**						**86,76Nilai**	**0,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				52.750.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	52.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB* *Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat* *Angka Putus Sekolah SMA/SMK* *Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik* *Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo* *Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK*	49.49% 47.01% 41.50% 65% 58.65% 0,16% 50Orang 46.86% 81,5% 77.62% 100% 86.25%				86.10 % 99,5 % 77.47 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 %	2.122.250.000,00						49.47% 47.00% 41.49% 60% 58.63% 0,17% 45Orang 46.85% 81% 77.57% 100% 86.20%	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36.10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka			77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	2.122.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34.10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.122.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN						**1.973.107.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.973.107.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.973.107.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,81Nilai**			**86,66 Nilai**	**128.607.000,00**						**86,76Nilai**	**0,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian*	-				128.607.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	SMK Negeri 1 Cangkringan, siswa dan masyarakat	-	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	128.607.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	SMK Negeri 1 Cangkringan, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat*** ***Angka Putus Sekolah SMA/SMK*** ***Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik*** ***Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo*** ***Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman*** ***Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK***	**49.49%** **47.01%** **41.50%** **65%** **58,65%** **0,16%** **50Orang** **46.86%** **81,5%** **77.62%** **100%** **86.25%**			**86.10 %** **99,5 %** **77.47 %** **0,20 %** **35 Orang** **50 %** **58.60 %** **49.44 %** **41.46 %** **46.97 %** **46.82 %** **80 %**	**1.844.500.000,00**						**49.47%** **47.00%** **41.49%** **60%** **58.63%** **0,17%** **45Orang** **46.85%** **81%** **77.57%** **100%** **86.20%**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)* *Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD* *Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory* *Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP* *Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha* *Persentase SMK yang melaksanakan UKS*	55,31Angka 36,10% 24medali 25,36% 93,32Angka 7sekolah 46sekolah 62% 66,35Angka 77,95Angka 81,88Angka				77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 %	1.844.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	55,16Angka 34,10% 23medali 25,34% 93,17Angka 7sekolah 44sekolah 60% 66,20Angka 77,80Angka 81,73Angka	0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1.844.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
	J U M L A H							**1.573.651.957.917,00**							**1.910.879.426.868,63**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**38.288.661.227,00**							**58.075.024.871,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**37.868.311.227,00**							**57.334.238.871,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**37.868.311.227,00**							**57.334.238.871,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**89,51Nilai**			**89,06 Nilai**	**33.885.784.577,00**						**89,36Nilai**	**44.555.480.800,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY*	100%			100 %	41.637.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	54.601.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,00 Dokumen	38.637.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.501.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	100%			100 %	31.434.978.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	41.453.845.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				260.00 Orang/ Bulan	31.362.058.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.362.058.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	69.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		84.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.887.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	100%			100 %	16.528.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	20.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	14.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	148.600.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	247.303.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.897.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		44.303.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.685.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	78.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan*	100%			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	364.481.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		355.031.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	100%			100 %	1.835.524.827,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.851.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	736.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.097.144.827,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	100%			100 %	398.515.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	563.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33.890.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	280.002.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		233.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	35.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase fasyankes terakreditasi*** ***Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria*** ***Persentase keberhasilan pengobatan TBC*** ***Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta*** ***Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)*** ***Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur*** ***Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur*** ***Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar*** ***Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas*** ***Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara*** ***Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)*** ***Presentase remaja putri anemia*** ***Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM***	**75%** **80%** **80%** **65%** **100%** **19,3%** **6,1%** **50Angka** **18Angka** **93,1%** **88%** **100%** **67,41%**			**54,32 %** **100 %** **85 %** **100 %** **62 %** **77 %** **77 %** **72 %** **30 Angka** **15 Angka** **6,4 %** **21,5 %** **n/a %**	**3.693.329.550,00**						**74%** **79%** **79%** **64%** **100%** **20,1%** **6,2%** **40Angka** **17Angka** **n/a%** **87%** **100%** **62,22%**	**11.229.588.571,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan*	100%			100 %	66.779.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	236.169.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	61.779.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		236.169.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM* *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan* *Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella* *Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)* *Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus* *Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan* *Persentase K6* *Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa* *Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen* *Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen* *Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ* *Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya* *Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan* *Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria* *Persentase KN Lengkap* *Persentase lansia mendapat layanan kesehatan* *Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta* *Persentase Orang dengan*	100% 100% 80% 100% 100% 90% 93,5% 90% 100% 88% 72% 95% 252Angka 100% 18Angka 80% 88,61% 100% 51% 100% 60% 100% 98% 100% 100% 100%			247 Angka 100 % 92,7 % 97,42 % 40 % 100 % 60 % 60 % 60 % 60 % 100 % 60 % 100 % 100 % 70 % 54 % 95 % 69 % 85 % 100 % 48 % 100 % 12 Angka 90 % 84.81 % 77 %	3.572.866.950,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100% 100% 79% 100% 100% 80% 93% 90% 100% 87% 71% 90% 252Angka 100% 16Angka 80% 87,36% 100% 50% 100% 58% 100% 97,71% 98% 100% 100%	10.914.798.071,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART *Persentase Pelayanan Kesehatan Balita* *Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan* *Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC* *Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT* *Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah* *Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam* *Persentase RS memenuhi standar kredentialing* *Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)*														
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				438 Orang	693.304.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		798.425.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28215 Orang	234.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	173.849.487,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		544.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	33.763.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		180.576.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		198.220.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1.304.461.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.457.711.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	781.913.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.788.273.931,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		277.832.940,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		498.516.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	264.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		571.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				814300 Keluarga	46.539.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		64.772.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan*	100%			100 %	6.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	6.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan*	-			100 %	47.383.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	-	71.621.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	42.383.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		46.621.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*** ***Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan*** ***Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan***	**90%** **67.18%** **100%**			**55.73 %** **87 %** **n/a %**	**207.458.300,00**						**89%** **63.35%** **n/a%**	**885.979.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	88.51%			87.53 %	28.985.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	88.19%	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				28228 Orang	23.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				8 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya*	90% 99,74%			99,48 % 87 %	178.473.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	89% 99,66%	825.979.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		415.979.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	173.473.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		410.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi*** ***Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi*** ***Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman***	**97%** **90,2%** **100%**			**84,4 %** **88 %** **n/a %**	**24.308.800,00**						**95%** **87,7%** **n/a%**	**86.411.000,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan*	100%			100 %	19.308.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	19.941.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				1 Sarana	19.308.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		19.941.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	*Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan*	100%			100 %	5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	66.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				1 Sarana	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		66.470.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan***	**100%**			**100 %**	**57.430.000,00**						**100%**	**576.779.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi*	100%			100 %	57.430.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	576.779.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	57.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		576.779.500,00	DINAS KESEHATAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**420.350.000,00**							**740.786.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**420.350.000,00**							**740.786.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional***	**60%**			**20 %**	**420.350.000,00**						**40%**	**740.786.000,00**	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan tradisional*	100%			100 %	420.350.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	740.786.000,00	DINAS KESEHATAN
	2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional				50 Unit	420.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Peningkatan kualitas SDM	-		740.786.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI						**8.719.220.472,00**							**18.796.815.231,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.719.220.472,00**							**18.796.815.231,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**8.719.220.472,00**							**18.796.815.231,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**89,51Nilai**			**89,06 Nilai**	**8.706.020.472,00**						**89,36Nilai**	**7.662.102.731,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	100%			100 %	32.824.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	36.360.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	32.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.360.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	100%			100 %	15.064.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	18.600.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.600.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	100%			100 %	1.665.502.972,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.780.292.731,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	718.760.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		718.995.600,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	946.742.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.061.297.131,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD*	100%			100 %	6.992.629.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	5.826.850.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	6.992.629.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	-		5.826.850.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase fasyankes terakreditasi*** ***Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria*** ***Persentase keberhasilan pengobatan TBC*** ***Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta*** ***Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)*** ***Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur*** ***Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur*** ***Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar*** ***Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas*** ***Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara*** ***Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)*** ***Presentase remaja putri anemia*** ***Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM***	**75%** **80%** **80%** **65%** **100%** **19,3%** **6,1%** **50Angka** **18Angka** **93.1%** **88%** **100%** **67,41%**			**54,32 %** **100 %** **85 %** **100 %** **62 %** **77 %** **77 %** **72 %** **30 Angka** **15 Angka** **6,4 %** **21,5 %** **n/a %**	**13.200.000,00**						**74%** **79%** **79%** **64%** **100%** **20,1%** **6,2%** **40Angka** **17Angka** **n/a%** **87%** **100%** **62,22%**	**11.134.712.500,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan*	100%			100 %	13.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	11.134.712.500,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	2.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.046.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		7.888.712.500,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
		BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL						**55.599.723.144,00**							**67.834.125.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**55.599.723.144,00**							**67.834.125.742,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**55.599.723.144,00**							**67.834.125.742,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**89,51Nilai**			**89,06 Nilai**	**933.435.644,00**						**89,36Nilai**	**1.159.200.714,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	100%			100 %	32.883.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	31.860.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.00 Dokumen	32.883.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		31.860.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	100%			100 %	9.534.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	9.060.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	9.534.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.060.000,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	62.659.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	282.484.616,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.674.944,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.358.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		82.813.275,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.823.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		26.177.438,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	9.677.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.695.100,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	8.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		129.123.859,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	100%			100 %	694.257.944,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	749.887.820,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	137.718.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		173.899.748,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	556.539.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		575.988.072,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	100%			100 %	134.099.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	85.908.278,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	66.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		77.312.028,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	34.535.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	30.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.596.250,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase fasyankes terakreditasi*** ***Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria*** ***Persentase keberhasilan pengobatan TBC*** ***Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta*** ***Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)*** ***Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur*** ***Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur*** ***Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar*** ***Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas*** ***Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara*** ***Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)*** ***Presentase remaja putri anemia*** ***Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM***	**75%** **80%** **80%** **65%** **100%** **19,3%** **6,1%** **50Angka** **18Angka** **93.1%** **88%** **100%** **67,41%**			**54,32 %** **100 %** **85 %** **100 %** **62 %** **77 %** **77 %** **72 %** **30 Angka** **15 Angka** **6,4 %** **21,5 %** **n/a %**	**54.666.287.500,00**						**74%** **79%** **79%** **64%** **100%** **20,1%** **6,2%** **40Angka** **17Angka** **n/a%** **87%** **100%** **62,22%**	**66.674.925.028,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria* *Persentase KN Lengkap* *Persentase lansia mendapat layanan kesehatan* *Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta* *Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART* *Persentase Pelayanan Kesehatan Balita* *Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan* *Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC* *Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT* *Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah* *Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam* *Persentase RS memenuhi standar kredentialing* *Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)* *Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya* *Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM* *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan* *Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella* *Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)* *Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus* *Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan* *Persentase K6* *Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini*	100% 100% 80% 100% 100% 90% 93.5% 90% 100% 88% 72% 95% 252Angka 100% 18Angka 80% 88.61% 100% 51% 100% 60% 100% 98% 100% 100% 100%			100 % 70 % 54 % 95 % 69 % 85 % 100 % 48 % 100 % 12 Angka 90 % 84.81 % 77 % 60 % 247 Angka 100 % 92,7 % 97,42 % 40 % 100 % 60 % 60 % 60 % 60 % 100 % 100 %	54.666.287.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100% 100% 79% 100% 100% 80% 93% 90% 100% 87% 71% 90% 252Angka 100% 16Angka 80% 87.36% 100% 50% 100% 58% 100% 97,71% 98% 100% 100%	66.674.925.028,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan jiwa *Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen* *Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen* *Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ* *Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan*													
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6,00 Dokumen	54.666.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		66.674.925.028,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
		BALAI PELATIHAN KESEHATAN						**5.766.248.072,00**							**6.697.459.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.766.248.072,00**							**6.697.459.531,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.766.248.072,00**							**6.697.459.531,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**89,51Nilai**			**89,06 Nilai**	**5.600.729.872,00**						**89,36Nilai**	**6.281.480.531,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	100%			100 %	26.824.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	24.600.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4,00 Dokumen	26.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.600.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	100%			100 %	12.364.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	10.320.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	12.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.320.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	100%			100 %	2.755.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	55.055.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.755.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.300.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	100%			100 %	1.366.327.292,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.574.253.221,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	227.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		397.356.740,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.138.652.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.176.896.481,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY*	100%			100 %	139.259.580,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	624.252.310,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10.00 Unit	120.513.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		109.025.840,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.00 Unit	4.265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		68.373.470,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		363.000.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4.00 Unit	7.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		83.853.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD*	100%			100 %	4.053.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	3.993.000.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	4.053.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.993.000.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*** ***Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan*** ***Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan***	**90%** **67.18%** **100%**			**55.73 %** **87 %** **n/a %**	**165.518.200,00**						**89%** **63.35%** **n/a%**	**415.979.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan* *Persentase SDM yang meningkat kompetensinya*	90% 99.74%			99.48 % 87 %	165.518.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	89% 99.66%	415.979.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1353.00 Orang	165.518.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		415.979.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	JUMLAH							**108.373.852.915,00**							**151.403.425.375,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA						**87.040.881.370,00**							**68.921.111.993,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**87.040.881.370,00**							**68.921.111.993,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**67.704.186.370,00**							**68.921.111.993,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	**89,51Nilai**			**-**	**67.701.186.370,00**						**89,36Nilai**	**68.921.111.993,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	100%			-	47.101.286.370,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	47.432.192.293,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				337 Orang/ Bulan	47.101.286.370,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		47.432.192.293,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD*	-			-	20.599.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	21.488.919.700,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	20.599.900.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.488.919.700,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	*Persentase fasyankes terakreditasi*	**-**			**-**	**3.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan*	-			-	2.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				1 Unit	350.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	150.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**19.336.695.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	*Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang*	-			-	**19.336.695.000,00**						-	**0,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia*	-			-	15.900.502.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1 Dokumen	15.900.502.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	*Pemenuhan sarana prasarana pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia*	100%			-	3.436.193.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				1 Dokumen	3.436.193.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	JUMLAH							**87.040.881.370,00**							**68.921.111.993,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT PARU RESPIRA						**69.442.293.760,00**							**44.429.329.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**69.442.293.760,00**							**44.429.329.876,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**69.442.293.760,00**							**44.429.329.876,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	**-**			**-**	**39.440.843.760,00**						**-**	**33.959.329.876,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			-	23.757.886.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	23.000.094.876,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168,00 Orang/ Bulan	23.685.686.760,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.898.454.876,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4,00 Dokumen	72.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		101.640.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah*	-			-	20.120.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	36.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	20.120.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD*	-			-	15.662.837.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	10.923.235.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	15.662.837.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.923.235.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**30.001.450.000,00**						**-**	**10.470.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan*	-			-	30.001.450.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	-	10.470.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		170.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	30.000.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		3.500.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1.00 Paket	150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		6.800.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	J U M L A H							**69.442.293.760,00**							**44.429.329.876,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL						**718.952.264.452,00**							**767.179.806.507,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**687.603.618.152,00**							**712.077.056.767,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**590.929.418.152,00**							**631.119.556.767,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90Nilai**			**90 Nilai**	**47.153.454.247,00**						**90Nilai**	**57.573.137.900,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	148.226.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	556.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	42.089.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		121.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	53.068.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		83.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	53.068.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		352.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	40.439.344.297,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	46.809.641.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				421.00 Orang/ Bulan	40.265.649.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		46.570.678.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	73.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		96.855.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.00 Laporan	21.304.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		51.298.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	78.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.810.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	90.640.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	110.598.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		847.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	89.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		109.751.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	721.397.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.025.936.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	44.827.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		49.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	68.425.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	30.266.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		33.006.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	66.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		81.182.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.570.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				286 Laporan	509.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		707.978.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	9.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	177.392.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		177.392.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	3.933.117.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	6.628.917.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.545.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.113.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.047.322.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	2.816.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.575.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	1.811.228.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	2.264.053.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95 Unit	1.141.269.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		586.270.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16.00 Unit	269.958.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		363.283.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.314.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY***	**25403,58liter/detik 12.51% 58,05% 576.01liter/detik**			**n/a liter/detik n/a liter/detik 25391,58 liter/detik n/a % 21,86 %**	**18.039.000.000,00**						**25399,58liter/detik n/a% 49,10% n/aliter/detik**	**40.669.630.000,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yang dibangun dan dikelola Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari*	576,01liter/detik 25403,58 liter/detik			n/a liter/detik 25391,58 liter/detik 25391,58 liter/detik	6.235.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	n/aliter/detik 25399,58 liter/detik	14.970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				2.00 Lembaga	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				25 Unit	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		4.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1.00 Titik	645.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				4.00 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY* *Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77,5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY*	12,51% 58,05%			n/a % 21,86 %	11.804.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	n/a% 49,1%	25.699.630.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.24 KM	800.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				511.77 KM	9.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		14.710.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				41 Bendung	1.524.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.263.130.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi														
			Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya				41 DI	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		726.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional*** ***Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional [deleted]*** ***Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional*** ***Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional [deleted]*** ***Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional [deleted]1***	**14,78%** **23.85%**			**n/a %** **n/a %** **22.42 %** **22.42 %** **22.42 %**	**5.371.600.000,00**						**n/a%** **23.37%**	**0,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota* *Pengurangan luasan genangan* *Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional*	100% 23.85% 100% 3.83Ha 23.85%			n/a % n/a Ha 22.42 %	5.371.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	n/a% 23.37% n/a% n/aHa 23.37%	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				1 Unit	5.341.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan*** ***Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan*** ***Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan***	**100%** **541.212 m3** **541.212m3**			**n/a m3** **n/a m3** **60,44 %**	**111.107.000.000,00**						**98,63%** **n/am3** **n/am3**	**60.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	*Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan* *Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional* *Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan* *Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi*	100%			n/a m3 100 % 60,44 % 2 unit	111.107.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				150 Ton/hari	111.107.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Pengurangan luasan genangan*** ***Pengurangan luasan genangan***	**3.83Ha** **6,86Ha**			**n/a Ha** **6,01 Ha**	**250.000.000,00**						**n/aHa** **6,58Ha**	**300.000.000,00**	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	*Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani* *Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani* *Pengurangan luasan genangan*	3.83 Ha 6,86 Ha			n/a Ha 6,01 Ha 6,01 Ha	250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	n/aHa 6,58 Ha	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara***	**100%**			**100 %**	**250.000.000,00**						**100%**	**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi* *"Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi" Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi*	216dokumen 1dokumen 1dokumen			n/a dokumen 4 dokumen n/a dokumen	250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	4dokumen/adokumen n/adokumen	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				5 Kabupaten/Kota	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase kemantapan jalan*** ***Persentase kemantapan jalan***	**62.40%** **68.61%**			**62.10 %** **n/a %**	**57.996.848.905,00**						**62.30%** **n/a%**	**107.027.112.796,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan* *Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan*	68.01% 62.40%			n/a % 62.10 %	57.996.848.905,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	n/a% 62.30%	107.027.112.796,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				255 Jembatan	4.461.813.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		2.597.995.296,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5.00 KM	23.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		48.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0.5 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		24.516.979.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				674.58 KM	26.985.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		29.683.538.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				57.00 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		536.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				674.58 KM	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.292.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Meningkatnya ketersediaan air baku Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan***	**39.51liter/detik 3unit 100%**			**27.01 liter/detik 100 % 0 unit**	**350.761.515.000,00**						**32.01liter/detik 1unit 100%**	**365.099.676.071,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam. Penambahan jaringan jalan baru. Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan Peningkatan jalan Pembangunan jembatan Pemasangan patok aset tanah JJLS Proses tahapan pengadaan tanah*	-			-	350.761.515.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	365.099.676.071,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				11.00 Dokumen	31.693.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		26.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				3.00 Dokumen	1.970.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		160.054.783.071,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				4.00 Dokumen	84.940.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		29.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo				2.00 Dokumen	230.957.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		148.244.893.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**96.674.200.000,00**							**80.957.500.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah***	**100%**			**100 %**	**463.000.000,00**						**100%**	**2.252.500.000,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*	8dokumen 100%			n/a dokumen 100 %	113.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	n/adokumen 100%	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi				3 Dokumen	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*	20unit 51unit			n/a unit 12 unit	350.000.000,00			-	-	-	n/aunit 12unit	752.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				3.00 Unit Rumah	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		752.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Cakupan penanganan kawasan kumuh*** ***Persentase penanganan kawasan kumuh*** ***Persentase Penanganan RTLH*** ***Persentase penanganan rumah tidak layak huni***	**58.27%** **15Hektar** **25%** **8.41%**			**n/a Hektar** **n/a %** **3.15 %** **n/a %**	**17.530.000.000,00**						**n/a%** **10Hektar** **n/a%** **6.66%**	**23.100.000.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan*	5laporan 2dokumen 1dokumen			n/a dokumen 1 laporan 1 dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1laporan 1dokumen n/adokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	-			-	17.430.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengahpusan kemiskinan ekstrem	-	-	23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				747 Unit Rumah	17.430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengahpusan kemiskinan ekstrem	-		23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Penanganan PSU layak di permukiman Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman***	**2346lokasi 160lokasi**			**178 lokasi n/a lokasi**	**78.681.200.000,00**						**178lokasi n/alokasi**	**55.605.000.000,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman*	6dokumen 5laporan			2 dokumen 1 laporan	78.681.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1dokumen 1laporan	55.605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				178.00 Lokasi	78.481.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		55.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28.550.000.000,00**							**45.705.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**28.550.000.000,00**							**45.705.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	*Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP* *Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik* *Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta*	**-**			**-**	**28.550.000.000,00**						**-**	**45.705.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun*	-			-	15.700.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	31.570.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				200 Unit	15.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		31.570.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	-			-	12.850.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	14.135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				9 Laporan	12.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		13.475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional														
			Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional				3 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.798.646.300,00**							**9.397.749.740,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**2.798.646.300,00**							**9.397.749.740,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Pengendalian Pengusahaan Air Tanah***	**Kurang Dari atau Sama dengan 10%%**			**Kurang Dari atau Sama dengan 10% %**	**604.760.000,00**						**Kurang Dari atau Sama dengan 10%%**	**1.578.633.470,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi* *Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi* *Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi* *Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah* *Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan air tanah* *Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam* *Penetapan Zona Konservasi Air Tanah* *Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah* *Review Neraca Air Tanah*	3dokumen 6dokumen 1dokumen 1laporan 21laporan 1laporan 3dokumen 1laporan 1laporan			4 dokumen 4 laporan 0 dokumen n/a laporan n/a laporan n/a laporan n/a dokumen n/a laporan n/a dokumen	300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	n/adokumen 3dokumen n/adokumen n/alaporan 4laporan n/alaporan 0dokumen n/alaporan n/alaporan	313.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1,00 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				3,00 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		313.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi* *Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah* *Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah* *Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan*	18laporan 6dokumen 40.49% 7laporan 1laporan			1 dokumen 3 laporan n/a laporan 1 laporan n/a %	304.760.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	4laporan 1dokumen n/a% 1laporan n/alaporan	1.265.633.470,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	132.188.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		152.171.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				2 Laporan	152.571.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.063.462.220,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan***	**4031Ha**			**3966.5 Ha**	**949.405.600,00**						**4009.5Ha**	**3.141.719.820,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	*Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil*	12laporan			2 laporan	175.453.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	3laporan	911.420.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Laporan	175.453.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		911.420.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut*	100%			100 %	629.562.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	1.229.549.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				3 Dokumen	376.422.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				3 Laporan	253.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		679.549.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	*Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat*	3dokumen			5 dokumen	114.390.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	3dokumen	910.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				5 Dokumen	114.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		910.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	*Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan*	9laporan			1 laporan	30.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	2laporan	90.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		90.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	***Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan***	**58030TOE**			**55030 TOE**	**381.390.700,00**						**57030TOE**	**2.139.500.000,00**	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	*Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi*	n/alaporan n/aunit			1 unit 1 laporan	381.390.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	n/alaporan n/aunit	2.139.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1.00 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		181.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 unit	241.390.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.958.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan***	**14448SR 16423 Rumah Tangga 46,88% 150Izin**			**n/a SR 105 Izin 14623 Rumah Tangga n/a %**	**863.090.000,00**						**n/aSR 15823Rumah Tangga n/a% 135Izin**	**2.537.896.450,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi*	15dokumen 37.73% 150izin			6 dokumen n/a % 105 izin	352.190.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	1dokumen n/a% 135izin	742.896.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				3 Dokumen	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				3 Laporan	92.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		677.896.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan*	600unit 600unit			n/a unit 600 unit	510.900.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-	n/aunit 600unit	1.795.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				143.00 Unit	510.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		1.795.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN						**12.713.433.445,00**							**60.612.683.794,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.713.433.445,00**							**60.612.683.794,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**12.713.433.445,00**							**60.612.683.794,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90Nilai**			**90 Nilai**	**4.669.700.450,00**						**90Nilai**	**6.011.240.500,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	43.320.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	47.652.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	43.320.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		47.652.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	16.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	18.480.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.480.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	126.288.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	189.606.500,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.602.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		54.598.500,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	27.498.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.489.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	8.963.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.184.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	23.599.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.103.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.378.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		264.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	39.247.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		49.968.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	4.008.577.650,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	4.928.481.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.355.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	3.097.041.650,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.879.746.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	908.536.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.045.380.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	474.714.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	827.021.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	251.427.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		581.405.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	23.286.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.616.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		220.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
2.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional***	**38.05% 35.39%**			**n/a % 36.05 %**	**8.043.732.995,00**						**37.38% n/a%**	**54.601.443.294,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatl Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi*	2unit 28535Rumah Tangga 100%			100 % n/a % 36.05 % 27035 Rumah Tangga 2 unit	8.043.732.995,00			-	-	-	2unit 28035Rumah Tangga 100%	54.601.443.294,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi				27035 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.950.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara				2 Unit	6.843.732.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.651.443.294,00	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN
		BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						**2.567.625.200,00**							**7.850.275.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.567.625.200,00**							**7.850.275.400,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**2.567.625.200,00**							**7.850.275.400,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90Nilai**			**90 Nilai**	**1.265.625.200,00**						**90Nilai**	**1.581.838.400,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	29.220.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	34.452.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	29.220.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		34.452.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	13.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	12.540.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.200.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.540.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	101.581.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	185.988.350,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.570.700,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.040.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.434.700,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.779.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.712.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.477.650,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16.350.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.985.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.378.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.567.400,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	41.136.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		92.139.300,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	849.948.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	911.935.750,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.200.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	163.300.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		191.776.750,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	684.648.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		717.959.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	271.675.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	436.922.300,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	120.448.800,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		152.326.700,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				108 Unit	51.227.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		64.595.600,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		220.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi Peningkatan kinerja tenagakonstruksi dan masyarakat jasa konstruksi***	**63,48% 100% 100%**			**76,89 % 82,52 % n/a %**	**1.302.000.000,00**						**n/a% 94,17% 92,30%**	**6.268.437.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*"1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi "1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi" Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi*	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU 1) 150 orang; dan 2) 800 LHU1) orang; dan 2) LHU			1) 200 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU n/a 1) orang; dan 2) LHU n/a dokumen	1.002.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM	-	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU n/a1) orang; dan 2) LHU	4.993.437.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				200 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM	-		275.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				800 Lembaga	802.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM	-		4.368.437.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				200 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM	-		350.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	*1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.*	1) 1 laporan; dan 2) 36,000 orang1) laporan; dan 2) orang			1) 1 laporan; dan 2) 36,000 orang 1) laporan; dan 2) orang	300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1) 1 laporan; dan 2) 36,000 orang1) laporan; dan 2) orang	1.275.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		100.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.175.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	J U M L A H							**734.233.323.097,00**							**835.642.765.701,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG						**31.393.586.000,00**							**66.884.640.640,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.501.326.800,00**							**24.930.861.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**20.501.326.800,00**							**24.930.861.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**96,39Nilai**			**95,39 Nilai**	**10.881.065.800,00**						**96,39Nilai**	**11.396.581.000,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	9Dokumen 3Dokumen			9 Dokumen n/a Dokumen	18.205.600,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	9Dokumen n/aDokumen	43.234.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	8.025.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.140.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.331.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	8.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.763.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD*	n/aLaporan 21Dokumen			21 Dokumen n/a Laporan	9.712.507.797,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	n/aLaporan 21Dokumen	9.696.143.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	9.655.717.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.625.144.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	46.889.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.356.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.345.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	6.858.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.298.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	3Laporan			2 Laporan	20.400.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	2Laporan	24.684.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	20.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.684.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi penatausahaan kepagawaian daerah*	2Laporan			1 Laporan	3.792.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1Laporan	6.679.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.679.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	20Laporan 5Laporan			20 Laporan n/a Laporan	113.241.900,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	20Laporan n/aLaporan	225.395.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.650.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.087.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		51.865.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.931.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12.388.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.589.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1.917.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.382.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	76.778.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.541.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	3Laporan			3 Laporan	687.422.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3Laporan	742.657.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.762.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	236.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		260.546.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	443.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		467.349.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya*	3Laporan			3 Laporan	325.496.503,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3Laporan	657.789.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya				15 Unit	205.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		320.738.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	72.960.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		128.510.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	46.891.703,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		208.541.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan***	**81,25%**			**74,80 %**	**30.590.000,00**						**81,25%**	**660.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi* *Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi*	4Dokumen 5Dokumen			2 Dokumen n/a Dokumen	30.590.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	4Dokumen/aDokumen	660.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				2 Dokumen	30.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		660.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten*** ***Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten***	**89,63%** **85,31%**			**57,04 %** **83,81 %**	**9.589.671.000,00**						**87,41%** **84,81%**	**12.874.280.000,00**	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota* *Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten* *Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten*	5Dokumen 10Dokumen 8Dokumen			5 Dokumen n/a Dokumen 25 Dokumen	5.194.656.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	5Dokumen/aDokumen 9Dokumen	7.379.764.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				9.00 Dokumen	614.544.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		675.998.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				7.00 Dokumen	2.730.111.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		4.668.766.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang				7 Laporan	1.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		2.035.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	*Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang* *Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang*	n/aDokumen 13Dokumen			17 Dokumen n/a Dokumen	4.395.015.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	n/aDokumen 13Dokumen	5.494.516.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				15 Dokumen	4.395.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		5.494.516.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.892.259.200,00**							**41.953.779.640,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**10.892.259.200,00**							**41.953.779.640,00**	
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	***Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi*** ***Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan***	**100%** **1Dokumen**			**n/a** **Dokumen** **100 %**	**10.312.700,00**						**100%** **n/aDokumen**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	*Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi*	1Dokumen			1 Dokumen	10.312.700,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1.00 Dokumen	10.312.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Jumlah dokumen kinerja reforma agraria Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti***	**1Dokumen 2Angka**			**n/a Dokumen 1 Angka**	**21.031.500,00**						**n/aDokumen 2Angka**	**100.000.000,00**	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti*	1Dokumen			1 Dokumen	21.031.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	21.031.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten***	**38Dokumen 66,14% 18,43%**			**47,98 % 13,13 % n/a Dokumen**	**10.860.915.000,00**						**n/aDokumen 59,35% 16,44%**	**41.753.779.640,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten* *Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota* *Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan* *Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan*	-			4 Kabupaten n/a Kabupaten/Kota n/a Dokumen 29 Dokumen	8.713.400.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	39.391.513.640,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				11.00 Dokumen	1.540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.694.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.02	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan														
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan				1 Dokumen	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		990.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2.00 Dokumen	166.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		9.709.033.340,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				4.00 Dokumen	895.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		21.265.280.300,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				3.00 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		165.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.07	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan				3 Dokumen	5.062.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		5.568.200.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten* *Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi* *Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi*	-			4 Kabupaten 7 Angka n/a Angka	2.147.515.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	2.362.266.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.02.01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				4 Dokumen	1.337.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.471.266.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.02.02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				4 Berita Acara	810.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		891.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	J U M L A H							**31.393.586.000,00**							**66.884.640.640,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**31.323.076.817,00**							**29.717.273.092,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.015.270.417,00**							**24.597.273.092,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**18.015.270.417,00**							**24.597.273.092,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**87,67Angka**			**87,07 Angka**	**17.453.649.117,00**						**87,47Angka**	**16.192.041.092,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	45.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	93.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		66.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		27.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	13.961.032.102,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	14.161.141.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	13.887.672.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.082.055.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	45.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		45.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.876.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	13.200.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	246.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	326.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		29.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		280.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	2.714.597.640,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	561.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	130.063.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		170.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2.584.533.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		390.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	473.819.375,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.037.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	327.819.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		660.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24.00 Unit	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase gangguan trantibum yang tertangani*** ***Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani*** ***Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif***	**100%** **70%** **100%**			**100 %** **100 %** **55 %**	**561.621.300,00**						**100%** **65%** **100%**	**8.405.232.000,00**	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	100%			100 %	468.600.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	7.470.232.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				7 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				367 laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		5.836.732.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				2250 Orang	233.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.485.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur*	100%			100 %	93.021.300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	715.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				26 Laporan	53.021.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				130 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		440.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi*	100%			100 %	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				6 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				60 Dokuman	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.307.806.400,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**100.000.000,00**							**120.000.000,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani***	**100%**			**100 %**	**100.000.000,00**						**100%**	**120.000.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	100%			100 %	100.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**13.207.806.400,00**							**5.000.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Omah Jaga Warga yang aktif***	**100%**			**70 %**	**13.207.806.400,00**						**90%**	**5.000.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			-	13.207.806.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0016	Pembinaan Jagawarga														
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				7800 Orang	13.207.806.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH							**31.323.076.817,00**							**29.717.273.092,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**15.804.799.110,00**							**30.322.355.736,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.579.349.310,00**							**29.972.355.736,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.579.349.310,00**							**29.972.355.736,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**87,22Angka**			**86,92 Angka**	**13.018.649.310,00**						**87,12Angka**	**17.019.797.262,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	100%%			100% %	38.574.609,00			-	-	-	100%%	166.282.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20.848.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		58.793.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	10.226.099,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.488.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY*	12Bulan			12Bulan	11.108.430.781,00			-	-	-	12Bulan	12.791.031.437,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110.00 Orang/ Bulan	11.068.410.781,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.698.424.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	17.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.919.402,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.491.435,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.196.150,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY*	1 Tahun			1 Tahun	6.720.000,00			-	-	-	1 Tahun	27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	6.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY*	1 Tahun			1 Tahun	135.932.800,00			-	-	-	1 Tahun	509.649.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	135.932.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		509.649.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY*	1 Tahun			1 Tahun Tahun	1.503.001.120,00			-	-	-	1 Tahun	1.884.125.360,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	515.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		864.680.570,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	987.801.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.019.444.790,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY*	1 Tahun			1 Tahun	225.990.000,00			-	-	-	1 Tahun	1.641.208.715,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.314.115,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	129.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	77.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		506.529.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		497.365.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY***	**0,85Skor 0,88Skor 0,80Skor 0,88Skor**			**0,65 Skor 0,70 Skor 0,70 Skor 0,70 Skor**	**2.538.200.000,00**						**0,80Skor 0,83Skor 0,75Skor 0,83Skor**	**12.952.558.474,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi*	100%			100% %	830.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	2.157.973.480,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				810 Orang	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.857.973.480,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				2 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana*	100%			100%	1.058.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	7.130.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				45 Kawasan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		2.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	368.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.760.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				32 Orang	158.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				300 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		325.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				5 Unit	516.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		2.795.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	100%			100%	545.200.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	2.101.823.907,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				12 Laporan	31.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		246.823.907,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2500.00 Orang	513.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.855.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	100%			100%	105.000.000,00			-	-	-	100%	1.562.111.087,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		815.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		91.998.387,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		215.198.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		439.914.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota***	**100%**			**96,3%**	**22.500.000,00**						**98,9%**	**0,00**	
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	100%			100%	22.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**225.449.800,00**							**350.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**225.449.800,00**							**350.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY***	**0,90Skor**			**0,78 Skor**	**225.449.800,00**						**0,86Skor**	**350.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY*	100%			100 %	225.449.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				2 Dokumen	225.449.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							**15.804.799.110,00**							**30.322.355.736,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**86.077.318.889,00**							**103.999.483.273,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**83.306.658.389,00**							**97.999.483.273,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**83.306.658.389,00**							**97.999.483.273,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90,38Angka**			**90,18 Angka**	**45.248.782.139,00**						**90,38Angka**	**49.057.276.918,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 bulan Bulan	17.229.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	110.896.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.360.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		44.346.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	6.869.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	41.437.365.889,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	43.006.038.808,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				247 Orang/ Bulan	41.350.197.489,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.889.856.048,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	48.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		52.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	2.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.706.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.700.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	29.709.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		45.182.060,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.526.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	27.513.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	22.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	27.513.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	1.707.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	157.073.180,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.707.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		157.073.180,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	175.535.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	773.107.720,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.750.720,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		76.987.790,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	681.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		31.729.060,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		27.439.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.409.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	124.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		532.127.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		53.663.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	24.845.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	930.651.160,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10.169.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		95.651.160,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.275.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		435.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	3.020.926.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	3.026.868.790,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.510.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	462.200.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		527.175.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.553.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.495.183.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	543.658.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	1.030.140.760,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				53 Unit	467.018.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		747.316.460,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				137 Unit	35.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		91.382.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				71 Unit	40.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		191.441.800,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang***	**22,02%**			**21,41%**	**1.408.303.900,00**						**22,02%**	**11.278.742.545,00**	
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*	1943 Orang			1943 Orang	1.408.303.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-	1943 Orang	11.278.742.545,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				1943 Orang	412.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		8.151.534.855,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				78 Orang	869.366.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		2.052.983.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				17 Lembaga	126.654.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		1.074.224.690,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	***Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan*** ***Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial***	**1,19%** **0,60%**			n/a% **0,84 %**	**1.300.000,00**						**1,19%** **n/a%**	**56.870.000,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan pemulangan* *Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial*	10 Orang 5 Orang			n/a Orang 7 Orang	1.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	10 Orang n/a Orang	56.870.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				7 Orang	1.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		56.870.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**22,70%Orang**			**22,50% Orang**	**34.226.219.650,00**						**22,70%Orang**	**13.783.812.350,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)*	185 Orang 275 Orang 100 Orang			100 Orang 275 Orang 185 Orang	724.265.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	185 Orang 275 Orang 100 Orang	2.290.442.660,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	524.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		685.269.640,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	98.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		281.243.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	2.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		116.164.620,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		46.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	47.882.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		92.110.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	26.554.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		848.278.420,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	4.442.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		86.971.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	16.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		71.783.360,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				1 Dokumen	3.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		61.870.820,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)*	343 Orang 125 Orang			343 Orang 125 Orang	212.298.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	343 Orang 125 Orang	1.462.386.530,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				313 Orang	144.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		260.666.780,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				313 Orang	40.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		209.755.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				13 Orang	1.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		57.694.780,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				313 Orang	20.340.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		112.302.630,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				713 Orang	480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		506.789.360,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				13 Orang	505.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		54.729.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				313 Orang	4.097.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		70.363.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				13 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				13 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		44.401.280,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	294.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		143.483.120,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial*	2575 Orang 228 Orang			228 Orang 2575 Orang	31.001.571.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	2575 Orang 228 Orang	3.886.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				1850 Orang	31.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		2.920.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		36.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		258.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				1140 Orang	571.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		605.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.*	70 Orang 80 Orang 157 Orang			80 Orang 70 Orang 177 Orang	2.288.084.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	70 Orang 80 Orang 157 Orang	6.144.683.160,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				125 Orang	1.201.233.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		3.886.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				125 Orang	102.914.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		250.758.860,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				125 Orang	244.937.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		501.253.170,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				125 Orang	404.426.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		468.339.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				125 Orang	165.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		468.339.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				125 Orang	68.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		241.158.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				125 Orang	85.468.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		239.046.390,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2 Dokumen	15.268.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		89.487.640,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial***	**3,68%**			**3,55%**	**2.035.928.700,00**						**3,68%**	**20.072.843.040,00**	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.*	31Orang			30 Orang	26.550.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	31Orang	888.776.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang	26.172.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		858.013.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				1 Orang	378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		30.763.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.*	1600 KPM			1600 KPM	2.009.378.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	1600 KPM	19.184.067.040,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				1990 Keluarga	1.201.586.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		1.201.586.700,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				1225 Keluarga	807.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		17.982.480.340,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar***	**61,36%**			**61,03%**	**254.924.000,00**						**61,36%**	**2.945.318.420,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.*	1820 Orang			1785 Orang	254.924.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-	1820Orang	2.945.318.420,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				16250000 Orang	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		305.312.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				50 Orang	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		75.718.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		665.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				260 Orang	92.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		146.597.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				5043 Orang	108.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		1.752.190.220,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat***	**34,84%**			**34,60%**	**131.200.000,00**						**34,84%**	**804.620.000,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat*	34,84%			34,60%	131.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	34,84%	804.620.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				23 Makam	131.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		804.620.000,00	DINAS SOSIAL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.770.660.500,00**							**6.000.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.770.660.500,00**							**6.000.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya***	**8,18%**			**8,18%**	**2.770.660.500,00**						**8,18%**	**6.000.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan*	8,18%			8,18%	2.770.660.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	8,18%	6.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	2.22.08.5.09.0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial														
			Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial				6 Dokumen	2.770.660.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		6.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
		BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS						**3.308.745.992,00**							**5.677.870.860,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.308.745.992,00**							**5.677.870.860,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.308.745.992,00**							**5.677.870.860,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90,38Angka**			**90,18 Angka**	**1.797.001.992,00**						**90,38Angka**	**2.392.742.860,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12Bulan			12 Bulan	24.625.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12Bulan	21.540.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	24.625.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.540.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	12Bulan			12 Bulan	10.339.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12Bulan	10.320.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	10.339.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.320.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12Bulan			12 Bulan	12.474.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12Bulan	187.843.980,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.774.250,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.195.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		32.007.140,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4.758.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		29.960.150,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	486.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		26.608.200,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.026.240,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		54.468.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	499.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	205.124.520,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		205.124.520,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	1.675.904.392,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	1.643.368.360,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.800.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	177.905.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		229.900.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.497.698.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.408.668.360,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	73.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	324.546.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	72.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		164.076.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				152 Unit	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		119.140.200,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.329.800,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**22,70%Orang**			**22,50% Orang**	**1.511.744.000,00**						**22,70%Orang**	**3.285.128.000,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)*	185 Orang 275 Orang 100 Orang			100 Orang 275 Orang 185 Orang	1.511.744.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	185 Orang 275 Orang 100 Orang	3.285.128.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				155 Orang	1.114.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		1.618.903.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				155 Orang	212.218.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		460.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				155 Orang	495.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		70.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				15 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		8.525.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				155 Orang	183.651.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		311.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				155 Orang	180.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		800.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		5.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				1 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		300.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				14 Orang	200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		10.800.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		300.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		300.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
		BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA						**1.609.359.600,00**							**3.786.509.970,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.609.359.600,00**							**3.786.509.970,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.609.359.600,00**							**3.786.509.970,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90,38Angka**			**90,18 Angka**	**821.633.100,00**						**90,38Angka**	**1.021.860.170,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	21.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	24.948.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	21.420.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.948.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	10.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	11.352.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.140.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.352.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	9.263.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	127.316.640,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.190.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.242.860,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.070.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.166.940,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.542.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.396.200,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.117.100,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.196.440,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.644.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.600.200,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.700.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.714.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	701.242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	699.424.540,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	400.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	95.250.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		107.632.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	605.592.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		590.791.740,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	79.568.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	158.818.990,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	69.119.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		82.206.300,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	450.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.521.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	4.349.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		54.734.790,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	5.650.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.356.900,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**22,70%Orang**			**22,50% Orang**	**787.726.500,00**						**22,70%Orang**	**2.764.649.800,00**	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR) Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.*	70 Orang 80 Orang 157 Orang			80 Orang 70 Orang 177 Orang	787.726.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	70 Orang 80 Orang 157 Orang	2.764.649.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	487.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		726.600.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	177.461.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		321.286.700,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	162.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		77.845.100,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	29.405.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		50.894.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	22.163.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		692.621.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	70.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		101.833.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				16 Orang	225.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		779.049.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi				2 Orang	200.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		2.400.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				3 Orang	210.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		2.520.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				2 Orang	200.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		6.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2 Dokumen	200.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		3.600.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
		BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS						**5.111.393.334,00**							**8.770.134.768,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.111.393.334,00**							**8.770.134.768,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.111.393.334,00**							**8.770.134.768,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90,38Angka**			**90,18 Angka**	**2.280.245.584,00**						**90,38Angka**	**3.475.219.333,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	32.038.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	30.888.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32.038.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.888.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	14.448.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	13.530.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	14.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.530.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	1.559.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	71.577.979,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.879.137,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	553.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		23.371.700,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.967.142,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.360.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	2.078.440.984,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	3.093.870.794,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	170.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		187.368.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.908.105.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.906.502.294,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	153.759.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	265.352.560,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	151.779.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		169.389.880,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.549.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		71.412.880,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**22,70%Orang**			**22,50% Orang**	**2.831.147.750,00**						**22,70%Orang**	**5.294.915.435,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)*	185 Orang 275 Orang 100 Orang			100 Orang 275 Orang 185 Orang	2.450.182.050,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	185 Orang 275 Orang 100 Orang	3.674.104.100,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				180 Orang	1.862.795.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		2.412.787.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				180 Orang	179.112.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		498.674.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				180 Orang	582.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		209.179.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				1 Orang	100.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		3.904.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				180 Orang	11.849.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		175.447.100,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				180 Orang	320.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		139.165.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				180 Orang	393.120.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		145.692.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				2 Orang	300.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		1.800.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				180 Orang	1.103.550,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		39.240.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	300.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		8.100.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				6 Orang	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		8.014.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				1 Dokumen	300.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		32.100.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)*	50 Orang			50 Orang	380.965.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	50 Orang	1.620.811.335,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30 Orang	329.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		604.915.300,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	20.330.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		167.427.700,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				30 Orang	848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		48.108.995,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	3.765.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		14.520.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		205.823.420,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	21.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		167.427.700,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				30 Orang	996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		355.113.220,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				1 Orang	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		2.420.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				30 Orang	2.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		11.858.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				1 Orang	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		22.506.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		20.691.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
		BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA						**1.754.301.856,00**							**5.010.779.745,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.754.301.856,00**							**5.010.779.745,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.754.301.856,00**							**5.010.779.745,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90,38Angka**			**90,18 Angka**	**1.138.334.856,00**						**90,38Angka**	**1.243.545.880,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	22.821.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	24.420.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	22.821.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.420.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	10.384.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	11.400.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.384.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.400.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	10.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	115.091.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.411.200,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		32.093.100,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.966.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.620.600,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.400.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	1.022.379.856,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	973.284.480,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	100.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.500.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	74.400.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		78.400.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	947.879.856,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		891.384.480,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	71.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	119.350.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	69.350.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		69.350.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	2.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**22,70%Orang**			**22,50% Orang**	**615.967.000,00**						**22,70%Orang**	**3.767.233.865,00**	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR) Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.*	70 Orang 80 Orang 157 Orang			80 Orang 70 Orang 177 Orang	615.967.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	70 Orang 80 Orang 157 Orang	3.767.233.865,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	444.756.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		1.120.284.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	68.136.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		523.361.960,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	750.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		139.847.070,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	44.215.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		74.800.660,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	11.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		1.173.764.175,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	45.360.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		53.136.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	1.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		606.740.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	750.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		75.300.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
		BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK						**2.418.568.292,00**							**3.698.626.316,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.418.568.292,00**							**3.698.626.316,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.418.568.292,00**							**3.698.626.316,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90,38Angka**			**90,18 Angka**	**1.215.103.292,00**						**90,38Angka**	**1.909.846.026,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12Bulan			12 Bulan	24.209.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12Bulan	25.212.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	24.209.600,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.212.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	12Bulan			12 Bulan	10.109.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12Bulan	10.560.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.109.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.560.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	6.863.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	161.495.730,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.403.520,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		54.815.530,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		39.641.580,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.284.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		31.980.300,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	229.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.124.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.530.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	11.515.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	395.009.120,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		240.331.080,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		154.678.040,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	946.996.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	1.022.762.246,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	109.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		156.000.350,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	837.726.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		866.761.896,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	215.408.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	294.806.930,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	197.108.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		216.687.680,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				58 Unit	18.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		78.119.250,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**22,70%Orang**			**22,50% Orang**	**1.203.465.000,00**						**22,70%Orang**	**1.788.780.290,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)*	343 Orang 125 Orang			343 Orang 125 Orang	1.203.465.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	343 Orang 125 Orang	1.788.780.290,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				125 Orang	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		49.500.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	701.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		49.500.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				125 Orang	149.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		327.896.690,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				125 Orang	17.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		285.956.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				125 Orang	47.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		98.452.640,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				120 Orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		166.980.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				120 Orang	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		32.749.640,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				7 Orang	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		2.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				125 Orang	286.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		720.105.320,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		4.400.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				24 Orang	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		5.280.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				5 Orang	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		2.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		43.560.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
		BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA						**4.029.834.000,00**							**5.676.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.029.834.000,00**							**5.676.200.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.029.834.000,00**							**5.676.200.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90,38Angka**			**90,18 Angka**	**1.454.532.400,00**						**90,38Angka**	**2.050.200.000,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12Bulan			12 Bulan	27.340.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	30.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	27.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah*	12Bulan			12 Bulan	10.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	15.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	21.948.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	134.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.945.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	137.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	5.832.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	250.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	2.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		100.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				36 Unit	3.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	1.274.144.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	1.351.200.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.200.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	133.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.139.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.200.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	114.308.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	270.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	107.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		170.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	2.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial***	**22,70%Orang**			**22,50% Orang**	**2.575.301.600,00**						**22,70%Orang**	**3.626.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)* *Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial*	2575 Orang 228 Orang			228 Orang 2575 Orang	2.575.301.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	2575 Orang 228 Orang	3.626.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				228 Orang	2.089.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		2.500.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				228 Orang	210.469.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		450.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				228 Orang	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		30.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				228 Orang	15.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		50.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				228 Orang	34.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		200.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				228 Orang	178.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		250.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				72 Orang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		20.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				24 Orang	4.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		6.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				36 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		120.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	J U M L A H							**104.309.521.963,00**							**136.619.604.932,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**48.413.180.461,00**							**107.646.251.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**48.213.180.461,00**							**107.371.251.200,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**32.807.819.461,00**							**46.882.051.200,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91,00Angka**			**88,50 Angka**	**32.073.025.461,00**						**90,00Angka**	**44.815.574.200,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	25 Dokumen			5 Dokumen	65.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	5 Dokumen	217.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		91.055.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		56.265.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		70.580.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	28.974.911.161,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 Dokumen	39.734.840.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/ Bulan	28.889.551.161,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		39.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		188.760.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	50.475.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 Dokumen	55.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	20.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai*	5 Dokumen			1 Dokumen	15.682.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 Dokumen	20.740.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	15.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.740.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	5 Tahun			1 Tahun	248.588.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 Tahun	686.303.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		31.720.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	62.853.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		85.190.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	14.987.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.821.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.973.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		35.939.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.213.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.632.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	118.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		503.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	60 Bulan			12 Bulan	18.918.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	132.475.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3.217.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.811.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		132.475.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	2.079.386.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	2.509.030.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.624.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	492.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		823.788.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.580.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.667.617.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	620.064.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	1.458.485.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.091.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	281.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		544.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	1.037.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	54.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.774.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	243.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		690.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		92.310.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK***	**5 Kabupaten/ Kota**			**5 Kabupaten/ Kota**	**10.000.000,00**						**5 Kabupaten/ Kota**	**0,00**	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Jumlah tenaga kerja yang kompeten*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten*** ***Persentase peserta magang yang ditempatkan*** ***Persentase peserta pelatihan yang yang terampil*** ***Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi*** ***Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar***	**97%** **80%** **60%** **100%** **90%** **n/aOrang**			**n/a Orang** **80%** **60%** **95%** **100%** **90%**	**39.850.000,00**						**96%** **80%** **60%** **100%** **90%** **n/aOrang**	**641.770.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang* *Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3* *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n* *Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi*	840 Orang 760 Orang 280 Orang 6180 Orang			50 Orang 210 Orang 1200 Orang 160 Orang	30.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	210 Orang 200 Orang 70 Orang 1200 Orang	602.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				20 Orang	30.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		602.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n*	135 Lembaga			111 Lembaga	9.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	127 Lembaga	39.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				106 LPK	9.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		39.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi***	**n/aOrang 60% 90% 90%**			**n/a Orang 45% 90% 90%**	**61.969.000,00**						**n/aOrang 55% 90% 90%**	**750.880.000,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n*	8000 Orang			6500 Orang	48.752.000,00			-	-	-	7500 Orang	335.875.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				25 Orang	21.036.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		168.725.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				30 Orang	4.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				15 Orang	7.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				6315 Orang	15.738.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*	1 Dokumen			1 Dokumen	7.843.000,00			-	-	-	1 Dokumen	115.005.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	4.330.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				50 Orang	3.512.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.605.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan*	100 Orang Orang			25 Orang Orang	5.374.000,00			-	-	-	25 OrangOrang	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	5.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial dan kebijakan pengupahan Persentase jumlah layanan yang terselesaikan***	**n/a Perusahaan 99%**			**n/a Perusahaan 97%**	**314.100.000,00**						**n/a Perusahaan 98%**	**310.800.000,00**	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n*	1130 Perkara			210 Perkara	162.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	250 Perkara	210.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				100 Perkara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				5 Perusahaan	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		38.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	*Jumlah Penetapan UMP*	5 SK Angka			1 SK Angka	151.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1 SK Angka	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	50.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				300 Orang	100.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	***Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3 Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan***	**100% 89,10% n/aPerusahaan**			**n/a Perusahaan 88,90% 90% 65%**	**308.875.000,00**						**95% 89,00% n/aPerusahaan**	**363.027.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n*	160 Perusahaan 85 Perusahaan 975 Perusahaan			85 Perusahaan 145 Perusahaan 795 Perusahaan	308.875.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	145 Perusahaan 85 Perusahaan 915 Perusahaan	363.027.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				1008 Perusahaan	308.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		363.027.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**15.405.361.000,00**							**60.489.200.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan***	**100%% 35%% n/aOrang 80%%**			**n/a Orang 80% % 100% % 31% %**	**15.405.361.000,00**						**100%% 33%% n/aOrang 80%%**	**60.489.200.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*	9 Dokumen			9 Dokumen	15.405.361.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	9 Dokumen	60.489.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				6 Dokumen	4.305.361.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		6.465.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa														
			Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa				2 Laporan	11.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		54.024.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**200.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**200.000.000,00**							**275.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan*** ***Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran***	**80% n/a%**			**77% n/a %**	**200.000.000,00**						**79% n/a%**	**275.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah transmigran yang ditempatkan*	145 KK			30 KK	200.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	30 KK	275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	58.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi														
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				10 Kepala Keluarga	141.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS						**28.020.145.400,00**							**30.251.656.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28.020.145.400,00**							**30.251.656.200,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**26.820.145.400,00**							**29.051.656.200,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91,00Angka**			**88,50 Angka**	**2.098.646.200,00**						**90,00Angka**	**3.951.087.200,00**	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	39.570.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 Dokumen	40.648.500,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	39.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.648.500,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	13.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 Dokumen	17.567.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.567.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	5 Tahun			1 Tahun	76.652.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 Tahun	188.338.700,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		56.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.102.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.594.700,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.600.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.036.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.213.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.508.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	16.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.600.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	1.688.367.200,00			-	-	-	12 Bulan	1.621.460.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.240.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	215.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		226.270.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.471.103.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.390.950.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	280.556.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	2.083.073.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	109.743.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		155.100.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	311.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		33.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	29.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		131.373.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.310.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	8.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		453.600.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Jumlah tenaga kerja yang kompeten*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten*** ***Persentase peserta magang yang ditempatkan*** ***Persentase peserta pelatihan yang yang terampil*** ***Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi*** ***Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar***	**97%** **80%** **100%** **90%** **n/aOrang**			**n/a Orang** **80%** **60%** **95%** **100%** **90%**	**24.721.499.200,00**						**96%** **80%** **60%** **100%** **90%%** **n/aOrang**	**25.100.569.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang* *Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3* *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n* *Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi*	840 Orang 760 Orang 280 Orang 6180 Orang			50 Orang 210 Orang 1200 Orang 160 Orang	24.671.499.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	210 Orang 200 Orang 70 Orang 1200 Orang	25.000.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				2000 Orang	24.660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.000.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				3 Unit	11.499.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah*	45 Dokumen			10 Dokumen	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	10 Dokumen	100.569.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		100.569.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.200.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja*** ***Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan***	**100%** **35%** **n/aOrang** **80%**			**n/a Orang** **80%** **100%** **31%**	**1.200.000.000,00**						**100%** **33%** **n/aOrang** **80%**	**1.200.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*	9 Dokumen			9 Dokumen	1.200.000.000,00			-	-	-	9 Dokumen	1.200.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		1.200.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						**1.649.280.500,00**							**2.867.915.611,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.649.280.500,00**							**2.867.915.611,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**1.649.280.500,00**							**2.867.915.611,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91,00Angka**			**88,50 Angka**	**1.050.570.000,00**						**90,00Angka**	**1.564.018.611,00**	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	34.170.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 Dokumen	30.346.800,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	34.170.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.346.800,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	10.620.000,00			-	-	-	1 Dokumen	11.616.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	10.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.616.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	5 Tahun			1 Tahun	58.200.900,00			-	-	-	1 Tahun	228.348.350,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.100.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.397.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		109.000.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.548.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.553.564,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.890.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.213.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.937.396,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.041.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.867.390,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	60 Bulan			12 Bulan	11.928.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 Bulan	0,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3.217.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.811.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	771.291.000,00			-	-	-	12 Bulan	967.759.718,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.765.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.135.650,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	121.146.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		171.491.388,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	648.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		794.132.680,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	164.359.800,00			-	-	-	12 Bulan	325.947.743,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	99.146.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.606.187,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	55.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.852.500,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	9.963.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.489.056,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Jumlah tenaga kerja yang kompeten*** ***Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten*** ***Persentase peserta magang yang ditempatkan*** ***Persentase peserta pelatihan yang yang terampil*** ***Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi*** ***Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar***	**97%** **80%** **60%** **100%** **90%** **n/aOrang**			**n/a Orang** **80%** **60%** **95%** **100%** **90%**	**214.160.000,00**						**96%** **80%** **60%** **100%** **90%** **n/aOrang**	**334.297.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang* *Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3* *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n* *Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi*	840 Orang 760 Orang 280 Orang 6180 Orang			50 Orang 210 Orang 1200 Orang 160 Orang	214.160.000,00			-	-	-	210 Orang 200 Orang 70 Orang 1200 Orang	334.297.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				210 Orang	214.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		334.297.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
3.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	***Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3*** ***Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja*** ***Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan*** ***Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan***	**100%** **89,10%** **n/aPerusahaan**			**n/a Perusahaan** **88,90%** **90%** **65%**	**384.550.500,00**						**95%** **89,00%** **n/aPerusahaan**	**969.600.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3* *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n* *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n*	160 Perusahaan 85 Perusahaan 975 Perusahaan			85 Perusahaan 145 Perusahaan 795 Perusahaan	384.550.500,00			-	-	-	145 Perusahaan 85 Perusahaan 915 Perusahaan	969.600.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				15 Perusahaan	384.550.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		969.600.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	J U M L A H							**78.082.606.361,00**							**140.765.823.011,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK						**19.852.175.356,00**							**50.902.484.644,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.852.175.356,00**							**50.902.484.644,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**13.246.175.356,00**							**28.745.486.144,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**87,82-90,01 Angka**			**87,82-90,01 Angka 87,82-90,01 Nilai**	**11.679.442.551,00**						**87,82-90,01 Angka**	**17.738.229.556,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	40Dokumen			8 Dokumen	67.654.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	8Dokumen	139.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	38.151.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		54.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.236.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	19.266.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun*	100Laporan			20 Laporan	8.890.798.403,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	20Laporan	11.206.427.216,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79.00 Orang/ Bulan	8.816.078.403,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		11.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	39.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.369.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		4.077.216,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	31.630.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	5Laporan			1 Laporan	13.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1Laporan	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah*	25Laporan			5 Laporan	146.027.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	5Laporan	983.882.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.214.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.681.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	19.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		69.882.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	51.676.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		109.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor*	5Laporan			1 Laporan	71.884.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1Laporan	785.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	33.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	22.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				5 Unit	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				107 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor*	15Laporan			3 Laporan	1.918.441.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3Laporan	2.283.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		26.620.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	503.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		786.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.412.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.470.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor*	20Laporan			4 Laporan	571.437.348,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	4Laporan	2.300.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.984.548,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		425.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	299.000.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	120.602.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		675.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				75 Unit	64.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik***	**39%**			**38,8 %**	**778.500.000,00**						**38,95%**	**3.869.935.348,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	*Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender*	37OPD			37 OPD	40.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	37OPD	186.237.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				20 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		170.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				37 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		15.507.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi*	17%			12 %	687.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	16%	3.320.698.348,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				4 Orang	487.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		2.211.679.503,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				25 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.109.018.845,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA*	3Organisasi			3 Organisasi	50.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	3Organisasi	363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				3 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		272.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				60 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani***	**meningkat Orang 100%**			**N/A Orang 100 % 95 %**	**717.500.000,00**						**N/AOrang 100%**	**3.139.524.120,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah kebijakan yang tersusun*	5Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1Dokumen	437.268.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		37.268.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				5 Perangkat Daerah	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penerima manfaat*	650Orang			129 Orang	715.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	131Orang	2.237.256.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				1 Orang	715.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		1.772.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				3 Layanan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		464.606.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	*jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi*	3Organisasi			3 Organisasi	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	3Organisasi	465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik*** ***Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik***	**10 Dokumen**			**2 Dokumen** **2 Dokumen**	**2.500.000,00**						**2 Dokumen**	**1.253.000.000,00**	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak*	97,8%			97,8 %	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	97,8%	491.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		91.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga*	4 Lembaga			2 Lembaga	415.000.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Peningkatan kualitas SDM	-	3 Lembaga	481.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				4 Lembaga	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi*	1Lembaga			1 Lembaga	500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1Lembaga	280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Layanan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola***	**3Sistem 100%**			**100 % N/A Sistem**	**1.000.000,00**						**N/ASistem 100%**	**363.000.000,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	*Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak*	10Dokumen			2 Dokumen	1.000.000,00 415.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	2Dokumen	363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		211.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				3 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		151.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Jumlah lembaga layanan yang dilakukan pembinaan Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar***	**100% 50Buah**			**N/A Buah 100 %**	**65.232.805,00**						**100% N/ABuah**	**1.000.000.000,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan*	5Kab/Kota			5 Kab/Kota	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	5Kab/Kota	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				16 perangkat daerah	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak*	210Lembaga			42 Lembaga	64.232.805,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	42Lembaga	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				90 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				6 Kegiatan	59.732.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik Persentase anak korban kekerasan yang dilayani Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi yang diimplementasikan dengan baik***	**100% 409Angka 100%**			**N/A Angka 95 % 100 %**	**2.000.000,00**						**100% N/AAngka 100%**	**1.381.797.120,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	5Dokumen			1 Dokumen	500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah penerima manfaat*	235Orang			46 Orang	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	48Orang	1.259.697.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				39 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		907.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				3 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		352.197.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	5Dokumen			1 Dokumen	500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1Dokumen	62.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		62.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**7.500.000,00**							**2.256.998.500,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***CWR (Child Women Rate) PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)***	**77,5% 250Angka**			**N/A Angka 76 %**	**1.000.000,00**						**77% N/AAngka**	**652.500.000,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Forum yang terfasilitasi*	1Forum			1 Forum	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1Forum	652.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				2.00 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		302.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				7.00 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)***	**56,6%**			**56 %**	**4.500.000,00**						**56,4%**	**972.875.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun*	4Paket			2 Paket	4.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	4Paket	625.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				6 Daerah	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		625.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB*	4Kali			2 Kali	500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	4Kali	347.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5 Organisasi	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		347.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif***	**0,48%**			**0,40 %**	**2.000.000,00**						**0,48%**	**631.623.500,00**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan*	5Jenis			5 Jenis	2.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	5Jenis	631.623.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan														
			Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan				15 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		73.205.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana														
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				150 Kelompok	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		122.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)														
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				15 Kelompok	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		72.566.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**6.598.500.000,00**							**19.900.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan***	**"Cak Per = 0,063, Cakupan Anak = 0,060"Angka**			**"Cak Per = 0,054, Cakupan Anak = 0,044" Angka**	**6.598.500.000,00**						**"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056"Angka**	**19.900.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima*	160kelompok			30 kelompok	6.598.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	40kelompok	19.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09.0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan														
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya				250 Orang	3.598.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		11.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				2 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		8.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	J U M L A H							**19.852.175.356,00**							**50.902.484.644,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						**90.155.798.340,00**							**102.721.800.513,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**88.822.185.640,00**							**98.879.065.823,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**87.618.575.640,00**							**94.405.865.823,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**95,89Angka 94,24Angka**			**n/a Angka 95,69 Angka**	**47.989.405.390,00**						**95,79Angka n/aAngka**	**50.779.246.491,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	49.343.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	134.445.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		54.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4.343.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		5.445.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	100%			100 %	44.233.703.903,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	45.039.549.112,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				369 Orang/ Bulan	44.156.774.303,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		44.889.389.112,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	56.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		114.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.359.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	17.989.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	52.800.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	82.038.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	52.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		82.038.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	405.145.179,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	1.250.660.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.333.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		57.432.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.963.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		152.527.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	27.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		174.063.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		104.863.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		11.749.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	266.965.929,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		750.026.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	2.865.387.942,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	2.837.973.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		6.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.167.223.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		818.084.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.696.464.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		2.013.569.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	383.025.166,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	1.434.579.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		21.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95 Unit	205.428.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.054.426.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				145 Unit	162.596.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		359.103.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup*** ***Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup***	**100%** **30%**			**n/a %** **80%**	**295.781.000,00**						**n/a%** **n/a%**	**0,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi*	3 Dokumen			3 Dokumen	245.781.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	0Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokuman	245.781.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Terlaksananya penyusunan KLHS Provinsi*	3 dokumen Dokumen			0 Dokumen	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	0Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan***	**5,1% 91200 parameter uji 100%**			**15200 parameter uji 1,7% n/a %**	**1.007.936.250,00**						**3,9% 20830 parameter uji n/a%**	**2.713.548.200,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim*	38 Dokumen			8 Dokumen	941.327.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	8 Dokumen	2.237.304.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3.00 Dokumen	223.414.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		261.196.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	103.851.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		133.308.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	614.061.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.842.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau*	50 titik		50 titik		66.609.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	50 titik	476.244.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				50 Titik	66.609.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		476.244.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3*** ***Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi***	**100%** **100%**			**n/a %** **100 %**	**10.860.000,00**						**n/a%** **100%**	**94.853.000,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3*	5 Dokumen			2 Dokumen	10.860.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	4 Dokumen	94.853.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	10.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		94.853.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup*** ***Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi***	**85,41%** **87,5%**			**n/a %** **75,68 %**	**200.607.800,00**						**82,16%** **n/a%**	**355.100.000,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	158 Usaha/Kegiatan			140 Usaha /Kegiatan	200.607.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	152 Usaha/Kegiatan	355.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	85.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		97.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				32 Orang	13.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				140 Badan Usaha	102.227.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		169.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup* *Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya***	**100% 21,05%**			**n/a % 34% %**	**299.986.000,00**						**76% n/a%**	**130.622.500,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat*	250 Entitias			85 Entitias	299.986.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	190 Entitias	130.622.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				45 Lembaga	299.986.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		130.622.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup*** ***Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional***	**100%** **100%**			**n/a %** **35 %**	**100.000.000,00**						**76,67%** **n/a%**	**140.680.000,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	119Entitas			44 Entitas	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	94Entitas	140.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				30 Entitas	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		140.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)*** ***Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional***	**100%** **92,86%**			**N/A %** **100 %**	**37.713.999.200,00**						**100%** **N/A%**	**40.191.815.632,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional*	100%			100 %	37.713.999.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	40.191.815.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional				350 Ton	24.477.646.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		27.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional														
			Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				13 Unit	13.032.654.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		12.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan				350 Ton	117.287.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		491.815.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				3 Unit	86.411.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**756.255.000,00**							**3.973.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta***	**30,14% 7 Entitas**			**n/a Entitas 0,45%**	**756.255.000,00**						**24,92% n/aEntitas**	**3.973.200.000,00**	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)*	1Objek			1 Objek	98.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	1Objek	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	98.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	100%			100 %	507.755.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	173.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram														
			Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan				2 Objek	507.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		173.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah kalurahan/keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau*	10Desa/Kelurahan			4 Desa/Kelurahan	150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	8Desa/Kelurahan	3.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		3.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.333.612.700,00**							**3.842.734.690,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.333.612.700,00**							**3.842.734.690,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase kesesuaian pengelolaan hutan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha***	**100% 69,33% 5% 82,375Angka 100%**			**80,65 Angka 5 % N/A % 23,53 % 84,21 %**	**929.861.400,00**						**70,6% N/A% 5% 81,925Angka 94,74%**	**2.391.835.590,00**	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	1279Ha			226 Ha	299.413.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	326Ha	1.478.570.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		216.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				200 Ha	106.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		524.070.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				6 Ha	94.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		580.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				5 Unit	77.638.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		158.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi*	97%			92,42 %	374.850.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	96,95%	545.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				15581 Ha	357.850.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*	28Unit Manajemen			28 Unit Manajemen	75.332.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	28Unit Manajemen	244.260.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun														
			Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah				18.00 Unit Managemen	44.997.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	30.335.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		174.260.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit*	100%			100 %	180.264.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	124.005.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	18.132.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		22.740.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih														
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	9.673.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		12.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit														
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan				1 Sertifikat	12.653.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		14.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	16.318.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		20.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Sumber Benih yang Dibangun				5 Ha	123.486.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		53.335.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	***Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi*** ***Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi***	**69Indeks 68,53Angka**			**66 Indeks N/A Angka**	**264.911.000,00**						**68 Indeks N/AAngka**	**982.100.000,00**	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	*Luas hutan konservasi yang dikelola* *Luas hutan konservasi yang dikelola*	634,10Ha 634,10Ha			634,10 Ha 634,10 Ha	218.810.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	634,10Ha 634,10Ha	812.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi														
			Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi				1 Operasi	99.493.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		172.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi														
			Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi				6 Ha	105.117.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		359.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				5 Desa	14.198.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		280.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	*Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola* *Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola*	3Kawasan 3Kawasan			3 Kawasan 3 Kawasan	46.101.000,00			-	-	-	3Kawasan 3Kawasan	170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0003	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah				1 Dokumen	46.101.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya*** ***Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)***	**22,55%** **22,17%**			**N/A %** **19,96 %**	**138.840.300,00**						**21,69%** **N/A%**	**468.799.100,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat*	25Kelompok			10 Kelompok	138.840.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	20Kelompok	468.799.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				40 Orang	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		260.469.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	93.840.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		208.329.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**88.822.185.640,00**							**98.879.065.823,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**447.355.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang*** ***Persentase capaian tahapan produk hukum kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta***	**85%** **30 Dokumen**			**n/a Dokumen** **85%**	**447.355.000,00**						**n/a%** **n/aDokumen**	**500.000.000,00**	
	-	-	*Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan*	-			1 Laporan	447.355.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	-	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				1 Dokumen	447.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA						**4.760.481.660,00**							**68.668.932.721,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.010.063.100,00**							**6.381.612.879,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**1.010.063.100,00**							**6.381.612.879,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**95,89Angka 94,24Angka**			**n/a Angka 95,69 Angka**	**1.010.063.100,00**						**95,79Angka n/aAngka**	**6.381.612.879,00**	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	100%			100 %	35.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	114.160.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		114.160.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	15.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	82.038.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		82.038.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	39.361.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	1.238.911.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.164.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		57.432.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.272.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		152.527.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.527.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		174.063.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.836.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		104.863.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		750.026.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	599.804.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	2.837.973.999,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		6.320.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	158.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		818.084.200,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	440.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		2.013.569.799,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	320.497.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	2.108.529.880,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	115.289.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.054.426.680,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14.00 Unit	7.568.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		359.103.200,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	197.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		695.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.750.418.560,00**							**62.287.319.842,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**3.750.418.560,00**							**62.287.319.842,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase kesesuaian pengelolaan hutan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha***	**100% 69,33% 5% 82,375Angka 100%**			**80,65 Angka 5 % N/A % 23,53 % 84,21 %**	**3.750.418.560,00**						**70,6% N/A% 5% 81,925Angka 94,74%**	**62.287.319.842,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH*	6Dokumen			3 Dokumen	185.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	5Dokumen	253.862.500,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		253.862.500,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan*	15,581Ha			15,581 Ha	3.130.882.560,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	15,581Ha	60.606.569.792,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	114.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		2.333.250.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	2.993.982.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		58.178.319.792,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				37.00 Dokumen	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		70.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				8 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		25.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi*	97%			92,42 %	434.536.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	96,95%	1.426.887.550,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				15581 Ha	434.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.426.887.550,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	JUMLAH							**94.916.280.000,00**							**171.390.733.234,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**143.704.215.326,00**							**220.860.364.975,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31.409.442.000,00**							**34.314.490.833,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**31.409.442.000,00**							**34.314.490.833,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis*** ***1. Presentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (KTB dan Bus)*** ***2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan*** ***2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis*** ***3. Persentase Kendaraan yang Terlayani di tempat khusus parkir per hari*** ***3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis*** ***4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis*** ***4. Presentase Pengendalian dan Pengawasan*** ***5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis***	**59,00%** **54,63%** **11,52%** **95,00%** **100%** **0,00%** **11,52%** **74,73%** **12,50%**			**18,00 %** **N/A %** **N/A %** **13,89 %** **N/A %** **43,75 %** **100,00 %** **N/A %** **65,59 %**	**31.409.442.000,00**						**51,50%** **43,52%** **N/A%** **92,50%** **100%** **N/A%** **N/A%** **71,68%** **N/A%**	**34.314.490.833,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	100%			100 %	31.409.442.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100%	34.314.490.833,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				16.00 Dokumen	31.409.442.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN, DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		34.314.490.833,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**112.294.773.326,00**							**186.545.874.142,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**112.294.773.326,00**							**186.545.874.142,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**94,69angka 94,62angka**			**94,39 angka N/A angka**	**17.128.153.289,00**						**94,59angka N/Aangka**	**25.989.898.354,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	141.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		64.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	14.378.437.189,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	15.696.489.428,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/ Bulan	14.257.519.989,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.477.496.578,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	89.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		163.052.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	13.897.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.765.825,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		38.175.025,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	2.954.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	7.731.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	2.954.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.731.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran*	100%			100 %	354.343.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	949.265.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		237.776.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	6.334.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		37.734.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		137.132.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.240.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.205.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	261.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		485.617.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran*	100%			100 %	1.245.541.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	5.930.769.576,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.356.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	495.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		891.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.725.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		246.874.620,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	741.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.783.088.956,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	1.106.877.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	3.264.142.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	507.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		813.767.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	202.920.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		721.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	345.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		792.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		935.805.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Ketertiban LLAJ*** ***Persentase Ketertiban LLAJ [deleted]*** ***Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja*** ***Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja [deleted]*** ***Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP)*** ***Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)*** ***Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B*** ***Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan*** ***Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan*** ***Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan*** ***Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS*** ***Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS*** ***Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B*** ***Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi*** ***Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi*** ***Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY*** ***Presentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang beroperasi*** ***Presentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan*** ***Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa***	**48,06%** **85,98%** **82,00%** **1,00%** **50,00%** **42,86%** **72,39%** **90,35%** **86,49%** **70,00%** **64,68%** **2,85%** **100,00%** **45,52%** **24,71%** **0,78%** **66,77%**			**74,39 %** **74,39 %** **N/A %** **N/A %** **N/A %** **78,07 %** **67,57 %** **10,00 %** **N/A %** **22,25 %** **N/A %** **36,39 %** **N/A %** **42,28 %** **N/A %** **56,55 %** **N/A %** **N/A %** **N/A %**	**95.166.620.037,00**						**45,93%** **85,62%** **N/A%** **N/A%** **N/A%** **N/A%** **N/A%** **87,72%** **82,43%** **50,00%** **64,49%** **N/A%** **80,50%** **N/A%** **N/A%** **N/A%** **56,64%**	**160.555.975.788,00**	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	*Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY*	100%			100 %	250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100%	1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1.00 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia*	100%			100 %	4.223.869.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100%	14.083.869.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				65 Unit	1.671.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		7.975.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				113.00 Unit	552.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		582.399.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				468 Unit	1.999.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		5.526.220.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	*Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY*	100%			100 %	2.670.294.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100%	12.912.940.409,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				20 Laporan	50.294.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.348.068.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				3 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.145.971.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		141.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				63 Unit	2.240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		10.235.901.109,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	*Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi*	100%			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100%	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek*	100%			100 %	87.872.456.237,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100%	131.840.451.979,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				5 Laporan	1.287.394.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.720.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				95 Unit	86.585.061.837,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		130.120.451.979,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Penyediaan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan*	100%			100 %	20.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100%	543.713.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		543.713.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyusunan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan dalam Kota dalam Provinsi*	100%			100 %	120.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100%	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN						**4.839.226.674,00**							**550.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.839.226.674,00**							**550.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**4.839.226.674,00**							**550.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**94,69angka 94,62angka**			**94,39 angka N/A angka**	**4.387.958.674,00**						**94,59angka N/Aangka**	**0,00**	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	44.952.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	39.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.490.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran*	100%			100 %	111.203.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	11.783.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	15.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	37.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran*	100%			100 %	3.741.369.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	224.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	150.941.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	3.361.428.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	488.433.374,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	126.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	78.913.374,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	282.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Ketertiban LLAJ*** ***Persentase Ketertiban LLAJ [deleted]*** ***Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja*** ***Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja [deleted]*** ***Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP)*** ***Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)*** ***Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B*** ***Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan*** ***Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan*** ***Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan*** ***Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS*** ***Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS*** ***Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B*** ***Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi*** ***Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi*** ***Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY*** ***Presentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang beroperasi*** ***Presentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan*** ***Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa***	**48,06%** **85,98%** **82,00%** **1,00%** **50,00%** **42,86%** **72,39%** **90,35%** **86,49%** **70,00%** **64,68%** **2,85%** **100,00%** **45,52%** **24,71%** **0,78%** **66,77%**			**74,39 %** **74,39 %** **N/A %** **N/A %** **N/A %** **78,07 %** **67,57 %** **10,00 %** **N/A %** **22,25 %** **N/A %** **36,39 %** **N/A %** **42,28 %** **N/A %** **56,55 %** **N/A %** **N/A %** **N/A %**	**451.268.000,00**						**45,93%** **85,62%** **N/A%** **N/A%** **N/A%** **N/A%** **N/A%** **87,72%** **82,43%** **50,00%** **64,49%** **N/A%** **80,50%** **N/A%** **N/A%** **N/A%** **56,64%**	**550.000.000,00**	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	*Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B*	100 %			100 %	451.268.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100 %	550.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				7 Unit	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		550.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	311.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		0,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	J U M L A H							**148.543.442.000,00**							**221.410.364.975,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**40.059.859.200,00**							**78.350.883.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**40.059.859.200,00**							**78.350.883.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**13.119.059.200,00**							**25.183.003.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**84.5angka**			**83 angka**	**10.742.088.000,00**						**84angka**	**16.959.363.000,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksanakanya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100%			100 %	30.528.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	76.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	21.086.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	9.441.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*	100%			100 %	9.229.148.600,00			-	-	-	100%	14.461.870.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	9.161.456.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.413.613.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	53.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.990.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	9.292.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		27.267.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	100%			100 %	246.297.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	434.603.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.897.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.346.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		39.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.166.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		33.762.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	179.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		328.585.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana , prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya*	100%			100 %	77.205.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	377.966.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	39.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	37.405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		127.966.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor "*	100%			100 %	851.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.202.185.179,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	286.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		554.894.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	565.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		647.291.179,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya pemeliharaaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan "*	100%			100 %	307.509.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	406.738.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	22.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16.00 Unit	130.509.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		142.759.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	115.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		183.013.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	40.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.966.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu***	**88%**			**85 %**	**2.326.971.200,00**						**87%**	**4.458.000.000,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi*	100%			100 %	2.326.971.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%%	4.458.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	374.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		695.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	428.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		783.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	813.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	710.863.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Indeks Penerapan Audit TIK*** ***Indeks Penerapan Manajemen SPBE***	**1.38indeks 2indeks**			**1.35 indeks 1.91 indeks**	**50.000.000,00**						**1.37indeks 1.95indeks**	**3.765.640.000,00**	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*	100%			100 %	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	3.325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				269 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*	100%			100 %	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	440.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		440.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**25.000.000,00**							**5.517.880.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY***	**633skor**			**630 skor**	**25.000.000,00**						**632skor**	**5.517.880.000,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*	100%			100 %	25.000.000,00			-	-	-	100%	5.517.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.517.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**26.915.800.000,00**							**47.650.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi***	**2.55skor**			**2.52 skor**	**26.915.800.000,00**						**2.54skor**	**47.650.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	100%			100 %	26.915.800.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	47.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				1 Objek	26.915.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		47.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							**40.059.859.200,00**							**78.350.883.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						**199.087.293.824,00**							**137.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**199.087.293.824,00**							**137.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**13.399.509.424,00**							**137.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**85angka**			**85 angka**	**9.113.614.514,00**						**85angka**	**105.000.000,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	19.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	105.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	6.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	7.685.193.514,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/ Bulan	7.612.333.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	69.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	13.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	162.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	6.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	1.069.396.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	376.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	692.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	157.675.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17.00 Unit	117.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)***	**n/a% 25unit**				**16 unit n/a %**	**8.000.000,00**						**n/a% 22unit**	**0,00**	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*	24izin			15 izin	8.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	22izin	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				1.00 Unit Usaha	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***"Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) " Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)***	**32koperasi n/a%**			**26 koperasi n/a %**	**10.000.000,00**						**30koperasi n/a%**	**32.000.000,00**	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi*	13koperasi			8 koperasi	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	13koperasi	32.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				3 Unit Usaha	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		32.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya Presentase KSP/USP yang meningkat kualitasnya***	**47koperasi n/a%**			**32 koperasi n/a %**	**2.450.000,00**						**42koperasi n/a%**	**0,00**	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatn koperasinya yang wilayah keanggotaanya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi*	95koperasi			95 koperasi	2.450.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	95koperasi	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				35 Unit Usaha	2.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM***	**n/aunit usaha 100 %**			**n/a unit usaha 94 %**	**1.000.000,00**						**n/aunit usaha 98 %**	**0,00**	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah oabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi*	725orang			725 orang	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	725orang	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				10.00 Orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***jumlah koperasi modern Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi***	**94koperasi n/akoperasi**			**n/a koperasi 88 koperasi**	**462.140.000,00**						**92koperasi n/akoperasi**	**0,00**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*	60koperasi			60 koperasi	462.140.000,00			-	-	-	60koperasi	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				3.00 Unit Usaha	462.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif) "Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) "***	**25002UMKM 2.200 orang** n/aorang			**24630 UMKM n/a orang 550 orang**	**3.679.000.000,00**						**24877UMKM 550 orang** n/aorang	**0,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi*	835orang			725 orang	3.679.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	835orang	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				5.00 Unit Usaha	1.227.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				2640 Orang	2.452.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya***	**n/aUMKM**			**n/a UMKM**	**123.304.910,00**						**n/aUMKM**	**0,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)*	1095unit usaha			850 unit usaha	123.304.910,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1095unit usaha	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				25 Unit Usaha	122.304.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				5.00 Orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**185.687.784.400,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah desa preneur Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.***	**88,32indeks 101angka 2578 KUMK Mangka**			**83,48 indeks 71 angka 2278 KUMKM angka**	**185.687.784.400,00**						**86,74indeks 91angka 2478 KUMK Mangka**	**0,00**	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya*	100angka			100 angka	148.478.284.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100angka	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	138.348.284.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 Objek	10.130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)*	100angka			100 angka	21.935.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100angka	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				3450 Unit	21.935.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah desa prenuer yang meningkat statusnya*	150desa			30 desa	15.274.000.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-	30desa	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				1 Laporan	15.274.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN, DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	J U M L A H							**199.087.293.824,00**							**137.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**10.245.487.336,00**							**13.829.001.362,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.245.487.336,00**							**13.829.001.362,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**10.245.487.336,00**							**13.829.001.362,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**88,60skor**			**88,25 skor**	**9.882.146.436,00**						**88,50skor**	**11.369.000.162,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi*	9dokumen			9 dokumen	24.065.251,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	9dokumen	66.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,00 Dokumen	12.002.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	5.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	6.583.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan*	15dokumen			3 dokumen	8.461.381.721,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3dokumen	8.975.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/ Bulan	8.428.183.721,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	33.035.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	163.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1laporan			1 laporan	10.766.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1laporan	17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.766.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah*	80paket/dokumen/laporan			16 paket/dokumen/laporan	210.256.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	16paket/dokumen/laporan	814.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.210.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.353.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		97.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	220.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	157.408.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.328.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang (Unit/Paket)*	52unit/paket			14 unit/paket	3.046.600,00			-	-	-	9unit/paket	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1.188.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.271.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	209.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	378.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	15laporan			3 laporan	790.622.934,00			-	-	-	3laporan	778.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11.156.160,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	133.320.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		114.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	646.146.774,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)*	840unit			156 unit	382.007.080,00			-	-	-	167 unit	537.000.162,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33.967.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		162,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	134.791.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		166.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	18.430.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	179.118.480,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Jumlah izin Usaha Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**6lokus 88,60angka n/aizin**			**n/a izin 1 lokus 88,25 angka**	**150.000,00**						**2lokus 88,50angka n/aizin**	**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Jumlah Dokumen Peta Potensi*	8dokumen			1 dokumen	150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	2dokumen	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Kepeminatan Investasi Nilai Rencana Investasi (Rp Trilyun)***	**n/aRp 16buah**			**13 buah n/a Rp**	**150.000,00**						**n/aRp 15buah**	**650.000.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal*	10dokumen			2 dokumen	150.000,00			-	-	-	2dokumen	650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**87,25skor**			**86,5 skor**	**242.524.900,00**						**87,00skor**	**485.001.200,00**	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani*	9.244 pelaku usaha/kegiatan usaha			1700 pelaku usaha/kegiatan usaha	242.524.900,00			-	-	-	2010pelaku usaha/kegiatan usaha	485.001.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	41.883.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	180.688.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		420.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	19.953.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM Jumlah Proyek yang patuh memberikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)***	**n/abuah 1186 kegiatan usaha**			**968 kegiatan usaha n/a buah**	**50.295.000,00**						**n/abuah 1109 kegiatan usaha**	**975.000.000,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*"Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha yang dipantau, di bina, dan di awasi" Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal*	38kali 420kegiatan			n/a kegiatan 38 kali	50.295.000,00			-	-	-	38 kali n/akegiatan	975.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan usaha	50.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				10 Pelaku Usaha	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		870.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah data yang tersaji Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan***	**100% n/ajenis**			**n/a jenis 85 %**	**70.221.000,00**						**95% n/ajenis**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.*	5jenis			5 jenis	70.221.000,00			-	-	-	5jenis	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5.00 Dokumen	70.221.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**10.245.487.336,00**							**13.829.001.362,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN						**334.016.761.349,00**							**1.109.754.964.016,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**334.016.761.349,00**							**1.109.754.964.016,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**334.016.761.349,00**							**1.109.754.964.016,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90angka**			**90 angka**	**25.816.681.349,00**						**90angka**	**45.008.611.926,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6dokumen			6 dokumen	900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	6dokumen	4.019.184,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,00 Dokumen	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.019.184,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	23.440.620.149,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	28.517.693.769,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2964 Orang/ Bulan	23.439.720.149,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		28.267.879.233,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6000 Dokumen	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		206.543.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.276.212,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.995.324,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	92.928.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		92.928.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	1.975.224.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	9.437.371.702,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	618.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.049.974.702,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.357.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.387.397.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	399.637.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	6.956.599.271,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.430.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.387.397.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	359.206.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		569.202.271,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan*** ***Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n*** ***Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis*** ***Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan*** ***Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni*** ***Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	**7objek 9% 18kegiatan 18kegiatan 23% sangat baikindeks sangat baikindeks 45desa 100% 10%**			**baik indeks baik indeks 18 kegiatan 18 kegiatan N/A objek 35 desa 14 % 10 % 7.5 % 100 %**	**308.200.080.000,00**						**N/Aobjek 8.5% 18kegiatan 18kegiatan 20% sangat baikindeks sangat baikindeks 45desa 100% 10%**	**1.064.746.352.090,00**	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum*	25 laporan			21 laporan	16.345.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	25 laporan	19.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				8 Dokumen	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		6.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra				12 Laporan	6.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		7.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				40 Unit	4.845.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		5.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan*	1Objek 288 Objek			256 Objek	22.100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	1Objek 277 Objek	33.592.929.040,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				75 Objek	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		17.523.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		7.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				11 Objek	7.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		8.369.929.040,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya*	821 unit 1Unit			523 unit	1.200.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	720 unit 1Unit	1.322.640.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				207 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.322.640.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	*Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan*	19dokumen 22dokumen 5kab/kota			N/A dokumen 22 dokumen 5 kab/kota	7.800.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	N/Adokumen 22dokumen 5kab/kota	429.320.147.050,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan				3 Dokumen	1.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		421.730.147.050,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)*				4 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		440.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya				15 Dokumen	6.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya* *Jumlah Hasil Fasilitasi Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	13kegiatan 31Lokasi 13laporan			13 kegiatan N/A laporan	247.899.080.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	13kegiatan 7Lokasi N/Alaporan	568.071.636.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya														
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				76 Desa	13.437.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		287.885.818.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				9 Lembaga	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		38.004.318.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				2 Laporan	2.584.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		4.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan														
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				36 Orang	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		2.750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				1 Laporan	4.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		5.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0006	Gelar Budaya Yogyakarta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				10 Laporan	8.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		9.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				8 Dokumen	5.715.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		6.451.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi														
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				340 Orang	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		3.080.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				14 Laporan	9.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		11.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0010	Selendang Sutera														
			Jumlah Laporan Selendang Sutera				1 Laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni														
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	8.262.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		8.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya														
			Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya				2 Laporan	178.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		185.350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				6 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		3.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya*	-			523 unit	12.856.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	-	13.189.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				316 Unit	12.856.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		13.189.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO						**19.148.146.671,00**							**31.734.099.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.148.146.671,00**							**31.734.099.900,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**19.148.146.671,00**							**31.734.099.900,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90angka**			**90 angka**	**3.448.146.671,00**						**90angka**	**0,00**	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	300.000,00			-	-	-	100%	0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	300.000,00			-	-	-	100%	0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	3.408.739.671,00			-	-	-	100%	0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1.426.021.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1.982.717.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	38.807.000,00			-	-	-	100%	0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	38.807.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan*** ***Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n*** ***Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis*** ***Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan*** ***Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni*** ***Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	**7objek 9% 18kegiatan 18kegiatan 23% sangat baikindeks sangat baikindeks 45desa 100% 10%**			**baik indeks baik indeks 18 kegiatan 18 kegiatan N/A objek 35 desa 14 % 10 % 7.5 % 100 %**	**15.700.000.000,00**						**N/Aobjek 8.5% 18kegiatan 18kegiatan 20% sangat baikindeks sangat baikindeks 45desa 100% 10%**	**31.734.099.900,00**	
	2.22.08.5.03	*Penguatan museum Sonobudoyo*	*Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo*	-			2 laporan	15.700.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	-	31.734.099.900,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.08.5.03.02	Pengembangan Museum Sonobudoyo														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan				1 Unit	10.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		25.000.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.08.5.03.01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo														
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola				1 Unit	5.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		6.734.099.900,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
		TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA						**18.552.503.300,00**							**25.102.460.130,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.552.503.300,00**							**25.102.460.130,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**18.552.503.300,00**							**25.102.460.130,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**90angka**			**90 angka**	**1.552.503.300,00**						**90angka**	**0,00**	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	300.000,00			-	-	-	100%	0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	300.000,00			-	-	-	100%	0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	1.485.117.600,00			-	-	-	100%	0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	304.509.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1.180.608.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	66.785.700,00			-	-	-	100%	0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	66.785.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman*** ***Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan*** ***Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n*** ***Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis*** ***Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan*** ***Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni*** ***Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	**7objek** **9%** **18kegiatan** **18kegiatan** **23%** **sangat baikindeks** **sangat baikindeks** **45desa** **100%** **10%**			**baik indeks** **baik indeks** **18 kegiatan** **18 kegiatan** **N/A objek** **35 desa** **14 %** **10 %** **7.5 %** **100 %**	**17.000.000.000,00**						**N/Aobjek** **8.5%** **18kegiatan** **18kegiatan** **20%** **sangat baikindeks** **sangat baikindeks** **45desa** **100%** **10%**	**25.102.460.130,00**	
	2.22.08.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun*	13event			13 event	17.000.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	13event	25.102.460.130,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	17.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		25.102.460.130,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	J U M L A H							**371.717.411.320,00**							**1.166.591.524.046,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						**35.099.737.277,00**							**33.115.592.460,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35.099.737.277,00**							**33.115.592.460,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**7.282.506.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi***	**3000dokumen**			**3000 dokumen**	**7.282.506.000,00**						**3000dokumen**	**0,00**	
	2.22.08.5.02	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	*Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi*	2jenis			2 jenis	7.282.506.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	2jenis	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.22.08.5.02.0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten				12000 Dokumen	4.225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.22.08.5.02.0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya														
			Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya				72510 Unit	3.057.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**27.701.506.377,00**							**31.382.328.500,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91,5angka**			**90,5 angka**	**19.003.737.508,00**						**91,5angka**	**24.108.494.840,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*	10Dokumen 7Dokumen			N/A Dokumen 10 Dokumen	1.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	10DokumenN/ADokumen	93.212.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		49.335.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.522.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.355.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan administrasi keuangan*	14laporan			14 laporan	15.954.445.908,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	14laporan	19.830.508.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	15.904.330.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.830.508.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.032.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku*	4laporan			4 laporan	22.885.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4laporan	24.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	22.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional*	4Dokumen			4 Dokumen	3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4Dokumen	43.087.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		43.087.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah*	6jenis			6 jenis	26.153.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	6jenis	1.493.690.780,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.369.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		54.694.860,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.329.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		49.087.720,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.608.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.262.971.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	4unit			4 unit	2.736.000,00			-	-	-	4unit	1.482.899.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.482.899.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	3jenis			3 jenis	2.917.180.000,00			-	-	-	3jenis	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.515.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.400.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	16unit			16 unit	76.212.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	16unit	1.140.346.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	66.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		394.514.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		83.930.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.182.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		441.901.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan***	**57perpustakaan 15perpustakaan 16%**			**N/A perpustakaan 48 perpustakaan 14,50 %**	**8.688.168.869,00**						**54perpustakaan N/Aperpustakaan 15,50%**	**6.657.245.660,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah perpustakaan ber-SNP* *Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	50perpustakaan 575perpustakaan			560 perpustakaan N/A perpustakaan	158.641.069,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	N/Aperpustakaan 570perpustakaan	3.592.257.960,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		516.480.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		419.369.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				1 Perpustakaan	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		211.689.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				25 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		292.957.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		120.956.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	156.391.069,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		2.030.805.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat* *jumlah sosialisasi budaya baca*	48kali 48kali			48 kali N/A kali	8.529.527.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	48 kali N/Akali	3.064.987.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				222 Lokus	8.377.634.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		2.914.669.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				3 Orang	1.893.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		150.318.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				8 Perpustakaan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan*** ***Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan***	**2535 eksemplar 2550eksemplar**			**N/A eksemplar 2520 eksemplar**	**9.600.000,00**						**2530 eksemplar N/Aeksemplar**	**616.588.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	*jumlah karya cetak dan karya rekam baru* *Jumlah KCKR daerah yang dihimpun*	2500eksemplar 2.500 eksemplar			N/A eksemplar 2.500 eksemplar	375.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	N/Aeksemplar 2.500 eksemplar	441.744.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				500 Eksemplar	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		441.744.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	*jumlah judul yang tercantum dalam KID* *jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah*	2500 entri 6terbitan			2500 entri N/A terbitan	8.625.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	2500 entri N/Aterbitan	118.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				500 Entry	6.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		74.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	2.059.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		44.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar*	10eksemplar			10 eksemplar	600.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	10eksemplar	56.544.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				4 Eksemplar	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		56.544.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**115.724.900,00**							**1.733.263.960,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi*** ***Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip***	**nilai : 97,5angka 8000arsip**			**N/A arsip nilai : 97,5 angka**	**115.724.900,00**						**nilai : 97,5angka N/Aarsip**	**1.733.263.960,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip*	43%			41,50 %	113.724.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	42,50%	631.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				1 Laporan	99.974.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		531.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				100 Arsip	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				2500 Arsip	13.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip*	44%			42,50 %	1.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	43,50%	453.648.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				50 Arsip	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		453.648.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN*	21%			19,50 %	1.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	20,50%	648.015.120,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				100 Pengguna	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		360.333.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		287.681.520,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN						**2.188.003.464,00**							**11.432.269.965,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.188.003.464,00**							**11.432.269.965,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**2.188.003.464,00**							**11.432.269.965,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91,5angka**			**90,5 angka**	**1.796.326.464,00**						**91,5angka**	**4.694.435.865,00**	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan administrasi keuangan*	14laporan			14 laporan	32.922.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	14laporan	30.600.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32.922.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.600.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku*	4laporan			4 laporan	15.298.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4laporan	0,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	15.298.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah*	6jenis			6 jenis	7.217.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	6jenis	94.868.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.369.500,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.453.500,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.813.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		67.232.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	3jenis			3 jenis	1.606.470.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3jenis	1.847.603.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		900.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.603.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.843.703.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	16unit			16 unit	134.419.464,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	16unit	2.721.364.865,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	28.156.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		231.177.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.237.500,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		114.588.565,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	102.638.214,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.027.624.800,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		332.737.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan***	**57perpustakaan 15perpustakaan 16%**			**N/A perpustakaan 48 perpustakaan 14,50 %**	**389.652.000,00**						**54perpustakaan N/Aperpustakaan 15,50%**	**5.909.500.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	50perpustakaan 575perpustakaan			560 perpustakaan N/A perpustakaan	389.652.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	-	N/Aperpustakaan 570perpustakaan	5.909.500.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	388.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	-		5.375.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		534.500.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan***	**2535 eksemplar 2550eksemplar**			**N/A eksemplar 2520 eksemplar**	**2.025.000,00**						**2530 eksemplar N/Aeksemplar**	**828.334.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	*jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan* *jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan*	50eksemplar 800lembar			N/A eksemplar 650 lembar	2.025.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	-	N/Aeksemplar 750lembar	828.334.100,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				25 Orang	1.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	-		343.998.500,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Eksemplar	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		484.335.600,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	J U M L A H							**37.287.740.741,00**							**44.547.862.425,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**43.289.736.996,00**							**57.008.245.491,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**543.711.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**543.711.000,00**							**1.250.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen) Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)***	**100,0 % 46,11%**			**N/A % 42,5 %**	**543.711.000,00**						**87,5 % N/A%**	**1.250.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)*	100%			100 %	543.711.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	100%	1.250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				5 Dokumen	543.711.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.111.855.100,00**							**22.653.547.510,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**9.111.855.100,00**							**22.653.547.510,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase desa maritim dalam tahap mandiri*** ***Persentase desa maritim dalam tahap mandiri*** ***[deleted]*** ***Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)*** ***Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya*** ***Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik*** ***Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi***	**n/a%** **100%** **100%** **55%** **45%**			**30 %** **30 %** **n/a %** **40 %** **100 %** **40 %**	**9.111.855.100,00**						**n/a%** **100%** **80%** **48%** **40%**	**22.653.547.510,00**	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)*	1Tahun			1 Tahun	9.111.855.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1Tahun	22.653.547.510,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari														
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				4 Objek	9.111.855.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		22.653.547.510,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**33.634.170.896,00**							**33.104.697.981,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**33.634.170.896,00**							**33.104.697.981,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)***	**89,20skor**			**88,90 skor**	**20.394.073.196,00**						**89,10skor**	**19.094.697.981,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)*	100%			100 %	50.607.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	58.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	32.161.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.350.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.475.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	11.339.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*	100%			100 %	18.157.058.160,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	18.809.197.981,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				152 Orang/ Bulan	18.080.498.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.600.097.981,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	55.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		153.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		46.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)*	100%			100 %	13.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	52.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		52.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "*	100%			100 %	274.567.400,00			-	-	-	100%	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.567.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*	100%			100 %	989.000,00			-	-	-	100%	175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	833.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	100%			100 %	1.176.855.044,00			-	-	-	100%	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.729.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	410.002.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	761.122.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	100%			100 %	720.796.492,00			-	-	-	100%	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	73.828.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	576.058.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	40.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	***"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)***	**33% 100%**			**63 % N/A %**	**40.000.000,00**						**N/A% 96%**	**75.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)*	3lokasi			2 lokasi	40.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	3lokasi	75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				5670.87 Ha	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor) Produksi perikanan tangkap (ton)***	**83,00skor 7754ton**			**81,50 skor 7109 ton**	**90.000.000,00**						**82,50skor 7584ton**	**175.000.000,00**	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)*	10angka			10 angka	50.000.000,00			-	-	-	10angka	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*"Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) "*	2angka			2 angka	40.000.000,00			-	-	-	2angka	75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Produksi perikanan budidaya (ton)***	**9ton 98200ton 35,42%**			**34,82 % 9 ton 97468 ton**	**6.106.000.000,00**						**9ton 98136ton 35,22%**	**6.600.000.000,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)*	5angka			5 angka	80.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5angka	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)*	5angka			5 angka	6.026.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5angka	6.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				184 Unit	6.026.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		6.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)***	**82%**			**73 %**	**155.150.000,00**						**79%**	**410.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil*	1tahun			1 tahun	100.150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1tahun	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				33 Kelompok	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*"Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya "*	1tahun			1 tahun	55.000.000,00			-	-	-	1tahun	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya				10 Dokumen	25.000.000,00	-	-	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "***	**35,00 Kg/KAP/TH**			**34,80 Kg/KAP/TH**	**6.848.947.700,00**						**34,93 Kg/KAP/TH**	**6.750.000.000,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	1tahun			1 tahun	15.200.000,00			-	-	-	1tahun	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Rekomendasi	15.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*"Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "*	3dokumen			3 dokumen	6.833.597.700,00			-	-	-	3dokumen	6.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				50 Unit Usaha	3.353.597.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				50 Unit Usaha	3.480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*"Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan "*	1tahun			1 tahun	150.000,00			-	-	-	1tahun	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				5 Unit Usaha	150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA						**4.625.976.725,00**							**3.500.350.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.625.976.725,00**							**3.500.350.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.625.976.725,00**							**3.500.350.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)***	**89,20skor**			**88,90 skor**	**1.735.976.725,00**						**89,10skor**	**350.000,00**	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*	100%			100 %	41.420.000,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	33.420.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)*	100%			100 %	13.530.000,00			-	-	-	100%	350.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.200.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "*	100%			100 %	97.820.000,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*	100%			100 %	5.000.000,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	2.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	100%			100 %	1.453.712.925,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				26 Laporan	578.560.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	874.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	100%			100 %	124.493.800,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	97.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	16.993.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	7.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Produksi perikanan budidaya (ton)***	**9ton 98200ton 35,42%**			**34,82 % 9 ton 97468 ton**	**2.890.000.000,00**						**9ton 98136ton 35,22%**	**3.500.000.000,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)*	5angka			5 angka	40.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5angka	200.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				25 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		200.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)*	5angka			5 angka	2.850.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5angka	3.300.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	2.850.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		3.300.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI						**2.783.662.200,00**							**75.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.783.662.200,00**							**75.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**2.783.662.200,00**							**75.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)***	**89,20skor**			**88,90 skor**	**2.730.662.200,00**						**89,10skor**	**0,00**	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*	100%			100 %	38.279.500,00			-	-	-	100%	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32.280.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	999.500,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	5.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)*	100%			100 %	15.000.000,00			-	-	-	100%	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "*	100%			100 %	92.811.000,00			-	-	-	100%	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	546.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.005.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	34.800.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	100%			100 %	2.479.824.700,00			-	-	-	100%	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	739.500.700,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	1.737.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "*	100%			100 %	104.747.000,00			-	-	-	100%	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	65.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	21.347.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	5.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	13.400.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor) Produksi perikanan tangkap (ton)***	**83,00skor 7754ton**			**81,50 skor 7109 ton**	**53.000.000,00**						**82,50skor 7584ton**	**75.000.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)*	3angka			3 angka	53.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	3angka	75.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				12 Layanan	53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		75.000.000,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	JUMLAH							**50.699.375.921,00**							**60.583.595.491,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA						**44.124.980.207,00**							**75.483.987.732,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.200.000.000,00**							**3.000.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**6.200.000.000,00**							**3.000.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan***	**9kawasan**			**7 kawasan**	**6.200.000.000,00**						**7kawasan**	**3.000.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	9 kawasanKawasan 100%%			7 kawasan Kawasan 100% %	6.200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	7 kawasanKawasan 100%%	3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1.00 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1.00 Dokumen	5.000.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.664.200.000,00**							**56.600.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**25.664.200.000,00**							**56.600.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)***	**n/alembaga 11.823.472 orang n/aorang**			**n/a lembaga n/a orang 8.724.083 orang**	**25.664.200.000,00**						**n/alembaga 10.556.672 orang n/aorang**	**56.600.000.000,00**	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi*	1Objek			1 objek 1 Objek	1.600.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1Objek	1.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1.00 Objek	1.600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya*	1Unit			1 objek 1 Unit	3.371.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1Unit	6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	3.371.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN, DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*[deleted]* *Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY* *Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual*	3620Angka 3.550.000Orang			 850.000 Orang 406 Angka	18.268.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	597Angka 1.000.000 Orang	40.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya														
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				206 Objek	18.268.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN, DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		40.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri*	31Lokasi			5 Lokasi	2.425.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	7Lokasi	9.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya														
			Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan				336 Lembaga	2.425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		9.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.260.780.207,00**							**15.883.987.732,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**12.260.780.207,00**							**15.883.987.732,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**93,05skor**			**90,14 skor**	**11.353.130.207,00**						**92,86skor**	**11.535.487.732,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	26.419.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	105.000.004,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	8.819.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		74.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		31.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	7.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		4,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	10.151.269.007,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	9.256.700.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80.00 Orang/ Bulan	10.102.269.007,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		9.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	37.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		2.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		14.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	28.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	29.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		17.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	96.644.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	561.820.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.901.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.773.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		7.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.985.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		43.560.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		7.260.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	71.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.550.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	19.178.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	230.175.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		170.175.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	14.278.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	832.092.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	845.412.728,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		39.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	208.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		242.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	620.088.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		564.412.728,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	198.727.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	506.980.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.611.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		36.300.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	116.986.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		214.370.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				32 Unit	6.595.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		13.310.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	18.475.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		73.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	20.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi*** ***Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)*** ***Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)*** ***Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)***	**n/aOrang** **n/aUJP** **1660UJP** **24,632,000 Orang**			**n/a UJP** **315 UJP** **n/a Orang** **21,278,000 Orang**	**140.650.000,00**						**n/aOrang** **n/aUJP** **345UJP** **23,459,000 Orang**	**1.210.000.000,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan*	4Lokasi			1 Lokasi	250.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1Lokasi	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya				10 Orang	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat	-			-	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi*	2Dokumen			2 Dokumen	200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	2Dokumen	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				41 Unit	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PARIWISATA-PENUGASAN	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah UJP yang dipantau dan dibina* *Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha*	460Usaha 25Usaha			100 Usaha 5 Usaha	40.200.000,00			-	-	-	100Usaha 5Usaha	360.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				20 Unit Usaha	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata														
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1.00 Laporan	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara tahun ke n Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n***	**n/aOrang 10.000.000 Orang 300.000Orang**			**n/a Orang 60.000 Orang 7.000.000 Orang**	**202.812.000,00**						**n/aOrang 8.750.000 Orang 150.000Orang**	**500.000.000,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwsiata DIY dan visitingjogja Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar Jumlah pengunjung TIC Jumlah transaksi B2B*	8000 Orang 13Dokumen 40 MilyarRp 900Orang 9000Orang			6500 Orang 3 Dokumen 500 Orang 6000 Orang 20 Milyar Rp	202.812.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	7500Orang 3Dokumen 30 MilyarRp 700Orang 8000Orang	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	142.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang) jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI***	**345Orang 100produk**			**75 Orang n/a produk**	**14.288.000,00**						**90Orang n/aproduk**	**200.000.000,00**	
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI*	90 Nilai			89,62 Nilai	14.288.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	89,94 Nilai	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	14.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Jumlah desa wisata yang naik kelas/jumlah objek yang difasilitasi oleh kemitraan*** ***Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)*** ***Jumlah SDM yang sudah tersertifikasi***	**5.756Orang** **n/aLokasi** **100Orang**			**n/a Lokasi** **4.506 Orang** **n/a Orang**	**549.900.000,00**						**5.256Orang** **n/aLokasi** **n/aOrang**	**2.438.500.000,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata* *Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata*	2750Orang 1875Orang			325 Orang 400 Orang	549.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	600Orang 400Orang	2.101.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				25 Orang	87.500.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				30 Orang	12.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		545.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				225 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		656.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih* *Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf*	360Orang 400Orang			60 Orang 100 Orang	200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	90Orang 100Orang	337.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				10 Orang	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		337.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	J U M L A H							**44.124.980.207,00**							**75.483.987.732,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						**89.691.838.727,00**							**92.509.585.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.534.741.000,00**							**2.800.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.534.741.000,00**							**2.800.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Jumlah luas penanaman komoditas pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha)*** ***Jumlah luas penanaman komoditas pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) [deleted]*** ***Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten***	**N/AHa** **640Ha**			**N/A Ha** **N/A Ha** **173,5 Ha**	**1.534.741.000,00**						**N/AHa** **484,5Ha**	**2.800.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah kelompok tani yang diberdayakan* *Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian*	4Satuan Ruang Strategis N/AKelompok			N/A Kelompok 4 Satuan Ruang Strategis	1.534.741.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	4Satuan Ruang Strategis N/AKelompok	2.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				2 Dokumen	1.234.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.741.365.700,00**							**8.571.388.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**756.694.300,00**							**558.250.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)***	**3,734Kkal/ Kapita/Hari 2,137Kkal/ Kapita/Hari**			**3,734 Kkal/Kapita/Hari 2,143 Kkal/Kapita/Hari**	**538.167.000,00**						**3,734Kkal/ Kapita/Hari 2,139Kkal/ Kapita/Hari**	**275.000.000,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya*	1Tahun			1 Tahun	244.427.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	1Tahun	225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	118.427.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				2 Laporan	101.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian*	10,6kg/kapita/tahun			10,5 kg/kapita/tahun	293.740.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	10,6kg/kapita/tahun	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	260.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	33.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)***	**97,73%**			**94,32 %**	**105.435.000,00**						**96,59%**	**113.250.000,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	*Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan*	22Dokumen			5 Dokumen	35.435.000,00			-	-	-	5Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				5 Dokumen	35.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Penanganan Kerawanan Pangan*	5Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	70.000.000,00			-	-	-	5Kabupaten /Kota	63.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)***	**81,47%**			**79,55 %**	**113.092.300,00**						**80,88%**	**170.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar*	5Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	113.092.300,00			-	-	-	5Kabupaten /Kota	170.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5 Sertifikat	36.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	36.624.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.984.671.400,00**							**8.013.138.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) Produksi pertanian komoditas jagung dan garut hasil budidaya di Lumbung Mataraman ditambah gabah dan/atau beras yang ada di lumbung pangan (ton)***	**370Ton 36,14%**			**22,06 % N/A Ton**	**5.984.671.400,00**						**N/ATon 32,05%**	**8.013.138.000,00**	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan*	5Jenis			5 Jenis	5.984.671.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	5Jenis	8.013.138.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				12 Laporan	5.984.671.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		8.013.138.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**81.415.732.027,00**							**81.138.197.165,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**81.415.732.027,00**							**81.138.197.165,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91Angka**			**89,35 Angka**	**53.912.465.427,00**						**90,85Angka**	**53.229.412.035,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	100%			100 %	55.045.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	89.537.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	17.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		35.789.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		31.248.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	49.326.698.186,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	53.015.982.035,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				386 Orang/ Bulan	49.242.572.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		53.000.017.035,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	73.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	69.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	69.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100%			100 %	10.317.230,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	40.924.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	10.317.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.924.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	79.660.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.968.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.708.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.226.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	34.756.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	6.036.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5.956.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	3.572.356.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	917.845.771,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.654.010.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	100%			100 %	792.391.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	82.969.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	68.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		82.969.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				136 Unit	623.668.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	68.903.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	30.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-)*** ***Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-) [deleted]*** ***Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) [deleted]*** ***Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%)*** ***Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%)***	**98,5%** **100%** **91%** **98,5%** **93,5%** **100%%** **2,38%**			**N/A %** **N/A %** **93,5 %** **93,50 %** **N/A %** **2,35 %** **N/A %** **N/A %** **100% %** **98,5 %**	**22.261.237.600,00**						**N/A%** **N/A%** **N/A%** **98,5%** **93,5%** **100%%** **2,37%**	**21.525.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian*	4Kabupaten 4Kabupaten			4 Kabupaten	3.190.237.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	4Kabupaten 4Kabupaten	4.025.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				6 Dokumen	3.189.862.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		3.900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat*	942Kelompok 355Ekor 355Ekor			185 Kelompok 68 Ekor	19.071.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	187Kelompok 75Ekor 75Ekor	17.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	19.071.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		17.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Indeks prasarana pertanian yang dibangun*** ***Indeks prasarana pertanian yang dibangun*** ***Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%)***	**0,018Indeks 10%**			**N/A Indeks 18 Indeks 10 %**	**1.860.375.000,00**						**N/AIndeks 10%**	**2.375.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian*	4Kabupaten 4Kabupaten			4 Kabupaten	1.860.375.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	4Kabupaten 4Kabupaten	2.375.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	1.860.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		2.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				1 Ha	375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)*** ***Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)***	**8,71%** **100%**			**N/A %** **4,97 %**	**717.500.000,00**						**7,46%** **N/A%**	**726.000.000,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular*	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	80.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota	80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	*Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah*	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	622.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota	632.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	590.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		580.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	*Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan*	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	15.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota	13.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				2 Sertifikat	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		13.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)*** ***Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)***	**58,80%% 95%**			**N/A % 58,20% %**	**52.000.000,00**						**58,60%% N/A%**	**75.096.630,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan*	3Sub sektor 3Sub sektor			3 Sub sektor	52.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	3Sub sektor 3Sub sektor	75.096.630,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				700 Ha	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		75.096.630,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)***	**68 %%**			**62 % %**	**2.612.154.000,00**						**66 %%**	**3.207.688.500,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)* *Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian (%)*	N/A% 5Kabupaten /Kota 68%			62 % 5 Kabupaten/ Kota N/A %	49.080.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	N/A% 5Kabupaten /Kota 66%	107.688.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				30 Orang	49.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		107.688.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian*	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	2.563.074.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota	3.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2 Dokumen	2.486.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				45 Kelompok	77.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN						**2.889.122.626,00**							**1.755.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.889.122.626,00**							**1.755.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.889.122.626,00**							**1.755.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91Angka**			**89,35 Angka**	**1.163.524.046,00**						**90,85Angka**	**0,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	33.660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	33.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	10.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	45.984.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.290.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.502.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.019.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	19.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	142.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	62.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	847.938.146,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	167.710.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	679.727.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	100%			100 %	225.479.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	208.530.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	10.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	5.418.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-)*** ***Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-) [deleted]*** ***Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) [deleted]*** ***Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%)*** ***Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%)***	**98,5%** **100%** **91%** **98,5%** **93,5%** **100%%** **2,38%**				**N/A %** **N/A %** **93,5 %** **93,50 %** **N/A %** **2,35 %** **N/A %** **N/A %** **100% %** **98,5 %**	**1.725.598.580,00**						**N/A%** **N/A%** **N/A%** **98,5%** **93,5%** **100%%** **2,37%**	**1.755.000.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman*	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	1.725.598.580,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5Kabupaten /Kota 5Kabupaten /Kota	1.755.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				138 Sertifikat	111.591.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		130.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				3 laporan	44.096.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				33500 Batang	418.068.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		500.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				7570 Batang	88.743.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		95.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				70.6 Ton	1.063.098.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.030.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
		BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN						**4.731.677.115,00**							**4.096.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.731.677.115,00**							**4.096.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4.731.677.115,00**							**4.096.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91Angka**			**89,35 Angka**	**603.375.115,00**						**90,85Angka**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	29.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	29.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	13.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	47.036.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.246.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.532.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.183.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	22.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	142.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	62.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	292.280.815,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	152.454.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	139.325.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	100%			100 %	221.015.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	212.715.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	5.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-)*** ***Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-) [deleted]*** ***Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) [deleted]*** ***Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)*** ***Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%)*** ***Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%)***	**98,5%** **100%** **91%** **98,5%** **93,5%** **100%%** **2,38%**				**N/A %** **N/A %** **93,5 %** **93,50 %** **N/A %** **2,35 %** **N/A %** **N/A %** **100% %** **98,5 %**	**3.633.300.000,00**						**N/A%** **N/A%** **N/A%** **98,5%** **93,5%** **100%%** **2,37%**	**3.500.000.000,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan* *Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat*	942Kelompok 355Ekor 355Ekor			185 Kelompok 68 Ekor	3.633.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	187Kelompok 75Ekor 75Ekor	3.500.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 laporan	3.633.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		3.500.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)*** ***Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)***	**8,71%** **100%**			**N/A %** **4,97 %**	**495.002.000,00**						**7,46%** **N/A%**	**596.000.000,00**	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	96220Sampel 96220Sampel			18810 Sampel	495.002.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	19620Sampel 19620Sampel	596.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				3 Dokumen	495.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		596.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	JUMLAH							**97.312.638.468,00**							**98.360.585.165,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**31.514.677.833,00**							**13.515.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.960.000.000,00**							**13.500.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**12.960.000.000,00**							**13.500.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan*** ***Nilai Produksi IKM Industri Kreatif***	**N/ARp 14,84 TriliunRp**			**13,38 Triliun Rp N/A Rp**	**12.960.000.000,00**						**N/ARp 14,27 TriliunRp**	**13.500.000.000,00**	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan*	31545IKM			6200 IKM	12.960.000.000,00			-	-	-	6500IKM	13.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				6200 Unit	12.960.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-		13.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**18.554.677.833,00**							**15.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**664.400.000,00**							**0,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Jumlah Perusahaan Ekspor***	**635Perusahaan**			**545 Perusahaan**	**10.000.000,00**						**605Perusahaan**	**0,00**	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	*Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu*	99%			94 %	10.000.000,00			-	-	-	98%	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1,00 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	***Inflasi Pangan Bergejolak*** ***Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting***	**90% N/A%**			**N/A % 90 %**	**201.000.000,00**						**90% N/A%**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah jenis barang yang dipantau*	25jenis			25 jenis	201.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	25jenis	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1.00 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru***	**20%**			**20 %**	**128.000.000,00**						**20%**	**0,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina*	2015pelaku			371 pelaku	128.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	470pelaku	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				1.00 Pelaku Usaha	77.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				1.00 Pelaku Usaha	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				20 Produk	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen***	**N/A% 97,5% 99%**			**N/A % 96 % 96 %**	**175.400.000,00**						**N/A% 97 % 98%**	**0,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani*	125Pengaduan			30 Pengaduan	174.400.000,00			-	-	-	20Pengaduan	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				40 Pengaduan	174.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jenis barang yang dipantau*	25Pengaduan			25 Pengaduan	1.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	25Pengaduan	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1.00 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina***	**2,74 MilyarRp**			**2,64 Milyar Rp**	**150.000.000,00**						**2,68 MilyarRp**	**0,00**	
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN*	65IKM			50 IKM	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	60IKM	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				5.00 UMKM	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**17.890.277.833,00**							**15.000.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**85Angka**			**85 Angka**	**17.867.277.833,00**						**85Angka**	**15.000.000,00**	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan , Penganggran, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah.*	100%			100 %	30.218.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.218.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	16.244.706.313,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/ Bulan	16.201.066.313,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	41.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	58.053.720,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	58.053.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	131.494.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	106.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	2.373.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.373.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	1.138.128.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	345.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	792.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	262.303.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	33.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	214.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1.00 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.00 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.803.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG***	**89,50% 41500Orang**			**413500 Orang 84,00 %**	**2.000.000,00**						**89,00% 414500Orang**	**0,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi*	3Dokumen			3 Dokumen	2.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	3Dokumen	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.00 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.00 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin***	**18,043Perusahaan**			**16,543 Perusahaan**	**20.000.000,00**						**17,543Perusahaan**	**0,00**	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	*Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait*	40%			37 %	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	39%	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1.00 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS***	**900Perusahaan**			**600 Perusahaan**	**1.000.000,00**						**800Perusahaan**	**0,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS*	925Orang			200 Orang	1.000.000,00			-	-	-	200Orang	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA						**1.883.839.052,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.883.839.052,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.883.839.052,00**							**0,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**85Angka**			**85 Angka**	**1.583.839.052,00**						**85Angka**	**0,00**	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	18.180.000,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	500.000,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	4.494.000,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	500.000,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	1.558.665.052,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	856.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	701.900.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	1.500.000,00			-	-	-	100%	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG***	**89,50% 41500Orang**			**413500 Orang 84,00 %**	**300.000.000,00**						**89,00% 414500Orang**	**0,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi*	3Dokumen			3 Dokumen	300.000.000,00			-	-	-	3Dokumen	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	J U M L A H							**33.398.516.885,00**							**13.515.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						**71.313.338.300,00**							**72.634.169.424,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**71.313.338.300,00**							**72.634.169.424,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**71.313.338.300,00**							**72.634.169.424,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted] Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**89,23Nilai 86Nilai 90,90Nilai 89Nilai 88,00Nilai 96,0angka 94,71angka 88,7Angka 91,03Angka**			**87,6 Angka 88,15 Angka 88,15 nilai 88,15 Nilai 88,48 nilai 88,48 Nilai 88,7 Angka 88,70 nilai 90,60 nilai 90,60 Nilai N/A angka 95,7 angka 86 Nilai 87,60 Nilai N/A angka 90,36 Angka**	**71.313.338.300,00**						**88,98Nilai 86Nilai 90,80Nilai 88,75Nilai 87,85Nilai 95,9angka N/Aangka 88,7Angka 90,81Angka**	**72.634.169.424,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	65.016.598.773,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	65.859.165.222,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				389 Orang/ Bulan	64.992.598.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.831.485.222,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Dokumen			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	1.494.720.316,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 20Dokumen	1.725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*												
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.494.720.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah*	100%			100 %	3.828.483.911,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	4.021.104.202,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	241.983.911,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		252.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	157.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/*100%* Bulan	3.369.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.523.504.202,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah; dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*	*100%*			*100%*	973.535.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	*100%*	1.028.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	775.557.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		815.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	134.089.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	63.887.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		63.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO TATA PEMERINTAHAN						**3.794.884.650,00**							**5.682.535.445,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**689.140.000,00**							**964.200.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**425.000.000,00**							**600.200.000,00**	
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY***	**89.40%**			**88.70 %**	**136.292.400,00**						**88.85%**	**228.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan*	100%			100 %	58.160.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	95.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				80 Dokumen	28.160.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		35.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan*	100%			100 %	78.132.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	133.700.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	21.182.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		23.700.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1.00 Laporan	56.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		110.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY***	**99.25%**			**99.18 %**	**91.970.600,00**						**99.23%**	**145.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	100%			100 %	35.218.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	60.500.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	35.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.500.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi*	100%			100 %	49.726.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	73.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	41.998.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		58.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				3 Dokumen	7.728.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil*	100%			100 %	7.026.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	12.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	7.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.***	**100%**			**76 %**	**127.037.000,00**						**92%**	**146.000.000,00**	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*	100%			100 %	127.037.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	134.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	38.482.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		44.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				2.00 Dokumen	88.554.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*	100%			100 %	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	12.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar***	**100%**			**100 %**	**69.700.000,00**						**100%**	**80.000.000,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan*	100%			100 %	69.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	80.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	69.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		80.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**50.000.000,00**							**64.000.000,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren***	**100%**			**100 %**	**50.000.000,00**						**100%**	**64.000.000,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*	100%			100 %	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	64.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1.00 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa														
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				1.00 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.105.744.650,00**							**4.718.335.445,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.105.744.650,00**							**4.718.335.445,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52Dokumen			100 % 100 % 100 % 100 % 10 Dokumen 100 % 100 %	31.247.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 11Dokumen	58.300.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	11.247.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	13.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.300.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	46.981.060,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	52.906.766,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	33.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		38.187.600,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.108.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.619.724,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	8.272.220,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.099.442,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD* *Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 25Dokumen			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	11.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 5Dokumen	13.794.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.794.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,* *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,* *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,* *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,* *Penyelenggaraan Rapat*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Dokumen			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	335.078.290,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20Dokumen	516.834.679,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.284.760,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.213.236,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	35.423.740,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		38.966.114,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.683.390,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.451.729,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	27.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		29.700.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	15.686.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.503.600,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		385.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100% 100% 23Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 5Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	0,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 3Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2.750.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.750.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya*	20Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	173.538.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	211.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	111.538.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		143.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	42.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		46.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	***Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi*** ***Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah*** ***Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah***	**100%** **100%** **100%**			**100 %** **100 %** **100 %**	**525.000.000,00**						**100%** **100%** **100%**	**1.222.750.000,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi* *Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah* *Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah*	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	225.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100%	592.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				4 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		192.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				4,00 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah*	100%			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	330.750.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		330.750.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah*	100%			100 %	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	300.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2.00 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		300.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
3.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***[deleted]*** ***Kematangan Perangkat Daerah*** ***Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan*** ***Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik***	**45%** **12,76%** **45angka** **45angka**			**40,5 angka** **95 %** **5,1 %**	**1.980.000.000,00**						**95%** **10,20%** **43,5angka** **43,5angka**	**2.640.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	*Terlaksananya embinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan*	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	1.980.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100%	2.640.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina				4 Dokumen	1.980.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.640.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**689.140.000,00**							**964.200.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**214.140.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi [deleted]***	**100% 100%**			**100 % 57 % 57 %**	**214.140.000,00**						**100% 86%**	**300.000.000,00**	
	-	-	*Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan*	-			2 Dokumen	214.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	300.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				2.00 Dokumen	214.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		300.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		BIRO HUKUM						**4.195.150.925,00**							**5.800.719.360,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**395.000.000,00**							**528.184.360,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**395.000.000,00**							**528.184.360,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan*** ***Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi*** ***Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi [deleted]***	**100%** **100%**			**100 %** **57 %** **57 %**	**395.000.000,00**						**100%** **86%**	**528.184.360,00**	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	100%			100 %	395.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	528.184.360,00	BIRO HUKUM
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				30 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.000.000,00	BIRO HUKUM
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				1 Berita Acara	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		463.184.360,00	BIRO HUKUM
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.800.150.925,00**							**5.272.535.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.800.150.925,00**							**5.272.535.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52Dokumen			100 % 100 % 100 % 100 % 10 Dokumen 100 % 100 %	6.503.100,00			-	-	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11Dokumen	18.535.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	2.784.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.035.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.00 Dokumen	2.178.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	1.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	30.138.000,00			-	-	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	49.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	28.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14.00 Laporan	748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD* *Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 25Dokumen			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	10.320.000,00			-	-	-	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 5Dokumen	13.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.00 Laporan	10.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Peerangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* *Terlaksananya Penilaian kinerja pegawai*	100% 100% 100% 10Dokumen			100 % 2 Dokumen 100 % 100 %	6.300.000,00			-	-	-	100% 100% 100% 2Dokumen	8.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	6.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,* *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan* *Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;* *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;* *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,* *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,* *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan* *Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Dokumen			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	363.242.773,00			-	-	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20Dokumen	439.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.006.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	69.672.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.808.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.321.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	247.394.473,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100% 100% 23Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	94.860.500,00			-	-	-	100% 100% 5Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	136.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0.00 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36.00 Unit	87.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	7.108.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.622.000,00			-	-	-	100% 3Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	53.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan*	20Dokumen 100% 100%			100 % 4 Dokumen 100 %	372.856.752,00			-	-	-	4Dokumen 100% 100%	410.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pemerintahan daerah *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %							100% 100% 100% 100% 100%		
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33.064.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	120.744.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0.00 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38.00 Unit	23.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	195.487.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	***Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum***	**100%**			**100 %**	**2.161.307.800,00**						**100%**	**3.145.000.000,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendoklumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota*	100%			100 %	561.307.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.445.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				18.00 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				35 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				53.00 Dokumen	199.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.080.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				62.00 Dokumen	136.750.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		250.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM*	100%			100 %	1.600.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.700.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				1.00 Kasus	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				100 Kasus	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.700.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***[deleted]*** ***Kematangan Perangkat Daerah*** ***Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan*** ***Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik***	**45%** **12,76%** **45angka** **45angka**			**40,5 angka** **95 %** **5,1 %**	**750.000.000,00**						**95%** **10,20%** **43,5angka** **43,5angka**	**1.000.000.000,00**	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	*Terlaksananya embinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan* *Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan* *Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan*	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	750.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100%	1.000.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.10.5.01.0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan														
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi				30 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		600.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.10.5.01.0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan														
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun				15 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL						**25.975.218.600,00**							**49.341.420.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.975.218.600,00**							**49.341.420.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**25.975.218.600,00**							**49.341.420.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted]* *Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	89,23Nilai 86Nilai 90,90Nilai 89Nilai 88,00Nilai 96,0angka 94,71angka 88,7Angka 91,03Angka			87,6 Angka 88,15 Angka 88,15 nilai 88,15 Nilai 88,48 nilai 88,48 Nilai 88,7 Angka 88,70 nilai 90,60 nilai 90,60 Nilai N/A angka 95,7 angka 86 Nilai 87,60 Nilai N/A angka 90,36 Angka	651.113.800,00					88,98Nilai 86Nilai 90,80Nilai 88,75Nilai 87,85Nilai 95,9angka N/Aangka 88,7Angka 90,81Angka	1.456.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 52Dokumen			100 % 100 % 100 % 100 % 10 Dokumen 100 % 100 %	69.211.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 11Dokumen	110.100.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	54.737.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		84.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.600.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.00 Laporan	9.474.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.500.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	57.343.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	95.700.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	45.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		66.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.500.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	6.666.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.200.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD* *Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 25Dokumen			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	13.854.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 5Dokumen	21.600.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	13.854.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.600.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* *Terlaksananya Penilaian kinerja pegawai*	100% 100% 100% 10Dokumen			100 % 2 Dokumen 100 % 100 %	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 2Dokumen	40.320.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.320.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Dokumen			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	333.605.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 20Dokumen	711.200.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.761.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.600.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.117.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		26.500.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.100.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	287.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		550.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100% 100% 23Dokumen 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 5Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	209.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		85.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				30 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		100.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	9.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 3Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	14.500.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.500.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	20Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	167.650.400,00			-	-	-	4Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	254.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %							100%		
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30.533.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5.00 Unit	82.637.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		85.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	32.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		52.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	14.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		45.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental yang ditindaklanjuti*** ***Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindaklanjuti*** ***Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti*** ***Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjut*** ***Persentase 4 jenis Fasilitasi keagamaan*** ***Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan*** ***Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti*** ***Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti***	**25Dokumen** **20Rumusan** **100%** **76%** **1Dokumen** **1Dokumen** **1Dokumen**			**N/A Dokumen** **N/A Dokumen** **N/A Dokumen** **4 Rumusan** **75 %** **N/A %** **5 Dokumen** **5 Dokumen**	**25.324.104.800,00**						**5Dokumen** **4Rumusan** **100%** **N/A%** **N/ADokumen** **N/ADokumen** **N/ADokumen**	**47.885.000.000,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan*	10Dokumen			2 Dokumen	24.701.017.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	2Dokumen	46.515.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				788 Unit	19.885.101.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		31.515.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				13 Lembaga	4.815.916.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		15.000.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terlaksanya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*	100% 72Dokumen			14 Dokumen 14 Dokumen 100 %	562.202.100,00			-	-	-	100% 14Dokumen	1.090.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				3 Dokumen	362.202.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		540.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				6 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar* *Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar* *Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*	100% 22Dokumen			100 % 4 Dokumen 4 Dokumen	60.885.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-	100% 4Dokumen	280.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				2 Dokumen	60.885.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		280.000.000,00	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						**1.351.480.100,00**							**1.992.182.405,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**245.406.900,00**							**350.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**245.406.900,00**							**350.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***pemberdayaan ekonomi masyarakat*** ***Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan*** ***Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan*** ***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda*** ***Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya*** ***Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan***	**100%** **100%** **100%** **100%** **100%** **8Kaluraha n**			**4 Kalurahan** **100 %** **n/a %** **50 %** **100 %** **100 %**	**245.406.900,00**						**100%** **100%** **100%** **100%** **n/a%** **4Kaluraha n**	**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*persentase implementasi global gotong royong dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan* *Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya* *Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah*	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	245.406.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	100% 100% 100% 100%	350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya														
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				30 Desa	245.406.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.106.073.200,00**							**1.642.182.405,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.106.073.200,00**							**1.642.182.405,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted]* *Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	89,23Nilai 86Nilai 90,90Nilai 89Nilai 88,00Nilai 96,0angka 94,71angka 88,7Angka 91,03Angka			87,6 Angka 88,15 Angka 88,15 nilai 88,15 Nilai 88,48 nilai 88,48 Nilai 88,7 Angka 88,70 nilai 90,60 nilai 90,60 Nilai N/A angka 95,7 angka 86 Nilai 87,60 Nilai N/A angka 90,36 Angka	399.420.400,00						88,98Nilai 86Nilai 90,80Nilai 88,75Nilai 87,85Nilai 95,9angka N/Aangka 88,7Angka 90,81Angka	501.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52Dokumen			100 % 100 % 100 % 100 % 10 Dokumen 100 % 100 %	12.681.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 11Dokumen	50.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4.171.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	37.881.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	51.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	32.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.869.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD* *Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 25Dokumen			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	9.633.604,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 5Dokumen	12.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	9.633.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Dokumen			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	123.675.596,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20Dokumen	241.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	3.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	14.104.596,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	8.667.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		29.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	83.201.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100% 100% 23Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	65.038.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 5Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	0,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Paket	14.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	50.838.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 3Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	9.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	3.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	20Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	145.961.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	137.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %							100%		
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	29.452.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	96.958.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		75.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	14.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8.00 Unit	4.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)***	**100%**			**100 %**	**706.652.800,00**						**100%**	**1.141.182.405,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro*	100%			100 %	685.328.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	855.468.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen	642.420.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		675.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				4 Dokumen	42.907.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		180.468.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan*	100%			100 %	19.052.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	240.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	19.052.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		240.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah*	100%			100 %	2.272.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	45.714.405,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	2.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		45.714.405,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN						**2.505.779.100,00**							**8.140.906.896,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**370.389.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**370.389.000,00**							**0,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah*** ***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda***	**100%** **100%**			**100 %** **25 %**	**370.389.000,00**						**100%** **75%**	**0,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*	100% 100%			25 % 100 %	370.389.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100% 75%	0,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				1 Dokumen	370.389.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		0,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.500.000.000,00**							**1.981.230.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.500.000.000,00**							**1.981.230.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***pemberdayaan ekonomi masyarakat*** ***Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan*** ***Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan*** ***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda*** ***Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya*** ***Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan***	**100%** **100%** **100%** **100%** **100%** **8Kaluraha n**			**4 Kalurahan** **100 %** **n/a %** **50 %** **100 %** **100 %**	**1.500.000.000,00**						**100%** **100%** **100%** **100%** **n/a%** **4Kaluraha n**	**1.981.230.000,00**	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang dikelola dan dilestarikan* *Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan* *Terlaksananya Penegembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya*	2Objek 100% 0%			2 Objek n/a % 0 %	1.500.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	2Objek n/a% 0%	1.981.230.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				2 Objek	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.981.230.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**635.390.100,00**							**6.159.676.896,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**635.390.100,00**							**6.159.676.896,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted]* *Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	89,23Nilai 86Nilai 90,90Nilai 89Nilai 88,00Nilai 96,0angka 94,71angka 88,7Angka 91,03Angka			87,6 Angka 88,15 Angka 88,15 nilai 88,15 Nilai 88,48 nilai 88,48 Nilai 88,7 Angka 88,70 nilai 90,60 nilai 90,60 Nilai N/A angka 95,7 angka 86 Nilai 87,60 Nilai N/A angka 90,36 Angka	351.790.100,00					88,98Nilai 86Nilai 90,80Nilai 88,75Nilai 87,85Nilai 95,9angka N/Aangka 88,7Angka 90,81Angka	1.033.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52Dokumen			100 % 100 % 100 % 100 % 10 Dokumen 100 % 100 %	10.799.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 11Dokumen	25.345.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,00 Dokumen	4.221.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.050.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4,00 Dokumen	2.878.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.900.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.699.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.395.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%				100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	31.942.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	51.935.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	28.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		35.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.00 Laporan	1.542.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.595.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.340.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD* *Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 25Dokumen			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	10.951.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 5Dokumen	19.020.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	10.951.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.020.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi*	100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 %	186.214.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100%	780.063.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% 100% 100Dokumen			100 % 100 %				Berkualitas Dan Berdaya Saing			100% 100% 20Dokumen		
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.394.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.245.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.854.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		45.375.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	961.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.275.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.482.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.168.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	165.522.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		700.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100% 100% 23Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	18.563.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 5Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	73.150.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	8.976.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	9.586.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.150.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 3Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	7.200.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.200.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah*	20Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	92.820.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	76.947.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		32.932.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	62.323.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.418.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23.00 Unit	6.525.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.995.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16.00 Unit	6.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.602.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	***Kinerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa*** ***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** ***Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik*** ***Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa*** ***Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa***	**78,74%**			**N/A %** **88,15 Angka** **80,65 %** **62,99 %** **62,99 %**	**133.600.000,00**					**73,49%**	**2.261.278.800,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas*	92%			86 %	88.392.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	90%	1.028.610.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	88.392.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.028.610.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas*	69,94%			62,44 %	20.083.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	67,44%	1.028.610.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				3.00 Laporan	20.083.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.028.610.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Pemenuhan level kematangan strategis*	62,5%			25 %	25.124.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	50%	204.058.800,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	25.124.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		204.058.800,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda*** ***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda sektor Pembangunan***	**100%** **21,50 %**			**33,33 %** **N/A %**	**150.000.000,00**						**83,33%** **N/A%**	**2.864.738.096,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi*	100%			36,84 %	28.253.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	78,95%	1.514.738.096,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				2.00 Laporan	28.253.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.514.738.096,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda*	100%			45,45 %	121.746.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	81,82%	1.350.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				3 Dokumen	121.746.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.350.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		BIRO ORGANISASI						**4.018.903.000,00**							**4.421.044.004,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.018.903.000,00**							**4.421.044.004,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.018.903.000,00**							**4.421.044.004,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	89,23Nilai 86Nilai 90,90Nilai 89Nilai 88,00Nilai 96,0angka 94,71angka 88,7Angka 91,03Angka			87,6 Angka 88,15 Angka 88,15 nilai 88,15 Nilai 88,48 nilai 88,48 Nilai 88,7 Angka 88,70 nilai 90,60 nilai 90,60 Nilai N/A angka 95,7 angka 86 Nilai 87,60 Nilai N/A angka 90,36 Angka	387.112.000,00						88,98Nilai 86Nilai 90,80Nilai 88,75Nilai 87,85Nilai 95,9angka N/Aangka 88,7Angka 90,81Angka	679.598.904,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52Dokumen			100 % 100 % 100 % 100 % 10 Dokumen 100 % 100 %	7.162.000,00			-	-	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11Dokumen	11.712.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	1.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.715.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2.00 Dokumen	2.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.468.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.529.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.529.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	40.805.100,00			-	-	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	40.805.100,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	34.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.020.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	3.887.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.887.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4.00 Laporan	2.898.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.898.100,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD* *Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 25Dokumen			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	11.347.000,00			-	-	-	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 5Dokumen	4,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.00 Laporan	11.347.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Dokumen			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	194.321.500,00			-	-	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20Dokumen	431.041.400,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.682.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.201.200,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	6.556.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.938.400,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	2.299.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.917.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	3.552.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.368.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	178.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		381.116.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan*	20Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	133.476.400,00			-	-	-	4Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	196.040.400,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	29.210.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.300.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7.00 Unit	84.098.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		109.824.400,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8.00 Unit	20.167.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.915.200,00	BIRO ORGANISASI
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	***Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B***	**83,12Nilai 100%**			**82,97 nilai 82,97 Nilai 50,00 %**	**206.791.000,00**						**83,07Nilai 83,33%**	**241.445.100,00**	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja*	100% 100%			100 %	206.791.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100%	241.445.100,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	63.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		84.405.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1,00 Dokumen	17.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.378.700,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1.00 Dokumen	125.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		142.661.400,00	BIRO ORGANISASI
3.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***[deleted]*** ***Kematangan Perangkat Daerah*** ***Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan*** ***Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik***	**45%** **12,76%** **45angka** **45angka**			**40,5 angka** **95 %** **5,1 %**	**3.425.000.000,00**						**95%** **10,20%** **43,5angka** **43,5angka**	**3.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	*Terlaksananya embinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan* *Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan* *Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah* *Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan*	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	2.225.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100%	2.300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan				3.00 Dokumen	725.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota				6.00 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan				3.00 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				5.00 Dokumen	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		850.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan*	100%			100 %	1.200.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				5.00 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL						**21.917.906.236,00**							**54.000.523.555,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.899.000.000,00**							**26.535.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**3.899.000.000,00**							**26.535.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah*** ***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda***	**100%** **100%**			**100 %** **25 %**	**3.899.000.000,00**						**100%** **75%**	**26.535.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*	100% 100%			25 % 100 %	3.899.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 75%	26.535.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				5 Dokumen	3.899.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		26.535.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.635.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.635.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***pemberdayaan ekonomi masyarakat*** ***Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan*** ***Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan*** ***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda*** ***Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya*** ***Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan***	**100%** **100%** **100%** **100%** **100%** **8Kaluraha n**			**4 Kalurahan** **100 %** **n/a %** **50 %** **100 %** **100 %**	**1.635.000.000,00**						**100%** **100%** **100%** **100%** **n/a%** **4Kaluraha n**	**1.000.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya Pengadaan Mobil Operasional* *Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya* *Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana keistimewaan urusan kebudayaan* *Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan*	325Unit 100% 100% 100% 100%			0 % 325 Unit n/a % n/a %	885.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	n/aUnit 100% n/a% 0% n/a%	0,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				325 Unit	885.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah* *persentase implementasi global gotong royong dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan* *Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya*	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	750.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100%	1.000.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				6 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.000.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.383.906.236,00**							**26.465.523.555,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**16.383.906.236,00**							**26.465.523.555,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted] Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**89,23Nilai 86Nilai 90,90Nilai 89Nilai 88,00Nilai 96,0angka 94,71angka 88,7Angka 91,03Angka**			**87,6 Angka 88,15 Angka 88,15 nilai 88,15 Nilai 88,48 nilai 88,48 Nilai 88,7 Angka 88,70 nilai 90,60 nilai 90,60 Nilai N/A angka 95,7 angka 86 Nilai 87,60 Nilai N/A angka 90,36 Angka**	**16.383.906.236,00**						**88,98Nilai 86Nilai 90,80Nilai 88,75Nilai 87,85Nilai 95,9angka N/Aangka 88,7Angka 90,81Angka**	**26.465.523.555,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52Dokumen			100 % 100 % 100 % 100 % 10 Dokumen 100 % 100 %	14.124.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 11Dokumen	26.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	7.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4.849.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%			14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	43.624.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	49.175.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		47.200.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		575.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	1.374.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.400.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD* *Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 25Dokumen			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	70.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 5Dokumen	72.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		61.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Dokumen			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	1.397.141.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20Dokumen	2.314.232.412,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	114.953.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		142.371.625,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	184.783.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		325.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6.00 Paket	182.585.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		340.390.787,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	125.684.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		250.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	38.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		57.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	640.223.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		930.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.00 Dokumen	109.914.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		269.470.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100% 100% 23Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 5Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	755.125.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				77.00 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		700.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				305.00 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.125.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah* *Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	5.658.680.486,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 3Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	6.138.972.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.100.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	3.085.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.121.371.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		241.975.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.429.390.486,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.766.526.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau*	20Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.164.435.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	6.795.420.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15.00 Unit	508.164.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		700.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67.00 Unit	1.373.390.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.350.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12.00 Unit	219.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		380.554.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6.00 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.106.830.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		258.036.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan*	100%			100 %	610.759.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.751.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12.00 Laporan	32.140.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		130.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12.00 Laporan	578.618.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.621.000.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan*	100%			100 %	5.274.641.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	8.563.599.143,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				25 Laporan	2.868.657.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.921.426.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	1.527.866.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.322.873.143,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12.00 Laporan	878.117.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.319.300.000,00	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**5.049.826.900,00**							**29.259.518.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.275.000.000,00**							**20.950.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.275.000.000,00**							**20.950.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***pemberdayaan ekonomi masyarakat*** ***Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan*** ***Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan*** ***Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda*** ***Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya*** ***Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan***	**100%** **100%** **100%** **100%** **100%** **8Kaluraha n**			**4 Kalurahan** **100 %** **n/a %** **50 %** **100 %** **100 %**	**1.275.000.000,00**						**100%** **100%** **100%** **100%** **n/a%** **4Kaluraha n**	**20.950.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*persentase implementasi global gotong royong dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan* *Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya* *Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah*	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	1.275.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	100% 100% 100% 100%	20.950.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				1 Laporan	425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		500.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.22.08.5.09.0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa				2 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		750.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa														
			Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		19.700.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.774.826.900,00**							**8.309.518.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.774.826.900,00**							**8.309.518.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52Dokumen			100 % 100 % 100 % 100 % 10 Dokumen 100 % 100 %	5.470.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 11Dokumen	70.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,00 Dokumen	4.069.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.400.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan daerah* *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 70Dokumen 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	32.224.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100%	65.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	29.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.040.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD* *Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 25Dokumen			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	9.942.300,00			-	-	-	100% 100% 100% 100% 100% 12Bulan 100% 5Dokumen	25.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	9.942.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah* *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,* *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,* *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,* *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan* *Perundang-undangan,* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100Dokumen			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	335.407.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20Dokumen	755.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.804.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.039.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		95.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	1.300.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		20.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	14.562.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		70.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	293.699.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		550.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya* *Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100% 100% 23Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	4.220.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100% 5Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	170.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4.220.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		170.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100% 14Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 3Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%	10.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan*	20Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	124.970.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	205.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30.032.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	79.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		110.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	9.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.000.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental yang ditindaklanjuti*** ***Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindaklanjuti*** ***Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti*** ***Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjut*** ***Persentase 4 jenis Fasilitasi keagamaan*** ***Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan*** ***Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti*** ***Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti***	**25Dokumen** **20Rumusan** **100%** **76%** **1Dokumen** **1Dokumen** **1Dokumen**			**N/A** **Dokumen** **N/A** **Dokumen** **N/A** **Dokumen** **4 Rumusan** **75 %** **N/A %** **5 Dokumen** **5 Dokumen**	**3.258.991.900,00**						**5Dokumen** **4Rumusan** **100%** **N/A%** **N/ADokumen** **N/ADokumen** **N/ADokumen**	**7.009.518.000,00**	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar* *Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar* *Terlaksanya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*	100% 72Dokumen			14 Dokumen 14 Dokumen 100 %	184.912.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	100% 14Dokumen	589.930.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				4 Dokumen	184.912.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		589.930.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar* *Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar* *Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*	100% 22Dokumen			100 % 4 Dokumen 4 Dokumen	3.074.079.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-	100% 4Dokumen	6.419.588.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				14 Dokumen	3.074.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengha pusan kemiskinan ekstrem	-		6.419.588.000,00	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	J U M L A H							**140.122.487.811,00**							**231.273.019.089,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PANIRADYA KAISTIMEWAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PANIRADYA KAISTIMEWAN						**28.027.330.733,00**							**28.122.043.463,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.027.330.733,00**							**28.122.043.463,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**28.027.330.733,00**							**28.122.043.463,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**89,79Angka**			**89,49 Angka**	**7.628.996.733,00**						**89,69Angka**	**8.091.368.463,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	13.802.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	16.854.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,00 Dokumen	5.333.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	5.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.054.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19,00 Laporan	2.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri?kasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	6.998.536.633,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	7.049.474.463,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52.00 Orang/ Bulan	6.956.804.133,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.007.674.463,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	36.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.420.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.011.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.380.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	4.301.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	100%			100 %	11.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	11.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	11.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	100%			100 %	95.573.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	228.940.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	2.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.440.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	22.014.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	3.789.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8.00 Paket	4.902.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2.574.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.209.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		169.300.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	305.568.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	336.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	287.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		314.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	100%			100 %	204.116.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	448.200.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	168.790.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		199.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36.00 Unit	6.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		210.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
2.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*** ***Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi [deleted]*** ***Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi [deleted]1***	**91,67%**			**86,00 %** **86,00 %** **86,00 %**	**20.398.334.000,00**						**90%**	**20.030.675.000,00**	
	4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	*Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara*	100% 100%			100 %	1.200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100%	1.330.380.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun				6 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		820.380.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				4.00 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		510.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	100% 100%			100 %	1.291.334.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100%	1.644.135.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				5 Dokumen	755.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		907.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				4.00 Laporan	536.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		736.635.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	*Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang*	100% 100%			100 %	2.410.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100%	2.480.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				9,00 Dokumen	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		726.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan				7.00 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		484.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				7.00 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		786.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				7 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		484.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY*	100% 100%			100 %	4.497.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100%	5.441.370.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				17.00 Dokumen	2.147.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.597.870.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY				19.00 Laporan	2.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.843.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	*Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan*	100%			100 %	3.000.000.000,00			-	-	-	100%	0,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan				1.00 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-		0,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	*Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan*	100% 100%			100 %	1.000.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100%	1.293.490.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.08.0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan														
			Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan				10.00 Rekomendasi	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.293.490.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	*Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan*	100% 100%			100 %	7.000.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100% 100%	7.840.800.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan				4 Dokumen	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.840.800.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	JUMLAH							**28.027.330.733,00**							**28.122.043.463,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						**165.412.284.618,00**							**359.391.525.555,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**165.412.284.618,00**							**359.391.525.555,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**165.412.284.618,00**							**359.391.525.555,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**89.5angka**			**88,5 angka**	**125.028.116.807,00**						**89,5angka**	**271.033.690.555,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	130.171.300,00			-	-	-	100%	137.106.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	59.263.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	32.882.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.808.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	38.025.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.837.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	100%			100 %	10.576.143.498,00			-	-	-	100%	11.714.931.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	10.419.728.498,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.572.563.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	58.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.727.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.639.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.952.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	81.856.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.689.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	12.480.000,00			-	-	-	100%	29.404.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14.00 Laporan	12.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.404.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	100%			100 %	68.766.000,00			-	-	-	100%	400.685.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16 Dokumen	26.258.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.374.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	42.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		381.311.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga"*	100%			100 %	1.134.888.000,00			-	-	-	100%	1.592.568.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	40.688.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.418.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	266.908.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		226.681.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	13.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.623.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	120.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153.621.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	693.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.165.225.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel*	100%			100 %	55.736.047.800,00			-	-	-	100%	197.436.973.555,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				110 Unit	728.054.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.093.978.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	55.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		196.342.995.555,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7.993.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	3.694.339.500,00			-	-	-	100%	3.440.658.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	1.182.563.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.248.166.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	2.511.776.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.192.492.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	1.948.885.300,00			-	-	-	100%	2.158.124.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	446.061.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		437.819.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	715.028.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		670.849.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				274 Unit	278.407.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		273.536.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	500.989.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		775.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	100%			100 %	47.155.820.009,00			-	-	-	100%	49.382.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang/ Bulan	45.820.213.509,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.558.032.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				55 Paket	981.324.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		526.091.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	354.282.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		297.917.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	100%			100 %	4.570.575.400,00			-	-	-	100%	4.741.201.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				252 Laporan	3.045.538.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.801.068.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				146,00 Laporan	1.525.037.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.940.133.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY***	**97%**			**95.5 %**	**40.384.167.811,00**						**96%**	**88.357.835.000,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD*	97%			96 %	5.182.789.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	96.5%	15.588.056.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	1.271.850.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		3.107.764.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				12 Dokumen	2.009.854.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		8.101.639.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				8 Dokumen	538.381.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		1.081.593.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				158 Dokumen	1.152.142.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		3.297.060.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1.00 Dokumen	210.561.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"*	97%			96 %	2.095.951.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	96.5%	2.509.001.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	464.957.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		521.721.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	116.292.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		125.132.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1.00 Dokumen	486.572.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		675.309.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	413.533.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		503.718.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	53.342.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		51.988.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	561.254.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		631.133.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	97%			96 %	5.214.504.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	96.5%	1.140.756.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	1.688.343.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		285.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	1.175.387.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		285.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5 Laporan	1.175.387.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		285.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	1.175.387.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		285.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	97%			96 %	12.175.885.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	96,5%	26.692.459.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1.010.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	2.693.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		3.862.482.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				18 Orang	1.422.783.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		1.728.749.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	700.829.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		855.721.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				33 Dokumen	2.811.706.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		6.205.609.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				16 Dokumen	3.536.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		14.039.898.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses*	97%			96 %	2.785.405.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	96.5%	11.282.116.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	295.123.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		234.859.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2.490.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		11.047.257.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%*	07%			96 %	541.446.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	96,5%	455.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	190.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3 Laporan	350.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		455.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*	97%			96 %	12.388.186.511,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	96.5%	30.689.755.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				40 Dokumen	7.040.170.311,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		23.319.309.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	35.369.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		32.786.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Dokumen	1.521.502.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		2.025.768.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				13 Dokumen	3.791.145.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		5.311.892.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H							**165.412.284.618,00**							**359.391.525.555,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**23.592.798.432,00**							**28.993.834.534,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**23.592.798.432,00**							**28.993.834.534,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**23.592.798.432,00**							**28.993.834.534,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi*** ***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**96,00angka 95,35angka**			**N/A angka 95,16 angka**	**20.252.698.297,00**						**95,72angka N/Aangka**	**24.283.065.534,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	150Dokumen			30 Dokumen	66.423.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	30Dokumen	92.984.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	17.060.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		31.196.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	19.685.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		23.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.00 Laporan	29.678.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		37.968.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	715Dokumen/lap/orang/bulan			143 Dokumen/lap/orang/bulan	17.979.585.254,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	143Dokumen/lap/orang/bulan	18.740.035.935,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115,00 Orang/ Bulan	17.891.561.354,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.649.416.935,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	55.124.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.809.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	8.976.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.861.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	23.923.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		28.949.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	60laporan			12 laporan	12.540.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12laporan	15.173.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	12.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.173.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	65dokumen			13 dokumen	73.188.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	13dokumen	184.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	73.188.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		184.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	139paket/dokumen/laporan				28 paket/dokumen/laporan	904.463.157,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	28paket/dokumen/laporan	1.163.604.766,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.980.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.123.146,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2,00 Paket	46.999.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		56.870.374,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	36.547.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		44.223.278,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	36.475.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		44.135.388,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.408.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.965.352,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	686.339.257,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		826.287.228,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	75.712.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	346unit			76 unit	210.306.446,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	75unit	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11.00 Unit	210.305.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	646,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*	9laporan			9 laporan	447.236.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	9laporan	488.928.693,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.075.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.914.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		61.607.469,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48.549.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		58.744.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	340.272.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		359.501.384,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*	1185unit			240 unit	558.955.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	240unit	3.237.618.740,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.643.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	225.965.840,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		275.760.870,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	10.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.282.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				57.00 Unit	10.810.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.164.866,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87.00 Unit	51.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		62.339.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.048.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.801.317.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	25.711.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		31.111.432,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan***	**100%**			**100 %**	**2.677.205.835,00**						**100%**	**3.861.651.000,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	34dokumen			7 dokumen	1.312.709.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	7dokumen	1.673.215.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	89.909.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		111.683.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3.00 Dokumen	1.222.800.000,00	-	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.561.532.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*"Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi"*	135 dokumen			28 dokumen	1.364.496.235,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	28 dokumen	2.188.436.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				25.00 Laporan	1.331.387.135,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.110.894.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				3 Dokumen	33.109.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		77.542.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan***	**100% 94% 94% 28,97%**			**93,75 % 92 % 91 % 28,28%**	**662.894.300,00**						**93,75% 93% 92% 28,97%**	**849.118.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"*	34dokumen			7 dokumen	462.895.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	7dokumen	560.105.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	362.895.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		439.105.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	4dokumen			4 dokumen	99.998.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	4dokumen	121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	99.998.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	`15dokumen			3 dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3dokumen	168.013.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		168.013.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH						**729.448.568,00**							**1.487.800.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**582.444.468,00**							**1.222.800.000,00**	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**582.444.468,00**							**1.222.800.000,00**	
1.	**2.20.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi*** ***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**96,00angka 95,35angka**			**N/A angka 95,16 angka**	**334.303.268,00**						**95,72angka N/Aangka**	**759.800.000,00**	
	2.20.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	715Dokumen/lap/orang/bulan			143 Dokumen/lap/orang/bulan	18.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	143Dokumen/lap/orang/bulan	40.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	18.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	60laporan			12 laporan	7.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12laporan	8.500.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.500.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	139paket/dokumen/laporan			28 paket/dokumen/laporan	143.256.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	28paket/dokumen/laporan	267.500.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.851.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.500.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.705.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		35.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.698.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.907.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.734.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	103.359.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		185.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	346unit			76 unit	53.130.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	75unit	215.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	41.130.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		190.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*	9laporan			9 laporan	62.177.368,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	9laporan	130.500.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.500.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.843.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.718.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	47.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		100.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*	1185unit			240 unit	49.758.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	240unit	98.300.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1.00 Unit	22.853.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		48.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	1.218.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.300.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17.00 Unit	9.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6.00 Unit	4.500.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
2.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah "Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah "***	**50% 85%**			**70 % N/A %**	**248.141.200,00**						**N/A% 80%**	**463.000.000,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral*	39dokumen			8 dokumen	248.141.200,00			-	-	-	8dokumen	463.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				8 Dokumen	248.141.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		463.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**147.004.100,00**							**265.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**147.004.100,00**							**265.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***"Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah " Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional***	**85% 70% 70%**			**N/A % 70 % 55 %**	**147.004.100,00**						**80% N/A% 65%**	**265.000.000,00**	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial*	1dokumen			1 dokumen	42.909.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1dokumen	65.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	42.909.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	5laporan			5 laporan	104.095.000,00			-	-	-	5laporan	200.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5,00 Dokumen	104.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	JUMLAH							**24.322.247.000,00**							**30.481.634.534,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET						**1.777.603.940.240,00**							**4.433.750.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.777.603.940.240,00**							**4.433.750.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.777.603.940.240,00**							**4.433.750.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,5angka**			**85,9 angka**	**86.314.391.446,00**						**86angka**	**0,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,00 Dokumen	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2.00 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12,00 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	83.683.326.864,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				240.00 Orang/ Bulan	83.673.806.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				72.00 Dokumen	1.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	1.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				72.00 Laporan	1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD*	100%			100 %	8.215.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12.00 Dokumen	8.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*erlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	100%			100 %	681.900.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6.00 Paket	9.283.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34.00 Paket	134.156.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				36.00 Paket	17.926.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16.00 Paket	90.882.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17.00 Dokumen	11.547.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.00 Laporan	370.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.00 Dokumen	47.941.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	30.667.482,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				143 Unit	30.667.482,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	1.551.559.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	18.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Laporan	922.722.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	534.372.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	347.322.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	10.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	221.197.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				117 Unit	55.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan***	**100%**			**100 %**	**1.685.695.699.794,00**						**100%**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*"Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran "*	100%			100 %	354.550.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	41.352.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	39.173.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	12.366.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	82.683.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6.00 Dokumen	101.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				30 Dokumen	77.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabuaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	18.074.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				5.00 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				5.00 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				5.00 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				2.00 Dokumen	3.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*"Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait"*	100%			100 %	98.694.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2.00 Laporan	69.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8000.00 Dokumen	29.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*"Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD "*	100%			100 %	174.995.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12.00 Laporan	8.724.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2.00 Laporan	20.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2.00 Dokumen	54.203.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1.00 Dokumen	3.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1.00 Dokumen	4.753.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1.00 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1.00 Dokumen	53.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				80.00 Orang	7.386.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi														
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				8.00 Lembaga	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*"Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi"*	100%			100 %	1.685.049.386.144,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				6.00 Laporan	2.835.355.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	817.489.845.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA KEISTIMEWAAN, BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	849.724.184.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur***	**100%**			**100 %**	**2.244.301.500,00**						**100%**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*"Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah"*	100%			100 %	2.244.301.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	301.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1.00 Dokumen	54.049.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2.00 Laporan	290.449.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	1.120.650.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2.00 Laporan	210.799.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3.00 Dokumen	266.643.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah***	**53,85%**			**58,98 %**	**3.349.547.500,00**						**52,88%**	**4.433.750.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. "*	100%			100 %	3.349.547.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	4.433.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	3.241.398.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	17.849.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		205.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	57.300.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		78.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA						**2.152.685.300,00**							**3.869.621.612,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.152.685.300,00**							**3.869.621.612,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.152.685.300,00**							**3.869.621.612,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,5angka**			**85,9 angka**	**1.815.722.650,00**						**86angka**	**2.529.621.612,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	41.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	12,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*erlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	100%			100 %	39.551.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	210.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.689.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.448.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.077.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	137.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		106.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	11.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	300.750.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		300.750.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	1.235.897.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.226.100.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	168.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.100.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	412.997.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		413.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	787.632.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		720.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	526.943.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	751.771.600,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	108.498.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		97.301.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	163.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		220.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	45.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		200.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				62 Unit	209.545.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		234.470.100,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah***	**53,85%**			**58,98 %**	**336.962.650,00**						**52,88%**	**1.340.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. "*	100%			100 %	336.962.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.340.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				13 Laporan	142.534.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		425.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	194.427.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		915.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL						**4.011.351.075,00**							**6.953.743.156,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.011.351.075,00**							**6.953.743.156,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.011.351.075,00**							**6.953.743.156,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,5angka**			**85,9 angka**	**3.360.180.075,00**						**86angka**	**4.964.127.209,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	38.062.710,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	770.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		38.062.710,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	13.196.925,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	860.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.196.925,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*erlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	100%			100 %	72.410.175,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	462.215.551.00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.340.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		26.532.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.648.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		103.057.999,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16.460.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		102.761.186,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.242.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.108.886,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	176.175,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		34.769.350,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.644.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.986.130,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		160.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	32.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.070.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	32.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		420.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		200.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		450.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	2.454.332.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	2.455.959.113,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	783.106.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		887.335.538,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	147.585.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		157.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.523.640.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.411.123.575,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	799.107.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	924.692.910,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	166.967.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		189.692.910,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	255.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		285.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	150.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		300.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	226.890.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah***	**53,85%**			**58,98 %**	**651.171.000,00**						**52,88%**	**1.989.615.947,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. "*	100%			100 %	651.171.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.989.615.947,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				13 Laporan	236.424.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		544.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	414.747.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.445.115.947,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL						**2.238.073.588,00**							**53.819.513.550,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.238.073.588,00**							**53.819.513.550,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.238.073.588,00**							**53.819.513.550,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,5angka**			**85,9 angka**	**1.727.467.900,00**						**86angka**	**52.214.603.430,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	770.000,00			-	-	-	100%	33.060.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	770.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.060.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	860.000,00			-	-	-	100%	10.320.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	860.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.320.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*erlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	100%			100 %	1.387.000,00			-	-	-	100%	190.419.200,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	88.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.132.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	200.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.665.400,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	440.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.571.750,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	136.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.036.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	86.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.284.850,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	137.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.728.400,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	37.400.000,00			-	-	-	100%	50.155.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	37.400.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	1.065.975.200,00			-	-	-	100%	1.104.225.732,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	606.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.642.100,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	442.441.200,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		495.744.320,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	39.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.351.600,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	583.428.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		556.487.712,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	621.075.700,00			-	-	-	100%	721.578.498,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	251.255.700,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		233.358.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	224.220.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		271.542.888,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		177.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	45.600.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.677.110,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah***	**53,85%**			**58,98 %**	**510.605.688,00**						**52,88%**	**1.604.910.120,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. "*	100%			100 %	510.605.688,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.604.910.120,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	206.921.838,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		448.948.720,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	303.683.850,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.155.961.400,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO						**2.385.046.171,00**							**4.734.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.385.046.171,00**							**4.734.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.385.046.171,00**							**4.734.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,5angka**			**85,9 angka**	**1.977.109.900,00**						**86angka**	**3.684.600.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	1.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	33.600.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	1.240.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		33.600.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	860.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*erlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	100%			100 %	62.592.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	247.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	15.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5.00 Paket	12.277.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3.00 Paket	12.273.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		45.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	5.040.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3.00 Paket	8.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4.00 Dokumen	752.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	8.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	43.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	875.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		160.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35.00 Unit	43.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7.00 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		315.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	1.418.149.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.494.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.00 Laporan	1.520.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	671.829.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		700.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		90.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	709.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		700.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	450.467.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.020.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		250.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	162.127.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		200.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	153.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		170.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		250.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	120.270.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah***	**53,85%**			**58,98 %**	**407.936.271,00**						**52,88%**	**1.050.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. "*	100%			100 %	407.936.271,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.050.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12.00 Laporan	192.323.071,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12.00 Laporan	215.613.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		650.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN						**4.255.911.356,00**							**15.820.513.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.255.911.356,00**							**15.820.513.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	**KEUANGAN**						**4.255.911.356,00**							**15.820.513.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**86,5angka**			**85,9 angka**	**3.366.186.556,00**						**86angka**	**12.720.122.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	770.000,00			-	-	-	100%	44.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	770.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	860.000,00			-	-	-	100%	17.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	860.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*erlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	100%			100 %	64.229.756,00			-	-	-	100%	416.614.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.620.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	26.844.256,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		136.614.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	2.145.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.156.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.012.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	137.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	2.315.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		146.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	30.000.000,00			-	-	-	100%	9.039.063.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.888.750.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.780.313.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	2.474.365.200,00			-	-	-	100%	2.316.700.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	140.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.700.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.010.209.200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		910.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.394.016.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.325.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	795.961.600,00			-	-	-	100%	886.245.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	139.221.400,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		118.405.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	409.323.200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		412.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	44.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		187.840.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	203.417.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		168.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah***	**53,85%**			**58,98 %**	**889.724.800,00**						**52,88%**	**3.100.391.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. "*	100%			100 %	889.724.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	3.100.391.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				13 Laporan	195.440.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		902.084.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	694.284.800,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.198.307.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	J U M L A H							**1.792.647.007.730,00**							**89.631.741.318,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						**57.064.004.529,00**							**37.554.399.160,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.100.000.000,00**							**1.136.464.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.100.000.000,00**							**1.136.464.000,00**	
1.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY***	**85%**			**78 %**	**1.100.000.000,00**						**83%**	**1.136.464.000,00**	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan*	100%			100 %	1.100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.136.464.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				2,00 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan														
			Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan				630 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		826.464.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**55.964.004.529,00**							**36.417.935.160,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**55.964.004.529,00**							**36.417.935.160,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**87,5Angka**			**86 Angka**	**53.750.699.078,00**						**87Angka**	**19.350.133.182,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	23.467.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	166.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	13.481.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2.385.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	7.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		38.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%			100 %	14.801.115.078,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	15.354.633.182,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	14.771.241.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.277.633.182,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		53.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.195.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	12.817.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100%			100 %	326.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100%			100 %	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%			100 %	186.059.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.599.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.369.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		125.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		133.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		87.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	98.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.212.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%			100 %	36.875.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	36.875.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	1.558.855.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.582.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	258.938.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		475.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.282.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.080.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%			100 %	305.876.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	593.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.804.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	171.135.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				227 Unit	80.937.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian*** ***Persentase Keterisian Jabatan*** ***Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan*** ***Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi*** ***Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN*** ***Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN*** ***Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN*** ***Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS***	**66,48%** **87,46Angka** **95%** **90%** **96,9%** **70%** **35,28%** **89,8%**				**83,23 Angka** **85,96 %** **25,17 %** **63,05 %** **40 %** **94,05 %** **89 %** **84 %**	**2.213.305.451,00**						**64,90%** **86,59Angka** **93%** **88%** **95,94%** **60%** **29,21%** **86,96%**	**17.067.801.978,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	100%			100 %	667.850.951,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	5.317.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	3.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	553.702.551,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				616 Dokumen	36.298.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		463.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				7 Dokumen	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		612.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				7 Dokumen	42.502.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN*	100%			100 %	538.992.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.496.184.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				200 Dokumen	32.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		260.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	82.945.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		403.764.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	423.187.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		832.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN*	100%			100 %	905.094.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	9.108.724.022,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				6 Dokumen	290.825.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.174.656.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	50.132.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		240.566.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	542.032.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.730.777.293,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	8.489.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.658.342.079,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				30 Orang	5.576.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		174.332.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				115 Orang	8.037.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		130.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	100%			100 %	101.367.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.145.463.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	24.018.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		57.594.366,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	5.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		888.368.690,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				460 Orang	20.435.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				250 Orang	45.107.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	6.442.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	J U M L A H							**57.064.004.529,00**							**37.554.399.160,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**20.525.293.243,00**							**29.285.252.356,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.200.000.000,00**							**2.484.600.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.200.000.000,00**							**2.484.600.000,00**	
1.	**4.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi***	**89%**			**86 %**	**2.200.000.000,00**						**88%**	**2.484.600.000,00**	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	100%			100 %	2.200.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	2.484.600.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan														
			Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan				360 Orang	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.484.600.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**18.325.293.243,00**							**26.800.652.356,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**18.325.293.243,00**							**26.800.652.356,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91Angka**			**89,5 Angka**	**14.257.073.143,00**						**90,5Angka**	**16.993.975.000,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	72.624.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	110.975.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,00 Dokumen	29.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		46.475.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		27.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	24.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		37.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100%			100 %	10.573.792.321,00			-	-	-	100%	11.555.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1064.00 Orang/ Bulan	10.512.992.321,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	13.293.000,00			-	-	-	100%	18.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.00 Laporan	13.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	100%			100 %	0,00			-	-	-	100%	85.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0.00 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100%			100 %	189.476.700,00			-	-	-	100%	1.268.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.562.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.482.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	64.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.050.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	60.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	2.460.988.779,00			-	-	-	100%	2.166.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	597.533.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		710.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.860.635.307,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.450.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel*	100%			100 %	946.898.343,00			-	-	-	100%	1.791.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.364.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	185.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0.00 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	640.734.443,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.424.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				93 Unit	96.729.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan***	**100%**			**99,99 %**	**4.068.220.100,00**						**100%**	**9.806.677.356,00**	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis*	100%			100 %	128.858.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	2.271.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				5 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		327.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	73.858.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.944.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	100%			100 %	3.939.362.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	7.535.677.356,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				10 Dokumen	197.077.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		732.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	91.706.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		162.821.900,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				7 Dokumen	61.625.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		282.855.456,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1200 Orang	3.588.952.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.358.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	JUMLAH							**20.525.293.243,00**							**29.285.252.356,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH						**12.713.102.229,00**							**16.819.607.092,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.039.313.800,00**							**5.330.357.090,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.039.313.800,00**							**5.330.357.090,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah***	**100%**			**100 %**	**5.039.313.800,00**						**100%**	**5.330.357.090,00**	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	100%			100 %	239.600.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				3.00 Unit	239.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif*	100%			100 %	1.018.385.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				73.00 Unit	1.018.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya dukungan penyelenggaran Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	100%			100 %	3.781.328.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	3.930.357.090,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah														
			Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah				3.00 Laporan	3.781.328.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.930.357.090,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.673.788.429,00**							**11.489.250.002,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**7.673.788.429,00**							**11.489.250.002,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**91Angka**			**90,7 Angka**	**7.502.479.829,00**						**90,9Angka**	**10.929.250.002,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	10.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	48.250.002,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	5.969.436.429,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	6.994.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60.00 Orang/ Bulan	5.969.428.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.897.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2,500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2,500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	2,500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12,00 Laporan	2,500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100%			100 %	133.115.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	537.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	5.355.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	12.091.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		80.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	13.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.240.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	99.863.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler*	100%			100 %	7.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3.00 Paket	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	1.116.159.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.330.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	11.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	318.635.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	785.838.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		850.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	283.748.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13.00 Unit	283.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	***Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY***	**100%**			**100 %**	**171.308.600,00**						**100%**	**560.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya*	100%			100 %	171.308.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	560.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				5.00 Laporan	99.985.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		275.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2.00 Laporan	71.323.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		285.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	J U M L A H							**12.713.102.229,00**							**16.819.607.092,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						**24.444.171.293,00**							**36.414.091.170,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.444.171.293,00**							**36.414.091.170,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**24.444.171.293,00**							**36.414.091.170,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**87,4Angka**			**86,8 Angka**	**18.398.890.493,00**						**87,2Angka**	**27.080.296.170,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	192.000,00			-	-	Inspektorat DIY	100%	55.824.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	64.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		21.313.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	64.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		21.313.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.00 Laporan	64.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		13.198.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100%			100 %	15.274.850.657,00			-	-	Inspektorat DIY	100%	19.233.572.170,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90.00 Orang/ Bulan	15.228.946.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		19.175.071.170,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	45.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		46.320.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	64.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		12.181.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD*	100%			100 %	13.200.000,00			-	-	Inspektorat DIY	100%	33.075.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6,00 Laporan	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		33.075.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	100%			100 %	110.653.000,00			-	-	Inspektorat DIY	100%	677.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.00 Dokumen	640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		56.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	110.013.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		620.600.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	100%			100 %	295.771.800,00			-	-	Inspektorat DIY	100%	941.084.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	56.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		33.075.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	14.697.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		86.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3.00 Paket	8.322.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		92.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		26.460.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	182.596.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		557.849.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	100%			100 %	776.000,00			-	-	Inspektorat DIY	100%	2.944.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0.00 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		1.544.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				143 Unit	776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		1.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	100%			100 %	1.499.214.843,00			-	-	Inspektorat DIY	100%	1.761.913.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		7.177.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	344.341.939,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		480.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		72.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.152.432.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		1.202.736.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mobil, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-				1.204.232.193,00			-	-	Inspektorat DIY	-	1.433.628.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.226.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		45.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16.00 Unit	400.262.393,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		405.168.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				134.00 Unit	326.893.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		492.510.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	196.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		110.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	244.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		380.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur***	**100%**			**100 %**	**5.448.298.800,00**						**100%**	**8.000.212.000,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100% 100%			100 % 100 %	4.833.457.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	100% 100%	7.030.884.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16.00 Laporan	315.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		508.525.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				174 Laporan	2.910.009.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		4.300.525.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				113 Laporan	850.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		996.564.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				38 Laporan	212.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		526.719.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				21 Laporan	369.681.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		449.990.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1.00 Kesepakatan	167.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		208.710.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	8.115.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		39.851.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	100%			100 %	614.841.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	100%	969.328.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	15.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		48.620.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				70 Laporan	599.441.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		920.708.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan***	**100%**			**100 %**	**596.982.000,00**						**100%**	**1.333.583.000,00**	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan*	100%			100 %	28.484.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	100%	210.745.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		63.132.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	28.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		147.613.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	100%			100 %	568.498.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	100%	1.122.838.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				37 Perangkat Daerah	64.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		8.404.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				37 Perangkat Daerah	2.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		55.334.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	403.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		882.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				37 Perangkat Daerah	162.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		177.100.000,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H							**24.444.171.293,00**							**36.414.091.170,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**30.820.225.787,00**							**37.911.395.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.640.000.000,00**							**3.630.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.640.000.000,00**							**3.630.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan***	**3Lembaga**			**3 Lembaga**	**2.640.000.000,00**						**3Lembaga**	**3.630.000.000,00**	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*	18Dokumen			3 Dokumen	2.640.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	3Dokumen	3.630.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				3 Dokumen	2.640.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-		3.630.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**28.180.225.787,00**							**34.281.395.200,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**28.180.225.787,00**							**34.281.395.200,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**96,98Angka**			**96,95 Angka**	**10.010.112.787,00**						**96,97Angka**	**11.612.217.700,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%			100 %	82.753.346,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	98.111.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	26.078.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		29.020.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2.00 Dokumen	30.445.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.139.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	26.229.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		28.952.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	100%			100 %	7.707.416.453,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	8.937.593.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52.00 Orang/ Bulan	7.610.296.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.822.473.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	46.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-		48.570.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17.00 Laporan	33.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	100%			100 %	11.400.000,00			-	-	-	100%	11.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	11.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100%			100 %	463.221.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	721.211.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6.00 Paket	8.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.854.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	55.132.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		64.115.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11.00 Paket	31.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		55.274.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8.00 Paket	33.478.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.959.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	334.653.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		529.009.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	100%			100 %	128.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	83.634.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4.00 Unit	73.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		62.199.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	55.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.435.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	100%			100 %	1.149.731.888,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	1.283.596.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	229.649.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		288.175.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	67.402.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		47.589.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	852.680.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		947.832.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	100%			100 %	466.889.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	476.672.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	71.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.069.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12.00 Unit	291.860.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		307.854.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				133.00 Unit	103.167.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		132.749.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI***	**30,05Skor**			**30,02 Skor**	**3.007.486.000,00**						**30,04Skor**	**3.389.945.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	100%			100 %	3.007.486.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-	100%	3.389.945.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50.00 Orang	26.198.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		188.875.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2.00 Laporan	101.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	-		81.070.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				38 Orang	54.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	481.062.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		530.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	390.757.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		430.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				38 Orang	1.953.074.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI***	**70,44Skor**			**70,41 Skor**	**11.480.283.100,00**						**70,43Skor**	**12.557.305.000,00**	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	100%			100 %	11.480.283.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	12.557.305.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				750.00 Orang	10.715.133.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.039.210.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4.00 Laporan	765.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		518.095.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI***	**100Skor**			**100 Skor**	**334.479.200,00**						**100Skor**	**494.446.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	100%			100 %	334.479.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	494.446.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1.00 Dokumen	39.497.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		114.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300.00 Orang	171.616.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		226.996.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.00 Laporan	123.365.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		153.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI***	**88,38Skor**			**88,35 Skor**	**845.490.700,00**						**88,37Skor**	**1.395.310.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	100%			100 %	845.490.700,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	100%	1.395.310.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2.00 Dokumen	56.815.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		87.010.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500 Orang	190.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		843.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4.00 Laporan	597.743.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		465.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI***	**79,05Skor**			**79,02 Skor**	**2.502.374.000,00**						**79,04Skor**	**4.832.171.500,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	100%			100 %	2.502.374.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100%	4.832.171.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1.00 Dokumen	25.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		49.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10.00 Laporan	784.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.712.475.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.00 Dokumen	1.692.602.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.070.266.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**30.820.225.787,00**							**37.911.395.200,00**	

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah DIY Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcomes)* atau kompositnya *(impact).* Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu

menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2024. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Kinerja Utama	*Baseline*	Target	
	2022	2023	2024
IGI (*Inclusive Growth Index*)	6,24	6,32	6,42
Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84	73,41
Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23
TPT	4,06	4,06-3,76	3,8-3,45
Inflasi	6,49	2-4	2-4
IPM	80,64	81,01	81,36
Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78
Indeks Williamson	0,450	0,444	0,441
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09
Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A

Indikator Kinerja Utama	*Baseline*	Target	
	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
SAKIP	AA	AA	AA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	81,5	82,62
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11

7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum. Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah DIY Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6
2	Inflasi (%)	6,49	2-4	2-4
3	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23
4	Indeks Williamson	0,450	0,444	0,441
5	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16
6	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09
7	Indeks Gini	0,459	0,423	0,419
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	6,1	2,9	3,1

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
9	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,1	5,35	5,57
	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,38 - 81,56
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (*Inclusive Growth Index*)	6,24	6,32	6,42
5	Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84	73,41
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A
8	SAKIP	AA	AA	AA
9	Harapan Lama Sekolah	15,65	15,72	15,74
10	Angka Harapan Hidup	75,08	75,15	75,18
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	86,75	87,76
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,77	77,07	77,37
13	Indeks Kebebasan	74,46	74,61	74,76
14	Indeks Kesetaraan	87,44	87,59	87,74
15	*Total Fertility Rate*	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2
16	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	74,4	75,4	76,39
17	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum	57,54	58,53	59,52
18	Prevalensi *Stunting*	16,4	15,1	14,0
	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sedang	Sedang	Sedang
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62
4	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11
5	Crime rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,10	128,90	124,70
6	Indeks Kematangan SPBE	3,02	3,07	3,12
7	Persentase Desa Mandiri	46,94	54,59	62,24
8	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,6	3,7
9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,63	0,65	0,7

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
10	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	97,004	97,603	98,203
11	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	337	343	349
12	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	NA	59,91	67,03
13	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	2.635	2.637	2.639
14	Perwujudan pola ruang (%)	90,7	91,96	93,22
15	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	17,66	20,94	24,23
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Urusan Pendidikan			
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,64	9,65	9,66
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50,68%	50,70%	50,71%
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30,81%	30,83%	30,84%
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51,91%	51,93%	51,94%
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30,34%	30,36%	30,37%
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	89,95%	89,97%	89,98%
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	21,91%	21,93%	21,94%
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	18,93%	18,95%	18,96%
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	14,02%	14,04%	14,05%
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	11,04%	11,06%	11,07%
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36,42%	36,47%	36,52%
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,30%	51,32%	51,33%
	Urusan Kesehatan			
1	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,33	0,36
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	12,1	11,9	11,7

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,77%	95,47%	95,90%
2	Persentase Warga Negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96,42%	96,77%	97,09%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64,06%	82,03%	85,94%
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97,70%	98,27%	98,66%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	n/a	81,65%	86,07%
6	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100 %	100 %	100 %
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	38,70%	62,92%	73,28%
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,51%	95,67%	95,83%
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	60%	65%	70%
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	50%	60%	70%
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	93,7	100	101,4
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59	0,65	0,71
	Urusan Sosial			
1	Prosentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan OPD	100	100	100
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	27,88%	28,10%
3	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang	n/a	21,00%	21,22%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
4	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	26,05%	26,20%
5	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	n/a	60,70%	61,03%
	Urusan Tenaga Kerja			
1	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	75%	n/a	75%
2	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	63,53%	n/a	67,50%
3	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2.609 Perusahaan	n/a	2.629 Perusahaan
4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2.708 Perusahaan	2.728 Perusahaan	2.748 Perusahaan
5	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	n/a	n/a	65%
6	Tingkat produktivitas DIY	Rp 50,38 juta/tenaga kerja	Rp 51,93 juta/tenaga kerja	Rp 54,09 juta/tenaga kerja
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat	n/a	0,63	0,63
2	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	18,22%	18,3%	18.5%
3	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	93.99%	94.50%	95.00%
4	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	22,2 tahun	22,9 tahun	22,9 tahun
	Urusan Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	94,3	94,4	96,3
2	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	6,41%	5,13%	5,13%
3	Indeks Ketahanan Pangan (skor)	81.43	81.76	82.08
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	13,48	n/a	13,08

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	Urusan Pertanahan			
1	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah	37,59%	53,83%	59,90%
2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	36,48%	44,74%	46,53%
	Urusan Lingkungan Hidup			
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	21,43%	24,44%	25%
2	Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,2	6,11
	Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil			
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	87,97%	93,93%	93,96%
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga
2	Persentase rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjut	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	100%	100%	100%
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	1,116	1,14	1,14
2	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	1 lembaga	3 lembaga	4 lembaga
	Urusan Perhubungan			
1	Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY	26,96%	40,37%	48,34%
2	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	30,25%	41,63%	48,44%
3	Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	23,67%	39,11%	48,25%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	Urusan Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif	18.92%	24.32%	29.73%
2	Indeks Kematangan Manajemen SPBE	1,82	1,87	1,92
3	Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY	Baik	Baik	Baik
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Jumlah koperasi modern	n/a	n/a	7
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)	1.400	n/a	1.500
3	Jumlah wirausaha Baru / Pemula	1.615	n/a	6.115
4	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	n/a	n/a	130
5	Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)	15,655	17,863	18,025
6	Rasio Wirausaha baru terhadap Total Angkatan Kerja (%)	3,55	3,75	3,95
	Urusan Penanaman Modal			
1	Nilai Realisasi Investasi di DIY	Rp 2,60 Triliun	Rp 2,90 Triliun	Rp 3,02 Triliun
2	Nilai Predikat Pelayanan Prima	A	n/a	A
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
1	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	17 medali	20 medali	22 medali
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	65,57	65,59	65,61
3	Persentase pemuda bekerja	60,34%	61,84%	63,34%
4	Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)
5	Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar
	Urusan Statistik			
1	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	n/a	65%	70%
	Urusan Persandian			
1	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	626	629	630

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	Urusan Kebudayaan			
1	Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola	428	430	432
2	Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola	262	279	280
3	Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang terkelola	240	246	248
4	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	2,17%	3,47%	4,85%
5	Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional	13 event	14 event	15 event
6	Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	365 lembaga	375 lembaga	385 lembaga
	Urusan Perpustakaan			
1	Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip	20%	21%	22%
2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	48,33%	49%	50%
	Urusan Kearsipan			
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	50,26%	50,50%	51%
	Urusan Kelautan dan Perikanan			
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	367870 juta rupiah	349329 juta rupiah	368122 juta rupiah
2	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2299709 juta rupiah	2276954 juta rupiah	2293318 juta rupiah
3	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin (juta rupiah/tahun)	n/a	n/a	36 juta rupiah/tahun
4	Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (dalam juta rupiah/tahun)	n/a	n/a	180 juta rupiah/tahun
5	Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor)	n/a	34,70	40,50
6	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha)	695,90	N/A	5670,87
	Urusan Pariwisata			
1	Lama Tinggal Wisatawan wisman / 12 bulan)	2.40 hari	n/a	2.48 hari
2	Lama Tinggal Wisatawan wisnus / 12 bulan	1.44 hari	n/a	1.52 hari

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
4	Rata-rata Spending money wisatawan mancanegara ($)	($) 640	n/a	($) 550
5	Rata-rata spending money wisatawan nusantara (rupiah)	Rp2.128.142	n/a	Rp2.400.000
7	*Total Yield* (Jumlah wisatawan x Belanja/per hari) - Satuan (Rp.)	14,1 T	14,8 T	17,2 T
	Urusan Pertanian			
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	-1,22%	0,45%	0,21%
2	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	8.059.344 juta rupiah	7.575.752 juta rupiah	8.180.687. juta rupiah
3	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	n/a	n/a	2,01%
4	Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	n/a	n/a	1,98%
	Urusan Kehutanan			
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	2,31%	2,52%	3,15%
2	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	5%	5%
3	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	n/a	82,35%	85,91%
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99%	99,99%
2	Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9,14%	9,18%	9,23%
3	Pengendalian Rerata Penurunan Air Muka Tanah	< 20%	< 20%	< 20%
	Urusan Perdagangan			
1	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,29 %	8,34 %	8,39 %
2	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,22 %	n/a	5,32 %
	Urusan Perindustrian			
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	12,05 %	12,10%	12,15%
2	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	0,99 %	n/a	2,50 %

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	Urusan Transmigrasi			
1	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	n/a	90%	90%
	Sekretariat Dewan			
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,50%	95,50%	96%
2	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	80%	82%	83%
	Sekretariat Daerah			
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan	100%	100%	100%
2	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	100%	100%	100%
3	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	20%	20%	40%
4	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	57,5%	57,5%	67,5%
5	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%	100%	100%
6	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %
7	Persentase layanan hukum yang berkualitas	100%	100%	100%
8	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas	100%	100%	100%
9	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	94,6%	91,9%	94,6%
10	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	66,67 %	73,33 %	80 %
11	Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	88,90	89,00	89,10
12	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	89	90	90,1
13	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	n/a	20%	30%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
14	Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dan Persentase kualitas Pengadaan Barang Jasa	80%	28,27%	38,69%
15	Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM	n/a	53,09%	64,76%
16	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	n/a	86,25	86,56
17	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	n/a	86.25	86.56
	Perencanaan Pembangunan			
1	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	n/a	83,93%	85,71%
2	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	86,90%	87,30%	88,10%
	Keuangan			
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp15.486.233.611	Rp9.016.589.475	Rp9.378.609.475
3	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
	Kepegawaian			
1	Indeks Profesionalitas ASN (Skor)	52.09	55.09	59.09
2	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	59.70%	63.15%	68.75%
	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	90%	90,5%	91%
2	Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 JPL dalam 1 tahun	13,51%	14%	15%
	Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	n/a	65%	70%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	Penghubung Daerah			
1	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	n/a	87%	87,5%
2	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	n/a	87 angka indeks	87,5 angka indeks
	Inspektorat Daerah			
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90%	91%	91,5%
2	Indeks Penilaian integritas	72	72	72,5
3	Nilai Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3
	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Capaian Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY	74,31	74,32	74,33
2	Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI	73,54	73,55	73,56

BAB 8 PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang merupakan pelaksanaan tahapan RPJPD periode lima tahunan keempat. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2024, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Perkada RKPD juga akan dijadikan acuan di dalam penyusunan rancangan akhir Renja PD dan juga acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2024.

Yogyakarta, JuA 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

ABCDEBE AGHI BDJ GEKBE LHDEMB
NOPLQL RSTU VWNWX Y

LJ SRLZWNTSAÀLÁÀU
ÁSP ÂÃÄÃĂÄÃÂ ÂÃÃÄĂÅ Â ĂÃÅ

BAPPEDA DIY

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ꦥꦫꦶꦫꦤ꧀ꦆꦤ꧀ꦝꦺꦴꦤꦺꦱꦶꦪ

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213
Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)
Fax: (0274) 586712
Website: http://bappeda.jogjaprov.go.id
Email: bappeda@jogjaprov.go.id

jogja istimewa